KREATIF SIASATI TANTANGAN, BERKEMBANG BERSAMA UNTUK PERUBAHAN

Be Creative to Overcome Challenges, Grow Together for A Change

2016 Annual Report
Laporan Tahunan

PT Perkebunan Nusantara X

KREATIF SIASATI TANTANGAN, BERKEMBANG BERSAMA UNTUK PERUBAHAN

Be Creative to Overcome Challenges, Grow Together for A Change

Ketika menghadapi tantangan, seringkali muncul ketakutan akan bahaya dan risiko yang dihadapi. Ketakutan kemudian melahirkan kesendirian dan keterasingan dari lingkungan di sekitarnya. Padahal, memandang tantangan harus dibarengi dengan kemauan untuk mengevaluasi diri, dan mawas diri untuk dapat melihat peluang dalam merumuskan solusi. Tantangan bukan menjadi sesuatu yang menakutkan, melainkan menjadi batu loncatan untuk terus belajar dan berkembang.

Demikian pula dalam menghadapi tantangan tahun 2016, dimana PTPN X menemui sejumlah faktor eksternal yang menghalanginya dalam meraih potensi terbaiknya. Di tengah situasi yang kurang menguntungkan tersebut, PTPN X harus mampu mencari titik evaluasi agar dapat menarik nilai pembelajaran.

Kunci menghadapi tantangan adalah kebersamaan. Melalui kebersamaan, organisasi akan mempertemukan setiap elemen untuk dapat saling mengisi dan mencari solusi terbaik atas tantangan yang ada. Dari pemahaman inilah, PTPN X menghadirkan tema “Kreatif Siasati Tantangan, Berkembang Bersama untuk Perubahan” sebagai tema Laporan Tahunan 2016, sekaligus menunjukkan motif kuat PTPN X untuk dapat mengevaluasi diri dan melakukan perubahan mendasar demi menemukan kembali potensi terbaik dalam dirinya.

When we face challenges, we often fear the danger and the risk. That fear will create the birth of a solitude and alienation from the surrounding environment. In fact, looking at challenges must be accompanied with the willingness to evaluate ourselves, and introspection to allow ourselves to see the opportunities in framing a solution. Challenges are not something to be scared of, instead, a stepping stone to continue to learn and to grow.

Likewise, in facing challenges of 2016, PTPN X was faced with a number of external factors that prevent us reaching our best potential. In the midst of this unfortunate situation, PTPN X must be able to find a point of evaluation, in pursuance of attracting the value of learning.

The key to facing challenges is togetherness. Through togetherness, the organization will bring together each element filling each other’s gaps and finding the best solution to the challenges. Departing from this understanding, PTPN X presents "Be Creative to Overcome Challenges, Grow Together for A Change" as the theme of its 2016 Annual Report, and shows that PTPN X strong motivation is to self-evaluate and to create fundamental changes to rediscover the best potential within the Company.

Planting Seeds of Perfection for Future Perfect X

PT Perkebunan Nusantara X senantiasa menanamkan bibit-bibit kesempurnaan dalam setiap aspek usaha dengan harapan bahwa melalui proses dan pengawasan yang berkelanjutan, bibit-bibit tersebut akan tumbuh berkembang membawa PT Perkebunan Nusantara X menjadi perusahaan yang memimpin industri agribisnis di Indonesia.

PT Perkebunan Nusantara X always plant the seeds of perfection in each and every business aspect with hopes that with continuous process and development, those seeds will mature and able to become a vessel to help PT Perkebunan Nusantara X in becoming a leading company in Indonesian agribusiness industry.

Strenghtening the Present Shaping the Future

PT Perkebunan Nusantara X menyadari pentingnya melakukan berbagai langkah bermakna untuk menjaga pertumbuhan perseroan secara berkelanjutan. Kesinambungan usaha perusahaan bergantung bagaimana visi dan misi perusahaan dibuat dan diarahkan untuk senantiasa memberikan manfaat bagi pemegang saham dan para pemangku kepentingan lain seluas-luasnya tanpa mengabaikan hak generasi mendatang untuk ikut menikmati manfaat yang sama di masa depan.

PT Perkebunan Nusantara X realizes The importance of conducting various meaningful steps in order to keep the Corporate growth continously. Company viability depends on how company vision and mission are made and directed to continously give optimal benefits to the shareholders and other stakeholders without ignoring rights of future generations.

Thrive in Harmony

Dalam menjalankan misi perusahaan diperlukan acuan yang berfungsi sebagai koridor/batasan dan arahan untuk karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Hal tersebut hendaknya dilaksanakan oleh semua tingkat karyawan yang penuh integritas dan taat aturan sehingga memberikan pencapaian prestasi yang diinginkan visi perusahaan

Carrying corporate mission under the urgency of certain guideline as corridor and limitation as the employees reference in implementing duty. This should be performed by all employees in all level with integrity by complying to existing regulation and will deliver achievement as the Company's vision.

MENJAGA GULA, MENJAGA INDUSTRI YANG STRATEGIS

SUSTAINING SUGAR, SUSTAINING A STRATEGIC INDUSTRY

Mendorong ketahanan pangan, demikian salah satu misi yang ingin dicapai Pemerintah Indonesia yang tertuang dalam konsep Nawa Cita. Ketahanan pangan dapat diartikan pada berbagai perspektif, termasuk menciptakan sebuah grand design tentang pengelolaan hulu dan hilir dari industri yang menopang pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.

Di bidang industri gula, ketahanan pangan diupayakan melalui kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara permintaan pasar dan kemampuan memenuhi permintaan pasar tersebut. Lekatnya gula dengan kultur masyarakat dan kebutuhan sehari-hari membuat gula digolongkan sebagai salah satu komoditas khusus (*special products*) bersama beras, jagung dan kedelai yang memiliki kemampuan nilai ekonomis untuk mempengaruhi perekonomian masyarakat. Pada titik inilah gula menjadi sebuah industri yang strategis, yang harus dijaga agar tidak menimbulkan gejolak yang tidak diinginkan.

Ketahanan pangan juga dapat dilihat dari kemampuan pemanfaatan teknologi dan pengolahan tebu sebagai bahan baku dasar gula. Sejarah pengolahan tebu secara massif, yang telah terlihat sejak berkembangnya perkebunan tebu dan pabrik gula di masa kolonial Belanda, terus mengalami inovasi sejalan dengan perkembangan teknologi *modern*. Pemanfaatan teknologi masa kini telah memungkinkan tebu untuk dapat diproses hingga ke bagian ampas, seperti yang dapat dilihat pada gambar.

To promote food security is one of the missions to be achieved by the Government of Indonesia specified in the Nawa Cita concept. Food security can be interpreted in a variety of perspectives, including creating a grand design of upstream and downstream management of the industry that sustains the Indonesian people's needs of food.

In the sugar industry, food security is pursued through a policy to maintain a balance between market demand and the ability to meet market demand. The adhesion to the culture of society and daily necessities has placed sugar as one of special commodities group together with rice, corn and soybeans, with an economic value that can affect the economy of the people. At this point, sugar becomes a strategic industry that must be sustained in order to avoid undesired fluctuation.

Food security can also be seen from the ability to utilize technology and process sugar cane as basic raw material of sugar. The history of massive processing of sugar cane, which can be traced since the development of sugarcane plantations and sugar mills in the Dutch colonial period, continues with the making of innovations in line with the development of modern technology. The utilization of today's technology has enabled sugar cane to be processed down to the dregs, as can be seen in the chart below.

Bagan di atas menggambarkan bagaimana tebu dapat dimanfaatkan bagi industri lainnya; termasuk Bioethanol dan Pembangkit Listrik yang justru dapat mendorong ketahanan energi. Dari cara pandang inilah, gula dan tebu menjadi sebuah industri yang sangat strategis, yang memiliki *added value* dan berperan untuk menopang ketahanan pangan, seperti yang dicita-citakan oleh kita semua.

The above chart illustrates how sugar cane can be used for other industries; including Bioethanol and Power Plant that can actually spur the energy security. From this perspective, sugar and sugar cane have become very strategic industries, which offer added value and contribute to sustaining food security aspired by us all..

PRODUSEN GULA TERBESAR

PTPN X mampu mempertahankan kinerja operasional dengan tetap memposisikan diri sebagai produsen gula terbesar di Indonesia. Dari sisi produksi, pangsa pasar PTPN X di industri gula nasional tahun 2016 mencapai 17,11% dari total keseluruhan produksi gula nasional yang sebesar 2,2 juta ton, dengan tingkat produksi mencapai 380,4 ribu ton. Jika dibandingkan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga bergerak di industri gula, PTPN X memiliki pangsa pasar produksi terbesar, mencapai komposisi 30,84% dari total 1,22 juta ton gula yang diproduksi BUMN.

PTPN X berlokasi di Jawa Timur yang merupakan lumbung produksi gula nasional dengan porsi produksi mencapai 47,51%.

LARGEST SUGAR PRODUCER

PTPN X is the largest sugar producing company in Indonesia and has proven to maintain its high performance. PTPN X took part in the nation sugar industry by 17.11% of market share or of the total 2.2 million tons of sugar that has been produced nationally as of 2016, contributed 380.4 thousand tons of production. Compared to other State-Owned Enterprises (SOEs) that also operates in sugar industry, PTPN X still holds the largest market share as 30.84% of the total of 1.22 million tons of sugar produced by State-Owned Enterprise.

PTPN X is located in East Java, which is a national sugar production barn with production portions up to 47.51%.

17,11%

Pangsa Pasar PTPN X dari total keseluruhan produksi gula nasional

PTPN X Market Share of total sugar production

30,84%

Pangsa Pasar PTPN X dari total keseluruhan produksi gula oleh BUMN

PTPN X Market Share of total sugar production State-Owned Enterprise

BERPERAN MENJAGA HARGA GULA

Sebagai entitas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah, PTPN X memiliki peran dalam menjaga stabilisasi harga gula; dimana PTPN X turut mendukung upaya pemerintah untuk ketersediaan gula dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Fungsi stabilisasi harga yang dijalankan oleh PTPN X berjalan dengan baik, dengan *gap* harga penjualan PTPN X atas harga dari petani yang terus mengecil di tahun 2016. Upaya strategi stabilisasi harga gula dengan cara sinergi PTPN produsen gula dengan Perum Bulog; dengan realisasi penjualan PTPN X ke Perum Bulog sebesar Rp666 miliar dengan kuanta sebesar 60.576 ton atau 60% dari total penjualan gula PTPN X tahun 2016.

MAINTAINING THE PRICE OF SUGAR

As an entity with shares owned by the Government, PTPN X plays a role in maintaining the stability of price of sugar; which also supports the Government's efforts in providing availability sugar with affordable price for the community. The stabilizing price function carried by PTPN X has been running well, by the reduced gap of PTPN X selling price over the farmers price in 2016. The strategy was by creating a synergy with Perum BULOG; with Rp 666 billion sales of PTPN X to Perum BULOG with quanta of 60.576 tons or 60% of total sugar sold by PTPN X in 2016.

CHAMPION STRATEGY

PTPN X mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan prospek bisnis gula di masa mendatang melalui strategi berikut:

- **Pengembangan Produk**, yaitu peningkatan penjualan dengan memperbaiki produk atau jasa sekarang, atau dengan mengembangkan produk atau jasa baru.
- **Pengembangan Pasar**, dengan memperkenalkan produk atau jasa lama ke daerah geografis yang baru.
- ***Concentric Diversification***, dengan menambah produk atau jasa baru yang hampir sama atau mendekati *core business*.
- **Kombinasi berbagai strategi**, yang menggabungkan berbagai macam strategi di atas dengan mengacu pada strategi EDO (Efisiensi, Diversifikasi dan Optimalisasi).

CHAMPION STRATEGY

PTPN X maximize the prospects for the sugar business in the future through the following strategies:

- **Product Development**, by increasing sales through existing products or services improvement, or new products and/or services development.
- **Market Development**, by introducing existing products or services to new geographical areas.
- **Concentric Diversification**, by adding new products or services that are almost the same or close to the core business.
- **Combination of Strategies**, combining these strategies with reference to "EDO "strategies (Efficiency, Diversification and Optimization).

EFISIENSI — Efficiency

DIVERSIFIKASI — Diversification

OPTIMALISASI — Optimization

Harga Rata-rata Penjualan Gula Produksi Tahun 2016
Graph of average sugar price transaction in 2016

Jejak Langkah
Milestone

Sebelum/*Before*
1996

Hampir semua pabrik gula yang dimiliki perseroan dibangun oleh Belanda

almost all the sugar mills (SM) owned by the Company were built by the Dutch.

1996

14 Februari: berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 tentang Pengalihan Bentuk Badan Usaha Milik Negara dari PT Perkebunan (Eks-PTP 19, Eks-PTP 21-22, dan Eks-PTP 27) yang dilebur menjadi PTPN X (Persero).

February 14: Pursuant to the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 15 on the Transfer of State-Owned Enterprises Form from PT Perkebunan (PTP) comprising PTP 19, PTP 21-22, and PTP 27 to be merged into PTPN X (Persero).

2004

Pendirian PT Dasaplast Nusantara sebagai entitas anak usaha yang menunjang bisnis PTPN X dalam hal produksi karung plastik.

Establishment of PT Dasaplast Nusantara as a subsidiary supporting the business of PTPN X in the production of sacks.

2006

Mampu melewati PTPN XI menjadi produsen gula terbesar, baik dari sisi produksi maupun rendemen.

Able to outperform PTPN XI to become the biggest sugar producer, both in terms of production and rendemen.

2009

Mendapat penugasan untuk mengelola PG Bone & PG Camming, Sulawesi Selatan, yang berada di bawah naungan PTPN XIV.

Assigned to manage Bone SM & SM Camming, South Sulawesi, both were operated under PTPN XIV.

2012

Mendapat penugasan mengelola PG Takalar, Sulawesi Selatan, yang berada di bawah naungan PTPN XIV.

Assigned to manage Takalar SM, South Sulawesi, which was operated under PTPN XIV.

2013

- Penerbitan obligasi sebesar 700 miliar dengan *rating* A+.
- *Spin off* SBU rumah sakit menjadi entitas anak usaha PTPN X, yakni PT Nusantara Medika Utama.
- Pembentukan PT Energi Agro Nusantara sebagai entitas anak usaha yang mengelola pabrik Bioethanol PTPN X.

- *Issued bonds worth Rp700 billion with A+ rating.*
- *Exercised a spin off of the hospital SBU to become a subsidiary of PTPN X named PT Nusantara Medika Utama.*
- *Established PT Energi Agro Nusantara as a subdiary of PTPN X operating bioethanol factory.*

2014

- PTPN X meningkatkan kepemilikan saham atas PT Mitratani Dua Tujuh yang didirikan pada tahun 1994; dari yang sebelumnya 45% menjadi 65%.
- Terbentuknya *Holding* Perkebunan, dimana PTPN X menjadi bagian dari *Holding* Perkebunan.

- *PTPN X increased its share ownership in PT Mitratani Dua Tujuh, founded in 1994, from 45% to 65%.*
- *State-Owned Plantation Holding was established and PTPN X has become part of the Holding.*

Daftar Isi
Table of Contents

2 **Cover Story**

8 **Jejak Langkah**
Milestone

10 **Daftar Isi**
Table of Contents

Kilas Kinerja
Performance Highlights

14 Ikhtisar Operasional
Operational Highlights
15 Rasio Ikhtisar Keuangan
Ratio Financial Highlights
18 Peristiwa Penting 2016
Significant Event 2016

Laporan Manajemen
Management Report

30 Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report
38 Laporan Direksi
Board of Directors Report
50 Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2016 PT Perkebunan Nusantara X
Statement of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the Resposibility for the 2016 Annual Report of PT Perkebunan Nusantara X

Profil Perusahaan
Company Profile

54 Informasi Umum Tentang PTPN X
General Information of PTPN X
56 Riwayat Singkat PTPN X
Brief History of PTPN X
60 Maksud dan Tujuan Pendirian PTPN X
Purpose and Objective of the Establishment of PTPN X
61 Bidang Usaha
Line of Business
62 Produk dan Jasa
Product and Services
65 Kompetensi Inti
Core Competencies
66 Struktur Organisasi
Organizational Structures
68 Visi, Misi dan Budaya Perusahaan
Vision, Mission and Corporate Cultures
70 Makna Branding Logo
The Meaning of Branding Logo
71 Profil Dewan Komisaris
Board of Commisioner Profiles
76 Profil Direksi
Board of Directors Profile
84 Profil Pejabat Puncak
Profile of Senior Executives
90 Sekilas Demografi Karyawan
Employee Demographic
91 Komposisi Pemegang Saham
Composition of Shareholders
94 Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi/*joint venture* (JV)/*special purpose vehicle* (SPV)
The List of Subsidiaries and Associates/Joint Venture (JV)/ Special Purpose Vehicle (SPV)
97 Struktur Grup PTPN X
Group Structure of PTPN X
97 Kronologis Penerbitan Saham
Share Listing Chronology
98 Kronologis Penerbitan Obligasi
Bonds Listing Chronology
99 Kronologis Penerbitan Efek Lainnya
Other Securities Listing Chronology
99 Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Capital Market Supporting Institutions and Professions
100 Penghargaan dan Sertifikasi 2016
Awards and Certifications 2016
102 Daftar Alamat Entitas Anak dan Kantor Cabang/Kantor Perwakilan
Address List of Subsidiary Entities and Branch / Representative Office
107 Informasi pada Situs Web Perseroan
Information of the Company's Website
108 Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal
Education and/or Training for Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit

Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

112 Tinjauan Ekonomi
Economic Review
115 Tinjauan Industri
Industry Review
123 Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
Operational Review per Business Segment
130 Tinjauan Keuangan
Financial Review

Fungsi Penunjang Bisnis
Business Supporting Functions

162 Sumber Daya Manusia
Human Resources
169 Teknologi Informasi
Information Technology

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

180 Prinsip dan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Principles and Implementation of Good Corporate Governance
187 Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation
189 Penilaian Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Ungul (KPKU) Tahun 2015
Assessment on Implementation of Good Performance Evaluation Criteria (KPKU) of 2016
191 Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance
278 Manajemen Risiko
Risk Management
288 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System
291 Corporate Social Responsibility
Corporate Social Responsibility
292 Perkara Penting dan Permasalahan Hukum
Litigation and Legal Cases
296 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Company's Information and Data
303 Kode Etik, Pedoman Perilaku Perseroan
Code of Ethics, Company's Code of Conduct
310 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
State Official Property Report
313 Whistleblowing System
Whistleblowing System
316 Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Policy on the Diversity of the Composition of Board of Commissioners and Directors
324 Perpajakan
Taxation

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

328 Pembangunan Berkelanjutan Fondasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Sustainable Development Foundation of Corporate Social Responsibility
332 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup
Corporate Social Responsibility Related to Environment
333 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja
Corporate Social Responsibility Relatied to Manpower, Health, Work Safety
334 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility Related to Social and Community Development
336 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Tanggung Jawab kepada Konsumen
Corporate Social Responsibility Related To Responsibility To The Consumers

Lampiran
Attachment

Kilas Kinerja

Performance Highlights

Menghadapi situasi yang penuh tantangan, PTPN X berkomitmen untuk mampu menjadi salah satu pionir bagi pertumbuhan industri perkebunan di Indonesia.

In facing a challenging situation, PTPN X is committed to be one of the pioneers for the growth of plantation industry in Indonesia.

Ikhtisar Operasional
Operational Highlights

Indikator *Indicator*	Segmen *Segment*	Uraian *Description*	2016	2015	2014	2013	2012
Luas Area Tanam *Plantation Estate Size*	Tebu *Sugarcane*	Luas Area (ha): *Farm Size (ha):*	70.611	70.301	72.435	77.788	72.125
		TS (Ha)	3.170	2.438	2.266	2.973	5.167
		TR (Ha)	67.441	67.863	70.168	74.814	66.958
	Tembakau *Tobacco*	Luas Area (ha): *Field Size (ha)*	1.078	1.123	1.053	1.327	1.152
		TBN/VBN	878	872	870	752	800
		FIN/FIK				100	51
		NO	200	251	101	476	151
		VIRGINIA					150
Produksi *Production*	Tebu *Sugarcane*	Produksi Tebu Giling (ton) *Sugarcane Milling Production*	5.944.896	5.188.355	6.110.957	6.737.552	6.072.265
		Produktivitas tebu/ha (ton) *Sugarcane Productivity*	84,2	73,8	84,4	86,6	84,2
		Rendemen (%) *Yield (%)*	6,36	8,30	7,65	7,19	8,14
		Produksi gula (ton) *Sugar Production (tons)*	380.403	430.750	468.338	485.472	494.616
		Produksi tetes (ton) *Molasses Production (tons)*	333.002	323.758	371.437	393.317	367.046
	Tembakau *Tobacco*	Produksi Daun Hijau (ton) *Leaves Production (tons)*	19.078	21.580	17.828	21.187	19.028
		Rendemen (%) *Yield (%)*	9,08	9,91	9,7	7,8	9,9
		Produksi Kering Rompos (ton) *Dried Tobbaco Production (tons)*	1.736	2.138	1.638	1.650	1.879
		Protas Kering Rompos (ton/ha) *Dried Protas (tons/ha)*	1,61	1,90	1,55	1,24	1,63
	Cutting *Bobbin*	Produksi cutting bobbin (potong) *Cutting & Bobbinizing Production*	521.747	549.118	563.302	716.384	673.370
	Rumah Sakit *Hospital*	Bed Occupation Rate (BOR) %	88,74%	82,01%	85,31	76,2	66,4
		Hari Perawatan (Hari) *Inpatient Days*	155.905	145.182	124.548	102.278	92.137
		Jumlah Tempat Tidur (Buah) *Number of Beds (units)*	485	485	400	387	380

Rasio Ikhtisar Keuangan
Ratio Financial Highlights

Uraian	2016	2015	2014	2013	2012	Description
Aset Lancar (Rp Juta)	2.557.767	2.436.820	1.843.418	1.540.274	1.656.921	*Current Asset (Rp Million)*
Aset Tidak Lancar (Rp Juta)	10.503.355	9.881.716	2.702.929	2.324.597	1.006.717	*Non Current Assets (Rp Millions)*
Jumlah Aset (Rp Juta)	13.061.122	12.318.536	4.546.348	3.864.872	2.694.765	*Total Assets (Rp Million)*
Liabilitas Jangka Pendek (Rp Juta)	1.320.604	975.042	1.230.827	1.148.425	452.416	*Current Liabilities (Rp Million)*
Liabilitas Jangka Panjang (Rp Juta)	2.697.259	2.081.419	2.236.897	1.492.262	825.167	*Non-Current Liabilities (Rp Million)*
Jumlah Liabilitas (Rp Juta)	4.017.863	3.056.462	3.467.724	2.640.687	1.277.584	*Total Liabilities (Rp Million)*
Jumlah Ekuitas (Rp Juta)	9.043.859	9.267.255	1.078.623	1.224.184	1.417.182	*Total Equity (Rp Million)*
Pendapatan (Rp Juta)	2.260.374	2.531.558	1.902.441	2.375.078	2.145.471	*Revenue (Rp Million)*
Laba Kotor (Rp Juta)	250.799	618.336	288.385	429.493	676.177	*Gross Profit (Rp Million)*
Laba Usaha (Rp Juta)	-162.920	302.290	61.130	191.821	506.706	*Operating Profit (Rp Million)*
Laba (Rugi) Komprehensif (Rp Juta)	-138.886	7.220.886	-128.442	129.329	378.921	*Comprehensive Profit (Loss) (Rp Million)*
Laba (Rugi) Per Saham (Rp/lembar)	-98.238	136.749	-37.905	14.703.150	417.493	*Earning (Loss) Per Share (Rp/share)*
EBITDA (Rp Milyar)	98	406	642	380	277	*EBITDA (Rp Billion)*
Marjin Laba Kotor (%)	11,10	24,43	15,16	18,08	31,52	*Gross Profit Margin (%)*
Marjin Laba Usaha (%)	-7,21	11,94	3,21	8,08	23,62	*Operating Profit Margins (%)*
Marjin Laba Bersih (%)	-6,14	285,23	-6,75	5,45	17,66	*Net Profit Margins (%)*
Rasio Kewajiban terhadap Aset (%)	30,76	24,81	76,27	68,33	47,41	*Debt to Total Assets (%)*
Tingkat Pengembalian Ekuitas (%)	-1,54	77,92	-11,91	10,56	26,74	*Return on Equity (%)*
Tingkat Pengembalian Investasi (%)	-1,19	1,22	1,22	5,43	14,06	*Return on Investment (%)*
Rasio Kas (%)	91,47	140,60	23,08	60,04	35	*Cash Ratio (%)*
Rasio Lancar (%)	193,68	250,45	108,8	248,76	366,24	*Current Ratio (%)*
Tingkat Kolektibilitas (Hari)	164,55	96,72	73,27	55,36	16,81	*Collection Ratio (Day)*
Perputaran Persediaan (x)	2,22	3,77	2,9	5,9	2,85	*Inventory Turnover (x)*
Perputaran Aset (x)	0,17	0,21	0,43	0,63	0,8	*Asset Turnover(x)*
Rasio DER (x)	0,44	0,33	0,27	0,88	1,66	*Debt to Equity Ratio (x)*
EBITDA Marjin (%)	4,37	19,97	29,91	15,99	14,55	*EBITDA Margin (%)*
ROA (%)	-1,19	1,03	14,06	3,34	-2,83	*ROA (%)*
Rasio EBITDA terhadap beban bunga (x)	0,88	4,68	19,44	13,41	3,62	*EBITDA to Interest Expense Ratio (x)*
Tingkat Kesehatan Perusahaan	Kurang Sehat (BBB) *Not Healthy (BBB)*	Sehat (A) *Healthy (A)*	Sehat (A) *Healthy (A)*	Sehat (AA) *Healthy (AA)*	Sehat (AAA) *Healthy (AAA)*	*Company's Performance*

Rasio Ikhtisar Keuangan
Ratio Financial Highlights

Jumlah Aset
Total Assets

Labilitas
Liabilities

Ekuitas
Equity

Pendapatan
Revenue

Rasio Ikhtisar Keuangan
Ratio Financial Highlights

Produksi Tebu Giling
Sugarcane Milling Production

Produksi Kering Rompos
Dried Tobbaco Production

Produksi gula
Sugar Production

Peristiwa Penting 2016
Significant Event 2016

14 Januari | January 14

Peresmian Gedung Mimosa Medical Center, RS Perkebunan Jember, oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno, yang didampingi Direktur Utama PTPN X, Subiyono; Direktur Utama PT Nusantara Medika Utama (NMU), Ibnu Gunawan; Direktur Operasional, Pemasaran dan Pengembangan entitas anak, PT Nusantara Medika Utama (NMU), Ary Sylviati; dan Pejabat Bupati Jember, Supaat. Gedung Mimosa Medical Center merupakan pengembangan layanan kesehatan NMU kepada masyarakat Jember berupa gedung 3 (tiga) lantai yang dilengkapi berbagai fasilitas kesehatan, diantaranya adalah Instalasi Gawat Darurat (IGD), Farmasi, Laboratorium, Fisioterapi, serta layanan rawat inap dan bersalin.

The inauguration of Mimosa Medical Center Building, Jember Plantation Hospital, by the Minister of SOE, Rini Soemarno, accompanied by the President Director of PTPN X Subiyono; President Director of PT Nusantara Medika Utama (NMU) – PTPX's subsidiary - Ibnu Gunawan; Director of Operations, Marketing and Development of NMU, Ary Sylviati; and Jember Regency Official, Supaat. The Mimosa Medical Center Building is the development of NMU's health service to the Jember community in the form of a 3-storey building equipped with various health facilities, including Emergency Installation (IGD), Pharmacy, Laboratory, Physiotherapy, as well as inpatient and maternity services.

26-28 Januari | January 26-28

Melalui program Sinergi Antar BUMN, PTPN X bekerjasama dengan PT Taspen memberikan pelatihan mekanisasi untuk 25 petani tebu, di Hotel Atria Malang. Pelatihan-pelatihan semacam ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing petani khususnya dalam bidang pemanfaatan teknologi.

Through the Inter-SOE Synergy program, PTPN X in cooperation with PT Taspen organized mechanization training for 25 sugar cane farmers at Hotel Atria Malang. Such training is expected to improve the competitiveness of farmers, especially in the technology utilization.

Peristiwa Penting 2016
Significant Event 2016

3 Februari | February 3

PTPN X melakukan sinergi dengan Dinas Perkebunan Jawa Timur untuk memberikan pemaparan terkait perkembangan industri gula, di *Ballroom* Best Western, Papilio Hotel, Surabaya. Acara dengan tema "Mengembangkan Mekanisasi, Irigasi dan Sistem Analisa Rendemen Independen untuk Meningkatkan Produktivitas Gula Nasional" ini dihadiri Direktur Utama PTPN X, Subiyono; Kasubdit Budidaya Tanaman Semusim Direktorat Tanaman Semusim, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Gede Wirasutha; Kepala Dinas Perkebunan Jawa Timur, Samsul Arifin; dan berbagai pihak pemangku kepentingan industri gula.

PTPN X synergizes with the East Java Plantation Office to give exposure on the development of the sugar industry, taking place at the Best Western Ballroom of Papilio Hotel, Surabaya. The event themed "Developing Mechanization, Irrigation and Independent Rendemen Analysis System to Increase National Sugar Productivity" was attended by the President Director of PTPN X Subiyono; Head of Sub Directorate of Annual Plant Cultivation of the Annual Plants Directorate, Directorate General of Plantation of the Ministry of Agriculture, Gede Wirasutha; Head of East Java Plantation Office, Samsul Arifin; And various stakeholders of the sugar industry.

16-18 Maret | March 16-18

Untuk meningkatkan komitmen petugas tanaman tebu dalam mengamankan areal, meningkatkan produktivitas, mengendalikan biaya produksi, dan menjalin sinergi dengan bagian/divisi lain, PTPN X memberikan pelatihan kepada petugas tanaman Pabrik Gula di Tretes Raya Hotel, Surabaya. Pelatihan diberikan langsung oleh Direktur Produksi PTPN X, Tarsisius Sutaryanto.

To increase the commitment of sugarcane officers to securing the area, increasing productivity, controlling production costs, and establishing synergies with other departments/divisions, PTPN X organized training to Sugar Mills' plant workers at Tretes Raya Hotel, Surabaya. The training was given directly by PTPN X Production Director, Tarsisius Sutaryanto.

Peristiwa Penting 2016
Significant Event 2016

14 April | April 14

PTPN X menggelar *Expose* Hasil Penelitian Tembakau di Royal Hotel and Lounge, Jember. Kegiatan yang memaparkan hasil penelitian tembakau oleh Divisi Rencana dan Pengembangan PTPN X kepada pemangku kepentingan industri tembakau ini menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya adalah Direktur Perencanaan dan Pengembangan, Mochamad Sulton; Kepala Divisi Tembakau, Toto Guranto; Kepala Pusat Penelitian Tembakau, Erna Anastasia; dan Kepala Divisi Rencana dan Pengembangan, Mustaqim.

PTPN X held an Expose of the Result of Tobacco Research at Royal Hotel and Lounge, Jember. The activity was to explain results of the tobacco research conducted by the Planning and Development Division of PTPN X before the tobacco industry's stakeholders and presented several speakers including Director of Planning and Development Mochamad Sulton; Head of Tobacco Division Toto Guranto; Head of Tobacco Research Center Erna Anastasia; and Head of Planning and Development Division, Mustaqim.

4 Mei | May 4

PTPN X menghadiri Kongres Ikatan Ahli Gula Indonesia (IKAGI) XI di Grand City, Surabaya. Hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PTPN X, Subiyono, yang juga menjabat Ketua IKAGI. Dalam kongres yang dihadiri oleh berbagai kalangan dari pemangku kepentingan industri gula tersebut, dilakukan pemilihan ketua baru, dimana Subiyono kemudian digantikan oleh Direktur PT Rajawali Nusantara Indonesia, B. Didiek Prasetyo.

PTPN X attended the Association of Indonesian Sugar Experts (IKAGI)'s Congress XI in Grand City, Surabaya. The occasion was attended by President Director of PTPN X Subiyono, who also serves as Chairman of IKAGI. In the congress which was attended by various stakeholders in the sugar industry, a new chairman was elected, where Subiyono was replaced by the Director of PT Rajawali Nusantara Indonesia, B. Didiek Prasetyo.

Peristiwa Penting 2016
Significant Event 2016

11 Mei | May 11

6 (enam) orang anggota Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan ke Kantor Pusat PTPN X untuk mendapatkan laporan kinerja dan kesiapan Pabrik Gula yang berlokasi di Jawa Timur dalam menghadapi musim giling. Kunjungan yang juga dihadiri PTPN III (Persero), PTPN XI, PTPN XII, dan PT Garam (Persero) tersebut juga membicarakan isu terkini tentang Penyertaan Modal Negara (PMN) yang telah diberikan negara kepada PTPN X.

6 (six) members of the House of Representatives Commission VI visited PTPN X Head Office to obtain a report on the performance and preparedness of Sugar Mill located in East Java in the face of the milling season. The visit was also attended by PTPN III (Persero), PTPN XI, PTPN XII, and PT Garam (Persero) and discussed the latest issue of State Equity Participation (PMN) granted to PTPN X.

26-29 Mei | May 26-29

PTPN X memperkenalkan produknya melalui kepesertaan pada Gebyar Pasar Produk Daerah (GPPD) Expo 2016, di Grand City Exhibition Hall, Surabaya. Kegiatan yang telah ke-7 kalinya ini menyedot perhatian berbagai kalangan dari pelaku industri bisnis, khususnya di Jawa Timur.

PTPN X introduced its products through its participation in Gebyar Pasar Produk Daerah (GPPD) Expo 2016 held in Grand City Exhibition Hall, Surabaya. This event was held for the 7th time and drawn the attention of various people from business industry, especially in East Java.

Peristiwa Penting 2016
Significant Event 2016

27-28 Mei | May 27-28

Sebagai bagian dari upaya menekan lonjakan harga gula konsumsi, PTPN X menggelar operasi pasar di Pasar Wonokromo, Pasar Pucang, Pasar Rungkut, Pasar Tambakrejo, dan Pasar Kedurus, Surabaya. Dalam operasi pasar ini, PTPN X menggelontorkan 700 ton gula.

As part of the attampts to reduce the rise of sugar, PTPN X held market operations in Wonokromo Market, Pucang Market, Rungkut Market, Tambakrejo Market, and Kedurus Market, Surabaya. In this market operation, PTPN X poured 700 tons of sugar.

3-4 Juni | June 3-4

PTPN X menggelar program CSR melalui Khitanan Massal di Pabrik Gula Kremboong, Pabrik Gula Lestari dan Kebun Tembakau Klaten.

PTPN X held a CSR program through Mass Circumcision at Kremboong Sugar Mill, Lestari Sugar Mill and Klaten Tobacco Plantation.

Peristiwa Penting 2016
Significant Event 2016

6 Juni | 6 June

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp494 miliar, dimana Rp130 miliar diantaranya dialokasikan kepada PTPN X untuk disalurkan kepada petani tebu pada musim tanam 2016-2017. Penyaluran kredit ini menggunakan pola *linkage* atau bekerja sama dengan koperasi yang bernaung di bawah perusahaan perkebunan.

Disbursement of Credit for Businesses (Kredit Usaha Rakyat, or KUR) from PT Bank Negara Indonesia Tbk amounting to Rp494 billion, of which Rp130 billion was allocated to PTPN X to be distributed to sugar cane farmers during the 2016-2017 planting seasons. This credit distribution uses a linkage pattern or cooperates with cooperatives under the plantation company.

9 Juni | June 9

Sinergi BUMN diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PTPN X dan PT Pertamina (Persero) terkait penyaluran dana kemitraan Pertamina untuk petani tebu masa tanam 2016-2017. Perjanjian ini meliputi peran PTPN X sebagai pihak yang akan memberikan rekomendasi petani yang layak mendapatkan dana kemitraan, dimana Pertamina akan menyalurkan langsung dana tersebut. Penandatanganan yang dilakukan di Kantor Pusat PTPN X ini diwakilkan oleh Direktur SDM & Umum PTPN X, Djoko Santoso; dan *Vice President* CSR & SMEPP PT Pertamina (Persero), Kuswandi.

The synergy of SOEs is realized through the signing of Cooperation Agreement between PTPN X and PT Pertamina (Persero) concerning the channeling of Pertamina partnership fund for sugar cane farmers in 2016-2017. This agreement covers the role of PTPN X as a party which will provide recommendations on the farmers who deserve the partnership funds Pertamina will distribute directly. The signing was done at the Head Office of PTPN X and PTPN X was represented by the Director of Human Resources & General Affairs Djoko Santoso, and PT Pertamina (Pertamina) was represented by ita Vice President of CSR & SMEPP Kuswandi..

Peristiwa Penting 2016
Significant Event 2016

17 Agustus | August 17

Peringatan Hut kemerdekaan RI yang ke-71. Kegiatan yang dihadiri oleh ± 300 undangan dari Kantor Pusat PTPN X, Pabrik Gula hingga Kebun Tembakau dan anak usaha ini dibuka dengan upacara bendera, kemudian dilanjutkan dengan pemberian Penghargaan Masa Pengabdian untuk karyawan/karyawati yang telah bertugas selama 25, 30 dan 35 tahun, serta pelepasan Jamaah Haji.

Commemoration of the 71st Anniversary of Indonesian Independence, which was attended by ± 300 guests from Head Office of PTPN X, Sugar Mills, Tobacco Plantations and the Company's subsidiaries. This event was started with a flag ceremony, continued with the Award Ceremony for the employees with 25, 30 and 35 years of service and a release ceremony of Hajj pilgrims.

25 Agustus | August 25

PTPN X menggelar program CSR melalui pembuatan patusan kepada empat desa di sekitar wilayah PG Gempolkrep yaitu Desa keboan, Kecamatan Ngusikan Kabupate Jombang; Desa Betro dan Mojorejo, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto dan Desa Gading, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto.

PTPN X held a CSR program by making drainage channels for four villages in the vicinity of its Gemplokrep SG, namely Keboan Village, Ngusikan Subdistrict – Jombang Regency; Betro Village dan Mojorejo Village – Kemlagi Subdistrict, Mojokerto Regency; and Gading Village, Jatirejo Subdistrict – Mojokerto Regency.

Peristiwa Penting 2016
Significant Event 2016

30 Agustus | August 30

Peluncuran awal Kartu Tani, di Pabrik Gula Tjoekir, di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang dilakukan oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno. Kartu Tani memberikan banyak memberikan jaminan dan manfaat yang bisa diperoleh, seperti kepastian ketersediaan saprotan bersubsidi/non-subsidi, kemudahan penjualan hasil panen oleh Bulog (*off taker*) tanpa perantara, kemudahan penerimaan pembayaran hasil panen dari *off-taker*, kemudahan akses pembiayaan KUR dan menumbuhkan kebiasaan menabung. Program Kartu Tani juga membantu pemerintah dalam hal kepastian data untuk menyusun program kebijakan, subsidi, dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Bagi perbankan, Kartu Tani akan memudahkan perbankan untuk mengucurkan bantuan karena lebih terorganisasi oleh asosiasi petani dan PTPN yang membina para petani. Hadir dalam acara ini: Deputi Kementerian BUMN Bidang Farmasi dan Agroindustri, Wahyu Kuncoro; Wakil Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab; Kepala Dinas Perkebunan Jawa Timur, Samsul Arifin; Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Arum Sabil; jajaran Direksi PTPN X; Direksi PTPN IX, XI, XII, RNI, P3GI, LPP; Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Kartika Wirjoatmodjo; Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Asmawi Syam; Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Achmad Baiquni; Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jawa Timur, Benny Siswanto; dan berbagai pihak pemangku kepentingan industri perkebunan.

The initial launching of Farmer's Card at Tjoekir Sugar Mill in the Regency of Jombang East Java, conducted by Minister of SOE, Rini Soemarno. The Farmer's Card provides many guarantees and benefits, such as certainty in the availability of subsidized/non-subsidized saprotan, easy sale of harvests by Bulog (off taker) without intermediaries, easy payments for crops by the off-taker, easy access to KUR financing and aims to foster the habit of saving. The Farmer's Card program also assists the government in terms of data security to develop more targeted policy, subsidy and social assistance programs. For banks, the Farmer's 'Card will make them easier to disburse funds because it is more organized by farmers' associations and PTPN that fosters farmers. The event also was attended by Deputy Ministry of State-owned Enterprises for Pharmaceutical and Agroindustry, Wahyu Kuncoro; Vice Regent of Jombang, Hj. Mundjidah Wahab; Head of East Java Plantation Office, Samsul Arifin; Chairman of the Indonesia Sugar Cane Farmers Association (APTRI) Arum Sabil; Board of Directors of PTPN X; Directors of PTPN IX, XI, XII, RNI, P3GI, LPP; President Director of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Kartika Wirjoatmodjo; President Director of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Asmawi Syam; President Director of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Achmad Baiquni; Head of Bank Indonesia's East Java Representative, Benny Siswanto; and various stakeholders of the plantation industry.

Peristiwa Penting 2016
Significant Event 2016

8 November | November 8

Dewan Komisaris Holding, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (PTPN III) Joefly J. Bahroeny, Dahlan Harahap, Sardan Marbun, dan S. Budhisantoso, serta Direktur Human Capital Management PTPN III Seger Budiarjo mengunjungi 2 (dua) Pabrik Gula (PG) PTPN X, yaitu PG Gempolkrep dan PG Ngadirejo. Hadir mewakili PTPN X untuk menemui kunjungan: Komisaris Utama, Rudi Wibowo; Direktur SDM dan Umum Djoko Santoso; *General Manager* seluruh PG; serta beberapa Kepala Divisi. Kunjungan dari *Holding* dilakukan untuk bersilaturahmi, termasuk berdiskusi langsung dengan petani.

The Board of Commissioners of the Plantation Holding, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), namely Joefly J. Bahroeny, Dahlan Harahap, Sardan Marbun, and S. Budhisantoso, and Director of Human Capital Management of PTPN III Seger Budiarjo, made a visit to 2 (two) Sugar Mills (SM) of PTPN X: Gempolkrep SM and Ngadirejo SM. In the visit, PTPN X was represented by President Commissioner Rudi Wibowo; Director of Human Resources and General Affairs Djoko Santoso; General Manager of all SMs; and several Division Heads. The Holding's Visit was conducted as a forum to stay in touch (silaturahmi), including to have a discussion with farmers.

9 November | November 9

Kunjungan dan pelatihan kepada para petani tebu, kerjasama PTPN X dengan P3GI dan CSIRO yang didatangkan langsung dari Australia. Manajemen PTPN X memandang besarnya potensi lahan di Pulau Madura yang dapat dikembangkan menjadi perkebunan tebu..

A visit to and training of sugar cane farmers were conducted by PTPN X in cooperation with P3GI and CSIRO with speakers directly from Australia. PTPN X management sees ample land potential in Madura Island that can be developed into sugar cane plantations.

Peristiwa Penting 2016
Significant Event 2016

16 November | November 16

Direktur Utama, Subiyono, didaulat untuk menjadi pembicara dalam ajang Forum BUMN 2016, dengan topik industri gula dan ketahanan pangan Indonesia. Selain Direktur Utama PTPN X, ajang bergengsi ini juga menghadirkan beberapa narasumber yang memiliki jejak rekam yang baik, di antaranya Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pujiastuti; Dirut Pertamina, Dwi Soetjipto; Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Kartika Wirjoatmodjo; Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Asmawi Syam; dengan moderator oleh Rhenald Kasali.

President Director, Subiyono, was asked to become a speaker in the SOE Forum 2016 carrying a topic on the sugar industry and food security Indonesia. Besides PTPN X President Director, this prestigious event also presented some speakers with a good track record, to name a few: the Minister of Fisheries and Marine Affairs, Susi Pujiastuti; President Director of Pertamina, Dwi Soetjipto; President Director of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Kartika Wirjoatmodjo; President Director of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Asmawi Syam; with moderator Reynald Khasali.

23 November | 23 November

Penganugerahan *Top IT Implementation on Agro Industry Sector* 2016 dalam ajang *Top IT* & *Telco* 2016 *Award* yang diadakan oleh Itech Magazine, Asosiasi Perusahaan Konsultan Telematika Indonesia (Aspekti), Ikatan Konsultan Teknologi Informasi Indonesia (IKTII), Masyarakat Telematika (Mastel), Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI), Forum Teknologi Informasi (FORTI), Alvara, serta didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Di samping itu, Direktur Utama PTPN X, Subiyono terpilih sebagai *Top IT Leadership* 2016. Penghargaan yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta ini diberikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informasi RI, Rudiantara, dan diterima oleh Direktur Utama PTPN X, Subiyono.

Awarding of Top IT Implementation on Agro Industry Sector 2016 in the Top IT & Telco 2016 Award held by Itech Magazine, the Association of Indonesian Telematics Consultant Company (Aspekti), the Association of Indonesian Information Technology Consultant (IKTII), Telematics Society (Mastel), Indonesian Big Data Association (ABDI), Information Technology Forum (FORTI), Alvara, and supported by the Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia. In addition, President Director of PTPN X, Subiyono, was elected as Top IT Leadership 2016. The awarding event was held in Balai Kartini, Jakarta, and the award was presented directly by the Minister of Communication and Information of RI, Rudiantara, to the President Director of PTPN X, Subiyono.

Laporan Manajemen

Management Report

Sebagai industri yang strategis, industri perkebunan harus merangkul regulator, lembaga profesi, entitas usaha dan petani; agar terwujud ketahanan pangan seperti yang dicita-citakan.

As a strategic industry, plantation industry must embrace the regulators, professional institutions, business entities and farmers; in order to realize the aspired food security.

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report

Rudi Wibowo
Komisaris Utama
President Commissioner

PTPN X berkewajiban untuk menjaga harmoni antara kepentingan industri, kebutuhan produksi dan bisnis, serta kepentingan petani sebagai pemangku kepentingan industri perkebunan.

PTPN X has the obligation to maintain a harmony between interest of the industry, the needs of production and business, as well as interests of farmers as Stakeholders of plantation industry.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat

Sebagai entitas usaha yang bergerak di bidang industri komoditas, PT Perkebunan Nusantara X, atau "Perseroan" memiliki visi untuk menjadi perusahaan agroindustri terkemuka serta berwawasan lingkungan. Upaya meraih visi tersebut memerlukan dukungan kapabilitas yang memadai agar senantiasa dapat melakukan strategi cerdas (*agile strategy*). Empat kekuatan inti yang terus-menerus didorong kapabilitasnya adalah kompetensi terhadap bisnisnya, responsif atas dinamika perubahan lingkungan strategis, kecepatan meraih peluang kemanfaatan, serta kemampuan fleksibilitas yang tinggi dalam mengelola setiap dinamika yang mungkin dihadapi. Secara integratif, dorongan untuk meningkatkan keempat kapabilitas tersebut memerlukan dukungan kehandalan organisasi, SDM, teknologi, informasi dan inovasi. Keseluruhan kekuatan inti ini terus-menerus harus dapat saling bersinergi untuk dapat mengoptimalkan kinerja dan memberikan nilai tambah bagi Perseroan, yang kemudian akan berdampak pada kontribusi kepada pemegang saham maupun kesejahteraan masyarakat.

Status Perseroan sebagai eks-Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara khusus memberikan ciri khas yang memposisikannya sebagai entitas usaha non-BUMN yang tetap bekerja dengan jiwa dan ruh ke-BUMN-annya. Hal ini perlu ditegaskan sebagai pemahaman kepada seluruh pihak akan kewajiban Perseroan untuk tetap menjaga harmoni antara kepentingan industri, kebutuhan produksi dan bisnis, serta kepentingan petani sebagai pemangku kepentingan industri perkebunan. Melalui pemahaman ini, Perseroan memiliki kewajiban moral untuk tetap dan dapat terus mengembangkan sektor perkebunan bersama pemangku kepentingan khususnya petani sekaligus terus menciptakan nilai tambah pada aspek bisnis Perseroan.

Pada kesempatan ini, ijinkan Dewan Komisaris memberikan laporan kinerjanya, yang sekaligus menjadi sambutan pembuka atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016.

Dear Respected Shareholders and Stakeholders,

As a business entity engaged in commodity industry, PT Perkebunan Nusantara X, or the "Company", has a vision to become a leading agroindustry and environmentally friendly company. In order to achieve that vision, the support of adequate capability to consistently execute agile strategies is required. The four core strengths whose capabilities are constantly driven are business competence, responsiveness to the dynamics of change in strategic environment, the pace of expediency, and the high flexibility in managing every possible dynamics. Integratively, the drive to improve these four capabilities requires the support of reliable organization, human resources, technology, information and innovation. All these core strengths must be synergized on an on going basis in order to optimize the performance and provide added value to the Company, which will then impact the contribution to shareholders and the welfare of society.

The Company's status of the Company as a former State-Owned Enterprise (BUMN) specifically gives a characteristic and positioning it as a non-BUMN business entity that keeps working with the soul and spirit of SOEs. This should be emphasized as an understanding to all parties concerning the Company's obligation to maintain harmony between the industrial interests, production and business requirements, as well as the interests of farmers as stakeholders of the plantation industry. Through this understanding, the Company has a moral obligation to remain and continue to develop the plantation sector with stakeholders-especially farmers-while continuing to create added value on the business aspects of the Company.

Therefore, in this opportunity, the Board of Commissioners would like to present our performance report, which will be an opening act for the Company's Annual Report for financial year 2016.

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report

Penilaian atas Kinerja Direksi Mengenai Pengelolaan Perusahaan

Kondisi harga komoditas dunia yang masih menunjukkan penurunan patut menjadi catatan utama atas faktor eksternal yang melingkupi industri perkebunan pada umumnya. Perseroan bersama-sama entitas usaha industri perkebunan lainnya, seperti PT Perkebunan Nusantara lainnya merasakan kondisi ini sebagai sebuah tantangan yang harus melahirkan sebuah strategi baru untuk dapat menjawab situasi yang ada.

Selain itu, faktor iklim dan cuaca senantiasa menjadi variabel penentu pada subsistem agribisnis hulu dalam proses produksi berbasis tebu dan tembakau. Anomali iklim yang terjadi pada tahun 2016 telah menjadi salah satu penyebab utama penurunan kualitas bahan baku bagi proses produksi Perseroan dalam hal ini tebu dan tembakau. Rendemen sebagai ukuran kadar dan tingkat kualitas produk akan sangat ditentukan oleh faktor iklim dan cuaca tersebut.

Di tahun 2016, Perseroan mencatat kinerja produksi dengan pencapaian-pencapaian yang bervariasi. Jika dibandingkan dengan target dan anggaran yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta RKAP Perubahan (RKAPP), secara umum Perseroan mampu membukukan pencapaian yang cukup baik. Meskipun demikian, khusus pada kinerja bidang keuangan, Perseroan mengalami kerugian dengan Rugi Tahun Berjalan sebesar Rp155,78 miliar.

Dewan Komisaris menerima alasan dari Direksi tentang adanya kerugian ini melalui 2 (dua) faktor penentu utama: faktor anomali iklim, dan adanya entitas usaha pesaing baru yang mengambil hampir separuh pangsa pasar bahan baku (tebu) bagi Perseroan. Meskipun demikian, Dewan Komisaris menilai, manajemen dapat mengambil tindakan yang lebih baik untuk dapat menekan kerugian tersebut; baik melalui kebijakan pemanfaatan teknologi produksi maupun strategi manajemen lainnya yang mampu menjawab tantangan-tantangan di sepanjang tahun 2016.

Assessment of the Board of Directors Performance on Managing Company

The condition of the world commodity prices that still shows a decline should be the main note on external factors surrounding the plantation industry in general. The Company, along with other plantation industry entities, such as PT Perkebunan Nusantara, perceives this condition as a challenge to produce a new strategy to address the situation.

In addition, climate and weather factors have always been a determinant variable in the upstream agribusiness subsystem of sugar cane and tobacco-based production process. The climate anomaly that occurred in 2016 has been one of the main causes of the decline in quality of raw materials for the Company's production process, in this case, sugar cane and tobacco. The yield as the indicator of content and quality level of products will be greatly determined by climate and weather factors.

In 2016, the Company recorded production performance with varying achievements. Compared to the targets and budgets set forth in the Company's Working Plan and Budget (RKAP) and its Revision (RKAPP), the Company was generally able to record a satisfactory achievement. However, in terms of financial performance, the Company has suffered quite a loss with Loss for the Year amounted to Rp155.78 billion.

The Board of Commissioners accepts the reasons from the Board of Directors on these losses through 2 (two) major determinants: the climate anomaly factor and the existence of new competitor that accounted for nearly half of the raw material (sugarcane) market share for the Company. Nevertheless, the Board of Commissioners believes that management should undertake better actions to reduce the losses; either by policy of utilizing production technology and other management strategies to address the challenges faced throughout 2016.

Pelaksanaan Bentuk Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Kinerja Komite-komite yang Berada di Bawah Dewan Komisaris

Sebagai perangkat Perseroan yang berfungsi melakukan pengawasan, Dewan Komisaris memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi melalui berbagai pertimbangan dari keberagaman latar belakang yang tercermin dari tugas dan kompetensi masing-masing Dewan Komisaris. Pelaksanaan fungsi pengawasan ini sebagian besar dilakukan dalam wujud formal, yaitu Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, pemantauan berupa pertemuan dan kunjungan pada setiap unit kerja merupakan instrumen yang sangat baik. Keseluruhan rapat tersebut bersifat strategis, dalam mendampingi kinerja perseroan. Pada Rapat Gabungan, Dewan Komisaris dan Direksi memberikan masukan maupun rekomendasi berkenaan dengan aspek-aspek kendala dan tantangan serta pengembangan organisasi Perseroan; sementara pemantauan ke setiap unit kerja dan unit bisnis lebih mengedepankan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja di tingkat unit kerja dan unit bisnis perseroan.

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Sekretariat Dewan Komisaris mengupayakan pengawasan yang menyeluruh bagi pengelolaan bisnis dan organisasi yang dijalankan Direksi. Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas kinerja kedua organ pendukung tersebut dalam memberikan masukan dan rekomendasi bagi Dewan Komisaris. Kunjungan lapangan dari Komite Audit, penelaahan beberapa kendala dan tantangan, hingga pemantauan manajemen risiko Perseroan, telah dilakukan Komite Audit dan telah menjadi bagian dari tugas-tugas pengawasan dan masukan Dewan Komisaris kepada Perseroan melalui Rapat-Rapat Gabungan.

Salah satu fungsi pengawasan Dewan Komisaris dilakukan dengan memberikan masukan terkait pemanfaatan teknologi produksi yang dapat menjawab tantangan terkait risiko iklim dan cuaca. Dewan Komisaris melihat, risiko yang sifatnya *given* ini tidak boleh menjadi faktor yang menyandera perkembangan Perseroan ke depan. Dengan pemanfaatan teknologi produksi yang tepat guna, Dewan Komisaris berharap Perseroan dapat tetap menjaga kuantitas dan kualitas produksi di sepanjang

The Execution of Board of Commissioners' Supervision and the Performance of Commitees Under the Board of Commissioners.

Functioning as the Company's supervisory body, the Board of Commissioners provides inputs and recommendations to the Board of Directors through various considerations from diverse backgrounds as reflected in duties and competencies of each Board of Commissioners. The implementation of this supervisory function is mostly conducted in a formal form, namely the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors. In addition, monitoring in the form of meetings and visits to each work unit is a good instrument. The entire meetings are strategic as support to the Company's performance. At the Joint Meeting, the Board of Commissioners and the Board of Directors provide inputs and recommendations regarding the constraints and challenges, as well as the development of the Company's organization, while monitoring to each work unit and business unit reflects the supervisory function of the Board of Commissioners on the performance at the level of work unit and business unit.

With the assistance of the Audit Committee and the Secretary of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners seeks comprehensive oversights on the business and organization management run by the Board of Directors. The Board of Commissioners acknowledges the performance of these two supporting organs in providing input and recommendation to the Board of Commissioners. The Audit Committee's field visit, review on obstacles and challenges, up to monitoring the Company's risk management, have been conducted by the Audit Committee and have become part of the supervisory and advisory duty of the Board of Commissioners to the Company through Joint Meetings.

One of the supervisory functions of the Board of Commissioners is to provide inputs related to the utilization of production technology that can address challenges related to climate and weather risk. The Board of Commissioners sees that this given risk should not be a factor that restrained the Company's future progress. With the utilization of appropriate production technology, the Board of Commissioners expects the Company to be able to maintain its quantity and quality of production

tahun, walaupun terdapat tantangan terkait faktor iklim dan cuaca tersebut. Dalam pada itu, Dewan Komisaris senantiasa mendorong Perseroan bahwa meningkatkan kapabilitas segenap instrumen pendukung bisnisnya, baik di bidang kompetensi SDM, organisasi, Teknologi-Informasi maupun inovasinya, adalah suatu keharusan agar semakin berdaya saing.

throughout the year, despite challenges related to climate and weather factors. In the meantime, the Board of Commissioners continuously encourages the Company to improve the capability of all its business supporting instruments, whether in the areas of HR competence, organization, Information Technology and its innovation, as a necessity to improve the Company's competitiveness.

Pandangan atas Penerapan *Whistleblowing System* di Perusahaan dan Peran Dewan Komisaris dalam WBS

Perseroan memiliki Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau *Whistleblowing System* (WBS) yang dikembangkan dengan tujuan menjadi wadah pelaporan adanya pelanggaran secara internal oleh siapapun yang terlibat dalam kegiatan operasional dan bisnis Perseroan. Sistem pelaporan, saluran, hingga investigasi dan mekanisme *punishment*, telah disusun sedemikian rupa dengan harapan bahwa pelanggaran secara internal akan dapat diminimalisir, dan mampu membentuk prinsip korporasi yang kuat bagi Perseroan.

The View on the Implementation of Whistleblowing System in the Company and the Board of Commissioners's Role in WBS.

The Company has a Whistleblowing System (WBS), developed with the objective of being a medium for reporting internal violations by anyone involved in the Company's operational and business activities. Reporting systems, channels, investigations and punishment mechanisms, have been established to minimize internal violations and create strong corporate principles for the Company.

Salah satu unit yang terlibat dalam WBS Perseroan adalah Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang bekerja di bawah Direksi, dimana Komite Audit sebagai organ pendukung Dewan Komisaris memiliki hubungan pengelolaan audit di lingkup Perseroan. Hubungan kerja yang terbentuk antara Komite Audit dan SPI ini mencakup pelaporan WBS dari SPI kepada Komite Audit, untuk kemudian diteruskan kepada Dewan Komisaris. Melalui informasi ini, Dewan Komisaris dapat menelaah risiko atas pelanggaran yang terjadi, dan mengambil langkah-langkah strategis untuk memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi.

One of the units involved in the Company's WBS is the Internal Audit Unit (SPI) working under the Board of Directors, whereby the Audit Committee as a supporting organ of the Board of Commissioners has audit management linkage within the Company. The working relationship established between the Audit Committee and the SPI includes the reporting of WBS from SPI to the Audit Committee, to be forwarded to the Board of Commissioners. Through this information, the Board of Commissioners may review the risks of the violation, and take strategic steps to provide input and recommendations to the Board of Directors.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Dewan Komisaris memandang, prospek usaha yang telah disusun Direksi dan telah ditandatangani Dewan Komisaris telah mencerminkan kompetensi inti Perseroan, dan upaya serta target yang menjadi acuan atas perkembangan Perseroan di tahun 2017. Dewan Komisaris menilai upaya sungguh-sungguh Direksi melalui penyusunan strategi cerdas yang mencoba menjawab

The View on the Board of Directors' Business Prospect

The Board of Commissioners considers that the business prospects compiled by the Board of Directors and have been signed by the Board of Commissioners has reflected the core competencies of the Company, as well as the efforts and targets that become the benchmark for the Company's development in 2017. The Board of Commissioners respects the Board of Directors' serious

kendala dan tantangan yang terjadi di sepanjang tahun 2016, khususnya terkait kendala dan tantangan seperti yang telah dijelaskan di atas. Dewan Komisaris berharap, strategi yang telah dirumuskan untuk menjawab kendala dan tantangan pengelolaan bisnis dan operasional Perseroan oleh Direksi akan mampu dijalankan dengan maksimal, termasuk mewujudkan sinergi EDO (Efisiensi, Diversifikasi dan Optimalisasi) sebagai kekuatan Perseroan dalam menghadirkan proses produksi yang lebih memiliki profil profitabilitas yang tinggi.

efforts through the preparation of intelligent strategy to answer obstacles and challenges that occurred throughout year 2016, especially the obstacles and challenges that have been described above. The Board of Commissioners hopes that the strategy that has been formulated to address the business management and operational constraints and challenges of the Company by the Board of Directors can be carried out optimally, including the synergy of EDO (Efficiency, Diversification and Optimization) as the Company's strength in pursuing higher profitable production process.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Di tahun 2016, terdapat pergantian susunan dan komposisi Dewan Komisaris. Per 31 Desember 2015, susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Changes in the Board of Commissioners' Composition

In 2016, there were changes in the Board of Commissioners' composition. As of December 31, 2015, the Board of Commissioners' composition was as follows:

Komisaris Utama	Rudi Wibowo	*President Commissioner*
Komisaris	Djoko Moeljono	*Commissioner*
Komisaris	Irjen Pol (Purn) Drs. Indarto, SH	*Commissioner*
Komisaris	Brigjen TNI (Purn) Heru Sudibyo	*Commissioner*
Komisaris	Mayjen TNI (Purn) Susanto Darus	*Commissioner*

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-73/MBU/03/2016 jo KPJAK/Hold/SKPTS/R/07/2016 tanggal 29 & 31 Maret 2016 dan No. SK-207/MBU/09/2016 jo 3.00/SKPTS/R/36/2016 tanggal 1 September 2016, susunan dan komposisi Dewan Komisaris hingga akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Pursuant to the Minister of SOEs Decree no. SK-73/MBU/03/2016 jo KPJAK/Hold/SKPTS/R/07/2016 dated March 29 & 31, 2016 and no. SK-207/MBU/09/2016 jo 3.00/SKPTS/R/36/2016 dated September 1, 2016, the Board of Commissioners' composition as of the end of 2016 was as follows:

Komisaris Utama	Rudi Wibowo	*President Commissioner*
Komisaris	Sukardi Rinakit	*Commissioner*
Komisaris	Y.B. Priyatmo Hadi	*Commissioner*
Komisaris Independen	Arvan Rivaldy Rebion Siregar	*Independent Commissioner*

Terkait perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris seluruhnya merupakan keputusan pemegang saham Perseroan, yaitu Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Menteri BUMN.

The changes in the Board of Commissioners' composition were entirely decided by the Company's shareholders, namely the President Director of PT Perkebunan Nusantara III and the Minister of SOEs.

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report

Akhir Kata

Kepada pemegang saham, ijinkan Dewan Komisaris menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Kepada Direksi, Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas kinerja yang telah ditunjukkan, termasuk upaya sungguh-sungguh menjalankan roda Perseroan, yang diyakini akan menjadi landasan untuk melakukan evaluasi lebih lanjut. Dengan seluruh kekuatan yang ada dan dukungan segenap pemangku kepentingan, Dewan Komisaris berharap Perseroan akan mampu mengembalikan kinerja ke *level* terbaik, sembari tetap mengusung harmonisasi dengan pemangku kepentingan industri perkebunan, yaitu petani.

Surabaya, 20 April 2017

Closing Statement

To the shareholders, please allow the Board of Commissioners to express our gratitude for the trust that has been given. To the Board of Directors, the Board of Commissioners would like to express an appreciation on the performance that has been demonstrated, including the most sincere efforts to run the Company, which is believed to be the basis for further evaluation. With all the strengths and supports from all stakeholders, the Board of Commissioners hopes that the Company will be able to return its performance to the best level while still harmonizing with the farmers as stakeholders of the plantation industry.

Surabaya, April 20, 2017

Atas Nama Dewan Komisaris
On Behalf of the Board of Commissioners

Rudi Wibowo
Komisaris Utama
President Commissioner

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intenttionally left blank

Laporan Direksi
Board of Directors Report

Dwi Satriyo Annurogo
Direktur Utama
President Director

Pasar yang kompetitif harus diimbangi dengan strategi dan inovasi yang dapat membawa PTPN X mengoptimalkan seluruh peluang yang dimilikinya.

Competitive markets must be balanced with various strategies and innovations that can bring PTPN X to optimize all opportunities.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat

Tahun 2016 menjadi tahun penuh tantangan bagi PT Perkebunan Nusantara X, atau "Perseroan". Jatuhnya harga komoditas pada beberapa tahun belakangan disebabkan oleh berbagai faktor. Iklim sebagai variabel utama dari komoditas agrikultur berperan penting bagi kuantitas dan kualitas produk komoditas. Di samping itu, perlambatan perekonomian negara-negara besar turut berperan dalam *supply & demand* dari pasar. Perlambatan perekonomian Tiongkok telah menurunkan harga-harga komoditi ke *level* yang rendah selama bertahun-tahun. Sebagai negara eksportir komoditi yang besar, performa ekspor Indonesia tentu sangat terpengaruh saat harga komoditi rendah.

Rendahnya harga komoditi tidak hanya disebabkan permintaan global yang menurun, namun juga adanya kelebihan suplai pasca proyeksi pertumbuhan global yang optimis dari Bank Dunia dan *International Monetary Fund* di tahun 2000-an. Atas dasar proyeksi tersebut, banyak entitas usaha memasuki sektor komoditi atau perusahaan komoditi yang telah ada berinvestasi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menyebabkan timbunan suplai sehingga menekan turun harga komoditi.

Di tengah kondisi yang demikian, Perseroan mengupayakan sebuah strategi kinerja yang diharapkan mampu memberikan landasan bagi perkembangan di masa mendatang.

Kebijakan Strategis di Tahun 2016

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri berbasis tebu yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Di samping itu, Perseroan menggarap bisnis turunan tebu non-gula serta bisnis yang dapat memperkuat nilai tambah bagi mata rantai bisnisnya. Produk utama Perseroan adalah gula kristal putih dengan produk samping berupa tetes; dan tembakau yang menjadi komoditas ekspor.

Aktivitas operasional dan bisnis Perseroan didukung oleh 11 unit Pabrik Gula dengan total kapasitas 41.800 TCD dan 3 (tiga) unit Kebun Tembakau. Perseroan juga mendapatkan penugasan dari Kementerian BUMN untuk mengelola 3 (tiga) Pabrik Gula di Sulawesi Selatan milik

Dear Respected Shareholders and Stakeholders,

The year 2016 has become a challenging year for PT Perkebunan Nusantara X or the "Company". The fall in commodity prices in recent years, caused by various factors. Climate, as the main variable of agricultural commodities, played an important role in the quantity and quality of commodity products. In addition, the economic deceleration of the big countries also impacted the supply & demand of the market. The slowdown in China's economy has lowered commodity prices to a low level for years. As a large exporter of commodities, Indonesia's export performance will be greatly affected when commodity prices are low.

The low commodity prices were not only due to declining global demand, but also the excess supply of the optimist post-projected global growth from the World Bank and International Monetary Fund in the 2000s. Based of these projections, many entities entered the commodity sector or existing commodity companies invested to increase production capacity and caused stockpiles of supply and depressed down the commodity prices.

Amidst this situation, the Company has devised a performance strategy which will hopefully provide a starting point of development in the near future.

Strategic Policy of 2016

The Company is engaged in sugar cane-integrated agro-industry from upstream to downstream. In addition, the Company also specializes in a non-sugar cane derivative business that can strengthen the additional value for its business chain. The Company's main products are white sugar with side products in the form of drops; and tobacco as an export commodity.

The Company's operational and business activities are supported by 11 (eleven) Sugar Mill units with a total capacity of 41,800 TCD and 3 (three) units of Tobacco Field. The Company also received an assignment from the Ministry of SOEs to manage 3 (three) sugar mills in South

Laporan Direksi
Board of Directors Report

PT Perkebunan Nusantara XIV. Perseroan juga membawahi 4 (empat) entitas anak usaha, yakni PT Dasaplast Nusantara yang bergerak di bidang karung plastik, PT Energi Agro Nusantara di bidang bioetanol, PT Nusantara Medika Utama bidang layanan kesehatan, serta PT Mitratani Dua Tujuh yang menyediakan makanan beku seperti Edamame dan Okra.

Dari ragam kegiatan usaha tersebut, Perseroan mengklasifikasikan aktivitas usahanya menjadi 5 (lima) segmen usaha yang terdiri dari segmen usaha gula, segmen usaha tetes, segmen usaha tembakau, segmen usaha rumah sakit, dan segmen usaha lainnya. Kompetensi inti Perusahaan adalah budidaya tebu dan industri gula, budidaya dan proses pengolahan tembakau, serta pengelolaan energi terbarukan berbasis tebu.

Dengan profil bisnis tersebut, Perseroan menempuh strategi dengan mengupayakan optimalisasi aset dan proses produksi untuk dapat menghasilkan produk yang efektif, salah satunya tercermin dari Rendemen. Rendemen tebu menggambarkan kadar kandungan gula di dalam batang tebu yang dinyatakan dengan persen setelah melalui proses di dalam pabrik gula. Sementara, Rendemen tembakau adalah berat daun tembakau kering yang dihasilkan dibandingkan dengan berat daun tembakau hijau yang diproses yang dinyatakan dalam persen. Angka Rendemen menyatakan kualitas produk yang dihasilkan.

Selain itu, Perseroan juga mengupayakan luas areal suplai tebu dan tembakau yang dapat menopang kebutuhan produksi Perseroan. Di sepanjang tahun 2016, luas areal untuk produksi tebu mencapai 70.611 hektar, meningkat 0,44% dibandingkan luas areal tahun 2015 yang sebesar 70.301 hektar. Untuk produksi tembakau, luas perolehan lahan mencapai 1.078 hektar, menurun 4% dibandingkan tahun luas perolehan lahan tahun 2015 yang mencapai 1.123 hektar.

Kinerja produksi tebu Perseroan secara rata-rata mengalami sedikit perbedaan dengan tahun sebelumnya. Hingga akhir giling 2016, pabrik gula Perseroan telah melaksanakan giling dengan rata-rata 167 hari giling; dimana produksi gula Perseroan tahun 2016 mencapai 380.403 ton, turun 11,69% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 430.750 ton. Dari total produksi 380.403 ton,

Sulawesi owned by PT Perkebunan Nusantara XIV. In addition, the Company also oversees 4 (four) subsidiaries, PT Dasaplast Nusantara engaged in plastic bags sector, PT Energi Agro Nusantara in bioethanol sector, PT Nusantara Medika Utama in health services sector, and PT Mitratani Dua Tujuh in frozen foods sector such as Edamame and Okra.

Out of these various business activities, the Company classifies them into five business segments consisting of the sugar business segment, drops business segment, tobacco business segment, hospital business segment, and others business segments. The Company's core competencies are sugar cane cultivation and sugar industry, tobacco cultivation and processing, and sugar cane-based renewable energy management.

With these business profiles, the Company pursues a strategy by seeking the optimization of assets and production process to produce an effective product, one of which will be reflected in the Yield. Sugar cane yields represent sugar content levels in cane stalks and stated in percentager after being processed inside the sugar mills. Meanwhile, tobacco yields are the weight of dry produced tobacco leaves compared to the weight of processed green tobacco leaves and are stated in percentage.

In addition, the Company also strives for the supply area of sugar cane and tobacco to support the Company's production needs. Throughout the year 2016, the total area for sugar cane production reached 70,611 hectares, an increase of 0.44% compared to the total area of 2015 amounting to 70,301 hectares. For tobacco production, the land acquisition area reached 1,078 hectares, decreasing 4% compared to the land acquisition in 2015 reaching 1,123 hectares.

The Company's sugar cane production performance has been slightly different from the previous year. Until the end of milling 2016, the Company's sugar mills have been milling with an average of 167 milled days; where the Company's sugar production in 2016 reached 380,403 tons, down 12% compared to 2015 reaching 430,750 tons. Of the total production of 380,403 tons, 93,567 tons of

sebanyak 93.567 ton merupakan gula milik Perseroan dan 286.837 ton adalah milik petani.

Produksi tebu digiling pada tahun 2016 tercapai 5,94 juta ton, mengalami peningkatan 15% dibandingkan produksi tahun 2015 yang mencapai 5,19 juta ton. Selain faktor kenaikan luas areal tertebang, adanya kenaikan jumlah tebu digiling disebabkan peningkatan produktivitas tebu per hektar sebesar 14%; dari 73,8 ton/hektar di tahun 2015 menjadi 84,2 ton/hektar di tahun 2016.

Angka Rendemen produksi tebu Perseroan menunjukkan penurunan, dari 8,30% di tahun 2015 menjadi 6,36% di tahun 2015. Demikian pula pada Rendemen produk tembakau yang mengalami penurunan dari 9,91% di tahun 2015 menjadi 9,08% di tahun 2016. Penurunan ini terjadi sebagai akibat anomali iklim La-Nina yang menyebabkan masih tingginya curah hujan pada musim kemarau.

Pada produksi tembakau, realisasi areal dan realisasi tanam untuk tembakau TBN/VBN tahun 2016 sebesar 878 hektar, meningkat 1% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 872 hektar. Panen daun hijau dan kering rompos tahun 2016 masing-masing tercatat 19.077 ton dan 1.736 ton. Jika dibandingkan tahun 2015, panen daun hijau mengalami penurunan sebesar 12%, dan produksi kering rompos mengalami penurunan 19%.

Selain pengelolaan Pabrik Gula dan Kebun Tembakau, Perseroan juga memiliki segmen usaha rumah sakit dan segmen usaha lainnya yang meliputi produk Edamame dan Okra, karung plastik, Bioethanol dan *Cutting Bobbin*. Kedua segmen ini dikelola oleh entitas anak, PT Nusantara Medika Utama pada segmen usaha rumah sakit; PT Dasaplast Nusantara pada industri karung plastik dan *Cutting Bobbin*; PT Energi Agro Nusantara pada Bioethanol; dan PT Mitratani Dua Tujuh yang memproduksi Edamame dan Okra. Dibandingkan kegiatan usaha pada produksi gula, tetes dan tembakau, segmen usaha rumah sakit dan segmen usaha lainnya mencatat kinerja dengan pertumbuhan pendapatan yang signifikan dibandingkan tahun 2015; masing-masing tumbuh 11% dan 40%.

Dengan kinerja kelima segmen usaha di atas, Perseroan membukukan Pendapatan sebesar Rp2,26 triliun, turun 11% dibandingkan Pendapatan tahun 2015 yang sebesar Rp2,53 triliun. Rugi Usaha sebesar Rp162,92 miliar,

sugar is owned by the Company and 286,837 tons are owned by farmers.

Production of milled cane in 2016 reached 5.94 million tons, an increase of 15% compared to production in 2015 reaching 5.19 million tons. In addition to the increase in the logged-over areas, the increase in the number of sugar cane is due to the increase of sugarcane productivity per hectare by 14%; from 73.8 tons/hectare in 2015 to 84.2 tons/hectare in 2016.

The yield of the Company's sugar cane production showed a decrease, from 8.30% in 2015 to 6.36% in 2015. The yield of tobacco products also experienced a decrease from 9.91% in 2015 to 9.08% in 2016. This decline occured as a result of the La-Nina climate anomaly that caused high rainfalls during the dry season.

In tobacco production, the realization of area and the realization of planting for TBN/VBN tobacco by 2016 amounted to 878 hectares, an increase of 1% compared to the year 2015 amounting to 872 hectares. Harvest of green leaves and dried rompos in 2016 each recorded 19,077 tons and 1736 tons. Compared with 2015, the harvesting of green leaves was decreased by 12%, and the production of dry items (rompos) was decreased by 19%.

In addition to managing the Sugar Mills and Tobacco Factories, the Company also has hospital business segment and others business segment, which includes Edamame and Okra products, plastic bags, Bioethanol and Cutting Bobbin. Both segments are managed by a subsidiary, PT Nusantara Medika Utama in the hospital business segment; PT Dasaplast Nusantara in the plastic bag industry and Cutting Bobbin; PT Energi Agro Nusantara in Bioethanol; And PT Mitratani Dua Tujuh in producing Edamame and Okra. Compared to business activities in the production of sugar, drops and tobacco, the hospital business segment and others business segment recorded performance with significant revenue growth compared to 2015, grew 11% and 40% respectively.

With the performance of the above five business segments, the Company posted a Revenue of Rp 2.26 trillion, a decrease of 11% compared to Revenue in 2015 amounting to Rp 2.53 trillion. The operating loss

Laporan Direksi
Board of Directors Report

turun 154% dibandingkan Laba Usaha tahun 2015 yang mencapai Rp302,29 miliar. Rugi Tahun Berjalan sebesar Rp155,78 miliar, turun 223% dibandingkan Laba Tahun Berjalan tahun 2015 yang sebesar Rp126,43 miliar. Kinerja produksi gula dan tembakau sebagai kontributor utama dari pendapatan Perseroan dapat menjadi gambaran tentang kondisi Perseroan dan tantangan yang dihadapi di tahun 2016, yang kemudian berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Perbandingan Antara Realisasi dengan Target

Secara umum, realisasi produksi tahun 2016 mencatat kinerja dengan variasi yang berbeda-beda. Beberapa angka realisasi produksi berada di atas anggaran, sebagian lainnya berada di bawah target atau anggaran yang tertuang di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). RKAP tahun 2016 telah disusun di akhir tahun 2015 dan awal tahun 2016 sebagai acuan bagi pemegang saham dan manajemen untuk mengukur kemajuan kinerja Perseroan.

Pada aspek produksi, realisasi produksi gula pada 2016 sebesar 380.403 ton, dengan pencapaian 98% dibandingkan anggaran 2016 yang sebesar 389.013 ton. Produksi tebu digiling tahun 2016 mencapai 5,94 juta ton, dengan pencapaian 104% dibandingkan produksi tahun 2015 yang mencapai 5,71 juta ton. Sementara jumlah tebu digiling yang berasal dari realisasi luas areal tertebang sebesar 70.611 hektar, tercapai 102% dari anggaran tahun 2016 yang seluas 69.323 hektar. Angka pencapaian tersebut didominasi oleh lahan TR seluas 67.441 hektar dan lahan TS seluas 3.170 hektar. Kenaikan capaian luas areal tertebang ini disebabkan oleh tebu rakyat mandiri yang awalnya diperkirakan akan digiling keluar Pabrik Gula Perseroan, namun kenyataannya masuk ke Pabrik Gula Perseroan. Produktivitas tebu per hektar tercapai 102% dari anggaran tahun 2016 yang sebesar 82,4 ton/hektar, dengan realisasi produktivitas tebu per hektar tahun 2016 sebesar 84,2 ton/hektar.

Rendemen tebu sebagai acuan bagi kualitas produk gula Perseroan tercapai 94%, antara realisasi Rendemen yang sebesar 6,36% dan target sebesar 6,80%. Seperti yang telah dijelaskan di atas, efek anomali iklim La-Nina menjadi penyebab tingginya curah hujan pada musim kemarau, yang kemudian mempengaruhi kualitas tebu

of Rp 162.92 billion, down 154% compared to the 2015 Operating Profit amounting to Rp 302.29 billion. Loss in Current Year of to Rp 155.78 billion, down 223% compared to 2015 Current Profit of Rp 126.43 billion. The performance of sugar and tobacco production as major contributors to the Company's revenues can illustrate the Company's conditions and the challenges faced in 2016, which then affected the Company's financial performance.

Comparison Between Realizations and Targets

In general, the realization of production in 2016 has recorded performances with different variations. Several figures were above the budget, while others reached below the targets or budgets set forth in the Company Budgeting Plan (CBP). The CBP in 2016 has been drawn up at the end of 2015 and early 2016 as a reference for shareholders and management to measure the progress of the Company's performance.

In production aspect, the realization of sugar production in 2016 amounted to 380,403 tons, with an achievement of 98% compared to the 2016 budget of 389,013 tons. Production of milled sugar cane in 2016 reached 5.94 million tons, with an achievement of 104% compared to production in 2015 reaching 5.71 million tons. While the number of milled cane from the realization of total logged-over areas of 70,611 hectares, reached 102% of the 2016 budget of 69,323 hectares. The achievement figures are dominated by TR area of 67,441 hectares and TS area of 3,170 hectares. The increase in the area's width achievement is caused by independent sugar cane that was initially expected to be milled out of the Company's Sugar Mills, but in fact it went to the Company's Sugar Factory. The productivity of sugar cane per hectare was 102% of the 2016 budget of 82.4 tons/hectare, with the realization of sugar cane productivity per hectare in 2016 of 84.2 tons/hectare.

The sugar cane yields as a reference for the quality of the Company's sugar products reached 94%, between the 6.36% realization and 6.80% target of the yield. As mentioned above, the La-Nina climate anomaly caused the high rainfall during the dry season, which then affected the quality of sugar canes that were processed by the

yang diolah oleh Perseroan. Di samping itu, kondisi kebun tebangan yang sulit akibat hujan menyebabkan kapasitas dan kualitas tebangan menjadi turun serta biaya tebang meningkat.

Company. In addition, the difficult condition of harvesting due to rainfall caused the decreased capacity and quality of felling and the increased cost of felling.

Pada budidaya tembakau, realisasi luas perolehan lahan sebesar 1.078 hektar, tercapai 98% dibandingkan anggarannya yang sebesar 1.100 hektar. Realisasi panen dan produksi daun hijau dan kering rompos tahun 2016 sebesar 19.077 ton dan 1.736 ton; masing-masing mencatat pencapaian 90% dan 86% dari anggaran yang sebesar 21.270 ton dan 2.011 ton. Adanya deviasi antara realisasi dan anggaran pada produksi daun hijau TBN dan VBN disebabkan pertumbuhan tanaman yang kurang maksimal dan tingkat kematian yang tinggi pada tanaman TBN/VBN, dimana hal ini terjadi karena tingginya kandungan air dalam tanah selama proses pengolahan tanah dan pemeliharaan tanaman serta robohnya rumah naungan TBN/VBN oleh karena adanya hujan yang ekstrim dan disertai angin kencang. Sementara Rendemen budidaya tembakau mencapai 96%, antara realisasi tahun 2016 yang sebesar 9,08% dan anggaran yang sebesar 9,45%.

In tobacco cultivation, the realization of land acquisition of 1,078 hectares, reached 98% compared to the budget of 1,100 hectares. Realization of harvest and production of green and dry leaves in 2016 by 19,077 tons and 1,736 tons; each achieving 90% and 86% of the budget of 21,270 hectares and 2,011 hectares. There was a deviation between the realization and budget on the production of green leaves of TBN and VBN due to the less maximum growth of plants and high mortality rates on TBN/VBN plants, which was due to the high water content in the soil during the process of soil cultivation and plant maintenance and the collapse of houses shade TBN/VBN because of the extreme rain and accompanied by strong winds. While the tobacco yields reached 96%, between the realization of 2016 of 9.08% and budget of 9.45%.

Aspek kinerja keuangan mencatat sebagian besar pencapaian berada di bawah anggaran. Dengan capaian produksi seperti yang telah diuraikan di atas, Pendapatan Perseroan tahun 2016 mencatat pencapaian 72%, yaitu antara realisasi Pendapatan sebesar Rp2,26 triliun dan anggaran Rp3,15 triliun. Sementara Laba (Rugi) Tahun Berjalan tahun 2016 membukukan pencapaian hingga 144%, antara realisasi sebesar negatif Rp155,78 miliar dan anggaran perubahan yang sebesar negatif Rp107,96 miliar.

The financial performance aspect noted that most of the achievements were under budget. With production achievements as described above, the Company's revenue in 2016 recorded an achievement of 72%, between the realization of Rp 2.26 trillion and the budget of Rp 3.15 trillion in revenues. Meanwhile, Profit (Loss) of the Current Year 2016 booked an achievement of 144%, between the realization of negative Rp 155.78 billion and the revised budget of Rp 107.96 billion.

Kendala-kendala dan Tantangan Tahun 2016 serta Solusinya

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan masih menghadapi berbagai kendala, baik menyangkut aspek *on-farm* maupun aspek *off-farm*. Pada aspek *on-farm* kendala-kendala meliputi:

1. Ketidaktepatan dalam penyediaan agro input budidaya tanaman tebu baik menyangkut jumlah, waktu, dan kualitas termasuk kurangnya dukungan penyediaan varietas unggul, sehingga menyebabkan tingkat produktivitas gula rendah.

Constraints and Challenges in 2016 and the Solutions

In conducting its business, the Company still faced various obstacles, both concerning on-farm aspects and off-farm aspects. The constraints in the on-farm aspects including:

1. Inaccuracy in the provision of agro inputs of sugar cane cultivation both concerning quantity, time, and quality including lack of support for the supply of improved varieties, resulting in low levels of sugar productivity.

Laporan Direksi
Board of Directors Report

2. Keterbatasan area pengembangan yang relatif sesuai untuk tebu, terutama disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian dan kompetisi penggunaan lahan yang ketat dengan komoditi lain.
3. Kelangkaan tenaga kerja terampil di sektor budidaya, terutama untuk penebangan tebu. Fragmentasi area tebu petani di Jawa pada luasan yang sempit menyulitkan penggunaan alat-alat mekanisasi.
4. Kehilangan gula yang relatif besar selama proses transportasi tebu ke Pabrik Gula Perseroan karena manajemen tebang, muat, angkut (TMA) tebu yang belum baik.
5. Adanya pabrik gula baru di wilayah kerja Perseroan sehingga terjadi persaingan dalam hal perolehan bahan baku tebu.

Sementara pada aspek *off farm* kendala yang dihadapi meliputi:
1. Kapasitas giling yang rendah dan kurang efisien yang menyebabkan Pabrik Gula Perseroan kurang mampu bersaing sehingga memerlukan Investasi yang besar guna menghadapi persaingan dengan pabrik gula baru.
2. Keterbatasan dana untuk revitalisasi peralatan pabrik gula lama dan pengembangan hilirisasi produk berbasis tanaman tebu.

Manajemen telah mengupayakan antisipasi sebagai langkah strategis untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, meliputi:
1. Investasi bagi revitalisasi pabrik gula untuk mendukung program hilirisasi industri gula dalam hal kecukupan ampas sebagai bahan bakar *co-generation*; termasuk menyiapkan sumber pendanaan guna mendukung investasi tersebut.
2. Perluasan lahan tebu di areal pengembangan dengan mengembangkan wilayah pengembangan Tuban, Bojonegoro dan Madura.
3. Menerapkan praktek pertanian yang presisi *(precision agriculture)* untuk menjamin ketepatan pemberian/ penyediaan agro input budidaya tanaman tebu baik menyangkut jumlah, waktu, dan kualitas
4. Penerapan *core sampler* guna meningkatkan kepercayaan terhadap petani dalam rangka menghadapi persaingan perolehan bahan baku tebu.

2. Limitations of development areas that were relatively suitable for sugar cane, mainly due to the conversion of agricultural land and tight land use competitions with other commodities.
3. The scarcity of skilled labor in the cultivation sector, especially for sugar cane logging. Fragmentation of the sugar cane area of farmers in Java in a narrow area makes it difficult to use mechanization tools.
4. Relatively large sugar losses during the process of sugar cane transportation to the Company's Sugar Mills due to poor harvest, load, haul (TMA) cane management.
5. The existence of new sugar mills in the Company's work area, resulting in competition in the acquisition of raw materials of sugar cane.

While the constraints encountered in the off-farm aspects including:
1. Low and less efficient milling capacity that caused the Company's Sugar Mills to be less competitive, requiring large Investment in order to face competition with new sugar mills.
2. Limited funds for the revitalization of old sugar mill equipment and the development of downstream sugar cane-based products.

Management has strived for anticipation as a strategic step to overcome these obstacles, including:

1. Investments for the revitalization of sugar mills to support the downstream sugar industry program in terms of sufficiency of pulp as co-generation fuel; including preparing funding sources to support the investment.
2. Expansion of sugar cane fields in the development area by developing Tuban, Bojonegoro and Madura areas.
3. Implementing precision agriculture practices to ensure the accuracy of the provision of agro inputs of sugar cane cultivation in terms of quantity, time and quality
4. Implementating core sampler to increase the confidence of farmers in order to face competition in the acquisition of raw materials of sugar cane.

Analisis Prospek Usaha dan Strategi Mencapainya

Tahun 2017 akan menjadi tahun penuh tantangan bagi Perseroan. Dengan catatan kerugian pada kinerja keuangan di tahun 2016, Perseroan akan melakukan beberapa pembenahan untuk dapat mengembalikan performanya ke *level* yang terbaik.

Pada sasaran korporasi, Perseroan menargetkan pencapaian laba di tahun 2017 sebelum pajak (konsolidasi) sebesar Rp127,65 miliar atau 169% dibandingkan realisasi 2016 yang sebesar negatif Rp216,84 miliar. Total aset sebesar Rp13,31 triliun atau 102% dibandingkan Realisasi tahun 2016 yang sebesar Rp13,06 miliar. Sementara tingkat kesehatan perusahaan mendapatkan skor "A" atau lebih baik dibandingkan tingkat kesehatan pada 2016 yang mendapatkan skor "BBB".

Berdasarkan analisis SWOT yang didasarkan pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perseroan, manajemen membagi strategi yang sesuai untuk ditempuh pada tahun 2017 ke dalam 4 (empat) aspek, yaitu pengembangan produk, pengembangan pasar, *Concentric Diversification*, dan kombinasi berbagai strategi. Keempat aspek strategi ini diharapkan mampu memberikan peningkatan kinerja bagi Perseroan.

Business Prospect Analysis and Achieving Strategy

The year 2017 will be a challenging year for the Company. With a record loss on financial performance in 2016, the Company will make some improvements to be able to return its performance to the best level.

In corporate objectives, in 2017 the Company targeted the achievement of pre-tax profit (consolidated) of Rp127.65 billion or 169% compared to Realization 2016 of negative Rp 216.84 billion. Total assets of Rp13.31 trillion or 102% compared to Realization in 2016 of Rp13.06 billion. While the health level of the company get the score of "A" or better than the level of health in 2016 of score "BBB".

With the SWOT analysis based on the Company's Long Term Plan (RJPP), management divided the appropriate strategy for 2017 into 4 (four) aspects: product development, market development, concentric diversification, and a combination of strategies. The four aspects of this strategy are expected to provide improved performance for the Company.

Pengembangan Produk *Product Development*	Pengembangan Pasar *Market Development*	*Concentric Diversification*	Kombinasi Berbagai Strategi *Combination of Strategies*

Pengembangan produk ditempuh dengan meningkatkan penjualan melalui perbaikan produk atau jasa yang telah ada atau dengan mengembangkan produk atau jasa baru. Pengembangan pasar, yaitu dengan memperkenalkan produk atau jasa lama ke daerah geografis yang baru. *Concentric Diversification*, yaitu dengan menambah produk atau jasa baru yang hampir sama atau mendekati *core business* Perseroan; serta kombinasi berbagai strategi yang menggabungkan berbagai macam strategi di atas dengan mengacu pada strategi EDO (Efisiensi, Diversifikasi dan Optimalisasi). Tujuan penerapan strategi ini adalah untuk menekan biaya produksi per unit dan menciptakan *value added* terhadap produk samping terutama tetes, dan yang tidak kalah penting adalah *supply energy* (*co-generation*).

Product development is accomplished by increasing sales through existing products or services improvement or new products or services development. Market development, by introducing old products or services to new geographical areas. Concentric Diversification, by adding new products or services that are almost the same or close to the Company's core business; as well as a combination of strategies that combine the various strategies above by referring to the EDO strategy (Efficiency, Diversification and Optimization). The objective of this strategy is to reduce the production cost per unit and create value added to the side product especially the drops, and equally important is supply energy (co-generation).

Laporan Direksi
Board of Directors Report

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2016

Tahun 2016 menjadi tahun ketiga bagi Perseroan untuk menyandang status sebagai entitas usaha eks-BUMN. Dengan status tersebut, Perseroan bergerak sebagai layaknya perusahaan non-BUMN lainnya, namun tetap melekatkan berbagai perangkat Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang diwajibkan oleh pemegang saham, Kementerian BUMN.

Perangkat GCG Perseroan terus dikembangkan sejalan dengan proses *Holding* dan penataan organisasi yang dilakukan dalam *Holding* BUMN Perkebunan. Organ GCG yang sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah berjalan cukup baik; Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Ketiga organ ini, didukung oleh beberapa perangkat lainnya seperti Komite-komite, Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan, telah berjalan dengan baik.

Pengembangan GCG Perseroan di tahun 2016 difokuskan pada pengembangan dan penyelarasan *softstructure* berupa pedoman-pedoman dan piagam serta *Standard Operational Procedure* (SOP) yang sebelumnya telah ada. Pedoman GCG, Kode Etik atau *Code of Conduct* (CoC), maupun *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi serta piagam-piagam. Manajemen juga mengupayakan sosialisasi Kode Etik kepada seluruh karyawan dengan tujuan adanya kesatuan bahasa dalam memahami Kode Etik sebagai pedoman perilaku.

Salah satu fokus dari penerapan GCG adalah pertumbuhan bersama dan harmonis antara Perseroan dan pemangku kepentingan. Perseroan menaruh perhatian yang besar terhadap aspek ini, dimana BUMN memiliki peran sebagai "*Agent of Development*" atau "Agen Pembangunan". Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Program CSR Perseroan ditujukan kepada petani dan masyarakat di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Berbagai bantuan yang ada disalurkan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), sebuah program yang diinisasi oleh Kementerian BUMN untuk menekankan keterlibatan entitas usaha untuk dapat tumbuh bersejajar dengan aspek kesejahteraan masyarakat.

Development of Good Corporate Governance Implementation in 2016

The year 2016 became the third year for the Company to hold the status as a former SOE's business entity. Under this status, the Company operated as other non-SOE companies, but still attached various Good Corporate Governance (GCG) tools required by shareholders, Ministry of SOEs.

The Company's GCG tools continue to be developed in line with the process of Holding and organizational structuring conducted in Holding BUMN Perkebunan. GCG Organs that comply with Regulation no. 40 Year 2007 on Limited Liability Company has been running quite well; General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners and Board of Directors. These three organs, supported by several other tools such as Committees, Internal Audit and Corporate Secretary, have been functioning properly.

The Company's GCG development in 2016 focused on the development and synchronization of softstructures in the form of guidelines and charters and the existing Standard Operational Procedure (SOP). GCG Guidelines, Code of Conduct (CoC), as well as Board Manual of Board of Commissioners and Board of Directors and charters. Management also sought to socialize the Code of Conduct to all employees with the aim of creating an unified language in understanding the Code as a code of conduct.

One of the main focus of the GCG implementation is the mutual and harmonious growth between the Company and its stakeholders. The Company pays great attention to this aspect, where SOEs have an "Agent of Development" role. This is realized through the implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) program.

The Company's CSR program was aimed at farmers and communities in East Java and surrounding areas. Various assistances were channeled through the Partnership and Community Development Program (PCDP), a program introduced by the Ministry of SOEs to emphasize the involvement of business entities to grow in alignment with the community's welfare aspect.

Selain program CSR yang dilakukan Perseroan, konsep Sinergi Antar BUMN turut mendorong pelaksanaan program CSR dengan lebih tepat guna dan tepat sasaran. Sinergi Perseroan dengan beberapa entitas BUMN di tahun 2016 seperti PT Pertamina (Persero) yang menyalurkan dana kemitraan kepada petani mitra binaan Perseroan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada petani binaan Perseroan, serta pelatihan mekanika kepada petani hasil kerjasama Perseroan dengan PT Taspen (Persero). Sinergi ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dan langsung kepada kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Di samping itu, pelaksanaan program CSR Perusahaan juga dilakukan dengan membangun hubungan yang harmonis bersama karyawan, konsumen dan membangun lingkungan hidup yang memiliki aspek berkelanjutan. Hubungan dengan karyawan dilakukan melalui pemenuhan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, serta pemenuhan hak-hak karyawan. Demikian pula kepada konsumen, Perseroan memberikan produk yang memenuhi standar kesehatan dan standar kualitas yang telah ditetapkan.

Di bidang lingkungan hidup, Perseroan menjalankan proses produksi dengan mengedepankan pengolahan produksi hasil bumi yang memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh regulator. Pabrik Perseroan yang terkenal tertata rapi dan bersih telah menjadi *benchmark* bagi perusahaan lainnya untuk dapat menyelenggarakan proses produksi yang baik. Di samping itu, Perseroan juga memenuhi sertifikasi di bidang lingkungan hidup, dengan tujuan menciptakan standarisasi atas pengelolaan lokasi produksi yang sesuai dengan standar internasional.

Melalui seluruh pengembangan GCG dan terjalinnya hubungan dengan pemangku kepentingan, Perseroan berharap dapat membentuk citra korporasi yang baik, yang akan menjadi fondasi bagi Perseroan untuk dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

Perubahan Komposisi Anggota Direksi

Di tahun 2016 terjadi pergantian susunan Direksi sebagai akibat adanya perubahan nomenklatur organisasi Perseroan, dari 5 (lima) direktorat menjadi 4 (empat)

Besides the CSR programs conducted by the Company, the concept of Sinergy of SOEs also encouraged the implementation of CSR programs to be more beneficial and effective. The synergy of the Company with several BUMN entities in 2016 such as PT Pertamina (Company) that distributes partnership funds to the partner farmers of the Company, the distribution of Credit for Businesses (CB) by PT Bank Negara Indonesia (Company) Tbk to the Company's farmers, and mechanics training to Farmers in cooperation with PT Taspen (Company). This synergy was expected to give a real and direct impact to the community's socio-economic life.

Apart from that, the implementation of Company's CSR programs is also done by building a harmonious relationship with employees, consumers and creating a sustainable environment. Relationship with employees is done through the fulfillment of Employment, Health and Safety, as well as the fulfillment of the employee's rights. Similarly to the consumer, the Company provides products that meet health standards and quality standards that have been set.

In the field of environment, the Company runs the production process by prioritizing the agricultural products processing that meet the standards set by the regulator. The Company's neat and well-organized factories have become benchmarks for other companies to carry out a good production process. In addition, the Company also meets the environmental certification, with the aim of creating standardization of production site management in line with international standards.

Through all GCG development and stakeholder relationship building, the Company expects to establish a good corporate image, which will be the foundation for the Company to continue to grow in sustainability.

Board of Directors' Change of Composition

In 2016 there was a change of the Board of Directors, resulted from the nomenclature of the Company's organization, from 5 (five) directorates to 4 (four)

Laporan Direksi
Board of Directors Report

direktorat. Per 31 Desember 2015, terdapat 5 (lima) direktorat dengan masing-masing direkturnya, yaitu:

directorates. As of December 31, 2015, there were 5 (five) directorates with each directors, namely:

Direktur Utama	Subiyono	*President Director*
Direktur Produksi	Tarsisius Sutaryanto	*Director of Production*
Direktur Keuangan	Muhammad Hanugroho	*Director of Finance*
Direktur Perencanaan & Pengembangan	Moch Sulton	*Director of Planning and Development*
Direktur Sumber Daya Manusia & Umum	Djoko Santoso	*Director of Human Resources (HR) and General Affairs (GA)*

Perubahan nomenklatur dari 5 direktorat menjadi 4 direktorat sesuai Surat Kementrian BUMN No. SK-150/MBU/07/2016 jo 3.00/SKPTS/R/19/2016 tanggal 15 Juli 2016 menjadi sebagai berikut:

The changes in the nomenclature from 5 into 4 Directorates was in accordance with Minister of SOEs Decree No. SK-150/MBU/07/2016 jo 3.00/SKPTS/R/19/2016 dated July 15, 2016 are as follow:

Direktur Utama	Subiyono	*President Director*
Direktur Operasional	Tarsisius Sutaryanto	*Director of Operation*
Direktur Komersil	Muhammad Hanugroho	*Director of Commercial*
Direktur Sumber Daya Manusia & Umum	Djoko Santoso	*Director of Human Resources and General Affairs (GA)*

Pada awal tahun 2017, terjadi perubahan nomenklatur dari 4 direktorat menjadi 3 direktorat sesuai surat Kementerian BUMN No. SK-35/MBU/02/2017 tanggal 24 Februari 2017 dan Surat *Holding* PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. 3.06/SKPTS/R/18/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang mengesahkan perubahan nomenklatur tersebut, terdapat pergantian susunan Direksi, dimana Direktur Utama, Subiyono diberhentikan dengan hormat, untuk kemudian digantikan oleh Dwi Satriyo Annurogo; Direktur Operasional, Tarsisius Sutaryanto diberhentikan dengan hormat, untuk kemudian digantikan oleh Mustaqim; Direktur Sumber Daya Manusia & Umum, Djoko Santoso diberhentikan dengan hormat, dimana direktorat ini kemudian dilebur ke dalam direktorat lainnya; sementara Direktur Komersil tetap dijabat oleh Muhammad Hanugroho.

In the biginning of 2017, the change in the nomenclature from 4 Directorates into 3 Directorates was in accordance with Minister of SOEs Decree No. SK-35/MBU/02/2017 dated February 24, 2017 and Letter from Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. 3.06/SKPTS/R/18/2017 dated February 20, 2017 which authorized the changing of nomenclature, as such, a change in composition of the Board of Directors, in which the President Director, Subiyono was dismissed with respect, and replaced by Dwi Satriyo Annurogo; the Director of Operations, Tarsisius Sutaryanto was dismissed with respect, and replaced by Mustaqim; the Director of Human Resources & General Affairs, Djoko Santoso was dismissed with respect, in which the said directorate was then merged into other directorate; in the meantime, the Director of Commercial is currently held by Muhammad Hanugroho.

Terkait perubahan nomenklatur dan susunan Direksi seluruhnya merupakan keputusan pemegang saham Perseroan, yaitu PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Kementerian BUMN.

Changes of the nomenclature and the composition of the Board of Directors were entirely decided by the Company's shareholders, namely PT Perkebunan Nusantara III (Persero) and the Ministry of SOEs.

Penutup

Atas kepercayaan yang telah diberikan, Direksi menyampaikan rasa terima kasih kepada pemegang saham Perseroan. Direksi juga menyampaikan rasa terima kasih atas kerjasama dan masukan dari Dewan Komisaris sebagai bagian dari tugas pengawasan. Kepada manajemen entitas anak dan seluruh karyawan Perseroan, Direksi memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras dan kerja cerdas yang telah ditunjukkan. Demikian pula kepada rekanan dan mitra bisnis, ijinkan Direksi menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang ada. Semoga sinergi ini akan dapat terus berjalan dan memberikan landasan bagi Perseroan untuk dapat tumbuh di masa mendatang.

Surabaya, 20 April 2017

Closing Statement

Upon the given trust, the Board of Directors would like to express gratitude to the Company's shareholders. The Board of Directors also express our gratitude for the cooperation and input from the Board of Commissioners as a part of the supervisory duties. To the management of subsidiaries and all of Company's employees, the Board of Directors would like to give high appreciation for the hard and creative works that have been demonstrated. As for partners and business partners, allow the Board of Directors to say thank you for the cooperation. Hopefully this synergy will remain intact and provide a strong foundation for the Company to grow in the future.

Surabaya, April 20, 2017

Atas Nama Direktur Utama
On Behalf of the Board of Directors

Dwi Satriyo Annurogo
Direktur Utama
President Director

Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2016 PT Perkebunan Nusantara X

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Perkebunan Nusantara X tahun buku 2016 sudah dimuat secara lengkap dan bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 20 April 2017

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Rudi Wibowo
Komisaris Utama
President Commissioner

Sukardi Rinakit
Komisaris
Commissioner

Y.B Priyatmo Hadi
Komisaris
Commissioner

Arvan Rivaldy Rebion Siregar
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Statement of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the Resposibility for the 2016 Annual Report of PT Perkebunan Nusantara X

We, the undersigned, declare that the information in the 2016 Annual Report of PT Perkebunan Nusantara X is presented in its entirity and we are fully responsible for the correctness of the contents of this 2016 Annual Report.

The above statement is made truthfully

Jakarta, April 20, 2017

Direksi
Board of Directors

Dwi Satriyo Annurogo
Direktur Utama
President Director

Mustaqim
Direktur Operasional
Director of Operations

Muhammad Hanugroho
Direktur Komersil
Director of Commercial

Profil Perusahaan

Company Profile

Melalui entitas anak, PTPN X melakukan diversifikasi usaha yang sejalan dengan kompetensi inti PTPN X, dengan harapan mampu menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan.

Through its Subsidiaries, PTPN X diversifies its business in line with the core competencies of PTPN X, with the hope that it will create an added value in a sustainable manner.

Informasi Umum Tentang PTPN X

General Information of PTPN X

Informasi Umum Tentang PTPN X
General Information of PTPN X

Nama Perusahaan *Name of the Company*	:	PT Perkebunan Nusantara X
Cikal Bakal *The Embryo*	:	Nasionalisasi aset Belanda berdasarkan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda *Nationalization of Dutch Assets based on Law no. 86 of 1958 regarding to nationalization of Dutch Owned Enterprises*
Tanggal Pendirian *Establishment Date*	:	11 Maret 1996 *11 March 1996*
Dasar Hukum Pendirian *Legal Basis of Establishment*	:	Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas No. 43 tanggal 11 Maret 1996 dibuat di hadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C28338.HT.01.01. TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 020/BH.13.01/ Sept/1996 tanggal 18 September 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1996, Tambahan No. 8681 *Deed of Establishment of Limited Liability Company No. 43 dated March 11, 1996 made by Harun Kamil, S.H., notary in Jakarta and has approved by the Minister of Judicial Affairs based on Decision Letter No. C28338.Ht.01.01.TH.96 registered into the Limited Liability Company Registry No. 020/ BH.13.01/Sept/1996 dated September 18th, 1996, and has been published on State Gazette of the Republic of Indonesia No. 81 dated 8 October 1996, additional No. 8681*
Bidang Usaha *Line of Business*	:	Budidaya tanaman, produksi hasil tanaman, perdagangan dan pemasaran, pengembangan usaha bidang perkebunan serta usaha lain yang menunjang usaha pokok Perusahaan. *Crop cultivation, crop production, trade and marketing, plantation business development and other business that support the Company's main business.*
Kegiatan Usaha yang Dilakukan *Business Activities*	:	• Industri gula • Tetes • Industri tembakau • Rumah Sakit • Lain-lain, mencakup: - Bioetanol - Jasa *Cutting Bobbin* - Industri Karung Plastik, *Innerbag* dan *Waring* - Makanan/sayuran beku • Sugar industry • Molasses • Tobacco industry • Hospital • Others related to: - Bioetanol - Cutting Bobbin Service - Plastic Bag, Innerbag and Waring industry - Frozen Food/Vegetables
Jaringan Usaha *Business Networks*	:	11 Pabrik Gula, 3 Kebun Tembakau, serta 4 anak usaha di bidang Bioetanol, Karung Plastik, *Innerbag* dan *Waring*, Rumah Sakit, dan Makanan/Sayuran beku *11 Sugar Mills, 3 Tobacco Farms, 4 Subsidiaries in Bioetanol, Plastic and Fiber, Hospital, and Frozen food/vegetables.*
Kepemilikan *Ownership*	:	• Negara Republik Indonesia 10% *The Republic of Indonesia 10%* • PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 90% *PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 90%*
Modal Dasar *Authorized Capital*	:	Rp7.300.000.000.000
Modal Belum Disetor *Non-Paid up Capital*	:	Rp5.454.404.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor *Issued and Fully Paid-up Capital*	:	Rp1.845.596.000.000
Pemeringkatan Obligasi *Bond Rating*	:	BBB+ (per 31 Desember 2016) *BBB+ (as of December 31, 2016)*
Jumlah Karyawan *Total Employeesz*	:	9.885 orang *9.885 person*
Alamat *Address*	:	Jl. Jembatan Merah No. 3 – 11 Surabaya 60175 Jawa Timur, Indonesia
Telepon *Phone*	:	+62 31 3523143 (*hunting*)
Email	:	contact@ptpn10.co.id
Situs Web *Official Website*	:	http://ptpn10.co.id

Riwayat Singkat PTPN X

Brief History of PTPN X

KILAS SEJARAH PTPN X

PT Perkebunan Nusantara X ("Perseroan") memulai riwayatnya sebagai sebuah perusahaan milik Belanda yang berada dalam wilayah Republik Indonesia, yang kemudian dinasionalisasi dan dinyatakan menjadi miliki penuh dan bebas Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda yang disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1958, Perseroan diubah menjadi Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Nasional. Landasan dari perubahan ini adalah timbulnya kesadaran Pemerintah Republik Indonesia sebagai bentuk percepatan atas pelaksanaan dasar-dasar ekonomi nasional dengan menasionalisasikan cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Pemerintah Negara Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1963 Jo. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1963 sebagai tindak lanjut dari program nasionalisasi perusahaan milik Belanda khususnya yang bergerak di bidang Pertanian dan Perkebunan. Dengan landasan hukum ini, status Perseroan menjadi Perusahaan Perkebunan Gula Negara. Bersama dengan peraturan ini dibentuk pula Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara (BPU – PPN) Gula dan Karung Goni untuk melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan dan pengawasan pekerjaan Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan Negara Karung Goni.

Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 1968 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Gula dan Karung Goni, Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Karet, Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman dan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Tembakau kemudian dibubarkan. Dasar pemikiran disahkannya Peraturan Pemerintah tersebut secara umum sebagai usaha untuk menertibkan, menyempurnakan dan menyederhanakan aparatur pemerintah. Secara khusus, Peraturan Pemerintah tersebut juga menjadi awal pelaksanaan asas delegasi kendali dan penyederhanaan birokrasi pada perusahaan-perusahaan milik Negara.

PTPN X AT A GLANCE

PT Perkebunan Nusantara X ("Company") began its history as a Dutch-owned enterprise located within the area of Republic of Indonesia, which then was subjected to nationalization program and stated as fully and independently owned by Government of Republic Indonesia. In accordance with Law Number 86 of 1958 on Nationalization of Dutch-owned Enterprises, authorized in Jakarta on December 27th, 1958, the Company was then transformed into State-Owned Agriculture/Plantation Company. The rationale behind this transformation was the awareness from Government of Republic of Indonesia to accelerate the establishment of national economic foundation by means of nationalizing production areas that were important for general public and had related to the welfare of Indonesian people.

The Government of Indonesia then issued Government Regulation No. 1 of 1963 juncto Government Regulation No. 2 of 1963 as a follow up to the nationalization of Dutch-owned Enterprises, especially those related with Agriculture and Forestry industries. By this legal basis, the status of the Company became State-Owned Sugar Company. This regulation also became the legal establishement basis for General Governing Body of State-Owned Sugar Plantation and Gunny Sacks (BPU-PPN) for Sugar and Gunny Sacks as a central coordinator to coordinate the operation and supervision of State-Owned Sugar Plantation Company and State-Owned Gunny Sacks Company.

In accordance with Government of Republic Indonesia Regulation No. 13 of 1968 regarding dismissal of General Governing Body of State-Owned Sugar Plantation and Gunny Sacks, General Governing Body of State-Owned Rubber Company, General Governing Body of State-Owned Plantation Companies and General Governing Body of State-Owned Tobacco Companies, the BPU-PPN was then disbanded. This was done in general to regulate, improve and simplify government bodies. Specifically, the Government Regulation also became as the starting point that led to control delegation and simplification of State-Owned Enterprises.

Riwayat Singkat PTPN X
Brief History of PTPN X

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1973 untuk pertimbangan efisiensi dan efektivitas usaha, Perusahaan Negara Perkebunan XXI dan Perusahaan Negara Perkebunan XXII mengalami pengalihan bentuk menjadi PT Perkebunan XXI–XXII (Persero) sesuai daftar keputusan Menteri Kehakiman tanggal 1 Februari 1974 No. YA-5/28/9. Pada saat pengalihan status tersebut, PT Perkebunan XXI–XII (Persero) membawahi 12 Pabrik Gula dan 2 (dua) Rumah Sakit .

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas Badan Usaha Milik Negara di lingkungan Departemen Pertanian, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1996 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 1996, PT Perkebunan XIX (Persero) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1990, PT Perkebunan XXI-XXII (Persero) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1973, dan PT Perkebunan XXVII yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1972, dilebur menjadi PT Perkebunan Nusantara X (Persero).

Berdasarkan peleburan tersebut didirikan suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perusahaan perseroan (Persero) terbatas, berkedudukan di Kotamadya Surabaya Propinsi Jawa Timur, dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X atau disingkat PTPN X (Persero) berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas No. 43 tanggal 11 Maret 1996 dibuat di hadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C28338.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 020/BH.13.01/Sept/1996 tanggal 18 September 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1996, Tambahan No. 8681. Melalui Akta Pendirian tersebut, Perseroan resmi berdiri sebagai entitas usaha di Indonesia dengan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana Negara Republik Indonesia memiliki 100% saham Perseroan.

Di tahun 2014, kepemilikan saham Perseroan mengalami perubahan, sejalan dengan pembentukan *Holding* BUMN yang diharapkan mampu mendorong kinerja BUMN di setiap sektornya. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Pursuant to Government Regulation No. 23 of 1973 as a consideration to the business efficiency and effectiveness, Perusahaan Negara Perkebunan XXI and Perusahaan Negara Perkebunan XXII were transformed into PT Perkebunan XXI-XXII (Persero) based on Minister of Justice Decree dated February 1, 1974 No. YA-5/28/9. At the time of this transformation, PT Perkebunan XXI–XII (Persero) supervised 12 sugar mills and 2 hospitals.

In order to enhance efficiency and effectiveness of State-Owned Enterprise that came under the purview of Department of Agriculture, based on Government Regulation No. 15 of 1996 as stipulated in Jakarta on February 14, 1996, PT Perkebunan XIX (Persero) which was established under Government Regulation No. 13 of 1990, PT Perkebunan XXI – XXII (Persero) which was established under Government Regulation No. 23 of 1973 and PT Perkebunan XXVII which was established under Government Regulation No. 7 of 1972, were merged into PT Perkebunan Nusantara X (Persero).

As a result of those mergers, an Indonesian legal entity was formed as “Perusahaan Perseroan (Persero) Terbatas”, domiciled in Surabaya Regency, East Java Province under the name of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X, or PTPN X (Persero), based on Deed of Establishment of Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas No. 43 dated March 11, 1996 made in presence of Harun Kamil, S.H., Notary in Jakarta and has been granted authorization from Minister of Justice Republic of Indonesia pursuant to Decree No.C2-8338. HT.01.01.TH.96 dated August 8, 1996 and registered on the Company Register No.020/ BH.13.01/Sept/1996 dated September 18, 1996, as announced on National Gazette of Republic Indonesia No. 81 dated October 8th, 1996, appendix No. 8681. Through the Deed of Establishment, the Company was officially established as a business entity in Indonesia with the status as State-Owned Enterprises (BUMN), in which the Republic of Indonesia owns 100% of the Company's shares.

In 2014, the Company's share ownership changed, in line with the formation of BUMN Holding which is expected to boost the performance of SOEs in each sector. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ("PTPN III") was

Riwayat Singkat PTPN X
Brief History of PTPN X

("PTPN III") dipilih menjadi *Holding* BUMN di sektor perkebunan, dimana Perseroan menjadi anak usaha dari PTPN III. Sejak pembentukan *Holding* tersebut, kepemilikan Negara Republik Indonesia atas saham Perseroan menjadi 10%, sementara sisanya 90% dimiliki oleh PTPN III.

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah, terakhir kali sebagaimana dimaksud dalam :

1. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. 48 tanggal 13 Agustus 2008 dibuat di hadapan Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU45899.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 16 September 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0061814. AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 16 September 2009.
2. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. 36 tanggal 27 Juli 2010 dibuat di hadapan Sri Eliana Tjahjoharto, S.H. Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar sesuai dengan surat No. AHUAH.01.10-22426 tanggal 30 Agustus 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-065129. AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010,
3. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Negara BUMN tentang Peningkatan Modal Dasar, Penambahan Modal Disetor, dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 18 tanggal 18 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Sri Eliana Tjahjoharto, S.H., Notaris di Surabaya dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU04572. AH.01.02 tahun 2013 tanggal 6 Februari 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0007931. AH.01.09. tahun 2013 tanggal 6 Februari 2013.
4. Pada tanggal 23 Oktober 2014 terdapat perubahan Anggaran Dasar PTPN X tahun 2014 No. 30 Tahun 2014 dengan Notaris Nanda Fauz Iwan SH., MKn., mengenai ditunjuknya PTPN X sebagai salah satu anak perusahaan *Holding* PTPN III (Persero).
5. Pada tanggal 14 Maret 2016 terdapat perubahan Anggaran Dasar PTPN X untuk maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; modal; tugas, wewenang dan kewajiban Direksi.

selected to be the BUMN Holding in the plantation sector, where the Company became a subsidiary of PTPN III. Since the establishment of Holding, the ownership of the Republic of Indonesia on the Company's shares to 10%, while the remaining 90% owned by PTPN III.

The Company's articles of association have been amended several times, lastly as referred in:

1. Deed of Minister of State-Owned Enterprise Decree No. 48 dated August 13, 2008 made in presence of Dyah Ambarwaty Setyoso, SH., Notary in Surabaya, as approved by Minister of Law and Human Rights pursuant to Decree No. AHU-45899.AH.01.02 of 2009 dated September 16, 2009 and registered on Company List No. AHU-0061814.AH.01.09. of 2009 dated September 16, 2009.
2. Deed of Minister of State-Owned Enterprise Decree No. 36 dated July 27, 2010 made in presence of Sri Eliana Tjahjoharto, SH., Notary in Surabaya as granted approval for Articles of Association amendment based on Letter No. AHUAH.01.10-22426 dated August 30, 2010 regarding Company's Data Amendment Notification Approval, and registered on Company List No. AHU-0065129.AH.01.09. of 2010 dated August 30, 2010,
3. Deed of Minister of State-Owned Enterprise regarding to Addition of Capital and Addition of Paid-In Capital, as well as Amendment of Articles of Association No. 18 dated October 18, 2012 made in presence of Sri Eliana Tjahjoharto, SH., Notary in Surabaya and has been approved by Minister of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-04572.AH.01.02. of 2013 dated February 6, 2013 and has been registered on Company Register No. AHU-0007931.AH.01.09. of 2013 dated February 6, 2013, and
4. On October 23, 2014 there were changes in the Articles of Association of PTPN X 2014 No. 30, 2014 made in presence Notary Nanda Fauz Iwan SH., MKn. regarding the appointment of PTPN X as one of the subsidiaries of PTPN III (Persero) as the holding company.
5. On March 14, 2016, there was amendments to the Articles of Association of PTPN X regarding the Company's purpose and objectives and business activities; capital; duties and responsibilities of the Board of Directors.

PERUBAHAN NAMA PERSEROAN

Di tahun 2014, kepemilikan saham Perseroan mengalami perubahan, sejalan dengan pembentukan *Holding* BUMN. Sejak pembentukan *Holding* tersebut, Perseroan melepas status Badan Usaha Milik Negara dan merubah namanya, dari PT Perkebunan Nusantara X (Persero) menjadi PT Perkebunan Nusantara X.

CHANGES OF COMPANY NAME

In 2014, the Company's share ownership changed, in line with the formation of SOE Holding. Since the formation of the holding, the Company has released the status as State-Owned Enterprise and changed its name, from PT Perkebunan Nusantara X (Perseo) to PT Perkebunan Nusantara X.

Maksud dan Tujuan Pendirian PTPN X

Purpose and Objective of the Establishment of PTPN X

Tujuan pendirian Perseroan seperti tercantum dalam Akte Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No.11 tanggal 14 Maret 2016 adalah melakukan usaha di bidang agrobisnis dan agroindustri serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip entitas usaha.

Kegiatan usaha untuk mencapai tujuan Perseroan antara lain :

1. Pengusahaan budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sehubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut.
2. Produksi meliputi pengolahan hasil tanaman sendiri maupun pihak lain menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi serta produksi turunannya.
3. Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
4. Pengembangan usaha bidang perkebunan, agro wisata, agro bisnis, dan agro *forestry*.
5. Usaha lain yang menunjang usaha pokok Perseroan.

As stated in Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn. No.11 dated March 14, 2016, the objectives of establishing the Company is to conduct business in agro-business and agro-industry and to optimize the utilization of Company's resources to produce goods and/services of high quality and strong competitiveness, whilst seeking profit in order to increase the value of the company with the principles of business entities.

The business activities of the Company to achieve the objectives include:

1. Concession of plants cultivation covering the opening and processing of land, nursery, planting, and maintenance, and harvesting of crops as well as carrying out other activities related to the plants cultivation.
2. Production covering processing of own or other parties' crops into semi-finished goods and/or finished goods and production of its derivatives.
3. Trading covering marketing activities of various production products and conducting other trading activities related to the Company's business.
4. Development of business in the field of plantation, agro-tourism, agro-business, and agro-forestry
5. Other business that supports the company.

Bidang Usaha
Line of Business

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah budidaya tanaman, produksi hasil tanaman, perdagangan dan pemasaran, pengembangan usaha bidang perkebunan serta usaha lain yang menunjang usaha pokok Perusahaan.

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN

Perseroan memiliki lini usaha utama di bidang usaha industri gula dan tembakau. Pada kedua segmen tersebut, Perseroan melakukan penjualan melalui persaingan bebas dan terkoordinir. Disamping kedua segmen usaha utama, Perseroan juga menjalankan usaha industri tetes, Industri Karung Plastik, *Innerbag* dan *Waring*, jasa kesehatan yaitu rumah sakit, jasa *Cutting Bobbin*, industri bioetanol serta makanan/sayuran beku. Semua dijalankan melalui anak perusahaan yang dimiliki oleh Perseroan.

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON THE ARTICLES OF ASSOCIATION

Based on Article 3 of the Company's articles of association, the scope of the Company's business activities is plant cultivation, crop production, trade and marketing, development of plantation business and other businesses supporting the Company's main business.

BUSINESS ACTIVITIES UNDERTAKEN

The Company's main line of business is sugar and tobacco industry. In both segments, the company sells through free and coordinated competition. Besides the two main business segments, the Company also runs the molasses industry, Plastic Bag, Innerbag, and Waring Industry, health services (hospital), Cutting Bobbin services, bioethanol industry and frozen food/vegetables, managed by its subsidiaries.

Industri Gula	*Sugar industry*
Tetes	*Molasses*
Industri Tembakau	*Tobacco industry*
Rumah Sakit	*Hospitals*
Lain-lain:	*Miscellaneous:*
› Bioetanol	› *Bioethanol*
› Jasa *Cutting Bobbin*	› *Cutting Bobbin service*
› Industri Karung Plastik, *Innerbag* dan *Warring*	› *Plastic Bag, Innerbag, and Waring Industry*
› Makanan/Sayuran Beku	› *Frozen food/vegetables*

Produk dan Jasa
Product and Services

INDUSTRI GULA

Perseroan menjalankan usaha pada segmen industri gula melalui 11 Pabrik Gula yang dimiliki oleh Perseroan. Sebagai bahan baku dari PG tersebut, Perseroan memanfaatkan produksi dari kebun tebu milik Perseroan ditambah dengan produksi dari kebun tebu milik petani gula. Pabrik Gula milik Perseroan yaitu :

1. Pabrik Gula Watoetoelis di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
2. Pabrik Gula Toelangan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
3. Pabrik Gula Kremboong di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
4. Pabrik Gula Gempolkrep di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
5. Pabrik Gula Djombang Baru di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
6. Pabrik Gula Tjoekir di Kabupaten Jombang Jawa Timur.
7. Pabrik Gula Lestari di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
8. Pabrik Gula Meritjan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
9. Pabrik Gula Pesantren Baru di Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
10. Pabrik Gula Ngadiredjo di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
11. Pabrik Gula Modjopanggoong di Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Pemasaran produk gula Perseroan dilakukan di pasar dalam negeri melalui persaingan bebas dan terkoordinir (pasar lelang dan negosiasi), sedangkan pemasaran produk tetes dilakukan kepada industri (*end user*) dan melalui mekanisme tender.

Melalui 11 pabrik gula tersebut, Perseroan memiliki kapasitas terpasang untuk giling tebu sebesar 41.800 ton tebu per hari (TCD) per 31 Desember 2016.

TETES

Tetes merupakan produk samping dari proses produksi tebu menjadi gula, yang memiliki nilai ekonomis. Produk tetes dari Perseroan dapat digunakan sebagai bahan baku pada beberapa kebutuhan industri, seperti penyedap rasa serta bahan baku Bioetanol.

SUGAR INDUSTRY

The Company operates its sugar industry segment through 11 Sugar Mills (PG) owned by the Company. The raw materials used by those Sugar Mills are gathered from Company-owned sugarcane farm and farmer-owned sugarcane farm. Below s the list of eleven Sugar Mills owned and operated by the Company:

1. Watoetoelis Sugar Mill in Sidoarjo Regency, East Java.
2. Toelangan Sugar Mill in Sidoarjo Regency, East Java.
3. Kremboong Sugar Mill in Sidoarjo Regency, East Java.
4. Gempolkrep Sugar Mill in Mojokerto Regency, East Java.
5. Jombang Baru Sugar Mill in Jombang Regency, East Java.
6. Tjoekir Sugar Mill in Jombang Regency East Java.
7. Lestari Sugar Mill in Nganjuk, East Java.
8. Meritjan Sugar Mill in Kediri Regency, East Java.
9. Pesantren Baru Sugar Mill in Kediri Regency, East Java.
10. Ngadiredjo Sugar Mill in Tulungagung District, East Java.
11. Modjopanggoong Sugar Mill in Kediri Regency, East Java.

In sugar industry, the sugar is sold and marketed domestically through free and coordinated market (auction and negotiated market), while molasses is sold and marketed to industrial end users through tender mechanism.

Through all 11 sugar mills, the Company has the sugarcane milling capacity of 41.800 tonnes per day (TCD) per December 31, 2016.

MOLASSES

Molasses are by-products of the production process from sugar cane to sugar, which has much more economic value. Molasses products from the Company can be used as raw material for several industries, such as flavoring and bioethanol.

INDUSTRI TEMBAKAU

Pada industri tembakau, Perseroan memiliki 3 (tiga) lahan kebun tembakau yang tersebar di beberapa wilayah, yaitu :

1. Kebun Kertosari di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
2. Kebun Ajong Gayasan di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
3. Kebun Kebonarum, Gayamprit, Wedibirit di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Dari ketiga kebun tembakau ini Perseroan menghasilkan tembakau cerutu kualitas ekspor, yaitu jenis tembakau TBN/VBN dan FIN/FIK dengan *grade* NW, LPW, RFU dan *Filler*. Selain itu kebun Perseroan juga menghasilkan tembakau NO/VO dengan *grade Dekblad*, *Omblad* dan *Filler*.

Pemasaran produk tembakau milik Perseroan dilakukan dengan cara penjualan langsung kepada pembeli industri atau pabrikan dan pembeli perantara (*trader*). Selain itu Perseroan juga mengirim produk contoh ke luar negeri untuk mengikuti mekanisme lelang.

Sampai dengan Desember 2016, Perseroan mengelola lahan tembakau dengan luasan mencapai 1.077,83 hektar.

BIOETANOL

Perseroan melihat adanya peluang berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan energi melalui bioetanol, dimana Perseroan telah memiliki salah satu bahan baku untuk produksi bioetanol yaitu tetes tebu.

Dengan adanya peluang ini dan juga kesempatan mendapatkan hibah (*grant*) dari pemerintah Jepang melalui *New Energy Development Organization* (NEDO) berupa mesin dan teknologi bioetanol, Perseroan mendirikan PT Energi Agro Nusantara yang menjalankan produksi Bioetanol. Pabrik Bioetanol milik Perseroan berlokasi di Pabrik Gula Gempolkrep.

RUMAH SAKIT

Perseroan menjalankan jasa pelayanan kesehatan melalui pendirian dan pengoperasian rumah sakit yang saat ini telah menjadi unit usaha mandiri. Jasa pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui 4 (empat) buah rumah sakit yang seluruhnya berada di wilayah Jawa Timur,

TOBACCO INDUSTRY

In the tobacco industry, the Company has 3 (three) tobacco fields that are located in several areas, namely:

1. Kertosari field in Jember Regency, East Java.
2. Ajong Gayasan field in Jember Regency, East Java.
3. Kebonarum field, Gayamprit, Wedibirit in Klaten Regency, Central Java.

From all three tobacco fields, the Company produces export quality cigar tobaccos, namely TBN/VBN and FIN/FIK varieties in NW, LPW, RFU and Filler grades. In addition, the Company' also produces NO/VO variety with Dekblad, Omblad and Filler grades.

Marketing of the Company's tobacco products is conducted through direct selling to industrial or manufacturing buyers and traders. The Company also sends sample of tobacco products abroad to participate in auction.

As of December 2016, the Company is managing tobacco fields with an area of 1,077.83 hectares.

BIOETHANOL

The Company sees an oppurtiny to contribute in fullfilling the energy need through bioethanol, in which the Company already has one of raw material to produce bioethanol: sugar molasses.

To seize this opportunity and also the leverage grant opportunity from Japanese government through NEDO (New Energy Development Organization) in the form of machineries and bioethanol technology, the Company established PT Energi Agro Nusantara engaged in bioethanol production, located at Gempolkrep Sugar Mill.

HOSPITAL

The Company operates the health care service through building and operating hospitals of which have an independent business unit. The health care service are conducted through the operation of four hospitals that are entirely located in East Java region: Gatoel Hospital in

Produk dan Jasa
Product and Services

yaitu Rumah Sakit Gatoel di Mojokerto, Rumah Sakit Toeloengredjo di Kediri, Rumah Sakit Perkebunan di Jember dan Rumah Sakit Cendana di Blitar. Keempat rumah sakit milik Perseroan selain melayani pasien dari internal Perseroan juga memberikan layanan kepada masyarakat umum di sekitarnya.

JASA *CUTTING BOBBIN*

Bekerja sama dengan Burger Soehne AG Burg (BSB), Swiss, Perseroan menjalankan usaha Jasa *Cutting Bobbin*. Segmen usaha ini memberikan jasa pemotongan daun tembakau menjadi pembungkus cerutu. Lokasi operasional jasa *Cutting Bobbin* terletak di Jember.

Dalam lingkup struktur organisasi Perseroan, jasa *Cutting Bobbin* berada masuk di dalam struktur Kebun Kertosari yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Perseroan No. XX-SURKP/13.050 pada tanggal 21 Mei 2013 dan No. XXSURKP/13.076 pada tanggal 2013 perihal Penyempurnaan Struktur Organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan di lingkungan Perseroan.

INDUSTRI KARUNG PLASTIK, *INNERBAG* DAN *WARRING*

Perseroan membentuk kemitraan strategis dengan PT Surya Satria Sembada, yang berlokasi di Jakarta, dalam menjalankan usaha di segmen industri karung plastik, *inner bag*, dan *warring*. Perseroan dan mitra strategis membentuk anak usaha dengan nama PT Dasaplast Nusantara.

PT Dasaplast Nusantara memiliki pabrik di Jepara, Jawa Tengah yang memproduksi karung plastik, *inner bag*, dan *warring*. Sebagian besar hasil produksi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal Perseroan, yaitu untuk Pabrik Gula dan Kebun Tembakau. Sebagian kecil dari hasil produksi dipasarkan ke pasar domestik dan internasional.

MAKANAN/SAYURAN BEKU, BUDIDAYA EDAMAME DAN OKRA

Bekerja sama dengan mitra strategis PT Kelola Mina Laut, Perseroan memiliki usaha di segmen budidaya Edamame dan Okra dengan nama PT Mitratani Dua Tujuh. Produk Edamame hasil produksi PT Mitratani Dua Tujuh diutamakan untuk diekspor ke pasar internasional di Jepang dalam bentuk makanan/sayuran beku.

Mojokerto, Toeloengredjo Hospital in Kediri, Perkebunan Hospital in Jember and Cendana Hospital in Blitar. All four hospitals accept patienst from within the Company and also provide health services for general public within the area.

BOBBIN CUTTING SERVICE

Cooperating with Burger Soehne AG Burg (BSB), Switzerland, the Company operates the Bobbin Cutting Service business. This business segment provides a service of cutting bobbin (tobacco leave) into cigar wraps. The Bobbing Cutting services is located in Jember.

In the Company's organizational structure, the Bobbin Cutting service is integrated in the structure of Kebuh Kertosari, which has been mandated by the Company's Board of Directors Decree No. XX-SURKP/13.050 dated May 21, 2013 and No. XXSURKP/13.076 on 2013 regarding the Organizational Structure Enhancement and main duties of office holders in the Company.

BAGS, INNER BAGS, AND WARING INDUSTRY

The Company formed a strategic partnership with PT Surya Satria Sembada, which is located in Jakarta, to operate business in plastic bags, inner bags, and waring. PT Dasaplast Nusantara was then established as subsidiary of both the Company and its strategic partner.

PT Dasaplast Nusantara owns and operates a factory in Jepara, Central Java, which produces plastic bags, inner bags, and waring. Most of its production is aimed to fulfill internal needs of the Company, which is for sugar mills and tobacco fields. A small portion of production output is sold to domestic and international market.

FROZEN FOODS/VEGETABLES, EDAMAME CULTIVATION AND OKRA

Cooperating with a strategic partner, PT Kelola Mina Laut, the Company runs business in the cultivation of Edamame and Okra, under the name of PT Mitratani Dua Tujuh. The Edamame produced by PT Mitratani Dua Tujuh is prioritized to be exported to the international market in Japan in the form of frozen food/vegetables.

Kompetensi Inti
Core Competencies

Kompetensi inti adalah sumberdaya dan kapabilitas yang menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan untuk dapat melebihi para pesaingnya. Sebagai sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan, kompetensi inti membedakan perusahaan secara kompetitif dan merefleksikan kepribadiannya.

Core competencies are resources and capabilities as source of competitive advantage for the Company to outperform its competitors. The core competencies differentiate the Company competitively and reflecting its personality.

Kompetensi inti PTPN X
Core Competences of PTPN X

Budidaya tebu dan industri gula	Budidaya dan proses pengolahan tembakau	Pengelolaan energi terbarukan berbasis tebu
Sugar cane cultivation and Sugar industry	*Cultivation and production process of tobacco*	*Renewed sustainable energy based on sugar canes*

Struktur Organisasi
Organizational Structures

Struktur Organisasi
Organizational Structures

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

Vision, Mission and Corporate Cultures

Berdasarkan Surat Keputusan No. XX-SURKP/13.074.1 tentang Visi dan Misi PT Perkebunan Nusantara X, Visi dan Misi Perseroan adalah sebagai berikut :

Based on Decree: No. XX-SURKP/13.074.1 regarding the Vision and Mission of PT Perkebunan Nusantara X, the Company's Vision and Mission are as follows:

Visi

Vission

Menjadi perusahaan agroindustri terkemuka yang berwawasan lingkungan

To become a leading environmentally sound agro-industry company.

Misi

Mission

Berkomitmen menghasilkan produk berbasis bahan baku tebu dan tembakau berdaya saing tinggi di pasar domestik dan internasional, yang berwawasan lingkungan.

Berkomitmen menjaga pertumbuhan dan kelangsungan usaha melalui optimalisasi dan efisiensi di segala bidang.

Mendedikasikan diri untuk selalu meningkatkan nilai-nilai perusahaan bagi kepuasan pemangku kepentingan melalui kepemimpinan, inovasi dan kerjasama tim serta organisasi yang profesional.

Committed to produce highly competitive and environmentally sound products of sugar cane and tobacco for domestic and international market.

Committed to keep the growth and continuity of the business by doing optimalization and efficiency in every aspects.

Dedicated to always improve corporate values for the satisfaction of stakeholders through leadership, innovation teamwork, and professional organization.

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan
Vision, Mission and Corporate Cultures

FILOSOFI BISNIS DAN BUDAYA KERJA

Di dalam menjalankan misi, Perseroan memiliki tuntunan yang berfungsi sebagai koridor dan batasan sekaligus pendorong bagi insan Perseroan untuk melakukannya dengan penuh integritas, sehingga apabila tuntunan ini dilakukan oleh seluruh jajaran karyawan, akan dapat membawa pencapaian visi Perseroan.

Filosofi Bisnis Perseroan terwujud dalam nilai-nilai organisasi sebagai berikut :

BUSINESS PHILOSOPHY AND CORPORATE CULTURE

In carrying the mission, the Company holds a reference as a corridor and guidance, also as booster for the Company's people to perform with full integrity, that if practiced by all employees will encourage the achievement of Company's vision.

The Company's Business Philosophy is embodied on organizational values, as follows:

ProViSI

Profesionalisme

Professionalism

Senantiasa bekerja dengan dedikasi tinggi dan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

Always work with high dedication and full responsibility based on elevated competencies to pursue the best performance.

Visioner

Visionary

Senantiasa memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat peluang kedepan serta dapat berpikir diluar kebiasaan.

Always have a broad perspective and able to see future opportunities and to think outside of the box.

Sinergi

Synergy

Senantiasa berkolaborasi secara produktif dan berkualitas dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

Always conduct high quality collaboration productively with all internal and external stakeholders.

Integritas

Integrity

Senantiasa bertindak obyektif, adil dan konsisten sesuai dengan pedoman perilaku dan pedoman tata kelola perusahaan dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

Always act in an objective, fair and consistent manner in accordance with code of conduct and code of governance by upholding honesty and commitment.

Budaya kerja yang dianut adalah "Profesional, Produktif dan Pembelajar (3P)".

The corporate culture is "Profesional, Produktif dan Pembelajar (3P)".

3P

PROFESIONAL
Professional

PRODUKTIF
Productive

PEMBELAJAR
Learner

Makna Branding Logo

The Meaning of Branding Logo

Perubahan logo PTPN X sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris No. 26/DK/PTPN-X/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 yang telah disahkan dalam risalah RUPS No. RIS-005/XXKBUMN/2011 tanggal 28 Januari 2011.

The redesign of PTPN X logo was according to the approval of the Board of Commissiners No. 26/DK/PTPN-X/III/2011 dated March 25, 2011, which was been ratified in the minutes of GMS No. RIS-005/XXKBUMN/2011 dated January 28, 2011.

Logo tersebut merupakan visualisasi dari visi PTPN X yakni "Tumbuh Berkembang Bersama". Dalam logo tersebut, terdapat gabungan *image* tangan yang saling meraih. Hal tersebut mencerminkan semangat kerjasama, baik itu kerjasama tim maupun bersama mitra. Gambar tangan tersebut dapat juga dilihat sebagai sekelompok daun berwarna hijau yang bergradasi dari hijau tua menuju hijau muda. Gradasi tersebut menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan, sekaligus membentuk pencitraan usaha agribisnis dari PTPN X. Warna Hijau tua yang terletak pada logo mencerminkan kepedulian dan pelayanan rumah sakit yang dikelola PTPN X bagi masyarakat luas dan perkebunan. Warna hijau juga melambangkan kenyamanan dan kesegaran.

The logo is a visualization of PTPN X's vision of "Growing Together". In the logo, there is a combined image of hands reaching each other. It reflects the spirit of teamwork within group or partners. The image can also be seen as a group of green leaves with gradation of dark green to light green. The gradation shows growth and development, and at once forming the image of PTPN X as an agribusiness company. The dark green color in the logo reflects care and service from hospital business managed by PTPN X for the public and the Company itself. The green color also symbolizes comfort and freshness.

Pada logo, juga terdapat *logotype* berupa teks PTPN X yang digunakan untuk memperkuat pencitraan, mempermudah pengidentifikasian identitas PTPN X kepada khalayak luas. Warna biru pada *logotype* mencerminkan kepemimpinan, kemandirian untuk memajukan PTPN X.

In the logo, there is also a logotype of text: "PTPN X" which is used to strengthen the image and to simplify the identification of PTPN X identity to the public. The blue color in logotype reflects leadership, and independency of PTPN X to move forward.

Sedangkan penggunaan huruf tanpa kait dan *layout* logo yang dinamis befungsi untuk memperkuat citra modern serta inovasi PTPN X dalam bersaing di kancah usaha agribisnis internasional.

The use of letters with no hook and dynamic layout of the logo amplify the modern image and innovation of PTPN X to compete in the international agribusiness.

Profil Dewan Komisaris
Board of Commisioner Profiles

1 **Rudi Wibowo**
Komisaris Utama
President Commissioner

2 **Sukardi Rinakit**
Komisaris
Commissioner

3 **Y.B. Priyatmo Hadi**
Komisaris
Commissioner

4 **Arvan Rivaldy Rebion Siregar**
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Profil Dewan Komisaris
Board of Commisioner Profiles

Rudi Wibowo

Komisaris Utama
President Commissioner

Warga negara Indonesia
Usia 64 tahun
Kelahiran Kebumen, 6 Juli 1952
Berdomisili di Jember, Jawa Timur
Indonesian Citizen
64 years old
Born in Kebumen on July 6, 1952
Domiciled in Jember, Jawa Timur

Periode Jabatan
13 Oktober 2013 – 12 Oktober 2018

Pendidikan
Sarjana Pertanian jurusan Sosial Ekonomi, Universitas Jember (1978); Magister Sains Ekonomi Pertanian Insitut Pertanian Bogor (1981); Doktor Perencanaan Pembangunan Wilayah Pedesaan dari Institut Pertanian Bogor (1987); dan gelar Profesor dari Universitas Jember. Pendidikan tambahan diperoleh antara lain dari University California Davis (UCDUSA, 1994), SPAMEN-LAN (Jakarta, 1996), "*Good Governance*" in Germany Government, (Jerman, 1997).

Riwayat Profesi
Deputi Badan Eksekutif GAPPERINDO bidang SDM/Teknologi (2003-sekarang); Ketua Majelis Penasehat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) (2011-2014); Sekretaris Jenderal PERHEPI (2004-2007); Sekditjen Tanaman Pangan dan Hortikultura Departemen Pertanian (1998-2000); Kepala Biro Tata Usaha BUMN (1997); Sekretaris Badan Agribisnis Departemen Pertanian (1994-1997).

Riwayat Jabatan Sebagai Dewan Komisaris PTPN X
Jabatan Komisaris Utama diemban sejak RUPS Tahun 2013 melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-390/MBU/2013 tanggal 21 November 2013. Jabatan Komisaris Utama ini merupakan periode ke-1. Sebelum itu, Rudi Wibowo pernah menjabat pada Dewan Komisaris Perseroan sebagai Komisaris untuk 2 (dua) kali periode (2008-2012).

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain
-

Penghargaan
Satyalencana Wirakarya dalam Pengembangan Agribisnis (1998), dan Satyalencana dalam Tiga Dasawarsa Pengabdian (2010).

Term of Office
October 13, 2013 - October 12, 2018

Education
Bachelor of Agriculture majoring in Social Economics from Jember University (1978); Master of in Agricultural Economic Science from Bogor Institute of Agriculture (1981); Doctor of Rural Development Planning from Bogor Institute of Agriculture (1987); and Professor title from Jember University. Additional educations are obtained from: California Davis University (UCDUSA, 1994), SPAMEN-LAN (Jakarta, 1996), "Good Governance" in Germany Government, (Germany, 1997).

Professional History
Deputy of Executive Board of GAPPERINDO in HR/Technology (2003-present); Chief Advisory Board of Association of Indonesian Agricultural Economy (PERHEPI) (2011-2014); Secretary General of PERHEPI (2004-2007); Secretary of Directorate General of Food Crops and Holticure of Agriculture Department (1998-2000); Chief of SOE Administration Bureau (1997); Secretary of Agribusiness Body of the Ministry of Agriculture (1994-1997).

Position History in Board of Commissioners of PTPN X
Served as President Commissioner since 2013 GMS through Minister of SOE Decree No. SK-390/MBU/2013 dated November 21, 2013, for the 1st period. Prior to that, Rudi Wibowo had served on the Board of Commissioners of the Company as Commissioner for 2 (two) periods (2008-2012).

Concurrent Positions at Other Companies
-

Awards
Satyalencana Wirakarya in Agribusiness Development (1998), and Satyalencana for three decades of service (2010).

Profil Dewan Komisaris
Board of Commisioner Profiles

Sukardi Rinakit

Komisaris
Commissioner

Warga negara Indonesia
Usia 53 tahun
Kelahiran Madiun, 5 Juni 1963
Berdomisili di Madiun, Jawa Timur
Indonesian Citizen
53 years old
Born in Madiun, on June 5, 1963
Domiciled in Madiun, East Java

Periode Jabatan
31 Maret 2016 - 30 Maret 2021

Pendidikan
Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (1989); M.A., Departement of Southeast Asian Studies, National University of Singapore (1996); Ph.D, Departement of Political Science, National University of Singapore (2003).

Riwayat Profesi
Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (2015-sekarang); Anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) (2015-sekarang); Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate (2001-2014); Dosen Tamu di Lemhanas dan Program Pascasarjana Universitas Indonesia (2001-2014); Staf Peneliti *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) (1989-1998).

Riwayat Jabatan Sebagai Dewan Komisaris PTPN X
Jabatan Komisaris diemban sejak RUPS Tahun 2016 melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-73/MBU/2016 tanggal 31 Maret 2016. Jabatan Komisaris ini merupakan periode ke-1. Sebelum itu, Sukardi Rinakit belum pernah menjabat pada Dewan Komisaris Perseroan.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain
-

Term of Office
March 31, 2016 - March 30, 2021

Education
Bachelor of Social and Political Science, University of Indonesia (1989); M.A., Departement of Southeast Asian Studies, National University of Singapore (1996); Ph.D, Departement of Political Science, National University of Singapore (2003).

Professional History
Special Staff of the President of the Republic of Indonesia (2015-present); Member of Association of Indonesian Political Science (AIPI) (2015-present); Executive Director of Soegeng Sarjadi Syndicate (2001-2014); Guest Lecturer at Lemhanas and Graduate program at University of Indonesia (2001-2014); Research Staff of Centre for Strategic and International Studies (CSIS) (1989-1998).

Position History in Board of Commissioners of PTPN X
Served as Commissioner since 2016 GMS through the Minister of SOE Decree No. SK-73/MBU/2016 dated March 31, 2016, for the 1st period. Prior to that, Sukardi Rinakit had never served on the Board of Commissioners of the Company.

Concurrent Positions at Other Companies
-

Profil Dewan Komisaris
Board of Commisioner Profiles

Y.B. Priyatmo Hadi

Komisaris
Commissioner

Warga negara Indonesia
Usia 44 tahun
Kelahiran Boyolali, 16 Januari 1972
Berdomisili di Boyolali, Jawa Tengah
Indonesian Citizen
44 years old
Born in Boyolali, on June 5, 1963
Domiciled in Boyolali, East Java

Periode Jabatan
1 September 2016 - 31 Agustus 2021

Pendidikan
Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta (1996); Magister Ekonomi Universitas Indonesia (2007).

Riwayat Profesi
Kepala Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana, Prasarana Perhubungan 1b, Kementerian BUMN (2015-sekarang); Komisaris PT Reasuransi International Indonesia (2014-2016); Kepala Bidang Usaha Perbankan & Asuransi I, Kementerian BUMN (2014-2015); Komisaris PT Jalantol Lingkar Luar Jakarta (2014); Staf Sekretaris Komisaris PT Bank Mandiri (2011-2014); Kepala Sub Bidang Jasa 1 A2, Kementerian BUMN (2010-2014); Sekretaris Dewan Komisaris PTPN XI (2008-2011); Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kinerja Usaha Perkebunan II A Kementerian BUMN (2008-2010); Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kinerja Usaha Perkebunan II A, Kementerian BUMN (2006-2008); Sekretaris Dewan Komisaris PTPN IX (2006-2008); Sekretaris Dewan Komisaris PT Merpati Nusantara Airlines (2002-2006); Pelaksana pada Sub Bidang Perencanaan Usaha Bidang Sarana Perhubungan, Kementerian Keuangan/Kementerian Pembinaan BUMN (1999-2006); Staf Sekreatris Dewan Komisaris PT Merpati Nusantara Airlines (2000-2002).

Riwayat Jabatan Sebagai Dewan Komisaris PTPN X
Jabatan Komisaris diemban sejak RUPS Tahun 2016 melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-207/MBU/2016 tanggal 1 September 2016. Jabatan Komisaris ini merupakan periode ke-1. Sebelum itu, Y.B. Priyatmo Hadi belum pernah menjabat pada Dewan Komisaris Perseroan.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain
-

Penghargaan
2015: Satya Lencana 15 Tahun Pengabdian

Term of Office
September 1, 2016 - August 31, 2021

Education
Bachelor of Social and Political Science from University of Atmajaya, Yogyakarta (1996); Master of Economics from University of Indonesia (2007).

Professional History
Head of Construction and Facilities Department, Transportation Infrastructure 1b, Ministry of SOE (2015-present); Commissioner of PT Reasuransi International Indonesia (2014-2016); Head of Banking and insurance Department, Ministry of SOE (2014-2015); Commissioner of PT Jalantol Lingkar Luar Jakarta (2014); Staff of Secretary to Commissioner of PT Bank Mandiri (2011-2014); Head of Service Sub-Department 1 A2, Ministry of SOE (2010-2014); Secretary of Board of Commissioners of PTPN XI (2008-2011); Head of Plantation Planning and Business Performance Sub-Department II A, Ministry of SOE (2008-2010); Officer of Plantation Planning and Business Performance Sub-Department II A, Ministry of SOE (2006-2008); Secretary of the Board of Commissioners of PTPN IX (2006-2008); Secretary of the Board of Commissioners of PT Merpati Nusantara Airlines (2002-2006); Officer of Business Planning Sub-Department, Transportation Infrastructure Department, Ministry of Finance/Ministry of SOE Development(1999-2006); Staff of Secretary of the Board of Commissioners of PT Merpati Nusantara Airlines (2000-2002).

Position History in Board of Commissioners of PTPN X
Served as Commissioner since 2016 GMS through the Minister of SOE Decree No. SK-207/MBU/2016 dated September 1, 2016, for the 1st period. Prior to that, Y.B. Priyatmo Hadi had never served on the Board of Commissioners of the Company.

Concurrent Positions at Other Companies
-

Awards
2015: Satya Lencana for 15 years of service

Profil Dewan Komisaris
Board of Commisioner Profiles

Arvan Rivaldy Rebion Siregar

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Warga negara Indonesia
Usia 36 tahun
Kelahiran Bandung, 31 Mei 1980
Berdomisili di Jakarta
Indonesian Citizen
36 years old
Born in Bandung on May 31, 1980
Domiciled in Jakarta

Periode Jabatan
1 September 2016 - 31 Agustus 2021

Pendidikan
Bachelor Comm – University of Queensland, Brisbane, Australia – Specializing in Finance.

Riwayat Profesi
Direktur PT Ingria Pratama Capitalindo (2015); Komisaris PT Puri Amerta Sanjiwani (2009); Direktur PT Petrobas Indonesia (2006-2009); Direktur PT Megah Tama Berjangka (2007-2008); Assistant to Senior Vice President Coordinating Executive PT Freeport Indonesia (2003-2005).

Riwayat Jabatan Sebagai Dewan Komisaris PTPN X
Jabatan Komisaris Independen diemban sejak RUPS Tahun 2016 melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-207/MBU/2016 tanggal 1 September 2016. Jabatan Komisaris Independen ini merupakan periode ke-1. Sebelum itu, Arvan Rivaldy Rebion Siregar belum pernah menjabat pada Dewan Komisaris Perseroan.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain
-

Term of Office
September 1, 2016 - August 31, 2021

Education
Bachelor Comm – University of Queensland, Brisbane, Australia – Specializing in Finance.

Professional History
Director of PT Ingria Pratama Capitalindo (2015); Commissioner of PT Puri Amerta Sanjiwani (2009); Director of PT Petrobas Indonesia (2006-2090); Director of PT Megah Tama Berjangka (2007-2008); Assistant to Senior Vice President Coordinating Executive of PT Freeport Indonesia Co.(2003-2005).

Position History in Board of Commissioners of PTPN X
Served as Independent Commissioner since 2016 GMS through the Minister of SOE Decree No. SK-207/MBU/2016 dated September 1, 2016, for the 1st period. Prior to that, Arvan Rivaldy Rebion Siregar had never served on the Board of Commissioners of the Company.

Concurrent Positions at Other Companies
-

Profil Direksi
Board of Directors Profile

1 **Dwi Satriyo Annurogo**
Direktur Utama
President Director

2 **Mustaqim**
Direktur Operasional
Director of Operations

3 **Muhammad Hanugroho**
Direktur Komersil
Director of Commercial

Profil Direksi
Board of Directors Profile

Dwi Satriyo Annurogo

Direktur Utama (24 Februari 2017-sekarang)
President Director (February 24, 2017-present)

Warga negara Indonesia
Usia 49 tahun
Kelahiran Lawang, 13 Desember 1967
Berdomisili di Surabaya
Indonesian Citizen
49 years old
Born in Lawang, on December 13, 1967
Domiciled in Surabaya

Periode Jabatan
24 Februari 2017 - 23 Februari 2022

Pendidikan
Sarjana Teknik Kimia Institut Teknologi Surabaya (ITS) (1991); Magister Teknik Kimia ITS (2007).

Riwayat Profesi
Direktur Produksi, Teknik & Pengembangan, PT Pupuk Iskandar Muda (2016-2017); General Manager Pabrik III, PT Petrokimia Gresik (2014-2016); General Manager Pabrik II, PT Petrokimia Gresik (2011-2014); Kepala Departemen Produksi II, PT Petrokimia Gresik (2009-2011); Kepala Bagian Pupuk Fosfat I, PT Petrokimia Gresik (2007-2009); Kepala Bagian Phonska, PT Petrokimia Gresik (2005); Kepala Bagian Perencanaan & Pengendalian Produksi II, PT Petrokimia Gresik (2002-2005); Staf di Departemen Produksi II, PT Petrokimia Gresik (1992-2002).

Riwayat Jabatan Sebagai Direksi PTPN X
Jabatan Direktur Utama diemban sejak RUPS Tahun 2016 melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-35/MBU/02/2017 tanggal 24 Februari 2017. Jabatan Direktur Utama ini merupakan periode ke-1. Sebelum itu, Dwi Satriyo Annurogo belum pernah menjabat sebagai Direksi Perseroan.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain
-

Term of Office
February 24, 2017 - February 23, 2022

Education
Bachelor of Chemical Engineering from Surabaya Institute of Technology (ITS) (1991); Master in Chemical Engineering from ITS (2007).

Professional History
Director of Production, Engineering & Development, PT Pupuk Iskandar Muda (2016-2017); General Manager of Factory III, PT Petrokimia Gresik (2014-2016); General Manager of Factory II, PT Petrokimia Gresik (2011-2014); Head of Production Department II, PT Petrokimia Gresik (2009-2011); Head of Phosphate fertilizer Department, PT Petrokimia Gresik (2007-2009); Head of Phonska Department, PT Petrokimia Gresik (2005); Head of Production Planning and Control II, PT Petrokimia Gresik (2002-2005); Staff of Production Department II, PT Petrokimia Gresik (1992-2002).

Position History as Director of PTPN X
Served as President Director since 2016 GMS through the Minister of SOE Decree No. SK-35/MBU/02/2017 dated February 24, 2017, for the 1st period. Prior to that, Dwi Satriyo Annurogo had never served as Director of the Company.

Concurrent Positions at Other Companies
-

Profil Direksi
Board of Directors Profile

Mustaqim

Direktur Operasional (24 Februari 2017-sekarang)
Director of Operations (February 24, 2017-present)

Warga negara Indonesia
Usia 39 tahun
Kelahiran Blora, 26 Januari 1978
Berdomisili di Surabaya
Indonesian Citizen
39 years old
Born in Blora, on January 27, 1978
Domiciled in Surabaya

Periode Jabatan
24 Februari 2017 - 23 Februari 2022

Pendidikan
Sarjana Teknik Elektro Universitas Diponegoro Semarang (2003).

Riwayat Profesi
Pjs. Kepala Divisi Perencanaan & Pengembangan - Kantor Pusat PTPN X (2016-2017); Manajer Instalasi, PG Gempolkrep (2015-2016); Manajer Instalasi, PG Lestari (2014-2015); Manajer Instalasi, PG Watoetoelis (2013-2014); Pjs. Kabag Instalasi PG Watoetoelis (2012-2013); Pemb. Masinis I, PG Ngadiredjo (2010-2012); Pemb. Masinis Ii, PG Ngadiredjo (2007-2010); Masa Percobaan, PG.Ngadiredjo (2004-2007); Pemb. Masinis Iii, PG Ngadiredjo (2004).

Riwayat Jabatan Sebagai Direksi PTPN X
Jabatan Direktur Operasional diemban sejak RUPS Tahun 2016 melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-35/MBU/02/2017 tanggal 24 Februari 2017. Jabatan Direktur ini merupakan periode ke-1. Sebelum itu, Mustaqim belum pernah menjabat sebagai Direksi Perseroan.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain
-

Term of Office
February 24, 2017 - February 23, 2022

Education
Bachelor of Electrical Engineering from Diponegoro University, Semarang (2003).

Professional History
Interim Head of Planning & Development Division – Head office of PTPN X (2016-2017); Installation Manager, PG Gempolkrep (2015-2016); Installation manager, PG Lestari (2014-2015); Installation manager, PG Watoetoelis (2013-2014); Interim Head of Installation Division, PG Watoetoelis (2012-2013); Assistant Machinist I, PG Ngadiredjo (2010-2012); Assistant Machinist II, PG Ngadiredjo (2007-2010); Probation period, PG Ngadiredjo (2004-2007); Assistant Machinist III, PG Ngadiredjo (2004).

Position History as Director of PTPN X
Served as Operational Director since 2016 GMS through the Minister of SOE Decree No. SK-35/MBU/02/2017 dated February 24, 2017, for the 1st period. Prior to that, Mustaqim had never served as Director of the Company.

Concurrent Positions at Other Companies
-

Profil Direksi
Board of Directors Profile

Muhammad Hanugroho

Direktur Komersil (10 Juni 2015-sekarang)
Director of Commercial (June 10, 2015-present)

Warga negara Indonesia
Usia 45 tahun
Kelahiran Gisting, 27 April 1972
Berdomisili di Bogor, Jawa Barat
Indonesian Citizen
45 years old
Born in Gisting, on April 27, 1972
Domiciled in Bogor, West Java

Periode Jabatan
10 Juni 2015 - 9 Juni 2020

Pendidikan
Diploma Ilmu Perpustakaan dari Universitas Indonesia (1995) dan Sarjana Administrasi Bisnis dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (2005).

Riwayat Profesi
Associate Director-Investment Banking Department, PT Mandiri Sekuritas (2012-Juni 2015), Assistant Vice President-Investment Banking Department, PT Mandiri Sekuritas (2011-2012), Senior Manager-Investment Banking Department, PT Bahana Securities (2005-2011), Senior Manager-Invesment Banking Department, PT Bahana Securities (Mei 2005-Maret 2011), Manager-Fixed Income Sales Department, PT Bahana Securitires (Februari 2005-April 2005), Assistant Manager-Research Department, PT Bahana Securities (Juli 1997-Januari 2005), Researcher-Research Department, PT DBS Securities Indonesia (Maret 1996-Juni 1997)

Riwayat Jabatan Sebagai Direksi PTPN X
Jabatan Direktur Komersil diemban sejak RUPS Tahun 2015 melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-91/MBU/06/105 dan PTPN III (Persero) sebagai induk perusahaan dengan nomor surat KPJAK/Hold/SKPTS/R/03/2015 tanggal 10 Juni 2015. Jabatan Direktur ini merupakan periode ke-1. Sebelum itu, Muhammad Hanugroho belum pernah menjabat sebagai Direksi Perseroan.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain
-

Term of Office
June 10, 2015 - June 9, 2020

Education
Diploma of Librarian Science from University of Indonesia (1995) and Bachelor of Business Administration from Mandala School of Administration, Indonesia (2005).

Professional History
Associate Director – Investment Banking Department, PT Mandiri Sekuritas (2012- June 2015), Assistant Vice President - Investment Banking Department, PT Mandiri Sekuritas (2011 - 2012), Senior Manager – Investment Banking Department, PT Bahana Securities (2005 – 2011), Senior Manager, Investment Banking Department, PT Bahana Securities (May 2005 – March 2011), Manager – Fixed Income Sales Department, PT Bahana Securities (February 2005 – April 2005), Assistant Manager – Research Department, PT Bahana Securities (July 1997 – Janury 2005), Researcher – Research Department, PT DBS Securities Indonesia (March 1996 – June 1997).

Position History as Director of PTPN X
Served as Commercial Director since 2015 through the Minister of SOE Decree No. SK-91/MBU/06/105 and PTPN III (Persero) as the parent company with Letter Number KPJAK/Hold/SKPTS/R/03/2015 dated Juni 10, 2015, for the 1st period. Prior to that, Muhammad Hanugroho had never served as Director of the Company.

Concurrent Positions at Other Companies
-

Profil Direksi
Board of Directors Profile

Subiyono

Direktur Utama (13 Juni 2013-24 Februari 2017)
President Director (June 13, 2013 - February 24, 2017)

Warga negara Indonesia
Usia 66 tahun
Kelahiran Banyuwangi, 21 Maret 1951
Berdomisili di Surabaya
Indonesian Citizen
66 years old
Born in Banyuwangi, on March 21, 1951
Domiciled in Surabaya

Periode Jabatan
13 Juni 2013 - 24 Februari 2017

Pendidikan
Sarjana Pertanian jurusan Sosial Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang (1979); Magister Manajemen Agribisnis UPN "Veteran" (2002).

Riwayat Profesi
Direktur Utama PTPN X (2008-2017); Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (2001-2008); Kepala Dinas Perkebunan Prop. Dati I Jatim (1998-2001); Kepala Sub. Dinas Bina Produk Disbunda Prop. Dati I Jatim di Surabaya (1997-1998); Kepala Sub. Dinas Tehinik Produk Disbunda Prop. Dati I Jatim di Surabaya (1994-1997); Kepala Cabang Disbunda Prop. Dati I Jatim di Jember (1986-1994); Kepala Cabang Disbunda Prop. Dati I Jatim di Bojonegoro (1982-1986); Kasie Perencanaan Disbunda Prop. Dati I Jatim di Bojonegoro (1981-1982).

Riwayat Jabatan Sebagai Direksi PTPN X
Jabatan Direktur Utama diemban sejak RUPS Tahun 2013 melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-282/MBU/2013 tanggal 13 Juni 2013, hingga diberhentikan pada RUPS Tahun 2017 melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-35/MBU/02/2017 tanggal 24 Februari 2017.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain
-

Term of Office
June 13, 2013 - February 24, 2017

Education
Bachelor of Agriculture majoring in Social Economics from Brawijaya University, Malang (1979); Master in Agribusiness Management from UPN "Veteran" (2002).

Professional History
President Director of PTPN X (2008-2017); Head of Departement of Plantation of East Java Province (2001), Head of Departement of Plantation of Dati I East Java province (1998-2001), Head of Disbunda Product Development Sub-Department of Dati I East Java Province in Surabaya (1997-1998), Head of Disbunda Product Engineering Sub-Department of Dati I East Java Province in Surabaya (1994-1997), Branch Head of Disbunda of Dati I East Java Province in Jember (1986-1994), Branch Head of Disbunda of Dati East Java Province in Bojonegoro (1982-1986), Section Chief of Disbunda Planning of Dati I East Java Province in Bojonegoro (1981-1982).

Position History as Director of PTPN X
Served as President Director 2013 GMS through the Minister of SOE Decree No. SK-282/MBU/2013 dated June 13, until dismissed by 2017 GMS through the Minister of SOE Decree No. SK-35/MBU/02/2017 dated February 24, 2017.

Concurrent Positions at Other Companies
-

Profil Direksi
Board of Directors Profile

Tarsisius Sutaryanto

Direktur Produksi (1 Februari 2013-24 Februari 2017)
Director of Production (February 1, 2013 - February 24, 2017)

Warga negara Indonesia
Usia 60 tahun
Kelahiran Magelang, 2 Nopember 1957
Berdomisili di Surabaya
Indonesian Citizen
66 years old
Born in Magelang on November 2, 1957
Domiciled in Surabaya

Periode Jabatan
1 Maret 2012-24 Februari 2017

Pendidikan
Sarjana Muda Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta (1982); Sarjana Pertanian UGM Yogyakarta (1983); Magister Manajemen Universitas Gajayana, Malang (2003).

Riwayat Profesi
Direktur Produksi PTPN X (2007-2017); Administratur PG Ngadiredjo (2003-2007); Administratur PG Modjopanggoong (2003); Pjs. Administratur PG Modjopanggoong (2001-2003); Kepala Bagian Tanaman PG Ngadiredjo (2001); Kepala Bagian Tanaman PG Modjopanggoong (1999-2001); Sinder Kebun Kepala Agronomi/SKK Litbang/SKK Tebang & Angkut PG Pesantren Baru (1993-1999); Sinder Kebun, PG Gempolkrep (1990-1992); Pembantu Sinder Kebun I PG Gempolkrep (1985-1989); Trainee, PG Gempolkrep (1984); Guru SMA Seminari Mertoyudan Magelang (1981-1982).

Riwayat Jabatan Sebagai Direksi PTPN X
Jabatan Direktur Produksi/Operasional diemban melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-95/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 yang ditegaskan melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-52/MBU/2013 tanggal 1 Februari 2013 hingga diberhentikan pada RUPS Tahun 2017 melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-35/MBU/02/2017 tanggal 24 Februari 2017.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain
-

Term of Office
June 13, 2013 - February 24, 2017

Education
Bachelor of Gajah Mada University (UGM) Yogyakarta (1982); Bachelor of Agriculture UGM Yogyakarta (1983); Magister of Managment Gajayana University, Malang (2003).

Professional History
Director of Production of PTPN X (2007-2017); Administrator of PG Ngadiredjo (2003-2007); Administrator of PG Modjopanggoong (2003); Acting of Administrator PG Modjopanggoong (2001-2003); Head of Plantation PG Ngadiredjo (2001); Head of Plantation PG Modjopanggoong (1999-2001); Head of Agronomy Cinder Plantation/SKK Litbang/SKK Tebang & Angkut PG Pesantren Baru (1993-1999); Cinder of Plantation, PG Gempolkrep (1990-1992); Assistant of Plantation Cinder I PG Gempolkrep (1985-1989); Trainee, PG Gempolkrep (1984); Teacher of Seminari Mertoyudan Magelang High School (1981-1982).

Position History as Director of PTPN X
Served as Production/Operation Director through the Minister of SOE Decree No. SK-95/MBU/2012 dated March 1, 2012 which decided through the Minister of SOE Decree No. SK-52/MBU/02/2013 dated February 1, 2013 until dismissed by 2017 GMS through the Minister of SOE Decree No. SK-35/MBU/02/2017 dated February 24, 2017.

Concurrent Positions at Other Companies
-

Profil Direksi
Board of Directors Profile

Djoko Santoso

Direktur SDM & Umum
(1 Februari 2013-24 Februari 2017)
HR and GA Director
(February 1, 2013 - February 24, 2017)

Warga negara Indonesia
Usia 59 tahun
Kelahiran Probolinggo, 11 Juli 1958
Berdomisili di Surabaya
Indonesia Citizen
59 years old
Born in Probolinggo, July 11, 1958
Domiciled in Surabaya

Periode Jabatan
1 Maret 2012 - 24 Februari 2017

Pendidikan
Sarjana Pertanian Universitas Brawijaya (1982).

Riwayat Profesi
Direktur SDM & Umum PTPN X (2012-2017); Sekretaris Perusahaan PTPN X (2008-2012); Kepala Bidang Renbang PTPN X (2008); Kepala Biro Sekretariat Perusahaan PTPN X (2004-2008); PLH Kepala Biro Sekretaris Perusahaan PTPN X (2001-2004); Kepala Urusan PDE Bidang Litbang PTPN X (1999-2001); Staf Kepala II Bidang Litbang PTPN X (1997-1999); Staf E - Bidang Pengkajian Sumber Daya Kantor Pusat PTPN X (1996-1997); Staf E - Bidang Pengkajian Sumber Daya Kantor Pusat PTPN X (1994-1996); Staf D - Bidang Pengkajian Sumber Daya Kantor Pusat PTPN X (1989-1993); Staf C - Bidang Pengkajian Sumber Daya Kantor Pusat PTPN X (1987-1989); Staf C - Bidang PDE Kantor Pusat PTPN X (1983-1986); Calon Staf C - Bagian PDE Kantor Pusat PTPN X (1983); Trainee Bagian PDE Kantor Pusat PTPN X (1983).

Riwayat Jabatan Sebagai Direksi PTPN X
Jabatan Direktur SDM & Umum diemban melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK -95/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 yang ditegaskan melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-52/MBU/2013 tanggal 1 Februari 2013, hingga diberhentikan pada RUPS Tahun 2017 melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-35/MBU/02/2017 tanggal 24 Februari 2017.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain
-

Penghargaan
-

Term of Office Period
March 1, 2012 - February 24, 2017

Education
Bachelor of Agriculture, University of Brawijaya (1982).

Professional History
Director of HR and GA of PTPN X (2012-2017); Corporate Secretary of PTPN X (2008-2012); Head of Planning Development Division (2008), Head of Corporate Secretary Bureau of PTPN X (2004-2008), Interim Head of Corporate Secretary of PTPN X (2001-2004); Head of PDE at Research Division of PTPN X (1999-2001); Staff of Head II Research Division of PTPN X (1997-1999); Staff E - Resources Study Division of PTPN X Head Office (1996-1997); Staff E - Resources Study Division of PTPN X Head Office (1994-1996); Staff D - Resources Study of PTPN X Head Office (1989-1993); Staff C – Resource Study Division of PTPN X Head Office (1987-1989); Staff C – PDE Division of PTPN X Head Office (1983-1986); Staff C Candidate – PDE Division of PTPN X Head Office (1983); PDE Trainee of PTPN X Head Office (1983).

Position History as Director of PTPN X
Served as HR and GA Director through the Minister of SOE Decree No. SK -95/MBU/2012 dated March 1, 2012 which decided through the Minister of SOE Decree No. SK-52/MBU/02/2013, until dismissed at 2017 GMS through the Minister of SOE Decree No. SK-35/MBU/02/2017 dated Februari 24, 2017.

Concurrent Positions at Other Companies
-

Award
-

Profil Direksi
Board of Directors Profile

Moch. Sulton

Direktur Perencanaan dan Pengembangan
(1 Maret 2012 - 24 Februari 2017)
Director of Planning & Development
(1 Maret 2012 - February 24th, 2017)

Warga negara Indonesia
Usia 59 tahun
Kelahiran Jember, 12 Oktober 1958
Berdomisili di Surabaya
Indonesia Citizen
59 years old
Born in Jember, Oktober 12, 1958
Domiciled in Surabaya

Periode Jabatan
1 Maret 2012 - 24 Februari 2017

Pendidikan
Sarjana Pertanian jurusan Agronomi Universitas Negeri Jember (1983); Pascasarjana Universitas Gajahyana Malang (2003).

Riwayat Profesi
Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPN X (2012-2017); Administratur PG Pesantren Baru (2010-2012); Administratur PG Djombang Baru (2008-2010); Pjs. Administratur PG Kremboong (2008); Kabag. Tanaman PG Lestari (2007-2008); Kabag. Tanaman PG Watoetoelis (2005-2007); SKK - Tebang & Angkut, PG Lestari (2004-2005); SKK - Tebang & Angkut, PG Ngadiredjo (1997-2003); Sinder Kebun, PG Meritjan (1993-1997); Penata Muda, PG Meritjan (1991-1992); Pengatur Madya, PG Modjopanggoong (1990); Pemb. Sinder Kebun I, PG Modjopanggoong (1985-1990); Masa Percobaan di PG Modjopanggoong (1984-1985).

Riwayat Jabatan Sebagai Direksi PTPN X
Jabatan Direktur Perencanaan dan Pengembangan diemban melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK -95/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 yang ditegaskan melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-52/MBU/2013 tanggal 1 Februari 2013, hingga diberhentikan pada RUPS Tahun 2017 melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-35/MBU/02/2017 tanggal 24 Februari 2017.

Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain
-

Term of Office Period
1 Maret 2012 - February 24, 2017

Education
Bachelor of Agriculture majoring in Agronomy Department from State University of Jember (1983); Master Degree from Gajahyana University, Malang (2003)

Professional History
Planning and Development Director of PTPN X (2012-2017); PG Pesantren Baru Administrator (2010-2012), PG Djombang Baru Administrator (2008–2012), Interim Administrator for PG Krembong (2008), Head of Plantation, PG Lestari (2004–2005), Head of Plantation, PG Watoetoelis (2005-2007); SKK - Tebang & Angkut, PG Lestari (2004-2005), SKK - Tebang & Angkut, PG Ngadiredjo (1997–2003).; Field Assistant, PG Meritjan (1993-1997); Junior Administrator, PG Meritjan (1991-1992); Middle Level Supervisor, PG Modjopanggoong (1990); Assistant of Field Assistant I, PG Modjopanggoong (1985-1990); Probation period, PG Modjopanggoong (1984-1985).

Position History as Director of PTPN X
Served as Planning & Development Director through the Minister of SOE Decree No. SK -95/MBU/2012 dated March 1, 2012 which decided through the Minister of SOE Decree No. SK-52/MBU/02/2013, until dismissed at 2017 GMS through the Minister of SOE Decree No. SK-35/MBU/02/2017 dated Februari 24, 2017.

Concurrent Positions at Other Companies
-

Profil Pejabat Puncak

Profile of Senior Executives

Kepala Divisi/Biro/Sekretaris Perusahaan
Head of Division/Bureau/Corporate Secretary

Adi Santoso Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	18 Februari 2015 *February 18, 2015*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Date of Birth*	:	Bondowoso, 9 Januari 1964 *Bondowoso, January 9, 1964*
Usia *Age*	:	53 Tahun *53 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S2 Magister Manajemen Universitas Airlangga Surabaya *Master Degree of Managment Airlangga University Surabaya*

Heru Sinarjanto Kepala SPI/*Head of IAU*		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	15 Januari 2016 *January 15, 2016*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Date of Birth*	:	Magetan, 14 Januari 1963 *Magetan, January 14, 1963*
Usia *Age*	:	54 Tahun *54 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S2 Agrobisnis Universitas Tri Buana Tungga Dewi Malang *Master Degree of Agro-industry Tri Buana Tungga Dewi University Malang*

Tri Ari Sulistyawan Kabiro Hukum & MR		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	15 Januari 2016 *January 15, 2016*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Date of Birth*	:	Kediri, 15 September 1980 *Kediri, September 15, 1980*
Usia *Age*	:	37 Tahun *37 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S2 Magister Hukum Universitas Airlangga *Master Degree of Law Airlangga University*

Moch. Abdul Khamid Kadiv Budidaya/*Head of Cultivation Division*		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Januari 2014 *January 1, 2014*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Date of Birth*	:	Tuban, 1 Juni 1961 *Tuban, June 1, 1961*
Usia *Age*	:	56 Tahun *56 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S1 Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada Yogyakarta *Bachelor Degree of Agricultural Gajah Mada University Yogyakarta*

Miftakhul Munir Kadiv. Quality Control/*Head of Quality Control Division*		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	18 Februari 2015 *February 18, 2015*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Date of Birth*	:	Mojokerto, 12 April 1965 *Mojokerto, April 12, 1965*
Usia *Age*	:	52 Tahun *52 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S2 Magister Manajemen Universitas Islam Kediri *Master Degree of Managment Islam University Kediri*

Totok Sarwo Edi Kadiv. Teknik/*Head of Engineering Division*		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	24 Januari 2014 *January 24, 2014*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Dateof Birth*	:	Blitar, 13 Mei 1960 *Blitar, Mei 13, 1960*
Usia *Age*	:	57 Tahun *57 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S1 Fakultas Teknik Elektro Universitas Gajah Mada Yogyakarta *Bachelor Degree of Electrical Engineering Gajah Mada University Yogyakarta*

Profil Pejabat Puncak
Profile of Senior Executives

Marshal G. Pattiasina Kadiv. Pengolahan/*Head of Processing Division*		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	15 Januari 2016 *January 15, 2016*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Dateof Birth*	:	Surabaya, 9 April 1966 *Surabaya, April 9, 1966*
Usia *Age*	:	51 Tahun *51 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S1 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Terbuka Jakarta *Bachelor Degree of Social Sciences Terbuka University Jakarta*

Septo Koeswitjahjono Pjs. Kadiv. Akuntansi/*Pjs Head of Accounting Division*		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Oktober 2015 *October 1, 2015*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Dateof Birth*	:	Surabaya, 19 September 1968 *Surabaya, September 19, 1968*
Usia *Age*	:	49 Tahun *49 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S1 STIE Malangkucecwara Malang *Bachelor Degree from STIE Malangkucecwara Malang*

Sugiharto Bisri Kadiv. PBJ/*Head of PBJ Division*		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Januari 2014 *January 1, 2014*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Dateof Birth*	:	Malang, 24 Juni 1976 *Malang, June 24 1976*
Usia *Age*	:	41 Tahun *41 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S1 Teknik Mesin Universitas Brawijaya Malang *Bachelor Degree of Mechanical Engineering Brawijaya University Malang*

Hera Hertantina Pjs Kadiv. Pemasaran/*Pjs Head of Marketing Division*		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	Maret 2016 *March 2016*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Dateof Birth*	:	Nganjuk, 24 April 1967 *Nganjuk, April 24, 1967*
Usia *Age*	:	50 Tahun *50 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S1 Fakultas Teknik Industri ISTP Malang *Bachelor Degree of Industry Engineering ISTP Malang*

Budianto Dwi Nugroho Kadiv. SDM & HI/*Head of HR & IR*		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Juli 2013 *July 1, 2013*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Dateof Birth*	:	Surabaya, 27 November 1961 *Surabaya, November 27, 1961*
Usia *Age*	:	56 Tahun *56 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S1 Fakultas Ekonomi STIE Indonesia Surabaya *Bachelor Degree of Economic from STIE Indonesia Surabya*

Sugeng Purnomo Pjs. Kadiv PKBL/*Pjs Head of PKBL Division*		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	15 Januari 2016 *January 15, 2016*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Dateof Birth*	:	Mojokerto, 22 Januari 1964 *Mojokerto, January 22, 1964*
Usia *Age*	:	54 Tahun *54 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S2 Magister Manajemen Universitas Wijaya Putra *Master Degree of Managment University Wijaya Putra*

Profil Pejabat Puncak
Profile of Senior Executives

Suryanto Kadiv. Umum/*Head of GA Division*		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Januari 2015 *January 1, 2015*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Dateof Birth*	:	Nganjuk, 12 Maret 1965 *Nganjuk, March 12, 1965*
Usia *Age*	:	55 Tahun *55 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S1 Fakultas Ekonomi STIE Yapan Surabaya *Bachelor Degree of Ecomonic*

Mustaqim, ST Pjs. Kadiv. Renbang/*Pjs Head of Renbag Division*		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	15 Januari 2016 *January 15, 2016*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Dateof Birth*	:	Blora, 26 Januari 1978 *Blora, January 26, 1978*
Usia *Age*	:	39 Tahun *39 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S1 Fakultas Teknik Elektro Universitas Diponegoro Semarang *Bachelor Degree Faculty of Electro Engineering Diponogoro University Semarang*

Toto Guranto Kadiv. Tembakau/*Head of Tobacco Division*		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	15 Oktober 2014 *October 15, 2014*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Dateof Birth*	:	Madiun, 24 Oktober 1961 *Madiun, October 24, 1961*
Usia *Age*	:	56 Tahun *56 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S1 Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang *Bachelor Degree Faculty of Agricultular Brawijaya University Malang*

Bambang Hari Nugroho Kadiv. Sarpram/*Head of Sapram Division*		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	15 Oktober 2014 *October 15, 2014*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Dateof Birth*	:	Madiun, 24 Oktober 1961 *Madiun, October 24, 1961*
Usia *Age*	:	56 Tahun *56 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S1 Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang *Bachelor Degree Faculty of Agricultural Brawijaya University Malang*

General Manager Pabrik Gula dan Kebun Tembakau
Sugar Mills and Tobacco Plantation General Manager

Benny Basuki S. GM PG Watoetoelis/ *Watoetoelis Sugar Mill GM*		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Juni 2016 *June 1, 2016*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Dateof Birth*	:	Sidoarjo, 7 Juni 1964 *Sidoarjo, june 7, 1964*
Usia *Age*	:	54 Tahun *54 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S1 Fakultas Teknik Kimia ITN Malang *Bachelor Degree Faculty of Chemical Engineering from ITN Malang*

Gatot Subiyakto GM PG. Kremboong & PG. Toelangan/*Kremboong & Toelangan Sugar Mill GM*		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Juni 2016 *June 1, 2016*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Dateof Birth*	:	Bangkalan, 21 April 1962 *Bangkalan, April 21, 1962*
Usia *Age*	:	55 Tahun *55 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S2 Magister Manajemen Uniska *Master Degree of Managment from Uniska*

Hb. Koes Darmawanto GM PG Gempolkrep		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	18 Februari 2015 *February 18, 2015*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Dateof Birth*	:	Kudus, 3 November 1962 *Kudus, November 3, 1962*
Usia *Age*	:	55 Tahun *55 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S2 Magister Manajemen Universitas Islam Kediri *Master Degree of Managment Islam University Kediri*

Moch. Arif Effendi GM PG Djombang Baru		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Januari 2016 *January 1, 2016*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Dateof Birth*	:	Kediri, 10 November 1962 *Kediri, November 10, 1962*
Usia *Age*	:	55 Tahun *55 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S2 Magister Manajemen Universitas Gajayana Malang *Master Degree of Magister Managment Gajayana University Malang*

Profil Pejabat Puncak
Profile of Senior Executives

Ir. Glen AT. Sorongan GM PG Ngadiredjo/*Ngadiredjo Sugar Mill GM*		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Juli 2013 *July 1, 2013*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Dateof Birth*	:	Gresik, 25 Januari 1960 *Gresik, January 25, 1960*
Usia *Age*	:	53 Tahun *53 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S1 Fakultas Pertanian Universitas Negeri Jember *Bachelor Degree Faculty of Agricultural Jember State University*

Soekamto P GM PG Lestari/*Lestari Sugar Mill GM*		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Januari 2015 *January 1, 2015*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Dateof Birth*	:	Magetan, 12 November 1963 *Magetan, November 12, 1963*
Usia *Age*	:	54 Tahun *54 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S2 Magister Manajemen Agribisnis Kediri *Master Degree of Agribusiness Managment Kediri*

Alan Purwandiarto GM PG. Meritjan/*Meritjan Sugar Mill GM*		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	31 Desember 2014 *December 31, 2014*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Dateof Birth*	:	Lumajang, 27 Februari 1964 *Lumajang, February 27, 1964*
Usia *Age*	:	53 Tahun *53 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S2 Magister Manajemen Universitas Airlangga Surabaya *Master Degree of Managment Airlamgga University Surabaya*

Eko Budhi Djuniarto GM PG Pesantren Baru/*Pesantren Baru Sugar Mill GM*		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	15 Januari 2015 *January 15, 2015*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Dateof Birth*	:	Situbondo, 8 Juni 1960 *Situbondo, June 8, 1960*
Usia *Age*	:	57 Tahun *57 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S1 Fakultas Teknik Kimia ITN Malang *Bachelor Degree Faculty of Chemical Engineering ITN Malang*

Abdul Munib GM PG Tjoekir/ *Tjoekir Sugar Mill GM*		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	31 Desember 2014 *December 31, 2014*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Dateof Birth*	:	Nganjuk, 19 Maret 1964 *Nganjuk, March 19, 1964*
Usia *Age*	:	54 Tahun *54 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S1 Fakultas Pertanian Universitas Darul Ulum Jombang *Bachelor Degree Faculty of Agricultural Darul Ulum University Jombang*

Adi Baskoro GM PG Modjopanggoong/ *Modjopanggoong Sugar Mill GM*		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Januari 2015 *January 1, 2015*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Dateof Birth*	:	Jember, 20 Desember 1961 *Jember, December 20, 1961*
Usia *Age*	:	56 Tahun *56 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S1 Fakultas Pertanian Universitas Darul Ulum Jombang *Bachelor Degree Faculty of Agriculture Darul Ulum University Jombang*

Untung Moeljono GM Kebun Kertosari/*Kertosari Plantation GM*		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Januari 2014 *January 1, 2014*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Dateof Birth*	:	Jember, 14 Maret 1965 *Jember, March 14, 1965*
Usia *Age*	:	52 Tahun *52 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S1 Fakultas Ekonomi Kasgoro Jember *Bachelor Degree Faculty of Economic from kasgoro Jember*

Sugianto GM Kebun Ajong Gayasan/*Ajong Gayasan Plantation GM*		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Januari 2014 *January 1, 2014*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Dateof Birth*	:	Jember, 4 Maret 1962 *Jember, March 4, 1962*
Usia *Age*	:	52 Tahun *52 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S1 Fakultas Pertanian Universitas Negeri Jember *Bachelor Degree Faculty of Agriculture Jember State University*

Purwadi GM Kebun Gayamprit, Wedibirit/*Gayamprit plantation GM, Wedibirit*		
Menjabat Sejak *Served Since*	:	1 Januari 2016 *January 1, 2016*
Tempat/Tanggal Lahir *Place / Dateof Birth*	:	Klaten, 2 Januari 1963 *Klaten, January 2, 1963*
Usia *Age*	:	54 Tahun *54 Years*
Pendidikan Terakhir *Education*	:	S1 Fakultas Ekonomi UNWHIDA Klaten *Bachelor Degree of Economic from UNWHIDA Klaten*

Sekilas Demografi Karyawan

Employee Demographic

Perkembangan Jumlah Karyawan Tahun 2012-2016
The Development of Number of Employees year 2012-2016
(orang)
(peoples)

"9.885 karyawan yang berkarya di Perseroan tersebar di Kantor Pusat, 1 Kantor Perwakilan, 11 Pabrik Gula, serta 3 Kebun Tembakau"

"9,885 employees are working for the Company and located at the Head Office, one Representative Office, eleven Sugar Mills, three Tobacco Fields"

Uraian tentang pengembangan kekaryawanan Perseroan dapat dilihat pada bab Fungsi Penunjang Bisnis dalam bagian pembahasan Sumber Daya Manusia.

Description on the Company's employee development can be seen in the Business Supporting Function chapter in the discussion of Human Resources.

Komposisi Pemegang Saham
Composition of Shareholders

RINCIAN PEMEGANG SAHAM

Komposisi Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

DETAILS OF SHAREHOLDERS

The Composition of Company's Shareholders are as follow:

Modal Saham dan Kepemilikan Saham PTPN X per 31 Desember 2016

Share Capitals and Share Ownerships of PTPN X per December 31, 2016

Pemegang Saham *Shareholders*	Jumlah Saham *(lembar) Number of Share (Share)*	Nominal *Par Value (Rp)*	Persentase Kepemilikan *Percentage of Ownership (%)*
Saham Seri A *Series A Share*			
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	1	1.000.000	0,00%
Saham Seri B *Series B Share*			
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	1.661.035	1.661.035.000.000	90,00%
Negara Republik Indonesia *Republic of Indonesia*	184.560	184.560.000.000	10,00%
Jumlah *Total*	1.845.596	1.845.596.000.000	100,00%

Komposisi Kepemilikan Saham Seri B PTPN X
The Composition of Series B Share Ownership of PTPN X

Komposisi Pemegang Saham

INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA

Pemegang saham utama dari Perseroan adalah PT Perkebunan Nusantara III (Persero), atau PTPN III. PTPN III sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana Negara Republik Indonesia memiliki seluruh saham atau 100% dari saham PTPN III. Dengan demikian, Negara Republik Indonesia menjadi entitas induk akhir dari Perseroan.

Di bawah ini disajikan informasi dalam grafis tentang PTPN III sebagai pemegang saham utama Perseroan.

INFORMATION ABOUT MAJOR SHAREHOLDERS

The major shareholders of the Company is PT Perkebunan Nusantara III (Persero) or PTPN III. PTPN III is a State-Owned Enterprise in which the Republic of Indonesia owns its entire shares or 100% of PTPN III's shares. Thus, the Republic of Indonesia is the ultimate parent entity of the Company.

Below is a graphic information about PTPN III as the majority shareholders of the Company.

Struktur Pemegang Saham Utama PTPN X
The Structure of the Major Shareholders of PTPN X

Komposisi Kepemilikan Saham PTPN III (Persero) Sebagai Pemegang Saham Utama PTPN X
The Composition of Share Ownership of PTPN III (Persero) As the Major Shareholders of PTPN X

INFORMASI TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN KELOMPOK PEMEGANG SAHAM MASING-MASING DI BAWAH 5 (LIMA) PERSEN

Hingga 31 Desember 2016, Perseroan tidak memiliki kebijakan Program Kepemilikan Saham Karyawan, atau *Employee Stock Ownership Program* (ESOP) dan Program Kepemilikan Saham Karyawan, atau *Management Stock Ownership Program* (MSOP). Perseroan juga tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham yang memungkinkan kepemilikan saham Perseroan oleh publik. Seluruh kepemilikan saham sesuai dengan penjelasan di atas.

INFORMATION ABOUT SHARE OWNERSHIP BY THE MANAGEMENT AND GROUP OF SHAREHOLDERS WITH LESS THAN 5 (FIVE) PERCENT

Until December 31, 2016, the Company did not have a policy regarding the Employee Stock Ownership Program (ESOP) and the Management Stock Ownership Program (MSOP). The Company also did not conduct an Initial Public Offering, which allowed the public to own the Company's shares. All share ownership are in accordance with the explainations above.

Jabatan *Position*	Nama *Name*	Jumlah Kepemilikan Saham PTPN X *Total of Share Ownership in PTPN X*
Komisaris Utama *President Commissioner*	Rudi Wibowo	- Nihil - *- Nil -*
Komisaris *Commissioner*	Sukardi Rinakit	- Nihil - *- Nil -*
Komisaris *Commissioner*	Y.B. Priyatmo Hadi	- Nihil - *- Nil -*
Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Arvan Rivaldy Rebion Siregar	- Nihil - *- Nil -*
Komisaris** *Commissioner***	Djoko Moeljono	- Nihil - *- Nil -*
Komisaris* *Commissioner**	Indarto	- Nihil - *- Nil -*
Komisaris** *Commissioner***	Heru Sudibyo	- Nihil - *- Nil -*
Komisaris** *Commissioner***	Susanto Darus	- Nihil - *- Nil -*
Direktur Utama *President Director*	Dwi Satriyo Annurogo	- Nihil - *- Nil -*
Direktur Utama*** *President Director****	Subiyono	- Nihil - *- Nil -*
Direktur Operasional *Director of Operations*	Mustaqim	- Nihil - *- Nil -*
Direktur Operasional*** *Director of Operations****	Tarsisius Sutaryanto	- Nihil - *- Nil -*
Direktur Komersil *Director of Commercial*	Muhammad Hanugroho	- Nihil - *- Nil -*
Direktur SDM & Umum*** *Director of HR and GA****	Djoko Santoso	- Nihil - *- Nil -*

*) Komisaris, Indarto digantikan oleh Sukardi Rinakit.

**) Komisaris Djoko Moeljono, Heru Sudibyo dan Susanto Darus digantikan oleh Y.B Priyatmo Hadi dan Arva Rivaldy Rebion Siregar.

***) Direksi, Subiyono, Tarsisius Sutaryanto dan Djoko Santoso digantikan oleh Dwi Satriyo Annurogo dan Mustaqim.

*) Commissioner Indarto was replaced by Sukardi Rinakit.

**) CommissionersDjoko Moeljono, Heru Sudibyo and Susanto Darus were replaced by Y.B Priyatmo Hadi dan Arva Rivaldy Rebion Siregar.

***) Director Subiyono, Tarsisius Sutaryanto and Djoko Santoso were replaced by Dwi Satriyo Annurogo dan Mustaqim.

Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi/*joint venture* (JV)/*special purpose vehicle* (SPV)

The List of Subsidiaries and Associates/Joint Venture (JV)/ Special Purpose Vehicle (SPV)

Entitas Anak *Subsidiary Entities*	Bidang Usaha *Line of Business*	Domisili *Domiciled in*	Tahun Beroperasi *Operating Years*	Kepemilikan Saham *Share Owership (%)*		Aset Sebelum Eliminasi (Rp juta) *Assets Before Elimination (Rp Million)*		Status Operasi *Operating Status*
				2016	2015	2016	2015	
PT Mitratani Dua Tujuh	Industri Edamame dan Okra *Edamame and Okra Industry*	Jember	1994	65,00%	65,00%	135.717	116.430	Beroperasi *Operating*
PT Dasaplast Nusantara	Industri plastik dan *fiber* *Plastic and Fiber Industry*	Jepara	2004	90,00%	90,00%	159.431	131.824	Beroperasi *Operating*
PT Nusantara Medika Utama	Pelayanan rumah sakit *Hospital Services*	Mojokerto	2013	99,56%	99,56%	212.304	184.551	Beroperasi *Operating*
PT Energi Agro Nusantara	Industri bahan bakar *Fuel Industry*	Mojokerto	2013	99,30%	99,30%	55.120	50.625	Beroperasi *Operating*

Entitas Asosiasi, *Joint Venture* (JV)/ *Special Purpose Vehicle* (SPV) *Associated Entities, Joint Venture (JV) / Special Purpose Vehicle (SPV*	Bidang Usaha *Line of Business*	Domisili *Domiciled in*	Kepemilikan Saham *Share Owership (%)*		Status Operasi *Operating Status*
			2016	2015	
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	Pemasaran *Marketing*	Jakarta	7,14%	7,14%	Beroperasi *Operating*
PT Riset Perkebunan Nusantara	Riset penelitian dan pengembangan *Research and development*	Bogor	6,67%	6,67%	Beroperasi *Operating*
Perantara Makelar Tembakau Indonesia	Pemasaran *Marketing*	Jerman *Germany*	24,53%	24,53%	Beroperasi *Operating*

PT Mitratani Dua Tujuh (MT 27)

PT Mitratani Dua Tujuh ("MT 27") dibentuk sebagai kerjasama antara Perseroan dan PT Kelola Mina Laut ("PT KML"). Berlokasi di Mangli, Jember, Jawa Timur, MT 27 bergerak dengan komoditi utama *frozen vegetable* kedelai Edamame dan Okura yang dipasarkan melalui ekspor ke Jepang dan sebagian untuk pasar lokal.

Perseroan memiliki saham 65,00% atas MT 27, sementara PT KML memiliki 35,00% saham MT 27.

PT Mitratani Dua Tujuh (MT 27)

PT Mitratani Dua Tujuh ("MT 27") was established as a cooperation between the Company and PT Kelola Mina Laut ("PT KML"). Located in Mangli, Jember, East Java, MT 27's main commodity is frozen vegetables such as Edamame soy and Okura, which are mostly marketed as export goods to Japan and some portion for local markets.

The Company owns 65.00% shares of MT 27, while 35.00% shares are owned by PT KML.

Ikhtisar Keuangan / **Financial Highlight**

Rp juta	2016	2015	*Rp Million*
Pendapatan	208.638	181.632	*Revenue*
Beban Usaha	35.623	36.443	*Operating Expenses*
Laba Bersih	14.140	20.049	*Net Profit*
Laba Komprehensif	13.309	28.439	*Comprehensive Income*
Aset	135.717	116.430	*Assets*
Liabilitas	48.959	53.141	*Liability*
Ekuitas	86.758	77.446	*Equity*

Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi/joint venture (JV)/special purpose vehicle (SPV)
The List of Subsidiaries and Associates/Joint Venture (JV)/ Special Purpose Vehicle (SPV)

PT Dasaplast Nusantara (DPN)

Dibentuk pada tahun 2004 sebagai perusahaan gabungan antara Perseroan dan perusahaan swasta, PT Dasaplast Nusantara ("DPN") berlokasi di Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. DPN bergerak di bidang industri karung plastik *Polypropylene* (PP) *Woven Bag, Polyethylene (PE) Inner Bag* dan *Leno Mesh* (*Warring*) yang telah memenuhi standar internasional dengan kemampuan anti-slip sehingga mengurangi risiko tergelincir, mengurangi kecelakaan kerja dan merubah standar keamanan kerja. Untuk pemasaran produk selain di Indonesia, juga diekspor ke manca negara antara lain ke Asia, Eropa, Timur Tengah, Amerika Selatan, Kanada, Amerika Serikat.

Perseroan memiliki saham mayoritas DPN yang mencapai 90,00%, sementara sisanya sebesar 10,00% dimiliki oleh PT Surya Satria Sembada.

PT Dasaplast Nusantara (DPN)

Established in 2004 as a joint venture between the Company and a private company, PT Dasaplast Nusantara ("DPN") is located in Pecangaan, Jepara Regency, Central Java. DPN operates in plastic bags industry, such as Polypropylene (PP) Woven Bag, Polyethylene (PE) Inner Bag and Leno Mesh (Warring), which has met the internasional standard with its anti-slip ability that reduce the risk of slippery as well as work accidents, and change the work safety standards. Besides Indonesian market, the plastic bags are also exported to other countries, such as Asia, Europe, Middle East, South America, Canada, and the United States.

The Company is the major shareholder of DPN with 90,00% shares ownership, while the remaining 10,00% is owned by PT Surya Satria Sembada.

Ikhtisar Keuangan / **Financial Highlight**

Rp juta	2016	2015	*Rp Million*
Pendapatan	111.993	93.412	*Revenue*
Beban Usaha	6.779	6.388	*Operating Expenses*
Laba Bersih	5.129	2.603	*Net Profit*
Laba Komprehensif	4.905	36.966	*Comprehensive Income*
Aset	159.431	131.824	*Assets*
Liabilitas	75.844	53.141	*Liability*
Ekuitas	83.588	78.683	*Equity*

PT Nusantara Medika Utama (NMU)

PT Nusantara Medika Utama ("NMU") merupakan bentuk spin off dari Strategic Business Unit (SBU) Rumah Sakit milik Perseroan yang berdiri berdasarkan Akta Notaris Sri Eliana Tjahjoharto, S.H. No. 14 tanggal 19 Januari 2013 dan berkantor pusat di Mojokerto, Jawa Timur. SBU Rumah Sakit Perseroan dibentuk pada 1 Desember 2003. Perubahan bentuk pengelolaan rumah sakit dari SBU menjadi entitas anak usaha dilakukan dalam rangka meningkatkan profesionalitas pengelolaan rumah sakit dan menciptakan nilai tambah bagi Perseroan sebagai entitas induk. Saat ini PT NMU Mengelola 4 (empat) unit usaha rumah sakit, yaitu RS Gatoel, RS HVA Toeloengredjo, RS Perkebunan Jember dan RS Cendana Blitar.

PT Nusantara Medika Utama (NMU)

PT Nusantara Medika Utama ("NMU") is a spin-off of Company's Strategic Business Unit (SBU) which was established based on a Notarial Deed of Sri Eliana Tjahjoharto, S.H. No. 14 dated January 19, 2013, headquartered in Mojokerto, East Java. Company SBU Hospital was created on December 1, 2003. Changing the form of hospital management from CBU into Subsidiary was conducted in order to improve the professionalism of Hospital Management and to create an added value for the Company as a Parent Entity. PT NMU currently manages 4 (four) Hospital business units, namely Gatoel Hospital, HVA Toeloengredjo Hospital, Plantation Hospital in Jember and Cendana Hospital in Blitar.

Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi/joint venture (JV)/special purpose vehicle (SPV)
The List of Subsidiaries and Associates/Joint Venture (JV)/ Special Purpose Vehicle (SPV)

Perseroan memiliki saham mayoritas NMU yang mencapai 99,56%, sementara sisanya sebesar 0,04% dimiliki oleh Koperasi Karyawan (KOPKAR) RS Gatoel, KOPKAR RS HVA Toeloengredjo, dan KOPKAR Alamanda.

Most of NMU's shares are owned by the Company, amounted to 99,56%, while the remaining 0,04% is owned by Employee Cooperative (KOPKAR) of Gatoel Hospital, KOPKAR of HVA Toeloengredjo Hospital, and KOPKAR of Alamanda.

Ikhtisar Keuangan / **Financial Highlight**

Rp juta	2016	2015	*Rp Million*
Pendapatan	294.278	254.246	*Revenue*
Beban Usaha	23.347	19.505	*Operating Expenses*
Laba Bersih	24.728	22.286	*Net Profit*
Laba Komprehensif	22.775	22.919	*Comprehensive Income*
Aset	212.304	184.551	*Assets*
Liabilitas	113.348	103.913	*Liability*
Ekuitas	98.955	80.638	*Equity*

PT Energi Agro Nusantara (ENERO)

Pengembangan bisnis Bioetanol dengan memanfaatkan bahan baku tetes dari unit bisnis gula Perseroan merupakan strategi diversifikasi yang berkaitan dengan bisnis utamanya. Didirikan dengan Akta Notaris Sri Eliana Tjahjoharto, S.H., No. 3 tanggal 5 Juni 2013, PT Energi Agro Nusantara ("ENERO") berlokasi di Desa Gempolkerep Mojokerto, Jawa Timur. ENERO merupakan langkah awal Perseroan untuk mewujudkan industri gula terintegrasi.

Perseroan memiliki saham mayoritas ENERO yang mencapai 99,30%, sementara sisanya sebesar 0,70% dimiliki oleh Koperasi Karyawan (KOPKAR) PTPN X.

PT Energi Agro Nusantara (ENERO)

The development of Bioethanol business by utilizing the raw material of molasses from the Company's sugar business unit is a diversification strategy related to the major business. Estasblished by the Notarial Deed of Sri Eliana Tjahjoharto, S.H., No. 3 dated June 5, 2013, PT Energi Agro Nusantara ("ENERO") is located in Gempolkerep Village, Mojokerto, East Java. ENERO is the Company's first step in pursuing an integrated sugar industry.

The major shares of ENERO up to 99,30% are owned by the Company, while the remaining 0,70% is owned by Employee Cooperative (KOPKAR) of PTPN X.

Ikhtisar Keuangan / **Financial Highlight**

Rp juta	2016	2015	*Rp Million*
Pendapatan	115.028	40.131	*Revenue*
Beban Usaha	7.204	9.799	*Operating Expenses*
Laba Bersih	2.208	(43.997)	*Net Profit*
Laba Komprehensif	2.210	(43.896)	*Comprehensive Income*
Aset	55.120	50.625	*Assets*
Liabilitas	39.046	43.761	*Liability*
Ekuitas	16.074	6.864	*Equity*

Struktur Grup PTPN X

Group Structure of PTPN X

Kronologis Penerbitan Saham

Share Listing Chronology

Hingga tanggal 31 Desember 2016 maupun tanggal disampaikannya data/informasi ini, Perseroan tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan tidak memperdagangkan sahamnya di bursa saham manapun. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), dan nama bursa dimana saham Perseroan dicatatkan.

Until December 31, 2016 and the date of submission of this data/information, the Company did not conducted an Initial Public Offering and does not trade its shares in any stock market. Therefore, there was no information related to the date of share listing, the amount, par value, stock offering price for each corporate action, number of shares registered after each corporate action and the name of the stock exchange where the Company's share is listed.

Kronologis Penerbitan Obligasi

Bonds Listing Chronology

Melalui surat No. XX-PESWA/13/026 tanggal 19 April 2013, Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Emisi Obligasi Perseroan tahun 2013 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,9% dan nominal sebesar Rp700.000.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Pernyataan pendaftaran tersebut dinyatakan efektif berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-198/D.04.2013 tertanggal 27 Juni 2013.

Penerbitan Emisi Obligasi Perseroan dengan nama Obligasi I PTPN X Tahun 2013 tersebut dicatatkan pada tanggal 8 Juli 2013 di BEI dengan perincian sebagai berikut:

Through Letter No. XX-PESWA/13/026 dated April 19, 2013, the Company submitted a Registration Statement to the Financial Services Authority on the emission of corporate bonds in 2013 with fixed interest rate of 8,9% and par value of Rp700,000,000,000 dengan with 5 years maturity through Indonesia Stock Exchange (IDX). The Registration Statement was efective based on the Financial Services Authority Letter No. S-198/D.04.2013 dated June 27, 2013.

The issuance of the Company's Bonds Emission under the name PTPN X Bonds I of 2013 was recorded on July 8, 2013 in IDX with details as follow:

Nama *Name*	Tanggal Penerbitan *Date of Publishing*	Tingkat Bunga/ Imbalan *Interest Rate / Benefits*	Tanggal Jatuh Tempo *Maturity Date*	Nilai Penawaran *IPO Price (Rp)*	Bursa Pencatatan dan Perdagangan *Recording and Trade Exchange*	Peringkat *Rating*
Obligasi I PTPN X Tahun 2013 Kode Obligasi: PPNX01 Kode ISIN: IDA000059604 *Bond I of PTPN X of 2013* *Bond Code: PPNX01* *ISIN Code: IDA000059604*	5 Juli 2013 *July 5, 2013*	Tetap 8,9% per tahun *Fixed 8.9% per year*	5 tahun, 5 Juli 2018 *5 years, July 5, 2018*	700.000.000.000	Bursa Efek Indonesia *Indonesia Stock Exchange*	Pada saat penerbitan: A+ *At the Time of Listing: A+* Per 31 Desember 2016: BBB+ *per December 31, 2016: BBB+*

Realisasi Penggunaan Dana Obligasi I PTPN X sebesar Rp700 miliar telah seluruhnya digunakan sesuai tujuan penggunaannya yaitu ± 39% untuk pelunasan *outstanding* kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan ± 61% digunakan sebagai belanja modal dan atau modal kerja dalam rangka optimalisasi 11 unit Pabrik Gula milik Perseroan. Pembayaran Bunga Obligasi I PTPN X dilakukan di setiap kuartal, dengan tanggal pembayaran bunga pertama dilakukan pada 5 Oktober 2013.

The use of proceed from PTPN X Bonds in amount of Rp 700 billion has been fully utilized according to its intended use of proceeds, which is approximately 39% (thirty nine percent) for the repayment of outstanding credit at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and approximately 61% (sixty one percent) for capital expenditure and or working capital in order to optimize Company's 11 sugar mills. The Interest Payment of PTPN X Bonds I is paid quarterly, with the first payment date at October 5, 2013.

Kronologis Penerbitan Efek Lainnya
Other Securities Listing Chronology

Selain penerbitan Obligasi I PTPN X, hingga akhir tahun 2016 Perseroan tidak menerbitkan efek lainnya.

Besides the issuance of PTPN X Bonds I, the Company did not issued other securities until the end of 2016.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Capital Market Supporting Institutions and Professions

Informasi Perdagangan dan Pencatatan Efek *Information of Trade and Stock Listing*	:	**Bursa Efek Indonesia** Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp: +62 21 515 0515 Email: callcenter@idx.co.id Website: www.idx.co.id
Kustodian *Custodian*	:	**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53 Jakarta 12190 Indonesia Telp: +62 21 515 2855 Fax: +62 21 5299 1199 Bebas Pulsa: 0800-186-5734 Email: helpdesk@ksei.co.id Website: www.ksei.co.id
Wali Amanat *Trustee*	:	**PT Bank CIMB Niaga** Graha CIMB Niaga Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 Telp: +62 21 5460 555 / 666 Fax: +62 21 259 5205
Pemeringkat Efek/Obligasi *Stock / Bond Rating*		**Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)** Panin Tower Senayan City, 17th Floor Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270 Telp: +62 21 7278 2380 Fax: +62 21 7278 2370

Akuntan Publik *Public Accountant*	:	**Purwantono, Sungkoro & Surja (affiliated Ernst & Young)** Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp : +62 21 52895000 Fax : +62 21 5289 4100 Website : www.ey.com
Notaris *Notary*	:	**Arry Supratno, SH** Gedung Arthaloka Lt 7 Suite 706 Jl. Jend Sudirman Kav. 2 Jakarta Telp: +62 21 251 1351 Fax: +62 21 251 1413
Konsultan Hukum *Legal Counsel*	:	**Assegaf Hamzah & Partner** Menara Rajawali, 16th Floor Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1 Jakarta 12950 Telp: +62 21 255 57800 Fax: +62 21 255 57899

Penghargaan dan Sertifikasi 2016

Awards and Certifications 2016

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Occupational Safety and Health Management System

TOP INFORMATION TECHNOLOGY AWARDS 2016

TOP TELECOMMUNICATION AWARDS 2016

Penghargaan dan Sertifikasi 2016
Awards and Certifications 2016

Sertifikasi ISO 9001:2008

Gold Winner kategori "The Best if State Own Enterprise Inhouse Magazine (InMA) 2017"

Peringkat Hijau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) 2015-2016

Daftar Alamat Entitas Anak dan Kantor Cabang/Kantor Perwakilan

Address List of Subsidiary Entities and Branch / Representative Office

Daftar Alamat Entitas Anak dan Kantor Cabang/Kantor Perwakilan
Address List of Subsidiary Entities and Branch / Representative Office

Daftar Alamat Entitas Anak dan Kantor Cabang/Kantor Perwakilan
Address List of Subsidiary Entities and Branch / Representative Office

Kantor Pusat PTPN X *Head Office of PTPN X*	:	Jl. Jembatan Merah No. 3 – 11 Surabaya 60175, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 31 3523143 (*hunting*) Website: http://ptpn10.co.id Email: contact@ptpn10.co.id
Kantor Perwakilan PTPN X *Representative Office of PTPN X*	:	Perumahan Taman Gandaria Valey Blok F 12 A, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12140, DKI Jakarta, Indonesia Telp/Fax: +62 21 7247733
Entitas Anak *Subsidiary*		
PT Mitratani Dua Tujuh	:	Jl Brawijaya 83 Mangli Jember 68136, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 331-422222, 488881 Fax: +62 331-489456, 489457 Email: mitratani27@mitratani27.co.id
PT Dasaplast Nusantara	:	Kantor Pusat/ *Head Office* Jl. Raya Pecangaan 3 Jepara 59462, Jawa Tengah, Indonesia Telp : +62 291 755210 Fax : +62 291 755205 www.dasaplast.com
		Kantor Perwakilan/ *Representative Office* Jl. Gajah Mada 23-27A Semarang 50133, Jawa Tengah, Indonesia Telp: +62 24 3543431 Fax: +62 24 3543843
PT Nusantara Medika Utama	:	Kantor Pusat/ *Head Office* Jl. Hayam Wuruk No. 88-90 Mojokerto 61321, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 321 328557, 390988 Fax: +62 321 395117 Website: www.nmu.co.id
		Rumah Sakit Gatoel Jl. Raden Wijaya No. 56 Mojokerto 61321, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 321 321681, 322329 Fax: +62 321 321684 UGD: +62 8155223444
		Rumah Sakit Toeloengredjo Jl. A Yani No. 25 Pare Kediri 64212, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 354 391047, 391145 Fax: +62 354 3392883
		Rumah Sakit Perkebunan Jl. Bedadung No. 2 Jember 68118, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 331 487104, 487226 Fax: +62 331 485912
		Rumah Sakit Cendana Jl. Kusuma Bangsa No. 1, Kanigoro Blitar 66171, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 342 442555

Daftar Alamat Entitas Anak dan Kantor Cabang/Kantor Perwakilan
Address List of Subsidiary Entities and Branch / Representative Office

PT Energi Agro Nusantara	:	Desa Gempolkerep, Gedeg Mojokerto 61351, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 321 360360 Fax: +62321 363363 Email: customercare@enero.co.id
Pabrik Gula *Sugar Mills*		
		PG Watoetoelis Desa. Temu, Kec. Prambon Sidoarjo 61262, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 31 8971007, 8972383 Fax: +62 31 8970079 Email: pg.watoetoelis@ptpn10.co.id
		PG Toelangan Ds. Tulangan, Kec. Tulangan Sidoarjo 61273, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 31 8851002 Fax: +62 31 8851001 Email: pg.toelangan@ptpn10.co.id
		PG Kremboong Ds. Krembung, Kec. Krembung Sidoarjo 61275, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 31 8851609, 8851315 Fax: +62 31 8151661 Email: pg.kremboong@ptpn10.co.id
		PG Gempolkrep Ds. Gempolkerep, Kec. Gedeg Mojokerto 61302, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 321 362111, 362114 Fax: +62 321 362414 Email: pg.gempolkrep@ptpn10.co.id
		PG Djombang Baru Jl. Panglima Sudirman No. 1 Jombang 61417, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 321 861311 Fax: +62 321 866373 Email: pg.tjoekir@ptpn10.co.id
		PG Tjoekir Ds. Cukir, Kec. Diwek Jombang 61471, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 321 861441 Fax: +62 321 868600 Email: pg.tjoekir@ptpn10.co.id
		PG Lestari Ds. Ngrombot, Kec. Patianrowo Nganjuk 64391, Jawa Timur, Indonesia Telp : +62 358 552468, 551439 Fax : +62 358 552468 Email : pg.lestari@ptpn10.co.id

Daftar Alamat Entitas Anak dan Kantor Cabang/Kantor Perwakilan
Address List of Subsidiary Entities and Branch / Representative Office

	PG Meritjan Jl. Merbabu, Ds. Mrican, Kec. Mojoroto Kediri 64102, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 354 771619, 773649 Fax: +62 354 773651 Email: pg.meritjan@ptpn10.co.id
	PG Pesantren Baru Jl. Mauni No. 334, Kec. Pesantren Kediri 64131, Jawa Timur, Indonesia Kotak Pos 6 Telp: +62 354 684610 Fax: +62 354 686538 Email: pg.pesantrenbaru@ptpn10.co.id
	PG Ngadiredjo Ds. Jambean, Kec. Kras Kediri 64102, Jawa Timur, Indonesia Tromolpos 5 Telp: +62 354 479700 Fax: +62 354 477178 Email: pg.ngadiredjo@ptpn10.co.id
	PG Modjopanggoong Ds. Sidorejo, Kec. Kauman Tulungagung 66261, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 355 321633, 324638 Fax: +62 355 327126 Email: pg.modjopanggoong@ptpn10.co.id
Kebun Tembakau *Tobacco Plantation*	
	Kebun Kebonarum/Gayamprit/Wedhibirit Jl. Pemuda Selatan No. 225 Klaten 57411, Jawa Tengah, Indonesia Telp: +62 272 321806, 320583, 321252 Fax: +62 272 322203 Email: wedibirit@ptpn10.co.id
	Kebun Kertosari Jl. A Yani No. 688 Pakusari Jember 68181, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 331 334177 Fax: +62 331 332854 Email: kt.kertosari@ptpn10.co.id
	Kebun Ajong Gayasan Jl. Mh Thamrin No.143 Ajung Jember 68175, Jawa Timur, Indonesia Telp: +62 331 321501, 331058 Fax: +62 331 335145 Email: kt.ajong@ptpn10.co.id

Informasi pada Situs Web Perseroan

Information of the Company's Website

Perseroan memiliki situs *web* resmi dengan alamat http://ptpn10.co.id. Situs *Web* ini berisi informasi seputar korporasi Perseroan, meliputi diantaranya profil Perseroan, profil manajemen dan struktur organisasi Perseroan, ulasan produk-produk yang dimiliki, informasi unit usaha, informasi dan kebijakan organisasi, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), kumpulan media, kontak, hingga informasi tentang kesempatan berkarir di Perseroan. Situs *web* ini menjadi portal yang dapat diakses secara terbuka, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif tentang Perseroan kepada khalayak luas.

The Company has an official website with the web address: http://ptpn10.co.id. This website contains information about the Company, including Company profile, management profile and organizational structure, product reviews, business unit information, organizational information and policies, Partnership and Community Development Program (PKBL), media collection, contacts, and information about career opportunities in the Company. This website becomes an openly accessible portal, with the aim of providing comprehensive information about the Company to the public.

Uraian *Description*	Ketersediaan *Availability*	Keterangan *Remark*
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu *Information about shareholders up to ultimate individual owner*	x	Perseroan belum menempatkan informasi terkait pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu pada situs *web*. *The Company has not presented information about shareholders up to ultimate individual owners on the website*
Isi Kode Etik *Code of Conduct Content*	v	Telah disajikan. *Has been presented*
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan *Information about the General Meeting of Shareholders (GMS), which at least includes the agenda, summary of the minutes, and information on important dates, such as the date of the GMS announcement, the date of the GMS invitation, the date of the GMS, the announcement date of summary of the minutes of the GMS.*	v	Telah disajikan. *Has been presented*
Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir) *Separated Annual Financial Report (the last 5 years)*	v	Telah disajikan. *Has been presented*
Profil Dewan Komisaris dan Direksi *Profiles of Boards of Commissioners and Board of Directors*	v	Telah disajikan. *Has been presented*
Piagam/*Charter* Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal *Charters of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit*	v	Telah disajikan. *Has been presented*

v: tersedia pada situs web Perseroan

x: belum tersedia pada situs web Perseroan

v: available on the Company's website

x: not available on the Company's website

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Education and/or Training for Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit

Nama *Name*	Kegiatan *Activity*	Tanggal/Tempat *Date/Venue*	Penyelenggara *Organizer*
Dewan Komisaris *Board of Commissioners*			
Rudi Wibowo (Komisaris Utama) *(President Commissioner)*	Seminar Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan PKBL Melalui Perbaikan Kinerja Program Kemitraan, Bina Lingkungan, dan Mitra Binaan *Seminar on Improving the Accountability of PKBL Management through Improving the Performance of Partnership, Community Development, and Fostered Partners Program*	Hyatt Regency, Bandung, 14 Mei 2016	LPMP
Direksi *Board of Directors*			
Subiyono (Direktur Utama) *(President Director)*	*Study of the Performance of Region Spesific Sugarcane Varieties for Propagation in East Java*	New Delhi, India, 17 - 23 Februari 2016	STM Project Ltd.
	Narasumber untuk Paparan Roadmap Industri Gula Nasional 2017-2019 *Speaker in the Expose on the National Sugar Industry Roadmap*	Grandcity Surabaya, 4 Mei 2016	Kongres IKAGI
	Orasi Ilmiah di Universitas Trunojoyo Madura, "Peluang dan Tantangan Pembangunan Industri Gula Melalui Penyiapan Tebu Lahan Kering di Madura" *Scientific Oration at Trunojoyo University Madura, "Opportunities and Challenges of Sugar Industry Development through the Preparation of Dry Sugarcane in Madura"*	Universitas Trunojoyo Madura, 11 Agustus 2016	Universitas Trunojoyo Madura
	Narasumber "Ketahanan Pangan dan Logistik" *Expert source on "Food Security and Logistics"*	Hotel Dharmawangsa, Jakarta, 3 November 2016	Forum BUMN 2016
Tarsisius Sutaryanto (Direktur Produksi/ Operasional) *(Production/Operational Director)*	Menjadi Narasumber Workshop di LPP, Yogyakarta *Expert source for Workshop at LPP, Yogyakarta*	LPP Yogyakarta, 12 - 13 Februari 2016	LPP
	Study of the Performance of Region Spesific Sugarcane Varieties for Propagation in East Java	New Delhi, India, 17 - 23 Februari 2016	STM Project Ltd.
	Narasumber Workshop LPP *Expert source for Workshop at LPP*	LPP, Yogyakarta, 6 April 2016	LPP
	Narasumber Kursus KMP di Yogya *Expert source for KMP Course in Yogya*	KMP, Yogyakarta, 22 - 23 Mei 2016	KMP
	Narasumber Semiloka AGI dan LPP *Expert source for Semi-workshop at AGI and LPP*	Yogyakarta, 31 Agustus - 1 September 2016	Asosiasi Gula Indonesia (AGI)
	Mengajar di LPP *Lecture at LPP*	LPP, Yogyakarta, 4 November 2016	LPP
Muhammad Hanugroho (Direktur Komersil) *(Commercial Director)*	*Study of the Performance of Region Spesific Sugarcane Varieties for Propagation in East Java*	New Delhi, India, 17 - 23 Februari 2016	STM Project Ltd.
Djoko Santoso (Direktur Sumber Daya Manusia & Umum)	*Study of the Performance of Region Spesific Sugarcane Varieties for Propagation in East Java*	New Delhi, India, 17 - 23 Februari 2016	STM Project Ltd.
Moch Sulton (Direktur Perencanaan & Pengembangan)	*Study of the Performance of Region Spesific Sugarcane Varieties for Propagation in East Java*	New Delhi, India, 17 - 23 Februari 2016	STM Project Ltd.

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal
Education and/or Training for Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit

Nama *Name*	Kegiatan *Activity*	Tanggal/Tempat *Date/Venue*	Penyelenggara *Organizer*
Komite Audit *Audit Committee*			
Di tahun 2016 Komite Audit tidak melaksanakan program pembelajaran berkelanjutan. *In 2016 the Audit Committee did not conduct sustainable learning.*			
Komite Nominasi dan Remunerasi *Remuneration and Nomination Committee*			
Perseroan belum memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi *The Company has not had the Remuneration and Nomination Committee.*			
Komite Lainnya *Other Committees*			
Perseroan belum memiliki komite lainnya selain Komite Audit *The Company has not had other committees other than Audit Committee.*			
Sekretaris Perusahaan *Corporate Secretary*			
7 karyawan/*employees*	Training Software Microsoft *Microsoft Software Training*	Best Western Papilio Hotel Surabaya, 10 - 11 Februari 2016	Internal Perseroan, bekerjasama dengan PT SoftwareOne Indonesia *Company's Internal collaborating with PT SoftwareOne Indonesia*
2 karyawan/*employees*	Pelatihan Training of Trainer GIS Tingkat Advance *Training of Trainer GIS for Advance Level*	Allianz Tower Jakarta, 18 - 23 April 2016	PT Micronet Gigatech Indoglobal
Audit Internal/Satuan Pengawasan Intern *Internal Audit/Internal Control Unit*			
3 orang/*persons*	Kursus Dasar-dasar Audit *Basic Audit Course*	Cipanas – Puncak, 11 - 21 Januari 2016	Pusat Pengembangan Akuntansi dan keuangan (PPA&K)
2 orang/*persons*	Kursus Audit Kecurangan *Fraud Audit Course*	Cipanas – Puncak, 14 - 20 Januari 2016	PPA&K
4 orang/*persons*	Kursus Pengadaan Barang dan Jasa *Goods and Services Procurment Course*	Cipanas – Puncak, 14 - 20 Januari 2016	PPA&K
2 orang/*persons*	Pelatihan Komunikasi dan Psikologi Audit *Communication and Psychology of Audit Training*	Cipanas – Puncak, 15 - 24 Februari 2016	PPA&K
1 orang/*persons*	Pelatihan Audit Operasional *Operational Audit Training*	Cipanas – Puncak, 16 - 25 Mei 2016	PPA&K
1 orang/*persons*	Pelatihan Dasar-dasar Audit *Basic Audit Training*	Cipanas – Puncak, 16 - 26 Mei 2016	PPA&K
1 orang/*persons*	Pelatihan Diklat Khusus Kepala SPI *Special Education and Training for Head of IAU*	Cipanas – Puncak, 19 - 25 Mei 2016	PPA&K
1 orang/*persons*	Seminar dan Pengukuhan Gelar PIA (Profesional Internal Auditor) *Seminar and Inauguration of PIA Title (Professional Internal Auditor)*	Centara Grand Hotel Bangkok, 23 - 27 Agustus 2016	Asosiasi Auditor Internal
1 orang/*persons*	Pelatihan Komunikasi dan Psikologi Audit *Communication and Psychology of Audit Training*	Cipanas – Puncak, 13 - 22 Desember 2016	PPA&K

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Sebagai produsen gula di Indonesia, PTPN X menjadi bagian dari formula pemerintah untuk menjaga industri gula sebagai industri yang strategis.

As an Indonesian sugar producer, PTPN X is part of Government formula to keep the sugar industry as a strategic industry.

Tinjauan Ekonomi

Economic Review

PEREKONOMIAN DUNIA

Pertumbuhan ekonomi yang masih melambat di berbagai negara maju dan ketimpangan pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang berkembang mewarnai ekonomi dunia di tahun 2016. Ekonomi Amerika Serikat (AS) pada kuartal IV hanya tumbuh sebesar 1,9% atau lebih rendah dari perkiraan sebesar 2,2%. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi AS di tahun 2016 tumbuh sebesar 1,6% atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yakni 2,6%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di benua Eropa masih mencari momentum untuk tumbuh ditengah dampak Brexit terhadap ekonomi global yang masih terbatas dan krisis utang di beberapa negara anggota Uni Eropa yang belum terselesaikan.

Pertumbuhan ekonomi China lebih rendah sebesar 6,7% di tahun 2016 dibandingkan 6,9% pada tahun sebelumnya menjadi salah satu pemicu pelemahan ekonomi dunia. Hal ini juga menegaskan proses *re-balancing* ekonomi Tiongkok yang sebenarnya terlihat sejak tahun 2011 setelah mampu membukukan pertumbuhan PDB dua digit pada tahun 2010 sebesar 10,6%. Sementara itu, kecuali Indonesia dan India yang mampu membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% dan 7,90%, beberapa negara sedang berkembang seperti Brazil dan Rusia justru terpuruk dengan pertumbuhan ekonomi di zona negatif.

Beberapa bank sentral di berbagai dunia merespon perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut dengan mengeluarkan berbagai kebijakan seperti pemangkasan suku bunga acuan menjadi 0,0% sejak bulan Maret 2016 untuk menggerakkan perekonomian di kawasan Uni Eropa oleh European Central Bank (ECB) atau Bank Sentral Eropa. Sebaliknya, The Fed akhirnya menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 0,75 pada bulan Desember 2016 dengan mempertimbangkan ekspektasi atas penguatan ekonomi dalam jangka pendek setelah ekonomi AS mampu tumbuh sebesar 1,7% di kuartal III tahun 2016.

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2017 akan membaik menjadi 2,8% dibandingkan estimasi pertumbuhan PDB dunia sebesar 2,4% tahun 2016. Perbaikan ekonomi negara-negara maju diharapkan menjadi pendorong penggerak ekonomi dunia.

WORLD ECONOMY

The economic slowdown in developed countries and uneven economic growth in developing countries colored the world economy in 2016. The United States (US) economy in the fourth quarter grew only 1.9% or was lower than the expected 2.2%. Cumulatively, the US economic growth in 2016 grew 1.6% or was lower than the previous year's growth of 2.6%. Meanwhile, the economic growth in Europe was still looking for momentum to grow amid the impact of Brexit on the global economy which was still limited and debt crisis in some EU member states that have not been resolved yet.

China economic growth was lower by 6.7% in 2016 compared to 6.9% in previous year prior to being one of the triggers of the global economic downturn. It also confirmed the process of Chinese economy re-balancing that had been actually seen since 2011 after being able to record double-digit GDP growth in 2010 of 10.6%. Meanwhile, except for Indonesia and India that were able to record economic growth of 5.02% and 7.90%, some developing countries like Brazil and Russia were in a slump with the economic growth in the negative zone.

Some central banks across the world responded to the economic slowdown by issuing various policies such as cuts in the benchmark rate to 0.0% since March 2016 to move the economy in the European Union by the European Central Bank (ECB) or the European Central Bank. Instead, the Fed eventually raised the benchmark interest rates by 25 basis points (bps) to 0.75 in December 2016 by considering the expectation of strengthening the economy in the short term after the US economy grew by 1.7% in the third quarter of 2016.

The World Bank expects that the global economic growth in 2017 will improve to 2.8% compared to world GDP growth estimation of 2.4% in 2016. The economic recovery of developed countries is expected to be a driving force of the world economy. The United States economy improved

Perekonomian Amerika Serikat membaik menjadi 2,2% pada tahun mendatang sementara ekonomi Uni Eropa tumbuh stabil di *level* 1,6% dan *re-balancing* ekonomi Tiongkok terus berlanjut dan tumbuh sekitar 6,5%.

PEREKONOMIAN INDONESIA

Ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik sebesar 5,02% pada tahun 2016 dibandingkan pertumbuhan tahun 2015 sebesar 4,88%. Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi ini adalah konsumsi domestik dengan rata-rata kontribusi sekitar 64,24% dari total PDB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagai komponen terbesar dari konsumsi domestik memiliki porsi signifikan rata-rata sebesar 84,62% dalam periode yang sama. Pengeluaran konsumsi meningkat sebesar 4,3% menjadi Rp6.006,10 triliun tahun 2016 karena peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 5,01% menjadi Rp5.126,50 triliun pada periode yang sama.

Inflasi yang terkendali sebesar 3,02% di tahun 2016 dibandingkan 3,35% pada tahun sebelumnya turut mendukung peningkatan konsumsi rumah tangga. Harga-harga yang terkendali sebagai dampak positif dari inflasi yang rendah tersebut juga ditopang oleh kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan mengarahkan ekspektasi inflasi di *level* 4%(±1%), serta semakin baiknya koordinasi kebijakan pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Seiring dengan terkendalinya tingkat inflasi, Bank Indonesia (BI) telah melakukan penyesuaian terhadap suku bunga acuan pada tahun 2016. BI *rate* telah mengalami penurunan dari posisi awal tahun 2016 sebesar 7,25% menjadi 6,50% pada bulan Juli. Suku bunga acuan baru yang diperkenalkan BI yakni BI 7-*Day Repo Rate* mengalami penurunan secara bertahap menjadi 4,75% pada bulan Desember dari posisi bulan April sebesar 5,50% ditopang oleh tekanan inflasi yang semakin rendah di tahun 2016.

Perbaikan ekonomi Indonesia juga disebabkan oleh perbaikan investasi baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Total realisasi investasi sepanjang tahun 2016 tumbuh

to 2.2% in the coming year while the EU economy grew steadily in the level of 1.6% and China economy re-balancing continues and grows at about 6.5%.

INDONESIAN ECONOMY

Indonesian economy grew better by 5.02% in 2016 compared to the growth in 2015 amounting to 4.88%. The biggest contributor to the economic growth was domestic consumption with an average contribution of approximately 64.24% of the total GDP within the last 5 years. The household consumption as the largest component of domestic consumption had a significant portion of an average of 84.62% within the same period. The consumption expenditure increased by 4.3% to Rp6.006,10 trillion in 2016 due to the increase of household consumption by 5.01% to Rp5.126,50 trillion in the same period.

Controlled inflation of 3.02% in 2016 compared to 3.35% in the previous year contributed to the increase of household consumption. The controlled prices as a positive result of the low inflation was also supported by the policy of Bank Indonesia in maintaining the exchange rate stability and directed the inflation expectations at a level of 4% (± 1%), as well as the improvements in the policy coordination of inflation control between Bank Indonesia and the Government, both at the central level and local levels.

Along with well-controlled inflation level, Bank Indonesia (BI) adjusted the benchmark interest rate in 2016. BI rate decreased from the initial position in 2016 at 7.25% to 6.50% in July. The new benchmark rate that was introduced by BI, that was BI 7-Day Repo Rate decreased gradually to 4.75% in December from the position in April of 5.50% supported by inflation lowering pressure in 2016.

Indonesia's economic improvement was also due to the improvement in the investment of domestic investment and foreign investment. The total actualized investment throughout 2016 grew by 12.36% to approximately

Tinjauan Ekonomi
Economic Review

sebesar 12,36% menjadi sekitar Rp612,80 triliun. Realisasi investasi ini ditopang oleh pertumbuhan realisasi PMDN dan PMA masing-masing sebesar 20,45% dan 8,39% menjadi Rp216,20 triliun dan Rp396,60 triliun berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Peningkatan realisasi investasi ini diimbangi dengan surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) sebesar US$12,09 miliar pada tahun 2016 yang ditopang oleh surplus investasi portofolio didukung oleh implementasi Undang-Undang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yang berjalan dengan baik. Kedua hal ini mendorong penguatan cadangan devisa Indonesia yang mencapai sekitar US$116,4 miliar pada bulan Desember 2016 dibandingkan posisi akhir tahun 2015 yang mencapai sekitar US$ 105,9 miliar. Hal ini memberikan kelonggaran kepada bank sentral untuk intervensi ke pasar jika diperlukan terutama untuk meredam gejolak fluktuasi mata uang Rupiah akibat faktor eksternal.

Pertumbuhan PDB Indonesia pada tahun 2017 diharapkan membaik seiring dengan ekspektasi perbaikan ekonomi global. Pemerintah memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,3%, sedikit membaik dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,2%. Selain itu, inflasi diharapkan tetap terkendali di *level* sekitar 4,0% dan Rupiah ditransaksikan menguat sebesar 13.300 per US$. Perbaikan ekonomi global juga diharapkan akan memberikan efek positif terhadap kenaikan harga komoditas khususnya minyak mental yang diproyeksikan naik menjadi US$ 45,0/barel pada tahun 2017. Selain itu, peningkatan anggaran pemerintah untuk infrastruktur menjadi sekitar Rp346,6 triliun ditahun 2017 atau lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran infrastruktur untuk tahun 2016 sebesar Rp317,1 triliun diharapkan mampu menjadi pendorong ekonomi Indonesia.

Rp612,80 trillion. The realization of the investment was supported by the growth of domestic investment and foreign investment respectively by 20.45% and 8.39% to Rp216,20 trillion Rp396,60 trillion based on the data from the Capital Investment Coordinating Board (BKPM).

The increasing realization of this investment was offsetted by a surplus of Indonesia's balance of payments (BOP) amounting to US $ 12.09 billion in 2016, propped by the portfolio investment surplus supported by the implementation of Tax Amnesty Law that works well. These two things have encouraged the strengthening of Indonesia's reserves that reached US $ 116.4 billion in December 2016 compared to the last position of 2015 that reached US $ 105.9 billion. This provides leeway for the central bank to intervene the market if necessary especially to reduce fluctuations in domestic currency due to the external factors.

Indonesia's GDP growth in 2017 is expected to improve in line with the expectations of global economic recovery. The government estimates that Indonesia's economy will grow by 5.3%, slightly improve compared to the economic growth target of 5.2% in 2016. Apart from it, inflation is expected to remain under control at the level of about 4.0% and Rupiah is traded higher by 13,300 per US $. The global economic recovery is also expected to have a positive effect against the rising of commodity prices, especially crude oil that is projected to rise to US $ 45.0/barrel in 2017. In addition, the increase in government's budget on infrastructure will be Rp346,6 trillion in 2017, or higher compared to the budget for infrastructure for 2016 amounting to Rp317,1 trillion that is expected to be the driving force for Indonesian economy.

Tinjauan Industri
Industry Review

SEKTOR PERKEBUNAN

Tanaman Tebu

Perkembangan sektor pertanian dan sub sektor perkebunan mengalami tren kenaikan dalam lima tahun terakhir. Rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap total PDB dalam lima tahun terakhir mencapai sekitar 11,16% sedangkan sub sektor perkebunan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 3,88%. Sementara itu, rata-rata kontribusi subsektor perkebunan terhadap sektor pertanian mencapai sekitar 29,49%. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB di tahun 2016 mencapai Rp1.209,69 triliun atau naik 3,25% dibandingkan tahun 2015. Sementara itu, kontribusi subsektor perkebunan mencapai Rp357,23 triliun atau tumbuh 3,50% dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp345,16 triliun. Pertumbuhan yang lebih tinggi ini tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah yang lebih aktif untuk menggalakkan program swasembada atau mengurangi impor pangan.

PLANTATION SECTOR

Sugar Cane

The development of agriculture and plantation sub-sector has an upward trend in the last five year. The average contribution of the agricultural sector to the total GDP in the last five years has reached approximately 11.16% while the plantation sub-sector contributed an average of 3.88%. Meanwhile, the average contribution of the plantation sub-sector to the agricultural sector has reached around 29.49%. The contribution of agricultural sector to GDP in 2016 reached Rp1.209,69 trillion or increased 3.25% compared to that of in 2015. Meanwhile, the contribution of the plantation sub-sector reached Rp357,23 trillion or increase 3.50% compared to the position in the previous year amounting to Rp345,16 trillion. This higher growth can not be separated from the role of government that is more being active promoting self-sufficiency program or reducing food imports.

Grafik Kontribusi Pertanian & Perkebunan Terhadap PDB
Graphic of Agriculture & Plantation Contributions to GDP

Sumber: BPS

Source: BPS-Statistics Indonesia

Indonesia dengan penduduk lebih dari 250 juta tentu memerlukan ketersediaan pangan yang harus ditopang oleh ketersediaan lahan perkebunan dan fasilitas

Indonesia with a population of more than 250 million would require food availability that must be supported by the availability of land for plantations and adequate

Tinjauan Industri
Industry Review

pabrik pengolahan yang memadai. Ketersediaan area perkebunan tebu milik negara mengalami kenderungan peningkatan dengan rata-rata majemuk (*Compounded Average Growth Rate*) atau CAGR sebesar 3,10%. Disisi lain, terdapat juga kenaikan dari sisi produksi sebesar 4,06% CAGR selama 2012-2016. Lahan tebu dan tingkat produksi mencapai sekitar 78,054 hektar dengan produksi mencapai 360.713 ton sehingga rata-rata produksi per hektar sebesar 4,62 ton. Target kementrian pertanian atas produksi gula sekitar 7 juta ton di tahun 2019 adalah peluang bagi pelaku industri gula untuk meningkatkan ketersediaan lahan, produktivitas per ton dan kapasitas produksi pabrik gula dalam waktu dekat.

processing facilities. The availability of the state-owned sugarcane plantation area tend to increase with average compound (Compounded Average Growth Rate) or a CAGR of 3.10%. On the other hand, there is also an increase from the the production side by 4.06% CAGR during 2012-2016. The sugarcane land and the production level reached about 78.054 hectares with production reached 360,713 tonnes so that the average production amounted to 4.62 tonnes per hectare. The target of the ministry of agriculture on sugar production around 7 million tons in 2019 is an opportunity for the sugar industry players to increase the availability of land, productivity per tonne and the production capacity of sugar factories in the near future.

Grafik ketersediaan lahan dan produksi tebu milik negara
Chart of state-owned land availability and sugar cane production

Sumber: Deptan

Source: Ministry of Agriculture

Dari sisi konsumsi terlihat bahwa konsumsi mingguan per kapita tebu mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar CAGR 1,66% menjadi 1.305 ons/kapita/minggu ditahun 2015 dibandingkan 1.242 ons/kapita/minggu di tahun 2012. Pertambahan populasi di Indonesia dan semakin beragam penggunaan gula akan mendorong kebutuhan gula yang meningkat mendatang.

In terms of consumption, it shows that per capita weekly consumption of sugar cane has increased every year CAGR of 1.66% to 1,305 oz / capita / week in 2015 compared to 1242 oz / capita / week in 2012. The increase population in Indonesia and the more diverse use of sugar will encourage the increasing sugar needs in the future.

POSISI PTPN X DI INDUSTRI GULA

Tabel-tabel berikut menjelaskan posisi PTPN X di industri nasional yang dapat dilihat dari beberapa cakupan:

a. Pangsa Pasar Perseroan terhadap Produksi Gula Nasional

Pangsa pasar Perseroan terhadap produksi gula nasional mengalami penurunan di tahun 2016 seiring dengan penurunan produksi nasional. Ditengah penurunan produksi nasional menjadi 2,20 juta ton gula di tahun 2016 dari 2,50 juta ton gula setahun sebelumnya, pangsa pasar Perseroan turun menjadi 17,11% (2016) dari 17,23% (2015).

PTPN X POSITION IN SUGAR INDUSTRY

The following tables explain the position of PTPN X in national industry that can be seen from several coverages:

a. The Company's Market Share towards the National Sugar Production

The Company's market share towards the national sugar production decreased in 2016 in line with the decrease in national production. Amid the drop in the national production to 2.20 million tons sugar in 2016 from 2.50 million tons of sugar in the previous year, the Company's market share fell to 17.11% (2016) from 17.23% (2015).

b. Pangsa Pasar Perseroan terhadap Produksi Gula BUMN

Pangsa pasar Perseroan terhadap gula yang dihasilkan BUMN mengalami peningkatan menjadi 30,34% di tahun 2016 ditengah penurunan produksi gula oleh BUMN menjadi 1,22 juta ton. Peningkatan ini terjadi karena disaat yang bersamaan beberapa BUMN produsen gula membukukan penurunan yang lebih besar dibandingkan Perseroan. Sebagai contoh, produksi gula PTPN XI turun 20,88% menjadi 321,64 ribu ton dibandingkan penurunan produksi Perseroan sebesar 11,69% menjadi 380,40 ribu ton di tahun 2016.

b. The Company's Market Share towards the State-Owned Companies' Sugar Production

The Company's market share of the sugar produced by state-owned companies has increased to 30.34% in 2016 amid a decrease in the production of sugar by the state-owned companies to 1.22 million tons. This increase occurred because at the same time several state-owned sugar producers posted a greater decline than the Company's. For example, PTPN XI sugar production fell 20.88% to 321.64 thousand tons compared to the Company's production decline of 11.69% to 380.40 thousand tons in 2016.

Tinjauan Industri
Industry Review

c. Pangsa Pasar Perseroan terhadap Produksi Gula di Pulau Jawa

Pangsa pasar Perseroan terhadap gula yang dihasilkan produsen gula di Pulau Jawa mengalami peningkatan menjadi 28,49% di tahun 2016 ditengah penurunan produksi gula oleh produsen gula di pulau Jawa menjadi 1,32 juta ton. Peningkatan ini terjadi karena disaat yang bersamaan beberapa produsen gula membukukan penurunan yang lebih besar dibandingkan Perseroan. Sebagai contoh, produksi gula PTPN XI turun 20,88% menjadi 321,64 ribu ton dibandingkan penurunan produksi Perseroan sebesar 11,69% menjadi 380,40 ribu ton di tahun 2016.

c. The Company's Market Share on Sugar Production in Java

The Company's market share towards the sugar produced by the sugar producers in Java increased to 28.49% in 2016 amid a decline in production of sugar by sugar producers in Java to 1.32 million tons. This increase occurred because at the same time some sugar producers posted a bigger drop than the Company. As an example, PTPN XI sugar production fell 20.88% to 321.64 thousand tons, compared to a decline in Company's production of 11.69% to 380.40 thousand tons in 2016.

d. Posisi Jawa Timur sebagai Sentra Gula Nasional

Provinsi Jawa Timur adalah sentra produksi gula di Indonesia dengan tingkat produksi mencapai 1,05 juta ton gula di tahun 2016. Jumlah produksi ini setara dengan pangsa pasar produksi sebesar 47,51% dari total produksi gula nasional sebesar 2,20 juta ton gula. Provinsi lain yang memiliki pangsa pasar signifikan adalah Lampung dengan tingkat produksi sebesar 573,24 ribu ton atau setara dengan 26,00%.

d. The Position of East Java as the Center of National Sugar

East Java province is the center for sugar production in Indonesia with production rate reached 1.05 million tons of sugar in 2016. The total production was equivalent to a market share of production amounted to 47.51% of total national sugar production amounted to 2.20 million tons of sugar. Other provinces that have significant market shares is Lampung with a production rate of 573.24 thousand tonnes, equivalent to 26.00%.

Dari sisi produksi tebu di Jawa Timur sebesar 1,05 juta ton gula tersebut, PTPN X adalah produsen terbesar tebu dengan produksi mencapai 380,40 ribu ton gula atau setara dengan 36,02% dari total gula yang diproduksi di Jawa Timur. Produsen lain dengan porsi yang dominan adalah PTPN XI yang mampu memproduksi 321,64 ribu ton gula di tahun 2016 denga pangsa pasar sebesar 30,71%.

In terms of sugar cane production in East Java of 1.05 million tons of sugar, PTPN X is the biggest sugar cane producer with production reaches 380.40 thousand tons of sugar, equivalent to 36.02% of the total sugar produced in East Java. Another producer with a dominant portion is PTPN XI that was capable of producing 321.64 thousand tons of sugar in 2016 with a market share of 30.71%.

Tinjauan Industri
Industry Review

Tanaman Tembakau

Tobacco Plants

Grafik ketersediaan lahan dan produksi tembakau milik negara
The Chart of State-Owned Land Availability and Tobacco Production

Sumber: Deptan

Source: the Ministry of Agriculture

Berbeda dengan lahan tebu, lahan tembakau milik pemerintah justru mengalami penurunan rata-rata sebesar CAGR 2,54% menjadi 2.523 hektar di tahun 2016 dibandingkan luas lahan tembaku seluas 2.870 hektar di tahun 2012. Penurunan lahan tembakau ini berdampak kepada turunnya produksi tembakau menjadi sekitar 2.060 ton di tahun 2016 atau lebih rendah dibandingkan panen tahun 2012 sebesar 2.371 ton. Tantangan peningkatan produktivitas tembakau harus diatasi karena meskipun dalam kurun tiga tahun terakhir terdapat penambahan –meski dalam skala kecil- rata-rata produksi per hektar tembakau stagnan sebesar 0,82 ton/ha selama 2014-2016, lebih rendah dari yield tertinggi yakni sekitar 1,01 ton/ha di tahun 2013.

In contrast to the sugar cane fields, the state-owned tobacco fields actually declined on average CAGR of 2.54% to 2,523 hectares in 2016 compared to an area of tobacco land of 2,870 hectares in 2012. The decline in tobacco fields has an impact on the decline in tobacco production to about 2,060 tons in 2016, or lower than the harvest in 2012 amounting to 2,371 tons. The challenge in increasing tobacco productivity must be addressed although in the past three years there have been additions - although in small scale - in the average stagnant tobacco production per hectare of 0.82 tonnes / ha during 2014-2016, lower than the highest yield which was about 1.01 tons / ha in 2013.

Parameter konsumsi tembakau dapat dilihat dari konsumsi per kapita rokok di suatu negara. Indonesia adalah negara dengan konsumsi rokok per kapita tertinggi di ASEAN yang mencapai sekitar 1.322,3 batang per kapita untuk usia pengguna rokok di atas 15 tahun menurut tobaccoatlas.org. Pertambahan penduduk setiap tahun

The parameter of tobacco consumption can be seen from the cigarette consumption per capita in a country. Indonesia is the country with the highest cigarette consumption per capita in ASEAN reaching around 1322.3 bars per capita cigarette for users over the age of 15 according to tobaccoatlas.org. The accretion of people

akan memicu permintaan tembakau yang lebih tinggi jika aturan larangan merokok dan kenaikan cukai rokok dengan skala lebih tinggi tidak dilakukan.

Sektor Jasa Kesehatan

Kontribusi sektor kesehatan dan kegiatan lainnya terhadap PDB masih marginal dengan rata-rata sebesar 1,06% dalam kurun lima tahun terakhir. Namun demikian, secara umum pertumbuhan kontribusi sektor kesehatan mampu mengungguli pertumbuhan PDB Indonesia. Kontribusi sektor jasa kesehatan mencapai Rp102,34 triliun di tahun 2016 atau tumbuh sebesar CAGR 6,90% dibandingkan sebesar Rp78,38 triliun di tahun 2012. Prospek peningkatan kontribusi sektor jasa kesehatan berpotensi meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan pelaksanaan BPJS Kesehatan.

every year will trigger demand for higher tobacco if the rules of smoking prohibition and increasing tobacco tax with a higher scale are not enforced.

Health Services Sector

The contribution of the health sector and other activities to GDP was still marginal with an average of 1.06% over the last five years. However, in general, the growth of contribution of health sector could surpass the growth of Indonesian GDP. The contribution of health service sector reached Rp102,34 trillion in 2016, growing at a CAGR of 6.90% compared to Rp78,38 trillion in 2012. The prospect of an increasing contribution to the health services sector may increase in line with population growth and the implementation of BPJS Kesehatan (BPJS for Health)

Grafik Sektor Jasa Kesehatan dan PDB
Chart of Health Service Sector and GDP

Sumber: BPS

Disisi lain, seiring dengan peningkatan kebutuhan jasa kesehatan, beragam rumah sakit telah berdiri di indonesia untuk melayani kebutuhan jasa kesehatan. Berdasarkan data terakhir dari BPS tahun 2013, terdapat kenaikan

Source: BPS

On the flip side, in line with the increasing need for health services, various hospitals have been established in Indonesia to serve the needs of the health services. Based on the latest data from the BPS in 2013, there was

Tinjauan Industri
Industry Review

beragam fasilitas kesehatan baik Rumah Sakit (RS) Umum, RS Khusus, dan Puskesmas. Terdapat 1.725 RS Umum, 503 RS Khusus, dan 9.655 puskesmas di seluruh Indonesia untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat.

an increase in the number of various health facilities either General Hospital (RSU), Special Hospitals and Community Health Center (Puskesmas). There were 1,725 General Hospitals, 503 Special Hospitals and 9655 Community Health Centers throughout Indonesia to serve the need of public health.

Grafik Fasilitas Kesehatan
Chart of Heatlh Facilities

Sumber: BPS

Source: BPS

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Operational Review per Business Segment

PTPN X mengklasifikasikan aktivitas usahanya menjadi lima segmen usaha yang terdiri atas segmen gula, segmen tetes, segmen tembakau, segmen rumah sakit dan segmen lainnya. Kompetensi inti Perusahaan adalah (i) budidaya tebu dan industri gula; (ii) budidaya dan proses pengolahan tembakau; dan (iii) pengelolaan energi terbarukan berbasis tebu.

Perseroan memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian.

SEGMEN USAHA GULA DAN TETES

Produk utama Unit Usaha Gula adalah gula SHS dan tetes yang dihasilkan oleh 11 Pabrik Gula yang berlokasi di Jawa Timur dan tersebar di beberapa Kota/Kabupaten, sebagai berikut :

- Kabupaten Sidoarjo : PG Watoetoelis, PG Toelangan, PG Kremboong
- Kabupaten Mojokerto : PG Gempolkrep
- Kabupaten Jombang : PG Djombang Baru dan PG Tjoekir
- Kabupaten Nganjuk : PG Lestari
- Kota Kediri : PG Meritjan, PG Pesantren Baru dan PG Ngadiredjo
- Kabupaten Tulungagung : PG Modjopanggoong

Selain itu, PT. Perkebunan Nusantara X mendapat penugasan dari Kementrian BUMN untuk pengelolaan 3 Pabrik Gula di Sulawesi Selatan milik PT. Perkebunan Nusantara XIV yaitu PG. Bone, PG. Camming dan PG. Takalar.

Pengelolaan PG. Bone dan PG. Camming

- Dasar atas Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor S-549/MBU/2009 tanggal 31 Juli 2009 : bahwa Menteri Negara BUMN memandang perlu untuk melibatkan PTPN X bersama-sama PT RNI untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan.
- Surat Deputi Bidang Usaha Agro Industri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan tanggal 12 Agustus 2009, yang pada intinya PTPN X apabila diperlukan dapat melakukan kegiatan pendahuluan untuk mendukung operasional giling tahun 2009.

PTPN X classifies its business activities into five business segments consisting of sugar segment, molasses segment, tobacco segment, hospital segment and other segments. The core competencies of the Company are (i) the cultivation of sugar cane and sugar industry; (Ii) the cultivation and processing of tobacco; and (iii) the management of sugarcane-based renewable energy.

The Company monitors the operating results of its business units separately for the purpose of making decisions on resource allocation and performance assessment. The segment performance is evaluated based on operational profit or loss and is measured consistently with operational profit or loss on the consolidated financial statements.

SEGMENT OF SUGAR AND MOLASSES INDUSTRY

The main product of Sugar Industry Unit is Sugar SHS and molasses produced by the 11 Sugar Factories located in East Java and spread in several Cities / Regencies, as follows:

- Sidoarjo regency : PG Watoetoelis, PG Toelangan, PG Kremboong
- Mojokerto regency : PG Gempolkrep
- Jombang regency : PG Djombang Baru dan PG Tjoekir
- Nganjuk regency : PG Lestari
- Kediri city : PG Meritjan, PG Pesantren Baru dan PG Ngadiredjo
- Tulungagung regency : PG Modjopanggoong

In addition, PT. Perkebunan Nusantara X got the assignment from the Ministry of State-Owned Enterprises for the management of 3 Sugar Factories in South Sulawesi belonging to PT. Perkebunan Nusantara XIV, they are PG. Bone, PG. Camming and PG. Takalar.

The management of PG. Bone and PG. camming

- Based on the Letter of the State Minister for State-Owned Enterprises No. S-549 / MBU / 2009 dated July 31, 2009: that the State-Owned Enterprises Minister deems it necessary to involve the PTPN X together with PT RNI to perform rescuing measures.
- The Letter of Deputy of Agro Industry, forestry, paper, printing and publishing dated 12 August 2009, which, in essence, PTPN X if necessary may be able to conduct a preliminary activity to support the milling operations in 2009.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
Operational Review per Business Segment

Untuk mendukung pengolahan tebu dan tetes, Perusahaan memiliki lahan yang dikelola dengan skema inti-plasma. Melalui skema ini, Perseroan memiliki kebun inti sedangkan masyarakat ikut berpartisipasi memiliki dan mengolah kebun plasma. Sampai akhir tahun 2016, Perusahaan mengoperasikan lahan tanaman seluas 70.611 ha atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 70.301 ha.

To support the processing of sugar cane and molasses, the Company has a land managed by the scheme of plasma-core. Through this scheme, the Company has a core plantation, while the community participate in possessing and cultivating the plasma plantation. Until the end of 2016, the Company operated land plant area of 70,611 ha or higher than that in 2015 amounting to 70,301 ha.

Tabel indikator produksi unit gula dan tetes / **Indicator Table of Sugar and Molasses Unit Production**

No	Uraian	2016	2015	*Description*
1	Luas Area (ha):	70.611	70.301	*Wide Area*
2	Produksi Tebu Giling (ton)	5.944.896	5.188.355	*Milled Sugar Cane Production*
3	Produktivitas tebu/ha (ton)	84,2	73,8	*Sugar Cane Productivity/ha*
4	Rendemen (%)	6,36	8,30	*Yields*
5	Produksi hablur (ton)	378.094	430.539	*Crystal Production*
6	Produktivitas hablur /ha (ton)	5,35	6,12	*Crystal Productivity/ha*
7	Produksi gula (ton)	380.403	430.750	*Sugar Production*
8	Produksi tetes (ton)	333.002	323.758	*Molasses Production*
9	Kapasitas giling			*Milling Capacity*
	- Incl. jam berhenti (TTH)	35.724	38.162	*Incl. Stopping Hour*
	- Excl. jam berhenti (TTH)	38.824	41.291	*Excl. Stopping Hour*

Kinerja segmen usaha tebu

Dibandingkan dengan kinerja tahun 2015, kinerja keuangan Perusahaan menurun karena pencapaian pendapatan segmen ini yang turun sebesar 25,00% menjadi Rp1,02 miliar. Disisi lain, beban pokok penjualan turun sebesar 2,71% menjadi Rp922,23 miliar. Meski demikian, laba kotor turun lebih dalam sebesar 75,96% menjadi Rp99,67 miliar di tahun 2016. Sejalan dengan penurunan laba kotor, laba operasi segmen tebu juga menurun tajam karena mengalami kerugian sebesar Rp58,05 miliar dibandingkan pendapatan operasi tahun 2015 sebesar Rp263,02 miliar sejalan dengan penurunan daari pendapatan usaha dari segmen ini.

The performance of sugar cane business segment

Compared with the performance of 2015, the Company's financial performance declined due to the attainment of this segment revenues, which fell by 25.00% to Rp1.02 billion. On the other hand, the cost of goods sold fell by 2.71% to Rp922,23 billion. However, the gross profit fell deeper by 75.96% to Rp99,67 billion in 2016. In line with the decline in gross profit, the sugar cane segment operating profit also dropped because of a loss of Rp58,05 billion compared to operating income in 2015 amounted to Rp263,02 billion, in line with the decline from operating revenues of this segment.

Kinerja segmen usaha tetes

Segmen ini mengalami penurunan pendapatan sebesar 28,78% menjadi Rp205,05 miliar di tahun 2016. Sejalan dengan penurunan kinerja segmen gula, kinerja keuangan segmen ini juga mengalami tekanan dengan membukukan rugi kotor menjadi Rp28,18 miliar dibandingkan dengan laba kotor tahun 2015 sebesar 63,81 miliar. Hal ini berdampak kepada rugi operasi yang dibukukan segmen ini sebesar Rp62,6 miliar di tahun 2016 dibandingkan laba operasi tahun sebelumnya sebesar Rp28,90 miliar.

Performance of molasses business segment

This segment revenues decreased by 28.78% to Rp205,05 billion in 2016. In line with the decline in the sugar segment performance, the financial performance of this segment also experienced pressures by recording a gross loss of Rp28,18 billion compared with gross profit of 2015 amounted to 63.81 billion. This affects the operating loss recorded by this segment by Rp62,6 billion in 2016 compared to the previous year's operating profit amounted to Rp28,90 billion.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
Operational Review per Business Segment

SEGMEN USAHA TEMBAKAU

Terdiri dari 3 Kebun Tembakau dengan wilayah kerja berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah yaitu :

- Kota/Kab Jember/Bondowoso :
  Kebun Kertosari
- Kota/Kab Jember/Bondowoso :
  Kebun Ajong Gayasan
- Kota/Kab Klaten :
  Kebun Kebonarum, Gayamprit, Wedibirit (Klaten)

Kebun Tembakau Perseroan dikelola dengan menggunakan skema sewa lahan. Dalam skema ini, Perseroan menyewa kepada masyarakat kemudian dikelola untuk tanaman tembakau. Sampai dengan akhir tahun 2016, Perseroan mengoperasikan lahan tanaman seluas 1.078 ha atau lebih rendah dibandingkan luas lahan setahun sebelumnya sebesar 1.123 ha. Dengan luas area tanaman tembakau tersebut, Perusahaan mampu memproduksi tembakau sebagai berikut:

TOBACCO BUSINESS SEGMENT

Comprising of 3 Tobacco Plantation with working area in East Java and Central Java those are:

- City/Jember Regency/ Bondowoso :
  Kebun Kertosari
- City/Jember Regency/ Bondowoso :
  Kebun Ajong Gayasan
- City/Klaten Regency / (Klaten) :
  Kebun Kebonarum, Gayamprit, Wedibirit

The Company of Kebun Tembakau is managed by using land lease scheme. In this scheme, The Company rented to the public then managed to plant tobacco. Until the end of 2016, the Company operated the plant area of 1,078 hectares of land or less compared to the land area of the previous year which was 1,123 ha. With an area of tobacco plants, the Company was able to produce tobacco as follows:

Tabel Produksi Tembakau / **Table of Tobacco Production**

	2016	2015	
Luas areal (ha)	1.078	1.123	*Area*
Produksi Daun Hijau (ton)	19.078	21.580	*Production of Green Leaves*
Rendemen (%)	9,1	9,9	*Yields*
Produksi Kering Rompos (ton)	1.736	2.138	*Production of Dry Rompos*
Produktivitas Kering Rompos (ton/ha)	1,61	1,90	*Productivity of Dry Rompos*

Kinerja segmen usaha tembakau

Pendapatan usaha segmen ini mengalami pertumbuhan sebesar 1,72% menjadi Rp331,44 miliar di tahun 2016. Namun demikian, kenaikan beban pokok penjualan yang lebih tinggi sebesar 11,49% menyebabkan laba kotor segmen ini turun sebesar 45,41% menjadi Rp30,5 miliar di tahun 2016. Penurunan ini berdampak kepada rugi operasi segmen ini sebesar Rp26,08 miliar karena kenaikan beban operasi sebesar 56,22% menjadi Rp56,61 miliar.

The performance of the tobacco business segment

The operating revenues of this segment grew by 1.72% to Rp331,44 billion in 2016. However, the increasing cost of goods sales being higher by 11.49% caused this segment gross profit to decrease by 45.41% to Rp30.5 billion in 2016. This decrease impacts on the segment operating loss amounting Rp26,08 billion due to operating expenses by 56.22% to Rp56,61 billion.

SEGMEN USAHA RUMAH SAKIT

Segmen bisnis ini juga dikelola oleh entitas anak yakni PT Nusantara Medika Utama (NMU). Perseroan ini adalah spin off dari SBU Rumah Sakit milik PT Perkebunan Nusantara X yang berdiri tanggal 19 Januari 2013 dan berkantor pusat di Mojokerto. SBU Rumah Sakit dibentuk pada 1 Desember 2003, meliputi 3 unit usaha rumah sakit yaitu RS Gatoel, RS HVA Toeloengredjo dan RS Perkebunan Jember. Perubahan bentuk rumah sakit dari SBU menjadi entitas anak adalah dalam rangka meningkatkan profesionalitas pengelolaan rumah sakit dan menciptakan nilai tambah bagi entitas induk. Ringkasan indikator produksi segmen ini adalah sebagai berikut:

THE HOSPITAL BUSINESS SEGMENT

This business segment is also managed by subsidiary of PT Nusantara Utama Medika (NMU). This Company is a spin off of the SBU Hospital owned by PT Perkebunan Nusantara X that was established on 19 January 2013 and has its headquarter in Mojokerto. SBU Hospital was formed on 1 December 2003, including three business units, those are Rumah Sakit Gatoel, Rumah Sakit HVA Toeloengredjo and Rumah Sakit Perkebunan Jember. Changes in the form of SBU hospital to become a subsidiary is to increase professional hospital management and to create added values for the Parent Company. The summary of production indicators of this segment is as follows:

Keterangan	2016	2015	2016 terhadap 2015	*Description*
Tempat Tidur	480	485	98,97%	*Beds*
Hari Perawatan	155.905	145.182	107,39%	*Days of Hospitaliztion*
BOR	88,74%	82,01%	108,21%	*BOR*
LOS	4,07	4,09	99,51%	*LOS*
TOI	0,52	0,9	57,78%	*TOI*
BTO	79,80	73,20	109,02%	*BTO*
Rawat Jalan	368.978	345.688	106,74%	*Outpatient*
Rawat Inap	47.249	51.307	92,09%	*Inpatient*
Penunjang Medis	735.260	416.940	176,35%	*Medical Support*
Total Kunjungan	1.151.487	813.935	141,47%	*Total Visit*

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
Operational Review per Business Segment

Kinerja segmen usaha rumah sakit

Pendapatan usaha segmen ini tumbuh sebesar 11,44% menjadi Rp293,48 miliar di tahun 2016 ditopang oleh peningkatan hari perawatan dan tingkat okupansi rumah sakit (BOR). Meski mengalami peningkatan beban pokok penjualan sebesar 10, 63% menjadi Rp224,38 miliar, segmen rumah sakit mampu membukukan pertumbuhan laba kotor sebesar 14,16% menjadi Rp69,10 miliar. Perbaikan laba kotor ini berdampak positif terhadap peningkatan laba operasi menjadi Rp45,75 miliar atau tumbuh 11,53% dibandingkan posisi tahun 2015.

The performance of hospital business segments

The operating revenues of this segment grew by 11.44% to Rp293,48 billion in 2016 underpinned by the increased day care and hospital occupancy rate (BOR). Despite the increase in cost of goods sales amounting to 10, 63% to Rp224,38 billion, the hospital segment was able to post growth in gross profit of 14.16% to Rp69,10 billion. The improvement of gross profit was a positive impact on operating profit improvement into Rp45,75 billion or grew 11.53% compared to the position in 2015.

SEGMEN USAHA LAIN-LAIN

Segmen usaha lainnya meliputi produk edamme dan okra, karung plastik, bioethanol dan *cutting bobbin*. Penjelasan terkait entitas anak yang mengelola segmen bisnis ini adalah sebagai berikut:

1. PT Dasaplast Nusantara (DPN) yang dibentuk pada tahun 2004 sebagai perusahaan gabungan antara perusahaan swasta dengan PT Perkebunan Nusantara X, berlokasi di Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Bergerak di industri karung plastik *Polypropylene* (PP) *Woven Bag, Polyethylene (PE) Inner Bag* dan *Leno Mesh* (Warring) yang telah memenuhi standar internasional.
2. Pada tahun 2016 produksi *cutting bobbin* mencapai 521.747 potong, lebih rendah dibandingkan produksi tahun sebelumnya sebesar 549.118 potong.
3. Segmen bisnis bioethanol dikelola oleh entitas anak, PT Energi Agro Nusantara (ENERO). Pengembangan bisnis bioethanol dengan memanfaatkan bahan baku

OTHER BUSINESS SEGMENT

Other business segments include products of edamame and okra, plastic sacks, bioethanol and cutting bobbins. The explanation related to the subsidiary companies managing this business segment are as following:

1. PT Dasaplast Nusantara (DPN), which was established in 2004 as a joint company between private companies with PT Perkebunan Nusantara X, located in Pecangaan District Jepara, Central Java. The Company engaged in industrial plastic sacks Polypropylene (PP) Woven Bag, Polyethylene (PE) Inner and Leno Mesh Bag (Warring) which meet international standards.
2. In 2016 bobbin cutting production reached 521,744 pieces, lower compared to the previous year's production of 549,118 pieces.
3. The bio-ethanol business segment is managed by its subsidiaries, PT Energi Agro Nusantara (Enero). The Bio-ethanol business development using molasses

tetes dari unit bisnis gula PTPN X merupakan strategi diversifikasi yang berkaitan dengan bisnis utamanya. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 5 Juni 2013 yang berlokasi di Desa Gempolkerep Mojokerto. Ini adalah langkah awal PT Perkebunan Nusantara X untuk mewujudkan industri gula terintegrasi.

4. PT Mitratani Dua Tujuh (MT 27) merupakan kerjasama antara PTPN X dan PT Kelola Mina Laut dengan prosentase kepemilikan saham PTPN X : 65% dan PT KML : 35%. Berlokasi di Mangli, Jember, Jawa Timur dengan komoditi utama *frozen vegetable* kedelai edamame dan okura untuk ekspor ke Jepang dan sebagian untuk pasar lokal.

Kinerja segmen usaha lain-lain

Pendapatan usaha segmen ini mengalami perbaikan kinerja di tahun 2016 dengan pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 39,89% atau terbesar dibandingkan segmen usaha lainnya. Pendapatan usaha segmen ini mencapai Rp408,52 miliar di tahun 2016 atau lebih besar dibandingkan dengan pencapaian setahun sebelumnya sebesar Rp292,03 miliar. Peningkatan signifikan atas pendapatan usaha ini menopang perbaikan kinerja laba kotor dan laba operasi yang naik tajam menjadi Rp79,69 miliar dan Rp25,56 miliar dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp26,62 miliar dan rugi laba operasi sebesar Rp28,16 miliar.

raw materials from sugar business of PTPN X is a diversification strategy related to its principal business. This Company was established on 5 June 2013, located in the village of Gempolkerep, Mojokerto. This was an initial step of PT Perkebunan Nusantara X to create an integrated sugar industry.

4. PT Mitratani Dua Tujuh (MT 27) merupakan kerjasama antara PTPN X dan PT Kelola Mina Laut dengan prosentase kepemilikan saham PTPN X : 65% dan PT KML : 35%. Berlokasi di Mangli, Jember, Jawa Timur dengan komoditi utama frozen vegetable kedelai edamame dan okura untuk ekspor ke Jepang dan sebagian untuk pasar lokal.

Performance of other business segment

Operating revenues of this segment had performance improvement in 2016 with growth operating revenues amounted to 39.89%, the highest compared to the other business segments. The business income of this segment reached Rp408,52 billion in 2016, or greater than the achievement of the previous year of Rp292,03 billion. A significant increase in revenue of this business income sustains the performance improvement in gross profit and operating profit that rose sharply to Rp79,69 billion and Rp25,56 billion compared to the previous year of Rp26,62 billion and operating loss profit of Rp28,16 billion.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Pembahasan tentang tinjauan keuangan berkaitan erat dengan data keuangan dan operasional serta laporan keuangan konsolidasi dan catatan atas laporan keuangan Perusahaan yang terdapat di dalam laporan tahunan ini. Pembahasan ini berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi PT Perkebunan Nusantara X dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernest & Young atau EY) dengan pendapat laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The discussion of the financial review is closely related to the financial and operational data as well as the consolidated financial statements and notes to the financial statements contained in this annual report. This discussion is based on the consolidated financial statements of PT Perkebunan Nusantara X and its subsidiaries for the year ended 31 December 2016 and 31 December 2015, which were audited by the Public Accountants Firm of Purwantono, Sungkoro Surja (a firm member of Ernest & Young or EY) with the opinion that the attached consolidated financial statements present fairly, in all material respects in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia.

ANALISA LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

ANALYSIS OF CONSOLIDATED COMPREHENSIVE INCOME

Tabel Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
(dalam jutaan Rupiah)

Table Consolidated Comprehensive Income (Loss)
(In Million Rupiah)

	2016	2015	Perubahan		
			Nominal	%	
Pendapatan Usaha	2.260.373,52	2.531.557,64	-271.184,12	-10,71%	*Revenue*
Beban Pokok Penjualan	-2.009.574,94	-1.913.222,04	-96.352,89	5,04%	*Cost of Sales*
Laba Kotor	250.798,58	618.335,60	-367.537,02	-59,44%	*Gross Profit*
Beban Operasional	-463.920,91	-378.911,94	-85.008,97	22,44%	*Operating Expenses*
Laba Usaha	-162.919,75	302.289,62	-465.209,37	-153,90%	*Operating Profit*
Beban Keuangan	-111.545,74	-107.267,30	-4.278,44	3,99%	*Finance Expense*
Laba Sebelum Pajak	-216.835,99	198.363,00	-415.198,99	-209,31%	*Profit Before Tax*
Pajak	61.053,00	-71.935,11	132.988,10	-184,87%	*Tax*
Laba Tahun Berjalan	-155.782,99	126.427,90	-282.210,89	-223,22%	*Profit for the Year*
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	-138.885,72	7.220.886,22	-7.359.771,94	-101,92%	*Total Comprehensive Income for the Year*

Perseroan memiliki beberapa kegiatan usaha yang dapat dikelompokkan menjadi lima segmen, yaitu:
1. Gula
2. Tetes
3. Tembakau
4. Rumah Sakit
5. Lain-lain

The Company has several business activities that can be grouped into five segments, they are:
1. Sugar
2. Molasses
3. Tobacco
4. Hospital
5. Others

Untuk menjalankan kelima segmen usaha tersebut, Perseroan memiliki beragam entitas anak dan entitas asosiasi yang dapat dilihat secara lengkap di bagian informasi Perusahaan.

To run the five business segment, the Company has a variety of subsidiaries and Company association that can be seen in full in the Company Information section.

Pendapatan Usaha

Perseroan pada tahun 2016 mampu membukukan total pendapatan usaha sebesar Rp2,26 triliun, turun 10,71% dari Rp2,5 triliun di tahun 2015. Penurunan ini seiring dengan penurunan yang tajam atas pendapatan terutama dari gula sebesar 25,00% menjadi Rp1,02 triliun. Komposisi pendapatan dari setiap segmen bisnis dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Revenue

In 2016 the Company was able to post total revenue of Rp2,26 trillion, down 10.71% from Rp2.5 trillion in 2015. The decrease was due to the sharply decline on revenue mainly the revenue from sugar segment which was down 25.00% to Rp1.02 trillion. The composition of revenue per business segment can be explained in the following table:

(dalam jutaan Rupiah) **(In Million Rupiah)**

	2016	2015	Perubahan		
			Nominal	%	
Gula	1.021.885,41	1.362.446,28	-340.560,87	-25,00%	*Sugar*
Tetes	205.045,72	287.908,65	-82.862,92	-28,78%	*Molasses*
Tembakau	331.435,38	325.817,14	5.618,24	1,72%	*Tobacco*
Rumah sakit	293.483,31	263.356,37	30.126,95	11,44%	*Hospital*
Lain-lain	408.523,69	292.029,20	116.494,49	39,89%	*Others*
Jumlah Pendapatan	2.260.373,52	2.531.557,64	-271.184,12	-10,71%	*Total Revenue*

Secara historis pendapatan dari segmen gula masih memiliki kontribusi yang tersesar karena segmen ini merupakan bisnis inti yang telah dikembangkan oleh Perusahaan sejak awal berdiri. Pada tahun 2016, kontribusi segmen bisnis gula mencapai 45,21% atau lebih rendah dibandingkan dengan kontribusi tahun sebelumnya sebesar 53,82%. Sementara itu, rata-rata kontribusi dari segmen bisnis lainnya relatif merata dan berada di kisaran 9,00%-18,00%.

Historically, the revenue from sugar segment still has the bigger contribution for this segment is the core business that has been developed by the Company since its establishment. In 2016, the contribution of sugar business segment reached 45.21% or lower than the contribution of the previous year by 53.82%. Meanwhile, the average contribution of the business segments is relatively even and the other is in the range of 9.00% -18.00%.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Chart Kontribusi Pendapatan 2016 vs 2015
Chart of Revenue Contribution of 2016 vs 2015

Penjelasan lebih lengkap dari kinerja pendapatan usaha per lini bisnis Perusahaan adalah dapat di lihat kembali di bagian tinjauan usaha per segmen usaha.

Detail explanation of the revenue per business segment of the Company can be seen again in the section of business review per business segment.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 5,04% menjadi Rp2,01 triliun dibandingkan posisi tahun 2015 sebesar Rp1,91 triliun. Peningkatan beban pokok penjualan Perseroan pada tahun 2016 tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok penjualan dari segmen rumah sakit, tembakau dan lain-lain yang masing-masing membukukan pertumbuhan di atas 10,00%. Beban pokok penjualan ketiga segmen tersebut mencapai Rp224,38 miliar; Rp300,90 miliar; Rp328,83 miliar pada tahun 2016 atau tumbuh masing-masing sebesar 10,63%;11,49%; dan 23,90%.

Cost of Sales

The Company's cost of sales in 2016 increased by 5.04% to be Rp2,01 trillion compared to the position in 2015 amounting Rp1,91 trillion. The increase of Company's cost of sales in 2016 was primarily due to an increase cost of sales of the hospital segment, tobacco and others, each posted a 10.00% growth. The cost of sales of the three segments in 2016 was Rp224,38 billion; Rp300,90 billion; Rp328,83 billion respectively, or grew 10.63%; 11.49%; and 23.90% respectively.

Chart Kontribusi Beban Pokok Penjualan 2016 vs 2015
Chart of Costs of Sales Contribution of 2016 vs 2015

Laba Kotor

Penurunan penjualan konsolidasi sebesar 10,71% memberikan dampak kepada pelemahan laba kotor menjadi Rp250,80 miliar di tahun 2016. Laba kotor turun sebesar 49,44% dibandingkan dengan posisi tahun 2015 yang mencapai Rp618,33 miliar. Penurunan laba kotor ini juga terlihat jika dibandingkan dengan pendapatan usaha yakni sebesar 11,10% di tahun 2016 dibandingkan 24,43%.

Gross profit

The decline in consolidated sales amounted to 10.71% gave impact on lower gross profit to reach Rp250,80 billion in 2016. This gross profit decreased by 49.44% compared to the position in 2015 amounting to Rp618,33 billion. The decrease in gross profit was also seen when compared with operating revenues, which was 11.10% in 2016 compared to 24.43%.

Beban Operasi

Beban Operasi Perseroan pada tahun 2016 mencapai Rp463,92 miliar, naik sebesar 22,44% dibandingkan posisi tahun 2015 sebesar Rp378,91 miliar. Perusahaan mampu melakukan efisiensi beban penjualan yang turun sebesar 2,27% menjadi Rp19,55 miliar di tahun 2016. Meski demikian, terdapat kenaikan beban umum & administrasi, dan beban operasi lainnya masing-masing sebesar 11,98% dan 61,91% menjadi Rp306,67 miliar dan Rp137,71 miliar di tahun 2016. Kenaikan kedua komponen inilah yang menyebabkan kenaikan biaya operasional Perseroan.

Secara kumulatif, beban umum dan administrasi masih mendominasi struktur biaya operasi Perseroan. Pada tahun 2016, beban umum dan administrasi mencapai Rp306,67 miliar atau 66,10% dari total beban operasi.

Operating Expenses

The Operating Expenses in 2016 reached Rp463,92 billion, an increase by 22.44% compared to the position in 2015 amounted Rp378,91 billion. The Company managed to undertake efficiency in selling expenses which fell by 2.27% to Rp19,55 billion in 2016. However, there was an increase in general and administration expenses, and other operating expenses respectively by 11.98% and 61.91% to reach Rp306,67 billion and Rp137,71 billion respectively in 2016. The increase in these two components was the causeof the increase in the Company's operating expenses.

On a cumulative basis, the general and administrative expenses were still dominating the Company's operating expenses structure. In 2016, the general and administrative expenses reached Rp306,67 billion, or 66.10% of the total operating

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Sementara itu, porsi beban operasi lain adalah sebesar 29,68% disusul oleh beban penjualan yakni 4,21%.

Laba Usaha

Perseroan membukukan kerugian usaha menjadi Rp162,92 miliar di tahun 2016 dibandingkan dengan laba usaha sebesar Rp302,29 miliar setahun sebelumnya. Kinerja profitabilitas yang melemah ini sejalan dengan penurunan laba kotor Perseroan sebesar 59,44% menjadi Rp250,80 miliar dan diikuti oleh kenaikan beban operasi sebesar 22,44%.

Beban Keuangan

Perseroan membukukan kenaikan beban keuangan sebesar 3,99% menjadi Rp111,55 miliar di tahun 2016. Kenaikan ini terutama sejalan dengan kenaikan *outstanding* utang jangka panjang Perseroan yang mengalami peningkatan sebesar 60,78% menjadi Rp1,40 triliun di tahun 2016 dimana sebesar 89,90% dari utang jangka panjang tersebut jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Dari total beban keuangan sebesar Rp111,55 miliar tersebut, beban bunga terbesar adalah untuk kredit investasi sebesar Rp47,51 miliar diikuti oleh bunga obligasi yakni Rp37,75 miliar. Sementara itu, jenis kredit lainnya yakni kredit modal kerja sebesar Rp26,29 miliar.

Laba Sebelum Pajak

Seiring dengan rugi usaha yang dibukukan tahun 2016, Perseroan mencatat rugi sebelum pajak sebesar Rp216,84 miliar. Kondisi ini berbeda dengan tahun sebelumnya dimana Perseroan berhasil membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp198,36 miliar.

Pajak dan Laba Tahun Berjalan

Perseroan membukukan rugi tahun berjalan sebesar Rp155,78 miliar di tahun 2016 meski disaat yang sama menerima manfaat pajak tahun berjalan sebesar Rp61,05 miliar. Kondisi profitabilitas ini juga berbanding terbalik dengan pencapaian tahun sebelumnya dengan laba tahun berjalan sebesar Rp126,43 miliar.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Ditopang oleh pendapatn komprehensif tahun berjalan sebesar Rp16,90 miliar, rugi komprehensif tahun berjalan mencapai Rp138,89 miliar.

expenses. Meanwhile, the share of other operating expenses amounted to 29.68%, followed by costs of sales by 4.21%.

Operating profit

The company posted an operating loss to Rp162,92 billion in 2016 compared to previous year's operating profit of Rp302,29 billion. This weaker profitability performance was in line with the Company's gross profit decline of 59.44% to Rp250,80 billion and followed by an increase in operating expenses by 22.44%.

Finance Expenses

The Company recorded a rise in finance expenses of 3.99% to Rp111,55 billion in 2016. The increase was mainly in line with the Company's outstanding long-term payables which increased by 60.78% to Rp1,40 trillion in 2016, 89.90% of which was the current portion of the long-term payables.

Of the total finance expenses of Rp111,55 billion, the biggest interest expense was for investment credits amounting Rp47,51 billion, followed by interest of bonds of Rp37,75 billion. Meanwhile, interest expense of other type of credit namely working capital loans was Rp26,29 billion.

Profit before tax

Along with the operating loss recorded in 2016, the Company recorded a loss before tax by Rp216,84 billion. This was different from the previous year's profit before tax of Rp198,36 billion successfully recorded by the Company in the previous year.

Taxes and Profit for the Year

The Company posted a loss for the year amounting to Rp155,78 billion in 2016 while at the same time received tax benefit of the current year amounting to Rp61,05 billion. This profitability conditions was also inversely proportional to the achievement of the previous year with profit for the year amounting to Rp126,43 billion.

Comprehensive Income for the Year

Supported by comprehensive revenue for the year amounting Rp16,90 billion, the comprehensive loss for the year was Rp138,89 billion.

ANALISA POSISI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Total aset Perseroan di tahun 2016 adalah sebesar Rp13,01 triliun atau tumbuh 5,98% dibandingkan posisi tahun 2015 sebesar Rp12,32 triliun. Kenaikan total aset Perseroan ini ditopang oleh kenaikan aset lancar dan aset non lancar masing-masing sebesar 4,96% dan 6,24% menjadi Rp2,56 triliun dan Rp10,50 triliun.

ANALYSIS OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS POSITION

The Company's total assets in 2016 amounted to Rp13.01 trillion or grew 5.98% compared to the position in 2015 amounting to Rp12.32 trillion. The increase in the Company's total assets was supported by the increase in current assets and non-current assets by 4.96% and 6.24% to Rp2.56 trillion and Rp10.50 trillion respectively.

(dalam jutaan Rupiah) *(In million Rupiah)*

	2016	2015	Nominal	%	
Kas dan setara kas	235.427,13	395.885,96	-160.458,82	-40,53%	*Cash and Cash Equivalents*
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	967.565,78	975.000,00	-7.434,22	-0,76%	*Restricted Cash and Cash Equivalents*
Piutang usaha, neto	150.483,46	183.390,12	- 32.906,66	-17,94%	*Trade receivables, net*
Piutang petani tebu rakyat, neto	176.862,78	178.490,05	-1.627,27	-0,91%	*Sugarcane farmers receivables, net*
Persediaan, neto	905.980,68	595.597,26	310.383,42	52,11%	*Inventories, net*
Aset lancar lainnya	121.447,29	108.456,24	12.991,06	11,98%	*Other Current Assets*
Jumlah Aset Lancar	2.557.767,13	2.436.819,62	120.947,50	4,96%	*Total Current Assets*
Piutang pihak berelasi jangka panjang	1.216.017,17	889.417,68	326.599,48	36,72%	*Long-term receivables from related parties*
Aset tetap, neto	8.824.200,78	8.679.922,97	144.277,81	1,66%	*Fixed Assets, net*
Aset tidak lancar lainnya	463.136,64	317.556,35	145.580,29	45,84%	*Other Non-Current Assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar	10.503.354,58	9.886.897,00	616.457,58	6,24%	*Current Assets*
Total Aset	13.061.121,71	12.323.716,63	737.405,08	5,98%	*Total Assets*

ASET LANCAR

CURRENT ASSETS

(dalam jutaan Rupiah) *(In million Rupiah)*

	2016	2015	Nominal	%	
Kas dan setara kas	235.427,13	395.885,96	-160.458,82	-40,53%	*Cash and Cash Equivalents*
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	967.565,78	975.000,00	-7.434,22	-0,76%	*Restricted Cash and Cash Equivalents*
Piutang usaha, neto	150.483,46	183.390,12	-32.906,66	-17,94%	*Trade receivables, net*
Piutang petani tebu rakyat, neto	176.862,78	178.490,05	-1.627,27	-0,91%	*Sugarcane farmers receivables, net*
Persediaan, neto	905.980,68	595.597,26	310.383,42	52,11%	*Inventories, net*
Aset lancar lainnya	121.447,29	108.456,24	12.991,06	11,98%	*Other Current Assets*
Jumlah Aset Lancar	2.557.767,13	2.436.819,62	120.947,50	4,96%	*Total Current Assets*

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Posisi aset lancar Perseroan mencapai Rp2,56 triliun di tahun 2016 atau tumbuh sebesar 4,96% dibandingkan posisi tahun 2015 sebesar Rp2,44 triliun. Kenaikan aset lancar Perseroan terutama ditopang oleh kenaikan persediaan sebesar 52,11% menjadi Rp905,98 miliar di tahun 2016.

Kas dan Setara Kas

Pada tahun 2016, Perseroan melaporkan posisi kas dan setara kas sebesar Rp235,43 miliar atau lebih rendah dari posisi tahun 2015 sebesar Rp395,89 miliar. Sebagai Perseroan yang mayoritas dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kas dan setara kas Perusahaan banyak di tempatkan di perbankan milik pemerintah dengan porsi sebesar 98,13% di tahun 2016. Rata-rata tingkat bunga deposito per tahun adalah sebesar 6,75% di tahun 2016 dan 4,6% di tahun 2015.

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp967,57 miliar adalah yang diterima oleh Perusahaan pada tahun 2015 terkait dengan program Penyertaan Modal Negara (PMN) yang telah ditentukan penggunaannya. Dana ini akan digunakan dalam beberapa program kegiatan Perusahaan, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas giling untuk PG Tjoekir dan PG Gempolkrep;
2. Pembangunan proyek *co-generation* untuk pembangkit listrik di PG Ngadiredjo, PG Tjoekir dan PG Gempolkrep sebesar 50 MW;
3. Pemantapan kinerja pabrik *Bioethanol* di PG Gempolkrep; dan
4. Pembangunan 1 pabrik *Bioethanol* berkapasitas 100 KL/hari di PG Ngadiredjo

Piutang Usaha

Piutang usaha Perusahaan pada tahun 2016 mencapai Rp150,48 miliar (net), turun sebesar 17,94% menjadi Rp150,48 miliar sejalan dengan penurunan penjualan Perusahaan di tahun 2016. Berdasarkan umur piutang, piutang usaha yang telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai sebesar Rp14,73 miliar atau sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp14,45 miliar ditengah tantangan perlambatan perekonomian Indonesia di tahun 2016.

The Company's current assets position reached Rp2.56 trillion in 2016 or grew 4.96% compared to its position in 2015 amounting to Rp2.44 trillion. The increase in the Company's current assets was mainly supported by an increase in inventories by 52.11% to Rp905.98 billion in 2016.

Cash and Cash Equivalents

In 2016, the Company reported cash and cash equivalents amounting to Rp235.43 billion or lower than its position in 2015 of Rp395.89 billion. As a company with majority shares owned by a State-Owned Enterprise (BUMN), the Company's cash and cash equivalents are placed in state-owned banks with a portion of 98.13% in 2016. The average annual interest rate of time deposits was 6.75 % in 2016 and 4.6% in 2015.

Restricted Cash and Cash Equivalents

Restricted Cash and Cash Equivalents of Rp967.57 billion was the State Capital Investment program fund (PMN) received by the Company in 2015. This fund will be allocated to several program activities of the Company, among others:

1. The increase in milling capacity and sugarcane yield rendement for Tjoekir Sugar Factory and Gempolkrep Sugar Factory
2. Project development of co-generation for power plant in Ngadirejo Sugar Factory, Tjoekir Sugar Factory and Gempolkrep Sugar Factory
3. Stabilization of Bioethanol plant performance in Gempolkrep Sugar Factory
4. Development of one Bioethanol plant with capacity of 100 KL/day in Ngadiredjo Sugar Factory.

Trade receivables

The Company's trade receivables, net in 2016 reached Rp150.48 billion, down 17.94% to Rp150.48 billion in line with the decrease of the Company's sales in 2016. Based on the age of receivables, trade receivables that were already matured and impaired amounted to Rp14.73 billion, slightly higher than Rp14.45 billion in 2015, which was due to the challenges of Indonesia's economic slowdown in 2016.

Dukungan dari pihak pihak berelasi meningkat dilihat dari kontribusi yang naik menjadi Rp42,75 miliar (neto) dari total piutang usaha bersih sebesar Rp150,48 miliar di tahun 2016. Setahun sebelumnya, piutang usaha dari pihak berelasi sebesar Rp36,85 miliar dari total piutang usaha sebesar Rp183,39 miliar.

Support from related parties increased indicated from the rise in the contribution to Rp42.75 billion (net) from total net trade receivables of Rp150.48 billion in 2016. A year earlier, trade receivables from related parties amounted to Rp36.85 billion, from the total trade receivables of Rp183.39 billion.

Piutang Petani Tebu Rakyat

Piutang petani tebu rakyat merupakan pinjaman kepada Petani Tebu Rakyat (PTR) antara lain berupa beban garap, sarana produksi (saprodi), Bahan Baku Tebu (BBT)/Bibit, beban traktor, termasuk pemberian pinjaman dalam rangka program Pemerintah "Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)", yang pelunasannya akan diperhitungkan dengan hasil penjualan gula dan tetes milik petani. Pinjaman ini berasal dari paket kredit beberapa Bank dengan petani melalui Koperasi Petani Tebu Rakyat yang penyaluran dan pelunasannya melalui pabrik gula Perusahaan. Dalam perjanjian pinjaman tersebut Perusahaan bertindak sebagai avalis. Posisi piutang petani tebu rakyat pada tahun 2016 adalah sebesar Rp176,86 miliar, lebih rendah dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp178,49 miliar (net).

Receivables of sugarcane farmers

Receivables of sugarcane farmers represents receivables which include loads till, inputs, BBT/Seed, tractor expenses, including lending relating to "Food Security and Energy Loan" government program. The repayment of the receivables will be compensated with the proceeds of the sale of sugar and molasses owned by farmers. These loans come from bank loan package through the Sugarcane Farmers Cooperative. The distribution and repayment of the loans will be made through the Company. Based on the loan agreements the Company acts as a guarantor (avalist). Receivables of sugarcane farmers (net) in 2016 amounted to Rp176.86 billion, a decrease compared to the previous year's position of Rp178.49 billion.

Persediaan

Posisi persediaan Perseroan pada tahun 2016 mencapai Rp905,98 miliar, tumbuh 52,11% dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp595,60 miliar (net). Kenaikan persediaan ini terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan barang jadi terutama gula yang naik signifikan menjadi Rp352,19 miliar di tahun 2016 dari hanya Rp63,10 miliar setahun sebelumnya.

Inventories

The Company's inventories (net) in 2016 amounted to Rp905.98 billion, grew 52.11% compared to the previous year's position of Rp595.60 billion. The increase in inventories was mainly due to increases in finished goods inventories, especially sugar, which rose significantly to Rp352.19 billion in 2016 from only Rp63.10 billion a year earlier.

Aset Lancar Lainnya

Aset lancar lainnya terdiri adalah komponen-komponen aset lancar diluar 6 (enam) komponen aset lancar yang telah disebutkan sebelumnya. Total aset lancar lainnya pada tahun 2016 mencapai Rp121,45 miliar, tumbuh 11,98% dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp207,68 miliar. Kenaikan/penurunan aset lancar lainnya ini terutama disebabkan oleh kenaikan pajak dibayar di muka yang naik menjadi Rp41,48 miliar di tahun 2016 dari posisi sebesar Rp30,95 miliar setahun sebelumnya.

Other Current Assets

Other current assets consist of current assets components out of the 6 (six) components of current assets previously mentioned. Total other current assets in 2016 reached Rp121, 45 billion, grew 11.98% compared to the previous year's position of Rp207, 68 billion. The increase in other current assets was primarily due to an increase in prepaid taxes which rose to Rp41.48 billion in 2016 from Rp30.95 billion in the previous year.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

ASET TIDAK LANCAR

NON-CURRENT ASSETS

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

	2016	2015	Perubahan		
			Nominal	%	
Piutang pihak berelasi jangka panjang	1.216.017,17	889.417,68	326.599,48	36,72%	*Long-term receivables from related parties*
Aset tetap, neto	8.824.200,78	8.679.922,97	144.277,81	1,66%	*Fixed assets, net*
Aset tidak lancar lainnya	463.136,64	317.556,35	145.580,29	45,84%	*Other non-current assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar	10.503.354,58	9.886.897,00	616.457,58	6,24%	*Total non-current assets*
Total Aset	13.061.121,71	12.323.716,63	737.405,08	5,98%	*Total Assets*

Perseroan membukukan aset tidak lancar senilai Rp10,50 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 6,24% dibandingkan posisi aset tidak lancar tahun 2015 sebesar Rp9,89 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang pihak berelasi sebesar 36,72% menjadi Rp1,22 triliun. Secara kumulatif, total aset Perusahaan naik sebesar 5,98% menjadi Rp13,06 triliun sejalan dengan kenaikan aset lancar dan aset tidak lancar di tahun 2016.

The Company posted non-current assets of Rp10.50 trillion, an increase by 6.24% compared with the 2015 non-current assets of Rp9.89 trillion. The increase was mainly due to an increase in long-term receivables from related parties by 36.72% to Rp1.22 trillion. Cumulatively, the Company's total assets increased by 5.98% to Rp13.06 trillion in line with the increase in current assets and non-current assets in 2016.

Piutang Pihak Berelasi Jangka Panjang

Piutang PT Perkebunan Nusantara XIV merupakan pengeluaran Perusahaan dalam rangka penyelamatan PT Perkebunan Nusantara XIV dari kerugian usaha Pabrik Gula Bone, Caming dan akalar (BCT) sesuai dengan penugasan dari enteri BUMN berdasarkan surat No. S- 49/MBU/2009 tanggal 31 Juli 2009 dan Surat deputi Bidang Agro Industri S-187/MBU/2009 tanggal 12 Agustus 2009 serta No. S- 653/MBU/2011 tanggal 7 Desember 2011. Posisi piutang pihak berelasi jangka panjang mencapai Rp1,22 triliun di tahun 2016, lebih tinggi dibandingkan posisi tahun 2015 sebesar Rp889,42 miliar

Long-Term Receivables from Related Parties

Receivables from PT Perkebunan Nusantara XIV represent cost incurred by the Company in relation to taking care PT Perkebunan Nusantara XIV of Bone, Caming and Takalar (BCT) Sugar Factory operating loss in accordance with the assignment from the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) based on letter No. S-549/MBU/2009 dated July 31, 2009 and the Letter of Deputy Agro Industries S-187/MBU/2009 dated August 12, 2009 and No. S-653/MBU/2011 dated December 7, 2011. The amount of Long-Term Receivables from Related Parties was Rp1.22 trillion in 2016, higher than the 2015's amount of Rp889.42 billion.

Aset Tetap

Perusahaan membukukan kenaikan aset tetap secara signifikan pada tahun 2015 menjadi Rp8,68 triliun karena ditopang oleh surplus revaluasi aktiva tetap. Pada tahun 2016, aset tetap Perseroan tumbuh sebesar 1,66% menjadi Rp8,82 triliun terutama ditopang oleh kenaikan mesin dan instalasi menjadi Rp2,79 triliun dibandingkan sebesar Rp2,63 triliun di tahun 2015.

Fixed Assets

The Company recorded a significant increase in fixed assets in 2015 to Rp8.68 trillion as supported by the revaluation surplus of fixed assets. In 2016, the Company's fixed assets grew 1.66% to Rp8.82 trillion primarily due to the increase in machinery and installation to Rp2.79 trillion compared to Rp2.63 trillion in 2015.

Aset Tidak Lancar Lainnya

Aset tidak lancar lainnya mencakup aset tidak lancar selain kedua komponen tersebut. Total aset tidak lancar lainnya di tahun 2016 adalah sebesar Rp463,14 miliar, lebih tinggi dibanding posisi tahun 2015 yang mencapai Rp317,56 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan asset pajak tangguhan sebesar menjadi Rp279,47 miliar di tahun 2016 dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp203,67 miliar.

Other Non-Current Assets

Other non-current assets include non-current assets other than those two components. Total other non-current assets in 2016 amounted to Rp463.14 billion, higher than the position in 2015 of Rp317.56 billion. The increase was mainly due to the increase in deferred tax assets to Rp279.47 billion in 2016 from the previous year's position of Rp203.67 billion.

LIABILITAS

Total liabilitas Perseroan di tahun 2016 naik sebesar 31,45% menjadi Rp4,02 triliun dibandingkan posisi tahun 2015 sebesar Rp3,06 triliun. Kenaikan total liabilitas ini sejalan dengan peningkatan liabilitas jangka pendek dan panjang yang masing-masing tumbuh sebesar 35,44% dan 29,59% menjadi Rp1,32 triliun dan Rp2,70 triliun di tahun 2016.

LIABILITIES

Total liabilities of the Company in 2016 increased by 31.45% to Rp4.02 trillion compared to the position in 2015 of Rp3.06 trillion. The increase in total liabilities was in line with the increase in current and non-current liabilities that grew 35.44% and 29.59% respectively to Rp1.32 trillion and Rp2.70 trillion in 2016.

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

	2016	2015	Perubahan		
			Nominal	%	
Utang usaha	466.676,10	62.470,24	404.205,86	647,04%	*Trade Payables*
Utang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi	242.547,96	205.831,74	36.716,22	17,84%	*Food security and energycredit ("KKPE") payables*
Utang jangka pendek	220.418,59	139.220,64	81.197,94	58,32%	*Short-Term Loans*
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	141.278,71	205.082,12	-63.803,41	-31,11%	*Current portion of long-term loans*
Liabilitas jangka pendek lainnya	249.682,55	362.437,73	-112.755,18	-31,11%	*Other Current Liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.320.603,90	975.042,47	345.561,43	35,44%	*Total Current Liabilities*
Bagian utang jangka panjang dikurangi jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.257.729,29	665.060,40	592.668,89	89,12%	*Long-term loans, net of current portion*
Utang obligasi	700.000,00	700.000,00	-	0,00%	*Bonds payable*
Liabilitas imbalan kerja	739.529,79	716.359,00	23.170,79	3,23%	*Employee benefits liability*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.697.259,08	2.081.419,40	615.839,68	29,59%	*Total Non-Current Liabilities*
Total Liabilitas	4.017.862,98	3.056.461,87	961.401,11	31,45%	*Total Liabilities*

Tinjauan Keuangan
Financial Review

LIABILITAS LANCAR

CURRENT LIABILITIES

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

	2016	2015	Perubahan		
			Nominal	%	
Utang usaha	466.676,10	62.470,24	404.205,86	647,04%	*Trade Payables*
Utang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi	242.547,96	205.831,74	36.716,22	17,84%	*Food security and energy credit ("KKPE") payables*
Utang jangka pendek	220.418,59	139.220,64	81.197,94	58,32%	*Short-Term Loans*
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	141.278,71	205.082,12	-63.803,41	-31,11%	*Current portion of long-term Loans*
Liabilitas jangka pendek lainnya	249.682,55	362.437,73	-112.755,18	-31,11%	*Other Current Liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.320.603,90	975.042,47	345.561,43	35,44%	*Total Current Liabilities*

Liabilitas lancar Perseroan mencapai Rp1,32 triliun di tahun 2016, tumbuh 35,44% dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp975,04 miliar. Kenaikan aktiva lancar ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha yang naik signifikan menjadi Rp466,68 miliar dari hanya Rp62,47 miliar di tahun 2015.

The Company's current liabilities reached Rp 1.32 trillion in 2016, growing 35.44% compared to the previous year's position of Rp975.04 billion. The increase in current assets was primarily due to a significant increase in operating debt to Rp466.68 billion from Rp62.47 billion in 2015.

Utang Usaha

Utang usaha Perseroan yang merupakan utang kepada para pemasok mencapai Rp466,68 miliar di tahun 2016. Posisi ini jauh lebih tinggi dibanding tahun 2015 sebesar Rp62,47 miliar seiring dengan peningkatan utang usaha dari pihak berelasi sebesar Rp311,16 miliar di tahun 2016.

Accounts payable

The Company's debt owed to suppliers reached Rp466.68 billion in 2016. This position is much higher than that of 2015 of Rp62.47 billion, in line with the increase in the related business debt of Rp311.16 billion in 2016.

Utang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi KKPE

Utang KKPE merupakan kredit yang diperoleh Perusahaan dari Bank-bank Pemerintah dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk diteruskan kepada Petani Tebu Rakyat melalui Pabrik Gula. Dalam perjanjian kredit ini, Perusahaan bertindak sebagai *avalist* (penjamin) dengan menerbitkan *corporate guarantee.* Jaminan yang diberikan berupa jaminan fidusia atas tebu yang dimiliki petani, bukti pemilik kendaraan bermotor, dan Sertifikat Hak Milik dari petani atau koperasi.

Food Security and Energy Credit (KPPE) Payables

KKPE payables represent credit obtained by the Company from government banks and the Partnership Program and Community Development ("PKBL") to be distributed to the Sugarcane Farmers through Sugar Factory. In this agreement, the Company acts as an avalist by issuing a corporate guarantee. Collateral provided is in the form of fiduciary on cane owned by farmers, certificate of ownership of vehicles, and land certificate from farmers or cooperatives.

Posisi utang KPPE di tahun 2016 mencapai Rp242,55 miliar, naik sebesar 17,84% dibandingkan posisi tahun 2015 sebesar Rp205,83 miliar.

Utang Jangka Pendek

Perusahaan membukukan utang jangka pendek sebesar Rp220,42 miliar di tahun 2016, naik 58,32% dibandingkan posisi tahun 2015 sebesar Rp139,22 miliar. Peningkatan utang ini disebabkan terutama oleh perolehan utang dari Bank Mandiri sebesar Rp163,37 miliar di tahun 2016.

Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Perusahaan membukukan total utang jangka panjang sebesar Rp1,38 triliun pada tahun 2016. Dari total utang tersebut, Rp137,44 miliar jatuh tempo di tahun 2016 atau lebih rendah dibandingkan posisi utang jangka panjang yang jatuh tempo di tahun 2015 sebesar Rp204,06 miliar. Dari jumlah tersebut utang dari Bank Mandiri (Persero) sebesar Rp130,00 jatuh tempo di tahun 2016.

Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

Liabilitas jangka pendek lainnya adalah liabilitas selain dari keempat komponen liabilitas lancar yang disebutkan diatas. Secara kumulatif liabilitas lancar di tahun 2016 sebesar Rp249,68 miliar, lebih rendah dibandingkan posisi tahun 2015 sebesar Rp358,56 miliar. Penurunan ini terutama terutama disebabkan oleh turunnya utang pajak menjadi Rp26,28 miliar dari Rp135,41 miliar di tahun 2015.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang Perusahaan sebesar Rp2,70 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 29,59%. Kenaikan ini terutama sejalan dengan peningkatan bagian utang jangka panjang dikurangi jatuh tempo dalam waktu satu tahun menjadi Rp1,26 triliun dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp665,06 miliar. Secara kumulatif, kenaikan liabilitas jangka pendek dan panjang sebesar 35,44% dan 31,45% menopang kenaikan total liabilitas menjadi Rp4,02 triliun di tahun 2016.

The amount of KPPE's payables in 2016 was Rp242.55 billion, an increase by 17.84% compared to 2015 amounting to Rp205.83 billion.

Short-Term Loans

The Company posted short-term loans amounting to Rp220.42 billion in 2016, up 58.32% compared to 2015 amounting Rp139.22 billion. The increase in short term loans was mainly due to lending facility of Rp163.37 billion obtained from Bank Mandiri in 2016.

Current portion of long-term loans

The Company recorded total long-term loans of Rp 1.38 trillion in 2016. From the total long-term loans, Rp137.44 billion was the current portion in 2016, lower than the current portion of long-term loans in 2015 amounting to Rp204.06 billion. From the said amount, long-term loans from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp130.00 billion were the current portion in 2016.

Other Current Liabilities

Other current liabilities are liabilities other than the four components of current liabilities mentioned above. The cumulative current liabilities in 2016 amounted to Rp249.68 billion, lower than the 2015 position of Rp358.56 billion. The decline was mainly due to lower tax payable to Rp26.28 billion from Rp135.41 billion in 2015.

NON-CURRENT LIABILITIES

Non-current liabilities of the Company amounted to Rp2.70 trillion or an increase by 29.59%. The increase was mainly in line with the increase in long-term loans net of current portion of long-term loans to reach Rp1.26 trillion from the previous year's position of Rp665.06 billion. Cumulatively, the increase in current liabilities and non-current liabilities by 35.44% and 31.45% respectively contributed to the increase in total liabilities to Rp4.02 trillion in 2016.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

	2016	2015	Peruabahan		
			Nominal	%	
Bagian utang jangka panjang dikurangi jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.257.729,29	665.060,40	592.668,89	89,12%	*Long-term loans, net of current portion*
Utang obligasi	700.000,00	700.000,00	-	0,00%	*Bonds Payable*
Liabilitas imbalan kerja	739.529,79	716.359,00	23.170,79	3,23%	*Employee Benefits Liability*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.697.259,08	2.081.419,40	615.839,68	29,59%	*Total Non-Current Liabilities*
Total Liabilitas	4.017.862,98	3.056.461,87	961.401,11	31,45%	*Total Liabilities*

Bagian Utang Jangka Panjang Dikurangi yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun

Total utang Perusahaan yang jatuh tempo lebih dari satu tahun dari berbagi insitusi keuangan adalah sebesar Rp1,26 triliun di tahun 2016 atau lebih tinggi dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp665,06 miliar. Perusahaan membukukan kenaikan pinjaman jangka panjang dari Bank Mandiri (Persero) menjadi Rp1,27 triliun di tahun 2016 dibandingkan hanya Rp813,75 miliar setahun sebelumnya. Selain itu, Perusahaan juga mendapatkan pinjaman baru dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebesar Rp50,00 miliar.

Long-Term Loans, Net of Current Portion

The Company's long-term loans, net of current portion from various financial institutions amounted to Rp1.26 trillion in 2016 or higher than the previous year's position of Rp665.06 billion. The Company recorded an increase in long-term loan from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to reach Rp1, 27 trillion in 2016 compared to only Rp813, 75 billion in the previous year. In addition, the Company also obtained new credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp50.00 billion.

Utang Obligasi

Perseroan menerbitkan obligasi korporasi sejumlah Rp700,00 miliar pada bulan Juli 2013 dengan bunga tetap sebesar 8,9% per tahun dan akan jatuh tempo pada 5 Juli 2018. Tujuan dari penerbitan ini adalah 39% untuk pelunasan *outstanding* kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan 61% untuk belanja modal dan atau modal kerja dalam rangka optimalisasi 11 unit Pabrik Gula milik Perusahaan. Peringkat obligasi saat diterbitkan adalah BBB+/stabil dibandingkan peringkat terkini BBB/stabil.

Bonds Payable

The Company issued corporate bonds in 2013 with nominal amount of Rp700 billion and a fixed interest rate at 8.9% per annum which will be due on July 5, 2018. The purpose of this bonds issuance are: 39% for the repayment of outstanding credit at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; 61% for capital expenditure and or working capital in order to optimize 11 units of sugar factories owned by the Company. The rating of bonds when issued was BBB+/stable compared to current rating of BBB/stable.

Liabilitas Imbalan Kerja

Perseroan membukukan kenaikan liabilitas imbalan kerja sebesar 3,23% menjadi Rp739,53 miliar di tahun 2016. Liabilitas ini lebih tinggi dibanding posisi tahun sebelumnya sebesar Rp716,36 miliar terutama akibat peningkatan nilai kini kewajiban imbalan pasti menjadi Rp1,05 triliun di tahun 2016 dari Rp1,04 triliun di tahun 2015.

Employee Benefits Liability

The Company recorded an increase in its employee benefits liability by 3.23% to Rp739.53 billion in 2016. This liability is higher than the previous year's position of Rp716.36 billion, which was primarily due to the increase in the present value of defined benefit obligations to Rp1.05 trillion in 2016 from Rp1.04 trillion in 2015.

EKUITAS

EQUITY

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

	2016	2015	Perubahan	
			Nominal	%
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh	1.845.596	870.596,00	975.000,00	111,99%
Modal Sumbangan	10.062	10.061,50	-	0,00%
Komponen Ekuitas Lainnya	10.626	985.137,12	(974.511,13)	-98,92%
Penghasilan Komprehensif Lainnya	6.792.289	7.126.062,05	(333.772,66)	-4,68%
Saldo laba	346.000	239.941,70	106.058,30	44,20%
Jumlah Ekuitas	9.004.573	9.231.798,37	(227.225,48)	-2,46%
Kepentingan Non Pengendali	39.285,74	35.456,39	3.829,35	10,80%
Total Ekuitas	9.043.858,63	9.267.254,76	(223.396,13)	-2,41%
Total Liabilitas dan Ekuitas	13.061.721,60	12.323.716,63	738.004,98	5,99%

Posisi ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar 2,41% menjadi Rp9,04 triliun di tahun 2016 dari posisi tahun 2015 sebesar Rp9,27 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya komponen ekuitas lainnya menjadi hanya Rp10,63 miliar di tahun 2016 dari Rp985,14 miliar di tahun 2015. Disisi lain terdapat penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 111,99% karena penambahan modal yang berasal dari dana PNM sebesar Rp975,00 miliar.

The Company's equity was down 2.41% to Rp9.04 trillion in 2016 from Rp9.27 trillion in 2015. The decrease was primarily due to a decline in other component of equity to Rp10.63 billion in 2016 from Rp985.14 billion in 2015. On the other hand, there was additional issued and fully paid capital of 111.99% due to additional capital of Rp975.00 billion taken from PNM funds.

ANALISA ARUS KAS KONSOLIDASI

CONSOLIDATED CASH FLOWS ANALYSIS

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

	2016	2015	Perubahan		
			Nominal	%	
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	-356.710,50	799.660,94	-1.156.371,44	-144,61%	*Net cash flows provided by (used in) operating activities*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	-382.752,53	-265.066,09	-117.686,44	44,40%	*Net cash flows provided by (used in) investing activities*

Tinjauan Keuangan
Financial Review

(dalam jutaan Rupiah) (in million Rupiah)

	2016	2015	Perubahan		
			Nominal	%	
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	571.569,99	437.173,84	134.396,15	30,74%	*Net cash flows provided by (used in) financing activities*
(Penurunan) Kenaikan Neto Kas Dan Setara Kas	-167.893,04	971.768,68	-1.139.661,73	-117,28%	*Net (decrease) increase in cash and cash equivalents*
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun	1.370.885,96	399.117,28	971.768,68	243,48%	*Cash and cash equivalents at beginning of year*
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun	1.202.992,91	1.370.885,96	-167.893,04	-12,25%	*Cash and cash equivalents at end of year*

Arus kas dari aktivitas operasi
Arus kas dari operasi mengalami penuruanan signifikan dari Rp799,66 menjadi defisit Rp356,71 miliar pada tahun 2016. Arus kas negatif dari aktivitas operasi ini sejalan dengan penurunan pendapatan usaha yang dibukukan Perusahaan di tahun 2016.

Cash flows provided by operating activities
Cash flows provided by operating activities significantly decreased by Rp799.66 to a deficit of Rp356.71 billion in 2016 compared to Rp799.66 billion in the previous year. Negative cash flows provided by operating activities were in line with the decrease in revenues recorded by the Company in 2016.

Arus kas dari aktivitas investasi
Perseroan membukukan defisit arus kas dari investasi di tahun 2016 seiring dengan realisasi capex berupa perolehan aset tetap yang meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Perolehan aset tetap pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp377,75 miliar dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp265,07 miliar. Total arus kas dari aktivitas investasi masih mengalami defisit sebesar Rp382,75 miliar atau dilihat dari dahulu dibandingkan ara peserta dari provinsi lain.

Cash flows provided by investing activities
The Company posted a deficit in cash flows provided by investing actvities in 2016 in line with the capex realization in the purchase of fixed assets compared to the previous period. Purchase of fixed assets in 2016 increased to Rp377.75 billion compared to the previous year's position of Rp265.07 billion. The total cash flows provided by investing activities were still experiencing a deficit of Rp382.75 billion compared to Rp265.07 billion deficit in the previous year.

Arus kas dari aktivitas pendanaan
Arus kas dari aktivitas pendanaan mengalami surplus terutama ditopang oleh kenaikan penerimaan pinjaman bank menjadi Rp1,59 triliun. Selain itu, terdapat peningkatan pinjaman KKPE menjadi Rp573,89 miliar. Secara kumulatif, arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp571,57 miliar di tahun 2016 dan Rp437,17 miliar.

Cash flows provided by financing activities
Cash flows provided by financing activities was in a surplus mainly supported by the increase in proceeds from bank loans to Rp1, 59 trillion. In addition, there was an increase in proceeds from KKPE payables to Rp573.89 billion. Cumulatively, net cash flows provided by financing activities amounted to Rp571.57 billion in 2016 and Rp437.17 billion in 2015.

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun
Dikombinasikan dengan penurunan neto kas dan setara kas

Cash and Cash Equivalents at End of Year
Combined with net decrease in cash and cash equivalents

menjadi defisit Rp167,89 miliar tetapi diimbangi dengan kas dan setara kas awal tahun sebesar Rp1,37 triliun mendorong posisi kas dan setara kas akhir tahun 2016 mencapai Rp1,20 triliun. Posisi ini lebih rendah dibanding dengan posisi akhir tahun 2015 senilai Rp1,37 triliun.

to Rp167.89 billion deficit but balanced with cash and cash equivalents at beginning of the year of Rp1.37 trillion, the position of cash and cash equivalents at the end of 2016 reached Rp1.20 trillion. This position was lower than the position at the end of 2015 amounting to Rp1.37 trillion.

RASIO KEUANGAN PENTING

Profitabilitas Perseroan

Sejalan dengan penurunan pendapatan usaha Perseroan, margin laba bruto mengalami tekanan menjadi 11,10% di tahun 2016 dibandingkan 24,55% setahun sebelumnya. Rugi bersih yang dibukukan oleh Perseroan berdampak kepada rasio profitabilitas yang negatif selain margin laba kotor di tahun 2016

KEY FINANCIAL RATIOS

Profitability of the Company

In line with the decrease of the Company's operating revenues, gross profit margin was down to 11.10% in 2016 compared to 24.55% a year earlier. The net loss posted by the Company affects negative profitability ratio in addition to gross profit margin in 2016.

Tabel Rasio-rasio profitabilitas / **Tabel Rasio-rasio profitabilitas**

	2016	2015	
Margin laba bruto	11,10%	24,55%	*Gross Profit Margin*
Margin EBITDA	4,37%	19,97%	*EBITDA Margin*
Margin laba (rugi) usaha	-4,66%	12,20%	*Operating Profit (Loss) Margin*
Margin laba (rugi) bersih	-6,89%	4,99%	*Net Profit (Loss) Margin*
Imbal hasil atas aset	-1,19%	1,03%	*Return on Assets*
Imbal hasil atas ekuitas	-1,70%	2,73%	*Return on Equity*

Rekonsiliasi EBITDA

	2016	2015	
EBIT	-105.290	306.342	*EBIT*
Depresiasi & Amortisasi	204.011	199.326	*Depreciation and Amortization*
EBITDA	98.721	505.667	*EBITDA*

Kemampuan Membayar Hutang

Tingkat kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhi tercermin dari tingkat likuiditas yang dimiliki. Indikator yang digunakan oleh Perseroan untuk mengukur tingkat likuiditas adalah rasio lancar yang membandingkan antara aset lancar dengan liabilitas lancar Perseroan. Rasio lancar Perseroan pada 2016 sebesar 193,68%, mengalami penurunan dibandingkan rasio lancar pada 2015 sebesar 250,45% disebabkan oleh kenaikan hutang lancar sebesar 35,44% menjadi Rp1,32 triliun di tahun 2016 dibandingkan pertumbuhan aset lancar yang lebih rendah sebesar 4,96% menjadi Rp2,56 triliun.

Ability to Pay Debt

The Company's ability to meet the liabilities that must be met immediately is reflected in the level of liquidity owned. The indicator used by the Company to measure the liquidity level is the current ratio that compares current assets to current liabilities of the Company. The Company's current ratio in 2016 was 193.68%, a decrease compared with the 250.45% current ratio in 2015, which was due to the increase in current liabilities by 35.44% to Rp1.32 trillion in 2016 compared to the 4.96% growth of current assets to Rp2, 56 trillion.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Meski demikian, secara umum likuiditas Perseroan masih terjaga dengan baik.Perseroan secara konsisten mengelola risiko likuiditas melalui pengawasan proyeksi dan arus kas aktual yang diiringi dengan pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Risiko likuiditas Perseroan berkaitan erat dengan risiko kredit, dimana Perseroan memberikan kredit kepada pelanggan, piutang petani tebu rakyat dan penempatan rekening koran dan deposito pada bank. Terkait piutang usaha, Perseroan menerapkan kebijakan untuk memastikan penjualan produk hanya dilakukan kepada pelanggan yang dapat dipercaya dengan rekam jejak atau sejarah kredit yang baik. Semua pelanggan yang melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit.

However, in general, the Company's liquidity is well maintained. The Company consistently manages liquidity risk by monitoring projection and actual cash flow accompanied by the supervision of the maturity date of financial assets and liabilities. The Company's liquidity risk is closely related to credit risk, whereby the Company provides credit to customers, receivables of sugarcane farmers and placements of current accounts and time deposits with banks. With regard to accounts receivable, the Company implements policies to ensure that product sales are only made to reliable customers with a good track record or credit history. All customers who make a purchase on credit must go through credit verification procedures.

Rasio-rasio Likuiditas & Solvabilitas / **Liquidity and Solvency Ratios**

	2016	2015
Rasio lancar	193,68%	250,45%
Rasio cepat	122,74%	183,87%
Utang berbunga terhadap ekuitas	25,50%	18.85%
Utang berbunga terhadap EBITDA	2335,65%	337,11%
Utang berbunga neto terhadap ekuitas	22,84%	14,47%
Utang berbunga neto terhadap EBITDA	2092,10%	258,82%

Kolektabilitas

Ditengah tantangan perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2016, rata-rata hari penagihan piutang adalah 164 hari atau lebih lambat dibandingkan dengan rata-rata hari penagihan piutang sebesar 97 hari di tahun 2015.

Collectibility

In the midst of the challenges of slower economic growth in 2016, the average day of receivables collection was 164 days or slower than 97 days on the average for receivables collection in 2015.

STRUKTUR PERMODALAN

(dalam jutaan Rupiah)

	2016	2015	%
Utang bank jangka pendek	220.419	139.152	158.40%
Utang jangka panjang-jatuh tempo dalam satu tahun	137.445	204.063	67,35%
Utang jangka panjang-jatuh tempo lebih dari satu tahun	1.247.911	661.461	188,66%
Obligasi	700.000	700.000	100,00%
Total	2.305.774	1.704.676	135,26%
Dikurangi kas dan setara kas	235.427	395.886	59,47%
Utang bersih - neto	2.070.347	1.308.790	158,19%
Total Ekuitas	9.043.259	9.267.255	97,58%

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Perseroan memiliki kewajiban untuk mengelola permodalan dalam rangka melindungi kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perseroan dan entitas anak. Selain karena sifat bisnis Perseroan yang wajib memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan juga nilai tambah serta manfaat bagi pemangku kepentingan yang lain, kelangsungan usaha Perseroan juga penting karena Perseroan juga menjalankan peran strategis nasional sebagai perpanjangan tangan Pemerintah dalam merevitalisasi industri gula nasional.

Struktur permodalan Perseroan merupakan perimbangan antara penggunaan modal sendiri, yaitu ekuitas Perseroan, dengan penggunaan modal eksternal, yaitu liabilitas Perseroan. Modal eksternal dapat berbentuk pinjaman/hutan bank, hutang usaha maupun jeniscpinjaman yang lain. Sementara itu ekuitas didapatkan dari penempatan modal, penghasilan komprehensif tahunan, dan dalam beberapa kondisi tertentu Penyertaan Modal Negara (PMN). Pada tahun 2015, Perseroan mendapatkan PMN sebesar Rp975,00 miliar.

Pada tahun 2016, rasio utang berbunga terhadap ekuitas masih dikelola dengan baik sebesar 25,50% dibandingkan 18,85% setahun sebelumnya. Dengan memperhitungkan kas yang dimiliki Perseroan rasio utang berbunga neto terhadap ekuitas mencapai 22,84% di tahun 2016 dari 14,47% di tahun 2015.

Dalam pengelolaan struktur permodalan, Perseroan menerapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Menjaga perbandingan antara total pinjaman (hutang) berbunga dengan total ekuitas (debt-to-equity ratio) tidak lebih dari 2,5:1.
2. Menjaga perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 1:1.
3. Memelihara perbandingan EBITDA dan beban bunga (interest coverage ratio) tidak kurang dari 2,5:1.

MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

The Company has an obligation to manage capital in order to protect the ability to maintain going concern of the Company and its subsidiaries. In addition to the business nature of the Company which is obliged to provide returns for shareholders as well as the added value and benefits for other stakeholders, the Company's going concern is also important as the Company also carries out the national strategic role as an extension of the Government in revitalizing the national sugar industry.

The Company's capital structure is a balance between the use of its own capital, that is, the equity of the Company, with the use of external capital, which is the Company's liabilities. External capital may be in the form of bank loans, trade payables or other types of loans. Meanwhile, equity is derived from capital placements, annual comprehensive income, and under certain conditions from the State Capital Investment (PMN). In 2016 the Company received PMN funds of Rp975 billion.

In 2016, the interest-bearing debt to equity ratio was still properly managed by 25.50% compared to 18.85% a year earlier. Taking into account the Company's cash, debt to equity ratio was 22.84% in 2016 and 14.47% in 2015.

In managing its capital structure, the Company applies the following policies:

1. Maintain a comparison between total interest-bearing debt with total equity (debt-to-equity ratio) of not more than 2.5: 1.
2. Maintain a comparison between current assets and current liabilities of not less than 1: 1.
3. Maintain a comparison of EBITDA and interest coverage ratio of not less than 2.5: 1.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

PENCAPAIAN TARGET 2016 DAN PROYEKSI 2017

Tantangan perlambatan ekonomi Indonesia di tahun 2016 memberikan pengaruh terhadap kinerja Perseroan disamping faktor tantangan di industri perkebunan khusunya industri gula nasional. Sejalan dengan turunnya produksi gula nasional yang mengalami penurunan menjadi 2,20 juta ton di tahun 2016 dari 2,50 juta ton setahun sebelumnya, produksi gula Perseroan juga mengalami penurunan menjadi 377,49 ribu ton di tahun 2016 dari 430,75 ribu ton. Disisi lain, kompetisi di industri gula yang semakin ketat juga turut mempengaruhi kinerja Perseroan.

Sebagai akibatnya, realisasi pendapatan dan laba bersih masih dibawah target yang ditetapkan. Hal ini juga berimbas pada pencapaian ekuitas sebesar Rp9,04 triliun atau dibawah target seiring dengan kinerja pendapatan yang mengalami tekanan. Meski demikian Perseroan mampu membukukan realisasi total aset sebesar Rp13,06 triliun atau diatas target Rp12,83 triliun. Realisasi aset yang lebih tinggi ini diikuti dengan pecapaian liabilitas yang lebih tinggi dari target sebesar Rp13,06 triliun untuk menopang pertumbuhan aset tersebut.

Seiring dengan ekspektasi pertumbuhan ekonomi, Perseroan memperkirakan perbaikan pendapatan usaha menjadi Rp3,28 triliun sehingga diharapakan Perseroan kembali mampu membukukan laba bersih sebesar Rp94,49 miliar di tahun 2017. Ekspansi bisnis yang terus berjalan menyebabkan aset diperkirakan tumbuh menjadi Rp13,31 triliun yang ditopang oleh kenaikan liabilitas menjadi Rp4,37 triliun.

ACHIEVEMENT OF TARGETS IN 2016 AND PROJECTION FOR 2017

The challenges of Indonesia's economic slowdown in 2016 have an impact on the Company's performance, in addition to the challenges in the plantation industry, especially the national sugar industry. In line with the decline of national sugar production to 2.20 million tons in 2016 from 2.50 million tons in the previous year, the Company's sugar production also decreased to 377.49 thousand tons in 2016 from 430.75 thousand tons. On the other hand, stringent competition in the sugar industry also affected the Company's performance.

As a result, the realization of revenues and net profit was still below the set target. This also impacted on the achievement of equity of Rp9, 04 trillion or below the target in line with unachieved revenue target. Nevertheless, the Company was able to record total assets of Rp13.06 trillion or above the targeted Rp12.83 trillion. The higher asset realization was followed by above-target realization of liabilities amounting to Rp13.06 trillion aimed at supporting the growth of assets.

In line with the projected economic growth, the Company expects an improved revenue to reach Rp3.28 trillion, so that the Company will be able to book net profit of Rp94.49 billion in 2017. Continuing business expansion is expected to spur the assets growth to Rp13.31 trillion, supported by an increase in liabilities to Rp4.37 trillion.

Indikator	2016		Proyeksi 2017 (Rp miliar) *2017 Projection (Rp billion)*	*Indicators*
	Target (Rp miliar) *Target (Rp billion)*	Realisasi (Rp miliar) *Realization (Rp billion)*		
Pendapatan Usaha	3.150,41	2.260,37	3.279,14	*Revenue*
Laba Bersih	-107,96	-155,82,99	94,49	*Net Profit*
Total Aset	12.828,73	13.061,12	13.312,46	*Total Assets*
Total Liabilitas	3.723,36	4.017,863	4.367,67	*Total Liabilities*
Ekuitas	9.105,36	9,043,86	8.944,79	*Total Equity*
Total Investasi	1.514,18	241,72	1.445,90	Total Investment

KEBIJAKAN DEVIDEN

Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 14 Juni 2016, menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp53.573.907.690 atau Rp29.028 per lembar saham kepada seluruh pemegang saham tanggal 31 Desember 2015, yang telah dibayarkan pada tahun 2016.

Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 15 Mei 2015, menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp4.625.276.000 atau Rp4.625 per lembar saham kepada seluruh pemegang saham tanggal 31 Desember 2014, yang telah dibayarkan pada tahun 2015.

DIVIDEND POLICY

The General Shareholders' Meeting dated June 14, 2016, approved the distribution of cash dividends amounting to Rp53,573,907,690 or Rp29,028 per share to all shareholders as of December 31, 2015, which has been paid in 2016.

The General Shareholders' Meeting dated May 15, 2015, approved the distribution of cash dividends amounting to Rp4,625,276,000 or Rp4,625 per share to all shareholders as of December 31, 2014, which has been paid in 2015.

INFORMASI & FAKTA MATERIAL TERKAIT AKSI KORPORASI MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI , AKUISISI DAN/ ATAU RESTRUKTURISASI UTANG MODAL

Pada tahun 2016 tidak ada fakta material terkait aksi korporasi mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisi dan/ atau Restrukturisasi utang/modal.

MATERIAL INFORMATION & FACTS RELATED TO CORPORATE ACTIONS OF INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION AND/OR DEBT RESTRUCTURING / CAPITAL

In 2016 there was no material facts on the Corporate Actions of Investment, Expansion, Divestment, Acquisition and/or Debt/ Capital Restructuring

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Pada tahun 2016 tidak ada transaksi material yang mengandung benturan kepentingan yang dilakukan Perseroan.

INFORMATION REGARDING MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICT OF INTERESTS

In 2016 there was no material transaction containing conflict of interest conducted by the Company.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Sampai dengan 31 Desember 2016, Perseroan tidak memiliki informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

MATERIAL INFORMATION AND FACTS OCCURING AFTER DATE OF ACCOUNTANT REPORT

As of December 31, 2016, the Company did not have material information and facts occurring after the date of the accountant's report.

INFORMASI DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

INFORMATION ON THE TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Pihak-pihak berelasi *Related Parties*	Sifat hubungan *Type of Relationship*	Jenis transaksi *Nature of Transaction*
PT Perkebunan Nusantara I	Dikendalikan oleh/Controlled by: PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Pihak-pihak berelasi *Related Parties*	Sifat hubungan *Type of Relationship*	Jenis transaksi *Nature of Transaction*
PT Perkebunan Nusantara II	Dikendalikan oleh/Controlled by: PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara III	Pemegang saham Perseroan/ Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *The Company's Shareholder/Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara IV	Dikendalikan oleh/Controlled by: PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara V	Dikendalikan oleh/Controlled by: PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara VI	Dikendalikan oleh/Controlled by: PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara VII	Dikendalikan oleh/Controlled by: PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara VIII	Dikendalikan oleh/Controlled by: PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara IX	Dikendalikan oleh/Controlled by: PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara X	Dikendalikan oleh/Controlled by: PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara XI	Dikendalikan oleh/Controlled by: PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara XII	Dikendalikan oleh/Controlled by: PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*

Pihak-pihak berelasi *Related Parties*	Sifat hubungan *Type of Relationship*	Jenis transaksi *Nature of Transaction*
PT Perkebunan Nusantara XIII	Dikendalikan oleh/Controlled by: PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara XIV	Dikendalikan oleh/Controlled by: PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara XV	Dikendalikan oleh/Controlled by: PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	Investasi saham Investment in Shares	Jasa pemasaran dan investasi saham *Marketing services and shares investment*
PT Riset Perkebunan Nusantara	Investasi saham Investment in Shares	-
Perantara Makelar Tembakau Indonesia	Entitas Asosiasi Associate	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan giro dan deposito, bunga atas deposito, fasilitas kredit modal kerja dan investasi, dan kredit ketahanan pangan dan energi *Placement of current accounts and deposits, interest on deposits, credit facilities for working capital and investment, and food security and energy credit*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan giro dan deposito, bunga atas deposito, fasilitas kredit modal kerja dan investasi, dan kredit ketahanan pangan dan energi *Placement of current accounts and deposits, interest on deposits, credit facilities for working capital and investment, and food security and energy credit*
PT Bank Negara Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan giro dan deposito, bunga atas deposito, fasilitas kredit modal kerja dan investasi, dan kredit ketahanan pangan dan energi Placement of current accounts and deposits, interest on *deposits, credit facilities for working capital and investment, and food security and energy credit*

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Pihak-pihak berelasi *Related Parties*	Sifat hubungan *Type of Relationship*	Jenis transaksi *Nature of Transaction*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan giro dan deposito, bunga atas deposito, fasilitas kredit modal kerja dan investasi, dan kredit ketahanan pangan dan energi *Placement of current accounts and deposits, interest on deposits, credit facilities for working capital and investment, and food security and energy credit*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Biaya pengobatan *Medical Costs*
PT Asuransi Jiwa Tugu *Mandiri*	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Klaim asuransi kesehatan *Healthcare Insurance Claim*
PT Perseroan Listrik Negara	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Biaya pengobatan *Medical Costs*
PT Bank Syariah Mandiri	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Fasilitas kredit investasi *Investment credit facility*
PT Pupuk Kujang	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Penjualan karung *Sale of plastic bags*
Program Kemitraan Bina *Lingkungan*	Unit Perseroan *The Company's Unit*	Penyaluran dana modal kerja ke petani tebu *Distribution of working capital to sugarcane farmers*
Perusahaan Umum Badan *Usaha Logistik ("Perum BULOG")*	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Kerjasama importasi raw sugar, pengolahan raw sugar, distribusi dan penjualan gula *Cooperation in importation of raw sugar, processing of raw sugar, distribution and sale of sugar*
PT Taspen (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Penyaluran dana modal kerja ke petani tebu *Distribution of working capital to sugarcane farmers*
PT Asuransi Jiwasraya	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Penyaluran dana modal kerja ke petani tebu *Distribution of working capital to sugarcane farmers*

Pihak-pihak berelasi *Related Parties*	Sifat hubungan *Type of Relationship*	Jenis transaksi *Nature of Transaction*
Dana Pensiun Perkebunan	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Pengelola dana pensiun karyawan *Management of pensioun fund of the employees*
LPP (Lembaga Pendidikan *Perkebunan)*	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Pendidikan dan pelatihan *Education and Training*
Badan Penyelenggara *Jaminan Sosial*	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan *Heath and social security program*
PT Perusahaan Perdagangan *Indonesia (Persero)*	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia *Controlled by the Government of the Republic of Indonesia*	Penjualan gula *Sale of Sugar*

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN

Efektif tanggal 1 Januari 2016, Kelompok Usaha menerapkan standar baru, amandemen, penyesuaian dan interpretasi PSAK. Penerapan standar baru, amandemen dan interpretasi tidak berdampak secara substansial atas kebijakan akuntansi Kelompok Usaha dan tidak berdampak material terhadap nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

1. Amandemen PSAK No. 4: Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri. Amandemen ini memperkenankan penggunaan metode ekuitas sebagai salah satu metode pencatatan investasi pada entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi dalam laporan keuangan tersendiri entitas tersebut.
2. Amandemen PSAK No. 15: Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi. Amandemen ini memberikan klarifikasi tentang pengecualian konsolidasi untuk entitas investasi ketika kriteria tertentu terpenuhi.

CHANGES TO ACCOUNTING POLICIES AND THEIR AFFECTS ON FINANCIAL PERFORMANCE

On January 1, 2016, Group adopted revised standards, amendments, adjustments and interpretations to PSAK. The adoption of these revised standards, amendments and interpretations did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the financial statements.

1. Amendments to PSAK No. 4: Separate Financial Statements of Equity Method in Separate Financial Statements. The amendments allow the use of the equity method as a method of recording the investment in subsidiaries, joint ventures and associates in the separate financial statements of the entity.
2. Amendments to PSAK No. 15: Investments in Associates and Joint Ventures on Investment Entities: The Application of Consolidation Exception. These amendments provide clarification on consolidation exception for investment entities when certain criteria are met.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

3. Amandemen PSAK No. 16: Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi. Amandemen ini memberikan tambahan penjelasan tentang indikasi perkiraan keusangan teknis atau komersial suatu aset. Amandemen ini juga mengklarifikasi bahwa penggunaan metode penyusutan yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat.
4. Amandemen PSAK No. 19: Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi. Amandemen ini memberikan klarifikasi tentang anggapan bahwa pendapatan adalah dasar yang tidak tepat dalam mengukur pemakaian manfaat ekonomi aset takberwujud dapat dibantah dalam keadaan terbatas tertentu.
5. Amandemen PSAK No. 24: Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja. Amandemen ini menyederhanakan akuntansi untuk kontribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, misalnya iuran pekerja yang dihitung berdasarkan persentase tetap dari gaji.
6. Amandemen PSAK No. 65: Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi. Amandemen ini mengklarifikasi tentang pengecualian konsolidasi untuk entitas investasi ketika kriteria tertentu terpenuhi.
7. Amandemen PSAK No. 67: Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi. Amandemen ini mengklarifikasi tentang pengecualian konsolidasi untuk entitas investasi ketika criteria tertentu terpenuhi.
8. PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015): Segmen Operasi. PSAK ini menambahkan pengungkapan deskripsi singkat segmen operasi yang telah digabungkan dan indikator ekonomik memiliki karakteristik yang serupa.
9. PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015): Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. PSAK ini menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi dan mengklarifikasi pengungkapan imbalan yang dibayarkan oleh entitas manajemen.
10. PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015): Aset Tetap. PSAK ini memberikan klarifikasi terkait model revaluasi, bahwa ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.

3. Amendments to PSAK No. 16: Property, Plant and Equipment on Clarification of the Accepted Depreciation and Amortization Methodology. The amendments provide additional explanation of the approximate indication of the technical or commercial obsolescence of an asset. The amendments also clarify that use of the depreciation method based on revenue is not appropriate.
4. Amendments to PSAK No. 19: Intangible Assets on Clarification of the Accepted Depreciation and Amortization Methodology. The amendments provide clarification on the presumption that revenue is not appropriate reflects the consumption of the economic benefits embodied in the intangible assets is rebutted in certain limited circumstances.
5. Amendments to PSAK No. 24: Employee Benefits on a Defined Benefit Plans: Contribution from Employees. The amendments simplify the accounting for the contribution from employees or third parties that independent on the number of years of service, for example contributions from employees that are fixed percentage of the employee's salary.
6. Amendments to PSAK No. 65: Consolidated Financial Statements on Investment Entities: Application Consolidation Exceptions. The amendments clarify the consolidation exceptions for investment entities when certain criteria are met.
7. Amendments to PSAK No. 67: Disclosure of Interests in Other Entities on Investment Entities: Application of Consolidation Exceptions. The amendments clarify the consolidation exceptions for investment entities when certain criteria are met.
8. PSAK No. 5 (Adjustment 2015): Operating Segments. The PSAK adds the disclosure of brief description on aggregated operating segments and indicators for similar economic characteristics.
9. PSAK No. 7 (Adjustment 2015): Related Party Disclosures. The PSAK adds requirements for related parties and clarify the disclosure of compensation paid by the entity management.
10. PSAK No. 16 (Adjustment 2015): Plant, Property and Equipment. The PSAK provides clarification of the revaluation model, that when an entity uses the revaluation model, the carrying amount of the asset is restated on revalued amount.

11. PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015): Aset Takberwujud. PSAK ini memberikan klarifikasi terkait model revaluasi, bahwa ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat asset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.
12. PSAK No. 22 (Penyesuaian 2015): Kombinasi Bisnis. PSAK ini mengklarifikasi ruang lingkup dan kewajiban membayar imbalan kontinjensi yang memenuhi definisi instrumen keuangan diakui sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas.
13. PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan. PSAK ini memberikan koreksi editorial tentang keterbatasan penerapan retrospektif.
14. PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015): Pengukuran Nilai Wajar. PSAK ini mengklarifikasi bahwa pengecualian portofolio, yang memperkenankan entitas mengukur nilai wajar kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan secara neto, diterapkan pada seluruh kontrak (termasuk kontrak non-keuangan) dalam ruang lingkup PSAK No. 55.
15. PSAK No. 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak. PSAK 70 memberikan opsi dalam akuntasi untuk entitas yang memilih untuk menerapkan pengampunan pajak berdasarkan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak ("SHPPP") untuk memilih menggunakan PSAK No. 25 (pendekatan umum), atau menggunakan ketentuan khusus dalam paragraf 10 - 23 dari PSAK No. 70 (pendekatan opsional). Aset pengampunan pajak harus diukur pada jumlah yang dilaporkan dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak ("SKPP") (sebagai biaya perolehan). Kewajiban lain terkait pengampunan pajak harus diukur pada jumlah kas atau setara kas yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban kontraktual yang terkait dengan akuisisi aset pengampunan pajak.
16. ISAK No. 30: Pungutan. ISAK ini merupakan interpretasi atas PSAK No. 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi yang mengklarifikasi akuntansi liabilitas untuk membayar pungutan, selain pajak penghasilan yang berada dalam ruang lingkup PSAK No. 46: Pajak Penghasilan serta denda lain atas pelanggaran perundang-undangan, kepada Pemerintah.

Perubahan PSAK tersebut tidak memiliki dampak terhadap Perseroan.

11. PSAK No. 19 (Adjustment 2015): Intangible Assets. The PSAK provides clarification of the revaluation model, that when an entity uses the revaluation model, the carrying amount of the asset is restated on revalued amount.
12. PSAK No. 22 (Adjustment 2015): Business Combinations. The PSAK clarifies the scope and the obligation to pay contingent consideration that meets the definition of financial instruments are recognized as financial liability or as equity.
13. PSAK No. 25 (Adjustment 2015): Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. The PSAK provides editorial revision on the limitations of retrospective application.
14. PSAK No. 68 (Adjustment 2015): Fair Value Measurement. The PSAK clarifies that the portfolio exception, which permits an entity to measure the fair value of a group of financial assets and financial liabilities on a net basis, applied to all contracts (including non-financial contracts) within the scope of PSAK No. 55.
15. PSAK No. 70: Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities. PSAK 70 provides options in accounting for an entity that applied for the Tax Amnesty Law based on its Declaration Letter for Tax Amnesty (Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak or "SHPPP") to apply PSAK No. 25 (General Approach); or to apply the specific provisions in paragraphs 10 - 23 of PSAK No. 70 (Optional Approach). The tax amnesty assets shall be measured at the amount reported in the "Surat Keterangan Pengampunan Pajak" ("SKPP") (as deemed cost). Any related tax amnesty liability shall be measured at the amount of cash or cash equivalents that will settle the contractual obligation related to the acquisition of the tax amnesty assets.
16. ISAK No. 30: Levy. The ISAK is an interpretation of PSAK No. 57: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets which clarifies the accounting for liability to pay levy, other than income taxes within the scope of PSAK No. 46: Income Tax and other penalties on violations of law, to the Government.

The above changes to PSAK have no significant impact on the Company.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

PERUBAHAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERDAMPAK KEPADA KINERJA PERUSAHAAN

Pada tahun 2016 tidak ada Perubahan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berdampak Kepada Kinerja Perusahaan

AMENDMENTS TO LAWS AND REGULATIONS SIGNIFICANTLY AFFECTING THE COMPANY'S PERFORMANCE

In 2016, there was no amendment to laws and regulations significantly affecting the Company's Performance.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

REALIZATION ON THE USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

Jenis Penawaran Umum *Type of Public Offering*	Tanggal Efektif *Effective Date*	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum (Rp juta) *Amount of Proceeds from Public Offering (Rp million)*			Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus (Rp juta) *Realization of Proceeds based on Prospectus (Rp million)*					Sisa Dana Hasil Penawaran Umum *Remaining Balance of Proceeds from Public Offering*
		Jumlah Hasil Penawaran Umum *Total Proceeds*	Biaya Penawaran Umum *Public Offering Cost*	Hasil Bersih *Net Proceeds*	Ekspansi *Expansion*	Refinancing	Divestasi *Divestment*	Lain-lain *Others*	Total	
Penawaran Umum Obligasi I PTPN X Tahun 2013 jangka Waktu 5 Tahun dengan tingkat suku bunga tetap *Public Offering of PTPN X Bonds I Year 2013 for 5-year tenor with fixed interest rate*	05 Juli 2013	700.000	4.753	695.247	-	274.836	-	420.411	695.247	-

PROSPEK USAHA DAN STRATEGI PERSEROAN

Segmen usaha gula masih akan menjadi pilar utama pendapatan Perseroan. Akan tetapi Perseroan juga mengembangkan produk-produk non-gula, terutama

BUSINESS PROSPECTS AND STRATEGIES OF THE COMPANY

The sugar business segment will remain the main pillar of the Company's revenue. However, the Company also develops non-sugar products, especially derivative

produk turunan tebu yang masih berada dalam satu mata rantai proses produksi gula. Pertumbuhan populasi yang diikuti dengan pertumbuhan konsumsi menjadi motor penggerak pertimbuhan industri gula di Indonesia. Selain dari konsumsi rumah tangga, prospek segmen usaha gula dari pasar domestik juga didorong oleh pertumbuhan sektor makanan dan minuman kemasan yang bertumbuh pesat.

Untuk mengembangkan bisnis Perseroan kedepan terdapat beberapa strategi yang akan ditempuh yakni:

1. **Pengembangan Produk**, yaitu dengan meningkatkan penjualan dengan memperbaiki produk atau jasa sekarang atau dengan mengembangkan produk atau jasa baru.
2. **Pengembangan Pasar**, yaitu dengan memperkenalkan produk atau jasa lama kedaerah geografis yang baru.
3. **Concentric Diversification**, yaitu dengan menambah produk atau jasa baru yang hampir sama atau mendekati *core business* perusahaan.
4. **Kombinasi berbagai strategi**, yaitu dengan menggabungkan berbagai macam strategi di atas dengan mengacu pada strategi EDO (Efisiensi, Diversifikasi dan Optimalisasi).

Terkait dengan strategi EDO, tujuan penerapan strategi ini adalah untuk menekan biaya produksi per unit dan menciptakan *value added* terhadap produk samping terutama tetes, dan yang tidak kalah penting adalah *supply energy* (*co-generation*). Melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang didapat pada tahun 2015 PTPN X melanjutkan program antara lain ; Meningkatkan kapasitas giling pabrik gula PTPN X dari 42.200 TCD menjadi 45.250 TCD dan pengembangan usaha hilirisasi yakni : *Co-Generation* sebesar 50 MW dan pabrik Bioethanol dari 30.000 KL menjadi 60.000 KL. Menekan biaya produksi per unit sangat diperlukan dalam upaya peningkatan nilai perusahaan melalui peningkatan laba. Peningkatan laba perusahaan dari pendapatan penjualan produk utama perusahaan (gula, tetes dan tembakau) sulit dilakukan karena keterbatasan perusahaan dalam penetapan harga yang terbentuk dari keseimbangan *supply and demand*. Hal itu yang menyebabkan penekanan biaya produksi mutlak diperlukan dengan peningkatan produksi dan optimalisasi biaya dalam upaya meningkatkan laba.

products of sugar cane that are still in one chainof sugar production process. Population growth followed by consumption growth has become the motor that drives sugar industry in Indonesia. In addition to household consumption, the prospect of the sugar business segment from the domestic market is also driven by the growth of the fast growing packaged food and soft drinks sector.

To develop the Company's business in the future, there are several strategies that will be taken:

1. **Product Development**, by increasing sales through current products or services improvement or new products or services development.
2. **Market development**, by introducing old products or services to new geographic areas.
3. **Concentric Diversification**, by adding new products or services that are almost or nearly the same with the company's core business.
4. **A combination of strategies**, by combining the above different strategies by referring to EDO (Efficiency, Diversification and Optimization) strategy.

With regard to the EDO strategy, the purpose of this strategy is to reduce production cost per unit and create value added to the side product especially molasses, as well as energy supply (co-generation). Through the State Capital Investment (PMN) obtained in 2015, PTPN X continued the following programs: to increase milling capacity of PTPN X Sugar Factories from 42,200 TCD to 45,250 TCD and develop of downstream business ie: Co-Generation of 50 MW and Bioethanol plant from 30,000 KL to 60,000 KL. Reduction of production costs per unit is necessary in an effort to increase the value of the company through increased profit. The increase in the Company's profit from the sales revenue of the Company's main products (sugar, molasses and tobacco) is difficult to be realized due the constraints in price determination formed from the supply and demand balance. This is production costs reduction is absolutely necessary with increased production and cost optimization in an effort to increase profit.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Penjelasan lebih rinci terkait dengan strategi EDO adalah sebagai berikut:

1. **Efisiensi**
   Dilakukan langkah-langkah efisiensi di sektor:
   a. *On Farm* meliputi : menekan biaya pokok produksi di kebun melalui intensifikasi (mekanisasi, *drip irrigation*, perbaikan kualitas bibit) , ekstensifikasi lahan dan *regrouping*
   b. *Off farm* meliputi : *reduce energy and fuel consumption*, *remove bottleneck* (dalam proses), *reduce maintenance cost, reduce sugar losses*.
   c. Operasional : membentuk cluster PG (menggabungkan beberapa PG dalam satu kawasan).

2. **Diversifikasi**
   Dalam upaya meningkatkan nilai tambah dari produk berbasis tebu, maka produk samping berupa *molasses* dan bagas (ampas) dilakukan diversifikasi produk melalui pembangunan:
   a. Mengembangkan Pabrik Bioethanol dan produk turunan lainnya (CO2, Methana/Buthana, POC) Bioethanol adalah sumber energi terbarukan harapan disaat produksi minyak bumi yang semakin langka dan mahal. Diharapkan ke depan, bioethanol bisa menggantikan minyak bumi secara bertahap.
   b. *Co Generation* dengan menggunakan kelebihan bahan baku ampas. Energi yang dihasilkan dari tanaman tebu cukup melimpah karena efisiensi *processing* yang terus meningkat maka diperoleh *excess power* dari sistem produksi gula yang dikonversi menjadi listrik yang dapat dijual ke PLN. Kedepan untuk meningkatkan *excess power* yang lebih tinggi akan dilakukan investasi bertahap terhadap *boiler* yang ada (*existing*) dari tekanan menengah (20 bar) menjadi bertekanan tinggi (lebih dari 80 bar). Sehingga hal ini akan menjadi peluang dalam pengembangan bisnis ke depan.

3. **Optimalisasi**
   Optimalisasi meliputi kegiatan *Off Farm* dan *On Farm*. *Off Farm* dengan cara:
   Utilisasi kapasitas giling terpasang yang dilakukan dengan :
   a. Penekanan jam berhenti,
   b. Bagasse saving,

Detailed explanation on the EDO strategy is as follows:

1. Efficiency
   By conducting efficiency measures in the following sectors:
   a. On Farm includes: reducing the cost of production in plantations through intensification (mechanization, drip irrigation, improved seed quality), land extensification and regrouping
   b. Off farm includes: reducing energy and fuel consumption, removing bottleneck (in process), reducing maintenance cost, reducing sugar losses.
   c. Operational: forming a sugar factory cluster (combining multiple sugar factories in one region).

2. Diversification
   In an attempt to increase the added value of cane-based products, the side products of molasses and dregs are diversified through the development of:

   a. Bioethanol and other derivative products (CO2, Methane / Buthana, POC) Factory. Bioethanol is a renewable energy source, a hope when petroleum production becomes increasingly scarce and expensive. It is expected that in the future, bioethanol can replace petroleum gradually.

   b. Co Generation by using excess of raw material dregs. The energy generated from the sugarcane is quite abundant and due to the improved processing efficiency, the excess power from the sugar production system is converted into electricity that can be sold to PLN. In the future, to increase the higher excess power, the Company will invest in the existing boiler from the current medium pressure (20 bars) to high pressure (more than 80 bars). This will be an opportunity for future business development.

3. Optimization
   Optimization includes Off Farm and On Farm activities. Off Farm by doing the following:
   Utilization of the installed milling capacity by:

   a. Stopped-clock compression,
   b. Bagasse saving,

c. Meningkatkan *Boiling House Recovery* (BHR),
d. Sinkronisasi kapasitas peralatan/stasiun serta *inhouse* keeping pabrik.

On Farm dengan cara :

1. Mekanisasi
   Penggunaan mekanisasi untuk mengoptimalkan waktu tanam, kecepatan penyelesaian pekerjaan serta penggunaan *harvester* untuk kelancaran dan peningkatan pasok tebu ke pabrik.
2. Drip irigasi
   Untuk meningkatkan produktifitas untuk lahan-lahan yang semakin terbatas
   a. Perbaikan kualitas bibit
   b. Ekstensifikasi lahan
   c. *Regrouping*

Dengan penerapan strategi diatas diharapkan kinerja perseroan kedepannnya akan meningkat, fokus pada *cost reduction* & *waste elimination*, inovasi produk dan mencari sumber pendapatan lain yang berasal dari produk turunan tebu. Sehingga cita-cita perseroan untuk menjadi agroindustri berbahan baku tebu bisa terealisasi.

c. Improve Boiling House Recovery (BHR),
d. Synchronization of equipment/station capacities and factory inhouse keeping.

On Farm by doing the following

1. Mechanization
   The use of mechanization to optimize planting time and speed-up work completion; and the use of harvester to ensure the smoothness and improvement of sugar cane supply to factories.
2. Drip irrigation
   To increase productivity for increasingly limited lands

   a. Improved seed quality
   b. Land extensification
   c. Regrouping

By implementing the above strategies, the Company's performance is expected to improve, focus on cost reduction and waste elimination, product innovation, and to seek other sources of income derived from sugar cane derivative products. These all will enable the Company to realize the goal of becoming an Agroindustry of products made from sugar cane.

Fungsi Penunjang Bisnis

Business Supporting Functions

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi Informasi menjadi salah satu fondasi bagi proses bisnis yang efektif, efisien dan akuntabel.

Management of Human Resource (HR) and Information Technology becomes one of the foundations for an effective, efficient and accountable business process.

Sumber Daya Manusia
Human Resources

Sebagai entitas usaha yang bergerak di bidang perkebunan, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting yang membutuhkan pengelolaan yang tepat. Perseroan memandang karyawan sebagai mitra strategis yang memiliki kemampuan pembelajaran dan peningkatan kompetensi secara mandiri. Dengan kemampuan seperti ini, pengelolaan kompetensi yang baik akan memberikan motivasi yang tinggi, yang kemudian akan mendorong peningkatkan produktivitas yang tinggi dan menciptakan kontribusi positif bagi operasional dan bisnis Perseroan.

As a business entity in the plantation sector, Human Resources constitute essential asset that requires a precise management. The Company views the employees as strategic partners who have the ability to learn and build their own competences. With this ability, a proper competence management will increase motivation and spur productivity and will also positively contribute to the Company's operations and business.

DEMOGRAFI DAN KOMPOSISI SDM

Hingga 31 Desember 2016, Perseroan mengaryakan 9.885 orang, menurun dibandingkan tahun 2015, dimana pada tahun 2015 Perseroan mengaryakan 10.821 orang. Adanya penurunan ini sejalan dengan kebijakan efisiensi dan optimalisasi SDM, melalui penataan karyawan tetap sesuai rincian pekerjaan yang ada. Berikut data demografi dan komposisi SDM yang dimiliki Perseroan.

HUMAN RESOURCES DEMOGRAPHY AND COMPOSITION

As of December 2016, the Company had 9,885 employees, a decrease compared to the Company's employees in 2015 totaling 10,821 persons. This decrease was in line with the Company's HR efficiency and optimization policy through the structuring of permanent employees according to the details of existing works. Information on the Company's Human Resources Demography and Composition is as follows.

Perkembangan Jumlah Karyawan Tahun 2012-2016
Growth of Total Employees 2012-2016

Jumlah dan Komposisi Pekerja Berdasarkan Level Organisasi
(orang)

Employees Headcount by Organizational Level
(persons)

Jabatan *Position*	2016			2015		
	L *M*	P *W*	Jumlah *Total*	L *M*	P *W*	Jumlah *Total*
Dewan Komisaris Board of Commissioners	4	-	4	5	-	5
Direksi Board of Directors	4	-	4	5	-	5
Pejabat Puncak Senior Executives	29	1	30	31	-	31
Kaur KD/Kabag UUS Heads of Departments	109	3	112	110	6	116
Karyawan Tetap Permanent Employees	2.836	246	3.082	3.015	268	3.283
Karyawan Tidak Tetap Contract Based Employees	6.494	159	6.653	7.170	211	7.381
Jumlah *Total*	9.476	409	9.885	10.336	485	10.821

Jumlah dan Komposisi Pekerja Berdasarkan Pendidikan
(orang)

Employees Headcount by Organizational Level
(persons)

Pendidikan	2016			2015		
	L *M*	P *W*	Jumlah *Total*	L *M*	P *W*	Jumlah *Total*
S3 *Doctorate Degree*	1	-	1	1	-	1
S2 *Master's Degree*	51	11	62	30	5	35
S1 *Bachelor's degree*	804	124	928	708	139	847
Akademi (D3/D2/LPP) *Academic (D3/D2/LPP)*	106	24	130	464	20	484
SLTA *Senior Highschool*	6.655	234	6.889	7.276	280	7.556
SLTP *Junior Highschool*	1.322	8	1.330	1.384	32	1.416
SD *Elementary School*	537	8	545	473	9	482
Jumlah *Total*	9.476	409	9.885	10.336	485	10.821

Sumber Daya Manusia
Human Resources

Jumlah dan Komposisi Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian (orang)

Employees Headcount by Emploment Status
(persons)

Status Kepegawaian *Employment Status*	2016			2015		
	L *M*	P *W*	Jumlah *Total*	L *M*	P *W*	Jumlah *Total*
Dewan Komisaris dan Direksi *Board of Commissioner & Board of Directors*	8	-	8	10	-	10
Golongan III-IV *Level III-IV*	511	50	561	548	52	600
Golongan I-II *Level I-II*	2.463	200	2.663	2.608	222	2.830
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) / *Outsource* *Contract-Based Employees / Outsourced*	6.494	159	6.653	7.170	211	7.381
Jumlah *Total*	9.476	409	9.885	10.336	485	10.821

Jumlah dan Komposisi Pekerja Berdasarkan Usia (orang)

Employee Headcount by Age
(persons)

Usia *Age*	2016			2015		
	L *M*	P *W*	Jumlah *Total*	L *M*	P *W*	Jumlah *Total*
≤ 30	1.450	77	1.527	1.359	76	1.435
31-40	3.430	108	3.538	3.822	118	3.940
41-50	3.351	150	3.501	3.805	187	3.992
51-55	1.199	74	1.273	1.291	102	1.393
≥ 56	46	-	46	59	2	61
Jumlah *Total*	9.476	409	9.885	10.336	485	10.821

Jumlah dan Komposisi Pekerja Berdasarkan Jenis Kelamin (orang)

Employees Headcount by Gender
(persons)

Jenis Kelamin *Sex*	2016	2015
Laki-laki *Male*	9.476	10.336
Perempuan *Female*	409	485
Jumlah	9.885	10.821

Sumber Daya Manusia
Human Resources

PENGEMBANGAN SISTEM SDM DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA

Program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perseroan disusun dan direncanakan dengan tujuan untuk menunjang operasional organisasi terutama dari sisi kapasitas pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam pelaksanaan tugas. Program-program Pengembangan SDM dilaksanakan melalui seminar, *workshop*, *inhouse training* oleh Direksi dan unit usaha, program sertifikasi, studi banding, serta kursus jabatan. Setiap bagian dari lini operasional Perseroan melakukan analisa kebutuhan pelatihan, yang kemudian dikombinasikan dengan hasil *assessment* akan menentukan jenis dan frekuensi program pengembangan SDM yang akan dilakukan Perseroan.

Program pengembangan SDM melalui seminar diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan karyawan, sedangkan penyelenggaraan *workshop* umumnya dilakukan untuk memenuhi dan meningkatkan kompetensi baik dari sisi pengetahuan dan ketrampilan, dimana kegiatan dalam *workshop* selalu disertai dengan praktek dan aplikasi materi. Diharapkan, usai pelatihan, peserta dapat langsung mengaplikasikan hasil pendidikannya. Selain itu, untuk memastikan bahwa karyawan memiliki kemampuan khusus atau spesialisasi, karyawan diikutsertakan dalam program sertifikasi profesi khusus sehingga selain menjadi ahli atau spesialis, hal ini juga dapat menjadi bekal Perseroan untuk bersaing secara kualitas karyawan dengan perusahaan lain yang sejenis.

Selain memiliki fungsi dan tanggung jawab dalam peningkatan kapasitas pengetahuan dan kompetensi karyawan dalam bidang tugasnya, pengembangan SDM di Perseroan juga memiliki fungsi strategis, yaitu fungsi *succession planning* untuk menyiapkan suksesor atau kader-kader potensial yang akan menduduki suatu jabatan tertentu. Kader penerus setiap jabatan merupakan bentuk jaminan keberlangsungan proses organisasi dalam menghadapi persaingan bisnis. Proses pembentukan kader dilakukan dengan berbagai metode baik melalui seleksi dan rekrutmen, *assessment*, *project assignment*, maupun presentasi dan wawancara langsung dengan Direksi.

HUMAN RESOURCES SYSTEM DEVELOPMENT AND HUMAN RECOURCES TRAINING

The Company's Human Resources (HR) development program is organized and planned with the objective to support the organization's operational capacity especially in terms of knowledge and skills of employees in conducting their tasks. HR Development program is implemented through seminars, workshops, in-house training by the Board of Directors and the business units, certification programs, comparative study, as well as office courses. Each section of the Company's operation line analyzes training requirements, which is then combined with assessment results to determine the types and frequencies of HR development program that should be conducted by the Company.

HR development program is organized through seminars aimed at enhancing employees' knowledge; while workshops are generally conducted to develop and enhance the competence both in terms of knowledge and skills by complementing the materials with practices. It is expected that, after the training, participants can directly apply the results of trainings. In addition, to ensure that employees have special skills or specialties, employees must participate in specific professional certification programs. This will not only make them expert or specialist, but also provide the Company with competitive advantage in terms of qualified employees with other similar companies.

The Company's HR management is responsible for not only improving employees' knowledge and competence in their respective sectors, but also for taking on strategic functions, such as to make succession planning to prepare a successor or potential cadre to occupy a certain position. The successor candidate for every position is an assurance of the organization's sustainability in facing the business competition. The process of candidates appointment is carried out by various methods, such as through selection and recruitment, assessment, project assignment, as well as presentations and interviews with the Board of Directors.

Sumber Daya Manusia
Human Resources

Dengan target minimal tersedia 2 (dua) orang calon suksesor untuk tiap jabatan, Perseroan memiliki harapan besar agar proses regenerasi dan keberlangsungan Perseroan akan dapat terus terjaga dan mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis. Perseroan memiliki perhatian khusus dalam program Pengembangan SDM yang lebih intensif, sehingga di dalam *roadmap*-nya, Perseroan mencanangkan untuk dapat memiliki sebuah akademi yang nantinya akan diberi nama *PTPN X Academy*.

Dalam mencapai tujuan tersebut, tentu Perseroan akan berhadapan dengan berbagai rintangan dan kendala. Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan program-program pengembangan SDM adalah cukup banyaknya nama jabatan, jarak antar unit usaha yang cukup berjauhan, belum adanya standar baku dalam proses seleksi dan rekrutmen, bahkan proses pengadaan atau pengajuan program-program pengembangan terutama pelaksanaan *inhouse training*.

Solusi untuk menghadapi kendala-kendala tersebut adalah dengan menyusun standar kompetensi dan kebutuhan kompetensi jabatan untuk semua nama jabatan yang ada di Perseroan, sehingga diharapkan ada keseragaman kompetensi antar unit usaha dan dapat dilakukan tanpa perlu melakukan penjelasan melalui tatap muka. Selain itu untuk menjamin kualitas proses yang standar, sejak tahun 2014 beberapa proses di dalam urusan Pengembangan SDM dimasukkan dalam sistem ISO 9001 : 2008, sehingga setiap tahapan proses akan menjadi standar baku pelaksanaan kegiatan program-program pengembangan SDM di Perseroan.

With a minimum target of two available, potential successors for each position, the Company hopes to sustain regeneration process and business operations, and to face the stringent business competition. Having a special interest in a more intensive HR development program, the Company has set a roadmap containing the Company's plan to build an academy named PTPN X Academy.

In achieving the objective, the Company will definitely face many obstacles and constraints. The obstacles faced by the Company in the course of preparing the HR development program are, among others: a reasonable number of positions, the distance between one business unit to another is quite far, there are no standards in the selection and recruitment process, even in the procurement process or submission of development programs, especially in-house training.

The solutions to address these constraints is by setting up competence standards and job competence requirements for all existing positions in the Company, so that all business units share the same competencies without face to face explanation. Moreover, to assure the standard process quality, since year 2014 some of the processes in HR development have been included in the ISO 9001: 2008 System, so that each stage of process will be the basic standard for implementing HR development programs in the Company.

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2016

Competence development based on position level in 2016

Level Jabatan *Level of Office*	Jenis Pelatihan *Types of Training*	Tujuan Pelatihan *Training Purpose*
Level Karyawan Pimpinan *Team Leader Level*	Pelatihan Kompetensi *Competence Training*	Mengembangkan seseorang mencapai kompetensi *Develop someone to achieve competence*
Level Karyawan Pimpinan *Team Leader Level*	Pelatihan Manajerial *Managerial Training*	Mempersiapkan seseorang untuk satu level diatasnya *Prepare someone for his upper level*
Seluruh Level Karyawan tergantung Sertifikasi yang diikuti *All Employment Levels depending on the certification attended*	Pelatihan Sertifikasi *Certification Training*	Mengembangkan kemampuan khusus seseorang *Develop someone's special capability*

Kepesertaan Pengembangan Kompetensi Tahun 2016 **Competence development based on position level in 2016**

Jenis Pengembangan Kompetensi *Type of Competence Development*	Jumlah Kepesertaan *Total Participants*
Seminar & Workshop	327
Sertifikasi *Certification*	32
Studi Banding *Comparative Study*	198
Kursus Jabatan	31
Diklat Dewan Komisaris dan Direksi *BOC and BOD Education Training*	3
Assessment	169
Program Luar Negeri *Overseas Programs*	34
Jumlah *Total*	794

Perbandingan Jumlah Jam Pelatihan 2015-2016
Comparison of Training Hours 2015 - 2016

Perbandingan Rata-rata Jumlah Jam Pelatihan per Karyawan 2015-2016
Comparison of Average Training Hours per Employee 2015-2016

Sumber Daya Manusia
Human Resources

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Untuk mengembangkan kompetensi SDM, Perseroan memberikan investasi biaya di tahun 2016 sebesar Rp13,17 miliar. Jumlah ini meningkat dari investasi biaya pengembangan kompetensi tahun 2015 yang sebesar Rp10,58 miliar. Berikut disampaikan detil biaya pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Perseroan.

COMPETENCE DEVELOPMENT COST

To develop human resource competence, the Company incurred investment cost of Rp13.17 billion in 2016. This amount increased from the investment cost for competence development in 2015 amounting to Rp10.58 billion. The following is details of the competency development cost incurred by the Company.

Investasi PTPN X atas Pengembangan Kompetensi Tahun 2016

PTPN X Investment for Competence Development in 2016

Uraian *Description*	Jumlah *Total* *(Rp)*
Diklat Sertifikasi *Certification Education Training*	935.018.658
Diklat Kompentensi *Competence Education Training*	3.871.665.789
Studi Banding Luar Negeri *Overseas Comparative Study*	2.288.006.522
Studi Banding Dalam Negeri *Overseas Comparative Study*	465.350.000
Inhouse Training	5.611.646.496
Jumlah *Total*	13.171.687.465

Perbandingan Investasi PTPN X atas Pengembangan Kompetensi Tahun 2015-2016

Comparison of PTPN X Competency Development Investment 2015-2016

	2016 *(Rp)*	2015 *(Rp)*	Kenaikan (Penurunan) *%*
Biaya Pengembangan Kompetensi *Competence Development Cost*	13.171.687.465	10.578.016.969	24,52%

Teknologi Informasi
Information Technology

Teknologi Informasi (TI) berperan penting dalam mengintegrasikan proses operasional dan keuangan ke dalam sebuah sistem yang memiliki nilai akuntabilitas. Penerapan sistem TI dalam proses bisnis membantu Perseroan menempatkan setiap langkah proses yang terdokumentasi secara sistemik, yang kemudian akan memberikan rekomendasi kepada manajemen dalam proses pengambilan keputusan.

Information Technology (IT) plays an important role in integrating the operational and financial processes into a system that has accountability value. Implementation of IT system in business processes supports the Company in organizing every step of process that systematically documented, which will then provide the Management with recommendations for decision-making processes.

VISI DAN MISI TEKNOLOGI INFORMASI PERSEROAN

Penerapan dan pengembangan TI Perseroan memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

THE COMPANY'S IT VISION AND MISSION

Vision and Mission of IT Application and Development in the Company are as follows:

Visi Menjadikan teknologi informasi sebagai komponen utama dalam mendukung strategi bisnis dan transformasi perusahaan guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Perusahaan AgroIndustri Yang Terkemuka dan Berwawasan Lingkungan.	***Vision*** *Making information technology as a key component to supporting the Company's business strategy and transformation in order to support the achievement of the Company's Vision and Mission to become a leading agro-industrial company that environmentally sound.*
Misi • Menyediakan Sistem Teknologi Informasi yang mendukung bisnis dan efisiensi perusahaan secara langsung. • Menyediakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang menjamin kemudahan dan kelancaran pengguna sistem TI • Terlibat secara aktif dalam lingkup nasional dalam hal peningkatan produktivitas Industri Gula dan Tembakau.	**Mission** • Provide Information Technology System that provide direct supports to the Company's business and efficiency. • Provide Information Technology Facility and Infrastructure that ensure the ease of IT system users. • Actively involve in the national scope in increasing the productivity of the Tobacco and Sugar Industry.
Tagline Memberikan layanan teknologi informasi dengan *tag line* "PASTI BISA", yaitu: **P**roven : Memberikan layanan sesuai *Best Practice* Dunia yang telah teruji **A**ccountable : Memberikan layanan yang memiliki akuntabilitas dan mendukung akuntabilitas perusahaan **S**implify : Menyederhanakan proses bisnis demi peningkatan kinerja dan efisiensi perusahaan **T**ransparant : Mendukung proses bisnis yang transparan. **I**nformative : Memberikan layanan teknologi yang mudah dimengerti dan memudahkan pengguna **B**est : Memberikan pelayanan prima dan terbaik dalam penyajian dan kualitas produk TI **I**nnovation : Selalu berinovasi dalam mendukung perkembangan perusahaan **S**ustainable : Menyediakan layanan Teknologi Informasi yang berkelanjutan. **A**ccelerating : Mendukung percepatan proses bisnis dan transformasi perusahaan.	**Tagline** Provide information technology services with the tag line "PASTI BISA", namely: **P**roven : Delivering services in accordance with the International Best Practice **A**ccountable : Providing accountable services that supports the Company's accountability **S**implify : Simplifying business processes in order to improve the Company's performance and efficiency . **T**ransparent : Supporting transparent business processes. **I**nformative : Providing technology services that can be easily understood and operated by users **B**est : Providing the best and excellent service in the presentation and quality of IT products **I**nnovation : Always innovating to support the Company's development **S**ustainable : Providing ongoing information technology services. **A**ccelerating : Supporting the acceleration of business processes and the Company's transformation .

Teknologi Informasi
Information Technology

IMPLEMENTASI SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI

Di tahun 2014, Perseroan mengembangkan TI melalui Sistem Pengelolaan Sumber Daya Perusahaan Terintegrasi atau yang lebih dikenal dengan istilah *Enterprise Resource Planning* (ERP). Kebutuhan tersebut muncul karena realitas terhadap perkembangan dan tantangan bisnis serta semangat peningkatan layanan kepada pemangku kepentingan yang telah menjadi fokus utama dalam bisnis Perseroan.

Perseroan menegaskan langkah tersebut dengan melakukan *Kick Off* Implementasi ERP SAP yang dilakukan pada 12 Juni 2014, dimana Perseroan mengimplementasikan 9 (Sembilan) modul SAP, yaitu *Finance*, *Controlling*, *Material Management*, *Human Capital Management*, *Sales and Distribution*, *Project System*, *Plantation Estate Management System*, *Production Planning*, dan *Plant Maintenance*. ERP SAP dipilih sebagai *core technology* ERP Perseroan karena *Best Practices* dan *Proven Technology* yang telah diakui oleh pelaku bisnis global.

THE IMPLEMENTATION OF THE INTERGRATED INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM

In 2014, the Company developed the IT through an Integrated Enterprise Resource Management System, or better known as the Enterprise Resource Planning (ERP). The requirement was appeared because the business development and challenges as well as the spirit to enhance services for stakeholders have become the main focus in the company's business.

The company was highlighting this phase by conducting a Kick Off of the ERP SAP Implementation which was conducted at June 12th, 2014, when the company implemented nine SAP modules, consist of Finance, Controlling, Material Management, Human Capital Management, Sales and Distribution, Project System, Plantation Estate Management System, Production Planning, and Plant Maintenance. The ERP SAP was selected as the Company's ERP core technology since its Best Practices and Proven Technology were acknowledged by global business players.

Strategi implementasi ERP SAP yang dipilih Perseroan menggunakan pendekatan 2 (dua) fase *Roll Out*, yaitu Implementasi SAP Modul *Basic* untuk *Finance*, *Controlling*, *Material Management*, *Human Capital Management*, *Sales and Distribution*, dan *Project System* pada awal Februari 2015 untuk Unit Usaha Gula dan Unit Usaha Tembakau, serta fase 2 untuk SAP Modul Produksi *Plantation Estate Management System*, *Production Planning*, dan *Plant Maintenance* pada pertengahan Mei 2015 untuk seluruh Unit Usaha Gula.

Pengembangan TI terintegrasi tidak hanya terbatas pada ERP SAP. Pada giling di tahun 2015, Perseroan mencanangkan penggunaan sistem Narada, yaitu sistem pengawasan bahan baku tebu dari lahan hingga ke Pabrik Gula. Sistem Narada ini memanfaatkan teknologi *Mobile* dan *Geographical Information System* (GIS) secara tepat guna untuk memecahkan permasalahan Perseroan pada sisi pengamanan bahan baku tebu.

Penguatan teknologi di sisi *Off-Farm* juga terus dikembangkan oleh Perseroan, ditandai dengan evolusi aplikasi Sistem Informasi Kebun (SIMBUN) menjadi *e-farming* demi tujuan peningkatan layanan terhadap petani dan menyederhanakan proses administrasi. Pendaftaran areal kebun yang dulu hanya dapat dilakukan oleh petugas, kini dengan adanya *e-farming* dapat dilakukan oleh petani dari telepon pintar mereka. Selain itu melalui sistem yang diluncurkan Mei 2016 ini, mitra Perseroan terutama petani dapat memantau *progress* pengajuan areal lahan serta menjadi jembatan penghubung antara petugas dan petani. Di sisi lain, Perseroan mendapatkan kemudahan dalam validasi lahan dan penyajian data lahan dengan berbagai informasi *geospatial* yang ditawarkan di dalam *e-farming*. Kehadiran *e-farming* menjadi penguatan teknologi *Geographical Information System* (GIS) yang dapat bersinergi dan terhubung dengan SAP khususnya modul *Plantation Estate Management System*.

PENGHARGAAN DI TAHUN 2016

Capaian pengembangan TI Perseroan telah diakui secara nasional ditandai dengan pengakuan dari Itech Magazine, Asosiasi Perusahaan Konsultan Telematika Indonesia (Aspekti), Ikatan Konsultan Teknologi Informasi Indonesia (IKTII), Masyarakat Telematika (Mastel), Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI), Forum Teknologi Informasi (FORTI),

The Company's ERP SAP implementation strategy uses two Roll-Out phases approach, which consist of the implementation of SAP Basic Module for Finance, Controlling, Material Management, Human Capital Management, Sales and Distribution, and Project System in early February 2015 for the Sugar and Tobacco Business Unit, followed by the phase 2 (two) for the implementation of SAP Production Module for Plantation Estate Management System, Production Planning, and Plant Maintenance in the middle of May 2015 for all the Sugar Business Units.

Development of integrated IT is not solely in ERP SAP. In the 2015 milling season, the Company launched the Narada system, a monitoring system of sugarcane raw materials from the field to be manufactured in the factory. This Narada system utilizes the Mobile and Geographical Information system (GIS) appropriately to solve the problems encountered by the Company in sugar cane raw materials.

The Company also continues to strengthen off-farming technology, which was marked with the evolution of Sistem Informasi Kebon (Field Information System or "SIMBUN"), into e-farming system for the purpose of enhancing service quality to farmers and simplify the administration process. The registration of field area that previously could only be done by the designated officers, now by using e-farming, farmers can easily register with their smartphones. By using the system that was launched in May 2016, the Company's partners especially farmers can monitor the progress of their land area proposal. The system can also serve as a link between the designated officers and farmers. In addition, it also enables the Company to do land validation and data with various geospatial data available in the e-farming system. E-farming will enhance the Geographical Information System (GIS) which can work in synergy with SAP, especially the Plantation Estate Management System module.

ACHIEVEMENTS IN 2016

The Company's achievement in IT development has gained national recognitions, marked with the recognition from Itech Magazine, Indonesian Association of Telematics Consultants (Aspekti), Indonesian Association of IT Consultants (I KTII), Telematics Community (Mastel), Indonesian Big Data Association (ABDI), IT Forum

Teknologi Informasi
Information Technology

Alvara serta didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berupa penghargaan sebagai *Top IT Implementation* di Sektor Industri Agro dalam ajang *Top IT & Telco 2016 Award* yang dihelat pada 23 November 2016 yang lalu. Prestasi ini dilengkapi dengan penghargaan kepada Direktur Utama Perseroan pada saat itu, Subiyono sebagai *Top IT Leadership 2016*.

(FORTI), Alvara supported by Indonesian Ministry of Communication and informatics, in the form of award as a winner of the "Top IT Implementation in the Agriculture Industry" in the Top IT & Telco Award event held on November 23, 2016. This achievement was completed with the presentation of an award to the Company's President Director Subiyono as Top IT Leadership 2016.

BIAYA INVESTASI DAN PROYEKSI TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan telah melakukan investasi TI di tahun 2016 sebesar Rp3,79 miliar, turun 67,61% dibandingkan investasi tahun 2015 yang menghabiskan anggaran sebesar Rp11,71 miliar. Adanya penurunan tersebut disebabkan tidak terealisasinya beberapa Investasi TI.

IT INVESTMENT COST AND PROJECTION

The Company's IT investments in 2016 totaled Rp3.79 billion, down 67.61% than the 2015 IT investment of Rp11.71 billion. The decline was due to a number of unrealized IT investments.

Investasi	2015 *(Rp)*	2016 *(Rp)*	*Investments*
Co-Sourching Implementasi Sistem Integrasi ERP SAP	7.736.818.780	216.500.000	*Co-Sourcing ERP SAP system integration implementation*
Penyusunan & Implementasi *Masterplan* TI	228.727.273	-	*IT Masterplan development and Implementation*
Pengembangan Aplikasi & *Training* TI	20.450.000	317.465.624	*IT Application development and Training*
Pengembangan Infrastruktur & Jaringan	36.731.818	633.670.981	*Infrastructure and network development*
Pengadaan Laptop, Printer, Scanner, UPS dll	638.025.727	284.844.544	*Laptops, Printers, Scanners, UPS units, and others*
Annual Maintenance ERP SAP	294.505.750	501.286.968	*Annual Maintenance ERP SAP*
Cloud Computing & ISP	2.064.576.070	1.776.152.667	*Cloud Computing & ISP*
Software Original	-	412.384.565	*Original Licensed Softwares*
Pemeliharaan Jaringan & *Hardware*	690.466.044	63.000.000	*Network and Hardware maintenance*
Jumlah	11.710.301.462	3.792.920.784	Total

Proyeksi investasi di tahun 2017 dapat disampaikan sebagai berikut:

Projected IT Investments in 2017 can be presented as follows:

Proyeksi Investasi Tahun 2017	Harga *Cost* (Rp)	*Investment of 2017*
Optimalisasi & Stabilisasi ERP SAP	2.905.000.000	*Optimizing and stabilizing the ERP SAP*
Penyusunan & Implementasi *Masterplan* TI	1.900.000.000	*IT Masterplan development and implementation*
Pengembangan Aplikasi & *Training* TI	1.984.000.000	*IT Application development and Training*
Pengembangan Infrstruktur & Jaringan	1.000.000.000	*Infrastructure and network development*

Proyeksi Investasi Tahun 2017	Harga *Cost* (Rp)	*Investment of 2017*
Pengadaan Laptop, Printer, Scanner, UPS dll	1.269.000.000	*Laptops, Printers, Scanners, UPS units, and others*
Annual Maintenance ERP SAP	2.803.500.000	*Annual Maintenance ERP SAP*
Cloud Computing & Internet	3.705.180.000	*Cloud Computing & Internet subscription*
Software Original	1.500.000.000	*Original Licensed Softwares*
Pemeliharaan Jaringan & *Hardware*	830.000.000	*Network and Hardware maintenance*
Jumlah	17.806.680.000	*Total*

ROADMAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengembangan TI Perseroan memperhatikan beberapa unsur strategis yaitu:

1. Pengembangan Kebijakan
   Fungsi dan tujuan komponen *roadmap* ini adalah untuk mendukung kebijakan strategi bisnis di lingkungan Perseroan yang selaras dengan visi dan misi pada Perseroan.
2. Sistem dan Aplikasi
   Setiap aplikasi yang ada di Perseroan akan dikelola dan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan internal dan eksternal dalam pengelolaan data maupun informasi untuk menunjang keterbukaan informasi serta pencapaian kinerja yang handal.
3. Infrastruktur
   Peningkatan kualitas layanan data berupa kecepatan konektifitas, layanan data setiap tahun terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pada komponen *roadmap* ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta kualitas layanan yang diberikan.
4. SDM dan informasi
   Peningkatan kualitas SDM melalui sosialisasi dan bimbingan teknis sehingga komponen khususnya yang terkait dengan TI dapat mengetahui dan memahami hal-hal yang terkait dengan TI serta untuk meningkatkan kualitas SDM agar tercipta efektifitas kerja di lingkungan Perseroan.

IT DEVELOPMENT ROADMAP

The Company's IT Development pays attention to several strategic elements:

1. Policy Improvement
   The purpose of this roadmap is to support the strategic business policies in the Company that are associated with the Company's vision and mission.
2. System and Application
   Every application applied in the Company will be managed and developed to help meet internal and external needs in data and information management as a support of information disclosure and reliable performance.
3. Infrastructure
   Quality of connectivity in data services will be enhanced every year. Therefore, this roadmap is focused on improving of the service quality with due regard to budget availability and service quality.
4. Human Resources and information
   HR quality improvement is carried out through supervision and technical mentoring so that the components most notably those related to IT will have knowledge and understanding on the matters related to IT as well as will improve HR quality so as to create work efficiency in the Company.

Teknologi Informasi
Information Technology

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

Inventarisasi Kebijakan Teknologi Informasi

Tahap ini merupakan awalan dari penyusunan sebuah kebijakan Teknologi Informasi.
Tujuan dari Inventarisasi ini adalah:

1. Terpetakannya seluruh informasi kebijakan Teknologi Informasi, baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum dapat dilaksanakan.
2. Tumbuhnya kesadaran akan pentingnya peraturan di bidang Teknologi Informasi dalam melakukan pelaksanaan tugas di dalam perusahaan.
3. Penyusunan data dan informasi terkait kebijakan Teknologi Informasi.

Penyusunan Master Plan Teknologi Informasi

Salah satu landasan dalam melakukan implementasi Teknologi Informasi adalah penyusunan sebuah perencanaan pengembangan Teknologi Informasi untuk beberapa tahun ke depan. Penyusunan *Master Plan* Teknologi Informasi ini tidak hanya melibatkan pihak internal namun juga melibatkan pihak eksternal. Hal yang menjadi dasar pembuatan *Master Plan* Teknologi ini adalah keadaan data dan informasi, kebijakan, kemajuan penerapan teknologi serta ketersediaan infrastruktur yang ada di PTPN X. Tujuan dari pembuatan *roadmap* ini adalah sebagai bakuan standar dalam pengembangan Teknologi Informasi. Oleh karena itu, penyusunan *roadmap* ini melibatkan para ahli dari berbagai praktisi Teknologi Informasi maupun Akademisi.

POLICY DEVELOPMENT

Inventory of IT Policies

This Phase is a beginning of IT policy arrangement.

The inventory aims to:

1. Make a mapping of all information regarding IT policies, both the policies that are already applied and not yet applied.
2. Instill an awareness of the importance of IT rules in performing tasks in the Company.
3. Data and information management related to IT policies.

IT MASTER PLAN DEVELOPMENT

One of the fundamentals of IT implementation is IT development planning for several years to come. This IT master plan development involves internal and external parties. The underlying matters for this IT master plan development are the conditions of data and information, policies, technological applications, and the availability of infrastructure in PTPN X. This roadmap serves as a standard in IT development. Therefore, the development of this IT roadmap also involves IT experts and academicians.

SISTEM DAN APLIKASI

Inventarisasi Sistem dan Aplikasi

Oleh karena itu perlu diadakannya inventarisasi terhadap setiap aplikasi yang telah dikembangkan di lingkungan Perseroan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Terpetakannya seluruh informasi terkait fungsi serta manajemen aplikasi Teknologi Informasi baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum dapat dilaksanakan.
2. Informasi mengenai detail arsitektur aplikasi seperti operating sistem, database, *library* maupun hal-hal teknis yang terkait lainnya.
3. Penyusunan rencana pengembangan peningkatan kualitas aplikasi baik.

SYSTEM AND APPLICATION

System and Application inventory

There is a necessity to make inventory of all applications that have been developed in the Company for the following purposes:

1. The mapping of all information regarding functions and management of IT applications that have been applied and/or not yet applicable.
2. Information regarding details of application architecture such as operating system, database, library, and other related matters.
3. Preparation of the plan for IT application quality enhancement.

Standarisasi Data, Informasi Dan Layanan

Penerapan standar data, informasi dan layanan Perseroan harus memiliki kebenaran dan sumber yang mengikat sehingga dapat menjadi rujukan dalam pengelolaan data dan informasi. Melalui penerapan kebijakan manajemen diharapkan pelaksanaan standarisasi data, informasi dan layanan dapat dilaksanakan dengan berkesinambungan karena akan memudahkan pengelolaan perencanaan dan pencapaian dari setiap kegiatan sehingga sesuai dengan tujuan dari *roadmap* ini yaitu melalukan peningkatan efektivitas dan efisiensi penerapan Teknologi Informasi.

Standardization of Data, information, and services

Standardization of data, information and services of the Company must be accurate and have sources of reference in data and information management. By applying management policy, it is expected that standardization of data, information and services can be continuously implemented to facilitate management of planning and accomplishing all activities so as to conform with to the purpose of this roadmap, which is to improve effectiveness and efficiency of IT implementation.

INFRASTRUKTUR

Inventarisasi Manajemen Jaringan

Tahap ini merupakan tahap awal dari penyusunan peningkatan kualitas manajamen jaringan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memetakan hasil dan capaian untuk setiap kemajuan manajemen di Perseroan. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Terpetakannya seluruh informasi terkait manajemen jaringan Perseroan baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum dapat dilaksanakan.
2. Terbentuknya dapat seluruh seluruh infrastruktur beserta seluruh laporan yang telah diimplementasikan.
3. Penyusunan rencana kegiatan terkait peningkatan kualitas manajemen.

Audit Infrastruktur

Hasil dari inventarisasi infrastruktur akan menjadi salah satu modal utama untuk melakukan audit infrastruktur. Audit infrastruktur menjadi sangat penting karena melalui hal ini akan memungkinkan pemetaan pencapaian dari setiap kebijakan yang telah dilakukan di bidang infrastruktur.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Inventarisasi capaian serta permasalahan-permasalahan yang terjadi di bidang infrastruktur.
2. Solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan setiap permasalahan yang ada serta laporan audit infrastruktur yang menjelaskan kondisi terkini serta hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas jaringan di Perseroan.

INFRASTRUCTURE

Network Management Inventory

This phase is a beginning of the plan to improve network management quality. This activity aims to make a mapping of results and accomplishment of the Company's management. This activity as the following purposes:

1. Realize the mapping of information regarding the Company's network management, both already applied and/or not yet applied.
2. Establish all infrastructures with all reports that have been implemented.
3. Arrange activity plans related to management quality enhancement.

Infrastructure Audit

Result of infrastructure inventory will become one of the main instruments to perform infrastructure audit. This will allow mapping of every infrastructure policies that has undertaken.

The activity has the following purposes:

1. Inventory of results and problems occurring in the infrastructure
2. Solutions that can be undertaken to solve all obstacles and audit report regarding the infrastructure which describes the current condition and other matters that are necessary to improve the Company's network quality.

Teknologi Informasi
Information Technology

SDM DAN INFORMASI

Inventarisasi Kualitas Data dan SDM

Salah satu faktor pendorong dari kemajuan Teknologi Informasi adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengelolaan informasi. Melalui unsur inilah maka dapat dipastikan pengelolaan Teknologi Informasi akan dapat berjalan dengan baik. Untuk mendukung hal inilah maka dilakukan proses inventarisasi mengenai pengelolaan data untuk mengetahui kualitas data dan informasi serta juga melakukan analisa ketersediaan SDM di PTPN X. Inventarisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui :

1. Kualitas data dan informasi yang tersedia di Perseroan.
2. Struktur layanan data dan informasi yang diterapkan di setiap unit.
3. Kualitas dan ketersediaan SDM untuk mendukung peningkatan Teknologi Informasi Perseroan.

Sertifikasi SDM Teknologi Informasi dan Layanan Informasi

Kemampuan SDM Teknologi Informasi dapat diketahui dengan adanya kualifikasi untuk setiap SDM. Sebuah kualifikasi dapat terlihat melalui pelaksanaan sertifikasi terkait pelaksanaan tupoksi masing-masing bagian. Maka, menjadi penting diterapkan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan yang telah memiliki sertifikasi untuk berbagai macam pengelolaan Teknologi Informasi dan layanan informasi. Melalui sertifikasi ini diharapkan kemampuan dan pengetahuan setiap SDM yang mengelola layanan informasi menjadi lebih baik lagi. Peningkatan layanan yang diberikan juga dapat ditunjukkan dengan melalui sertifikasi dari beberapa badan standarisasi. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana *level* pelayanan yang telah diberikan maka dapat diberlakukan sebuah kajian atau sebuah audit untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan. Kualifikasi dapat dilakukan audit untuk mengetahui standar organisasi dan pelayanan seperti SNI atau ISO.

Dari 4 (empat) unsur strategis *roadmap* TI di atas, yaitu pengembangan kebijakan, sistem dan aplikasi, infrastruktur serta SDM dan Informasi yang diimplementasikan melalui tahapan, baik Perencanaan maupun Pengembangan Layanan TI Perseroan diwujudkan dalam *tagline* "PASTI BISA", sesuai dengan Visi dan Misi yang diembannya.

HR AND INFORMATION

Inventory of Data and HR Quality

One of the factors that encourage IT improvement is the availability of Human resources (HR) and information management. The existence of these two elements will ensure that IT management can run properly. Therefore, there is a need to make inventory of data management to find out the quality of data and information as well as analyze the availability of Human Resources in PTPN X. This inventory has been conducted with the aim to have knowledge of:

1. Quality of data and information available in the Company.
2. Structure of data and information services that can be applied in all units
3. HR quality and availability to support the Company's IT enhancement.

HR with IT and Information services Certification

The capability of IT human resources can be seen from the qualifications of IT personnel. Qualification can be indicated with certifications related to the main functions of each division. Therefore, it is necessary to perform IT improvements through IT certification training programs. With this certification, it is expected that capability and knowledge of all IT personnel will improve. Enhanced service can also be seen through certifications from several standardization agencies. Therefore, to determine to which extent the services have been delivered, a review or an audit is performed to find out customers' satisfaction on the service provided. This qualification can be provided through an audit to find out standards of the organization and services standards, such as SNI and ISO.

From the four elements of IT strategic roadmap consisting of policy development, system and application, infrastructure, and HR and information that are implemented in phases, the Company's IT Service Planning and Development have been embodied in the tagline "PASTI BISA" in accordance with the mandated Vision and Missions.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intenttionally left blank

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan yang Baik mendorong PTPN X untuk terus melakukan pengelolaan operasional dan usaha berbasiskan kepatuhan dan prinsip korporasi yang sehat.

Good Corporate Governance encourages PTPN X to continue to manage its operations, compliance-based business, and sound corporate principles.

Prinsip dan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Principles and Implementation of Good Corporate Governance

PRINSIP DASAR DAN TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) mengatur hubungan antar organ perusahaan; baik hubungan internal maupun eksternal yang berlandaskan pada perundang-undangan dan etika berusaha. Aspek pengambilan keputusan dan pengelolaan aktivitas entitas usaha yang akuntabel menjadi hal mendasar yang berimbas langsung pada iklim investasi dan nilai tambah bagi pengelolaan organisasi yang berkelanjutan.

Dalam mengimplementasikan GCG, Perseroan mengacu pada beberapa peraturan dan perundang-undangan, utamanya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau yang biasa dikenal dengan sebutan UUPT. Undang-undang ini memberikan fondasi menyeluruh terhadap aspek pengelolaan organisasi; mulai dari hak dan kewajiban pemegang saham, tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, hingga hubungan Perseroan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal, dimana aspek-aspek tersebut juga diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Sebagai eks-Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana Negara masih memiliki saham Perseroan sebesar 10%, penerapan GCG di lingkup Perseroan juga mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 yang kemudian diubah dengan No. PER-09/MBU/2012, dimana disebutkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran merupakan landasan yang kuat bagi keberlanjutan aktivitas usaha Perseroan. Selain itu penerapan GCG yang mengacu pada praktik terbaik akan meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan para pemangku kepentingan dan membawa Perusahaan kepada kemajuan yang signifikan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN tersebut, tujuan penerapan prinsip-prinsip GCG pada perusahaan BUMN yaitu:

BASIC PRINCIPLE AND THE PURPOSES OF GOOD GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Basic principle of Good Corporate Governance (GCV) regulates relationship between companies organ either intenal or external relationship based on laws dan regulations and business ethics. The decision making aspect and accountable management of business entity activities is a basic this that has direct impact to the investment climate and is an additional value to a sustainable organization management.

In implementing GCG, the Company refers to several laws and regulations, primarily Law No 40 of 2007 regarding Limited Liability Company, or usually referred to as UUPT. This Law gives a complete coverage to organization management aspect; from rights and obligations of the shareholder, duties and authorities of the Board of Directors and Board of Commissioners, up to the Company's relation with internal and external stakeholders, where such aspects are regulated in the Company's Articles of Association.

As an ex State-Owned Enterprise (BUMN) where the State still owns 10% shares in the Company, GCG implementation in the Company environment also refers to the regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 which was amended by No. PER-09/MBU/2012, where it was set out that GCG is the principle that underlays a process and company management mechanism based on laws and regulations and business ethics. The implementation of GCG which covers transparency, accountability, responsibility, independence and fairness is a strong practice for the sustainability of Company's business activities. Aside from that, a GCG implementation that refers to the best practice shall improve the shareholders and stakeholders trust and bring the Company to a significant and sustainable improvement.

Based on the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises, the purpose of GCG principles implementation to State-Owned Enterprises are:

Prinsip dan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Principles and Implementation of Good Corporate Governance

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perseroan.
3. Mendorong organ perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Prinsip implementasi GCG yang digunakan Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 serta Pedoman Umum GCG dari Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) melalui azas-azas GCG yang umum dikenal dengan sebutan TARIF,

1. *Transparency,* atau Transparansi
   Perseroan mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perseroan.
2. *Accountability,* atau Akuntabilitas
   Perseroan mendefinisikan akuntabilitas sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan Perseroan dapat berlangsung secara efektif.
3. *Responsibility,* atau Tanggung Jawab
   Perseroan mendefinisikan responsibilitas atau tanggung jawab sebagai kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. *Independency*, atau Kemandirian
   Perseroan mendefinisikan kemandirian sebagai keadaan di mana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang sehat.

1. To optimize the State-Owned Enterprises value so that the Company will have strong competition ability, either nationally or internationally.
2. To encourage State-Owned Enterprises professional, efficient and effective management and to empower the function so that it will improve the company's independence.
3. To encourage the company organs in making decision and to carry out their actions in a good moral and compliance against laws and regulations and with awareness of the State-Owned Enterprises social responsibilities against the stakeholders and its surrounding environment.
4. To improve State-Owned Enterprises contribution in the national economy
5. To improve a conducive climate for the development of national investment

GCG principle implementation applied by the Company refers to Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 and GCG General Code from the National Committee of Governance Policy (KNKG) through GCG principles widely known as TARIF.

1. Transparency
   The Company defines transparency as an openness in the process of decision making and openness in disclosing material and relevant information regarding the Company.
2. Accountability
   The Company defines accountability as a clear function, implementation and responsibility of the Organs so that the Company management may become effective.
3. Responsibility
   The Company defines responsibilities as compatibility in Company's management against laws and regulations and health corporation principles.
4. Independency
   The Company defines independency as a condition where the Company is managed professionally without any conflict interests and influence/pressure from any other parties that are incompatible with the Laws and Regulations and healthy principles.

Prinsip dan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Principles and Implementation of Good Corporate Governance

5. *Fairness*, atau Kewajaran dan Kesetaraan
   Perseroan mendefinisikan *fairness* atau kewajaran sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Sebagai entitas usaha berstatus Emiten yang memperdagangkan obligasi di pasar modal indonesia, Perseroan memiliki kewajiban untuk menerapkan peraturan terkait pasar modal serta peraturan turunannya. Selain itu, *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang telah diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal tahun 2014 serta beberapa peraturan yang menyertainya menjadi acuan bagi Perseroan untuk dapat terus menyempurnakan penerapan GCG di lingkup Perseroan. Salah satunya adalah Peraturan OJK No. 21/Pojk.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan Surat Edaran OJK No. 32/Seojk.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Penyesuaian langkah ini diharapkan dapat memberikan fondasi pelaksanaan GCG Perseroan, khususnya bagi akuntabilitas Perseroan sebagai Emiten.

LANDASAN HUKUM

Penerapan GCG di lingkungan Perseroan mengacu kepada beberapa peraturan/perundangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya,

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
6. Undang Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2003.

5. Fairness
   The company defines fairness as justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders which arises based on agreements and laws and regulations.

As a business entity with issuer status that trades bond in Indonesia stock market, the Company has obligation to implement regulation related to stock market and all of its derivative regulations. Aside from that, the Roadmap of Indonesian Corporate Governance which was launched by Indonesian Financial Services Authority (OJK) at the early of 2014 and several other following regulations has become references for the Company to continuously refining GCG implementation in the company's environment. Among others is OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 regarding Implementation of the Corporate Governance Guidelines for Public Companies. This adjustment is expected to give a foundation to the Company's GCG implementation, especially for the Company's accountability as an Issuer.

LEGAL GROUND

Implementation of GCG in the Company's environment refers to several prevailing regulations/laws in Indonesia, such as:

1. Law of Republic of Indonesia No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company
2. Law of Republic of Indonesia No. 19 of 2003 regarding State-Owned Enterprises (BUMN)
3. Law of Republic of Indonesia No. 8 of 1995 regarding Stock Market
4. Law of Republic of Indonesia No. 20 of 2001 regarding Amendment of Constitutional of Republic of Indonesia No. 31 of 1999 regarding Corruption Eradication
5. Law of Republic of Indonesia No. 28 of 1999 regarding Government Executives Who are Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism.
6. Law of Republic of Indonesia No. 15 of 2002 regarding Money Laundering Criminal Act as amended by Law of Republic of Indonesia No. 25 of 2003

7. Undang Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
8. Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
9. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
10. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/ MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
11. Keputusan Sekretaris Menteri Negara BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN.
12. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/ MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
13. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN.

Beberapa peraturan terkait regulasi pasar modal dari OJK di antaranya adalah:

1. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003, Peraturan No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.
2. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-40/PM/2003, Peraturan Bapepam No. VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.
3. Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-431/BL/2012, Peraturan No. X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Lampiran Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perubahan Publik.

7. Law Of Republic of Indonesia No. 14 of 2008 regarding Information Disclosure
8. Law of Republic of Indonesia No.11 of 2008 regarding Eltronic Information and Transaction
9. Law or Republic of Indonesia No. 38 regarding Amendment to Government Regulation No. 6 of 2006 regarding Management of State/Regional Owned Property
10. Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. No. PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 and its amendment No. PER-09/MBU/2012 regarding Implementation of Good Corporate Governance on State-Owned Enterprises.
11. Decision of Secretary of State Minister of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 regarding Indicator/Parameter of Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation on State-Owned Enterprises.
12. Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No . PER-04/MBU/2014 regarding Guidelines on Determination of Income of Board of Directors, board of Commissioners, and Board of Supervisory of State-Owned Enterprises
13. Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/2013 dated 18 February 2013 regarding Guidelines on State-Owned Enterprised Information Technology Compilation.

Several regulations related to stock market from OJK are:

1. Decision of Chairman of Capital Market Supervisory Agency No. Kep-36/PM/2003 dated 30 September 2003m Regulation No. No. X.K.2 regarding Obligation to Submit Periodical Financial Statement
2. Decision of Chairman of Capital Market Supervisory Agency No. Kep-40/PM/2003, Regulation of Capital Market Supervisory Agency No. VIII.G.11 regarding Responsibility of the Board of Director on Financial Statement
3. Decision of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. Kep-431/BL/2012, Regulation No. X.K.6 regarding Obligation to Submit Annual Report for Issuers of Public Companies.
4. Annex to Decision of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. Kep-179/ BL/2008 dated 14 May 2008, Regulation No. IX.J.1 regarding Company's Articles of Association Principal Which conduct general offer for equity stock exchange and Public Amendment.

Prinsip dan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Principles and Implementation of Good Corporate Governance

5. Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-413/BL/2009 tanggal 25 November 2009, Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

6. Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

7. Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Perubahan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

8. Peraturan OJK No. 21/Pojk.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan Surat Edaran OJK No. 32/Seojk.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

9. Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Surat Edaran OJK No. 30/Seojk.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
10. Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
11. Peraturan OJK No. 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi Atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.
12. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
13. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
14. Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
15. Peraturan OJK No. 55 /POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

5. Decision of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. Kep-413/BL/2009 dated 25 November 2009, Regulation of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No.IX.E.2 regarding Material Transaction and Amendment to Main Business Activity.
6. Decision of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. Kep-412/BL/2009 dated 25 November 2009, Regulation of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No.IX.E.1 regarding Affiliated Transaction and Conflict Interest on Certain Transactions.
7. Decision of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. Kep-554/BL/2010 dated 30 December 2010 regarding Amendment to Decision of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. Kep-06/PM/2000 dated 13 Maret 2000 regarding Amendment of Regulation of Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. VIII.G.7 regarding Guidelines on Financial Statement Reporting.
8. Regulation of OJK No. 21/POJK.04/2015 regarding Implementation of Guidelines of Corporate Governance of Public Company, and OJK circular No. 32/SEOJK.04/2015 regarding Guidelines of Corporate Governance of Public Company.
9. Regulation of OJK No. 29/POJK.04/2016 regarding Annual Reports of the Issuer and Public Company, and OJK Circular No. 30/SEOJK.04/2016 regarding Format and Content of Annual Report of the Issuer and Public Company.
10. Regulation of OJK No 30/POJK.04/2015 regarding Realization Report of Public Offering Fund Utilization
11. Regulation of OJK No 31/POJK.04/2015 regarding Disclosure of Information or Material Facts by Issuer or Public Company
12. Regulation of OJK No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer and Public Company.
13. Regulation of OJK No. 34/POJK.04.2014 dated 8 December 2014 regarding National Committee and Remuneration of Issuer and Public Company,
14. Regulation of OJK No 35/POJK.04/2015 dated 8 December 2015 regarding Secretary of Issuer Copmany and Public Company.
15. Regulation of OJK No 55.POJK.04/2015 dated 23 December 2015 regarding Formation and Working Implementation Guidelines of the Audit Committee.

Prinsip dan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Principles and Implementation of Good Corporate Governance

Di samping peraturan/perundangan yang berlaku, Perseroan memiliki beberapa dasar peraturan internal yang mengatur Tata Kelola Perusahaan di lingkup Perseroan, antara lain:

1. Anggaran Dasar Perseroan, dengan perubahan terakhir sesuai Akta Notaris Nanda Fau Iwan, SH, M.Kn No. 11 tanggal 14 Maret 2016 dan disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0036411 tanggal 1 April 2016.
2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan, atau *Code of Corporate Governance*, yang telah diperbaharui dan disahkan Direksi pada 19 Agustus 2016.
3. Pedoman Perilaku, atau *Code of Conduct*, yang telah diperbaharui serta disahkan Direksi pada 19 Agustus 2016.
4. *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi, yang telah diperbaharui serta disahkan Direksi pada 19 Agustus 2016.
5. Piagam atau *Charter* Audit Internal, yang telah disahkan Direksi pada 28 Februari 2013.
6. Pedoman Manajemen Risiko, yang telah disahkan Direksi pada 5 Mei 2010.
7. Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa, yang telah disahkan Direksi pada 29 Februari 2012.

Aside from the regulations/laws in effect, the Company owns several basis internal rules that regulate the Good Corporate Governance in the Company's environment, such as:

1. Company's Articles of Association, with last amendment according to Notaral Deed Nanda Fau Iwan, SH. M.Kn No. 11 dated 14 March 2016 as legalized by the Decision of Minister of Justice and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0036411 dated 1 April 2016.
2. Code of Corporate Governance, which has been renewed and approved by Board of Directors on 19 August 2016.
3. Code of Conduct as renewed and approved by the Board of Directors on 19 August 2016
4. Manual of board of Commissioners and Board of Directors as renewed and approved by the Board of Directors on 19 August 2016
5. Audit Internal Charger as approved by the board of Directors on 28 February 2013
6. Code of Risk Management, as approved by the Board of Directors on 5 May 2010.
7. Code of Goods and/ Service Procurement as approved by Board of Directors on 29 February 2012.
8.

Landasan Hukum Penerapan GCG PTPN X
Legal Grounds of GCG PTPN X Implementation

Prinsip dan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Principles and Implementation of Good Corporate Governance

PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Sebagai entitas usaha, Perseroan menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang menjadi kaidah hubungan dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Pemegang saham sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam Perseroan memiliki hak yang diatur dalam Undang-undang. Perseroan memiliki Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berfungsi sebagai forum bagi seluruh pemegang saham untuk menggunakan haknya.

Di samping itu, prinsip penerapan GCG di lingkup Perseroan juga dilakukan dengan mengakui hak dan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan, baik yang ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan maupun melalui kesepakatan bersama untuk mendorong kerjasama yang aktif dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan kesinambungan Perseroan. Pemangku kepentingan secara umum terbagi menjadi dua: internal mencakup karyawan serta pemegang saham; dan pemangku kepentingan eksternal mencakup regulator, pelanggan, kreditur, mitra kerja/rekanan/pemasok/vendor, organisasi profesi dan publik masyarakat pada umumnya.

SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS

As business entity, the Company implements Good Corporate Governance which become the relationship rules with shareholders and stakeholders. The shareholders as one of stakeholders in the Company has rights as regulated in the Law. The Company has Shareholders General Meeting (GM) which functions as forum for all the shareholders to vote.

Besides that, the principle of GCG implementation in the Company's environment is alsi carried by acknowledging the rights and building relationship with Stakeholders , either as governed by the laws and regulations or through a joint agreement to encourage active cooperation in creating welfare, work opportunity, and Company's sustainability. The Stakeholders are generally distributed into two: Internal Stakeholders which include employees and shareholders and external shareholders which includes regulator, customers, clients, partners/suppliers/vendors, professional organization and community in general.

Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Assessment of Good Corporate Governance Implementation

Perusahaan telah melakukan *Self Assessment* terhadap evaluasi penerapan GCG yang dilaksanakan oleh Biro Manajemen Risiko sesuai dengan Indikator/Parameter yang mengacu kepada keputusan Sekretaris Menteri Negara BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. Evaluasi ini dilaksanakan untuk:

1. Mengukur kualitas penerapan GCG melalui evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di Perseroan, melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG-nya.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dengan penerapan GCG.
3. Memantau konsistensi penerapan GCG di Perseroan dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan Perseroan.
4. Memantau pelaksanaan rencana tindak atas rekomendasi hasil evaluasi GCG tahun sebelumnya.

Company which has conduct Self Assessment against their GCG implementation evaluation as carried by Risk Management Bureau according to Indicator/Parameter referring to Decision of Secretary of State Minister of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 regarding Indicator/Parameter of Assessment and Evaluation on Good Corporate Governance (GCG) Implementation on State-Owned Enterprises. This evaluation is carried to:

1. Measure the quality of GCG implementation through evaluation on fulfillment level of GCG criteria with real condition being implemented in the Company, by giving score/grades on the GCG implementation and category of the GCG implementation quality.
2. To identify the strength and weaknesses of GCG implementation and to suggest for improvement recommendation that will reduce the gap between GCG critera and the GCG implementation.
3. To moniter the GCG implementation consistency in the Company and to obtain inputs to refine and develop the policy of Corporate Governance in the Company's environment.
4. To monitor the implementation of action plan based on recommendation of the preceding year's GCG evaluation result

Jenis Penilaian *Type of Assessment*	*Self Assessment* / Evaluasi *Self Assessment / Evaluation*
Penilai *Assessor*	Biro Manajemen Risiko PTPN X *Risk Management Buerau PTPN X*
Tahun Buku Penerapan *Implemenetation Year*	1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 *January 1, 2015 to December 31, 2015*

Evaluasi penerapan GCG Perseroan meliputi 43 indikator, 153 parameter, dan 568 sub parameter yang dikelompokkan dalam 6 (enam) faktor/aspek penerapan GCG, dengan hasil skor penilaian sebagai berikut:

Evaluation of Company's GCG implementation includes 42 indicators, 153 parameters and 568 sub-parameters which is categorized into 6 (six) factors/aspects of GCG implementation, with the following assessment score results:

No.	Aspek Governance *Governance Aspect*	Bobot *Weight*	Capaian Perseroan *Company AChievement*	Persentase *Percentage (%)*
I.	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan *Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance*	7	6,398	91,40%
II.	Pemegang Saham dan RUPS *Shareholders and the General Meeting of Shareholders*	9	7,618	84,64%

Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance Implementation

No.	Aspek Governance *Governance Aspect*	Bobot *Weight*	Capaian Perseroan *Company AChievement*	Persentase *Percentage (%)*
III.	Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	35	30,778	87,94%
IV.	Direksi *Board of Directors*	35	31,414	89,75%
V.	Pengungkapan Informasi dan transparansi *Disclosure of Information and Transparency*	9	8,323	91,47%
	Sub total *Sub total*	95	84,531	88,98%
VI.	Aspek lainnya *Other Aspects*	5	-	-
	Jumlah *Total*	100	84,531	84,53%

Pelaksanaan *Self Assessment Good Corporate Governance* (GCG) Perseroan periode tahun 2015 meraih skor 84,531 dengan kategori predikat "BAIK". Penilaian dilakukan dengan metode telaah dokumen, kuesioner, wawancara dan pengamatan langsung (observasi). Hasil dari *self assessment* ini berupa rekomendasi-rekomendasi terhadap *Area of Improvement* yang dapat menjadi rujukan untuk aksi perbaikan/penyempurnaan yang mengarah kepada *best practices* Tata Kelola Perusahaan yang Baik; yang kemudian disusul dengan laporan rencana tindak lanjut terhadap pelaksanaan GCG 2016 kepada PTPN III (Persero).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kualitas penerapan GCG di Perseroan pada tahun 2015 sudah baik. Perseroan juga telah menerima berbagai penghargaan dari lembaga/instansi baik daerah maupun nasional atas praktik-praktik terbaik (*best practices*) dalam berbagai kegiatan operasional, administrasi, maupun kegiatan lainnya. Namun demikian, tetap diperlukan komitmen dari organ Perseroan dan seluruh karyawan secara berkelanjutan dalam peningkatan kualitas penerapan GCG sesuai standar dan pedoman yang berlaku; antara lain dengan melakukan penyempurnaan Pedoman, Kebijakan, SOP, Mekanisme, Rencana Kerja, dan aturan main lainnya serta pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di Divisi Manajemen Risiko, Tata Kelola Teknologi Informasi, pengungkapan dalam Laporan Tahunan, dan Rancangan Sistem Pengendalian Internal.

The implementation of the Company's Self Assessment Good Corporate Governance (GCG) for the period of 2015 managed to obtain a score of 84.531, with "GOOD" category predicate. The assessment was carried with document review method, questionnaire, interview and direct observation. Result of the self assessment is in the form of recommendations on Area of Improvement that can be used as references to show improvement/refinement action that leads to best practices of Good Corporate Governance; which will then followed by a follow up action plan against GCG 2016 implementation to PTPB III (Persero)

Overall, the quality of GCG implementation in the Company in 2015 can be concluded as pretty good. The Company has also received many appreciation from various institutions regionally or nationally, on its best practices in various operational, administrative, or other activities. Eventhough so, continuous commitment from Company's organs and all of its employee is still needed in order to improve the quality of GCG implementation, according to the prevailing standard and code; amont others by refining the Code, Policy, SOP, Mechanism, Work Plan, amnd other rules including implementation of GCG Principles in the Risk Management Divison, Technology Information Governance, Annual Report disclosure, and Internal System Control Design.

Penilaian Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Ungul (KPKU) Tahun 2015

Assessment on Implementation of Good Performance Evaluation Criteria (KPKU) of 2016

Kategori *Category*	Maksimal Skor *Maximum Score*	Persentase *Percentage (%)*	Skor (nominal) *Scores (nominal)*
	(1)	(2)	(3 = 1x2)
Kategori 1: Kepemimpinan *Category 1: Leadership*			
1.1. Kepemimpinan Senior *1.1. Senior Leadership*	70	50%	35,00
1.2. Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan *1.2. Governance and Community Responsibilty*	50	50%	25,00
Kategori 2: Perencanaan Strategis *Category 2: Strategic Planning*			
2.1. Pengembangan Strategi *2.1. Strategic Development*	40	45%	18,00
2.2. Implementasi Strategi *2.2. Strategic Implementation*	45	45%	20,25
Kategori 3: Fokus Pelanggan *Category 3: Customer Focus*			
3.1. Suara Pelanggan *3.1. Customer Input*	45	40%	18,00
3.2. Keterikatan (Engagement) Pelanggan *3.2. Customer Engagement*	40	40%	16,00
Kategori 4: Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan *Category 4: Measurement, Analysis, and Knowledge Management*			
4.1. Pengukuran, Analisis dan Perbaikan Kinerja Perusahaan *4.1. Measurement, Analysis, and Company Performance Improvement*	45	45%	20,25
4.2. Manajemen Pengetahuan, Pengelolaan Informasi dan Teknologi Informasi *4.2. Knowledge Management, Information Management and Information Technology*	45	40%	18,00
Kategori 5: Fokus Tenaga Kerja *Category 5: Focus of Manpower*			
5.1. Lingkungan Tenaga Kerja *5.1. Working Environment*	40	40%	16,00
5.2. Keterikatan (Engagement) Tenaga Kerja *5.2. Manpower Engagement*	45	35%	15,75
Kategori 6: Fokus Operasi *Category 6: Operational Focus*			
6.1. Proses Kerja *6.1. Working Process*	45	40%	18,00
6.2. Efektivitas Operasional *6.2. Operational Effectiveness*	40	35%	14,00

Penilaian Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Ungul (KPKU) Tahun 2015
Assessment on Implementation of Good Performance Evaluation Criteria (KPKU) of 2016

Kategori *Category*	Maksimal Skor *Maximum Score*	Persentase *Percentage (%)*	Skor (nominal) *Scores (nominal)*
Kategori 7: Dimensi Hasil *Category 7: Result Dimension*			
7.1. Hasil/Kinerja Produk dan Proses *7.1. Product and Process Performance/Result*	110	40%	44,00
7.2. Hasil/Kinerja Fokus Pelanggan *7.2. Customer Focus Performance/Result*	85	40%	34,00
7.3. Hasil/Kinerja Fokus Tenaga Kerja *7.3. Manpower Focus Performance*	85	30%	25,50
7.4. Hasil/Kinerja Kepemimpinan dan Tata Kelola *7.4. Leadership and Governance Performance/Result*	80	40%	32,00
7.5. Hasil/Kinerja Finansial dan Pasar *7.5. Financial and Market Performance/Result*	90	45%	40,50
Jumlah *Total*	1.000		410,25
Kategori *Category*		"Early Improvement"	

Skala Skor	Kategori
876-1000	World Class Leader
776-875	Benchmark Leader
676-775	Inventory Leader
576-675	Emerging Industry Leader
476-575	Good Performance
376-475	**Early Improvement**
276-375	Early Result
0-275	Early Development

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

MEKANISME HUBUNGAN ANTAR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan perubahannya, serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sistem Tata Kelola Perusahaan di Indonesia untuk jenis badan usaha berbentuk PT merujuk pada sistem *two board* yang terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris, dimana mekanisme *check and balance* diantara kedua organ ini harus diterapkan untuk menghindari potensi benturan kepentingan serta memastikan bahwa keputusan yang dibuat adalah untuk kepentingan perusahaan. Dewan Komisaris berperan melakukan pengawasan dan memberikan nasihat atas pengurusan perusahaan oleh Direksi, sementara Direksi berperan mengelola kegiatan operasional perusahaan dengan tetap mengutamakan kepentingan perusahaan.

Demikian pula pertanggungjawaban Manajemen kepada Pemegang Saham dan keseluruhan tata kelola organisasi. Direksi dan Dewan Komisaris diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berlandaskan pada hubungan fidusia *(fiduciary relationship)* dengan masa jabatan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam RUPS. Direksi berkewajiban menyusun pedoman GCG sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan usaha, dimana Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa prinsip GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan sesuai pedoman yang telah disusun oleh Direksi. Kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyampaikan laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan dalam tahun buku yang telah lampau dalam forum RUPS.

Struktur organ Tata Kelola Perusahaan yang dimiliki Perseroan dapat dilihat pada bagan di bawah ini,

MECHANISM OF RELATION BETWEEN ORGANS OF CORPORATE GOVERNANCE

Pursuant to Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company (PT), Law No.19 of 2003 regarding State-Owned Enterprises, Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 regarding Good Corporate Governance on State-Owned Enterprises and its amendment, including Regulation of OJK No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company, system of Corporate Governance in Indonesia consist of Board of Directors and Board of Commissioners, where the mechanism of checn and balance between both organs must be applied to prevent potential conflict interest and also to ensure that the decisions made are for the interes of the Company. Board of Commissioners role is to supervise and give advices on the company management by the Board of Directors, meanwhile Board of Directors's role is to manage the company's operational activities with due observance to the company's best interest.

Likewise, the responsibility of Management to Shareholders and all the organization governance. Board of Directros and Board of Commissioners are appointed based on Decision of Shareholders General Meeting based on fiduciary relationship with specific service period as determined in the Shareholders General Meeting. Board of Directors has the obligation to compile GCG code as the base of business activities execution, where the Board of Commissioners will monitor and ensure that the principle of GCG has been implemented effectively and continuously according to the code compiled by the Board of Directors. To the shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors have the obligation to submit report of their supervision carried in the previous accounting period in the General Meeting of Shareholders forum.

Organ Structure Corporate Governance owned by the Company can be seen in the following chart.

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

STRUKTUR ORGAN GCG PTPN X
STRUCTURE OF GCG PTPN X ORGANS

PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Saham dan Pemegang Saham Perseroan

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan dari perusahaan. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan definisi yang jelas terkait peran, fungsi, hak dan kewajiban dari pemegang saham sebagai pihak yang menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan; dimana hal ini diatur melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sebagai salah satu organ Perseroan, RUPS memiliki fungsi sentral dalam mengambil keputusan strategis. Di samping itu, RUPS merupakan wadah perlindungan dan perlakuan kesetaraan bagi seluruh Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh Perseroan. Melalui

SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Shares and Shareholders of the Company

Share is a unit value or a record in various financial instruments that refers to the ownership of the company Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company has given a clear definition in relation to role, function, rights and obligations of the shareholders as the party that take part in the company's ownership, where such condition is regulated through the General Meeting od Shareholders (GMS).

As one of the Company's organ GMS has the central function to take strategic decision. In addition, the GMS is an equal protection and treatment vessel for all Shareholders which held by the company. Through the GMS forum, Shareholdres may render their rights to

forum RUPS, Pemegang Saham dapat menyalurkan haknya untuk menciptakan nilai optimal bagi Perseroan, dimana hak tersebut berlaku secara adil dan proporsional berdasarkan prinsip *one share, one vote*.

create optimum value for the Company, whereby such rights shall prevail equally and proportionally based on one share, one vote principle.

Perseroan merupakan eks-BUMN yang kepemilikan sahamnya mayoritas berada di bawah *Holding* BUMN sektor Perkebunan, PT Perkebunan Nusantara III (Persero); sementara Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian BUMN turut memiliki saham Perseroan.

The Company is an ex-State-Owned Enterprise which majority shares ownership is under a State-Owned Enterprise Holding Company in Plantation Sector, PT Perkebunan Nusantara III (Persero); meanwhile The Republic of Indonesia through the Government of Republic of Indonesia/Ministry of State-Owned Enterprises co-own the shares in the Company.

Komposisi Pemegang Saham PTPN X per 31 Desember 2016

Composition of PTPN X Shareholders As of 31 December 2016

Pemegang Saham *Shareholders*	Jumlah Saham *(lembar) Number of Shares (Share)*	Nominal *(Rp)*	Persentase Kepemilikan *Percentage of Ownership (%)*
Saham Seri A *Series A Shares*			
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	1	1.000.000	0,00%
Saham Seri B *Series B Stock*			
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	1.661.035	1.661.035.000.000	90,00%
Negara Republik Indonesia	184.560	184.560.000.000	10,00%
Jumlah	1.845.596	1.845.596.000.000	100,00%

Komposisi Kepemilikan PTPN X
PTPN X Composition of Shares Ownership

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir diubah pada tahun 2016, Pasal 5 menyebutkan adanya Pemegang Saham Seri A dan Seri B, dimana Perseroan

Based on Company 's Articles of Association which ws last amended in 2016, Article No 5 mentioned that there are holder of Series A and Series B shares, where the

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

hanya menerbitkan 1 (satu) Saham Seri A, yakni saham yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lain sebagaimana akan ditetapkan dalam anggaran dasar. Perbedaan wewenang antara Pemegang Saham Seri A dan Seri B dapat dilihat di bawah ini,

Company only issue 1 (one) Series A Share, which gives the holder special rights which is not owned by other share holders as stipulated in the articles of association. The difference of authorities between Series A and Series B shareholders can be seen as below.

Wewenang *Authority*	
Pemegang Saham Seri A Holder of Series A Shares	Pemegang Saham Seri B Holder of Series B Shares
1. mengusulkan calon Dewan Komisaris dan Direksi; *to suggest Board of Commissioners and Board of Directors candidate*	pemegang saham biasa yang mempunyai kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku *General shareholders that owns the authority according to the prevailing laws and regulations.*
2. mengusulkan perubahan anggaran dasar termasuk perubahan modal; *to suggest amendment to articles of association including capital amendment*	
3. mengusulkan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran *to suggest for merger, consolidation, take over and separation of company, request for company's bankruptcy to be filed, and dissolution of the Company;*	
4. meminta laporan dan penjelasan mengenal hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan *to request for report and explanation regarding specific matters to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners subject to prevailing laws and regulations;*	
5. mengusulkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; *suggest for Board of Directors and Board of Commissioners remuneration;*	
6. menetapkan kebijakan umum terhadap Perseroan dalam bidang sebagai berikut: *to determine Company's general regulations in the following sector:*	
a. Bidang Produksi *Production sector* • Harmonisasi bidang produksi, energi, persediaan dan sumber daya perusahaan untuk *Harmonization in the Company's production, energy, supply and resourcesto optimise production amount; with efficient cost; mengoptimalkan jumlah produksi; dengan biaya yang efisien;* • *Health, Safety and Environment* (HSE) dengan target *zero accident*: *Health, Safety and Environment (HSE with zero accident target;* • Pengelolaan Aset Produksi dan fasilitas pendukung. *Management of production assets and supporting facilities*	
b. Bidang Pemasaran *Marketing Sector* • Kegiatan perdagangan produksi Barang dan Jasa untuk pasar ekspor maupun dalam negeri; *Goods and Services production trade activities for export or domestic market;*	

Wewenang *Authority*	
Pemegang Saham Seri A Holder of Series A Shares	Pemegang Saham Seri B Holder of Series B Shares
c. Bidang Keuangan, Akuntansi dan Perbendaharaan *Financial Sector, Accounting and Treasury* • Akuntansi mengenai standarisasi Biaya Operasional (OPEX) dan Biaya Modal (CAPEX), kebijakan Akuntansi dan komponen laporan keuangan Interim dan tahunan sesuai dengan Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan berbasis *International Financial Reporting Standard* (IFRS); *Accounting regarding Operational Expense (OPEX) and Capital Expenditure (CAPEX) standardization, Accounting Policy and interim and annual financial statement component according to accounting code of State-Owned Enterprises Plantation with International Financial Reporting Standard (IRFS) based;* • Keuangan dan perbendaharaan mencakup struktur modal ekuitas dan keuangan; perbankan atas penempatan dana; manajemen risiko; pendanaan proyek investasi; modal kerja; dan pengelolaan kas/Bank dan *treasury* dalam tata kelola valuta asing; *Financial and treasury includes capital structure of equity and financual; banking and fund deposit; risk management; investment project funding; working capital; and cash management/Bank and treasury in the foreign exchange governance;* • Modal kerja; *Working Capital;* • Pinjaman dana dari pihak luar dan melakukan kerjasama dengan pihak perbankan atau pihak lainnya terkait pinjaman dana, penerbitan obligasi atau instrumen-instrumen pasar modal lalnnya; *Loan from external party in doing cooperation with banking or other related party in relation to loan, bond or other stock market instruments issuance;*	
d. Bidang Pengadaan *Procurement Sector* • Impor Barang dan/jasa yang bersifat strategis; *Goods and/or service Import with strategic nature;* • Pengadaan bersama atas barang atau *material supporting* produksi yang jenisnya sama dan tertentu; *joint procurement of goods or production material supporting with the same and specific kind;*	
e. Bidang Perencanaan dan Pengembangan *Planning dn Development Sector* • Pengembangan perusahaan sesuai dengan ketersediaan sumber daya, teknologi dan peluang pasar; *Development of the Company according to the availability of resources, technology and market opoortunity;* • Aktivitas penelitian agar tujuan penelitian fokus kepada aktivitas dengan nilai tambah yang tinggi; *Research activity so that the intention of the research can be focused on the activities with high added value;*	
f. Bidang Teknologi Informasi *Technology Information Sector* Pengadaan dan Pengembangan Teknologi Informasi *Procurement and DEvelopment of Technology Information;*	

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Wewenang *Authority*	
Pemegang Saham Seri A Holder of Series A Shares	Pemegang Saham Seri B Holder of Series B Shares
g. Bidang Sumber Daya Manusia *Human Resource Sector* • Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia berbasis Kompetensi secara terintegrasi, yang terdiri dari: *Implementation of Human Resource Management Implementasi with competency based consist of:* » Sistem rekrutmen dan seleksi; *Recruitment and selection system;* » Sistem pengembangan SDM (Sumber Daya Manusla); *Human Resource development system;* » Sistem manajemen pengetahuan; *Knowldege management system;* » Sistem manajemen kinerja; *Performance management system;* » Sistem karir dan suksesi berdasarkan *talent management*; *career and succession bsed on talent management system;* » Sistem retensi; *retention system;* » Sistem remunerasi. *remuneration system;* • *Talent management* (*acceleration pool*) untuk mempersiapkan Pemimpin Strategis; *Talent management (acceleration pool) to prepare a Strategic Leader;* • Hubungan Industrial; *Industrial relation;* • Fungsi Pengembangan dan Perubahan Organisasi; *Development and Amendment of the Organization function* • Pengembangan sistem informasi. *Development of Information System*	

Informasi tentang Pemegang Saham Utama

Pemegang saham utama dari Perseroan adalah PT Perkebunan Nusantara III (Persero), atau PTPN III. PTPN III sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian BUMN memiliki seluruh saham atau 100% dari saham PTPN III. Dengan demikian, Negara Republik Indonesia menjadi entitas induk akhir dari Perseroan.

Di bawah ini disajikan informasi dalam grafis tentang PTPN III sebagai pemegang saham utama Perseroan.

Information regarding the Main Shareholder

Main shareholdrs of the Company is PT Perkebunan Nusantara III (Persero), or PTPN III. PTPN III itself is a STate-OWned Company (BUMN) where The Republic of Indonesia through the Government of REpublic of Indonsia/Ministry of State-Owned Enterprises owns all of the shares, or 100% of the PTPN III shares. As suchm Republic of Indonesia is the final holding entity of the Company.

Information in graphic form of PTPN III as main shareholder of the Company is given hereinbelow.

Struktur Pemegang Saham Utama PTPN X
Structure of PTPN X Shreholder

Komposisi Kepemilikan Saham PTPN III Sebagai Pemegang Saham Utama PTPN X
Composition of PTPN III shares ownership as the Main Shareholder of PTPN X

Hak dan Wewenang Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dimiliki Perseroan, hak RUPS adalah:

1. Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, khusus bagi pemegang saham Perseroan, dengan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara.
2. Memperoleh informasi material mengenai Perseroan secara tepat waktu, terukur, dan teratur.
3. Menerima pembagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntukkan bagi pemegang saham/pemilik modal dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya.
4. Meminta penyelenggaran RUPS dalam hal Direksi lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan.

Rights and Obligations of General Meeting of Shareholders

Based on Code of Corporate Governance owned by the Company, rights of GMS are:

1. To attend and vote in a GMS, exclusively for the Company's shareholders, undre provision that one shares shall give one voting right to the holder.
2. To obtain information regarding the Company in a timely, measurable, and orderly manner.
3. Received the Company's profit shares which were reserved for Shareholders/ Capital Owners in the form of dividends, and the remaining proceeds of liquidation, in proportion to the number of shares/ equity owned.
4. To request for GMS to be convened in the event the Board of Directors are negligent in convening the Annual GMS.

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

5. Memperoleh penjelasan lengkap mengenai informasi keuangan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan Perseroan yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. Memperoleh penjelasan tentang penerapan GCG di lingkup Perseroan.

Wewenang RUPS adalah:
1. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS,
2. Memberikan persetujuan mengenai:
   a. Perubahan jumlah modal
   b. Perubahan anggaran dasar
   c. Rencana penggunaan laba
   d. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Perseroan
   e. Investasi dan pembiayaan jangka panjang
   f. Kerjasama Perseroan
   g. Pembentukan anak perusahaan atau penyertaan
   h. Pengalihan aktiva
3. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris.
4. Mengangkat dan memberhentikan Direksi.
5. Menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Menetapkan auditor eksternal berdasarkan usulan yang diterima dari Dewan Komisaris.
7. Mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
8. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Jenis, Peran, Fungsi dan Wewenang Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS sebagai organ Perseroan merupakan wadah para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS merupakan organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang.

5. To obtain a comprehensive explanation on financial information or other matters related to the Company as contained in the Annual Report and Financial Statement.
6. To obtain explanation regarding implementation of GCG in Company environment.

The authority of the GMS are:
1. To give authorization with substitution rights to an individual or legal entity to represent it in the GMS,
2. To give approval on:
   a. Capital amendment
   b. Amendment of articles of association
   c. Profit utlilization plan
   d. Merger, consolidation, take over and separation including dissolution of the Company,
   e. Investment and long term financing
   f. Company joint cooperation
   g. Subsidiary company or participation formation
   h. Transfer of assets
3. To appoint and discharge the Board of Dirrectors.
4. To appoint and discharge the Board of Directors.
5. To evaluate the performance of Board of Commissioners and Board of Directors.
6. To appoint external auditor based on suggestion received from Board of Commissioners
7. To approve Company's Long Term Planning (RJPP) and Work and Company's Budget Planning
8. To determine the remuneration for Board of Commisisoners and Board of Directors.

Type, Role, Function and Authorization of General Meeting of Shareholdrs.

GMS as Company's organ is a vessel for the Shareholders to make important decision in relation to the capital investment made in the Company, with due observance to provisions of articles of association and prevailing laws and regulations. Pursuant to Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company, GMS constitute Company's organs that owns authority that is not given to the Board of Directors or Board of Commissioners according to limitation as governed in such Law and.or Company's Articles of Association. Decisions made in the GMS must be for the best interest of the Company in long term.

RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

Perseroan memiliki 2 (dua) jenis RUPS, yaitu RUPS Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan secara reguler di setiap tahunnya, dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yang dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dianggap diperlukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. RUPST diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Dalam RUPST ditetapkan terkait pertanggungjawaban laporan tahunan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, perhitungan tahunan, dan/atau pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Hasil Keputusan RUPS Tahun 2015 dan Tindak Lanjut serta Realisasi oleh Manajemen

Di sepanjang tahun 2015, Perseroan menyelenggarakan 3 (tiga) kali RUPS Tahunan. Hasil keputusan RUPS tahun 2015 dan realisasi oleh Manajemen Perseroan di tahun 2016 adalah sebagai berikut,

GMS and/or Shareholdrs may not interfere with the duty, function and authority of the Board of Directors and Board of Commissioners without prejudice to the authority of the GMS to exercise its rights according to the Company's Articles of Association and laws and regulations, includint to proceed with replacement or discharge of member of Board of Commissioners and Board of Directors.

The Company has 2 type of GMS, which are Annual GMS (AGMS) which is convened regulary each year, and Extraordinary GMS (EGMS) which can be convened at any given time if deemed necessary by the Board of Directors and/or Board of Commissioners and/or Shareholders. AGMS is convened every year at least 6 (six) months after the end of company's accounting period. The responsibilities of annual report by the Board of Commissioners and Directors, annual calculation, and/or approval of Company's Work Plan and budget are determined during the AGMS.

Resolution of 2015 AGMS and Follow up and Realization oby the Management.

During 2015, the Company has convened 3 (three) Annual GMS. The resolution of 2015 AGMS and realization by the Company's Management in 2016 are as follows:

Hasil Keputusan RUPS 13 Januari 2015 *Resolution of 13 January 2015 AGMS*	Realisasi dan Tindak Lanjut *Realization and Follow Up*
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2015 serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2015 *The stipulation of the Company's Work and Budget Plan (CWBP) in 2015 and the Work and Budget Plan for the Partnership and Environmental Promotion Program in 2015*	Perseroan sudah bisa melaksanakan operasional dan keuangan perusahaan sesuai RKAP yang sudah disahkan *The Limited Liability Company (LLC) is able to implement the company's operation and financing according to the stipulated (CWBP)*
Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2015 *Determination of the Operational Aspect Indicator for the Company's Health Level Assessment in 2015*	Penentuan dasar angka tingkat kesehatan dari angka target kinerja 2015 *Determination of the base scores of the health level of the performance target score in 2015*
Penetapan Kontrak Manajemen Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2015 *Determination of the Management Contract of the Board of Directorsandthe Board of Commissionersin 2015*	Target kinerja Direksi dan Komisaris sudah ditetapkan *The performance target of the Board of Directorsand the Board of Commissioners has been determined*
Penetapan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2015 *Determination of the Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissionersin 2015*	KPI Dewan Komisaris sudah ditetapkan *KPIs for the Board of Commissionershave been determined*

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris, untuk melakukan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya perubahan program dan alokasi anggaran investasi maksimal 10% dari plafon RKAP dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS *Granting the power of authority to the Board of Commissionersto give an approval when there are actions which may cause a change in the program and the investment budget allocation with a maximum of 10% from the CWBP's budget ceiling which shall be held accountable in the GMS.*	Apabila ada anggaran investasi yang melebihi maksimal 10%, direksi akan meminta persetujuan komisaris yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan kepada RUPS *If the investment budget is more than the maximum of 10%, the Board of Directors shall request an approval from the Commissioners which later shall be held accountable in the GMS.*
Pengukuhan diberlakukannya Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER 13/ MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN *The enactment of the Minister of State-Owned Enterprise RegulationNumber: PER 13/ MBU/09/2014 regardingthe Guideline for the Use of State-Owned Enterprises' (SOE) Fixed Assets*	Dalam pengelolaan aset perseroan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER 13/MBU/09/2014 *The management of LLC's assets is based on the Minister of State-Owned Enterprise RegulationNumber: PER 13/MBU/09/2014*
Persetujuan sebagai *avalist* dalam rangka penarikan dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dari perbankan sebesar Rp. 325 miliar dan dari PKBL BUMN Lain sebesar Rp. 425 miliar *The approval as the avalist in the withdrawal of the Food and Energy Security's (FES) credit fund from the banks with an amount of Rp325 billion and from other SOE's PKBL with an amount of Rp425 billion*	Sudah dilakukan sesuai persetujuan RUPS *Completed and approved by GMS*
Persetujuan penghapusbukuan dan pemindahan aset tetap milik PTPN X *The approval of the writing off and the transfer of PTPN X's fixed assets*	Sudah dilakukan sesuai persetujuan RUPS *Completed and approved by GMS*
Persetujuan pengagunan aset dalam rangka penarikan kredit investasi dan modal kerja, termasuk plafon LC impor sebesar Rp. 2,7 triliun dengan sumber pendanaan dari perbankan atau sumber dana lainnya *The approval for the asset collateral for the withdrawal of the investment and work capital credit including the import LC ceiling at Rp2.7 trillion derived from banks and other sources of fund.*	Sudah dilakukan sesuai persetujuan RUPS *Completed and approved by GMS*
Persetujuan mengkonversi dana talangan pada operasional PG *Bone Caming* dan Takalar sebesar Rp. 868,1 miliar menjadi penyertaan saham pada New Co PG BCT *The approval for the bailout fund for the PG Bone Caming and Takalar's operation at Rp868.1 billion to become the share inclusion for the New Co PG BCT*	Belum dilaksanakan dikarenakan New Co belum berdiri *Has not been implemented since the New Co has not been established*
Hasil Keputusan RUPS 18 Mei 2015 *Resolution of 18 May January 2015 AGMS*	Realisasi dan Tindak Lanjut *Realization and Follow Up*
Persetujuan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014 serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014. *The approval forAnnual Report on the condition and the running of the LLC's Accounting Year in 2014 and the Report for the Implementation of the Tasks of the Board of Commissionersin 2014 Accounting Year and the stipulation of the LLC's Financial Report for the 2014 Accounting Year and the full discharge and release of responsibility (volledig acquit et de charge) for the Board of Directorsand the Board of Commissioners for the managing and monitoring activities conducted during the 2014 Accounting Year.*	Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014 sudah disahkan *the Company's Financial Report for 2014 Accounting Year, and theMonitoring Task Report for the Board of Commissionersfor 2014 Accounting Year has been stipulated*

Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2014 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014. *The stipulation of the Annual Report for the Partnership and Environmental Promotion Program (PKBL)in 2014 Accounting Year as well as the full discharge and release of responsibility (volledig acquit et de charge) for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the managing and monitoring activities conducted during the 2014 Accounting Year.*	Direksi dan Komisaris sudah mendapatkan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) dalam menjalankan perseroan selama tahun 2014 *The Board of Directorsand the Board of Commissioners has received full discharge and release of responsibility (volledig acquit et de charge) of the LLC's operation for 2014*
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2014. *Determination of the Net Profit Use in 2014 Accounting Year.*	Direksi dan Komisaris sudah mendapatkan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) dalam menjalankan PKBL perseroan selama tahun 2014 *The Board of Directors and the Board of Commissioners has received full discharge and release of responsibility (volledig acquit et de charge) of the PKBL's operation for 2014*
Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2015 dan Pemberian Tantiem Tahun Buku 2014 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan. *Determination of the Salary/Honorarium, Allowance and Benefits for 2015 and the granting of Tantiem in 2014 Accounting Year for the Board of Directorsand the Board of Commissioners.*	Penggunaan laba bersih sebesar Rp.23.126.381.760 ditetapkan 20% untuk dividen dan 80% sebagai cadangan umum *The use ofnet profit at Rp23,126,381,760 was set at 20% for dividends and 80% as the general reserve*
Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan public Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2015. *The approval forthe appointment of Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young) Public Accountant Office to conduct an audit for the Company's Financial Report and the PKBL's Financial Report for 2015 Accounting Year.*	KAP yang mengaudit tahun buku 2015 adalah Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) *Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) audited the CWB for 2015 Accounting Year*
Hasil Keputusan RUPS LB 10 Juni 2015 *Resolution of 28 December 2015 AGMS*	Realisasi dan Tindak Lanjut *Realization and Follow Up*
Mengangkat Sdr Muhammad Hanugroho sebagai anggota dewan direksi *Appointed Mr. Muhammad Hanugroho as the member ofthe Board of Directors*	Perubahan Susunan Direksi dari sebelumnya 4 Direksi menjadi 5 Direksi *A change in the structure of the Board of Directors from 4 to 5 members of the Board of Directors*
Hasil Keputusan RUPS 28 Desember 2015 *The Result of GMS on 28 December 2015*	Realisasi dan Tindak Lanjut *The Realization and the Follow-up*
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2016 serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2016 *The stipulation of CWBP for 2016 and the PKBL's WBP for 2016*	Perseroan sudah bisa melaksanakan operasional dan keuangan perusahaan sesuai RKAP yang sudah disahkan *The LLC has successfully applied the company's operation and finance according to the approved CWBP*
Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2016 *Determination of the Operational Aspect Indicator for the Company's Health Level Assessment in 2016*	Penentuan dasar angka tingkat kesehatan dari angka target kinerja 2015 *Determination of the base scores of the health level of the performance target score in 2016*

Penetapan Kontrak Manajemen Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2016 *Determination of the Management Contract of the Board of Directors and the Board of Commissioners in 2016*	Target kinerja Direksi dan Komisaris sudah ditetapkan *The performance target of the Board of Directors and the Board of Commissioners has been determined*
Penetapan *Key Performance Indicators* (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2016 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham *Determination of the Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners in 2016 stated in the Contract Management in 2016 between the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Shareholders*	KPI Dewan Komisaris sudah ditetapkan *KPIs for the Board of Commissioners have been determined*
Penetapan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2016 *Determination of the Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners in 2016*	Apabila ada anggaran investasi yang melebihi maksimal 10%, direksi akan meminta persetujuan komisaris yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan kepada RUPS *If the investment budget is more than the maximum of 10%, the Board of Directors shall request an approval from the Commissioners which later shall be held accountable in the GMS.*
Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris, untuk melakukan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya perubahan program dan alokasi anggaran investasi maksimal 10% dari plafon RKAP dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS *Granting the power of authority to the Board of Commissioners to give an approval when there are actions which may cause a change in the program and the investment budget allocation with a maximum of 10% from the CWBP's budget ceiling which shall be held accountable in the GMS.*	Perseroan sudah bisa melaksanakan operasional dan keuangan perusahaan sesuai RKAP yang sudah disahkan *The LLC has successfully applied the company's operation and finance according to the approved CWBP*
Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN *The enactment of the Minister of State-Owned Enterprise Regulation Number: PER-09/MBU/07/2015 regarding the SOE's Partnership and Environmental Promotion Program (PKBL)*	Dalam pelaksanaan program PKBL perseroan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 *The implementation of PKBL Program is based on the Minister of State-Owned Enterprise Regulation Number: PER-09/MBU/07/2015*
Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) pada BUMN Jo. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) pada BUMN *The enactment of the Minister of State-Owned Enterprise Regulation Number: PER-01/MBU/2011 regarding the Implementation of Good Corporate Governance in the SOE in conjunction with the Minister of State-Owned Enterprise Regulation Number: PER-09/MBU/2012 regarding the amendment of the Minister of State-Owned Enterprise Regulation Number: PER-01/MBU/2011 regarding the Implementation of Good Corporate Governance in the SOE*	Dalam pelaksanaan program GCG perseroan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) pada BUMN Jo. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/2012 *The implementation of GCG program is based on the Minister of State-Owned Enterprise Regulation Number: PER-01/MBU/2011 regarding the Implementation of Good Corporate Governance in the SOE in conjunction with the Minister of State-Owned Enterprise Regulation Number: PER-09/MBU/2012*

Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN kepada BUMN dan Perseroan Terbatas Jo. PER-11/MBU/09/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN kepada BUMN dan Perseroan Terbatas *The enactment of the Minister of State-Owned Enterprise Regulation Number: PER-08/MBU/06/2015 regarding the Guideline for the Reporting of Realization of the Use of State Capital Share Additional Fund to the SOE and LLC in conjunctionwith PER-11/MBU/09/2015 regarding the amendment ofthe Minister of State-Owned Enterprise Regulation Number: PER-08/MBU/06/2015 regarding the Guideline for the Reporting of Realization of the Use of State Capital Share Additional Fund to the SOE and LLC.*	Dalam pelaksanaan PMN perseroan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN kepada BUMN dan Perseroan Terbatas Jo. PER-11/MBU/09/2015 *The implementation of state capital share is based on the Minister of State-Owned Enterprise Regulation Number: PER-08/MBU/06/2015 regarding the Guideline for the Reporting of Realization of the Use of State Capital Share Additional Fund to the SOE and LLCin conjunction with PER-11/MBU/09/2015*
Persetujuan prinsip sebagai *avalist* dalam rangka penarikan dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dari perbankan sebesar Rp325 miliar dan dari PKBL BUMN Lain sebesar Rp425 miliar *The approval for the principle of the avalist of the withdrawal of the Food and Energy Security's (FES) credit fund from the banks with an amount of Rp325 billion and from other SOE's PKBL with an amount of Rp425 billion*	Sudah dilakukan sesuai persetujuan RUPS *Completed and approved by GMS*
Persetujuan prinsip penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset tetap milik PTPN X senilai Rp5,13 miliar *The approval of the principles of the writing off and the transfer of PTPN X's fixed assets at Rp5.13 billion*	Sudah dilakukan sesuai persetujuan RUPS *Completed and approved by GMS*
Persetujuan pengagunan aset milik PTPN X dalam rangka penarikan kredit investasi dan modal kerja, termasuk *plafond* LC impor sebesar Rp2,5 triliun dengan sumber pendanaan dari perbankan atau sumber dana lainnya *The approval for the asset collateral for the withdrawal of the investment and work capital credit including the import LC ceiling at Rp2.5 trillion derived from banks and other sources of fund.*	Sudah dilakukan sesuai persetujuan RUPS *Completed and approved by GMS*

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2016

Pada tahun 2016, Perseroan menyelenggarakan RUPS sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:

1. RUPS Tahunan tanggal 14 Juni 2016
2. RUPSLB 15 Juli 2016
3. RUPSLB 1 September 2016
4. RUPS 3 November 2016 (Sirkuler)

The Convention of 2016 AGMS

Implementation of GMS 2016. In 2016, the Company held 4 (four) GMS, namely as follows:

1. Annual GMS on June 14, 2016
2. EGMS on July 15, 2016
3. EGMS on September 01, 2016
4. GMS on November 3, 2016 (Circular)

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Hasil keputusan dan realisasi serta tindak lanjut yang dilakukan di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Results of the decisions, realization and follow-up conducted in 2016 are as follows:

Hasil Keputusan RUPS 14 Juni 2016 *The Result of GMS on 14 June 2016*	Realisasi dan Tindak Lanjut *The Realization and the Follow-up*
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015 *The approval for Annual Report on the condition and the running of the LLC's Accounting Year in 2015 and the Report for the Implementation of the Tasks of the Board of Commissioners in 2015 Accounting Year*	Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015 sudah disahkan *The LLC's Annual Report for2015 Accounting Year, and the Monitoring Task Report for the Board of Commissionersfor 2015 Accounting Yearhave been stipulated*
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, serta pengesahan penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan Tahun Buku 2014 dan 2013 *The stipulation of the LLC's Financial Report for the 2015 Accounting Year and the full discharge and release of responsibility (volledig acquit et de charge) for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the managing and monitoring activities conducted during the 2015 Accounting Year as well as the restatement of the financial report in 2014 and 2013Accounting Year*	Direksi dan Komisaris sudah mendapatkan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) dalam menjalankan perseroan selama tahun 2015 *The Board of Directors and the Board of Commissioners has received full discharge and release of responsibility (volledig acquit et de charge) of the LLC's operation for 2015*
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2015, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015 *The approval forAnnual Report andthe stipulation ofFinancial Report of the PKBL for2015 Accounting Year, as well as the full discharge and release of responsibility (volledig acquit et de charge) for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the managing and monitoring of PKBL conducted during the 2015 Accounting Year*	Direksi dan Komisaris sudah mendapatkan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) dalam menjalankan PKBL perseroan selama tahun 2015 *The Board of Directors and the Board of Commissioners has received full discharge and release of responsibility (volledig acquit et de charge) of the PKBL's operation for 2015*
Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2015 *The approval forthe Use of LLC's profit for2015 Accounting Year*	Penggunaan laba bersih sebesar Rp.119.053.128.201 ditetapkan 45% untuk dividen dan 55% sebagai cadangan umum *The use of net profit at Rp.119.053.128.201 was set at 45% for dividends and 55% as the general reserve*
Persetujuan penetapan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2015, gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris, serta tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2016 *The approval forthe determination of the tantiem forthe Board of Directorsand the Board of Commissionersin 2015, the salary ofthe Board of Directorsand honorarium for the Board of Commissioners, and the Allowance and Benefits for the Board of Directors and the Board of Commissioners for 2015*	Penetapan tantiem Direksi dan Komisaris beserta remunerasi sesuai Surat Keputusan 3.00/ SKPTS/28/2016, SK-28/S-MBU/06/2016, S-51/D1-MBU/06/2016 tanggal 30 Juni 2016 *Determination of the tantiem for the Board of Directors and the Board of Commissioners and the remuneration is in accordance with the Decree 3.00/ SKPTS/28/2016, SK-28/S-MBU/06/2016, S-51/D1-MBU/06/2016 dated 30 June 2016*
Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 *The approval for determination of the Public Accountant Office Public Accountant Office to conduct an audit for the Company's Financial Report and the PKBL's Annual Report for 2015 for the Accounting Year that ended on 31 December 2016*	KAP yang mengaudit tahun buku 2016 adalah Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) *Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) audited the CWB for 2016 Accounting Year*

Pengesahan penggunaan dana PMN tahun 2015 *The stipulation of the Use of State Capital Share in 2015*	Penggunaan dana PMN sudah disahkan sesuai ketentuan yang berlaku pada per-11/MBU/09/2015 *The Use of State Capital Share was stipulated according to the applicable terms in per-11/MBU/09/2015*
Hasil Keputusan RUPSLB 15 Juli 2016 *The Result of Extra Ordinary GMS on 15 July 2016*	Realisasi dan Tindak Lanjut *Realization and the Follow-up*
Memberhentikan dengan hormat Sdr Moch Sulton sebagai anggota dewan direksi *Discharged Mr. Moch Sulton as the member of the Board of Directors*	Perubahan Susunan Direksi dari sebelumnya 5 Direksi menjadi 4 Direksi *A change in the structure of the Board of Directors from 5to 4 members of the Board of Directors*
Hasil Keputusan RUPSLB 1 September 2016 *The Result of Extra Ordinary on GMS 1 September 2016*	Realisasi dan Tindak Lanjut *Realization and the Follow-up*
Memberhentikan dengan hormat Sdr Heru Sudibyo, Sdr Susanto Darus dan Sdr Djoko Moeljono sebagai anggota dewan komisaris dan mengangkat Sdr Arvan Rivaldy Rebion Siregar dan Sdr Y.B. Priyatmo Hadi sebagai anggota dewan komisaris *DischargedMr. Heru Sudibyo, Mr. Susanto Darus and Mr. Djoko Moeljono as the members of the Board of Commissioners and appointed Mr. Arvan Rivaldy Rebion Siregar andMr. Y.B. Priyatmo Hadi as the members of the Board of Commissioners*	Perubahan Susunan Komisaris dari sebelumnya 5 Komisaris menjadi 4 Komisaris *A change in the structure of the Board of Commissioners from 5 to 4Commissioners*
Hasil Keputusan RUPS 3 November 2016 (Sirkuler) *The Result of GMS on3 November 2016 (Circular)*	Realisasi dan Tindak Lanjut *Realization and the Follow-up*
Kami menyetujui Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAP-P) Tahun 2016 PT Perkebunan Nusantara X *We approved the Amendment of the CWBP in 2016 for PT Perkebunan Nusantara X*	Pengesahan RKAPP2016 sebagai dasar pelaksanaan operasional perseroan *The stipulation of CWBPP 2016 as the basis of the LLC's operation*
Kami menyetujui Direksi untuk melakukan impor *raw sugar* dan mengolah *raw sugar* *We gave an approval for the Board of Directors to import raw sugar and process raw sugar*	Perseroan telah melakukan impor *raw sugar* sebesar 40.127 ton yang akan diolah Dalam Masa Giling dan Luar Masa Giling *The LLC has imported 40,127 tons of raw sugar which will be process Within and Outside the Grinding Period.*
Kami menyetujui penjualan gula melalui Perum Bulog (*off taker*) dalam rangka stabilisasi harga *We gave an approval for the sale of sugar throughLogistic Affairs public company (off taker) to stabilize the price*	Realiasi Penjualan ke Perum Bulog sebesar Rp666 miliar dengan kuanta sebesar 60.576 ton *The sale to the Logistic Affairs Public Company atRp666 billion with the quantity of 60,576 tons*
Persetujuan lain yang tercantum di dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2016 (Risalah Nomor: RIS-005/XX-K.BUMN/2015) dinyatakan tetap berlaku, kecuali keputusan yang telah diubah dalam Surat Persetujuan ini atau KeputusanlPersetujuan lainnya dari Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara X *The approval for others included in the Minutes of Meeting of the GMS regarding the approval for CWBP and the PKBL WBP in 2016 (Minutes of Meeting Number: RIS-005/XX-K.BUMN/2015) is still valid unless the decision has been changed in the Letter of approval orother approval from the shareholders of the PT Perkebunan Nusantara X*	Keputusan RUPS sesuai Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2016 (Risalah Nomor:RIS-005/XX-.BUMN/2015) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku *The decision of GMS in accordance with the Minutes of Meeting of the GMS regarding the approval for CWBP and the PKBL WBPin 2016 (Minutes of Meeting Number:RIS-005/XX-.BUMN/2015) has been completed in accordance with the applicable regulation*
Dengan adanya persetujuan RKAP-P 2016 ini, maka angka-angka KPI berubah tanpa perubahan komponen *Withthe approval for CWBP-P 2016, the KPI numbers changed without any changes in the components*	Target KPI direksi yang diaudit oleh KAP mengikuti angka Revisi RKAPP 2016 *Target of KPI for the Board of Directors audited by the Public Accountant Office following the revision of numbers in CWBPP 2016*

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memegang peran sebagai organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat atas tindakan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan, serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Susunan dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Tahun 2016

Susunan Dewan Komisaris secara kronologis di sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners hod a role as Company organ with duty of supervision and to provide advice on Board of Directors' action in carrying out the Company management, and to ensure that the Company is in compliance to the Good Corporate Governance Principles.

Composition and Ground of Board of Commissioners Appointment in 2016

Composition of Board of Directos chronologically in 2016 is as follows:

Susunan Dewan Komisaris PTPN X
Periode 1 Januari - 30 Maret 2016

Composition of Board of Directors of PTPN X
For the Period of 1 January - 30 March 2016

Jabatan *Position*	Nama *Name*	Dasar Pengangkatan *Ground of Appointment*	Awal Jabatan *Position Assumede*	Masa Akhir Jabatan *Position Ended*	Periode Jabatan *Position Period*
Komisaris Utama *President Commissioner*	Rudi Wibowo	Keputusan Menteri BUMN No. SK-390/MBU/2013 *Decision of Minister of State-Owned Enterprises No. SK-390/MBU/2013*	13 Oktober 2013 *13 October 2013*	12 Oktober 2018 *12 October 2018*	Ke-1. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris periode (2008-2012) *1st. Previously was a Commissioner for the period of (2008-2012)*
Komisaris *Commissioner*	Djoko Moeljono	Keputusan Menteri BUMN No. SK-390/MBU/2013 *Decision of Minister of State-Owned Enterprises No. SK-390/MBU/2013*	13 Oktober 2013 *13 October 2013*	12 Oktober 2018 *12 Oktober 2018*	Ke-1 *1st*
Komisaris *Commissioner*	Indarto	Keputusan Menteri BUMN No. KEP-80/MBU/2011 *Decision of Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-80/MBU/2011*	30 Maret 2011 *30 March 2011*	29 Maret 2016 *29 March 2016*	Ke-1 *1st*
Komisaris *Commissioner*	Heru Sudibyo	Keputusan Menteri BUMN No. SK-259/MBU/2012 *Decision of Minister of State-Owned Enterprises No. SK-259/MBU/2012*	20 Juli 2012 *20 July 2012*	19 Juli 2017 *19 July 2017*	Ke-1 *1st*
Komisaris *Commissioner*	Susanto Darus	Keputusan Menteri BUMN No. SK-434/MBU/2012 *Decision of Minister of State-Owned Enterprises No. SK-434/MBU/2012*	10 Desember 2012 *10 December 2012*	9 Desember 2017 *9 December 2017*	Ke-1 *1st*

Pada tanggal 31 Maret 2016, pemegang saham melalui RUPS memutuskan untuk melakukan pergantian Dewan Komisaris, yaitu Komisaris Indarto diberhentikan dengan hormat untuk kemudian digantikan oleh Sukardi Rinakit.

on 31st March 2016, the shareholdrs throu GMS decided to replace the Board of Commissioners, where Commissioner Indarto was honorably discharged and the replaced by Sukardi Rinakit.

Susunan Dewan Komisaris PTPN X
Periode 31 Maret - 31 Agustus 2016

Composition of Board of Commissioners of PTPN X
For the Period of 31 March - 31 August 2016

Jabatan *Position*	Nama *Name*	Dasar Pengangkatan *Ground of Appointment*	Awal Jabatan *Position Assumede*	Masa Akhir Jabatan *Position Ended*	Periode Jabatan *Position Period*
Komisaris Utama *President Commissioner*	Rudi Wibowo	Keputusan Menteri BUMN No. SK-390/MBU/2013 *Decision of Minister of State-Owned Enterprises No. SK-390/MBU/2013*	13 Oktober 2013 *13 October 2013*	12 Oktober 2018 *12 October 2018*	Ke-1. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris periode (2008-2012) *1st. Previously was a Commissioner for the period of (2008-2012)*
Komisaris *Commissioner*	Djoko Moeljono	Keputusan Menteri BUMN No. SK-390/MBU/2013 *Decision of Minister of State-Owned Enterprises No. SK-390/MBU/2013*	13 Oktober 2013 *13 October 2013*	12 Oktober 2018 *12 Oktober 2018*	Ke-1 *1st*
Komisaris *Commissioner*	Heru Sudibyo	Keputusan Menteri BUMN No. SK-259/MBU/2012 *Decision of Minister of State-Owned Enterprises No. SK-259/MBU/2012*	20 Juli 2012 *20 Juli 2012*	19 Juli 2017 *19 Juli 2017*	Ke-1 *1st*
Komisaris *Commissioner*	Susanto Darus	Keputusan Menteri BUMN No. SK-434/MBU/2012 *Decision of Minister of State-Owned Enterprises No. SK-434/MBU/2012*	20 Juli 2012 *20 July 2012*	19 Juli 2017 *19 July 2017*	Ke-1 *1st*
Komisaris *Commissioner*	Sukardi Rinakit	Keputusan Menteri BUMN No. SK-73/MBU/2016 *Decision of Minister of State-Owned Enterprises No. SK-73/MBU/2016*	31 Maret 2016 *31 Maret 2016*	30 Maret 2021 *30 Maret 2021*	Ke-1 *1st*

Pemegang saham melalui RUPS kemudian memutuskan untuk kembali melakukan pergantian Dewan Komisaris pada tanggal 1 September 2016, dengan susunan Dewan Komisaris hingga akhir tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Shareholders through GMS thereafter decided to replace the Board of Directors again on 1 September 2016, with composition of Board of Directors up to the end of 2016 as can be seen on the below table

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Susunan Dewan Komisaris PTPN X
Periode 1 September - 31 Desember 2016

Composition of Board of Commissioners of PTPN X
For the Period of 1 September - 31 December 2016

Jabatan *Position*	Nama *Name*	Dasar Pengangkatan *Ground of Appointment*	Awal Jabatan *Position Assumede*	Masa Akhir Jabatan *Position Ended*	Periode Jabatan *Position Period*
Komisaris Utama *President Commissioner*	Rudi Wibowo	Keputusan Menteri BUMN No. SK-390/MBU/2013 tanggal 21 November 2013 *Decision of Minister of State-Owned Enterprises No. SK-390/MBU/2013 dated 21 November 2013*	21 November 2013 *21 November 2013*	20 November 2018 *20 November 2018*	Ke-1 (pertama). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris periode (2008-2012) *1st Previously was a Commissioner for the period of (2008-2012)*
Komisaris *Commissioner*	Sukardi Rinakit	Keputusan Menteri BUMN No. SK-73/MBU/2016 tanggal 31 Maret 2016 *Decision of Minister of State-Owned Enterprises No. SK-73/MBU/2016 dated 31 March 2016*	31 Maret 2016 *31 March 2016*	30 Maret 2021 *30 March 2021*	Ke-1 *1st*
Komisaris *Commissioner*	Y.B. Priyatmo Hadi	Keputusan Menteri BUMN No. SK-207/MBU/2016 tanggal 1 September 2016 *Decision of Minister of State-Owned Enterprises No. SK-207/MBU/2016 dated 1 September 2016*	1 September 2016 *1 September 2016*	31 Agustus 2021 *31 August 2021*	Ke-1 *1st*
Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Arvan Rivaldy Rebion Siregar	Keputusan Menteri BUMN No. SK-207/MBU/2016 tanggal 1 September 2016 *Decision of Minister of State-Owned Enterprises No. SK-207/MBU/2016 dated 1 September 2016*	1 September 2016 *1 September 2016*	31 Agustus 2021 *31 August 2021*	Ke-1 *1st*

*Profil singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam Laporan Dewan Komisaris.

*Brief profile of each Member of the Board of Commissioners can be viewed in the Board of Commissioners Profile section in the Report of Board of Commissioners.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Dewan Komisaris Perseroan memiliki pedoman kerja yang tercantum dalam *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi yang telah diperbaharui serta disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. XX-SURKP/16.067 tanggal 19 Agustus 2016. *Board Manual* ini antara lain mengatur Dewan Komisaris tentang:

1. Prinsip dasar hubungan kerja Dewan Komisaris & Direksi
2. Ketentuan umum jabatan anggota Dewan Komisaris

Work Guidelines of the Baord of Commissioners

In carrying out its function, Board of Commissioners has Work Guidelines as set out in the Board Manual of the Board of Commissioners and Directors as renewed and legalised through the Decision Letter of Board of Board of Directors No. No. XX-SURKP/16.067 dated 19 August 2016. This Board Mabnual among others regulates the Board of Commissioners regarding:

1. Basic principe of work relation between Board of Commissioners and Board of Directors
2. General Provisions of member of Board of Commissioners position

3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris
4. Pengisian jabatan Dewan Komisaris yang lowong
5. Keadaan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Dewan Komisaris
6. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris
7. Rangkap jabatan
8. Fungsi Dewan Komisaris
9. Program pengenalan Perseroan
10. Program Pembelajaran Berkelanjutan anggota Dewan Komisaris
11. Tugas, wewenang, hak dan kewajiban Dewan Komisaris
12. Rapat Dewan Komisaris
13. Benturan kepentingan
14. Tanggung jawab hukum
15. Penilaian Dewan Komisaris
16. Organ pendukung

3. Appointment and Discharge of member of Board of Commissioners
4. The replacement of Board of Commissioner vacant position
5. The state of Company that do not have any member of Board of Commissioners
6. Resignation of member of Board of Commissioners
7. Dual position
8. Function of Board of Commissioners
9. Company Introduction Program
10. Sustainable Learning Program for member of Board of Commissioners
11. Duty, authority, right and obligation of the Board of Commissioners
12. Meeting of Board of Commissioners
13. Conflict Interest
14. Legal Responsibility
15. Assessment of the Board of Commissioners
16. Supporting Organ

Ketentuan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Provision on Supervisory Function of the Board of Commissioners

Board of Commissioners is responsible and hs the authority to supervise the policy of management, general management activity, either regarding Company or Company's business carried by the Board of Directors and to provide advice to the Board of Directors, including supervision on Company's Long TERm Plan, Company's Work Plan and Budget, provision of Articles of Association and AGMS resolution, according to the prevailing laws and regulations, for the interest of the Company and in accordance with the Company's objective and purpose.

2 (Dua) Tingkatan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris / **2 (Two) Function Level of Board of Commissioners Supervisory**

Level Performance	Fungsi pengawasan dimana Dewan Komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta memberikan masukan kepada RUPS. *Supervisory function where the Board of Commissioners will give guidance and direction to the Board of Directors and to give advice to the AGMS.*
Level Conformance	Pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahap selanjutnya untuk memastikan nasihat telah dijalankan serta dipenuhinya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku. *The execution of supervisory activity for the next stage shall be to to ensure that the advice are carried out and that the provisions of laws and regulations and Company's Aeticles of Association have been met.*

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Beberapa pedoman umum fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris adalah:

1. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak atas nama Dewan dan tidak dapat bertindak sebagai individu.
2. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan; pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi.
3. Pengawasan dilaksanakan pada keputusan-keputusan yang sudah diambil (*ex post facto*) maupun keputusan-keputusan yang akan diambil (*preventive* basis).
4. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan atas informasi dari Direksi dan RUPS, tetapi juga dapat berdasarkan informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan dengan mencakup semua aspek bisnis dan aspek operasional Perseroan.

Several general guidelines of supervision function carried out by the Board of Commissioners are:

1. To conduct supervisory, the Board of Commissioners shall act on behalf of the Board and may not act individually.
2. To conduct supervisory the Board of Commisisoners may not interfere in the operational decision making. Board of Commissioner may make decision on matters determined in Articles of Association or laws and regulations; such decision making shall be done in its function as supervisor, so that the decisio n of operational activities shall remain as responsibility of the Board of Directors.
3. Supervisory shall be done on decisions made (ex post facto) or decisions to be taken (preventive basis)
4. Supervisory execution is not only based on information from the Board of Directors and AGMS, but also based on information obtained from other source which can be accounted for.
5. Supervisory is not carried out only by approving or disapproving actions that needs approval of the Board of Commissioners but supervisory carried out includes all business and operation aspects.

Hubungan Kerja dengan Direksi

Hubungan kerja antara Dewan komisaris dan Direksi dilakukan sesuai dengan prinsip keterbukaan dan saling menghormati. Dewan Komisaris menghormati tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam mengelola Perseroan. Demikian pula Direksi menghormati tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan.

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi dapat bersifat formal ataupun informal. Hubungan kerja yang bersifat formal dilakukan dalam rangka tugas dan tanggung jawab masing-masing; sementara hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan tetapi tidak dapat digunakan sebagai prosedur formal sebelum diputuskan dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Working Relation with the Board of Directors

Working relation with the Board of Commissioners and Board of Directors are carried according to the principle of transparency and mutual respect. Board of Commissioners shall respect the responsibility and authority of the Board of Directors in managing the Company. Likewise, the Board of Directorsshall respect the responsibility and authority of the Board of Commissioners in conducting supervisory and providing advices on Company management policy.

Working relation between Board of Commissioners and Board of Directors can be either formal or informal. The formal relation will be taken in the course of carrying their respective duties and responsibilities; while informal working relation may be taken but it cannot be used as formal procedure before it is decided by a joint meeting between Board of Commissioners and Board of Directors .

Informasi-informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris dari Direksi adalah untuk kepentingan Perseroan dan atas sepengetahuan Komisaris Utama. Selain rapat rutin yang dilakukan secara berkala di setiap bulannya, rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dapat dilakukan sesuai kepentingan yang mendesak.

Kualifikasi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS harus memenuhi kualifikasi dan kriteria yang sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007, Undang-undang No. 19 tahun 2003, Permen BUMN PER-01/MBU/2011, POJK 33/POJK.04/2014, dan Anggaran Dasar Perseroan. *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi yang dimiliki Perseroan telah mengatur kualifikasi dan kriteria dalam pembahasan terkait ketentuan umum jabatan anggota Dewan Komisaris.

Selain berintergritas dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum, individu yang dinominasikan dan ditetapkan sebagai Dewan Komisaris tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan sebuah perusahaan dinyatakan pailit; dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Kriteria pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perseroan juga melarang anggota Dewan Komisaris memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN lain, BUMD, badan usaha milik swasta; serta jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk meminimalisir adanya potensi benturan kepentingan.

Information needed by Board of Commissioners and Board of Directors shall be for the interest of the Company and under the knowledge of President Commissioner. In addition to the regular periodic meeting held monthly, meeting between Board of Commissioners and Board of Directors can be held according to any urgent need.

Qualification and Criteria of Member of Board of Commissioners

Each member of Board of Commissioners as stipulated based on GMS shall have to fulfill the qualification and criteria in accordance with Law No. 40 of 20117, Law No. 19 of 2003, Regulation of Minister of State -Owned Enterprises PER-01/MBU/2011, POJK 33/POJK.04/2014, and Company's Articles of Association. Board of Manual of Board of Commissioners and Board of Directors owned by the Company to regulate the qualification and ciretria in the discussion related to the general provision of the position of Board of Commissioners's member.

Aside form having integrity and competent in carrying out legal acts, the individual nominated and appointed as Board of Commissioners may not be member of Board of Directors/ and/or member of Board of Commissioners who has been stated as guilty of causing bankrupty in a company; and has never been sentenced due to anyu criminal acts that causes loss to the state's financial and/ or related to any financial sector.

Criteria of Board of Commissioner appointment wil be made in consideration of integrity, dedication and understanding company management issues related to one of the managerial function, has sufficient knowledge in the Company's business sector and can provide sufficient time to carry its responsibility and other requirements based on laws and regulations.

The Company also forbid member of Board of Commissioners to hold a dual position as Board of Directors in other State-Owned Enterprises, Local Government-Owned Enterprises, Private business; and other position according to laws and regulations, caretaker of a political party and/or a legislative candidate/member . This policy constitute part of Company's commitment to minize potential conflict interest.

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Komisaris Independen

Komisaris Independen memiliki peran obyektifikasi dalam pengambilan keputusan di tubuh Dewan Komisaris. Faktor independensi dari Komisaris Independen diharapkan dapat mengurangi benturan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen Perseroan, utamanya karena fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui pendapat yang independen. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 secara khusus telah mengatur keberadaan Komisaris Independen dalam Perseroan.

Adapun kriteria Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan di atas diantaranya:

1. Berasal dari luar Perseroan;
2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
3. Tidak memiliki saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
4. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
5. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan memiliki 1 (satu) orang Komisaris Independen, yaitu Arvan Rivaldy Rebion Siregar yang telah diangkat pada RUPS Tahun 2016 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-207/MBU/2016 tanggal 1 September 2016.

Independent Commissioner

Independent Commissioner has objective role in decision makin in the Board of Commissioners. The indenpendency factor of the inedpendent commissioner is expected to reduce any conflict interest between shareholders and Company's management, mainly because of the supervisory function may be carried through an independent opinion. Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 and Regulation of OJK No. 33/POJK.04/2014 have specifically regulate the existence of Independent Commissioner in he Company.

The criterif of an independent Commissionar as regulated in the regulation are among others as follows:

1. Comes form outside of the Company;
2. Not a person working or having authority and responsibilty to plan, lead, control or supervise activities in the Companies for the last 6 (six) months, except for the re-appointment as the Company's Independent Commissioner for the next period;
3. Does not own and shares in the Company, either directly or indirectly;
4. Does not have any affiliation relation with the Company, Board of Commissioners, Board of Directors, or Company's shareholdrs; and
5. Does not have any business relation directly or indirectly related to the Company's business .

The Company has 1 (one) Independent Commissioner, Arvan Rivaldy Rebion Siregar which has been appointed by the Annual GMS of 2016 and has been legalized through Decision Letter of Minister of State-Owned Enterprises No. SK-207/MBU/2016 dated 1 September 2016.

Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Tanggal Pengangkatan *Date of Appointment*	Periode Menjabat *Position Period*	Riwayat Menjabat Sebagai Dewan Komisaris PTPN X *History as Board of Commissioner of PTPN X*
Arvan Rivaldy Rebion Siregar	1 September 2016	Ke-1 *1st*	Belum pernah menjabat sebagai Dewan Komisaris PTPN X *Has never been serving as Board of Commissioner of PTPN X*

Nominasi, Pengangkatan dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi yang dimiliki Perseroan telah mengatur nominasi, pengangkatan dan masa jabatan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1. Pengangkatan anggota Dewan komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
2. Anggota Dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS
3. Anggota Dewan komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang saham Seri A dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
4. Masa Jabatan anggota Dewan komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pembagian Tugas dan Wewenang Antar Anggota Dewan Komisaris

Agar tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing Komisaris dapat dilaksanakan secara optimal dan bersinergi, maka dilakukan pembagian kerja dan tugas para Komisaris sebagai berikut:

1. Komisaris Utama, Rudi Wibowo, membidangi tugas-tugas yang berkaitan dengan:
   a. Koordinasi di lingkup Dewan Komisaris.
   b. Tata kelola, pengembangan Perseroan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
   c. Manajemen keuangan dan investasi.
2. Komisaris, Sukardi Rinakit, membidangi tugas-tugas yang berkaitan dengan:
   a. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia Perseroan.
   b. Manajemen risiko.
   c. Pengawasan atas pengelolaan entitias anak, PT Energi Agro Nusantara.
   d. Hubungan organisasi, kelembagaan dan lingkungan.
3. Komisaris, Y.B. Priyatmo Hadi, membidangi tugas-tugas yang berkaitan dengan:
   a. Teknologi produksi komoditas di lingkup Perseroan.
   b. Teknologi pengolahan komoditas di lingkup Perseroan.
   c. Manajemen produksi Perseroan.

Nomination, Appointment and Period of Service of Board of Commissioners

Board Manual of the Board of Commissioners and Board of Directors owned by the Company hs regulated all nomination, appointment and period ofservice of Board of Commisisoners as follows:

1. Appointment of member of Board of Commissioners is not at the same time of the appointment of the Board of Directors.
2. Member of Board of Commissioners will be appointed and discharged by the AGMS
3. Member of Board of Commissioneers is appointe from candidates suggested by holder of Series A shares and such candidacy is binding to the GMS.
4. Period of serving for member of Board of Commissionar is stipulated at 5 (five) years and thereafter may be reappointed for another 1(one) service period.

Distribution of Duties and Authorities Between Member of Baord of Commisisoners

In order that the duties, authorities and obligations of respective commissioners may be carried out optimally and with synergy, so work and duties of the Commissioners will be distributed as follows:

1. President Commissioner, Rudi Wibowo, will be in charge of duties related to:
   a. Coordination in the scope of Board of Commissioner
   b. Governance, development of Company and Corporate Social Responsibility
   c. Financial Management and investment.
2. Commissioner, Sukardi Rinakit, will be in charge of duties related to:
   a. Management and development of human resources of the Company.
   b. Risk management
   c. Supervisory on management of subsidiary company, PT Energi Agro Nusantara.
   d. Organizational relation, institutional and environmental.
3. Commissioner, Y.B. Priyatmo Hadi, will be in charge of duties related to:
   a. Technology of commodity production in the company environment.
   b. Technology of commodity management in the Company environment.
   c. Company production management.

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

d. Pengawasan atas pengelolaan entitas anak, PT Nusantara Medika Utama dan PT Dasaplast Nusantara.

4. Komisaris, Arvan Rivaldy Rebion Siregar, membidangi tugas-tugas yang berkaitan dengan:
   a. Sistem Informasi Manajemen Perusahaan.
   b. Metode perencanaan dan alokasi sumber daya.
   c. Pemasaran hasil produksi dan pengembangan industri hilir.
   d. Pengelolaan aset Perseroan.
   e. Pengawasan atas pengelolaan entitas anak, PT Mitra Tani Dua Tujuh.
   f. Membidangi Komite Audit.

Program Pengenalan Perseroan

Dengan beragamnya latar belakang anggota Dewan Komisaris dimungkinkan belum mengenal Perseroan secara mendetail. Oleh karena itu program pengenalan mengenai Perseroan sangat penting untuk dilaksanakan dengan tujuan bahwa anggota Dewan Komisaris dapat secepatnya memberikan kontribusi terhadap kinerja Perseroan.

Program Pengenalan meliputi pelaksanaan Prinsip-Prinsip GCG oleh Perseroan; gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya; audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit. Program Pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan dimana program tersebut dilaksanakan. Tanggungjawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada di Sekretaris Perusahaan.

Di tahun 2016, Perseroan melaksanakan program pengenalan Perseroan kepada 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris baru, yaitu Komisaris, Sukardi Rinakit; Komisaris, Y.B. Priyatmo Hadi; dan Komisaris Independen, Arvan Rivaldy Rebion Siregar.

Program Peningkatan Kompetensi

Program peningkatan kompetensi, atau yang dikenal di lingkup Perseroan sebagai Program Pembelajaran

d. Supervisoru on subsidiary company management, PT Nusantara Medika Utama and PT Dasaplast Nusantara.

4. Commissioner, Arvan Rivaldy Rebion Siregar, will be in charge of duties related to:
   a. Company's Information Management System.
   b. Planning methid and allocation of resources,
   c. Marketing of production output and development of downstream industry
   d. Management of Company's asssets
   e. Supervisory and management of subsidiary company, PT Mitra Tani Dua Tujuh.
   f. To be in charge of Audit Committee

Company Introduction Program

Due to the Board of Commissioners' various background, it is possible that member of Board of Commissioner has does not understand the Company in detail. Therefore inforduction program in related to the Company is very important to be conducted with intention that member of Board of Commissioners can immediately give contribution to the Company's performance.

Introduction Program will cover GCG Principles implementation; illustration regarding the Company related to the objective, nature, and scope of activities, financial and operational performance, strategy, short term and long term work plan, competitivenes position, risk and other strategic issues; internal and external audit, system and policy of internal control, including Audit Committee. Company Introduction Program can be in the form of presentation, meeting, visit to the Company and document studies or other program deemed suitable by the Company where such program is implemented. The responsibility to hold such introduction program will be on the Company Secretary.

In 2016, the Company conducted Company Introduction Program for 3 (three) new Board of Commissioners member, such as Commissioner , Sukardi Rinakit; Commissioner, Y.B. Priyatmo Hadi; and Independent Commissioner, Arvan Rivaldy Rebion Siregar.

Competency Improvement Program

Competency improvement progra, or known as Company scope and Sustainable Learning Program is being carried

Berkelanjutan dilakukan oleh setiap anggota Dewan Komisaris agar senantiasa dapat mengikuti serta memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perseroan dan pengetahuan-pengetahuan lain terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Program Pembelajaran Berkelanjutan Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

by each member of Board of Commissioners so that they may always follow and renew the information regarding the updated development of the Company's business activities and other knowledge in relation to the execution of Board of Commissioners' duty. The Sustainable Learning Program for Member of Commissioners along 2016 was as follows:

Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	Kegiatan *Activity*	Tanggal *Date*	Tempat *Venue*	Penyelenggara *Organizer*
Rudi Wibowo (Komisaris Utama) *(President Commissioner)*	Seminar Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan PKBL Melalui Perbaikan Kinerja Program Kemitraan, Bina Lingkungan, dan Mitra Binaan *Seminar to improve accountability of PKBL Management Thorugh Partnership Work Program Performance Improvement, Environment Development and Developed Partner*	14 Mei 2016	Hyatt Regency, Bandung	LPMP

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau berdasarkan kebutuhan. Dalam menyelenggarakan rapat yang sesuai dengan hal-hal yang akan dibicarakan, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris.

Di sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris menyelenggarakan 23 kali rapat, dimana 12 kali rapat merupakan Rapat Internal Dewan Komisaris, dan 11 rapat lainnya merupakan Rapat Gabungan yang mengundang Direksi. Berikut risalah Rapat Dewan Komisaris dan kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat.

Board of Commissioners Meeting

Board of Commissioners meeting is convened periodically, at least once a montu or based on needs, In holding the meeting according to the issues to be disussed, Board of Commissioners will convene maating of Board of Commissioners with Board of Directors to as for the Board of Directors' and/or other staffs under the Board of Directors with acknowledgement of Board of Directors, to attend such Board of Commissioners Meeting.

During 2016, Board of Commisioners had convened 23 times meetingm where 12 times of them ware Board of Commissioner Internal Meeting, and 11 other meetings are joint meeting where the Board of Directors are invited. Below is summary of Board of Commissoners Meeting, and their attendance in the meeting.

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris **Summary of Internal Meeting of Board of Commissioners**

Tanggal *Date*	Tempat *Venue*	Agenda Rapat *Meeteng Agenda*	Peserta Rapat *Meeting Attendees*
23 Januari 2016 *January 23, 2016*	Makassar	1. Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Internal Dewan Komisaris bulan Desember 2015 (*Pending Issues*); *Follow up on Meeting Conclusion of Board of Commissioner Internal Meeting for December 2015 (Pending Issues);* 2. Membahas Hasil Kunjungan Dewan Komisaris ke PG BCT; *Discussing Board of Commissioners' Visiting Result to PT PG BCT;* 3. Membahas Rencana Kegiatan Dewan Komisaris Tahun 2016; *Discussing Board of Commissioner Work Plan for 2016;* 4. Lain-lain. *Etc.*	1. Komisaris Utama, Rudi Wibowo *President Commissioner, Rudi Wibowo* 2. Komisaris, Djoko Moeljono *Commissioner, Djoko Moeljono* 3. Komisaris, Indarto *Commissioner, Indarto* 4. Komisaris, Heru Sudibyo *Commissioner, Heru Sudibyo* 5. Komisaris, Susanto Darus *Commissioner, Susanto Darus* 6. Sekretaris Dewan Komisaris *Secretary of Board of Commissioners*
13 Februari 2016 *February 13, 2016*	LO PTPN X Jakarta	1. Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Internal Dewan Komisaris bulan Januari 2016 (*Pending Issues*); *Follow up on Meeting Conclusion of Board of Commissioner Internal Meeting for January 2016 (Pending Issues);* 2. Membahas Rekomendasi Dewan Komisaris atas Rencana Perubahan Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara X; *Discussing Recommendation from Board of Commissioners on the Amendment Plan of PT Perkebunan Nusantara X Organization Structure;* 3. Membahas Rekomendasi Dewan Komisaris atas Rencana Penghapusan Aset dan penambahan Peyertaan Modal pada Anak Perusahaan; *Discussing Recommendation from Board of Commissioners on he Plan to write off company's asset and Increment of Capital injection to the Subsidiary Company* 4. Lain-lain. *Etc.*	1. Komisaris Utama, Rudi Wibowo *President Commissioner, Rudi Wibowo* 2. Komisaris, Djoko Moeljono *Commissioner, Djoko Moeljono* 3. Komisaris, Indarto *Commissioner, Indarto* 4. Komisaris, Heru Sudibyo *Commissioner, Heru Sudibyo* 5. Komisaris, Susanto Darus *Commissioner, Susanto Darus* 6. Sekretaris Dewan Komisaris *Secretary of Board of Commissioners*
7 Maret 2016 *March 7, 2016*	Kantor Pusat Perseroan, Surabaya *Company Head Office, Surabaya*	1. Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Internal Dewan Komisaris bulan Februari 2016 (*Pending Issues*); *Follow up on Meeting Conclusion of Board of Commissioner Internal Meeting for February 2016 (Pending Issues);* 2. Membahas Persetujuan Perpanjangan, Penambahan dan Perubahan Fasilitas KMK serta *Supply Chain Financing Eksisting* PT Perkebunan Nusantara X Tahun 2016; *Discussing Renewal Approval of Additional and Amendment of KMK facility and Existing Supply Chian Financing of PT Perkbenunan Nusantanra 2016;* 3. Lain-lain. *Etc.*	1. Komisaris Utama, Rudi Wibowo *President Commissioner, Rudi Wibowo* 2. Komisaris, Djoko Moeljono *Commissioner, Djoko Moeljono* 3. Komisaris, Indarto *Commissioner, Indarto* 4. Komisaris, Heru Sudibyo *Commissioner, Heru Sudibyo* 5. Komisaris, Susanto Darus *Commissioner, Susanto Darus* 6. Sekretaris Dewan Komisaris *Secretary of Board of Commissioners*

Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris **Summary of Internal Meeting of Board of Commissioners**

Tanggal *Date*	Tempat *Venue*	Agenda Rapat *Meeteng Agenda*	Peserta Rapat *Meeting Attendees*
8 April 2016 *April 8, 2016*	Jakarta	1. Program Pengenalan Dewan Komisaris Baru; *Introduction Program to New member of Board of Directors;* 2. Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Internal Dewan Komisaris bulan Maret 2016 (*Pending Issues*); *Follow up on Meeting Conclusion of Board of Commissioner Internal Meeting for March 2016 (Pending Issues);* 3. Membahas Pembagian Tugas-tugas Dewan Komisaris; *To discuss distribution of duties for the Baord of Commissioners;* 4. Penetapan Komite Audit PTPN X; *Stipulation of Audite Committee of PTPN X;* 5. Rancangan Kunjungan ke Unit Kerja di Lingkungan PTPN X dan Anak Perusahaan; *Visit Plan to Working Unit in PTPN X dan Subsidiary Companies;* 6. Rancangan Kajian Aspek-aspek Kritis Kinerja PTPN X; *Study Plan for critical aspects of PTPN X performance;* 7. Lain-lain. *Etc.*	1. Komisaris Utama, Rudi Wibowo *President Commissioner, Rudi Wibowo* 2. Komisaris, Djoko Moeljono *Commissioner, Djoko Moeljono* 3. Komisaris, Heru Sudibyo *Commissioner, Heru Sudibyo* 4. Komisaris, Susanto Darus *Commissioner, Susanto Darus* 5. Komisaris, Sukardi Rinakit *Commissioner, Sukardi Rinakit* 6. Sekretaris Dewan Komisaris *Secretary of Board of Commissioners*
13 Mei 2016 *May 13, 2016*	Jakarta	1. Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Internal Dewan Komisaris bulan April 2016 (*Pending Issues*); *Follow up on Meeting Conclusion of Board of Commissioner Internal Meeting for April 2016 (Pending Issues);* 2. Membahas Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 (*Audited*); *Discussing response from Board of Commisioners on Financial Statement for the Accounting period of 2015 (Audited);* 3. Rancangan Kunjungan ke Unit Kerja di Lingkungan PTPN X dan Anak Perusahaan; *Visit Plan to Working Unit in PTPN X dan Subsidiary Companies;* 4. Lain-lain. *Etc.*	1. Komisaris Utama, Rudi Wibowo *President Commissioner, Rudi Wibowo* 2. Komisaris, Djoko Moeljono *Commissioner, Djoko Moeljono* 3. Komisaris, Heru Sudibyo *Commissioner, Heru Sudibyo* 4. Komisaris, Susanto Darus *Commissioner, Susanto Darus* 5. Komisaris, Sukardi Rinakit *Commissioner, Sukardi Rinakit* 6. Sekretaris Dewan Komisaris *Secretary of Board of Commissioners*
23 Juni 2016 *June 23, 2016*	Yogyakarta	1. Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Internal Dewan Komisaris bulan Mei 2016 (*Pending Issues*); *Follow up on Meeting Conclusion of Board of Commissioner Internal Meeting for May 2016 (Pending Issues);* 2. Membahas Rekomendasi Dewan Komisaris atas Rencana Penghapusan Aset yang terkena Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN); *Discussing Recommendation of Board of Commissioner on the Plan to write off assets that is applied with State Capital Participation* 3. Membahas Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2016 PT Perkebunan Nusantara X; *Discussing response from Board of Commissioners on Management Report for the 1st quarter of 2016 of PT Perkebunan Nusantara X;* 4. Lain-lain. *Etc*	1. Komisaris Utama, Rudi Wibowo *President Commissioner, Rudi Wibowo* 2. Komisaris, Djoko Moeljono *Commissioner, Djoko Moeljono* 3. Komisaris, Heru Sudibyo *Commissioner, Heru Sudibyo* 4. Komisaris, Susanto Darus *Commissioner, Susanto Darus* 5. Komisaris, Sukardi Rinakit *Commissioner, Sukardi Rinakit* 6. Sekretaris Dewan Komisaris *Secretary of Board of Commissioners*

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris **Summary of Internal Meeting of Board of Commissioners**

Tanggal *Date*	Tempat *Venue*	Agenda Rapat *Meeteng Agenda*	Peserta Rapat *Meeting Attendees*
29 Juli 2016 *July 29, 2016*	Kantor Pusat Perseroan, Surabaya *Company Head Office, Surabaya*	1. Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Internal Dewan Komisaris bulan Juni 2016 (*Pending Issues*); *Follow up on Meeting Conclusion of Board of Commissioners Internal Meeting on June 2016 (Pending Issues);* 2. Membahas Laporan Komite Audit; *Discussing Audite Committeee report;* 3. Membahas Rekomendasi Komisaris atas Rencana Inbreng Aset ke PT NMU; *Discussing Recommendation of Board of Commissioner on Asset Inbreng Plan to PT NMU* 4. Membahas Rencana Kunjungan Lapang Dewan Komisaris, Kajian Dekom dan Finalisasi *Code of Conduct*; *To disuss Board of Commissioners plan to visit the site, Board of Commissioners Study and Finalization of Code of Conduct;* 5. Lain-lain. *Etc.*	1. Komisaris Utama, Rudi Wibowo *President Commissioner, Rudi Wibowo* 2. Komisaris, Djoko Moeljono *Commissioner, Djoko Moeljono* 3. Komisaris, Heru Sudibyo *Commissioner, Heru Sudibyo* 4. Komisaris, Susanto Darus *Commissioner, Susanto Darus* 5. Komisaris, Sukardi Rinakit *Commissioner, Sukardi Rinakit* 6. Sekretaris Dewan Komisaris *Secretary of Board of Commissioners*
5 Agustus 2016 *August 5, 2016*	Jogjakarta Plaza Hotel Yogyakarta	1. Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Internal Dewan Komisaris bulan Juli 2016 (*Pending Issues*); *Follow up on Meeting Conclusion of Board of Commissioner Internal Meeting for July 2016 (Pending Issues);* 2. Membahas Kajian Laporan Hasil Kajian oleh Tim Pengkaji; *Discussing study of Report from the Study Team;* 3. Membahas Isu-Isu Strategis; *Discussing Strategic issues;* 4. Lain-lain. *Etc.*	1. Komisaris Utama, Rudi Wibowo *President Commissioner, Rudi Wibowo* 2. Komisaris, Djoko Moeljono *Commissioner, Djoko Moeljono* 3. Komisaris, Heru Sudibyo *Commissioner, Heru Sudibyo* 4. Komisaris, Susanto Darus *Commissioner, Susanto Darus* 5. Komisaris, Sukardi Rinakit *Commissioner, Sukardi Rinakit* 6. Sekretaris Dewan Komisaris *Secretary of Board of Commissioners*
16 September 2016 *September 16, 2016*	GQ Hotel Yogyakarta	1. Program Pengenalan Dewan Komisaris Baru; *Introduction Program for New member of Board of Commissioners;* 2. Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Internal Dewan Komisaris bulan Agusrus 2016 (*Pending Issues*); *Follow up on Meeting Conclusion of Board of Commissioner Internal Meeting for August 2016 (Pending Issues);* 3. Rekomendasi Dewan Komisaris atas Rencana Penghapusan Aset yang terkena Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN); *Discussing Recommendation of Board of Commissioner on the Plan to write off assets that is applied with State Capital Participation* 4. Membahas Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2016 PTPN X; *Discussing response from Board of Commissioners on Management Report for the 2nd quarter of 2016 of PT Perkebunan Nusantara X;* 5. Lain-lain. *Etc.*	1. Komisaris Utama, Rudi Wibowo *President Commissioner, Rudi Wibowo* 2. Komisaris, Sukardi Rinakit *Commissioner, Djoko Moeljono* 3. Komisaris, Y.B. Priyatmo Hadi *Commissioner, Y.B. Priyatmo Hadi* 4. Komisaris Independen, Arvan Rivaldy Rebion Siregar *Independent Commissioner, Arvan Rivaldy Rebion Siregar* 5. Sekretaris Dewan Komisaris *Secretary of Board of Commissioners*

Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris **Summary of Internal Meeting of Board of Commissioners**

Tanggal *Date*	Tempat *Venue*	Agenda Rapat *Meeteng Agenda*	Peserta Rapat *Meeting Attendees*
10 Oktober 2016 *October 10, 2016*	Jakarta	1. Membahas Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN sampai dengan Triwulan III Tahun 2016; *Discussing response from Board of Commissioners on Management Report for the 3rd quarter of 2016;* 2. Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Internal Dewan Komisaris bulan September 2016 (*Pending Issues*); *Follow up on Meeting Conclusion of Board of Commissioner Internal Meeting for September 2016 (Pending Issues);* 3. Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris PTPN X Tahun 2017; *Discussing Work Plan and PTPN X Board of Commissioner Budget for 2017* 4. Lain-lain. *Etc.*	1. Komisaris Utama, Rudi Wibowo *President Commissioner, Rudi Wibowo* 2. Komisaris, Sukardi Rinakit *Commissioner, Djoko Moeljono* 3. Komisaris, Y.B. Priyatmo Hadi *Commissioner, Y.B. Priyatmo Hadi* 4. Komisaris Independen, Arvan Rivaldy Rebion Siregar *Independent Commissioner, Arvan Rivaldy Rebion Siregar* 5. Sekretaris Dewan Komisaris *Secretary of Board of Commissioners*
11 November 2016 *November 11, 2016*	Plaza Hotel Yogyakarta	1. Tindak lanjut Kesimpulan Rapat Internal Bulan Oktober 2016; *Follow up on Meeting Conclusion of Board of Commissioner Internal Meeting on October 2016 (Pending Issues);* 2. Membahas Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2016; *Discussing response from Board of Commissioners on Management Report for the 3rd quarter of 2016* 3. Lain-lain *Etc.*	1. Komisaris Utama, Rudi Wibowo *President Commissioner, Rudi Wibowo* 2. Komisaris, Sukardi Rinakit *Commissioner, Djoko Moeljono* 3. Komisaris, Y.B. Priyatmo Hadi *Commissioner, Y.B. Priyatmo Hadi* 4. Komisaris Independen, Arvan Rivaldy Rebion Siregar *Independent Commissioner, Arvan Rivaldy Rebion Siregar* 5. Sekretaris Dewan Komisaris *Secretary of Board of Commissioners*
9 Desember 2016 *December 9, 2016*	GQ Hotel Yogyakarta	1. Tindak lanjut Kesimpulan Rapat Internal Bulan November 2016; *Follow up on Meeting Conclusion of Board of Commissioner Internal Meeting for November 2016 (Pending Issues);* 2. Membahas Rencana Kerja Dewan Komisaris; *Discussing Board of Commissioners Work Plan;* 3. Membahas Isu-isu Strategis dan Permasalahan PT Perkebunan Nusantara X; *Discussing Strategic Issues and issues in PT Perkebunan Nusantara X;* 4. Lain-lain. *Etc.*	1. Komisaris Utama, Rudi Wibowo *President Commissioner, Rudi Wibowo* 2. Komisaris, Sukardi Rinakit *Commissioner, Djoko Moeljono* 3. Komisaris, Y.B. Priyatmo Hadi *Commissioner, Y.B. Priyatmo Hadi* 4. Komisaris Independen, Arvan Rivaldy Rebion Siregar *Independent Commissioner, Arvan Rivaldy Rebion Siregar* 5. Sekretaris Dewan Komisaris *Secretary of Board of Commissioners*

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Daftar Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Internal Dewan Komisaris

List of Attendance of the Board of Commissioners at Internal Meeting of Board of Commissioners

Tanggal *Date*	Dewan Komisaris *Board of Commissioners*								Alasan Ketidakhadiran *Reason for not attending*
	Rudi Wibowo Komisaris Utama *President Commissioner*	Djoko Moeljono Komisaris *Commissioner*	Indarto Komisaris *Commissioner*	Heru Sudibyo Komisaris *Commissioner*	Susanto Darus Komisaris *Commissioner*	Sukardi Rinakit Komisaris *Commissioner*	Y.B. Priyatmo Hadi Komisaris *Commissioner*	Arvan Rivaldy Rebion Siregar Komisaris Independen *Independent Commissioner*	
23 Januari 2016	v	v	v	v	v				-
13 Februari 2016	v	v	v	v	v				-
7 Maret 2016	v	v	v	v	v				-
8 April 2016	v	v		v	v	v			-
13 Mei 2016	v	v		v	v	v			-
23 Juni 2016	v	v		v	v	v			-
29 Juli 2016	v	v		v	v	v			-
5 Agustus 2016	v	v		v	v	v			-
16 September 2016	v					v	v	v	-
10 Oktober 2016	v					v	v	v	-
11 November 2016	v					v	v	v	-
9 Desember 2016	v					v	v	v	-

: Belum/tidak lagi menjabat
Not yet/not serving anymore

v = hadir / x = berhalangan hadir
v = attending / x = Unable to attend

Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Summary of Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors

Tanggal	Tempat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
29 Januari 2016 *January 29, 2016*	Surabaya	1. Membahas Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Bulan Desember 2015; *Discussing Follow Up on Joint Meeting Conclusion of the Board of Commissioners and Board of Directors for December 2015;* 2. Membahas Perkembangan Kinerja Operasional dan Keuangan Bulan Januari2016; *Discussing Development of Operational Performance and Financial of January 2016:* 3. Membahas Perkembangan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2015; *Discussing Development of State Capital Participation Fund Utilization of 2015;*	Dewan Komisaris dan Direksi *Board of Commissioners and Board of Directors*
7 Maret 2016 *March 7, 2016*	Surabaya	1. Membahas Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Bulan Januari 2016; *Discussing Follow Up on Joint Meeting Conclusion of the Board of Commissioners and Board of Directors for January 2016;* 2. Membahas Persiapan dan Rancangan Implementasi RKAP Tahun 2016 pada Unit-Unit Bisnis PTPN X, termasuk Anak Perusahaan; *Discussion preparation and Implementation Plan of RKAP of 2016 on PTPN X Buisness Units, inculding Subsidiary Companies;* 3. Membahas Laporan Unaudit Tahun 2015; *Discussing Unaudited Financial Statement of 2015;* 4. Membahas Perkembangan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN); *Discussing Development of State Capital Participation Fund Utilization*	Dewan Komisaris dan Direksi *Board of Commissioners and Board of Directors*
1 April 2016 *April 1, 2016*	Jakarta	1. Membahas Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Bulan Februari 2016; *Discussing Follow Up on Joint Meeting Conclusion of the Board of Commissioners and Board of Directors for February 2016;* 2. Membahas Persiapan dan Strategi Giling Tahun 2016; *Discussing Preparation of Grinding Strategy for 2016* 3. Membahas Laporan Keuangan Tahun 2015 (*Audited*); *Discussing 2015 Financial Statement (Audited)* 4. Membahas Perkembangan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN); *Discussing Development of State Capital Participation Fund Utilization*	Dewan Komisaris dan Direksi *Board of Commissioners and Board of Directors*

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Summary of Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors

Tanggal	Tempat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
29 April 2016 *29 April 2016*	Jakarta	1. Membahas Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Bulan Maret 2016; *Discussing Follow Up on Joint Meeting Conclusion of the Board of Commissioners and Board of Directors for March 2016;* 2. Membahas Situasi dan Perspektif Ekonomi Makro Pergulaan (harga, produksi dan perdagangan) baik Nasional maupun Internasional Tahun 2016; *Discussing Situation and Macro Economic Perspective of Sugar (price, production and trade) Either Nationally of Internationally for 2016;* 3. Membahas Laporan Keuangan Tahun 2015 (*Audited*) dalam rangka persiapan RUPS Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015; *Discussing 2015 Financial Statement (Audited) in the course of GMS preparation, to approve the Financial Statement for 2015 Accounting Period;* 4. Membahas Progres Perkembangan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN); *Discussing Development of State Capital Participation Fund Utilization*	Dewan Komisaris dan Direksi *Board of Commissioners and Board of Directors*
31 Mei 2016 *31 May 2016*	Jember	1. Membahas Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Bulan April 2016; *Discussing Follow Up on Joint Meeting Conclusion of the Board of Commissioners and Board of Directors for April 2016;* 2. Membahas Persiapan Giling, Persiapan Tanam Tembakau Tahun 2016 dan Prognosa Produksi Tahun 2016; *Discussing Preparation of Grinsing, Preparation of Tobacco Planting for the year of 2016 and Production Prognosis in 2016;* 3. Membahas Progress dan Persiapan Impor *Raw Sugar*; *Discussing Progress and Praparation of Raw Sugar Importing;* 4. Membahas Progress Perkembangan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN); *Discussing Development of State Capital Participation Fund Utilization*	Dewan Komisaris dan Direksi *Board of Commissioners and Board of Directors*
14 Juni 2016 *14 June 2016*	Jakarta	Membahas Persiapan RUPS Tutup Buku Tahun 2015; *Discussing Preparation of GMS for closing of 2015 Accounting Period;*	Dewan Komisaris dan Direksi *Board of Commissioners and Board of Directors*
29 Juli 2016 *29 July 2016*	Surabaya	1. Membahas Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Bulan Juli 2016; *Discussing Follow Up on Joint Meeting Conclusion of the Board of Commissioners and Board of Directors for July 2016;* 2. Membahas Tata Kelola Direksi dan Organisasi Korporasi terkait Perampingan BoD; *Discussing Corporate Directors and Organization Governance in relation to BoD downsizing;* 3. Membahas Laporan Manajeman Semester I Tahun 2016; *Discussing Management Report for the 1st quarter of 2016;*	Dewan Komisaris dan Direksi *Board of Commissioners and Board of Directors*

Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Summary of Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors

Tanggal	Tempat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
21 September 2016 *21 September 2016*	Surabaya	1. Membahas Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Bulan Juli 2016; *Discussing Follow Up on Joint Meeting Conclusion of the Board of Commissioners and Board of Directors for August 2016;* 2. Membahas Kinerja Operasional dan Keuangan PT Perkebunan Nusantara X sampai dengan Bulan Juli dan Agustus 2016; *Discussing Operational and Financial Performance of PT Perkebunan Nusantara X until July and August 2016;* 3. Membahas Prognosa Tahun 2016 dan Langkah-langkah Mengatasi Permasalahan Tahun 2016 (tindak lanjut Raker tanggal 19 Agustus 2016); *Discussing 2016 Prognosos and Steps to be taken in Dealing with 2016 Issues (Follow up of working meeting dated 19 August 2016);*	Dewan Komisaris dan Direksi *Board of Commissioners and Board of Directors*
31 Oktober 2016 *31 October 2016*	Surabaya	1. Membahas Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Bulan September 2016; *Discussing Follow Up on Joint Meeting Conclusion of the Board of Commissioners and Board of Directors for September 2016;* 2. Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Perkebunan Nusantara X Tahun 2017; *Discussing PT Perkebunan Nusantara X Work Plan and Budget of PT Perkebunan Nusantara X for the year of 2017;* 3. Membahas Laporan Manajemen PT Perkebunan Nusantara X Triwulan III Tahun 2016; *Discussing PT Perkebunan Nusantara X Management Report for the 3rd Quarter of 2016;* 4. Membahas Rencana Pengadaan Barang Investasi untuk Operasional Giling Tahun 2017 yang Proses Pengadaannya akan dilaksanakan mulai tahun 2016; *Discussing Investment Goods Procurement Planning for Gringind Operation in 2017 which the procurement process will be started in 2015;* 5. Membahas Progres Perkembangan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN); *Discussing Development of State Capital Participation Fund Utilization;*	Dewan Komisaris dan Direksi *Board of Commissioners and Board of Directors*
25 November 2016 *25 November 2016*	Surabaya	1. Membahas Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Bulan Oktober 2016; *Discussing Follow Up on Joint Meeting Conclusion of the Board of Commissioners and Board of Directors for October 2016;* 2. Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Perkebunan Nusantara X Tahun 2017 (setelah dibahas dengan *Holding*); *Discussing PT Perkebunan Nusantara X Work Plan and Company Budgetfor the year 2017 (Upon discussion with the Holding);* 3. Membahas Kinerja Operasional dan Keuangan PT Perkebunan Nusantara X Bulan Oktober 2016; *Discussing PT Perkebunan Nusantara X Operational and Financial Performance for the month of October 2016;* 4. Membahas Progres Perkembangan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN); *Discussing Development of State Capital Participation Fund Utilization;*	Dewan Komisaris dan Direksi *Board of Commissioners and Board of Directors*
29 Desember 2016 *29 December 2016*	Jakarta	Evaluasi kinerja unit-unit kerja, subsidiaries, dan konsolidasi perusahaan tahun 2016 serta perspektif tahun 2017; *Performance Evaluation ofWorking Units, subsidiaries, and Company Consolidation for the yar of 2016 and perspective of 2017;*	

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Daftar Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Gabungan dengan Direksi

List of Attendance of the Board of Commissioners at the Joint Meeting with the Board of Directors.

Tanggal *Date*	Dewan Komisaris *Board of Commissioners*								Alasan Ketidakhadiran *Reason for not attending*
	Rudi Wibowo Komisaris Utama *President Commissioner*	Djoko Moeljono Komisaris *Commissioner*	Indarto Komisaris *Commissioner*	Heru Sudibyo Komisaris *Commissioner*	Susanto Darus Komisaris *Commissioner*	Sukardi Rinakit Komisaris *Commissioner*	Y.B. Priyatmo Hadi Komisaris *Commissioner*	Arvan Rivaldy Rebion Siregar Komisaris Independen *Independent Commissioner*	
29 Januari 2016	v	v	v	v	v				-
7 Maret 2016	v	v	v	v	v				-
1 April 2016	v	v	v	v	v	v			-
29 April 2016	v	v	v	v	v	x			-
31 Mei 2016	v	v		v	v	x			-
14 Juni 2016	v	v		v	v	x			-
29 Juli 2016	v	v		v	v	x			-
21 September 2016	v					x	x	v	-
31 Oktober 2016	v					x	v	v	-
25 November 2016	v					x	v	x	-
29 Desember 2016	v					v	x	x	-

: Belum/tidak lagi menjabat
Not yet/not serving anymore

v = hadir / x = berhalangan hadir
v = attending / x = Unable to attend

Rekapitulasi Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat

Recapitulation of Board of Commissioners Meeting Attendance

Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	Jumlah Wajib Rapat *Number of Compulsory*	Jumlah Kehadiran *Number of Attendance*	% Kehadiran *% of Attendance*
Rudi Wibowo (Komisaris Utama/ President Commissioner)	11	11	100,00%
Sukardi Rinakit (Komisaris/ Commissioner)	9	2	22,22%
Y.B. Priyatmo Hadi (Komisaris/ Commissioner)	4	2	50,00%
Arvan Rivaldy Rebion Siregar (Komisaris Independen/ Independent Commissioner)	4	2	50,00%
Djoko Moeljono (Komisaris/ Commissioner)	7	7	100,00%
Indarto (Komisaris/ Commissioner)	4	4	100,00%
Heru Sudibyo (Komisaris/ Commissioner)	7	7	100,00%
Susanto Darus (Komisaris/ Commissioner)	7	7	100,00%
Rata-rata *Average*			100,00%

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2016

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran selama tahun 2016 sesuai dengan rencana kerja adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Rutin
   a. Rapat Internal Dewan Komisaris
      Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 12 kali. Selain risalah rapat, hasil dari rapat Dewan Komisaris juga memberikan penetapan: surat persetujuan, rekomendasi, saran dan laporan.
   b. Pertemuan Rutin Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi, dimana selama tahun 2016 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 11 kali. Dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi, Dewan Komisaris memberikan masukan atau saran-saran mengenai Kegiatan Operasional Perusahaan (Unit Usaha Gula dan Tembakau), Organisasi/SDM, Keuangan, Informasi Teknologi, Anak Perusahaan/Penyertaan, Penugasan pada PG Bone Camming dan Takalar, Penerapan GCG, Temuan Hasil Pemeriksaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta lain-lain yang dianggap perlu.

The Report for the Implementation of Tasks in 2016

The implementation of activities and budget for 2016 was according to the workplan:

1. Routine activities
   a. The Board of Commissioners' Internal Meeting
      In 2016, the Board of Commissioners held the Board of Commissioners'internal meeting 12 times and the meeting resulted in the Minutes of Meeting and the Determination of approval letters, recommendation, suggestions and reports.
   b. The regular joint meetings between the Board of Commissioners (BOC) and the Board of Directors (BOD) in 2016 were held by the Board of Commissioners 10 (ten) times. In the joint meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors, the Board of Commissioners gave suggestions and advices on the Company's Operational Activities (for the Sugar and Tobacco Business Unit), Organization/ HR, Finance, Information Technology, Subsidiary/ Capital Shares, Assignment for PG Bone Camming and Takalar, the implementation of GCG, findings of the examination result and The Partnership and Environmental Promotion Program and other matters deemed necessary.

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

c. Kunjungan Kerja/lapangan ke Unit Usaha
Kegiatan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke unit usaha selama tahun 2016 dilakukan secara bersama-sama juga dilakukan dengan pembagian tugas agar efektif dan efisien.
Kegiatan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke berbagai unit usaha Perseroan, yaitu Unit Usaha Gula dan Tembakau.
d. Di tahun 2016 Dewan Komisaris telah menyampaikan hasil analisa dan klarifikasi atas laporan perkembangan operasional Perseroan serta tanggapan dan saran atas laporan dimaksud kepada Pemegang Saham yang dituangkan dalam Tanggapan, Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I, II, III dan Tahunan.
e. Pada tahun 2016, Dewan Komisaris telah menghadiri RUPS tentang Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan PTPN X Tahun Buku 2015 dan Pengesahan RKAP Tahun 2016.

2. Kegiatan Non Rutin (Khusus)
Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapabilitas untuk menunjang tugas fungsi dan kewajiban Dewan Komisaris, selama tahun 2016 Dewan Komisaris telah mengikuti/menghadiri Kegiatan-kegiatan akademis praktis dan undangan dan mengadakan pertemuan/rapat khusus dengan beberapa Direksi untuk membahas hal-hal yang cukup strategis.

c. Visit to the Business Unit
The visit activities of the Board of Commissioners to the business units in 2016 were conducted along with the division of tasks for the sake of effectiveness and efficiency.The Board of Commissioners visited the company's business units which were the Sugar and Tobacco Business Unit.
d. In 2016,the Board of Commissioners had delivered the result of the analysis and the clarification on the progress report of the company's operation and the responses and suggestions of the said reports to the shareholders of PTPN X stated in the Response, Opinion, and Suggestions of the Board of Commissioners on the Quarter I, II, III Management Report and the Annual Report.
e. In 2016, the Board of Commissioners attended the GMS regarding the stipulation of and the approval of PTPN X's Financial Report for 2015 Accounting Year and the stipulation of 2016 CWBP.

2. Non-routine activities (special)
In developing and improving the capability to support the functions and the obligations of the Board of Commissioners, in 2016, PTPN X's Board of Commissioners attended pragmatic academic activities and invitations as well as holding meetings/special meeting with a few members of the Board of Directors to discuss strategic matters.

Evaluasi dan Penilaian Terhadap Kinerja Dewan Komisaris

Board Manual Charter Dewan Komisaris secara khusus mengatur evaluasi dan penilaian kinerja terhadap Dewan Komisaris, dimana Indikator Pencapaian Kinerja atau *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris. KPI merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi KPI kepada Pemegang Saham.

Evaluation and Assessment on the Board of Commissioners Performance

The Board Manual Charter of the Board of Commissioners specifically regulates evaluation and performance appraisal of the Board of Commissioners, where the Key Performance Indicator (KPI) of the Board of Commissioners is determined through the GMS based on proposal from the Board of Commissioners. KPI is a measure of an assessment of successful implementation of supervisory tasks and responsibilities, and advice by the Board of Commissioners. The Board of Commissioners shall submit quarterly report on progress of KPI realization to Shareholders.

Alur Evaluasi dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
The Flow of Evaluation and Performance Assessment of the Board of Commissioners

Evaluasi kinerja Dewan Komisaris didasarkan pada target kinerja secara kolektif yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan target kinerja perorangan yang ditetapkan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris setiap tahun. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris merupakan sarana bagi peningkatan efektivitas peran Dewan Komisaris dan kontribusi masing-masing anggota Dewan Komisaris kepada Perseroan. Di samping itu, hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang saham untuk penunjukkan kembali sebagai anggota Dewan Komisaris.

Performance evaluation of the Board of Commissioners is based on collective performance targets set by the Board of Commissioners and individual performance targets set by each member of the Board of Commissioners annually. Result of performance evaluation of the Board of Commissioners is a means to increase the effectiveness of members of the Board of Commissioners' roles and contribution to the Company. In addition, the performance evaluation results of members of the Board of Commissioners are one of the considerations for Shareholders to reappoint the same members to the Board of Commissioners.

DIREKSI

Direksi merupakan organ Perseroan yang berfungsi untuk memimpin dan mengelola usaha demi tercapainya tujuan Perseroan. Di bawah pengawasan Dewan Komisaris, Direksi bertanggung jawab untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai dan meningkatkan pencapaian kinerja Perseroan pada tahun berjalan.

Susunan dan Dasar Pengangkatan Direksi Tahun 2016

Komposisi Direksi ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. Di tahun 2016, terdapat perubahan nomenklatur organisasi Perusahaan, dari 5 (lima) direktorat menjadi 4 (empat) direktorat. Kronologi susunan dan komposisi Direksi di sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is an Organ of the Company that serves to lead and manage the business in order to achieve the objectives of the Company. Under the supervision of the Board of Commissioners, the Board of Directors is responsible for maintaining the performance achieved and improving Company's performance in the current year.

Composition and Element of Appointment of the Directors 2016

Composition of the Board of Directors is established in such a way as to enable an effective, timely and prompt decision-making, and to act independently. In 2016, there was a change of nomenclature on Company organization, from 5 (five) directorates into 4 (four) directorates. Chronology of composition and structure of the Board of Directors in 2016 is as follows:

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Susunan Direksi PTPN X
Periode 1 Januari - 15 Juli 2016

Composition Board of Directors PTPN X
The Period of 1 January-15 July2016

Jabatan *Position*	Nama *Name*	Dasar Pengangkatan *Decrees for Appointment*	Awal Jabatan *Start of Term*	Masa Akhir Jabatan *End of Term*	Periode Jabatan *Number ofTerm*
Direktur Utama *President Director*	Subiyono	Keputusan Menteri BUMN No. SK-282/MBU/2013 tanggal 13 Juni 2013 *The Decree of the State-Owned Enterprises Minister No. SK-282/ MBU/2013 dated 13 June 2013*	13 Juni 2013 *13 June 2013*	12 Juni 2018 *12 June 2018*	Ke-2 *Second*
Direktur Produksi *Production Director*	Tarsisius Sutaryanto	Keputusan Menteri BUMN No. SK-52/MBU/2013 tanggal 1 Februari 2013 *The Decree of the State-Owned Enterprises Minister No. SK-52/ MBU/2013 dated 1 January 2013*	1 Februari 2013 *1 February 2013*	31 Januari 2018 *31 January 2018*	Ke-2 *Second*
Direktur Keuangan *Finance Director*	Muhammad Hanugroho	Keputusan Menteri BUMN No. SK-91/MBU/06/105 dan Surat Keputusan Direksi PTPN III (Persero) No. KPJAK/Hold/SKPTS/R/03/2015 tanggal 10 Juni 2015 *The Decree of the State-Owned Enterprises Minister No. SK-91/ MBU/06/105 and Decree of Board of Directors PTPN III (Persero) No. KPJAK/ Hold/SKPTS/R/03/2015 dated 10 June 2015*	10 Juni 2015 *10 June 2015*	9 Juni 2020 *9 June 2020*	Ke-1 *First*
Direktur Perencanaan & Pengembangan *Planning and Developement Director*	Moch Sulton	Keputusan Menteri BUMN No. SK-52/MBU/2013 tanggal 1 Februari 2013 *The Decree of the State-Owned Enterprises Minister No. SK-52/ MBU/2013 dated 1 January 2013*	1 Februari 2013 *1 February 2013*	31 Januari 2018 *31 January 2018*	Ke-1 *First*
Direktur Sumber Daya Manusia & Umum *Human Resource and General Affairs Director*	Djoko Santoso	Keputusan Menteri BUMN No. SK-52/MBU/2013 tanggal 1 Februari 2013 *The Decree of the State-Owned Enterprises Minister No. SK-52/ MBU/2013 dated 1 January 2013*	1 Februari 2013 *1 January 2013*	31 Januari 2018 *31 January 2018*	Ke-1 *First*

Pemegang saham melalui RUPS memutuskan untuk melakukan perubahan nomenklatur organisasi Perseroan, dimana 5 (lima) Direktorat menjadi 4 (empat) Direktorat.

Berdasarkan Surat Kementerian BUMN No. SK-150/ MBU/07/2016 tanggal 15 Juli 2016 dan Surat dari *Holding* PTPN III No. 3.00/SKPTS/R/19/2016 tanggal 15 Juli 2016, susunan Direksi hingga akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut,

The shareholders of the company through the General Meeting of the Shareholders decided to change the Nomeclature and the Operational Directorates from 5 (five) to 4 (four) Directorates.

According to the Ministry of State-Owned Enterprises Letter No. SK-150/MBU/07/2016 dated 15 July 2016 and the PTPN III Holding Company LetterNo. 3.00/ SKPTS/R/19/2016 dated 15 July 2016, the Structure of Board of Directors until the end of 2016 was as follows:

Susunan Direksi PTPN X
Periode 16 Juli - 31 Desember 2016

The Structure of PTPN X'sBoard of Directors
for 16 July- 31 December 2016 Period

Jabatan *Position*	Nama *Name*	Dasar Pengangkatan *Decrees for Appointment*	Awal Jabatan *Start of Term*	Masa Akhir Jabatan *End of Term*	Periode Jabatan *Number ofTerm*
Direktur Utama *President Director*	Subiyono	Keputusan Menteri BUMN No. SK-282/MBU/2013 tanggal 13 Juni 2013 *The Decree of the State-Owned Enterprises Minister No. SK-282/ MBU/2013 dated 13 June 2013*	13 Juni 2013 *13 June 2013*	12 Juni 2018 *12 June 2018*	Ke-2 *Second*
Direktur Operasional *Operational Director*	Tarsisius Sutaryanto	Keputusan Menteri BUMN No. SK-52/MBU/2013 tanggal 1 Februari 2013 *The Decree of the State-Owned Enterprises Minister No. SK-52/ MBU/2013 dated 1 January 2013*	1 Februari 2013 *1 January 2013*	31 Januari 2018 *31 January 2018*	Ke-2 *Second*
Direktur Komersil *Commercial Director*	Muhammad Hanugroho	Keputusan Menteri BUMN No. SK-91/MBU/06/105 dan Surat Keputusan Direksi PTPN III (Persero) No. KPJAK/Hold/SKPTS/R/03/2015 tanggal 10 Juni 2015 *The Decree of the State-Owned Enterprises Minister No. SK-91/ MBU/06/105 and the Director PTPN III Decree (Limited Liability Company) No. KPJAK/Hold/SKPTS/R/03/2015 dated10 June 2015*	10 Juni 2015 *10 June 2015*	9 Juni 2020 *9 June 2020*	Ke-1 *First*
Direktur Sumber Daya Manusia & Umum *Human Resource and General Affairs Director*	Djoko Santoso	Keputusan Menteri BUMN No. SK-52/MBU/2013 tanggal 1 Februari 2013 *The Decree of the State-Owned Enterprises Minister No. SK-52/ MBU/2013 dated 1 January 2013*	1 Februari 2013 *1 January 2013*	31 Januari 2018 *31 January 2018*	Ke-1 *First*

*Profil singkat masing-masing anggota Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Direksi, dalam Laporan Direksi

*A brief profile of each member of the Board of Directors can be found inBoard of Directors' Profile Section, in the Board of Directors' Report

Pada awal tahun 2017, pemegang saham Perseroan melalui RUPS memutuskan untuk melakukan pergantian nomenklatur dan operasional Direktorat, dimana dari 4 (empat) Direktorat menjadi 3 (tiga) Direktorat. Surat Kementerian BUMN No. SK-35/MBU/02/2017 tanggal 24 Februari 2017 dan Surat *Holding* PTPN III No. 3.06/ SKPTS/R/18/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang mengesahkan perubahan nomenklatur tersebut sekaligus mengesahkan pergantian susunan Direksi sebagai berikut:

1. Direktur Utama, Subiyono diberhentikan dengan hormat, untuk kemudian digantikan oleh Dwi Satriyo Annurogo.

In the beginning of 2017, the shareholders of the company through the General Meeting of the Shareholders decided to change the Nomenclature and the Operational Directorates from 4 (four) to 3 (three) Directorates. The Ministry of State-Owned Enterprises Letter No. SK-35/MBU/02/2017 dated 24 January 2017 and the PTPN III Holding Company Letter No. 3.06/SKPTS/R/18/2017 dated 20 January 2017 stipulated the change in the Nomenclature and also the change in the Structure of Board of Directors as follows:

1. he President Director, Subiyono, was discharged and replaced with Dwi Satriyo Annurogo.

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

2. Direktur Operasional, Tarsisius Sutaryanto diberhentikan dengan hormat, untuk kemudian digantikan oleh Mustaqim.
3. Direktur Komersil, Muhammad Hanugroho tetap menjabat.
4. Direktur Sumber Daya Manusia & Umum, Djoko Santoso diberhentikan dengan hormat. Direktorat ini kemudian dilebur ke dalam Direktorat lainnya.

Pedoman Kerja Direksi

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Direksi Perseroan memiliki pedoman kerja yang tercantum dalam *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi yang telah diperbaharui serta disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. XX-SURKP/16.067 tanggal 19 Agustus 2016. *Board Manual* ini antara lain mengatur Direksi tentang:

1. Ketentuan umum jabatan Direksi
2. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi
3. Persyaratan pengangkatan anggota Direksi
4. Etika jabatan
5. Pengisian jabatan Direksi yang lowong
6. Pengunduran diri dan masa Jabatan
7. Penetapan penghasilan Direksi
8. Tugas dan tanggung jawab serta wewenang dan kewajiban Direksi
9. Penetapan kebijakan Direksi
10. Pendelegasian wewenang
11. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi
12. Program pengenalan Perseroan
13. Program Pendidikan Berkelanjutan
14. Rapat Direksi
15. Benturan kepentingan
16. Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS
17. Kewajiban terkait Rencana Jangka Panjang perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
18. Kewajiban terkait penyelenggaraan laporan-laporan dan laporan tahunan
19. Kewajiban terkait Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan Intern, fungsi Sekretaris Perusahaan, dan Tatakelola Teknologi Informasi
20. Kewajiban terkait ketentuan cuti Direksi dan ijin keluar negeri Bagi Direksi dan dewan komisaris

2. The Operational Director, Tarsisius Sutaryanto, was discharged and replaced with Mustaqim.
3. The Commercial Director, Muhammad Hanugroho, is still in position.
4. The Human Resource and General Director, Djoko Santoso, was discharged and the Directorate was combined into other Directorate.

The Work Guideline for the Board of Directors

In implementing the functions and the roles, the Company's Board of Directors follows the guideline stated in the Board Manual of the Board of the Commissioners and Board of Directors which has been updated and stipulated through the Decree of the Board of Directors No. XX-SURKP/16.067 dated 19 August 2016. The Board Manual regulates among which:

1. The general provision of theBoard of Directors' position
2. The appointment and the termination of the Board of Directors
3. The requirements for the appointment of the members of the Board of Directors
4. The work ethics
5. Filling out the vacancy in the Board of Directors
6. Resignation and the serving terms
7. The determination of the Board of Directors' salary
8. The roles, the responsibilities, the authorities, and the obligations of the Board of Directors
9. The determination of the Board of Directors' policies
10. Delegating authorities
11. The division of roles and responsibilities of the members of theBoard of Directors
12. The company induction program
13. The sustainable education program
14. Board of Directors' meeting
15. Conflict of interest
16. The obligations of the Board of Directors pertaining to the General Meeting of the Shareholders
17. The obligations pertaining to the Company Long Term Plan and the Company's Work and Budget Plan.
18. The obligations pertaining to the preparation of the reports and the annual reports.
19. The obligations pertaining to the Risk Management, Internal Control System, Internal Monitoring, the functions of the Company's Secretary, and the information Technology Management.
20. The obligation pertaining to the leave of absence for the Board of Directors and the overseas assignment for the Board of Directorsand the Board of Commissioners.

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan juga memuat komitmen Dewan Komisaris dan Direksi dalam menerapkan GCG di lingkup Perseroan, dimana komitmen ini menjadi bagian dari keseluruhan pengembangan organ GCG Perseroan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

The Board Manual for the Board of Commissioners and Board of Directors of the LLC also includes the commitments of the Board of Commissionersand Board of Directors in implementing GCG within the LLC and such commitment is a part of the whole development of the LLC's GCG organs according to the applicable rules and regulations.

BAB II

Komitmen Penerapan Good Corporate Governance Direksi & Dewan Komisaris

PT PERKEBUNAN Nusantara X berkomitmen dan konsisten bahwa dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) tidak hanya sekedar formalitas dan kepatuhan, tetapi atas dasar kebutuhan untuk memperbaiki diri agar visi dan misi perusahaan dapat tercapai secara nyata.

Bagi PT Perkebunan Nusantara X, dibutuhkan komitmen yang kuat dan berkelanjutan sehingga insan di dalamnya mampu bekerja secara efisien, efektif, profesional, mandiri dan mampu bersaing dalam percaturan bisnis internasional. Sehingga, setiap keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan terbaik bagi perusahaan dan melindungi asset dari pengelolaan perusahaan yang tidak benar.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) merupakan wujud komitmen PT Perkebunan Nusantara X terhadap penerapan GCG. Pedoman Tata Kelola wajib diimplementasikan dalam praktik tata kelola perusahaan sehari-hari oleh segenap organ PT Perkebunan Nusantara X yaitu Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan jajaran Direksi serta para pemangku kepentingan sebagai wujud komitmen yang kuat dalam menerapkan tata kelola yang baik.

Hal tersebut merupakan bentuk komitmen yang kuat untuk melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, beretika dan transparan serta bertanggung jawab baik kepada pemegang saham maupun para pemangku kepentingan.

Surabaya, 20 Desember 2012
PT Perkebunan Nusantara X

Komisaris Utama	Direktur Utama
Prof. Dr. Ir. Rudi Wibowo, MS	**Ir. Subiyono, MMA**

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta memastikan agar Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan. Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkup Perseroan.

Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

Salah satu tugas terpenting dari Direksi adalah penyusunan dan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang kemudian akan ditandatangani bersama-sama dengan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada Pemegang Saham melalui RUPS. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja yang memuat RKAP Perseroan sebagai penjabaran tahunan dari RJPP kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. Rencana Kerja harus disampaikan paling lambat 60 hari kalender sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

RJPP merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya.
2. Posisi Perseroan saat RJPP disusun.
3. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP.
4. Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja jangka panjang.

The Roles and the Responsibilities of the Board of Directors

The Board of Directorsis responsible for implementing all actions related to the management of the LLC according to the objectives and the purposes of the LLC, and also for representing the LLC within or outside of the court on all matters and all occasions with certain limitations as regulated in the Articles of Association and the applicable laws. The Board of Directorsshall implement the tasks with good intentions for the interest of the LLC according to the objectives and the purposes of the LLC, and shall ensure that the LLC implements its social responsibilities and takes account of various stakeholders. One of the members of Board of Directors shall be appointed by the Board of Directors' Meeting as the person-in-charge of the implementation and the monitoring of the Good Corporate Governance (GCG) in the LLC.

Determination of the Company's Work and Budget Plan and the Company's Long Term Plan.

One of the most important tasks of the Board of Directors is to prepare and to propose the Company's Work and Budget Plan and the Company's Long Term Plan. Signed together with the Board of Commissioners, these two documents are later proposed to the Shareholders through the General Meeting of the Shareholders. The Board of Directorsis obligated to deliver the work plan which includes the Company's Work and Budget Plan as the annual breakdown of the Company's Long Term Plan to the Board of Commissioners for approval before the accounting year begins. The Work Plan has to be submitted in 60 calendar days at the least before the next accounting year.

The Company's Long Term Plan is a strategic plan which includes the targets and the objectives to achieve for the period of 5 (five) years, and contains at least:

1. The evaluation of the implementation of the company's previous long term plan.
2. The condition of the LLC at the time of the Long-Term Plan is prepared.
3. The assumptions used in the preparation of the Company's Long Term Plan.
4. The determination of the missions, targets, strategies, policies, and the long-term work plan.

Kualifikasi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi

Setiap anggota Direksi yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS harus memenuhi kualifikasi dan kriteria yang sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007, Undang-undang No. 19 tahun 2003, Permen BUMN PER-01/MBU/2011, POJK 33/POJK.04/2014, dan Anggaran Dasar Perseroan. *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi yang dimiliki Perseroan telah mengatur kualifikasi dan kriteria dalam pembahasan terkait etika jabatan anggota Dewan Komisaris.

Selain akhlak, moral, dan integritas yang baik serta cakap melakukan perbuatan hukum, individu yang dinominasikan dan ditetapkan sebagai Direksi tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi diwajibkan untuk senantiasa memperhatikan kepentingan Perseroan di atas kepentingan lainnya, dan harus bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta memperhatikan batasan yang ditentukan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Agar tidak menimbulkan benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, baik sebagai anggota Direksi pada BUMN lain, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha milik swasta; jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nominasi, Pengangkatan dan Masa Jabatan Direksi

Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi yang dimiliki Perseroan telah mengatur nominasi, pengangkatan dan masa jabatan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS

Qualifications, Criteria, and Impartiality of the members of Board of Directors

Each member of the Board of Directors appointed based on the decision of the General Meeting of Shareholders must fulfill the qualifications and the criteria which has been set according to the Law No. 40 Year 2007, the Law No. 19 Year 2003, the State-Owned Enterprises Minister Regulation PER-01/MBU/2011, POJK 33/POJK.04/2014, and the LLC's Articles of Association. The LLC's Board Manual for the Board of Commissioners and the Board of Directors regulates the qualifications and the criteria in the chapter that discusses the work ethics of the members of Board of Commissioners.

Aside from a good virtue, moral, and integrity as well as a competency in legal matters, the individual nominated and appointed as the Board of Directors should never declare bankruptcy, has never been a member of Board of Directorsand/or a member of Board of Commissioners found guilty of causing bankruptcy to the company, and have never been convicted of a crime that causes a loss for the state and/or in relation to the financial sector.

In implementing its tasks and authorities, the Board of Directors is obligated to prioritize the interest of the LLC, to act according to the purposes and objectives of the LLC, and to take account of the limitations set by the applicable rules and regulations. To avoid conflicts of interest, the members of Board of Directorsare forbidden from holding a double/multiple position, either as the member of Board of Directors in other State-Owned Enterprise, Regional-Owned Enterprise, or Privately-Owned Enterprise; other structural and functional positions in a central and regional government institution; an organizational structure of a political party and/or the member of legislative bodies; and/or other positions which can cause conflicts of interest according to the applicable rules and regulations.

The Nomination, the Appointment and the Terms of theBoard of Directors

The LLC's Board Manual Board of Commissioners and Board of Directors regulates the nominations, the appointment and the Term of the Board of Commissioners, as follows:

1. The members of Board of Directors are appointed and terminated by the General Meeting of Shareholders.

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

2. Anggota Direksi diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang saham Seri A dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

3. Masa Jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pembagian Lingkup Kerja dan Tanggung Jawab Antar Direksi

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Perseroan, Direksi membagi lingkup tugas dan wewenangnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. XX-SURKP/13.076 tanggal 29 juli 2013 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Pemegang Jabatan di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara X. Pembagian tugas pokok Direksi adalah sebagai berikut:

2. The members of Board of Directors are chosen from the candidates nominated by the Shareholders Series A and the nomination legally binds the General Meeting of Shareholders
3. The term for the member of Board of Directors is set at 5 (lima) year period and can be re-appointed for 1 (one) more term.

The Division of the Scope of Work and the Responsibilities among the Members of the Board of Directors

In implementing the LLC's business activities, the Board of Directors divides the score of tasks and authorities based of the Decree of the Board of Directors No. XX-SURKP/13.076 dated 29 July 2013 regarding the Refinement of the Organizational Structure and the Main Job Descriptions in PT Perkebunan Nusantara X. The division of the main tasks for the members of the Board of Directorsis as follows:

Direktur Utama/ *President Director* (Subiyono)

Tugas-tugas Direktur Utama yaitu:
1. Menetapkan kebijakan Perusahaan dalam mengelola Pabrik Gula dan Kebun Tembakau.
2. Mengkoordinir tugas Direktur Operasional, Direktur Komersil dan Direktur Sumber Daya Manusia & Umum.
3. Membidangi Satuan Pengawasan Intern dan Sekretaris Perusahaan.

The main tasks of the President Directorare:
1. *To determine the Company's policies in managing the Sugar Factory and the Tobacco Plantation.*
2. *To coordinate the tasks of the Operational Director, the Commercial Director, and Human Resource and the General Affairs Director.*
3. *To lead the Internal Monitoring Unit and to act as the Company's Secretary.*

Direktur Operasional / *Operational Director* (Tarsisius Sutaryanto)

Tugas-tugas pokok Direktur Operasional adalah:
1. Melaksanakan kebijakan Perusahaan di Bidang Operasional/Produksi.
2. Membidangi Divisi Areal & Budidaya, Divisi Teknik, Divisi Pengolahan, Divisi Renbang dan Divisi *Quality Assurance* (QA).

The main tasks of theOperational Directorare:
1. *To implement the company's policies in the field of Operation/Production.*
2. *To lead the Area and Culture Division, the Engineering Division, the Processing Division, the Development Plan Division, and the Quality Assurance (QA) Division.*

Direktur Komersil / *Commercial Director* (Muhammad Hanugroho)

Tugas dan kewenangan Direktur Komersil meliputi:
1. Melaksanakan kebijakan Perusahaan di Bidang Keuangan dan Komersil.
2. Membidangi Divisi Keuangan, Divisi Akuntansi, Divisi Pemasaran, Divisi PKBL dan Divisi Sarpram

The tasks and the authorities of the Commercial Director include:
1. *To implement the company's policies in the field of Financial and Commercial.*
2. *To lead the Financial Division, the Accounting Division, the Marketing Division, the Partnership and Environmental Promotion Division, and the Facilities, Infrastructures and Mechanism Division.*

Direktur Sumber Daya Manusia & Umum / *The Human Resource and General Affairs Director* (Djoko Santoso)

Direktur Sumber Daya Manusia & Umum memiliki tugas-tugas pokok sebagai berikut:
1. Melaksanakan kebijakan Perusahaan di Bidang Sumber Daya Manusia & Umum.
2. Membidangi Divisi Sumber Daya Manusia & Hubungan Industrial (SDM & HI), Biro Hukum dan Manajemen Resiko, Divisi Umum, Divisi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan Divisi Tembakau.

The main tasks of the Human Resource and General Affairs Director are:
1. *To implement the company's policies in the field of Human Resource and General Affairs.*
2. *To lead the Human Resource and the industrial Relationship division, the Legal Bureau and the Risk Management Division, the General Affairs Division, the Goods and Service Procurement Division, and the Tobacco Division.*

Selain pengelolaan Pabrik Gula dan Kebun Tembakau, Direksi memiliki tugas untuk membina dan mengkoordinir tugas-tugas Kantor Kuasa Direksi di Makasar.

Aside from the management of the Sugar Factory and the Tobacco Plantation, the Board of Directors is in charge of coaching and coordinating the tasks of the Board of Directors' Proxy Office in Makassar.

Program Pengenalan Perseroan

Anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan, dengan Sekretaris Perusahaan sebagai penanggung jawab program pengenalan tersebut. Program Pengenalan meliputi:
1. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip GCG oleh Perseroan;
2. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelagasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program Pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan dimana program tersebut dilaksanakan.

Oleh karena tidak terdapat perubahan susunan Direksi di tahun 2016, maka tidak dilaksanakan program pengenalan Perseroan kepada Direksi.

The Company Induction Program

The members of the Board of Directors appointed for the first term are obligated to attend the Company's Induction Program with the Company's Secretary as the person-in-charge of the program. The induction program discusses:

1. The implementation of the GCG principles implemented by the LLC;
2. An overview of the LLC related to the objectives, the nature and scope of work, the financial and operational performance, the strategies, the short- and long-term business plan, the competition, the risks and other strategic issues;
3. The explanation related to the delegated authorities, internal and external audit, the internal systems and policies, including the Audit Committee;
4. The explanation related to the tasks and responsibilities of the Board of Directors and all prohibited matters.

The LLC induction program can be in the form of presentation, meeting, visit to the LLC, and a desk study or other program duly suitable for the LLC where the program is implemented.

Since there is no change in the structure of the Board of Directors in 2016, the LLC induction program is not given to the Board of Directors.

Program Peningkatan Kompetensi

Program peningkatan kompetensi, atau yang dikenal di lingkup Perseroan sebagai Program Pembelajaran Berkelanjutan dilakukan oleh setiap anggota Direksi agar senantiasa dapat menambah dan memutakhirkan

The Competency Improvement Program

Each member of Board of Directorshas to attend or to participate in the competency improvement program, or famously known in LLC as the Sustainable Learning Program, to add and update their knowledge in

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

pengetahuannya untuk menjalankan tugas pengurusan dan pegelolaan Perseroan. Program Pembelajaran Berkelanjutan Direksi di sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

implementing the duties to administer and manage the LLC.The Sustainable Learning Program for the Board of Directorst hroughout 2016 were as follows:

Direksi *Board of Directors*	Kegiatan *Activities*	Tanggal *Date*	Tempat *Venue*	Penyelenggara *Organizer*
Subiyono (Direktur Utama) *(President Director)*	*Study of the Performance of Region Spesific Sugarcane Varieties for Propagation in East Java*	17 - 23 Februari 2016	New Delhi, India	STM Project Ltd.
	Narasumber untuk Paparan *Roadmap* Industri Gula Nasional 2017-2019) *The Speaker for the National Sugar Industrial Roadmap Elaboration 2017-2019*	4 Mei 2016	Grandcity Sby	Kongres IKAGI
	Orasi Ilmiah di Universitas Trunojoyo Madura, "Peluang dan Tantangan Pembangunan Industri Gula Melalui Penyiapan Tebu Lahan Kering di Madura" *A Scientific Oration in Universitas Trunojoyo Madura, "The Opportunities and the Challenges in the Development of Sugar Industry through the Preparation of Sugarcane Dry Land in Madura"*	11 Agustus 2016	Universitas Trunojoyo Madura	Universitas Trunojoyo Madura
	Narasumber "Ketahanan Pangan dan Logistik" *The Speaker for the "Food Security and Logistics"*	3 November 2016	Hotel Dharmawangsa, Jakarta	Forum BUMN 2016
Tarsisius Sutaryanto (Direktur Produksi/ Operasional) *(Production/ Operational Director)*	Menjadi Narasumber Workshop di LPP, Yogyakarta *The Speaker in a Workshop in Plantation Education Program (LPP) in Yogyakarta*	12 - 13 Februari 2016	LPP Yogyakarta	LPP
	Study of the Performance of Region Spesific Sugarcane Varieties for Propagation in East Java	17 - 23 Februari 2016	New Delhi, India	STM Project Ltd.
	Narasumber *Workshop* LPP The Speaker in LPPWorkshop	6 April 2016	LPP, Yogyakarta	LPP
	Narasumber Kursus KMP di Yogya The Speaker in KMP Course in Yogya	22 - 23 Mei 2016	KMP, Yogyakarta	KMP
	Narasumber Semiloka AGI dan LPP The Speaker in AGI and LPP Semi-Workshop	31 Agustus - 1 September 2016	Yogyakarta	Asosiasi Gula Indonesia (AGI)
	Mengajar di LPP Teaching in LPP	4 November 2016	LPP, Yogyakarta	LPP
Muhammad Hanugroho (Direktur Komersil) *(Commercial Director)*	*Study of the Performance of Region Spesific Sugarcane Varieties for Propagation in East Java*	17 - 23 Februari 2016	New Delhi, India	STM Project Ltd.

Direksi *Board of Directors*	Kegiatan *Activities*	Tanggal *Date*	Tempat *Venue*	Penyelenggara *Organizer*
Djoko Santoso (Direktur Sumber Daya Manusia & Umum) *(Human Resource and General Affairs Director)*	*Study of the Performance of Region Spesific Sugarcane Varieties for Propagation in East Java*	17 - 23 Februari 2016	New Delhi, India	STM Project Ltd.
Moch Sulton (Direktur Perencanaan & Pengembangan) *(Planning and Development Director)*	*Study of the Performance of Region Spesific Sugarcane Varieties for Propagation in East Java*	17 - 23 Februari 2016	New Delhi, India	STM Project Ltd.

Rapat Direksi

Rapat Direksi dapat dilaksanakan setiap waktu apabila dipandang perlu baik oleh anggota Direksi, atas permintaan Dewan Komisaris, maupun atas permintaan Pemegang Saham. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi, Sekretaris Perusahaan sebagai notulis Rapat, dan pihak-pihak lain yang perlu hadir untuk pembahasan materi. Risalah rapat harus mermuat hal-hal yang dibicarakan termasuk pernyataan ketidaksetujuan/*dissenting opinion* anggota Direksi dan hal-hal yang diputuskan.

Di sepanjang tahun 2016, Direksi melakukan 12 kali rapat dan menghadiri 11 kali Rapat Gabungan bersama Dewan Komisaris. Berikut agenda Rapat Direksi.

Board of Directors' Meeting

The Board of Directors' Meeting can be held at any time when considered necessary by the members of Board of Directors on the request of the Board of Commissioners or the Shareholders. The meeting is attended by the members ofBoard of Directors, Corporate Secretary of the notetaker of the Minutes of the Meeting, and other parties deemed necessary to attend in order to the discuss the matter at hands - which include the dissenting opinion of the member of Board of Directors – and other matters decided.

Throughout 2016, the Board of Directors held 12 meetings and attended 11 joint meetings with the Board of Commissioners. The following is the agenda of the Board of Directors' Meeting:

Risalah Rapat Direksi / **The Summary of the Board of Directors' Meeting**

Tanggal *Date*	Tempat *Venue*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta Rapat *Meeting Participants*
8 Januari 2016 *8 January 2016*	Surabaya	Pendirian Pabrik Gula di Madura *The Construction of Sugar Factory in Madura*	Subiyono (Direktur Utama/ *President Director*) Tarsisius Sutaryanto (Direktur/ *Director*) Muhammad Hanugroho (Direktur/ *Director*) Djoko Santoso (Direktur/ *Director*) Moch Sulton (Direktur/ *Director*) Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*
9 Februari 2016 *9 January 2016*	Surabaya	Perpanjangan, Perubahan Fasilitas KMK, KMK Fixed Loan *The Extension and the Change in the Capital Credit and Capital Credit for Fixed Loan Facilities.*	Subiyono (Direktur Utama/ *President Director*) Tarsisius Sutaryanto (Direktur/ *Director*) Muhammad Hanugroho (Direktur/ *Director*) Djoko Santoso (Direktur/ *Director*) Moch Sulton (Direktur/ *Director*) Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*
7 Maret 2016 *7 March 2016*	Surabaya	Alih Fungsi PG Toelangan *The Transfer of PG Toelangan Function*	Subiyono (Direktur Utama/ *President Director*) Tarsisius Sutaryanto (Direktur/ *Director*) Muhammad Hanugroho (Direktur/ *Director*) Djoko Santoso (Direktur/ *Director*) Moch Sulton (Direktur/ *Director*) Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Risalah Rapat Direksi **The Summary of the Board of Directors' Meeting**

Tanggal *Date*	Tempat *Venue*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta Rapat *Meeting Participants*
8 April 2016 *8 April 2016*	Surabaya	Akselerasi Peningkatan dengan Jaminan Rendemen 8,5% *The Acceleration with 8.5%Rendemen Guarantee*	Subiyono (Direktur Utama/ *President Director*) Tarsisius Sutaryanto (Direktur/ *Director*) Muhammad Hanugroho (Direktur/ *Director*) Djoko Santoso (Direktur/ *Director*) Moch Sulton (Direktur/ *Director*) Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*
17 Mei 2016 *17 May 2016*	Surabaya	Pengolahan Raw Sugar *Raw Sugar Processing*	Subiyono (Direktur Utama/ *President Director*) Tarsisius Sutaryanto (Direktur/ *Director*) Muhammad Hanugroho (Direktur/ *Director*) Djoko Santoso (Direktur/ *Director*) Moch Sulton (Direktur/ *Director*) Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*
9 Juni 2016 *9 June 2016*	Surabaya	Pengadaan Laboratorium Analisa Nira (*Mobile*) *The Procurement of Nisa Analysis Laboratory (Mobile)*	Subiyono (Direktur Utama/ *President Director*) Tarsisius Sutaryanto (Direktur/ *Director*) Muhammad Hanugroho (Direktur/ *Director*) Djoko Santoso (Direktur/ *Director*) Moch Sulton (Direktur/ *Director*) Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*
11 Juli 2016 *11 July 2016*	Surabaya	Kemajuan PMN Semester I/2016 *The Progress of the State Capital Shares Semester I/2016*	Subiyono (Direktur Utama/ *President Director*) Tarsisius Sutaryanto (Direktur/ *Director*) Muhammad Hanugroho (Direktur/ *Director*) Djoko Santoso (Direktur/ *Director*) Moch Sulton (Direktur/ *Director*) Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*
23 Agustus 2016 *23 August 2016*	Surabaya	Pemanfaatan PG Toelangan *The Use of PG Toelangan*	Subiyono (Direktur Utama/ *President Director*) Tarsisius Sutaryanto (Direktur/ *Director*) Muhammad Hanugroho (Direktur/ *Director*) Djoko Santoso (Direktur/ *Director*) Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*
27 September 2016 *27 September 2016*	Surabaya	Evaluasi Produksi *The Production Evaluation*	Subiyono (Direktur Utama/ *President Director*) Tarsisius Sutaryanto (Direktur/ *Director*) Muhammad Hanugroho (Direktur/ *Director*) Djoko Santoso (Direktur/ *Director*) Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*
24 Oktober 2016 *24 October 2016*	Surabaya	Proses Pengadaan Barang & Jasa *The Goods and Service Procurement Process*	Subiyono (Direktur Utama/ *President Director*) Tarsisius Sutaryanto (Direktur/ *Director*) Muhammad Hanugroho (Direktur/ *Director*) Djoko Santoso (Direktur/ *Director*) Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*
30 November 2016 *30 November 2016*	Surabaya	Status PKWT & *Golden Shake Hand* *The Status of Limited Employment Contract& Golden Shake Hand*	Subiyono (Direktur Utama/ *President Director*) Tarsisius Sutaryanto (Direktur/ *Director*) Muhammad Hanugroho (Direktur/ *Director*) Djoko Santoso (Direktur/ *Director*) Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*
8 Desember 2016 *8 December 2016*	Surabaya	Akuisisi PLT Biogas *The Acquisition of PLT Biogas*	Subiyono (Direktur Utama/ *President Director*) Tarsisius Sutaryanto (Direktur/ *Director*) Muhammad Hanugroho (Direktur/ *Director*) Djoko Santoso (Direktur/ *Director*) Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*

Daftar Kehadiran Anggota Direksi pada Rapat Direksi

The Attendance List of the members of the Board of Directors in the Board of Directors' Meeting

Tanggal *Date*	Direksi *Board of Directors*					Alasan Ketidakhadiran *Reasons for Absence*
	Subiyono (Direktur Utama) *(President Director)*	Tarsisius Sutaryanto (Direktur) *(Director)*	Muhammad Hanugroho (Direktur) *(Director)*	Djoko Santoso (Direktur) *(Director)*	Moch Sulton (Direktur) *(Director)*	
8 Januari 2016 8 January 2016	v	v	v	v	v	-
9 Februari 2016 9 February 2016	v	v	v	v	v	-
7 Maret 2016 *7 March 2016*	v	v	v	v	v	-
8 April 2016 8 April 2016	v	v	v	v	v	-
17 Mei 2016 17 May 2016	v	v	v	v	v	-
9 Juni 2016 *9 June 2016*	v	v	v	v	v	-
11 Juli 2016 11 July 2016	v	v	v	v	v	-
23 Agustus 2016 23 August 2016	v	v	v	v		-
27 September 2016 27 September 2016	v	v	v	v		-
24 Oktober 2016 24 October 2016	v	v	v	v		-
30 November 2016 30 November 2016	v	v	v	v		-
8 Desember 2016 *8 December 2016*	v	v	v	v		-

: tidak lagi menjabat
not serving anymore

v = hadir / x = berhalangan hadir
v = attending / x = Unable to attend

Untuk agenda Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris, dapat dilihat pada bagian rapat Dewan Komisaris. Daftar kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris dapat dilihat di bawah ini.

The agenda in the Joint Meeting between the Board of Directors and Board of Commissioners can be seen in the Board of Commissioners' meeting section. The Attendance List of the members of the Board of Directors in theJoint Meeting with the Board of Commissioners can be seen below.

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Daftar Kehadiran Anggota Direksi pada Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris

The Attendance List of the members of the Board of Directors in the Joint Meeting with the Board of Commissioners

Tanggal *Date*	Direksi *Board of Directors*					Alasan Ketidakhadiran *Reasons for Absence*
	Subiyono (Direktur Utama) *(President Director)*	Tarsisius Sutaryanto (Direktur) *(Director)*	Muhammad Hanugroho (Direktur) *(Director)*	Djoko Santoso (Direktur) *(Director)*	Moch Sulton (Direktur) *(Director)*	
29 Januari 2016 29 January 2016	v	v	v	v	v	-
7 Maret 2016 7 March 2016	v	v	v	v	v	-
1 April 2016 1 April 2016	v	v	v	v	v	-
29 April 2016 29 April 2016	v	v	v	v	v	-
31 Mei 2016 31 May 2016	x	x	v	v	v	-
14 Juni 2016 14 June 2016	v	v	v	v	v	-
29 Juli 2016 29 July 2016	v	v	x	v		-
21 September 2016 *21 September 2016*	v	v	v	v		-
31 Oktober 2016 *31 October 2016*	v	x	v	v		-
25 November 2016 *25 November 2016*	v	v	v	v		-
29 Desember 2016 *29 December 2016*	x	x	v	v		-

: tidak lagi menjabat
not serving anymore

v = hadir / x = berhalangan hadir
v = attending / x = Unable to attend

Rekapitulasi kehadiran anggota Direksi baik dalam Rapat Internal Direksi maupun Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris dapat dilihat di bawah ini,

The recapitulation of the members of Board of Directors's attendance in both Board of Directors' Internal Meeting or Joint Meeting with the Board of Commissioners can be seen below:

Rekapitulasi Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat

The Recapitulation of the Members of Board of Directors's attendance in Meetings

Direksi *The Board of Directors*	Jumlah Wajib Rapat *The Obligatory Number of Attendance*	Jumlah Kehadiran *The Number of Attendance*	% Kehadiran *% of Attendance*
Subiyono (Direktur Utama/ President Director)	11	9	81,82%
Tarsisius Sutaryanto (Direktur/ Director)	11	8	72,72%
Muhammad Hanugroho (Direktur/Director)	11	10	90,91%
Djoko Santoso (Direktur/ Director)	11	11	100%
Moch Sulton (Direktur/Director)	6	6	100%
Rata-rata *Average*			89,09%

Evaluasi dan Penilaian Terhadap Kinerja Direksi

Perseroan menetapkan *Key Performance Indicator* (KPI) sebagai ukuran kinerja yang harus dicapai oleh manajemen. Untuk memastikan bahwa KPI yang ditetapkan selaras dengan pencapaian visi dan misi Perseroan senantiasa dilakukan sosialisasi kepada seluruh level jabatan agar tercipta kesamaan visi dalam upaya tercapainya sasaran strategi.

Pelaksanaan kebijakan manajemen kinerja ini secara keseluruhan menggunakan *tools Balanced Scorecard* yang meliputi pengukuran berdasarkan perspektif keuangan, *customer*, *internal business process*, dan *learning and growth*. Salah satu bentuk implementasinya, progres pencapaian KPI dan program optimalisasi kinerja korporasi dibahas secara rutin, dengan periode setiap triwulanan dan tahunan dalam Rapat Direksi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Kementerian BUMN melakukan penilaian kinerja BUMN sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian BUMN. Penilaian kinerja BUMN dilakukan berdasarkan konsep *business excellence* Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU), yang diadopsi dari *Malcolm Baldridge Criteria for Performance Excellence* (MBCfPE). Konsep *business excellence* KPKU secara bertahap diterapkan pada BUMN, dimulai tahun 2012 melalui penilaian kinerja kepada 50 BUMN. Di tahun 2014, konsep

The Evaluation and the Assessment of the Board of Directors' Performance

The LLC determines the Key Performance Indicators (KPI) as the measurement of performance which has to be achieved by the management. To ensure that the pre-determined KPI are in line with the achievement of the vision and missions, the KPI are constantly promoted to the whole level of work to ensure all have the same visions to achieve the targets of the strategies.

The overall implementation of the performance management is conducted by usinga Balanced Scorecard tool which covers the whole measurement based on the financial, customer, internal business process, andlearning and growth perspective. One of the forms of its implementation, the progress of KPI achievement, and the corporation performance optimization are discussed regularly in a quarter and annual period during the Board of Directors Meeting and the results are reported to the Board of Commissioners.

The Ministry of the State-Owned Enterprises conducts the State-Owned Enterprise performance assessment as a part of the Strategic Plan of the Ministry. The State-Owned Enterprise performance assessment is conducted based on the concept of business excellence which is the Excellent Performance Assessment Criteria, adopted from the Malcolm Baldridge Criteria for Performance Excellence (MBCfPE). The concept of business excellence is gradually introduced in the State-Owned Enterprises starting in 2012

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

business excellence KPKU wajib diinternalisasikan sebagai sistem pengukuran kinerja BUMN.

Konsep *business excellence* KPKU terdiri dari 7 (tujuh) kriteria yang diawali dari profil organisasi, kepemimpinan (kategori 1), perencanaan strategis (kategori 2), fokus pada pelanggan (kategori 3), pengukuran analisis dan pengelolaan pengetahuan (kategori 4), fokus pada tenaga kerja (kategori 5), dan fokus pada operasi (kategori 6), serta kriteria hasil-hasil bisnis (kategori 7) yang meliputi:

1. Kinerja produk dan proses (7.1)
2. Kinerja pelanggan (7.2)
3. Kinerja tenaga kerja (7.3)
4. Kinerja kepemimpinan (7.4)
5. Kinerja keuangan dan pasar (7.5)

Tahapan penilaian meliputi ondesk *review*, klarifikasi dan *site visit*. Tahap klarifikasi dilakukan untuk laporan kinerja BUMN yang belum sepenuhnya sesuai dengan petunjuk pengisian Pelaporan Kinerja Berdasarkan Pendekatan KPKU. Dengan kriteria yang sangat komprehensif dan tahapan pengukuran ini, diharapkan dapat memberikan penilaian yang lebih objektif yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perbaikan kinerja.

Penilaian kinerja BUMN dilakukan oleh PTPN III (Persero) selaku Holding Perkebunan, yang didukung oleh Forum Ekselen BUMN (FEB) yang beranggotakan para praktisi BUMN di bidang *business excellence*. Para assessor yang ditugaskan adalah *assessor* yang berkualitas, berpengalaman di bidang manajemen kinerja, dan telah mendapat pelatihan khusus di bidang konsep *business excellence* KPKU. Untuk menjamin objektivitas penilaian, para assesor tidak diperkenankan menilai BUMN tempat yang bersangkutan bekerja.

Hasil penilaian di *review* oleh tim Teknis yang terdiri dari para praktisi yang berpengalaman dalam program *business excellence* dan bersertifikat *Baldridge* dari National Institute of Standards and Technology (NIST).

through the performance assessment of 50 State-Owned Enterprises. In 2014, the concept of business excellence is made mandatory to be implemented as the State-Owned Enterprise performance measurement system.

The concept of Excellent Performance Assessment Criteria's business excellence consists of 7 (seven) criteria starting from the profile of the organization, leadership (category 1), strategic planning (category 2), focus on customers (category 3), analysis measurement and the knowledge management (category 4), focus on the workforce (category 5), focus on the operation (category 6), and the criteria of the business deliverables (category 7) which cover:

1. The Product and Process Performance (7.1)
2. The Customer Performance (7.2)
3. The Workforce Performance (7.3)
4. The Leadership Performance (7.4)
5. The Financial and Market Performance (7.5)

The stages of the assessment are the ondesk review, clarification and site visit.The clarification stage is conducted for State-Owned Performance reports which have not been prepared according to the Performance Reporting guideline based on the Excellent Performance Assessment Criteria. The comprehensive criteria and the stages of the assessment shall provide a more objective assessment which can be used as the basis in the decision-making process for the improvement of performance.

The State-Owned Enterprise Performance assessment is conducted by PTPN III (Limited Liability Company) as the holding company of the plantation supported by the State-Owned Enterprise Excellent Forum whose members are the practitioners of State-Owned Enterprise Performance in the field of business excellence.The assessors assigned are qualified and experienced assessors in performance management, and have received training in the concept of Excellent Performance Assessment Criteria's business excellence. To achieve objectivity in the assessment, the assesors are not allowed to assess the State-Owned Enterprise where they currently work.

The result of the assessment is reviewed by the technical team which consists of the practitioners with experience in the business excellence program and with a Baldridge certification from National Institute of Standards and Technology (NIST).

Tentang hasil penilaian KPKU dapat dilihat pada bagian awal Bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam Laporan Tahunan ini.

The result of theExcellent Performance Assessment Criteria assessment can be seen in the early part of the Good Company Governance Management Chapter in the Annual Report.

TRANSPARANSI INFORMASI TERKAIT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi merupakan imbal jasa yang diberikan Perseroan kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas kinerja yang telah ditunjukkan. Dasar hukum remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Besarnya gaji/honorarium bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS setiap tahun dengan daya laku selama 1 (satu) tahun buku Perseroan terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.

INFORMATION TRANSPARENCY RELATED TO THEBOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The Remuneration Received by theBoard of Commissioners and the Board of Directors

The remuneration is a compensation given by the LLC for theBoard of Commissioners and theBoard of Directorsfor the performance achieved. The legalbasis for the remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is the LLC's Articles of Associationand the State-Owned Enterprise Minister Regulation No. PER-04/MBU/2014 dated 10 March 2014 regarding the Guideline for the Determination of Salary for the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Board of Supervisors of the state-Owned Enterprise. The amount of salary/honorarium for the Board of Commissioners and theBoard of Directorsis set in the General Meeting of Shareholders eachyear which is valid for 1 (one) LLC's accounting year starting from the month of January.

"Sesuai Pasal 5 Anggaran Dasar PTPN X, remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A, dengan mekanisme penetapan dan pengesahan melalui RUPS."

"According to the Article 5 in the PTPN X's Articles of Association, remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors is proposed to the Series A Shareholders, with the mechanism for the determination and stipulation through the General Meeting of Shareholders."

Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi diberikan dalam bentuk gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. Pemberian penghasilan juga mengacu kepada penghasilan profesional di bidang/industri yang sama untuk memberikan penghargaan yang seimbang dengan tanggung jawab yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, guna meningkatkan kinerja Perseroan agar mampu bersaing dengan entitas usaha lain di bidang/industri yang sama.

The remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors is given in the form of salary/honorarium and the allowance/benefits which includes in a similar pension scheme whose amount is determined by the General Meeting of Shareholders. The salary also refers to the professional salary normally given in the same field/industry given as a financial reward for the responsibilities taken by the Board of Commissioners and the Board of Directors to improve the LLC'sperformance in order to compete with other business entities in the same field/industry.

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Penetapan remunerasi yang berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor di bawah ini:
1. Pendapatan Perseroan.
2. Aktiva Perseroan.
3. Kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan.
4. Tingkat inflasi.
5. Faktor-faktor lain yang relevan, termasuk diantaranya adalah tingkat remunerasi yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

Untuk penetapan remunerasi yang berupa tunjangan dan tantiem yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:
1. Pencapaian target.
2. Tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan Perseroan.
3. Faktor-faktor lain yang relevan (*merit system*), termasuk diantaranya adalah tingkat remunerasi yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

Struktur remunerasi Direksi dapat terdiri dari:

1. Gaji/honorarium, dengan pajak atas gaji/honorarium ditanggung dan menjadi beban Perseroan.
2. Tunjangan.
3. Fasilitas.
4. Tantiem/insentif kinerja.

Berdasarkan Keputusan Rups tentang Penetapan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2015, Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2016 No. 3.00 /SKPTS/28/2016 jo No. SK-28/S-MBU/06/2016 jo No. S-51/D1-MBU/06/2016 tanggal 30 Juni 2016, perhitungan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Gaji/honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Tahun 2016
   a. Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp102.300.000,00 per bulan. Gaji Direktur sebesar 90% dari gaji Direktur Utama.
   b. Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama, sedangkan honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama.

The permanent remuneration in the form of salary/honorarium, allowance and benefits are determined by taking into account the following factors:
1. The LLC's revenue
2. The LLC's assets
3. The LLC's financial condition and capacity
4. The rate of inflation
5. Other relevant factors which include the common remuneration level in the same industry.

The variable remuneration in the form of allowance and tantiem is determined by considering various factors:

1. Target achievement
2. The LLC's financial health level and the capability

3. Other relevant factors (the merit system), which include, among which, the common remuneration level in the same industry

The structure of the remuneration for the Board of Directorsmay consists of:
1. Salary/honorarium, with the income tax for the salary/honorarium borne and paid by the LLC.
2. Allowance
3. Benefits
4. Tantiem/performance incentive.

Based on the decree of the General Meeting of Shareholders on the Determination of the Tantiem for the Board of Directors and Board of Commissionersin 2015, the salary/honorarium, allowance and benefitsfor Board of Directors and Board of Commissioners in 2016 No. 3.00 /SKPTS/28/2016 in conjunction with No. SK-28/S-MBU/06/2016 in conjunction with No. S-51/D1-MBU/06/2016 dated 30 June 2016, the calculation of the remuneration for the Board of Commissionersand Board of Directors are as follows:
1. Salary/honorarium, allowance, and benefits in 2016 are
   a. The salary of the President Directoris set at Rp102,300,000 per month. The salary of the Directoris 90% of the salary of the President Director.
   b. The honorarium of the President Commissioner is set at 45% of the salary of the President Director, while the honorarium for the member Board of Commissionersis set at 90% of the honorarium of the President Commissioner.

c. Tunjangan dan/atau fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris diberikan dengan mengacu pada PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 (sebagaimana tabel terlampir).
d. Gaji/honorarium bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2016 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2016.

2. Total tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2015 ditetapkan sebesar Rp3.842.000.000,00 dengan ketentuan:
   a. Tantiem Direktur dan Komisaris Utama masing-masing sebesar 90% dan 45% dari Tantiem Direktur Utama sedangkan tantiem anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari tantiem Komisaris Utama, dan pembayarannya dihitung proporsional dengan memperhitungkan masa kerja efektif tahun buku 2015.
   b. Pajak Penghasilan (PPh) atas tantiem menjadi beban penerima dan tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Transparansi mengenai remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi di sepanjang tahun 2016 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

c. The allowance and/or benefits for theBoard of Directorsand the Board of Commissioners are given by referring to the PER-04/MBU/2014 dated 10 March 2014 (as shown in the table).
d. The salary/honorariumas well as the allowance and benefits for the Board of Directors and Board of Commissioners in 2016 is effective from 1 January 2016.

2. The total tantiem for the Board of Directorsand the Board of Commissionersin 2015 Accounting Year is set at Rp3,842,000,000 with the following provision:
   a. The tantiem for the Directorand the President Commissioner is at 90% and 45% respectively of the tantiem given to the President Directorwhile the tantiem for the members of the Board of Commissionersis at 90% of the tantiem given to the President Commissioner, and the payment is calculated proportional to the effective work period for 2015 accounting year.
   b. The income tax on tantiem is borne by the beneficiary and is not allowed to be included in the company's expenses.

The remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2016 can be seen in the table below:

Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2016 / **The Remuneration of the Board of Commissionersin 2016**

Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	Periode Menjabat *The Terms of Service*	Perhitungan per Bulan *Monthly Calculation*			Jumlah Honorarium dan Tunjangan per Bulan *The Total Honorarium and Allowance per Month*	Jumlah Honorarium dan Tunjangan Selama 1 Tahun *The Total Honorarium and Allowance for 1 Year*	Tantiem	Jumlah Remunerasi Tahun 2016 *The Total Remuneration in 2016*
		Honorarium	Tunjangan Transport *Transport Allowance*	Tunjangan Komunikasi *Communi-cation Allowance*				
		(Rp)	*(Rp)*	*(Rp)*	*(Rp)*	*(Rp)*		*(Rp)*
Rudi Wibowo (Komisaris Utama) *(President Commissioner)*	Jan - Des	46.035.000	9.207.000	2.301.750	57.543.750	690.525.000	269.719.190	960.244.190
Sukardi Rinakit (Komisaris) *(Commissioner)*	Apr - Des	41.431.500	8.286.300	2.071.575	51.789.375	466.104.375	-	466.104.375

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2016 | **The Remuneration of the Board of Commissionersin 2016**

Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	Periode Menjabat *The Terms of Service*	Perhitungan per Bulan *Monthly Calculation*			Jumlah Honorarium dan Tunjangan per Bulan *The Total Honorarium and Allowance per Month*	Jumlah Honorarium dan Tunjangan Selama 1 Tahun *The Total Honorarium and Allowance for 1 Year*	Tantiem	Jumlah Remunerasi Tahun 2016 *The Total Remuneration in 2016*
		Honorarium	Tunjangan Transport *Transport Allowance*	Tunjangan Komunikasi *Communi-cation Allowance*				
		(Rp)	*(Rp)*	*(Rp)*	*(Rp)*	*(Rp)*		*(Rp)*
Y.B. Priyatmo Hadi (Komisaris) *(Commissioner)*	Sep - Des	41.431.500	8.286.300	2.071.575	51.789.375	207.157.500	-	207.157.500
Arvan Rivaldy Rebion Siregar (Komisaris Independen) *(Independent Commissioner)*	Sep - Des	41.431.500	8.286.300	2.071.575	51.789.375	207.157.500	-	207.157.500
Djoko Moeljono (Komisaris) *(Commissioner)*	Jan - Agt	41.431.500	8.286.300	2.071.575	51.789.375	414.315.000	242.747.270	657.062.270
Indarto (Komisaris) *(Commissioner)*	Jan - Mar	41.431.500	8.286.300	2.071.575	51.789.375	155.368.125	242.747.270	398.115.395
Heru Sudibyo (Komisaris) *(Commissioner)*	Jan - Agt	41.431.500	8.286.300	2.071.575	51.789.375	414.315.000	242.747.270	657.062.270
Susanto Darus (Komisaris) *(Commissioner)*	Jan - Agt	41.431.500	8.286.300	2.071.575	51.789.375	414.315.000	242.747.270	657.062.270
Jumlah *(Rp)* *Total (Rp)*								4.209.965.770

Tunjangan Purna Jabatan bagi anggota Dewan Komisaris diberikan dalam bentuk Asuransi Purna Jabatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-04/MBU/2014 yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji dalam satu tahun yang termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian yang diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti).

The pension allowance for the members ofthe Board of Commissionersis given in the form of pension insurance as stated in the Minister of State-Owned Enterprise Regulation No. PER-04/MBU/2014 which is 25% (twenty five percent of the salary in one year which includes an insurance premium for accident and death given during service terms (from appointment until termination).

Remunerasi Direksi Tahun 2016 **The Remuneration of the Board of Directorsin 2016**

Direksi *Board of Director*	Periode Menjabat *The Terms of Service*	Perhitungan per Bulan *Monthly Calculation*			Jumlah Gaji dan Tunjangan per Bulan *The Total Salary and Allowance per Month*	Jumlah Gaji dan Tunjangan Selama 1 Tahun *The Total Salary and Allowance for 1 Year*	Tantiem	Jumlah Remunerasi Tahun 2016 *The Total Remuneration in 2016*
		Gaji *Salary*	Tunjangan Perumahan *Housing Allowance*	Tunjangan Komunikasi *Communi-cation Allowance*				
		(Rp)	*(Rp)*	*(Rp)*	*(Rp)*	*(Rp)*		*(Rp)*
Subiyono (Direktur Utama) *(President Director)*	Jan - Des	102.300.000	- *	5.115.000	107.415.000	1.288.980.000	599.375.980	1.888.355.980
Tarsisius Sutaryanto (Direktur) *(Director)*	Jan - Des	92.070.000	25.000.000	4.603.500	121.673.500	1.460.082.000	539.438.380	1.999.520.380
Muhammad Hanugroho (Direktur) *(Director)*	Jan - Des	92.070.000	25.000.000	4.603.500	121.673.500	1.460.082.000	314.672.390	1.774.754.390
Djoko Santoso (Direktur) *(Director)*	Jan - Des	92.070.000	25.000.000	4.603.500	121.673.500	1.460.082.000	539.438.380	1.999.520.380
Moch Sulton (Direktur) *(Director)*	Jan - Jul	92.070.000	25.000.000	4.603.500	121.673.500	851.714.500	539.438.380	1.391.152.880
Jumlah *(Rp)* Total (Rp)								9.053.304.010

*) Direktur Utama menempati rumah dinas.

*) The President Directorlives in the company's house.

Tunjangan Purna Jabatan bagi anggota Direksi diberikan dalam bentuk Asuransi Purna Jabatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-04/MBU/2014 yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji dalam satu tahun yang termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian yang diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti).

The pension allowance for the members of the Board of Directors is given in the form of pension insurance as stated in the Minister of State-Owned Enterprise Regulation No. Per-04/MBU/2014 which is 25% (twenty five percent of the salary in one year which includes an insurance premium for accident and death given during service terms (from appointment until termination).

Jumlah remunerasi yang dibayarkan Perseroan kepada Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

The total remuneration paid by the LLC to the Board of CommissionersandBoard of Directors in 2016 is as follows:

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Uraian *Description*	Jumlah *Total (Rp)*
Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	4.209.965.770
Direksi *Board of Directors*	9.053.304.010
Jumlah *Total*	13.263.269.780

Transparansi Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan kepengurusan anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada perusahaan lain di luar Perseroan periode tahun 2016 sebagai berikut,

The transparency for the double/multiple positions held by the Board of Commissioners and Board of Directors

The involvement of the members ofthe Board of Commissionersand the Board of Directors on other companies outside the LLC in 2016 is as follows:

Nama *Names*	Kepengurusan pada Perusahaan Lain *Involvement in other Companies*	
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris *as the member of Board of Commissioners*	Sebagai Anggota Direksi *as the member of Board of Directors*
Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		
Rudi Wibowo (Komisaris Utama/ *President Commissioner*)	x	x
Sukardi Rinakit (Komisaris/ *Commissioner*)	x	x
Y.B. Priyatmo Hadi (Komisaris/ *Commissioner*)	x	x
Arvan Rivaldy Rebion Siregar (Komisaris Independen/ *Independent Commissioner*)	v	v
Djoko Moeljono (Komisaris/ *Commissioner*)	x	x
Indarto (Komisaris/ *Commissioner*)	x	x
Heru Sudibyo (Komisaris/ *Commissioner*)	x	x
Susanto Darus (Komisaris/ *Commissioner*)	x	x
Direksi		
Subiyono (Direktur Utama/ *President Director*)	x	x
Tarsisius Sutaryanto (Direktur/ *Director*)	x	x
Muhammad Hanugroho (Direktur/ *Director*)	x	x
Djoko Santoso (Direktur/ *Director*)	x	x
Moch Sulton (Direktur/ *Director*)	x	x

v = ada / x = tidak ada

v = yes / x = none

Rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi di luar Perseroan adalah sebagai berikut:

Double/multiple positions held by the Board of Commissioners and Board of Directors outside LLC are as follows:

Nama *Name*	Jabatan pada Perusahaan Lain *Position in Other Companies*
Arvan Rivaldy Rebion Siregar	Direktur PT Ingria Pratama Capitalindo (2015-sekarang); Komisaris PT Puri Amerta Sanjiwani (2009-sekarang) *the Director of PT Ingria Pratama Capitalindo (2015-present); the Commissioner of PT Puri Amerta Sanjiwani (2009-present)*

Di samping itu, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki jabatan fungsional dan/atau struktural pada institusi lain, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Aside from that, the LLC's Board of Commissioners and Board of Directors who have functional and/or structural positions in other institutions can be seen the table below:

Nama *Name*	Jabatan pada Institusi *Job Title in the institutions*
Rudi Wibowo	Deputi Badan Eksekutif GAPPERINDO bidang SDM/Teknologi (2003-sekarang) *The Deputy of GAPPERINDO President Board in Human Resource/Technology (2003-present)*
Sukardi Rinakit	Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (2015-sekarang) *The Special Staff of the President of the Republic of Indonesia (2015-present)*
Y.B. Priyatmo Hadi	Kepala Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana, Prasarana Perhubungan 1b, Kementerian BUMN (2015-sekarang) *The Head of the Construction, Facilities and Infrastructure of Transportation, The Ministry of State-Owned Enterprises (2015-present)*

Transparansi Hubungan Usaha dan Hubungan Afiliasi Antar Dewan Komisaris, Direksi, atau dengan Pemegang Saham Utama

The Transparency of the Business Relation and Affiliation Among the Board of Commissioners, Board of Directors, or with the MainShareholders

Di bawah ini disajikan hubungan usaha dan hubungan afiliasi antar Dewan Komisaris, Direksi, atau dengan Pemegang Saham Utama Perseroan. Bentuk hubungan usaha termasuk diantaranya hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsbnya; sementara bentuk hubungan afiliasi mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dsbnya.

Below can be seen the Business Relation and Affiliation Among the Board of Commissioners, Board of Directors, or with the Main Shareholders of the Limited Liability Company. The business relation includes account payable-receiveable, business partnership, etc. while the affiliation includes blood relations such as husband/wife/children/parents/siblings/in-laws, etc.

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

	Hubungan Afiliasi Dengan Affiliated with			Hubungan Usaha Dengan		
	Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	Direksi *Board of Directors*	Pemegang Saham Utama	Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	Direksi *Board of Directors*	Pemegang Saham Utama
Dewan Komisaris *Board of Commissioners*						
Rudi Wibowo (Komisaris Utama) *(President Commissioner)*	x	x	x	x	x	x
Sukardi Rinakit (Komisaris) *(Commissioner)*	x	x	x	x	x	x
Y.B. Priyatmo Hadi (Komisaris) *(Commissioner)*	x	x	x	x	x	x
Arvan Rivaldy Rebion Siregar (Komisaris Independen) *(Independent Commissioner)*	x	x	x	x	x	x
Djoko Moeljono (Komisaris) *(Commissioner)*	x	x	x	x	x	x
Indarto (Komisaris) *(Commissioner)*	x	x	x	x	x	x
Heru Sudibyo (Komisaris) *(Commissioner)*	x	x	x	x	x	x
Susanto Darus (Komisaris) *(Commissioner)*	x	x	x	x	x	x
Direksi *Board of Directors*						
Subiyono (Direktur Utama) *(President Director)*	x	x	x	x	x	x
Tarsisius Sutaryanto (Direktur) *(Director)*	x	x	x	x	x	x
Muhammad Hanugroho (Direktur) *(Director)*	x	x	x	x	x	x
Djoko Santoso (Direktur) *(Director)*	x	x	x	x	x	x
Moch Sulton (Direktur) *(Director)*	x	x	x	x	x	x

v = ada / x = tidak ada

v = yes / x = none

Transparansi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

The transparencyof Share Ownership by theBoard of Commissioners and the Board of Directors

Di bawah ini disajikan kepemilikan saham 5% atau lebih oleh Dewan Komisaris dan Direksi, baik kepemilikan saham di perusahaan publik lain maupun kepemilikan saham Perseroan. Transparansi kepemilikan saham 5%

Below can be seen the share ownership of 5% or more by the Board of Commissioners and the Board of Directors, either share ownershipin other public companies or share ownership in other LLCs. The transparencyof share

atau lebih oleh Dewan Komisaris dan Direksi ini menjadi bagian dari upaya Perseroan untuk memberikan informasi terkait potensi benturan kepentingan.

ownership 5% or more by the Board of Commissioners and the Board of Directors is done as a part of an effort to provide information related to the potential conflicts of interest.

	Saham PTPN X Share in PTPN X		Saham BUMN *Share in State-Owned Enterprise*		Saham Perusahaan Swasta *Share in Private Companies*	
	Nilai Value	Persen *Percentage*	Nilai Value	Persen *Percentage*	Nilai Value	Persen *Percentage*
Dewan Komisaris *Board of Commissioners*						
Rudi Wibowo (Komisaris Utama) *(President Commissioner)*	Nihil *None*		Nihil *None*			
Sukardi Rinakit (Komisaris) *(Commissioner)*			Nihil *None*			
Y.B. Priyatmo Hadi (Komisaris) *(Commissioner)*			Nihil *None*			
Arvan Rivaldy Rebion Siregar (Komisaris Independen) *(Independent Commissioner)*			Nihil *None*			
Djoko Moeljono (Komisaris) *(Commissioner)*			Nihil *None*			
Indarto (Komisaris) *(Commissioner)*			Nihil *None*			
Heru Sudibyo (Komisaris) *(Commissioner)*			Nihil *None*			
Susanto Darus (Komisaris) *(Commissioner)*			Nihil *None*			
Direksi *Board of Directors*						
Subiyono (Direktur Utama) *(President Director)*	Nihil *None*		Nihil *None*			
Tarsisius Sutaryanto (Direktur) *(Director)*			Nihil *None*			
Muhammad Hanugroho (Direktur) *(Director)*			Nihil *None*			
Djoko Santoso (Direktur) *(Director)*			Nihil *None*			
Moch Sulton (Direktur) *(Director)*			Nihil *None*			

Perseroan tidak memiliki kebijakan terkait kepemilikan saham oleh Manajemen.

The LLC does not possess any policy related to the share ownership by the Management.

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sekretariat Dewan Komisaris

Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain. Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang pejabat Sekretaris Dewan Komisaris.

Tugas

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat untuk Dewan Komisaris.
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.
4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
5. Menyusun Rancangan Laporan Dewan Komisaris.
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola perusahaan, Sekretariat Dewan Komisaris berkewajiban untuk memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan di atas tersimpan dengan baik di Perseroan.

Selain melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Dewan Komisaris memiliki tugas untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG. Sekretariat Dewan Komisaris juga wajib memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta, serta mengkoordinasikan anggota Komite jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS' SUPPORTING ORGANS

Board of Commissioners Secretariat

In order to support for the smooth implementation of its duties, the Board of Commissioners is assisted by the Board of Commissioners Secretariat serving as a liaison between the Board of Commissioners with other parties. The Board of Commissioners Secretariat is chaired by an Official of the Board of Commissioners Secretariat.

Duties

3. Preparing meetings, including meeting materials for the Board of Commissioners.
4. Making minutes of the Board of Commissioners meetings in accordance with the Articles of Association of the Company.
5. Administering documents of the Board of Commissioners, whether incoming mails, outgoing mails, minutes of meetings or other documents.
6. Drafting the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners.
7. Preparing the Draft of the Board of Commissioners' Report.
8. Carrying out other duties of the Board of Commissioners.

To maintain a good administration and implementation of corporate governance, the Board of Commissioners Secretariat is obliged to ensure that the above documents are properly stored in the Company.

In addition to performing the above task, the Board of Commissioners Secretariat has the duty to ensure that the Board of Commissioners complies with laws and regulations and applies the principles of GCG. The Board of Commissioners Secretariat should also provide information required by the Board of Commissioners on a regular basis and/or at any time if requested, and coordinate the members of the Committees if necessary in order to expedite the duties of the Board of Commissioners.

Kriteria Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang pejabat Sekretaris Dewan Komisaris yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan BUMN.
2. Memiliki integritas yang baik.
3. Memahami fungsi kesekretariatan.
4. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

Criteria of the Board of Commissioners Secretariat

The Board of Commissioners Secretariat is chaired by an official of the Board of Commissioners Secretariat who must meet the following criteria:

1. Understand SOE management, supervision, and guidance system.
2. Have good integrity.
3. Have a good understanding of secretarial function.
4. Have the ability to communicate and coordinate well.

Remunerasi

Sekretaris Dewan Komisaris diberikan honorarium yang ditetapkan sebesar 15% dari gaji Direktur Utama. Selain itu, Sekretaris Dewan Komisaris juga diberikan tunjangan dan fasilitas serta tantiem/insetif kinerja.

Remuneration

The Board of Commissioners Secretariat receives honorarium that is determined in the amount of 15% of the salary of the President Director. In addition, the Board of Commissioners Secretariat also receives benefits and facilities and tantiem/performance incentive.

Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris / **Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris**

Nama *Name*	Honorarium per Bulan *Monthly Honorarium*	Tunjangan Transportasi & Komunikasi *Transportation and Communication Allowance*	Jumlah Honorarium dan Tunjangan per Bulan *Total Monthly Honorarium & Allowance*	Jumlah Honorarium dan Tunjangan 1 Tahun *Total Honorarium & Allowance in One Year*	Tantiem *Tantiem*	Jumlah Remunerasi Tahun 2016 *Total Remuneration in 2016*
	(Rp)	*(Rp)*		*(Rp)*	*(Rp)*	*(Rp)*
Diah Triana	15.345.000	3.836.250	19.181.250	230.175.000	23.975.020	254.150.020

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2016

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran selama Tahun 2016 sesuai dengan rencana kerja adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Rutin
   a. Rapat Internal Dewan Komisaris
      Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 12 kali *Output* dari rapat Dewan Komisaris selain risalah juga penetapan : surat persetujuan, rekomendasi, saran dan laporan.

   b. Pertemuan Rutin Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris (BOC) dengan Dewan Direksi (BOD), selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 10 kali.

Report of Duty Implementation in 2016

Implementation of activities and budgets of the Board of Commissioners Secretariat during the year 2016 in accordance with the work plan are as follows:

1. Routine Activities
   a. Internal Meeting of the Board of Commissioners
      Throughout 2016, the Board of Commissioners conducted 12 internal meetings of the Board of Commissioners. Results of the Board of Commissioners' meetings, besides minutes of meetings, also included approval letters, recommendation, suggestion and reports.
   b. Regular Joing Meeting of the Board of Commissioners (BOC) and the Board of Directors (BOD), which in 2016, there were 10 Joint Meetings of BOC with BOD.

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi, Dewan Komisaris memberikan masukan atau saran-saran mengenai Kegiatan Operasional Perusahaan (Unit Usaha Gula dan Tembakau), Organisasi/SDM, Keuangan, Informasi Teknologi, Anak Perusahaan/Penyertaan, Penugasan pada PG Bone Camming dan Takalar, Penerapan GCG, Temuan Hasil Pemeriksaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta lain-lain yang dianggap perlu.

c. Kunjungan Kerja/lapangan ke Unit Usaha
Kegiatan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke unit usaha selama tahun 2016 dilakukan secara bersama-sama juga dilakukan dengan pembagian tugas agar efektif dan efisien.
Kegiatan kunjungan kerja Dewan Komisaris ke berbagai unit usaha perusahaan yaitu Unit Usaha Gula, Tembakau.

d. Selama tahun 2016 Dewan Komisaris telah menyampaikan hasil analisa dan klarifikasi atas laporan perkembangan operasional perusahaan serta tanggapan dan saran atas laporan dimaksud kepada Pemegang Saham PTPN X yang dituangkan dalam Tanggapan, Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I, II, III dan Tahunan.

e. Dalam tahun 2016, Dewan Komisaris telah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan PTPN X Tahun Buku 2015 dan Pengesahan RKAP Tahun 2016.

2. Kegiatan Non Rutin (Khusus)
Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapabilitas untuk menunjang tugas fungsi dan kewajiban Dewan Komisaris, selama tahun 2016 Dewan Komisaris PTPN X telah mengikuti/ menghadiri Kegiatan-kegiatan akademik pragmatis dan undangan dan mengadakan pertemuan/rapat khusus dengan beberapa Direksi untuk membahas hal-hal yang cukup strategis

In the joint meeting, the Board of Commissioners provides input or suggestions on the Company's Operations (Sugar and Tobacco Business Units), Organization/HR, Finance, Information Technology, Subsidiaries/Investment, Assignments to PG Bone Camming and Takalar, GCG Implementation, Audit Findings and Partnership and Community Development Program and other matters deemed necessary.

c. Work/Field Visit to Business Unit
The Board of Commissioners' visits to business units during 2016 were conducted jointly and with segregation of tasks to be effective and efficient.

The Board of Commissioners made work/field visits to various business units of the company namely Sugar Business Unit, Tobacco Business Unit.

d. Throughout 2016, the Board of Commissioners has submitted results of analysis and clarification on the report of the Company's operational progress as well as the responses and suggestions for the report to Shareholders of PTPN X as contained in the Response, Opinion and Recommendation of the Board of Commissioners on the QI, QII, QIII and Annual Management Reports.

e. In 2016, the Board of Commissioners has attended the General Meeting of Shareholders (AGM) on Ratification and Approval of the Financial Statements of PTPN X for the Fiscal Year 2015 and Endorsement of the 2016 Company's Budget and Plan.

2. Non-Routine (Special) Activities
In order to develop and enhance their capability to support the implementation of their duties and functions, in 2016, the Board of Commissioners of PTPN X attended pragmatic academic activities and and held special meetings with several Directors to discuss quite strategic matters.

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris oleh Dewan Komisaris

Atas pelaksanaan tugas yang dilakukan, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih kepada Sekretaris Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris telah melakukan fungsi dan perannya terkait mempersiapkan rapat dan membuat risalah bagi Rapat Dewan Komisaris, termasuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran bagi Dewan Komisaris tahun 2016.

Komite Audit

Guna membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan, Perseroan membentuk Komite Audit yang memberikan opini profesional dan independen kepada Dewan Komisaris mengenai laporan atau hal-hal lain yang diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris. Tugas komite ini termasuk memeriksa laporan dari fungsi Audit Internal dan memberikan argumen mendasar terkait pengendalian internal yang dijalankan di seluruh unit Perseroan. Komitmen Komite Audit dijalankan dengan fokus pada efektivitas *corporate governance*, pengendalian internal, *risks assessment*, dan pengelolaan Perseroan secara keseluruhan.

Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, dimana keberadaan komite ini sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya; Peraturan OJK No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan OJK No. 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Susunan Keanggotaan dan Profil Anggota Komite Audit

Sesuai Peraturan OJK No. 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, struktur dan keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan, dengan Komisaris Independen sebagai ketua. Berikut disampaikan susunan Komite Audit tahun 2016,

Performance Evaluation and Assessment of the Board of Commissioners Secretary by the Board of Commissioners

For the execution of her duties, the Board of Commissioners would like to thank the Board of Commissioners Secretary. The Board of Commissioners Secretary has performed her functions and roles related to preparing meetings and making minutes for the Board of Commissioners Meeting, including preparing the Work Plan and Budget for the Board of Commissioners in 2016.

Audit Committee

In order to assist the Board of Commissioners in conducting supervisory duties, the Company has established Audit Committee which provides professional and independent opinion to the Board of Commissioners regarding reports or other matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners. The duties of this Committee include reviewing reports of the Internal Audit function and providing fundamental arguments regarding internal controls carried out throughout the Company's units. The Commitment of the Audit Committee is conducted with a focus on the effectiveness of corporate governance, internal control, risk assessment, and overall management of the Company.

The Audit Committee is directly responsible to the Board of Commissioners, where the existence of this committee is in accordance with Law no. 19 Year 2003 on SOEs; Law no. 40 Year 2007 on Limited Liability Company; Regulation of the Minister of State Owned Enterprise. PER-01 / MBU / 2011 dated 1 August 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises and its amendments; OJK Regulation No. 33/ POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, as well as OJK Regulation no. 55 / POJK.04/2015 on the Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee.

Membership Composition and Profile of Audit Committee Members

Pursuant to OJK Regulation no. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee and Board Manual of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, the composition and membership of the Audit Committee consist of at least the Independent Commissioners and external parties, with Independent Commissioner as Chairman. The Audit Committee composition in 2016 was as below:

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Susunan Komite Audit PTPN X
Periode 1 Januari - 31 Maret 2016

PTPN X Audit Committee Composition
Period January, 1- March 31, 2016

Jabatan *Position*	Nama *Name*	Dasar Pengangkatan *Basis of Appointment*	Awal Jabatan *Served from*	Masa Jabatan *Term of Office*	Periode Jabatan *Term of Office Period*
Ketua *Chairman*	Heru Sudibyo (Komisaris)	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK-SURKP.10.001 tanggal 10 Maret 2010 *BOC Decision Letter No. DK-SURKP.10.001 dated March 10, 2010*	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris *Following the Term of Office as BOC*		
Anggota *Member*	Herry Soelistiono		10 Maret 2010 *March 10, 2010*	3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun *3 years and can be reappointed for a maximum of 2 years*	Ke-2 *2nd period*
Anggota *Member*	Soepraptono				Ke-2 *2nd period*

Pada tanggal 31 Maret 2016, Perseroan melakukan pergantian keanggotaan Komite Audit, dengan susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

On March 31, 2016, the Company conducted replacement of Audit Committee membership to become as follows:

Susunan Komite Audit PTPN X
Periode 31 Maret - 16 September 2016

PTPN X Audit Committee Composition
Period March 31 - September 16, 2016

Jabatan	Nama	Dasar Pengangkatan	Awal Jabatan	Masa Jabatan	Periode Jabatan
Ketua *Chairman*	Heru Sudibyo (Komisaris)	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK-SURKP.16.03 tanggal 31 Maret 2016 *BOC Letter No. DK-SURKP.16.03 dated March*	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris *Following the Term of Office as BOC*		
Anggota *Member*	Wisnu Pudjiatmoko		31 Maret 2016 *March 31, 2016*	3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun *3 years and can be reappointed for a maximum of 2 years*	Ke-2 *2nd period*
Anggota *Anggota*	Adi Rahardjo				Ke-2 *2nd period*

Sejalan dengan pergantian pada jajaran Dewan Komisaris, dimana Komisaris Heru Sudibyo diberhentikan dengan hormat, Dewan Komisaris mengangkat Komisaris Independen, Arvan Rivaldy Rebion Siregar sebagai Ketua Komite Audit.

Along with the change in the Board of Commissioners, where Heru Sudibyo dismissed with respectfully, the Board of Commissioner appoint the Independent Commissioner Arvan Rivaldy Rebion Siregar as the Head of Audit Committe.

Susunan Komite Audit PTPN X
Periode 16 September - 31 Desember 2016

PTPN X Audit Committee Composition
Period September 16 - December 31, 2016

Jabatan *Position*	Nama *Name*	Dasar Pengangkatan *Basis of Appointment*	Awal Jabatan *Served from*	Masa Jabatan *Term of Office*	Periode Jabatan *Term of Office Period*
Ketua *Chairman*	Arvan Rivaldy Rebion Siregar (Komisaris Independen)	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK-SURKP.16.04 tanggal 16 September 2016 *BOC Letter No. DK-SURKP.16.04 dated September 16, 2016*	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris *Following the Term of Office as BOC*		
Anggota *Member*	Wisnu Pudjiatmoko	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK-SURKP.16.03 tanggal 31 Maret 2016 *BOC Letter No. DK-SURKP.16. dated March 31, 2016*	31 Maret 2016 *March 31, 2016*	3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun *3 years and can be reappointed for a maximum of 2 years*	Ke-1 *1st Period*
Anggota *Member*	Adi Rahardjo				Ke-1 *1st Period*

* Profil Ketua Komite Audit, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

*Profile of Audit Committee Chairman can be seen in the BOC Profile of the Company Profile section hereof.

Profil anggota Komite Audit dapat dilihat di bawah ini.

Profiles of Audit Committee members are as follows:

Wisnu Pudjiatmoko
Anggota Komite Audit */ Audit Committee Member*

Wisnu Pudjiatmoko, warga negara Indonesia, usia 62 tahun, kelahiran Kebumen, 27 Desember 1955, berdomisili di Surabaya, Jawa Timur. Lulusan Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1982) dan merupakan pensiunan Perseroan. Karir beliau di Perseroan diantaranya Kepala Bidang Pengadaan Barang dan Bahan (2008-2011); Kepala Biro SPI (2004-2008); dan Kepala Urusan Pengawasan & Evaluasi Keuangan Biro SPI (1999-2002). Mulai bergabung di Perseroan sejak tahun 1983.

Wisnu Pudjiatmoko, Indonesia citizen, aged 62, born in Kebumen, December 27, 1955, domiciled in Surabaya, East Timur. He earned his Bachelor of Economics majoring in Accounting from Gajah Mada University, Yogyakarta (1982) and is a retiree of the Company. His career in the Company includes the Head of Procurement of Goods and Materials (2008-2011); Head of SPI Bureau (2004-2008); And Head of Financial Supervision & Evaluation of the SPI Bureau (1999-2002). First joined the Company in1983

Adi Rahardjo
Anggota Komite Audit */ Audit Committee Member*

Ir. Adi Rahardjo, warganegara Indonesia, usia 63 tahun, kelahiran Purwodadi, 13 Mei 1954, berdomisili di Malang, Jawa Timur. Lulusan Sarjana Pertanian jurusan Ilmu Tanah dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1981). Beliau memiliki karir di Perseroan, diantaranya sebagai Staf Ahli Direksi bidang Pengembangan Lahan dan *On Farm* (2011-2013); Asisten Produksi Kuasa Direksi PTPN X Makassar (2011); Kepala Bidag Budidaya (2010-2011); dan Administratur PG Lestari (2009-2010). Beliau merupakan pensiunan Perseroan, dengan catatan bergabung sejak tahun 1985.

Ir. Adi Rahardjo, Indonesian citizen, aged 63, born in Purwodadi, May 13, 1954, domiciled in Malang, East Java. He earned his Bachelor of Agriculture majoring in Soil Science from Gajah Mada University Yogyakarta (1981). He has an extensive career in the Company, such as Expert Staff of the Board of Directors of Land Development and On Farm (2011-2013); Production Assistant of Board of Directors of PTPN X Makassar (2011); Head of Cultivation Department (2010-2011); Administrator of PG Lestari (2009-2010). He is a retiree of the Company.. First joined the Company in1985.

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Pedoman Kerja Komite Audit

Selain peraturan-peraturan di atas, dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit Perseroan berpegang pada pedoman kerja yang diatur dalam *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Tugas Pokok, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas pokok Komite Audit adalah sebagai berikut:
Membantu Komisaris dalam melakukan pengawasan terutama pada tingkat strategi, meliputi:

1. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) maupun auditor eksternal, meliputi:
   a. Penilaian pelaksanaan kegiatan serta hasil audit oleh SPI meliputi hal-hal yang mempengaruhi keandalan hasil audit.
   b. Kualitas Auditor Eksternal dipengaruhi oleh Ketentuan dan Syarat (KAK), aturan Kementerian BUMN dan Instruksi Dasar Pengadaan Perseroan.

2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya meliputi:
   a. Proses yang dijalankan oleh manajemen untuk memperoleh keyakinan yang memadai akan tercapainya tujuan Perseroan berdasarkan:
      i. Kegiatan operasional yang efektif dan efisien
      ii. Informasi yang layak dipercaya
      iii. Pemberdayaan sumberdaya Perseroan
      iv. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
   b. Keandalan pengendalian manajemen tersebut dipengaruhi oleh:
      i. Lingkungan pengendalian, yaitu atmosfir yang mempengaruhi kegiatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya
      ii. Penilaian terhadap risiko
      iii. Aktivitas pengendalian
      iv. Sistem informasi dan komunikasi
      v. *Monitoring*
   c. Memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya, Komite Audit melakukan evaluasi terhadap unsur-unsur pengendalian pada angka b.(2) dikaitkan dengan pencapaian tujuan pada angka b.(1).

Audit Committee Charter

In addition to the above rules, in performing its functions, the Company's Audit Committee refers to the work guidelines set forth in the Board Manual of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.

Main Duties, Authorities and Responsibilities of the Audit Committee

Main duties of the Audit Committee are as follows:
Assisting the Board of Commissioners in conducting supervision, especially at the strategic level, including:

1. Assessing the implementation of activities and audit results conducted by the Internal Audit Unit (SPI) and external auditors, which covers:
   a. Assessment of the implementation of activities and audit results by SPI including matters affecting the reliability of audit results.
   b. Quality of External Auditor, which is influenced by Terms and Conditions (KAK), rules of the Ministry of SOEs and Basic Instruction of the Company's Procurement.
2. Providing recommendations on the improvement of management control system and its implementation covering:
   a. The processes undertaken by management to obtain reasonable assurance of achieving the Company's objectives based on:
      i. Effective and efficient operational activities;
      ii. Reliable information;
      iii. Empowerment of the Company's resources'
      iv. Compliance with applicable laws and regulations.
   b. The reliability of such management control is influenced by:
      i. Control environment, ie the atmosphere that affects employees' activities in carrying out their work;
      ii. Risk Assessment;
      iii. Control activities;
      iv. Information and communication systems'
      v. Monitoring
   c. Providing recommendations on the improvement of the management control system and its implementation, the Audit Committee evaluates the control elements in point b (2) associated the achievement of the objectives in point b (1).

3. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/*forecast* dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
4. Mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris:
   a. Hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris meliputi hal-hal yang mempunyai pengaruh material terhadap pencapaian tujuan Perseroan, terutama yang terkait dengan pencapaian CBP dan RJP, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
   b. Informasi tersebut dapat diperoleh dari manajemen atau dari pihak luar yang relevan.
5. Melakukan seleksi dan memberikan rekomendasi atas penunjukan Auditor Eksternal kepada Dewan Komisaris untuk diusulkan dalam RUPS.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

Kewenangan Komite Audit adalah:
1. Sebagai Organ Dewan Komisaris, Komite Audit menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit berwenang mananyakan dan meminta penjelasan tentang hal yang relevan dengan tugas kepada Direksi, dimana Direksi wajib memberikan penjelasan.
3. Jika dianggap perlu atas persetujuan Dewan Komisaris dapat meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
4. Sesuai lingkup penugasannya, komite audit dapat melakukan komunikasi langsung dengan Kepala SPI atau stafnya atau meminta data dan laporan hasil audit baik yang bersifat rutin maupun laporan audit khusus dari Kepala SPI untuk memastikan:
   a. Laporan yang disampaikan kepada Pemegang Saham telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu.
   b. Perseroan mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ensure that there is a satisfactory review procedure for information issued by the Company, including brochures, periodic financial reports, projections / forecasts and other financial information submitted to the Board of Commissioners and Shareholders.
4. Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners:
   a. Matters that require the attention of the Board of Commissioners include matters that have a material effect on the achievement of the Company's objectives, particularly those related to the achievement of CBP and Long-Term Plan, as well as compliance with laws and regulations.
   b. Such information may be obtained from the management or from relevant external parties.
5. Selecting and making recommendation on the appointment of the External Auditor to the Board of Commissioners to be submitted in the GMS.
6. Carrying out other duties granted by the Board of Commissioners as long as the duties are within the scope of duties and obligations of the Board of Commissioners under the terms of applicable law.

The authority of the Audit Committee is:
1. As an Organ of the Board of Commissioners, the Audit Committee exercises the authority possessed by the Board of Commissioners in accordance with the Company's Articles of Association.
2. In performing its duties, the Audit Committee is authorized to question and ask for clarification on matters relevant to the duties to the Board of Directors, whereby the Board of Directors shall provide an explanation.
3. If deemed necessary upon approval the Board of Commissioners, may request the assistance of experts in performing their duties for a limited period of time at the expenses of the Company.
4. Subject to the scope of its assignment, the Audit Committee may communicate directly with Head of SPI or his staff or request for data and reports of both routine and special audit reports from the Head of SPI to ensure that:
   a. Reports submitted to Shareholders have been done correctly and on time.
   b. The Company is in compliance with prevailing laws and regulations.

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

c. Manajemen menjamin Auditor Eksternal dan Intern dapat bekerja sesuai standar *auditing* yang berlaku.

d. Manajemen telah menjalankan usaha Perseroan sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
e. Manajemen telah menindaklanjuti rekomendasi hasil-hasil audit.

Komite Audit bertanggung jawab atas:
1. Pelaksanaan tugas pokoknya secara independen sesuai kompetensinya.
2. Pendapat serta rekomendasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Kriteria Keanggotaan dan Independensi Komite Audit
Kriteria penunjukan Komite Audit didasarkan pada integritas, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman masing-masing anggota. Salah seorang anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Komite Audit Perseroan bersifat independen, bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, dan bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

Anggota Komite Audit juga tidak diperkenankan memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama Perseroan. Anggota Komite Audit tidak diijinkan memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Transparansi Independensi Anggota Komite Audit
Di bawah ini disajikan tabel transparansi independesi anggota Komite Audit, termasuk diantaranya keterlibatan anggota Komite Audit di Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir, kepemilikan saham, maupun informasi terkait hubungan usaha dan hubungan afiliasi anggota Komite Audit.

c. The Management ensures the External and Internal Auditors can work according to applicable auditing standards.
d. The Management has been running the Company's business in accordance with sound corporate management principles.
e. The Management has followed up the recommendations of audit results.

The Audit Committee is responsible for:
1. Implementing its main duty independently according to its competence.
2. The opinions and recommendations submitted to the Board of Commissioners.

Membership Criteria and Independence of Audit Committee
Criteria for the appointment of the Audit Committee are based on the integrity, ability, knowledge and experience of each member. One member of the Audit Committee shall have a background on accounting or finance education. Audit Committee is independent and not a person in a public accounting firm, Office Legal consultants, or others who provides audit service or non-audit services and other consulting services to Company within six (6) months prior to be appointed by the Board of Commissioners, and not the person who has authority and responsibility for planning, directing or controlling the activities of the Company within 6 (six) months.

The Audit Committee members are also not allowed to own shares of the Company, either directly or indirectly. In addition, the Audit Committee members are not affiliated with members of the Board of Commissioners, Board of Directors or the main shareholder of the Company. The Audit Committee members are not permitted to have a direct business relationship or indirectly related to the Company's business activities.

Independence Transparency of Audit Committee Member
Below is a table of independence transparency of audit committee members, including the involvement of members of the Audit Committee of the Company within the last six (6) months, stock ownership, as well as information related to the business relationship and affiliated relationships to the Audit Committee.

Keterlibatan Anggota Komite Audit dalam Perseroan / **Involvement of the Audit Committee Members in the Company**

Nama *Name*	Orang dalam di Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir *People in Public Accounting firm, the law firm, or any other party that provides the audit service or non-audit services and other consulting services to the Company within the last six (6) months*	Memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir *Has the authority and responsibility for planning, directing or controlling the activities of the Company within the last six (6) months*
Arvan Rivaldy Rebion Siregar (Ketua/Komisaris Independen)	x	-
Heru Sudibyo (Ketua/Komisaris)	x	-
Wisnu Pudjiatmoko (Anggota)	x	x
Adi Rahardjo (Anggota)	x	x
Herry Soelistiono (Anggota)	x	x
Soepraptono (Anggota)	x	x

v = ada / x = tidak ada

v = present / x = absent

Hubungan Usaha dan Hubungan Afiliasi Antar Sesama Anggota Komite Audit, dengan Direksi dan Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama / **Relationship Between Business and Affiliate Relations among Fellow Member of the Audit Committee, the Board of Directors and the Board of Commissioners, or Major Shareholder**

	Hubungan Afiliasi Dengan				Hubungan Usaha Dengan			
	Komite Audit *Audit Committee*	Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	Direksi *Board of Directors*	Pemegang Saham Pengendali *Owner of Controlling Shares*	Komite Audit *Audit Committee*	Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	Direksi *Board of Directors*	Pemegang Saham Pengendali *Owner of Controlling Shares*
Arvan Rivaldy Rebion Siregar (Ketua/Komisaris Independen)	x	x	x	x	x	x	x	x
Heru Sudibyo (Ketua/ Komisaris)	x	x	x	x	x	x	x	x
Wisnu Pudjiatmoko (Anggota)	x	x	x	x	x	x	x	x
Adi Rahardjo (Anggota)	x	x	x	x	x	x	x	x
Herry Soelistiono (Anggota)	x	x	x	x	x	x	x	x
Soepraptono (Anggota)	x	x	x	x	x	x	x	x

v = ada / x = tidak ada

v = present / x = absent

*) Hubungan usaha termasuk diantaranya hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsbnya; sementara bentuk hubungan afiliasi mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/istri/ anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dsbnya.

*)Business relationship including debts, business cooperation, etc; while the shape of the relationship affiliates include related mainly caused by blood ties as relations husband / wife / child / parent / sibling / in-law, etc.

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Program Peningkatan Kompetensi

Program peningkatan kompetensi, atau yang dikenal di lingkup Perseroan sebagai Program Pembelajaran Berkelanjutan dilakukan oleh Komite Audit agar senantiasa dapat mengikuti serta memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perseroan dan pengetahuan-pengetahuan lain terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Audit.

Di tahun 2016 Komite Audit tidak melaksanakan program pembelajaran berkelanjutan.

Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi, Satuan Pengawasan Intern (SPI) atau Auditor Publik untuk hadir dalam rapat dan memberikan informasi yang dianggap perlu bagi Komite Audit untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan rapat Komite Audit sebanyak 3 (tiga) kali.

Kebijakan Remunerasi

Remunerasi anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perseroan, dengan besaran maksimal 20% dari gaji Direktur Utama. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris. Kepada anggota Komite Audit yang bukan merupakan Dewan Komisaris, Perseroan memberikan kebijakan remunerasi sebagai berikut,

Competency Enhancement Program

Competency enhancement program, or what is known in the scope of the Company as a Sustainable Learning Program carried out by the Audit Committee in order to be able to follow as well as updated information about the latest developments of the Company's business activities and other insights relating to the implementation of the Audit Committee duties.

In 2016, the Audit Committee did not carry out continuous learning program.

Audit Committee Meeting

Meetings of the Audit Committee may invite the Board of Commissioners, Directors, Internal Audit Unit (IAU) or the Auditor Public to attend the meeting and provide information that is considered necessary for the Audit Committee to carry out duties and responsibilities.

In 2016, the Audit Committee meeting has been held for three (3) times.

Remuneration Policy

Remuneration to the Audit Committee was decided by the Board of Commissioners with the capability of the Company, with a maximum amount of 20% of the salary of the Director. Commissioners then became Chairman / member of the Audit Committee was not given additional income other than income from office as member of the Board Commissioner. To the members of the Audit Committee who is not a Board of Commissioners, the Company provides policy remuneration as follows,

Remunerasi Komite Audit Dewan Komisaris / **Remunerasi Komite Audit Dewan Komisaris**

Nama *Name*	Periode Menjabat *Office Period*	Honorarium per Bulan *Honorarium per month* *(Rp)*	Honorarium 1 Tahun *Honorarium per year* *(Rp)*
Herry Soelistiono (Anggota)	Januari – Maret	12.500.000	37.500.000
Soepraptono (Anggota)	Januari – Maret		37.500.000
Wisnu Pudjiatmoko (Anggota)	April - Desember		112.500.000
Adi Rahardjo (Anggota)	April - Desember		112.500.000
Jumlah			300.000.000

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2016

Pelaksanaan tugas Komite Audit di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi kegiatan SPI
2. Evaluasi Pemeriksaan KAP 2016
   Telah diadakan pertemuan dengan KAP dengan obyek Kepatuhan terhadap Perundang Undangan dan *Manajemen Letter*.
3. *Review* Laporan Manajemen dan Prognosa 2016
4. Evaluasi atas Laporan Tahunan Perusahaan 2015 dan RKAP 2017
5. Kunjungan Komite Audit ke UUS Gula dan UUS Tembakau.

Pelaksanaan tugas di atas telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai bahan rujukan bagi Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan operasional dan bisnis oleh Direksi.

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Komite Audit oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya atas kinerja yang telah ditunjukkan oleh Komite Audit. Peran strategis Komite Audit untuk menjalankan fungsi pengawasan Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan baik, dimana evaluasi yang dilakukan Komite Audit meliputi *review* atas kegiatan SPI, KAP, serta kunjungan Komite Audit ke lapangan.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Hingga akhir tahun 2016, Perseroan belum memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Fungsi nominasi dan remunerasi yang berlaku di Perseroan dilakukan melalui usulan dari Pemegang Saham Seri A yang kemudian akan ditetapkan oleh RUPS.

Report of the Year 2016

The execution of duties of the Audit Committee in 2016 were as follows:

1. Evaluation of SPI
2. Evaluation Examination of KAP 2016
   KAP has held a meeting with the object of Compliance Regulations and Letter of management.
3. Review and Prognosis of Management Report 2016
4. Evaluation of the Company's Annual Report 2015 and CBP 2017
5. Visits to the Audit Committee UUS Sugar and Tobacco.

The implementation of the above tasks has been reported to the Board as a reference material for BOC in conducting oversight of the operational and business management by the Board of Directors.

Evaluation and Performance Assessment of the Audit Committee by the Board of Commissioners

BOC expressed his appreciation and gratitude for the performance of which has been shown by the Audit Committee. The strategic role of the Audit Committee to execute the supervision function of the BOC has been well implemented, where the evaluation done by the Audit Committee included a review of the activities of SPI, KAP, as well as the Audit Committee's visit to the field.

Nomination and Remuneration Function

Until the end of 2016, the Company has not had a Nomination and Remuneration Committee. The Function of nomination and remuneration prevailed in the Company was carried through the proposal of the Shareholders of Series A which will then be set by the General Meeting of Shareholders.

"Sesuai Anggaran Dasar PTPN X, nominasi dan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A, dengan mekanisme penetapan dan pengesahan melalui RUPS."

"In accordance with the Statutes of PTPN X, nomination and remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors is proposed by the Share Holders of Series A, with a mechanism for setting and ratification by the General Meeting of Shareholders."

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Kebijakan Suksesi Direksi

Pergantian Direksi Perseroan tunduk dan patuh berdasarkan mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam rangka mewujudkan proses dan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Direksi yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Perseroan telah mengikuti persyaratan dan tata cara yang diatur melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 mengenai Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Sekretaris Perusahaan

Sebagaimana ditegaskan dalam peraturan OJK No. 35 / POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Pedoman Tata Kelola Perusahaan dari Perseroan, dan *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi yang dimiliki Perseroan, fungsi Sekretaris Perusahaan memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG; memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta; sebagai penghubung *(liaison officer)* dengan pihak-pihak pemegang kepentingan di luar Perseroan seperti para pemegang saham, lembaga otoritas pasar modal dan keuangan, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan; dan menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab atas pelaksanaan program pengenalan Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris; keterbukaan informasi terhadap publik termasuk ketersediaan informasi pada situs *web* Perseroan sebagaimana diatur dalam *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi yang dimiliki Perseroan.

Keberadaan Sekretaris Perusahaan Perseroan diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan OJK No. 35 /POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Succession Policy of Director

Substitution Board of Directors is subject and obedient based on the mechanisms established by laws regulations, including Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. In order to realize a process and mechanism of the election and replacement of members of the Board of Directors that is transparent, accountable and may accounted for, the Company has followed the requirements and procedures stipulated by Regulation by State Enterprises No. PER-03 / MBU / 2012 dated March 29, 2012 regarding Guidelines for Appointment of Members of the Board of Directors and Members of the BOC Subsidiary State-Owned Enterprises.

Corporate Secretary

As defined by the FSA regulation No. 35 /POJK.04/2014 about the Secretary of the Issuer Company or Public Company, Code of Corporate Governance of the Company, and the Board of Commissioners and Directors of the Board Manual owned by the Company, the function of a Corporate Secretary has an important role in ensuring that the Company complies with the disclosure requirements in line with the implementation of corporate governance principles; give information required by the Board of Directors and Board of Commissioners periodically and / or at any time when requested; as a liaison officer with parties outside the Company's stakeholders such as the shareholders, capital market institutions and financial authorities and other parties concerned; and administer and store company documents, including but not limited to the list of shareholders, Special Register and the minutes of meetings of the Board of Directors, board meetings and the General Meeting of Shareholders..

Secretary is also responsible for the implementation of the program for the introduction of the Company's Board of Directors and / or Board of Commissioners; disclosure of information to the public, including the availability of information on the Company's website as set out in the Board Manual of the Board of Commissioners and Directors of the Company.

The existence of the Corporate Secretary of the Company regulated in Law No. 19 of 2003 on state enterprises and FSA Regulation No. 35 /POJK.04/2014 on Corporate Secretary for Public Listed Company. Secretary The Company is directly responsible to the Director.

Pejabat Sekretaris Perusahaan dan Dasar Pengangkatan

Pejabat Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. XX-SURKP/15.010 tanggal 18 Februari 2015, Direksi menetapkan Adi Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan dan mempercayakan pelaksanaan tugas serta fungsi Sekretaris Perusahaan untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan.

Corporate Secretary and Basis of Appointment

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Managing Director based on internal mechanism of the Company with the approval of the Board of Commissioners. Based on the Decree of the Board of Directors No. XX- SURKP / 15,010 dated February 18, 2015, the Board of Directors appointed Adi Santoso as a Corporate Secretary and entrust the implementation of the tasks and functions of the Corporate Secretary to be implemented by the concerned.

Adi Santoso
Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*

Ir. Adi Santoso, MM., warga negara Indonesia, usia 53 tahun, kelahiran Bondowoso, 9 Januari 1964, berdomisili di SIdoarjo, Jawa Timur. Lulusan Insinyur dari Institut Teknologi Bandung (1987), ST Inten Bandung (1992) dan Magister Manajemen dari Universitas Airlangga, Surabaya (1999). Bergabung di Perseroan sejak 1993, beliau sempat dipercaya menjadi Kepala Bidang Pengadaan Bahan & Barang (2012-2015). Adi Santoso dipercaya untuk melaksanakan tugas Sekretaris Perusahaan sejak Februari 2015.

Ir. Adi Santoso, MM., An Indonesian citizen, age 53, born in Bondowoso, January 9th, 1964, domiciled in Sidoarjo, East Java. Engineering graduates from Bandung Institute of Technology (1987), ST Inten Bandung (1992) and Masters on Management of the University of Airlangga, Surabaya (1999). Joined the Company since 1993, he was appointed as Head of Procurement of Goods (2012-2015). Adi Santoso was trusted to carry out the task of the Corporate Secretary since February 2015.

Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan dari Perseroan memiliki pedoman kerja yang tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan serta *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dimiliki Perseroan, tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan secara jelas telah diuraikan.

Work Guidelines of Corporate Secretary

Corporate Secretary of the Company has a work guidelines listed in the Guidelines of Corporate Governance as well as the Board of Commissioners and Board of Directors Manual. In the Guidelines of Corporate Governance of the Company, duties and functions of the Corporate Secretary are clearly described.

Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dari Perseroan, fungsi Sekretaris Perusahaan adalah:

1. Memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu bila diminta.
3. Sebagai penghubung (*liaison officer*).
4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.
5. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Functions and duties of the Corporate Secretary

Based on the Guidelines of Corporate Governance of the Company, Corporate Secretary functions are:

1. Ensuring that the Company complies with the disclosure requirements in line with the application of the principles of good corporate governance.
2. Provide the information needed by the Board of Directors and Board of Commissioners periodically and / or at any time when requested.
3. As a liaison (liaison officer).
4. Administer and store documents of the Company, including but not limited to the list of holders stock, special list and minutes of meetings of the Board of Directors, board meetings and the AGM.
5. Implementation of the orientation program for the Company for Directors and / or Board of Commissioners.

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Tugas Sekretaris Perusahaan yaitu:

1. Dalam kaitannya dengan rapat Direksi serta rapat Dewan Komisaris dan Direksi:
   a. Mengkoordinasikan rapat.
   b. Menyiapkan undangan, jadwal rapat, agenda, dan materi rapat.
   c. Membuat, mendokumentasikan, dan mengirimkan risalah rapat tersebut kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Dalam kaitannya dengan Pemegang Saham:
   a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pra-RUPS.
   b. Mengkoordinasikan perencanaan dan penyelenggaraan RUPS, baik yang bersifat tahunan maupun yang bersifat luar biasa atau pertemuan lainnya dengan Pemegang Saham.
   c. Membuat dan mendokumentasikan risalah rapat.
   d. Mendokumentasikan surat-menyurat antara Direksi dan pemegang saham.
3. Dalam kaitannya dengan Dewan Komisaris:
   a. Mengkoordinasikan arus informasi (laporan manajemen dan laporan lainnya) kepada Dewan Komisaris.
   b. Mendokumentasikan surat menyurat antara Direksi dan Dewan Komisaris.
   c. Mengkoordinasikan implementasi saran/nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi.
4. Dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan di bidang usaha Perseroan, termasuk yang berkaitan dengan GCG, dan menganalisis dampaknya terhadap Perseroan.
5. Sekretaris Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Memberikan masukan/informasi kepada Direksi untuk mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan GCG dan etika korporasi, serta memberikan masukan tentang peraturan perundang-undangan yang baru.
   a. Memberikan pendapat hukum terhadap setiap rancangan produk yang memiliki kekuatan hukum di lingkungan Perseroan.
   b. Mengkoordinasikan pembuatan buku laporan tahunan, profil Perseroan, brosur mengenai perseroan, dan media lainnya.

Duties of the Corporate Secretary

1. In conjunction with the meeting of Board of Directors and Board of Commissioners and Directors:
   a. Coordinate meetings.
   b. Preparing invitations, meeting schedules, agendas and meeting materials.
   c. Create, document, and send the minutes of the meeting to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
2. In relation to Shareholders:
   a. Coordinate the implementation of the Pre-GMS.
   b. To coordinate the planning and implementation of the GMS, both annual and that is extraordinary or other meetings with shareholders.
   c. Create and document the minutes of meeting.
   d. Documenting the correspondence between the Board of Directors and shareholders.
3. In conjunction with the Board of Commissioners:
   a. Coordinate the flow of information (management report and other reports) to the BOC.
   b. Document the correspondence between the Board of Directors and Board of Commissioners.
   c. Coordinate the implementation of suggestions / advice from the Board of Commissioners to the Board.
4. In relation to compliance with the legislation in the field of business of the Company, including related to GCG, and analyze the impact on the Company.
5. The Corporate Secretary shall maintain confidentiality of documents, data and confidential information except in order to fulfill obligations under the legislation.
6. Provide feedback / information to the Board of Directors to comply with all laws and regulations related with good corporate governance and corporate ethics, as well as provide input on new legislation.
   a. Provide a legal opinion on any product design that has the power of law in the vicinity of the Company.
   b. Coordinate the making of annual report book, company profiles, brochures about the company, and other media.

7. Dalam kaitannya dengan Pemangku Kepentingan:
   a. Menjadi penghubung antara Perseroan dan masyarakat atau badan-badan yang menjalin hubungan dengan Perseroan.
   b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan Perseroan.
   c. Membantu manajemen dalam menjalin hubungan baik dengan instansi yang terkait dengan Perseroan (pemerintah, parlemen, dan lain-lain).

7. In relations with the stake holders:
   a. Become a liaison between the Company and the people or entities who have a relationship with the Company.
   b. Provide the public with any information needed relating with the Company.
   c. Assisted management in establishing good relationships with relevant agencies (such as the Government, Parliament, etc.).

Struktur Organ Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan ditunjuk langsung oleh Direktur Utama. Fungsi/urusan di bawah Sekretaris Perusahaan terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu Data dan Kesekretariatan, Komunikasi Perusahaan, dan Teknologi Informasi.

Di bawah ini disajikan struktur organ dan pembagian fungsi/urusan di bawah Sekretaris Perusahaan.

Organ Structure of the Corporate Secretary

The corporate secretary is directly appointed by the Director. Function / affairs under the Corporate Secretary are divided into 3 (three), they are Data and Secretariat, Corporate Communications and Information Technology.

This section presents the organ structure and division of functions / affairs under the Corporate Secretary.

Struktur Organisasi Sekeretaris Perusahaan PT. Perebunan Nusantara X
Organizational Structure of the Corporate Secretary PT. Perebunan Nusantara X

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Program Pengembangan Kompetensi

Program pengembangan kompetensi merupakan bagian dari upaya Sekretaris Perusahaan untuk dapat mengikuti perkembangan industri perkebunan. Berikut disampaikan kegiatan pengembangan kompetensi dari Sekretaris Perusahaan.

Competency Development Program

The competence development program is a part of efforts of the Corporate Secretary to keep up with the development of the plantation industry. Below is the competence development activities of the Corporate Secretary.

Peserta dari Divisi Sekretaris Perusahaan *Participants from the Division of Corporate Secretary*	Kegiatan *Activities*	Tanggal *Date*	Tempat *Venue*	Penyelenggara *Organizer*
3 karyawan/ *Employees*	*Training Software* Microsoft	10 Februari 2016	Best Western Papilio Hotel Surabaya	Internal Perseroan, bekerjasama dengan PT SoftwareOne Indonesia *Internal Company, in cooperation with PT SoftwareOne Indonesia*
7 karyawan/ *Employees*	*Training Software* Microsoft	11 Februari 2016	Best Western Papilio Hotel Surabaya	Internal Perseroan, bekerjasama dengan PT SoftwareOne Indonesia *Internal Company, in cooperation with PT SoftwareOne Indonesia*
4 karyawan/ *Employees*	*Training Software* Microsoft	10 - 11 Februari 2016	Best Western Papilio Hotel Surabaya	Internal Perseroan, bekerjasama dengan PT SoftwareOne Indonesia *Internal Company, in cooperation with PT SoftwareOne Indonesia*
2 karyawan/ *Employeest*	Pelatihan *Training of Trainer* GIS Tingkat *Advance*	18 - 23 April 2016	Allianz Tower Jakarta	PT Micronet Gigatech Indoglobal

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan Tahun 2016

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang dilakukan di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Laporan kemajuan Analisa Data & Kesekretariatan meliputi:
   a. Menyiapkan Laporan Manajemen perusahaan triwulan I, II , III, dan *Unaudited* tahun 2016; Laporan manajemen perusahaan bulan Mei, Juli Agustus, Oktober dan November 2016.
   b. Menyiapkan data statistik yang menyangkut permintaan data dari pemegang saham (Kementerian BUMN & PTPN III (Persero)) dan *stakeholders.*
   c. Menyiapkan bahan rapat rapat pembahasan teknis, Pra RUPS dan RUPS RKAP 2016 dan Tutup Buku Tahun 2015.
   d. Menyiapkan bahan rapat gabungan Direksi dan Komisaris, sampai dengan bulan Desember 2016 sudah dilaksanakan sebanyak 11 kali.

Brief Report on Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary 2016

Duties and responsibilities of the Corporate Secretary conducted in 2016 are as follows:

1. Report on progress of Data Analysis & Secretariat, include:
   a. Set up a company Management Report of quarter I, II, III, and Unaudited 2016; Company's management reports of May, July August, October and November 2016.
   b. Prepare statistical data concerning the data requests from shareholders (SOE Ministry PTPN III (Persero)) and stakeholders.
   c. Prepare meeting materials on technical discussion meetings, Pre-GMS and GMS CBP 2016 and Book Closing of 2015.
   d. Prepare materials joint meetings of Directors and Commissioners, until the month of December 2016 that have been held for 11 times.

e. Menyiapkan materi presentasi untuk Direksi dalam rangka kegiatan kunjungan Menteri BUMN acara *Soft Launching* Kartu Tani, laporan ke DPR ke Pemegang Saham & dari perusahaan lain, dan *Media Gathering*

2. Laporan kemajuan Komunikasi Perusahaan meliputi: Kegiatan komunikasi perusahaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016, adalah:
   a. Mengunggah berita, artikel, dan informasi bagi *stakeholder* di *website www.ptpn10.co.id* dan portal BUMN di *www.publik.bumn.go.id/ptpn10* secara berkala. Jumlah unggahan hingga akhir 2016 adalah 361 berita, artikel, dan informasi lainnya.
   b. Mendokumentasi (*media monitoring*) berita yang terkait *core business* perusahaan dan anak perusahaan di media cetak dan *online*.
   c. Penerbitan Majalah Internal Triwulanan (I, II) PTPN-X Magz Tahun VI edisi 019 (Januari-Maret), edisi 020 (April-Juni) 2016; edisi 021 (Juli-September); dan edisi 022 (Oktober-Desember).
   d. Penyelenggaraan *event* internal dan eksternal sebanyak 44 kali.
   e. Konferensi pers sebanyak 4 (empat) kali.
   f. Kunjungan media sebanyak 8 (delapan) kali.
   g. Penerbitan siaran pers sebanyak 9 (sembilan) kali.

Audit internal

Kegiatan Audit Internal adalah bagian dari suatu fungsi pengendalian internal yang mengidentifikasi dan mengukur secara objektif dan independen mengenai keselarasan antara pelaksanaan aktivitas dengan rencana, kebijakan, peraturan dan ketentuan, sistem pencatatan dan pelaporan, serta sistem pembinaan sumber daya manusia yang telah ditetapkan. Sesuai dengan struktur organisasi Perseroan dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 67, bahwa di setiap BUMN wajib dibentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang merupakan aparat pengawasan internal perusahaan.

Keberadaan Unit SPI Perseroan diatur dan diperkuat melalui peraturan Bapepam LK No. IX.I.7 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, dan Piagam SPI yang telah dimiliki Perseroan.

e. Set up a presentation to the Board of Directors in regard to the visit of the Minister of State Enterprises on Soft Launching Event of Tani card, report to the Parliament to shareholders of other companies, and Media Gathering

2. Corporate Communications progress report include: Corporate communications activities that have been held in 2016, are:
   a. Upload news, articles, and information for stakeholders in www.ptpn10.co.id website and portal SOE www.publik.bumn.go.id/ptpn10 periodically. Total uploads until the end of 2016 were 361 news, articles, and other information.
   b. Document (media monitoring) news related to the core business of the company and its subsidiaries in the printed media and online.
   c. Internal Magazine Publishing Quarterly (I, II) PTPN X Magz Year VI edition of 019 (January-March), issue 020 (April-June) 2016; 021 edition (July to September); and the issue of 022 (October-December).
   d. Organizing of internal and external events for 44 times.
   e. Press conference for 4 (four) times
   f. Media visit for 8 (eight) visits
   g. Press Releases for 9 (nine) times.

Internal Audit

Internal Audit activity is a part of an internal control functions that identify and quantify objectively and independently the alignment between the organizing of the activities with the plans, policies, rules and regulations, recording and reporting system, as well as human resource development system that has been set. In accordance with the Company's organizational structure and Act No. 19 of 2003 on the Board State Owned Enterprises Article 67, that in each SOE Internal Audit Unit (IAU) shall be established, which is the company's internal control official.

The existence of the Company SPI Unit is organized and strengthened through Bapepam LK No. IX.I.7 2008 on Establishment and Guidelines for Internal Audit Charter, and the Charter SPI that has been owned by the Company.

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Pejabat Satuan Pengawasan Intern dan Dasar Pengangkatan

Pejabat atau Manajer SPI Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. XX-SURKP/16.010 tanggal 15 Januari 2016, Direksi mengangkat Heru Sinarjanto sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern.

Internal Audit Officer and Basis for Appointment

Officials or SPI Manager of Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Director. Based on the Decree No. XX-SURKP / 16 010 dated January 15, 2016, the Board of Directors appointed Heru Sinarjanto as Chief of Internal Control Unit.

Heru Sinarjanto
Kepala Satuan Pengawasan Intern/ *Chief of Internal Control Unit*

Heru Sinarjanto, warga negara Indonesia, usia 54 tahun, kelahiran Magetan, berdomisili di Mojokerto, Jawa Timur. Lulusan Sarjana Pertanian Universitas Pembangunan "Veteran" Yogyakarta (1998), dan Magister Agrobisnis di Universitas Tri Buana Tungga Dewi Malang (2008). Menempuh Sertifikasi Profesional Auditor Internal di PPA&K dengan gelar PIA tahun 2016. Bergabung di PTPN X sejak tahun 1991, beliau menempati berbagai posisi di Pabrik Gula dan Kantor Pusat. Beberapa jabatan yang pernah dijabat adalah: Kepala Divisi PKBL & CSR (2014), Manajer Tanaman PG Gempolkrep (2013-2014), Asisten Manajer TMA di PG Watoetoelis (2006-2007), Manajer Tanaman PG Watoetoelis (2011-2012), Asisten Manajer TMA PG Ngadiredjo (2008), Asisten Manajer TMA PG Pesantren Baru (2009-2010). Selain itu pernah ditugaskan sebagai Anggota Tim Penyelesaian Hutang Piutang petani serta Ketua Tim Investigasi Bagi Hasil Setara (2016). Heru Sinarjanto dipercaya untuk melaksanakan tugas Kepala Satuan Pengawasan Intern sejak Januari 2016.

Heru Sinarjanto, an Indonesian citizen, age 54, born in Magetan, domiciled in Mojokerto, East Java. Graduates of Agricultural Development University "Veteran" Yogyakarta (1998), and Master of Agribusiness in Tungga Dewi Tri Buana University of Malang (2008). Taking Professional Certification on Internal Auditor in PPA&K with PIA's degree in 2016. He joined PTPN X since In 1991, he held various positions in the Sugar and the Central Office. Some positions ever held are: Division Head of PKBL and CSR (2014), Plant Manager of PG Gempolkrep (2013-2014), Assistant Manager of TMA in PG Watoetoelis (2006-2007), Plant Manager of PG Watoetoelis (2011-2012), Assistant Manager of Ngadiredjo TMA PG (2008) Assistant Manager of TMA PG Pesantren Baru (2009-2010). Besides, he has been assigned as Team Member of Debt farmer resoulution and chairman of the Investigation Team of Bagi Hasil Setara (Equals Revenue Share) (2016). Heru Sinarjanto was entrusted to execute the task of the Head of Internal Control Unit since January 2016

Piagam Audit Internal

Dalam melaksanakan fungsi Audit Internal, Satuan Pengawasan Intern Perseroan berpedoman pada Internal Audit *Charter* atau Piagam Audit Internal Perseroan yang telah disahkan Direksi pada 28 Februari 2013. Piagam ini memuat antara lain:

1. Kedudukan Audit Internal.
2. Ruang lingkup, hak dan kewajiban.
3. Kewenangan dan tanggung jawab.
4. Tanggung jawab profesi.
5. Struktur dan Kedudukan SPI.
6. Metode kerja.
7. Pelaporan.
8. Kode etik.

Internal Audit Charter

In carrying out the functions of the Internal Audit, the Internal Audit Unit of the Company was based on the Internal Audit Charter which was approved by the Board of Directors on 28 February 2013. This Charter contains among others:

1. The position of Internal Audit.
2. The scope, rights and obligations.
3. The authority and responsibility.
4. Profession responsibility .
5. Structure and Position of SPI.
6. The working methods.
7. Reporting.
8. Code of Ethics.

Fungsi, Tugas dan Wewenang

Fungsi Satuan Pengawasan Intern adalah:

1. Membantu organisasi mencapai tujuannya.
2. Memonitor risiko dan memastikan bahwa terdapat pengendalian yang memadai untuk memitigasi risiko tersebut
3. Meningkatkan GCG.

Function, Task, and Authority

The functions of the Internal Audit unit are

1. Assist the organization to achieve its objectives.
2. Monitor the risks and ensure that there are adequate controls to mitigate the risks mentioned
3. Improve the corporate governance.

Tugas Satuan Pengawasan Intern adalah:
1. Melakukan audit terhadap semua kegiatan operasional unit kerja dalam organisasi Perseroan.
2. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian manajemen unit kerja
3. Memberikan rekomendasi, konsultasi dan fasilitasi kepada unit kerja atau manajemen untuk meningkatkan pengendalian manajemen, sistem dan prosedur, kinerja dan pengelolaan risiko serta mendorong pelaksanaan GCG.
4. Memberikan saran untuk efisiensi dan efektifitas biaya serta peningkatan pendapatan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya SPI memiliki wewenang untuk:
1. Melakukan audit terhadap semua kegiatan unit kerja dalam organisasi Perseroan dan badan-badan afiliasi dimana Perseroan mempunyai penyertaan sekurang-kurangnya 50% modal perusahaan.
2. Melakukan audit terhadap badan usaha afiliasi lain ataupun badan lainnya dengan persetujuan Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3. Melakukan penyelidikan terhadap semua kasus/ masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan, baik berupa penipuan, pemalsuan, penggelapan, pencurian, pembongkaran, perampokan, atau hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan kerugian materil maupun immaterial bagi Perseroan.

Tanggung Jawab SPI dan Ruang Lingkup Audit

Tanggung jawab SPI adalah memberikan analisa, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi mengenai aktivitas yang diperiksa yang dilakukan sesuai dengan standar audit dan standar perilaku professional yang dituntut kode etik. Tanggung jawab ini meliputi juga koordinasi pelaksanaan audit dengan auditor eksternal sehingga tujuan audit semua pihak tercapai. Satuan Pengawasan Intern berada dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Ruang lingkup audit mencakup pemeriksaan, pengkajian, dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas dari Sistem Pengendalian Internal Perseroan dan mutu kinerja dari pelaksanaan tanggung jawab yang ditetapkan serta pemeriksaan terhadap pengelolaan resiko, yaitu:

1. Mendampingi (*counter part*) pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
2. Peningkatan pengetahuan kemampuan/ketrampilan petugas dan kualitas hasil pemeriksaan.

Internal Audit Unit are:
1. Conduct an audit of all operational activities of organizational units within the Company.
2. Identify matters requiring the attention of the management unit
3. Provide recommendations, consultation and facilitation to the work unit or management to improve management controls, systems and procedures, performance and risk management as well as encouraging the implementation of GCG.
4. Provide advice to the efficiency and cost effectiveness as well as increased revenue

In carrying out its duties and responsibilities SPI has the authority to:
1. Conduct an audit of all activities of units within the Company's organization and affiliated bodies in which the Company has ownership of at least 50% of the company's capital.
2. Conduct audits of other affiliated business entities or other entities with the approval of Director and BOC.
3. Conduct investigation of all cases / issues in every aspect and element of activity, either fraud, forgery, embezzlement, theft, burglary, robbery, or other things that can material and immaterial incur losses for the Company.

Responsibility of SPI and Scope of Audit

SPI responsibility is to provide analysis, assessment, recommendation, consultation and information about activities that are examined and conducted in accordance with the auditing standards and the standards of professional behavior that demanded a code of ethics. This responsibility includes also the coordination of the audit with the external auditors that audit purposes all the parties reached. Internal Control Unit is responsible directly to the Managing Director.

The scope of the audit includes the examination, assessment, and evaluation on the adequacy and effectiveness of the Internal Control System of the Company and the performance quality of the implementation of the responsibilities assigned and examination of risk management, they are:
1. Assist (counter part) examination conducted by the Supreme Audit Agency (BPK) on management and financial responsibility of the State.
2. Improved knowledge of ability / skill personnel and the quality of the examination results.

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Struktur Organisasi dan Kedudukan Satuan Pengawasan Intern

SPI berada di bawah Direksi. Struktur organisasi internal SPI dapat dilihat di bawah ini.

Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Intern Perseroan

Jumlah karyawan SPI Perseroan di tahun 2016 sebanyak 14 orang, dengan pembagian fungsi sebagai berikut:

1. 1 orang Penanggungjawab (Kepala SPI)
2. 1 orang Pengawas (KaUr. Pengawasan Produksi)
3. 11 orang Pemeriksa, terdiri dari:
   a. Tanaman (Tebu dan Tembakau): 4 orang
   b. Teknik: 2 orang
   c. Keuangan: 3 orang
   d. QA (*Quality Assurance*): 1 orang
   e. IT (Informasi dan Teknologi): 1 orang
   f. Kesekretariatan: 1 orang

Organizational Structure and Position of Internal Audit

SPI is under the Board of Directors. SPI internal organizational structure can be seen below.

The number of employees of the Company SPI in 2016 is14 people, with the division of functions as follows:

1. 1 person-in-charge (Head of Internal Audit)
2. 1 Supervisor (Head Supervision of Production)
3. 11 Audit, consisting of:
   a. Plants (Cane and Tobacco): 4
   b. Technique: 2
   c. Financial: 3
   d. QA (Quality Assurance): 1 person
   e. IT (Information and Technology): 1 person
   f. Secretariat: 1

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

Kriteria dan Kode Etik Satuan Pengawasan Intern

Perseroan menetapkan persyaratan karyawan SPI dengan kriteria berintegritas, memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit, berpengetahuan tentang peraturan perundangan-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan-undangan terkait lainnya, dan memahami prinsip-prinsip GCG dan manajemen risiko. Karyawan SPI Perseroan diwajibkan mematuhi Standar Profesi Auditor Internal dan Kode Etik Auditor Internal yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Internal, serta wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.

Kualifikasi Auditor Internal

Hingga 31 Desember 2016, kualifikasi auditor internal dari SPI Perseroan adalah:

1. Dasar - Dasar Audit: 13 orang
2. Audit Operasional: 9 orang
3. Komunikasi Psikologi Audit: 10 orang
4. Audit Kecurangan: 7 orang
5. Pengelolaan Tugas-tugas Audit: 2 orang
6. Profesional Internal Audit (PIA): 3 orang

Program Pengembangan Kompetensi

Program pengembangan kompetensi yang diikuti Kepala dan karyawan SPI di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Criteria and Internal Control Unit Code

The Company establishes requirements for SPI employees with criteria such as, integrity, having knowledge and technical experience concerning audit, knowledgeable about the laws and regulations in the field of market regulatory capital and other relevant legislation, and understand the principles of good corporate governance and management risk. Company employees are required to adhere SPI Professional Standards and Code of Ethics of Internal Auditors issued by the Association of Internal Auditors, and shall maintain the confidentiality of information and / or data companies related to the duties and responsibilities of the Internal Audit except as required by regulations legislation or determination / decision of the court.

Internal Auditor Qualification

Until December 31, 2016, the internal auditor qualification of SPI Company are:

1. Basic Audit: 13
2. Operational Audit: 9
3. Communication Psychology Audit: 10
4. Audit Cheating: 7
5. Manage Tasks Audit: 2
6. Professional Internal Audit (PIA): 3

Competency Development Program

Competency development program followed by the Head and employees of SPI in 2016 are as follows:

Peserta dari Divisi SPI *Participants from SPI Division*	Kegiatan *Activities*	Tanggal *Date*	Tempat *Venue*	Penyelenggara *Organizer*
3 orang *3 person*	Kursus Dasar-dasar Audit *Basic Audit Classes*	11 - 21 Januari 2016	Cipanas - Puncak	Pusat Pengembangan Akuntansi dan keuangan (PPA&K)
2 orang *2 person*	Kursus Audit Kecurangan *Fraud Audit Classes*	14 - 20 Januari 2016	Cipanas - Puncak	PPA&K
4 orang *4 person*	Kursus Pengadaan Barang dan Jasa *Procurement Classes*	14 - 20 Januari 2016	Cipanas - Puncak	PPA&K
2 orang *2 person*	Pelatihan Komunikasi dan Psikologi Audit *Communication Training and Audit Psychology*	15 - 24 Februari 2016	Cipanas - Puncak	PPA&K
1 orang *1 person*	Pelatihan Dasar-dasar Audit *Training for Basic Audit*	16 - 26 Mei 2016	Cipanas - Puncak	PPA&K
1 orang *1 person*	Pelatihan Audit Operasional *Training for Operational Audit*	16 - 25 Mei 2016	Cipanas - Puncak	PPA&K

Peserta dari Divisi SPI *Participants from SPI Division*	Kegiatan *Activities*	Tanggal *Date*	Tempat *Venue*	Penyelenggara *Organizer*
1 orang *1 person*	Pelatihan Diklat Khusus Kepala SPI *Special Training for SPI Head*	19 - 25 Mei 2016	Cipanas - Puncak	PPA&K
1 orang *1 person*	Seminar dan Pengukuhan Gelar PIA (Profesional Internal Auditor) *Seminar and Inauguration degree of PIA (Professional Internal Auditor)*	23 - 27 Agustus 2016	Centara Grand Hotel Bangkok	Asosiasi Auditor Internal
1 orang *1 person*	Pelatihan Komunikasi dan Psikologi Audit *Communication Training and Audit Psychology*	13 - 22 Desember 2016	Cipanas - Puncak	PPA&K

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SPI Tahun 2016

Di sepanjang tahun 2016, audit internal telah dilaksanakan pada 11 Unit Usaha PG, 2 (dua) Lahan Pengembangan (Madura dan Bojonegoro), 1 (satu) Penelitian Gula, 2 (dua) Penelitian Tembakau, dan 3 (tiga) Kebun Tembakau dan telah diterbitkan 57 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau 107,55% terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2016 yang ditargetkan sebanyak 53 LHP.

Tindak Lanjut dari 57 LHP/Temuan Auditor sampai dengan bulan Desember 2016 sebanyak 47 LHP sudah ditindaklanjuti, sedangkan Tindak Lanjut 10 LHP masih dalam proses di Unit Usaha.

Brief Report on Duties and Responsibilities of SPI 2016

Throughout 2016, an internal audit was conducted on 11 PG Business Unit, two (2) Land Development (Madura and Bojonegoro), 1 (one) Sugar Research, 2 (two) Tobacco Research, and 3 (three) the tobacco and published 57 Inspection Report (LHP) or 107.55% against the Annual Work Program Oversight (PKPT) 2016 targeted as many as 53 LHP.

Follow-up of 57 LHP / Findings Auditor until December 2016 for 47 LHP already followed, while the follow-up of 10 LHP is still in process in the Business Unit.

Akuntan publik

Akuntan Publik, atau proses audit yang dilakukan pihak eksternal melakukan audit finansial untuk memberikan pendapat yang independen dan objektif mengenai kewajaran, ketaat-azasan dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Auditor Publik harus terbebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Perseroan, serta Perseroan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan dalam proses audit eksternal sehingga memungkinkan Auditor Publik memberikan pendapatnya

Public Accountant

Public Accountants, or the audit process conducted by external conduct financial audits to provide independent and objective opinion on the fairness, consistency and suitability of financial statements Company with Financial Accounting Standards (GAAP) of Indonesia and the applicable law.

Public Auditor should be free from the influence of the Board of Commissioners, Directors and parties concerned in Company, and the Company is obligated to provide all accounting records and supporting data needed in external audit process so as to allow the Public Auditor gave his opinion on the fairness, consistency and

Organ Tata Kelola Perusahaan
Organ of Corporate Governance

tentang kewajaran, ketaat-azasan dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Penunjukan Auditor Publik mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik; dan usulan Dewan Komisaris yang disahkan dalam RUPS. Berdasarkan PP 20/2015 tersebut, Auditor Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut, dimana Auditor Publik dapat memberikan kembali jasa audit setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa audit pada perusahaan yang sama.

Berdasarkan keputusan RUPS tahun 2016, forum RUPS menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surjauntuk melaksanakan audit independen Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016. Sementara akuntan yang akan melaksanakan audit independen Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 adalah Muhammad Kurniawan. Baik KAP Purwantono, Sungkoro & Surja maupun akuntan Muhammad Kurniawan telah menangani audit atas Laporan Keuangan Perseroan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Kepada KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, Perseroan memberikan biaya jasa untuk melakukan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 sebesar Rp709.209.600 Hasil audit menyatakan bahwa Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 Perseroan adalah "Wajar tanpa pengecualian."

Selain audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja melakukan audit sebagai berikut:
1. *Management Letter*
2. Audit Kepatuhan
3. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja
4. Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
5. Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Intern

appropriateness of the Company's financial statements with the Indonesian Financial Accounting Standards.

Public Auditor designation refers to Government Regulation No. 20 Year 2015 on Accounting Practices Public; and the proposed Board of Commissioners adopted at the AGM. Based on the PP 20/2015, the Public Auditor the longest is limited to five (5) consecutive fiscal year, which the Public Auditor can provide return services audit after two (2) consecutive fiscal year does not provide audit services to the same company.

Based on the decision of the 2016 GMS, the GMS approved the appointment of Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro Surjauntuk to carry out an independent audit of the Financial Statements for the Financial Year 2016. While accountants who will carry out an independent audit of the Financial Statements for the Financial Year 2016 is Muhammad Kurniawan. Both PAF of Purwantono, Sungkoro Surja or accountant Muhammad Kurniawan has handle the audit of the Financial Statements of the Company for two (2) consecutive years.

To PAF of Purwantono, Sungkoro Surja, the Company provides service fee to audit the expense reports Fiscal Year of 2016 Rp709,209,600 The audit stated that the Financial Statements Fiscal Year 2016 of the Company is "fair without exception."

In addition to the audit of the Financial Statements for the fiscal year 2016, PAF Purwantono, Sungkoro Surja conduct audits as follows:
1. Management Letter
2. Compliance Audit
3. Performance Evaluation Report
4. Report of Partnership Program and Community Development (CSR)
5. Report of Compliance with Legislation and Internal Control

Guna kepentingan transparansi, berikut disajikan Auditor Publik Laporan Keuangan Perseroan 6 (enam) tahun berturut-turut, untuk tahun buku 2011 hingga 2016 seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

In the interests of transparency, the following are presented the Public Auditor Financial Report 6 (six) years respectively, for fiscal year 2011 to 2016 as can be seen in the table below:

Tahun Buku	Akuntan	Kantor Akuntan Publik	Opini
2016	Muhammad Kurniawan	Purwantono, Sungkoro & Surja	Wajar tanpa pengecualian *Fair without exception*
2015	Muhammad Kurniawan	Purwantono, Sungkoro & Surja	Wajar tanpa pengecualian *Fair without exception*
2014	Indra Soesetiawan	Djoko Sidik Indra	Wajar tanpa pengecualian *Fair without exception*
2013	Bambang Herwanto	Bambang Sutjipto Ngumar	Wajar tanpa pengecualian *Fair without exception*
2012	Parwoto Wignjohartojo	Hadori Sugiarto Adi	Wajar tanpa pengecualian *Fair without exception*
2011	Parwoto Wignjohartojo	Hadori Sugiarto Adi	Wajar tanpa pengecualian *Fair without exception*

Manajemen Risiko
Risk Management

Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menghambat atau menghalangi pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan ini Tim *assessment* melakukan pengukuran terhadap risiko setelah pengendalian, bukan terhadap risiko absolut maupun risiko setelah perlakuan *(after treatment).*

Pengukuran risiko setelah perlakuan bersifat perkiraan, artinya mengukur posisi risiko setelah diterapkannya rencana perlakuan. Pengukuran risiko setelah perlakuan dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perlakuan tersebut terhadap perubahan level atau tingkat risiko tersebut setelah dilaksanakan perlakuan. Dengan diukurnya tingkatan risiko setelah pengendalian dan risiko setelah perlakuan, maka perusahaan akan mengetahui perbandingan tingkat risiko sebelum dan setelah perlakuan.

Manfaat lain dari pengukuran risiko setelah perlakuan adalah untuk mempertimbangkan biaya dan manfaat jika suatu rencana (opsi) perlakuan yang diusulkan, artinya perusahaan dapat mempertimbangkan apakah dengan sejumlah biaya yang dikeluarkan akan sebanding dengan manfaat yang akan diterima atau berapa besar kemungkinan kerugian yang dapat diminimalkan.

Hasil *risk assessment* atas kegiatan PTPN X, teridentifikasi terdapat 20 (dua puluh) risiko korporat yang dapat berdampak pada pencapaian sasaran perusahaan. Dari 20 risiko korporat yang teridentifikasi, terdapat 2 risiko yang termasuk dalam kategori ekstrim, 14 risiko kategori tinggi dan 4 risiko kategori sedang. Risiko korporat yang termasuk dalam sepuluh besar risiko perusahaan *(top ten risk).*

Assessment dilakukan dengan menggunakan kriteria risiko untuk unit kerja dan kriteria risiko korporat yang telah ditetapkan dalam Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko PTPN X. Oleh karena itu, dalam melakukan evaluasi risiko, risiko yang telah dianalisis/diukur diurutkan berdasarkan tingkat risiko untuk menentukan prioritas pengelolaannya. Risiko yang teridentifikasi tersebut seluruhnya akan dikelola perusahaan dengan mempertimbangkan rencana perlakuan yang sesuai. Setelah diterapkannya rencana perlakuan, diharapkan tingkat risiko perusahaan akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan sebelum dilakukan perlakuan.

Risk is defined as the likelihood of an event that may inhibit or impede the achievement of company goals or objectives that have been set. In this activity, the assessment team did measurement of risk after controlling and not against the absolute risk or risk after treatment.

Measurement of risk after treatment is an estimate, meaning that measures the risk positions after the implementation of treatment plan. Measurement of risk after treatment is carried out to determine how much influence the treatment to changes in the level or degree of that risk after treatment carried out. With measured levels of risk after risk control and after treatment, the company will know comparison of the level of risk before and after treatment.

Another benefit of risk assessment after treatment is to weigh the costs and benefits if a plan (option) of the proposed treatment, which means that the company may consider whether to a number of the cost will be outweighed by the benefits to be received or how likely these losses can be minimized.

The results of the risk assessment on the activities of PTPN X, identified that 20 (twenty) corporate risk can impact on the achievement of corporate goals. Of the 20 corporate risks identified, there are two risks included in the category of extreme, 14 high-risk category and 4 risk category of medium. Including corporate risk in the top ten risk companies (top ten risk).

Assessment is done by using risk criteria for the work unit and corporate risk criteria set out in the Policy and Risk Management Guidelines PTPN X. Therefore, in evaluating risk, the risk has been analyzed / measured sorted by risk level to determine priority management. The identified risks will be entirely managed by the company to consider an appropriate treatment plan. After the implementation of the treatment plan, the expected level of risk the company will be lower than before the treatment.

Dari 20 (dua puluh) risiko korporat, dapat dilihat bahwa terdapat dua risiko yang berada dalam level ekstrim dengan tingkat risiko di atas 16,00 yaitu risiko gula milik Perusahaan tidak tercapai dan Risiko kehilangan gula dalam proses produksi. Sedangkan risiko yang termasuk dalam kategori tinggi sebanyak 14 (empat belas) risiko, terutama yang berkaitan kapasitas giling, penyediaan bibit/pupuk, rendemen tebu, legalitas tanah, harga gula, rendemen, penyediaan bibit, dan harga), tembakau (penjualan, produktivitas, dan komposisi kualitas), dan risiko di luar proses bisnis utama seperti legalitas lahan dan rasio keuangan.

Keenam belas risiko korporat yang termasuk dalam level ekstrim dan tinggi tersebut harus mendapat perhatian serius dari manajemen karena dapat mengganggu pencapaian tujuan perusahaan. Perlakuan risiko tersebut dapat dilakukan oleh Direksi atau didelegasikan kepada unit kerja yang berkaitan.

Hasil *assessment* terhadap risiko yang teridentifikasi menunjukkan bahwa masih banyak risiko setelah pengendalian yang ada masih relatif tinggi. Untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima diperlukan upaya peningkatan pengendalian yang ada atau alternatif perlakuan risiko yang lain. Berikut adalah beberapa rencana perlakuan risiko *(action plan)* yang dipertimbangkan untuk mengurangi dan meminimalisir tingkat risiko terhadap risiko level tinggi.

1. Risiko Gula Milik Perusahaan Tidak Tercapai: kemungkinan terjadinya penurunan porsi produksi gula yang menjadi milik perusahaan (pabrik gula) sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran PTPN X.

   Rencana perlakuan yang dipertimbangkan PTPN X untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:
   a. Mempermudah pelayan pendaftaran areal,
   b. Perbaikan pengelolaan bahan baku,
   c. Menjaga teknik pengolahan gula,
   d. Menekan jam berhenti produksi,
   e. Menerapkan standar bagi hasil ke petani secara normatif.

Of the 20 (twenty) corporate risks, it can be seen that there are two risks that are in extreme levels with the risk level above 16.00, that is the risk of the Company's sugar is not achieved and the risk of losing sugar production process. While the risks are included in the high category is 14 (fourteen) risk, especially related to milling capacity, provision of seeds / fertilizers, the yield of sugarcane, the legality of the land, the sugar price, yield, seed supply, and price), tobacco (sales, productivity, and quality of the composition), and the risks outside the process of the main business such as the legality of land and financial ratios.

Sixteenth corporate risk included in the high levels of extreme and should receive serious attention of management because it can interfere with the achievement of corporate objectives. The treatment of these risks can be by the Board of Directors or delegated to related work units.

Assessment of the risks identified indicates that there are still many risks after control technologies still relatively high. To reduce the risk to an acceptable level, it needs efforts to improve the existing control or other alternative risk treatment. The following is some risk treatment plan (action plan) considered to mitigate and minimize the risk level to high risk level.

1. Risk-owned Sugar Company not achieved: the possibility of a decline in sugar production portion which belongs to the company (plant sugar) and therefore contributes to the achievement of the target of PTPN X.

   Treatment plan being considered by PTPN X to reduce risk to an acceptable level:

   a. Ease the service for registration area,
   b. Improve the management of raw materials,
   c. Keep the sugar processing techniques,
   d. Press the clock stopped production,
   e. Apply standards for the results to normative farmers.

Manajemen Risiko
Risk Management

2. Risiko Kehilangan Gula dalam Proses Produksi: kemungkinan makin tingginya kehilangan gula dalam proses pengolahan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran PTPN X.

   Rencana perlakuan yang dipertimbangkan PTPN X untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:
   a. Perbaikan kinerja mesin
   b. *Training* sumber daya manusia,
   c. Perbaikan proses pengolahan gula.
3. Risiko Menurunnya Penjualan Tembakau: kemungkinan terjadinya penurunan penjualan tembakau baik karena kuantitas maupun harga sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran PTPN X.

   Rencana perlakuan yang dipertimbangkan PTPN X untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:
   a. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam menyiapkan barang,
   b. Meningkatkan penjualan melalui upaya '*Treatment*' pada tembakau
   c. Memastikan barang yang disajikan sesuai dengan contoh yang dikirim,
   d. Negosiasi harga dengan pembeli,
   e. Penyesuaian proses produksi,
   f. Mengoptimalkan pertumbuhan tanaman,
   g. Pengawasan ketertiban panen,
   h. Melakukan penyempurnaan fermentasi dan sortasi,
4. Risiko Kapasitas Giling Rendah: kemungkinan terjadinya penurunan kapasitas giling dibanding kapasitas yang paling efisien sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran PTPN X.
   Rencana perlakuan yang dipertimbangkan PTPN X untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:
   a. Perbaikan dan pemeliharaan mesin,
   b. Pengolahan sesuai standar,
   c. Peningkatan kualitas bahan baku.
5. Risiko Penyediaan bibit, pupuk, dan alat mekanis budidaya tebu tidak sesuai kebutuhan: kemungkinan terjadinya hambatan dalam penyediaan bibit tebu, pupuk, dan alat mekanis budidaya tebu yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran PTPN X.

2. Risk of Losing Sugar in Production Process: the higher the possibility of loss of sugar in processing and therefore contributes to the achievement of the target PTPN X.

   Treatment plan being considered by PTPN X to reduce risk to an acceptable level:

   a. Engine performance improvements
   b. Training of human resources,
   c. Sugar processing process improvement.
3. Tobacco Sales Decreased Risk: the likelihood of a good tobacco sales decline because the quantity and the price therefore contributes to the achievement of the objectives of PTPN X.

   Treatment plan being considered by PTPN X to reduce the risk to a level that can be be accepted:

   a. Increase the speed and accuracy in preparing the goods,
   b. Increase sales through the efforts of 'Treatment' on tobacco
   c. Make sure the goods are presented in accordance with sample sent,
   d. Price negotiations with buyers,
   e. Adjustment of the production process,
   f. Optimize plant growth,
   g. Supervision on harvest,
   h. Perfecting the fermentation and sorting,

4. Milling Capacity Low Risk: the possibility of a decline in milling capacity than the capacity the most efficient and therefore contributes to the achievement of the target PTPN X. Treatment plan being considered by PTPN X to reduce the risk to a level that can be be accepted:

   a. Repair and maintenance of machinery,
   b. Processing according to the standard,
   c. Improving the quality of raw materials.
5. Risk Provision of seeds, fertilizers, tools and mechanical cultivation of sugar cane is not as needed: possibility of bottlenecks in the supply of sugarcane seed, fertilizer, and a mechanical device cultivation of sugar cane affect the achievement of the objectives of PTPN X.

Rencana perlakuan yang dipertimbangkan PTPN X untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:

a. *Monitoring* pemasukan areal bibit dan kesesuaian varietas,
b. Koordinasi lebih awal dengan penyedia jasa irigasi
c. Permintaan pengadaan pupuk dan obat,
d. Monitoring kepastian jumlah areal dan penyiapan lebih awal kebun.

6. Risiko Rendemen Tebu Rendah: kemungkinan terjadinya capaian rendemen tebu yang rendah dibanding tingkat keekonomian dan target yang ditetapkan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran PTPN X.

Rencana perlakuan yang dipertimbangkan PTPN X untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:

a. Perbaikan proses di kebun/ kualitas bahan baku.
b. Perbaikan proses di pabrik sesuai standar.

7. Risiko Produktivitas Tembakau Rendah: kemungkinan terjadinya capaian produktivitas tembakau di bawah target yang ditetapkan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran PTPN X.

Rencana perlakuan yang dipertimbangkan PTPN X untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:

a. Meningkatkan pengendalian vektor virus dengan satgas khusus,
b. Meningkatkan frekuensi kunjungan ke lapangan dan gudang pengolah (fungsi *monitoring*),
c. Mekanisasi alat pertanian semaksimal mungkin,

8. Risiko Harga Gula Tidak Ekonomis: kemungkinan terjadinya harga jual gula yang berada di bawah tingkat keekonomisan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran PTPN X.

Rencana perlakuan yang dipertimbangkan PTPN X untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima dengan melakukan pendekatan kepada para pengambil kebijakan dalam tata kelola gula baik di pemerintahan maupun legislatif.

Treatment plan being considered by PTPN X to reduce the risk to a level that can be be accepted:

a. Monitoring income areas and suitability seed varieties,
b. Early coordination with service providers irrigation
c. Request for procurement of fertilizer and insecticides,
d. Monitoring certainty the amount of acreage and early preparation of the garden.

6. The yield of sugarcane Low Risk: the likelihood of a low yield of sugarcane achievement compared to the economic level and the target therefore contributes to the achievement of the objectives of PTPN X.

Treatment plan being considered PTPN X to reduce the risk to a level that can be be accepted:

a. Repair process in the garden / quality of raw materials.
b. Repair process in the factory according to the standard.

7. Productivity Tobacco Low Risk: the likelihood of achievement of productivity tobacco below the target set and therefore contributes to the achievement of the target PTPN X.

Treatment plan being considered by PTPN X to reduce the risk to a level that can be be accepted:

a. Increase the viral vector control with special task force,
b. Increase the frequency of visits to the field and warehouse processing (function monitoring),
c. Mechanization of agricultural equipment as much as possible,

8. Sugar Price Risk Not Economical: possibility of selling price of sugar was below the level economy and therefore contributes to the achievement of the target PTPN X.

Treatment plan being considered by PTPN X to reduce the risk to a level that can be accepted by approaching to decision-makers in both the governance sugar and legislative branches of government.

Manajemen Risiko
Risk Management

9. Risiko Legalitas Tanah: kemungkinan terjadinya kelambatan dalam pengurusan legalitas tanah milik perusahaan yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran PTPN X.

   Rencana perlakuan yang dipertimbangkan PTPN X untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:
   a. Melengkapi data pemetaan obyek tanah,
   b. Pengurusan sertifikat tanah melalui biro/ jasa/ notaris,
   c. Menyelesaiakan permasalahan aset-aset,
   d. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat,
   e. Koordinasi dengan unit usaha untuk pengamanan aset,
   f. Menyiapkan dokumen pendukung perpanjangan,
   g. Koordinasi dengan pengelola administrasi aset di unit usaha.
10. Risiko Komposisi Kualitas Ekspor Tembakau: kemungkinan terjadinya komposisi kualitas ekspor tembakau yang tidak sesuai target sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran PTPN X.

    Rencana perlakuan yang dipertimbangkan PTPN X untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:
    a. Tembakau dipetik saat tepat tua,
    b. Tembakau dirompos saat masak curing (pengeringan),
    c. Ketepatan masak fermentasi (stapel A,B,C,D) sebelum diproses sortasi.
11. Risiko Rasio Keuangan Tidak Ideal: kemungkinan terjadinya rasio-rasio keuangan yang tidak ideal sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran PTPN X.

    Rencana perlakuan yang dipertimbangkan PTPN X untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:
    a. peningkatan volume penjualan dan pendapatan,
    b. *maintenance* rasio-rasio keuangan,
    c. pengendalian biaya,
    d. memaksimalkan pendapatan lain-lain melalui pemanfaatan aset,
    e. manajemen pendanaan yang baik (komposisi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang),
    f. manajemen piutang *customer* yang baik,

9. Land Legality Risk: the possibility of delays in the administration of the legality of land owned by the Companies which affect the achievement of PTPN X.

   Treatment plan being considered by PTPN X to reduce the risk to a level that can be be accepted:

   a. Completing the ground object mapping data,
   b. The maintenance of land titles through agency / service / notary,
   c. Resolving the problem assets,
   d. Coordination with the local Land Office,
   e. Coordination with the business units to safeguard assets,
   f. Prepare documents supporting the extension,
   g. Coordination with the administrative manager of the assets in the business units.
10. Composition of Export Quality Tobacco Risk: the likelihood of the composition of export quality tobacco that does not match the target and therefore contributes to the achievement of the target PTPN X.

    Treatment plan being considered by PTPN X to reduce the risk to a level that can be be accepted:

    a. Tobacco old picked the right time,
    b. Tobacco is being rompos when being curing ripe (drying),
    c. The accuracy of fermentation ripe (Stapling A, B, C, D) before sorting process.
11. Risk of Financial Ratios Not Ideal: the likelihood of financial ratios that are not ideal therefore contributes to the achievement of the objectives of PTPN X.

    Treatment plan being considered by PTPN X to reduce the risk to a level that can be be accepted:

    a. increased sales volumes and revenues,
    b. maintenance of financial ratios,
    c. cost control,
    d. maximizing other revenues through the utilization of assets,
    e. Good management of the fund (the composition of short-term debt and long-term debt),
    f. good customer receivables management,

g. manajemen pengadaan bahan/barang yang baik (minimalisir *stock*),
h. manajemen pendanaan yang baik (komposisi hutang jk pendek dan hutang jangka panjang),

12. Risiko Manajemen Gudang Tembakau: kemungkinan terjadinya tingkat persediaan tembakau di luar target yang ditetapkan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran PTPN X.

    Rencana perlakuan yang dipertimbangkan PTPN X untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:
    a. Meningkatkan koordinasi dengan Divisi Tembakau untuk mencari pasar alternatif
    b. Tembakau akan keluar dari persediaan apabila *invoice* dari pembeli sudah diterima oleh bagian pemasaran divisi tembakau,
    c. Perbaikan kualitas dengan penyempurnaan fermentasi dan sortasi
    d. Mengoptimalkan potensi karyawan sesuai kompetensinya,
    e. Menawarkan kembali *stock* tembakau lama kepada pembeli yang masih membutuhkan.
13. Risiko HPP Gula Tidak Efisien: kemungkinan terjadinya kenaikan harga pokok produksi gula yang berada di atas target sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran PTPN X.

    Rencana perlakuan yang dipertimbangkan PTPN X untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:
    a. Perbaikan dalam proses perolehan bahan baku
    b. Efisiensi biaya SDM,
    c. Perbaikan proses pengolahan
    d. Pengendalian biaya lainnya.
14. Risiko Keterlambatan Mulai Giling: kemungkinan terjadinya keterlambatan masa giling dibanding jadwal yang ditetapkan sehingga sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran PTPN X.

    Rencana perlakuan yang dipertimbangkan PTPN X untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:
    a. Penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara cepat dan effisien serta perencanaan dana yang mantap,
    b. Pengadaan tebu dari luar daerah.

g. g. material procurement management / good stuff (stock minimizing),
h. h. good funding management (debt composition of short and long-term debt),

12. Tobacco Warehouse Management Risk: the likelihood of tobacco inventory levels outside the target and therefore contributes to the achievement of the target PTPN X.

    Treatment plan being considered by PTPN X to reduce the risk to a level that can be be accepted:

    a. Improve coordination with the Tobacco Division to seek alternative markets
    b. Tobacco will be out of stock when the invoice of the purchaser has been accepted by marketing of tobacco division,
    c. Quality improvement by improvement of fermentation and sorting
    d. Optimizing the potential of employees according to their competencies,
    e. Offers back stock of old tobacco to buyers who are still in need.
13. Risk of HPP Sugar Inefficient: possibility of increase in the cost of production of sugar is in on the target and therefore contributes to the achievement of the target PTPN X.

    Treatment plan being considered by PTPN X to reduce the risk to a level that can be be accepted:

    a. Improvements in the process of obtaining raw materials
    b. The cost efficiency of human resources,
    c. Repair processing
    d. Other cost control.
14. Risk of Delay Start Milling: the possibility of delays in the milling period compared to the schedule are set so as to affect the achievement of the objectives of PTPN X.

    Treatment plan being considered by PTPN X to reduce the risk to a level that can be be accepted:

    a. Application of the procurement system as quickly and efficiently as well as planning funds steady,

    b. Procurement of cane from outside the area.

Manajemen Risiko
Risk Management

15. Risiko Pasokan Bahan Baku Tebu Tidak Memadai: kemungkinan terjadinya penurunan pasokan bahan baku tebu di bawah perhitungan keekonomian sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran PTPN X.

    Rencana perlakuan yang dipertimbangkan PTPN X untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:
    a. Membangun kepercayaan (*trust*), mempermudah pelayan, pendekatan pada Petani,
    b. Perbaikan proses Tebang.
16. Risiko Kualitas Tebu di Bawah Standar: kemungkinan terjadinya penurunan kualitas bahan baku tebu sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran PTPN X.

    Rencana perlakuan yang dipertimbangkan PTPN X untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:
    a. Penyiapan bibit KBD yang optimal,
    b. Pemberian biaya garap tepat sasaran,
    c. Gerakan mekanisasi untuk pemeliharaan kebun,
    d. Perbaikan Pemupukan,
    e. Perbaikan proses tebang.

17. Risiko Produk Sampingan (Tetes): kemungkinan terjadinya target persediaan dan penjualan produk sampingan (tetes) yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran PTPN X.

    Rencana perlakuan yang dipertimbangkan PTPN X untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima berupa revisi alokasi, pelayanan tahun depan, stock opname rutin, penambahan tangki tetes, dan analisa secara rutin
18. Risiko Biaya SDM Tidak Efisien: kemungkinan terjadinya realisasi biaya SDM melebihi target sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran PTPN X.

    Rencana perlakuan yang dipertimbangkan PTPN X untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima berupa mengefektifkan jam kerja, tidak mengganti karyawan yang sudah pensiun, pengendalian lembur (maksimal 3 jam).
19. Risiko Pengembangan Usaha: kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pengembangan usaha atau keterlambatan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran PTPN X.

15. Sugarcane Raw Material Supply Risks Inadequate: the possibility of a decline in the supply of materials Raw cane under economic calculation and therefore contributes to the achievement of the target PTPN X.

    Treatment plan being considered PTPN X to reduce the risk to a level that can be be accepted:

    a. Building trust (trust), simplify the waiter, approaches to Farmers,
    b. Cutting process improvement.
16. Risk of Sugarcane Under Quality Standards: the possibility of a decline in the quality of the raw material sugar cane therefore contributes to the achievement of the objectives of PTPN X.

    Treatment plan being considered by PTPN X to reduce the risk to a level that can be be accepted:

    a. KBD optimum seedling preparation,
    b. Provision expense was working right on target,
    c. Movement of mechanization for the maintenance of the garden,
    d. Fertilization repair,
    e. Cutting process improvement.
17. Risk Byproducts (drops): the possibility of product inventory and sales targets byproducts (molasses) which affect the achievement of PTPN X.

    Treatment plan being considered by PTPN X to reduce the risk to a level that can be revisions received in the form of allocations, service next year, a routine inventory check, the addition of tank molasses, and routine analysis
18. Risk of Inefficient HR Cost: possibility of realization of human resource cost exceeds the target so that affect the achievement of the objectives of PTPN X.

    Treatment plan being considered by PTPN X to reduce the risk to a level that can be acceptable form of effective working hours, not replacing employees who have retired, controlling overtime (Maximum of 3 hours).
19. Business Development Risk: the likelihood of failure in business development or delays and therefore contributes to the achievement of the target PTPN X.

Rencana perlakuan yang dipertimbangkan PTPN X untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima:

a. Sosialisasi program dan pendampingan aplikasi dan peningkatan kompetensi SDM,
b. *Setting* dan pemasangan melibatkan vendor dan technical consultant,
c. Perbaikan proses penerimaan barang:
d. Mematuhi standar *Maintenance Prosedure* dan *Standard Operational Prosedure* untuk tiap peralatan maupun sistem terintegrasinya
e. Memberikan sosialisasi terhadap petani dengan praktek di kebun demoplot, Menggandeng tokoh-tokoh setempat.

20. Risiko Pencemaran Lingkungan: kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan yang berpengaruh terhadap citra perusahaan atau sasaran perusahaan lainnya.

    Rencana perlakuan yang dipertimbangkan PTPN X untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima dengan minimalisasi sumber pencemar di dalam pabrik, perbaikan proses, dan revitalisasi IPAL.

Dari hasil *assessment* risiko unit kerja kemudian dikerucutkan ke tingkat Korporat, dan dari pengukuran risiko tingkat Korporasi dihasilkan sebanyak 20 (dua puluh) risiko seperti terlihat dalam tabel dan peta risiko di bawah ini.

Treatment plan being considered by PTPN X to reduce the risk to a level that can be be accepted:

a. Socialization and mentoring programs and improving the competence of human resources applications,
b. Setting and installation involving vendors and technical consultant,
c. Goods receipt process improvement:
d. Adheres to the standards and Standard Operating Procedure Maintenance Procedure for each equipment and system integration
e. Provide farmers with the socialization of the practice in the demoplot plantation, approach the local leaders.

20. Environmental Pollution Risk: the likelihood of environmental pollution that affect on the image of the company or other corporate goals.

    Treatment plan being considered by PTPN X to reduce the risk to a level that can be accepted by minimizing the pollution sources within the plant, process improvement and revitalization of the WWTP.

From the results of the risk assessment work unit then pursed to the Corporate level, and the level of risk measurement The corporation generated as many as 20 (twenty) risk as shown in the table and map risks below.

Daftar Risiko Korporat / **List of Corporate Risks**

No.	Nama Risiko *Risk Name*	Rata-Rata *Average*		Skor	Tingkat risiko *Risk Level*
		L	K		
1	Risiko Gula Milik Perusahaan Tidak T ercapai *Risk of company-owned sugar cannot be*	3.70	5.00	18.50	Ekstrim
2	Risiko Kehilangan Gula dalam Proses Produksi *Risk of Losing Sugar in Production Process*	4.07	3.97	16.13	Ekstrim
3	Risiko Menurunnya Penjualan Tembakau *Risk Low Tobacco Sales*	3.10	4.60	14.26	Tinggi
4	Risiko Kapasitas Giling Rendah *Risk of Low Milling Capacity*	3.70	3.60	13.32	Tinggi
5	Risiko Penyediaan bibit, pupuk, dan alat mekanis budidaya tebu tidak sesuai kebutuhan *Risk of Provision of seeds, fertilizers, tools of mechanical cultivation of sugar cane is not as needed*	3.57	3.57	12.76	Tinggi

Manajemen Risiko
Risk Management

No.	Nama Risiko *Risk Name*	Rata-Rata *Average*		Skor	Tingkat risiko *Risk Level*
		L	K		
6	Risiko Rendemen Tebu Rendah *Risk of Sugarcane yield*	3.10	3.97	12.30	Tinggi
7	Risiko Produktivitas Tembakau Rendah *Risk of Tobacco Productivity*	2.61	4.67	12.19	Tinggi
8	Risiko Legalitas Tanah *Risk of Land legality*	3.00	4.00	12.00	Tinggi
9	Risiko Perkembangan Harga Gula Tidak Menentu *Risk of uncertain sugar price*	3.00	4.00	12.00	Tinggi
10	Risiko Komposisi Kualitas Ekspor Tembakau *Risk of Composition of Tobacco Export Quality*	2.33	4.75	11.08	Tinggi
11	Risiko Rasio Keuangan Tidak Ideal *Risk of Financial Ratio not idealistic*	2.63	4.00	10.50	Tinggi
12	Risiko Manajemen Persediaan Tembakau *Risk of Tobacco Provision Management*	2.39	4.36	10.42	Tinggi
13	Risiko HPP Gula Tidak Efisien *Risk of Inefficient of Sugar production base price*	2.63	3.93	10.36	Tinggi
14	Risiko Keterlambatan Mulai Giling *Risk of Milling Delay*	2.33	4.40	10.27	Tinggi
15	Risiko Pasokan Tebu Tidak Memadai *Risk of Sugarcane Supply inadequate*	2.57	3.99	10.25	Tinggi
16	Risiko Kualitas Tebu di Bawah Standar *Risk of Sugarcane Quality below standard*	2.73	3.70	10.11	Tinggi
17	Risiko Produk Sampingan *Risk of Byproducts*	3.67	2.67	9.78	Sedang
18	Risiko Biaya SDM tidak efisien *Risk of Inefficient HR Cost*	3.10	3.10	9.61	Sedang
19	Risiko Pengembangan Usaha *Risk of Business Development*	3.14	3.03	9.52	Sedang
20	Risiko Pencemaran Lingkungan *Risk of Environment Pollution*	3.30	2.80	9.24	Sedang

Dari Tabel dan Gambar di atas dapat dilihat bahwa 80% risiko korporat berada pada tingkat tinggi dan ekstrim yang membutuhkan perhatian Direksi dalam melakukan penanganan risiko. Dari 20 risiko, 16 risiko yang berada di tingkat ekstrim dan tinggi perlu ditangani Direksi, sedangkan risiko dengan level sedang dan rendah diserahkan penangannya kepada unit kerja.

Of the Tables and Figures above it can be seen that 80% of corporate risk is at a high and extreme level that requires the attention of the Board of Directors to handle the risks. Of the 20 risks, 16 risks that are at extreme level and high level need to be addressed by the Board of Directors, while the risk associated with medium and low levels the handling was delivered to the work unit.

PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI MANAJEMEN RISIKO

PTPN X telah melakukan *risk assessmen,* dan untuk meningkatkan manfaat manajemen risiko kami rekomendasikan agar:

1. Mengintegrasikan penerapan manajemen risiko dengan sistem manajemen yang lain, seperti: sistem penganggaran, manajemen kinerja perusahaan (KPI), sistem pengadaan barang/jasa, dan audit internal.
2. Melakukan reviu *risk register* secara berkala,
3. Evaluasi kelayakan *action plan* dengan mempertimbangkan analisa biaya dan manfaat.

EVALUASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Evaluasi penerapan manajemen risiko dilakukan dengan tujuan untuk menilai tingkat kematangan *(maturity level)* penerapan manajemen risiko. PTPN X masih memulai pelaksanaan manajemen risiko dengan melakukan *risk assessment,* namun untuk meningkatkan manfaat manajemen risiko, kami merekomendasikan:

1. Menetapkan target kinerja pelaksanaan manajemen risiko baik di tingkat korporat maupun unit kerja,
2. Melakukan evaluasi secara periodik untuk menilai tingkat kematangan pelaksanaan manajemen risiko.

PENGEMBANGAN KE ARAH RISK BASE INTERNAL AUDIT (RBIA)

Risk asssessment yang telah dilakukan dapat dijadikan pijakan untuk melakukan pengembangan manajemen risiko dan perlu diintegrasikan dengan Bidang SPI dalam melakukan audit internal, atau dikenal dengan Audit Berbasis Risiko *(Risk Base Audit/RBA).*

Saat ini unit yang bertugas dalam pengelolaan manajemen risiko adalah Sekretaris Perusahaan.

DEVELOPMENT AND INTEGRATION OF RISK MANAGEMENT

PTPN X had done the assessment of risk, and to increase the benefits of risk management we recommend so that:

1. Integrating risk management with other management systems, such as: system budgeting, corporate performance management (KPI), the procurement of goods / services, and internal audit.
2. Conducting regular risk register 'Review,
3. Evaluate the feasibility of an action plan taking into account the costs and benefits analysis.

EVALUATION ON THE APPLICATION OF THE RISK MANAGEMENT

Evaluation of risk management was conducted in order to assess the level of maturity (maturity level) implementation of risk management. PTPN X still start the implementation of risk management by conducting risk assessment, but to increase the benefits of risk management, we recommend:

1. Set performance targets of risk management at both the corporate and business unit,
2. Conduct periodic evaluations to assess the maturity level of risk management.

RISK BASE TOWARDS THE DEVELOPMENT OF INTERNAL AUDIT (RBIA)

Risk assessment that has been used can be made as the basis for developing risk management and should be integrated with the SPI field in the internal audit, known as Risk-Based Audit (Risk Base Audit / RBA).

Currently the unit in charge of risk management is the Corporate Secretary.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu sistem usaha atau sistem sosial yang dilakukan Perseroan yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan Perseroan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program Perseroan dan mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sistem Pengendalian Internal yang handal dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat bagi manajer maupun Direksi yang bagus untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan Perseroan yang lebih efektif pula.

Sistem Pengendalian Internal berfungsi sebagai pengatur sumberdaya yang telah ada untuk dapat difungsikan secara maksimal guna memperoleh pengembalian (*gains*) yang maksimal pula dengan pendekatan perancangan yang menggunakan asas *Cost-Benefit*.

Tujuan penerapan SPI dalam Perseroan adalah untuk menghindari adanya penyimpangan dari prosedur, laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya dan kegiatan Perseroan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan berusaha untuk menghindari risiko dari penerapan sistem.

ELEMEN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

1. Lingkungan Pengendalian
   Lingkungan Pengendalian dari suatu organisasi menekankan pada berbagai macam faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian
2. Sistem Akuntansi
   Sistem akuntansi tidak hanya digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan saja, tetapi juga menghasilkan pengendalian manajemen.
3. Prosedur Pengendalian
   Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai.

Internal Control System is a business system business or social system conducted by the Company consisting of organizational structure, methods and measures to maintain and direct the Company's path to move in accordance with the Company's objectives and programs and to encourage efficiency and compliance with management policies.

A reliable and effective Internal Control System can provide the right information for both good managers and Board of Directors to make the right decisions and policies to achieve the Company's more effective objectives.

Internal Control System serves as a regulator of existing resources to be functioned optimally in order to obtain the maximum gains also with design approach that uses Cost-Benefit principle.

The purpose of SPI application in the Company is to avoid any deviations from procedures, financial statements generated by the company to be trusted and the activities of the Company in line with applicable laws and regulations. This indicates that the Company seeks to avoid risks from system implementation.

INTERNAL CONTROL SYSTEM ELEMENTS

1. Control Environment
   Control Environment of an organization emphasizes a variety of factors simultaneously affecting control policies and procedures
2. Accounting System
   Accounting system is not only used to generate financial statements but also result in management control.
3. Control Procedures Control procedures are policies and rules regarding employee behavior created to ensure that management control objectives can be achieved.

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Secara umum prosedur pengendalian yang baik terdiri dari:

a. Penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi.
   Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut.
   Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Dengan adanya pembagian wewenang ini akan mempermudah jika akan dilakukan audit trail, karena otorisasi membatasi aktivitas transaksi hanya pada orang-orang yang terpilih. Otorisasi mencegah terjadinya penyelewengan transaksi kepada orang lain.
b. Pembagian tugas.
   Pembagian tugas memisahkan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi (pencatatan). Dan suatu fungsi tidak boleh melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
   Dengan pemisahakn fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi pencatatan, catatan akuntansi yang disiapkan dapat mencerminkan transaksi yang sesungguhnya terjadi pada fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Jika semua fungsi disatukan, akan membuka kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi, sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya kebenarannya, dan sebagai akibatnya kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya.
c. Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.
   Prosedur harus mencakup perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu meyakinkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian secara memadai. Selanjutnya dokumen dan catatan yang memadai akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan dan biaya suatu organisasi.(biasanya dilakukan berdampingan dengan penggunaan wewenang secara tepat).

In general good control procedures consist of:

a. Proper use of authority to perform an activity or transaction.
   Within the organization, each transaction only takes place on the basis of authorization from an official who has the authority to approve the transaction.
   Therefore, the system that regulates the distribution of authority to authorize the implementation of each transaction must be made in the organization. The division of authority will make it easier if the audit trail will be conducted, as the authorization limits the transaction activity to only selected people. Authorization prevents the misappropriation of transactions to others.
b. Division of tasks.
   Division of tasks separates operation and storage functions from accounting function (record). And a function should not perform all stages of a transaction.
   With the separation of the operating and storage functions from the recording function, the prepared accounting records may reflect actual transactions taking place in the operation and storage functions. If all functions are unified, they will open up the possibility of recording transactions that are not actually occurring, so the resulting accounting information is untrustworthy, and as a result the organization's wealth is not guaranteed to be secure.
c. Preparation and use of adequate documents and records.
   Procedures shall include design and use of adequate documents and records to help ensure adequate recording of transactions and events. Subsequently adequate documents and records will provide accurate and reliable information about the organization's wealth, debt, income and expenses (usually accompanied by appropriate use of authority).

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

d. Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan.
   Keamanan yang memadai meliputi pembatasan akses ke tempat penyimpanan aset dan catatan perusahaan untuk menghindari terjadi-nya pencurian aset dan data/informasi perusahaan.
e. Pengecekan independen terhadap kinerja.
   Semua catatan mengenai aktiva yang ada harus dibandingkan (dicek) secara periodik dengan aktiva yang ada secara fisik. Pengecekkan ini harus dilakukan oleh suatu unit organisasi yang independen (selain unit fungsi penyimpanan, unit fungsi operasi dan unit fungsi pencatatan) untuk menjaga objektivitas pemeriksaan.

4. Penilaian Risiko (*Risk Assesment*)
   Semua organisasi memiliki risiko, dalam kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis (profit dan non profit) maupun non bisnis.
   Suatu risiko yang telah di identifikasi dapat di analisis dan evaluasi sehingga dapat di perkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya.
5. Informasi dan komunikasi
   Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh manajemen Winnebago pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan.
   Informasi juga diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi jenis ini untuk menilai standar eksternal. Hukum, peristiwa dan kondisi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal

d. Adequate security on assets and records.
   Adequate security includes restrictions on access to depositary of assets and company records to avoid the occurrence of theft of assets and data/company information.

e. Independent checking on performance.
   All records of existing assets must be periodically checked against existing physical assets. These checking shall be performed by an independent organizational unit (other than the storage function unit, operating function unit and recording function unit) to maintain the objectivity of the checking.

4. Risk Assessment
   All organizations have risks, under whatever circumstances the risk must exist in an activity, whether business-related activities (profit and non-profit) or non-business.
   An identifiable risk can be analyzed and evaluated so as to estimate the intensity and actions that can minimize it.
5. Information and communication
   Information and communication are important elements of the Company's internal control. Information on the control environment, risk assessment, control and monitoring procedures are required by the Winnebago management operating guidelines and ensuring compliance with legal reporting and regulations applicable to the company.

   Information is also required from parties outside the Company. Management can use this type of information to assess external standards. Laws, events and conditions affecting external decision-making and reporting

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi sebuah wadah bagi Perseroan dalam menjalin hubungan dengan Pemangku Kepentingan, baik dari internal seperti karyawan maupun dari eksternal seperti konsumen. Terkait pelaksanaan CSR, Perseroan membaginya ke dalam 4 (empat) aspek.

Corporate Social Responsibility (CSR) becomes a platform for the Company in establishing relationship with Stakeholders, both internally as employees and externally as consumers. Related to the implementation of CSR, the Company divides it into 4 (four) aspects.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang terkait dengan **lingkungan hidup**
corporate social responsibility related to ***environment***

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang terkait dengan **ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja**
corporate social responsibility related to ***employment, health and work safety***

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang terkait dengan **pengembangan sosial dan kemasyarakatan**
corporate social responsibility related to ***social and sociological developments***

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang terkait dengan **tanggung jawab kepada konsumen**
corporate social responsibility related to ***responsibility to consumers***

Selengkapnya tentang pelaksanaan CSR oleh Perseroan dapat dilihat pada bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

More about the implementation of CSR by the Company can be seen in the chapter of Corporate Social Responsibility in this Annual Report.

Perkara Penting dan Permasalahan Hukum

Litigation and Legal Cases

PENGUNGKAPAN PENYIMPANGAN INTERNAL

Tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi di sepanjang tahun 2016.

DISCLOSURE OF INTERNAL DEVIATIONS

There are no internal deviations in 2016.

PERKARA PENTING

Perseroan tidak menemukan adanya perkara penting di luar hokum formal yang melibatkan Perseroan, entitas anak, maupun Dewan Komisaris dan Direksi

LITIGATIONS

The Company did not find any litigation outside the formal law involving the Company, its subsidiaries or the Board of Commissioners and Board of Directors.

PERMASALAHAN HUKUM

Berikut disampaikan beberapa permasalahan hukum yang tercatat di tahun 2016, dan pengaruhnya terhadap Perseroan serta tindak lanjut yang diambil.

LEGAL CASES

The following are several legal cases recorded in 2016 and the effect on the Company and the follow-up actions taken.

1.	Pokok Perkara *Main Case*	:	Perkara Perdata wilayah PG Ngadirejo Kediri, Luas 16.250 M2 HGB No. 46 atas nama PTPN X (Persero) diakui sebagai hak waris Sdr. Sami No. 01/pdt.G/2003/PN, putusan Kasasi tahun 2010 (relas PN Kediri tgl. 22 Desember 2009 (PTPN X menang) penggugat mengajukan PK sesuai relas tgl. 15 Desember 2010. Saat ini timbul gugatan baru atas nama ahli waris Saminah (Penggugat) daftar perkara No. 56/Pdt.G/2012/PN Kediri, putus tanggal 10 September 2013.	*Territorial Civil Lawsuit on PG Ngadirejo Kediri, with territorial size of 16,250 M2 HGB No. 46 on behalf of PTPN X (Persero) declraed as the right of inheritance of Mr. Sami No. 01/pdt.G/2003/PN, the decision of Cassation in 2010 (relas PN Kediri dated December 22, 2009 (PTPN X won) the plaintiff applied for re-examination on December 15, 2010. Currently a new lawsuit is filed on behalf of the heir Saminah (Plaintiff) case no. 56/Pdt.G/2012/ PN Kediri, verdict on September 10, 2013.*
	Pokok Perkara *Main Case*	:	Hasil Putusan Pengadilan Tinggi No. 249/ Pdt/2014/PT.Sby tanggal 25 Juli 2014 menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri No. 56/Pdt.G/2012/PN.Kdi tanggal 10 September 2013. Hasil Putusan Mahkamah Agung RI No. 179K/ PDT/2015 tanggal 27 April 2015, PTPN X dimenangkan yang isinya adalah mengabulkan permohonan Kasasi PTPN X dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi No. 249/Pdt/2014/ PT.Sby tanggal 25 Juli 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 56/ Pdt.G/2012/PN.Kdi tanggal 10 September 2013. Pada Tingkat Kasasi PTPN X Menang dan saat ini sudah *inkracht*. Proses saat ini untuk penghapusan pada Letter C Desa yang masih atas nama orang lain agar tidak terjadi gugatan lagi.	*Verdict of the Supreme Court of RI 249/PDT/2014/ PT.Sby dated July 25, 2014, upholds the verdict of the District Court No. 56/Pdt.G/2012/PN.Kdi on September 10, 2013.* *Verdict of the Supreme Court of RI No. 179K/ PDT/2015 dated April 27, 2015, is in favor of PTPN X the contents of which it granted the request of the Cassation of PTPN X and Cancel the Verdict of the Supreme Court. No. 249/Pdt/2014/PT.Sby dated July 25, 2014 which upholds the Verdict of the District Court of Kediri No. 56/Pdt.G/2012/ PN.Kdi on September 10, 2013.* *At Cassation Level, PTPN X won and is now inkracht.* *The current process is for deleting the Letter C Village which is still on behalf of others in order to avoid further lawsuits.t*

	Pengaruhnya bagi Perseroan *The effect on the Company*	:	Secara Material perkara tersebut tidak berdampak signifikan bagi Perseroan.	*Materially, the case did not effect significantly to the Company.*
	Tindak Lanjut *Follow-up*	:	Perseroan melakukan upaya hukum secara maksimal sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.	*The Company fully did the legal effort based on the litigation law.*
2.	Pokok Perkara *Main Case*	:	Perkara Perdata No. 128/Pdt G/2014/PN, Mks gugatan intervensi atas perkara PT Saraswati Anugerah Makmur dengan PTPN XIV berkaitan dengan tagihan tunggakan pembayaran pupuk.	*Civil Case No. 128/Pdt G/2014/PN, Mks intervention lawsuit on the case of PT Saraswati Anugerah Makmur with PTPN XIV related to back payment of fertilizers.*
	Pokok Perkara *Main Case*	:	Dalam Putusan PN Kepentingan PTPN X dalam permohonan intervensi telah terpenuhi dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar yaitu PTPN X tidak ikut serta mengganti atau mengcover hutang senilai Rp.27.671.123.704,- tersebut dan tidak dilakukannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Pabrik Gula Bone, Camming, dan Takalar. Dan saat ini sedang proses banding oleh PT Saraswati dan PTPN XIV.	*In the Verdict of District Court of the interest of PTPN X in the request for intervention has been fulfilled in the verdict of Makassar District Court, namely PTPN X did not participate in replacing or covering the debts worth Rp27,671,123,704, and the absence of conservatoir beslag on Bone, Camming and Takalar Sugar Factories. Currently it is being appealed by PT Saraswati and PTPN XIV.*
	Pengaruhnya bagi Perseroan *The effect on the Company*	:	Secara Material perkara tersebut tidak berdampak signifikan bagi Perseroan.	*Materially, the case did not effect significantly to the Company.*
	Tindak Lanjut *Follow-up*	:	Perseroan melakukan upaya hukum secara maksimal sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.	*The Company fully did the legal effort based on the litigation law.*
3.	Pokok Perkara *Main Case*	:	Perkara Perdata yaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari petani bernama H. Miskan kepada PTPN X atas tunggakan kredit KKP-E di PN Jombang No. Perkara 53/ Pdt.G/2014.JMB.	*Civil Case of Tort lawsuit from a farmer named H. Miskan to PTPN X on outstanding loan of KKP-E in Jombang District Court No. 53/Pdt.G/2014. JMB.*
	Pokok Perkara *Main Case*	:	Putusan Pengadilan Negeri PTPN X menang. Pihak H Miskan mengajukan banding dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 658/PDT/2015/PT.SBY tanggal 22 Februari 2016 menyatakan menguatkan putusan PN Jombang. Saat ini sedang proses kasasi.	*Ruling of District Court is in favor of PTPN X. H Miskan appealed and the Verdict of Supreme Court of East Java No. 658/PDT/2015/PT.SBY dated February 22, 2016 upholds the verdict of Jombang District Court. Currently cassation is being processed.*
	Pengaruhnya bagi Perseroan *The effect on the Company*	:	Secara Material perkara tersebut tidak berdampak signifikan bagi Perseroan.	*Materially, the case did not effect significantly to the Company.*
	Tindak Lanjut *Follow-up*	:	Perseroan melakukan upaya hukum secara maksimal sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.	*The Company fully did the legal effort based on the litigation law.*

Perkara Penting dan Permasalahan Hukum
Litigation and Legal Cases

4.	Pokok Perkara *Main Case*	:	Perkara Perdata yaitu gugatan wanprestasi dari PTPN X kepada petani bernama H. Miskan dan Isticharah atas tunggakan kredit KKP-E No.	*Civil Case regarding a default lawsuit from PTPN X to farmers named H. Miskan and Isticharah on outstanding loan of KKP-E No.*
	Pokok Perkara *Main Case*	:	Perkara 56/Pdt.G/2014/JMB melawan PTPN X dan putusan Pengadilan Negeri PTPN X menang. Pihak H Miskan mengajukan banding dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 650/PDT/2015/PT.SBY Tanggal 17 Mei 2016 menyatakan menguatkan putusan PN Jombang. Saat ini sedang proses kasasi.	*Case No. 56/Pdt.G/2014/JMB against PTPN X and the verdict of District Court is in favor of PTPN X.* *H Miskan appealed and the verdict of Supreme Court of East Java No. 650/PDT/2015/PT.SBY dated May 17, 2016 upholds the verdict of Jombang District Court. Cassation is being processed.*
	Pengaruhnya bagi Perseroan *The effect on the Company*	:	Secara Material perkara tersebut tidak berdampak signifikan bagi Perseroan.	*Materially, the case did not effect significantly to the Company.*
	Tindak Lanjut *Follow-up*	:	Perseroan melakukan upaya hukum secara maksimal sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.	*The Company fully did the legal effort based on the litigation law.*
5.	Pokok Perkara *Main Case*	:	Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 19/Pdt.G/2014/PN.Jr Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 580/PDT/2014/PT.SBY, gugatan intervensi atas tanah asset di Desa Pecoro, Kec. Rambipuji, Kab. Jember melawan Sadji dkk.	*Civil Case regarding the Verdict of Jember District Court No. 19/Pdt.G/2014/PN.Jr Juncto Verdict of Supreme Court of East Java No. 580/PDT/2014/ PT.SBY, lawsuit of intervention on asset land in Pecoro Village, Sub-district of Rambipuji, Regency of Jember against Sadji et al.*
	Status Penyelesaian *Settlement Status*	:	Putusan pada tingkat kasasi menyatakan PTPN X menang. Saat ini PTPN X sedang mengajukan proses eksekusi.	*The verdict on cassation level states that it is in favor of PTPN X. Currently PTPN X is filing an execution process.*
	Pengaruhnya bagi Perseroan *The effect on the Company*	:	Secara Material perkara tersebut tidak berdampak signifikan bagi Perseroan.	*Materially, the case did not effect significantly to the Company.*
	Tindak Lanjut *Follow-up*	:	Perseroan melakukan upaya hukum secara maksimal sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.	*The Company fully did the legal effort based on the litigation law.*
6.	Pokok Perkara *Main Case*	:	Perkara Perdata Pengadilan tingkat pertama No. 41/Pdt.G/2014/PN.Jr, gugatan atas tanah asset di Dusun Langsepan, Desa Rowo Indah, Kec. Ajong, Kab. Jember.	*Civil Case of Court of First Instance No. 41/ Pdt.G/2014/PN.Jr, lawsuit on land assets in Dusun Langsepan, Rowo Indah Village, Sub-district of Ajong, Regency of Jember.*
	Pokok Perkara *Main Case*	:	PTPN X mengajukan banding dan putusan Pengadilan tingkat banding No. 25/PDT/2015/ PT.SBY tanggal 10 Maret 2015 menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, saat ini sedang proses kasasi.	*PTPN X appealed and verdict of the Court of Appeal No. 25/PDT/2015/PT.SBY dated March 10, 2015 upholds the verdict of the court of first instance, currently in the cassation process.*
	Pengaruhnya bagi Perseroan *The effect on the Company*	:	Secara Material perkara tersebut tidak berdampak signifikan bagi Perseroan.	*Materially, the case did not effect significantly to the Company.*
	Tindak Lanjut *Follow-up*	:	Perseroan melakukan upaya hukum secara maksimal sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.	*The Company fully did the legal effort based on the litigation law.*

SANKSI ADMINISTRATIF

Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi).

PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN

Di sepanjang tahun 2016 tidak terdapat permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di lingkup Perseroan.

LAPORAN ATAS AKTIVITAS PERSEROAN YANG MENCEMARI LINGKUNGAN

Perseroan tidak menemukan adanya laporan dari pihak manapun terkait aktivitas Perseroan yang mencemari lingkungan. Bahkan, 10 Pabrik Gula Perseroan mendapatkan PROPER Biru, dan 1 Pabrik Gula mendapatkan PROPER Hijau.

ADMINISTRATIVE SANCTION

Administrative sanctions imposed on the Company, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, by the relevant authorities (capital market, banking and others) in the last fiscal year (or there is a statement that it is not subject to administrative sanctions).

PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN

In 2016, there are no employment issues within the Company.

REPORTS ON COMPANY ACTIVITIES POLLUTED THE ENVIRONMENT

The Company did not find any reports from any parties related to the Company's activities that pollute the environment. In fact, the Company's 10 Sugar Factories get the Blue PROPER, and one Sugar Factory gets the Green PROPER.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Company's Information and Data

Sesuai asas transparansi dalam penerapan GCG dan *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), transparansi dan tata kelola keterbukaan informasi menjadi salah satu pilar bagi Emiten seperti Perseroan untuk menginformasikan data dan informasi yang layak bagi pemegang saham, publik dan pemangku kepentingan. Selain bagian dari pedoman pelaksanaan GCG, transparansi dan tata kelola keterbukaan informasi akan mengirimkan pesan atas data dan informasi yang akurat atas perkembangan aktivitas operasional dan proses usaha Perseroan; yang kemudian akan berimbas pada profil saham Perseroan di pasar modal serta citra Perseroan di masyarakat luas.

KORESPONDENSI DAN LAPORAN BERKALA

Informasi keuangan dan non keuangan dari Perseroan telah disusun dan dilaporkan secara transparan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan dan lembaga lain yang dipersyaratkan. Informasi dilaporkan sesuai target waktu, tersajikan dengan lengkap dan akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Perseroan. Informasi dipaparkan melalui laporan berupa:

1. Laporan Manajemen Perseroan triwulan I, II , III, dan *Unaudited* tahun 2016.
2. Laporan Manajemen Perseroan bulan Mei, Juli Agustus, Oktober dan November 2016..
3. Pelaporan kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Keterbukaan informasi terkait *corporate action* dan *public expose* melalui website, majalah eksternal.
5. Laporan Tahunan 2016.

In accordance with the principle of transparency in the implementation of GCG and the Roadmap of Indonesian Corporate Governance released by the Financial Services Authority (OJK), transparency and information disclosure governance become one of the pillars for Issuers such as the Company to inform data and information appropriate for shareholders, public and stakeholders. In addition to be parts of the GCG implementation guidelines, transparency and information disclosure governance will send messages on accurate data and information on the development of the Company's operational activities and business processes; which will then affect the Company's stock profile in the capital market as well as the Company's image in the wider community.

CORRESPONDENCY AND PERIODIC REPORTS

The financial and non-financial information of the Company have been prepared and reported in a transparent manner to the shareholders, stakeholders and other institutions required. Information is reported on time target, presented completely and accurately, up-to-date, fully and adequately in accordance with the procedures, types and scopes as stipulated in the provisions on Transparency of Financial Condition of the Company. Information presented through the report is in the form of:

1. Corporate Management Reports of the I, II, III quarter and Unaudited in 2016.
2. Company Management Reports for May, July August, October and November 2016.
3. Reporting to the Indonesia Stock Exchange and the Financial Services Authority.
4. Disclosure of information related to corporate actions and public expose through websites, external magazines.
5. 2016 Annual Report.

Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Company's Information and Data

Di bawah ini disajikan korespondensi Perseroan selama tahun 2016.

Below is the Company's correspondency during 2016.

Korespondensi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia *Correspondency with Financial Services Authority and Indonesia Stock Exchange*	
• 13 April 2016, perihal: Laporan Hasil Pemeringkatan Tahunan. • 13 April 2016, perihal: Informasi Perubahan Pengurus Perkebunan Nusantara X (Persero). 28 April 2016, perihal: Penyampaian Laporan Keuangan Auditan Tahun 2015. • 29 April 2016, perihal: Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan. • 30 April 2016, perihal: Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan. • 4 Mei 2016, perihal: Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik-Penjelasan Kenaikan Lebih Dari 20% Total Aset atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2015. • 5 Mei 2016, perihal: Perubahan Komite Audit. • 16 Juni 2016, perihal: Penyampaian Laporan Tahunan. • 28 Juli 2016, perihal: Informasi Perubahan Pengurus PT Perkebunan Nusantara X (Persero). • 31 Juli 2016, perihal: Penyampaian Laporan Keuangan Interim. • 1 Agustus 2016, perihal: Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik-Penjelasan atas Kenaikan Lebih Dari 20% Total Liabilitas Laporan Keuangan per 30 Juni 2016. • 23 Agustus 2016, perihal: Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim. 15 September 2016, perihal: Informasi Perubahan Pengurus PT Perkebunan Nusantara X (Persero). 12 Oktober 2016, perihal: Perubahan Komite Audit.	• April 13, 2016, regarding: Annual Rating Result Report. • April 13, 2016, regarding: Information on Changes in the Management of Perkebunan Nusantara X (Persero). • April 28, 2016, regarding: Submission of Audited Financial Statement Year 2015. • April 29, 2016, regarding: Submission of Annual Financial Statement. • April 30, 2016, regarding: Submission of Proof of Advertisement Information of Annual Financial Statement. • May 4, 2016, regarding: Disclosure of Information Required for the Public: Explanation on the Increase of More Than 20% of Total Assets on Financial Statement as of December 31, 2015. • May 5, 2016, regarding: Changes in the Audit Committee. • June 16, 2016, regarding: Submission of Annual Report. • July 28, 2016, regarding: Information on Changes in the Management of PT Perkebunan Nusantara X (Persero). • July 31, 2016, regarding: Submission of Interim Financial Statement. • August 1, 2016, regarding: Disclosure of Information Required for the Public: Explanation on the Increase of More Than 20% of Total Liabilities on Financial Statement as of June 30, 2016. • August 23, 2016, regarding: Submission of Proof of Advertisement Information of Interim Financial Statement. • September 15, 2016, regarding: Information on Changes in the Management of PT Perkebunan Nusantara X (Persero).
Korespondensi dengan Kementerian BUMN	
35 surat, dengan perihal surat tentang pelaporan, pemenuhan data, permohonan RUPS dan persiapannya, sosialisasi peraturan baru, pelaporan Penyertaan Modal Negara (PMN), dan beberapa perihal surat lainnya. *Correspondency with the Ministry of SOEs 35 letters, regarding letters of reporting, data fulfillment, request for GMS and preparation, socialization of new regulations, reporting of State Equity Participation (PMN), and several other letters.*	
Korespondensi dengan *Holding* Perkebunan	
76 surat, dengan perihal surat tentang permintaan dan pemenuhan data, sosialisasi peraturan baru dan turunannya, persiapan RUPS, pelaporan Penyertaan Modal Negara (PMN), operasional Perseroan, dan beberapa perihal surat lainnya. *76 letters regarding letters on data request and fulfillment, socialization of new regulations and derivatives, preparation of the General Meeting of Shareholders, Reporting on State Equity Participation (PMN), Company operations, and several other letters.*	

SITUS WEB PERSEROAN

Sesuai peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs *Web* Emiten atau Perusahaan Publik yang baru dirilis, keberadaan situs *web* memiliki peran yang signifikan atas tata kelola keterbukaan informasi. Pengungkapan

COMPANY WEBSITE

In accordance with OJK regulation no. 8/POJK.04/2015 on the Issuer Website or newly released Public Company, the existence of website has a significant role in information disclosure governance. Disclosure and availability of

Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Company's Information and Data

dan ketersediaan informasi pada situs *web* Perseroan akan memberikan manfaat kepada pemegang saham, publik dan pemangku kepentingan, dimana hal ini akan memungkinkan penyampaian informasi tidak terbatas yang dapat dilakukan secara cepat, tepat, murah dan membantu para pemegang saham dan pemangku kepentingan serta pihak lain sebelum mengambil keputusan.

information on the Company's website will provide benefits to shareholders, public and stakeholders, which will enable the delivery of unlimited information that can be done quickly, precisely, inexpensively and assist shareholders and other stakeholders and parties before making decisions.

Perseroan telah memiliki situs web elektronik resmi dengan alamat *www.ptpn10.com*. Situs *web* ini menyediakan konten seputar informasi Perseroan yang komprehensif dan berguna bagi akses informasi dari pemegang saham dan pemangku kepentingan.

The Company already has an official electronic website at www.ptpn10.com. The website provides content around the Company's comprehensive and useful information for access to information from shareholders and stakeholders.

Majalah PTPN X Magz

Perseroan memiliki majalah cetak dan digital dengan merk nama "PTPN X Magz" yang terbit berkala setiap 3 (tiga) bulannya. PTPN X Magz berisi informasi terkini atas kegiatan Perseroan per triwulan, dengan pengelolaan konten majalah sesuai dengan standar jurnalistik yang dapat meraih pembaca yang lebih luas. Pelaksanaan PTPN X Magz di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

PTPN X Magz magazine

The Company has print and digital magazines under the name of "PTPN X Magz" published periodically every 3 (three) months. PTPN X Magz contains up-to-date information on the Company's activities quarterly, with magazine content management in accordance with journalistic standards that can reach a wider audience. The implementation of PTPN X Magz in 2016 is as follows:

Edisi *Edition*	Jumlah *Number*	Judul Edisi *Edition Title*
Vol. 019/Th VI	1.000	Menata Kembali Varietas *Reorganizing Varieties*
Vol. 020/Th VI	1.000	Siap Wujudkan Target Tiga Juta Ton *Ready to Achieve Three Million Ton Targets*
Vol. 021/Th VI	1.000	Atur Langkah Saat Kemarau Basah *Arrange Steps During Wet Dry Season*
Vol. 022/Th VI	1.000	Rumah Sakit PTPN X Tingkatkan Performa *PTPN X Hospital Increases Performance*

Event Internal dan Eksternal

Perseroan melakukan *event* internal dan eksternal dalam rangka membina hubungan dengan pemangku kepentingan, baik pemangku kepentingan eksternal terkait industri perkebunan, industri gula dan industri tembakau, maupun pemangku kepentingan internal seperti karyawan. Gelaran *event* ini menjadi penting, mengingat industri yang dijalankan Perseroan erat kaitannya dengan kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat luas. *Event* internal dan eksternal yang dilakukan di tahun 2016 adalah:

Internal and External Events

The Company conducts internal and external events in order to foster relationships with stakeholders, including external stakeholders related to the plantation, sugar and tobacco industries, as well as internal stakeholders such as employees. These events become important, considering that the industry run by the Company is closely related to the interests of the government and the interests of the wider community. Internal and external events conducted in 2016 are:

Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Company's Information and Data

Tanggal *Date*	Tempat *Location*	Kegiatan *Activity*
14 Januari 2016 *January 14, 2016*	RS Perkebunan Jember	Peresmian Gedung Mimosa Medical Center *Inauguration of Mimosa Medical Center Building*
14 Januari 2016 *January 14, 2016*	PT Mitratani Dua Tujuh	Kunjungan Menteri BUMN ke PT Mitratani Dua Tujuh *Visit of the Ministry of SOEs to PT Mitratani Dua Tujuh*
14 Januari 2016 *January 14, 2016*	Madura	Kunjungan Menteri BUMN ke Madura *Visit of the Minisgtry of SOEs to Madura*
16 Januari 2016 *January 16, 2016*	Hall Center Simpang Lima Gumul	Perayaan Natal 2015 *Christmas Celebration 2015*
26-28 Januari 2016 *January 26-28, 2016*	Hotel Atria Malang	Pelatihan Mekanisasi untuk Petani bekerjasama dengan PT Taspen *Mechanization Training for Farmers in cooperation with PT Taspen*
3 Februari 2016 *February 3, 2016*	Ballroom Best Western Papilio Hotel	Sinergi PTPN X dengan Dinas Perkebunan *Synergy between PTPN X and Plantation Service*
16-18 Februari 2016 *February 16-18, 2016*	Hall Kantor Direksi PTPN X	Konsolidasi Sistem Keuangan Holding Perkebunan *Consolidated Financial System of Plantation Holding*
16-18 Maret 2016 *March 16-18, 2016*	Tretes Raya Hotel	Pelatihan Petugas Tanaman *Training of Plant Officers*
4 April 2016 *April 4, 2016*	Royal Hotel and Lounge Jember	Expose Hasil Penelitian Tembakau *Expose of Tobacco Research Result*
12-14 April 2016 *April 12-14, 2016*	Hotel Horison Ultima Batu	Pelatihan Mekanisasi untuk Petani bekerjasama dengan PT Jiwasraya *Mechanization Training for Farmers in cooperation with PT Jiwasraya*
4 Mei 2016 *May 4, 2016*	Grand City	Kongres Ikagi XI *Ikagi XI Congress*
18 Mei 2016 *May 18, 2016*	PG Gempolkrep, PG Ngadiredjo, PG Pesantren Baru	Kunjungan Dirut Holding Perkebunan ke PG Gempolkrep, PG Ngadiredjo, dan PG Pesantren Baru *Visit of President Director of Plantation Holding to PG Gempolkrep, PG Ngadiredjo and PG Pesantren Baru*
26-29 Mei 2016 *May 26-29, 2016*	Grand City Exhibition Hall	Gebyar Produk Pasar Daerah Expo 2016 *Regional Market Product Expo 2016*
27-28 Mei 2016 *May 27-28, 2016*	Pasar Wonokromo, Pasar Pucang, Pasar Rungkut, Pasar Tambakrejo, dan Pasar Kedurus	Operasi Pasar *Market Operations*
2 Juni 2016 *June 2, 2016*	PG Gempolkrep	Kunjungan PTPN III ke PG Gempolkrep *Visit of PTPN III to PG Gempolkrep*
9 Juni 2016 *June 9, 2016*	Kantor Direksi PTPN X	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama PTPN X dan Pertamina *Signing of Cooperation Agreement between PTPN X and Pertamina*
11 Mei 2016 *May 11, 2016*	Kantor Direksi PTPN X	Kunjungan Komisi VI ke PTPN X *Visit of Commission VI to PTPN X*
25-28 Mei 2016 *May 25-28, 2016*	PT ENERO	Kunjungan PTPN VIII ke PT ENERO *Visit of PTPN VIII to PT ENERO*
1 Juni 2016 *June 1, 2016*	Gedung Pertemuan PG Toelangan	Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTPN X *Signing of Cooperation Agreement (PKB) of PTPN X*
3-4 Juni 2016 *June 3-4, 2016*	PG Kremboong, PG Lestari, dan Kebun Tembakau Klaten	Khitanan Massal *Mass Circumcision*

Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Company's Information and Data

Tanggal *Date*	Tempat *Location*	Kegiatan *Activity*
17 Juni 2016 *June 17, 2016*	PG Tjoekir	Safari Ramadhan *Ramadhan Safari*
21 Juni 2016 *June 21, 2016*	PG Tjoekir	Kunjungan Deputi Kementrian BUMN ke PG Tjoekir *Visit of Deputy Minister of SOEs to PG Tjoekir*
23 Juni 2016 *June 23, 2016*	PG Gempolkrep	Kunjungan Cargill International ke PG Gempolkrep *Visit of Cargill International to PG Gempolkrep*
24 Juni 2016 *June 24, 2016*	PG Gempolkrep, PG Lestari, PG Ngadiredjo, PG Modjopanggoong	Safari Ramadhan BUMN *SOEs Ramadhan Safari*
11 Agustus 2016 *August 11, 2016*	Universitas Trunojoyo	Orasi Ilmiah *Scientific Oration*
11 Agustus 2016 *August 11, 2016*	PG Pesantren Baru	Kunjungan Dharma Wanita Provinsi Jawa Timur *Visit of Dharma Wanita of East Java Province*
12 Agustus 2016 *August 12, 2016*	Pakuwon	Jalan Sehat *Healthy Walk*
12 Agustus 2016 *August 12, 2016*	Hotel Kartika Wijaya	Gathering NMU *NMU Gathering*
17 Agustus 2016 *August 17, 2016*	Kantor Direksi PTPN X	Perayaan HUT Kemerdekaan RI *Indonesia Independence Anniversary Celebration*
25 Agustus 2016 *August 25, 2016*	PG Gempolkrep	CSR Patusan PG Gempolkrep *Patusan CSR of PG Gempolkrep*
30 Agustus 2016 *August 30, 2016*	PG Tjoekir	Soft Launching Kartu Tani *Soft Launching of Farm cards*
7 September 2016 *September 7, 2016*	Kantor Direksi PTPN X	Sosialisasi Tax Amnesty *Tax Amnesty Socialization*
9 September 2016 *September 9, 2016*	Kantor Direksi PTPN X	Peringatan Idul Adha 1437 H *Eid al- Adha 1437 H Celebration*
20 September 2016 *September 20, 2016*	Grand City	Pisah Sambut Komisaris PTPN X *Pisah Sambut of PTPN X Commissioner*
20 September 2016 *September 20, 2016*	Kompas	FGD Kompas *Kompas FGD*
3-4 Oktober 2016 *October 3-4, 2016*	Hotel Alana Surabaya	Workshop Kehumasan *PR Workshop*
21 Oktober 2016 *October 21, 2016*	PG Camming	Kunjungan Menteri BUMN ke PG Camming *Visit of Minister of SOEs to PG Camming*
3 November 2016 *November 3, 2016*	Jakarta	Forum BUMN 2016 *BUMN Forum 2016*
8 November 2016 *November 8, 2016*	PG Gempolkrep	Kunjungan Dewan Komisaris Holding Perkebunan ke PG Gempolkrep *Visit of Board of Commissioners of Plantation Holding to PG Gempolkrep*
9 November 2016 *November 9, 2016*	Madura	Pelatihan Petani Tebu di Madura *Training of Sugarcane Farmers in Madura*
16 November 2016 *November 16, 2016*	PG Ngadiredjo - PG Asembagoes	Pembagian Kartu Tani *Distribution of Farm Cards*
24 November 2016 *November 24, 2016*	PG Gempolkrep	Kunjungan Kementerian Pertanian *Visit of Ministry of Agriculture*

Hubungan Media

Perseroan membangun hubungan dengan media dengan harapan dapat menyampaikan informasi yang komprehensif terkait kemajuan pengelolaan operasi dan bisnis Perseroan kepada khalayak yang lebih luas. Hubungan media yang dilakukan di tahun 2016 mencakup konferensi pers, kunjungan media, dan siaran pers, seperti yang terlihat di bawah ini.

Media Relations

The Company builds relationships with the media in the hope of delivering comprehensive information on the progress of operations management and the Company's business to a wider audience. Media relations conducted in 2016 include press conferences, media visits and press releases, as seen below.

Konferensi Pers Tahun 2016 / **2016 Press Conference**

Tanggal *Date*	Media
6 Januari 2016 *January 6, 2016*	Dana PMN Wujudkan Industri Tebu Terintegrasi *PMN Funds Realizing Integrated Sugarcane Industry*
18 Maret 2016 *March 18, 2016*	Rapat Konsolidasi BUMN Gula *Consolidated Meeting of Sugar SOEs*
4 Mei 2016 *May 4, 2016*	Kongres Ikagi XI dengan tema Pemberdayaan SDM dan Teknologi untuk Meningkatkan Daya Saing Industri Gula Nasional *Ikagi XI Congress with theme of Empowerment of Human Resources and Technology to Improve Competitiveness of National Sugar Industry*
30 Agustus 2016 *August 30, 2016*	*Soft Launching Kartu Tani* *Soft Launching of Farm Cards*

Kunjungan Media Tahun 2016 / **2016 Media Visits**

Tanggal *Date*	Media
10 Februari 2016 *February 10, 2016*	Lensa Indonesia
10 Februari 2016 *February 10, 2016*	Koran Sindo
24 Februari 2016 *February 24, 2016*	www.kabarbisnis.com
24 Februari 2016 *February 24, 2016*	Radar Surabaya
28 Juni 2016 *June 28, 2016*	Kompas
10 November 2016 *November 10, 2016*	Surya
13 Desember 2016 *December 13, 2016*	Antara
13 Desember 2016 *December 13, 2016*	Bisnis Indonesia

Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Company's Information and Data

Siaran Pers Tahun 2016 — **2016 Press Conference**

Tanggal Terbit *Date of Publication*	Judul *Title*	Media *Media*
4 Januari 2016 *January 4, 2016*	PTPN X Pertahankan Predikat Produsen Gula Terbesar di Indonesia *PTPN X Maintains Predicate of the Biggest Sugar Manufacturers in Indonesia*	Jawa Pos, Surya, Bisnis Indonesia, detik.com, Antarajatim.com, Kabarbisnis.com, Lensaindonesia.com, dll
6 Januari 2016 *January 6, 2016*	Dana PMN Rp 975 Miliar ke PTPN X Difokuskan untuk Hilirisasi Produk *PMS's Rp975 Billion Funds to PTPN X Focused on Product Downstream*	Jawa Pos, Surya, Radar Surabaya, Industri.bisnis.com, Surabaya.tribunnews.com,
15 Januari 2016 *January 15, 2016*	Menteri Rini Dorong BUMN Kembangkan Industri Gula Madura *Minister Rini Encourages State Enterprises to Develop Madura Sugar Industry*	Kompas, Jawa Pos, Bisnis Indonesia, Bisnis.com, Tempo.com, Antaranews.com, Jatim.metronews.com, dll
18 Maret 2016 *March 18, 2016*	BUMN Gula Targetkan 3,26 Juta Ton pada 2019 *Sugar SOEs Target 3.26 Million Tons in 2019*	Jawa Pos, Bisnis Indonesia, Bisnis. Com, Antarajatim.com, dll
27 Mei 2016 *May 27, 2016*	PTPN X Gelontorkan 700 Ton Gula untuk Operasi Pasar di Jatim *PTPN X Pours 700 Tons of Sugar for Market Operation in East Java*	Jawa Pos, Sindo, Bisnis.com, Antarajatim.com, dll
11 Juni 2016 *June 11, 2016*	Tak Jual Gula ke Pedagang, PTPN Pilih ke Bulog untuk Stabilisasi Harga *Not Selling Sugar to Sellers, PTPN Choose Bulog for Price Stabilization*	Jawa Pos, Sindo, Bisnis.com, Lensa, Indonesia.com, Kanalsatu.com, Antarajatim.com, dll
28 Juni 2016 *June 28, 2016*	Kinerja Masih Yang Terbaik, PTPN X Targetkan 504.326 Ton *Still the Best Performance, PTPN X Targets 504,326 Tons*	Jawa Pos, Bisnis Indonesia, Bisnis. Com, Antarajatim.com, dll
21 Juli 2016 *July 21, 2016*	PTPN X Jual Listrik ke PLN *PTPN X Sells Electricity to PLN*	Jawa Pos, Surya, Bisnis Indonesia, detik.com, Antarajatim.com, Tempo.co.id, Kabarbisnis.com, Lensaindonesia.com, dll
30 Agustus 2016 *August 30, 2016*	Menteri BUMN Luncurkan Kartu Tani Untuk Petani Tebu *Minister of SOEs Launches Farm Cards for Sugarcane Farmers*	Jawa Pos, Sindo, Bisnis.com, Lensa Indonesia.com, Kanalsatu.com, Antarajatim.com, dll

Akses Publik, Konsumen dan Hubungan Investor

Kepada publik dan konsumen, Perseroan memberikan keterbukaan akses melalui jalur informasi yang telah disediakan seperti yang tertera di bawah ini.

Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara X
Jl. Jembatan Merah No. 3 – 11
Surabaya 60175
Jawa Timur, Indonesia
Tel: +62 31 3523143 (*hunting*)
Situs Web: www.ptpn10.com
E-mail: contact@ptpn10.co.id

Public Access, Consumer and Investor Relations

To the public and consumers, the Company provides access disclosure through the information channels provided below

Head Office of PT Perkebunan Nusantara X
Jl. Jembatan Merah No. 3 – 11
Surabaya 60175
East Java, Indonesia
Tel: +62 31 3523143 (hunting)
Situs Web: www.ptpn10.com
E-mail: contact@ptpn10.co.id

Kode Etik, Pedoman Perilaku Perseroan

Code of Ethics, Company's Code of Conduct

KEBERADAAN PEDOMAN PERILAKU SEABGAI KODE ETIK

Salah satu aset yang sangat berharga yang dimiliki perusahaan adalah Sumber Daya Manusia yang memiliki integritas yang tinggi. Agar insan Perseroan dapat memiliki integritas yang tinggi dan mencerminkan Nilai-nilai korporasi yang dimiliki Perseroan, Perseroan mengeluarkan Pedoman Perilaku atau *Code of Conduct* yang telah disahkan dan diperbaharui melalui Surat Keputusan Direksi No. XX-SURKP/16.068 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) PT Perkebunan Nusantara X. Penetapan Pedoman Perilaku ini menjadi sebuah pernyataan umum tertulis yang menggambarkan standar etika usaha Perseroan yang harus dilaksanakan oleh seluruh insan Perseroan dalam menjalin hubungan dengan sesama insan Perseroan , pelanggan, pemasok, pemegang saham,pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman Perilaku tersebut berlaku bagi seluruh insan Perseroan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan. Pedoman Perilaku dikembangkan berdasarkan filosofi bisnis dan budaya kerja Perseroan , peraturan perundang-undangan, praktik umum (*common practices*) dalam dunia usaha serta peraturan internal Perseroan yang terkait, termasuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direksi dan Serikat Pekerja serta pedoman tata tertib kerja karyawan.

Pedoman Perilaku tidak dimaksudkan untuk mengganti Pedoman tata tertib kerja karyawan ataupun peraturan/ pedoman sejenis lainnya, tetapi lebih ditujukan untuk menyempurnakan atau bersifat saling melengkapi antara satu dan lainnya. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku tetap mengacu pada pedoman tata tertib kerja karyawan serta berdasarkan kebijakan Direksi.

EXISTANCE OF CODE OF CONDUCT AS CODE OF ETHICS

One of the most valuable assets of the Company is high integrity Human Resources with high integrity. In order for the Company to have high integrity and reflect the Company's corporate values, the Company issues Code of Conduct that has been ratified and updated through Decree No. BOD. XX-SURKP/16.068 dated August 19, 2016 on Code of Conduct and Code of Corporate Governance of PT Perkebunan Nusantara X. The stipulation of the Code of Conduct is a written statement describing the Company's business ethics standards that must be implemented by all of the Company's personnel in establishing relationships with other Company's personnel, customers, suppliers, shareholders, government, communities and other stakeholders.

The Code of Conduct applies to all of the Company's personnel from the Board of Commissioners, Board of Directors to all employees. The Code of Conduct is developed based on the Company's business philosophy and work culture, laws and regulations, common practices in the business world as well as the related internal regulations of the Company, including the Collective Work Agreement (PKB) between the Board of Directors and Trade Unions and employee's code of conduct.

The Code of Conduct is not meant to replace employes' code of conduct nor any similar regulations, but it is aimed to refine or to complete existing regulations. The rule regarding sanctions due to violations of code of conduct still refers to the employees' code of conduct and based on the Board of Directors' ruling.

VISI, MISI, FILOSOFI BISNIS DAN BUDAYA KERJA SEBAGAI LANDASAN UTAMA

Perseroan menetapkan Visi, Misi, Filosofi Bisnis dan Budaya Kerja sebagai sebuah gambaran tujuan besar perjalanan Perseroan ke depan, dan upaya yang akan dilakukan

VISION, MISSION, BUSINESS PHILOSOPHY AND WORK CULTURE AS MAIN PLATFORM

The Company establishes Vision, Mission, Business Philosophy and Work Culture as an overview of the great goals of the Company's future journey and the efforts it will take to achieve the great goals. Vision, Mission,

Kode Etik, Pedoman Perilaku Perseroan
Code of Ethics, Company's Code of Conduct

Perseroan untuk dapat mencapai tujuan besar tersebut. Visi, Misi, Filosofi Bisnis dan Budaya Kerja Perseroan menjadi tuntunan yang berfungsi sebagai koridor dan batasan sekaligus pendorong bagi insan Perseroan untuk melakukannya dengan penuh integritas, sehingga apabila tuntunan ini dilakukan oleh seluruh insan Perseroan, akan dapat membawa pencapaian visi Perseroan.

Business Philosophy and Work Culture of the Company become guidance that serves as a corridor and limitation as well as a booster for the Company's personnel to do so with integrity so that if the guidance is performed by all the Company's personnel, it will be able to bring the achievement of the Company's vision.

Visi
Menjadi perusahaan agroindustri terkemuka yang berwawasan lingkungan

Vision
Become a leading environmentally friendly agroindustrial company

Misi
- Berkomitmen menghasilkan produk berbasis bahan baku tebu dan tembakau berdaya saing tinggi di pasar domestik dan internasional, yang berwawasan lingkungan.
- Berkomitmen menjaga pertumbuhan dan kelangsungan usaha melalui optimalisasi dan efisiensi di segala bidang.
- Mendedikasikan diri untuk selalu meningkatkan nilai-nilai perusahaan bagi kepuasan pemangku kepentingan melalui kepemimpinan, inovasi dan kerjasama tim serta organisasi yang profesional.

Mission
- Committed to produce high competitive environmentally friendly sugarcane-based products and tobacco materials in the domestic and international markets.
- Committed to maintain growth and sustainability through optimization and efficiency in all fields.
- Dedicates to constantly enhance corporate values for stakeholder satisfaction through leadership, innovation and teamwork as well as professional organization.

Filosofi Bisnis dan Budaya Kerja

Business Philosophy and Work Culture

ProViSI

1. Profesionalisme
   Senantiasa bekerja dengan dedikasi tinggi dan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.
2. Visioner
   Senantiasa memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat peluang kedepan serta dapat berpikir diluar kebiasaan.
3. Sinergi
   Senantiasa berkolaborasi secara produktif dan berkualitas dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.
4. Integritas
   Senantiasa bertindak obyektif, adil dan konsisten sesuai dengan pedoman perilaku dan pedoman tata kelola perusahaan dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

1. Professionalism
   Always work with high dedication and full responsibility based on high competence to achieve the best performance.
2. Visionary
   Always have a broad insight and able to see future opportunities and can think outside the box.
3. Synergy
   Always collaborate productively and qualified with all internal and external stakeholders.
4. Integrity
   Always act objectively, fairly and consistently in accordance with the Company's Code of Conduct and Corporate Governance by upholding honesty and commitment.

Budaya kerja yang dianut adalah "Profesional, Produktif dan Pembelajar (3P)".

The work culture adopted is "Professional, Productive and Learner (3P)".

3P
Profesional/Professional
Produktif/Productive
Pembelajar/Learner

Isi Pedoman Perilaku

Pedoman Perilaku atau Kode Etik Perseroan menjelaskan kebijakan berperilaku di Perseroan, jenis-jenis pelanggaran, mekanisme pengaduan pelanggaran maupun sanksi bagi pelanggaran yang terjadi. Kebijakan dalam Pedoman Perilaku mengatur hal-hal yang menjadi tanggung jawab Perseroan, individu jajaran Perseroan maupun pihak lain yang melakukan hubungan bisnis dengan Perseroan.

Isi materi Pedoman Perilaku terdiri dari 2 (dua) elemen penting, yaitu Etika Kerja dan Etika Usaha. Etika Kerja menjelaskan sikap dan perilaku antar insan Perseroan, baik sebagai atasan, rekan kerja, maupun bawahan. Sedangkan Etika Usaha menjelaskan bagaimana insan Perseroan beretika, bersikap dan bertindak dalam menjalin hubungan usaha dan interaksi dengan pemangku kepentingan.
Dalam Etika Kerja diatur mengenai:

1. Penerapan filosofi bisnis dan budaya kerja
2. Loyalitas kepada Perseroan
3. Penggunaan kewenangan dan jabatan
4. Benturan kepentingan (*conflict of interest*)
5. 5Gratifikasi dan suap
6. Jamuan bisnis
7. Biaya manajemen (*management expenses*)
8. Pemeliharaan lingkungan Perseroan
9. Penghargaan terhadap keberagaman pribadi
10. Perlindungan aset dan informasi
11. Pengawasan internal
12. Integritas pelaporan
13. Kesadaran terhadap biaya
14. Aktivitas politik
15. Pemeliharaan nama baik Perseroan.

Content of Code of Conduct

The Company's Code of Conduct explains the behavior policy inside the company, types of violations, reporting mechanisms for violations as well as sanctions for the violations. The policy within the Code of Conduct regulates matters that are the responsibilities of the Company, individuals of the Company's echelon or other parties conducting business with the company.

The content of the Code of Conduct material consist of two core elements, which are Work Ethics and Business Ethics. Work Ethics explains about the attitude and behavior between each corporate personnel, as superiors, workmates or subordinates. Business Ethics explains the ethics and how each corporate personnel behaves and acts in commencing every business relations and interactions with the Company's stakeholders.
Work Ethics regulates in regards of:

1. Application of business philosophy and work culture,
2. Loyalty to the company,
3. Use of authority and position,
4. Conflict of interests,
5. Gratifications and bribes,
6. Business treats,
7. Management expenses,
8. Maintenance of Company's environments,
9. Appreciation towards personal diversity,
10. Protection of assets and information,
11. Internal supervision,
12. Integrity of reporting,
13. Awareness on Cost
14. Political Activity
15. Maintanance of the Company's reputation

Kode Etik, Pedoman Perilaku Perseroan
Code of Ethics, Company's Code of Conduct

Sedangkan dalam Etika Usaha diatur tentang:
1. Penerapan *Good Corporate Governance*
2. Hubungan dengan karyawan
3. Hubungan dengan petani (Asosiasi Petani Tebu Rakyat/APTR)
4. Hubungan dengan pemegang saham
5. Hubungan dengan pelanggan
6. Hubungan dengan pemasok
7. Hubungan dengan mitra usaha/investor
8. Hubungan dengan kreditur
9. Hubungan dengan aparatur pemerintah
10. Hubungan dengan masyarakat
11. Hubungan dengan media massa

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan / perekonomian negara (pasal 2); menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3); kelompok delik penyuapan (pasal 5,6, dan 11); kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10); delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12); delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7); hingga delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C). Perseroan menekankan pentingnya anti korupsi sebagai upaya mendasar dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Kebijakan Perseroan terhadap anti korupsi tertuang dalam Etika Usaha dan Tata Perilaku serta Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dimiliki Perseroan.

Secara khusus, pengendalian gratifikasi merupakan upaya Perseroan untuk melindungi insan Perseroan terhindar dari kemungkinan dijatuhkannya tuduhan tindak pidana suap sebagaimana diatur pada Pasal 12 B ayat (1) UU 31/1999 Jo. UU 20/2011 yang menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan

While business ethic regulates:
1. Application of Good Corporate Governance,
2. Relations with employees,
3. Relations with farmers (Citizen's Sugar Cane Farmers Association/APTR)
4. Relations with shareholders,
5. Relations with customers,
6. Relations with suppliers,
7. Relations with business partner/investor,
8. Relations with creditors,
9. Relations with government officials,
10. Relations with the public,
11. Relations with the media.

ANTI-CORRUPTION POLICY AND GRATIFICATION CONTROL

Law No. 31 Year 1999 Jo. Law No. 20 Year 2001 on Corruption Eradication states that the definition of corruption includes unlawful acts, enriching persons/ other bodies that are detrimental to the state's finances/ economy (article 2); Misusing authority due to positions that could be detrimental to state's finances/positions that could be detrimental to the state's finances/economy (article 3); Groups of bribery offenses (articles 5, 6 and 11); Groups of offenses of embezzlement in office (articles 8, 9, and 10); offense of extortion in office (article 12); Offenses related to the exemption (article 7); to the gratification offense (articles 12B and 12C). The Company emphasizes the importance of anti-corruption as a fundamental effort of applying the principles of Good Corporate Governance. The Company's policy on anti-corruption is contained in the Code of Business Conduct and Code of Conduct and the Guidelines for Gratification Control and Guidelines for the State Officila Property Report (LHKPN) owned by the Company.

Specifically, gratification control is the Company's effort to protect the Company's personnel in order to avoid allegations of bribery as stipulated in Article 12 B paragraph (1) of Law 31/1999 Jo. Law 20/2011 which states that any gratification to a civil servant or state official is considered to be a bribe, in respect of his or her position and which is contrary to his or her obligations or duties. As such, the Company has a high commitment to anti-

kewajiban atau tugasnya. Dengan demikian, Perseroan memiliki komitmen yang tinggi terhadap penegakan anti korupsi, baik dalam pengelolaan operasional dan bisnis Perseroan, maupun dalam penggunaan jabatan terkait masing-masing insan Perseroan.

PENYEBARAN PEDOMAN PERILAKU KEPADA KARYAWAN

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh atas Pedoman Perilaku yang dimiliki, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialiasi Pedoman Perilaku kepada seluruh jajaran Perseroan, Pelanggan dan mitra kerja secara berkala melalui pendistribusian buku *Code of Conduct* kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan Perseroan.
2. Sosialisasi Pedoman Perilaku kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan Perseroan, bekerjasama dengan konsultan indenpenden serta melakukan evaluasi atas pencapaian atau pemahaman kepada jajaran Perseroan, baik pada masa orientasi maupun masa bekerja.

UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU

1. Seluruh karyawan Perseroan, apapun tingkatannya diwajibkan menandatangani surat pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku untuk diterapkan secara konsisten dan penuh tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pernyataan kepatuhan tersebut setiap tahun diperbarui dan dijadikan sebagai salah satu persyaratan kelanjutan hubungan kerja di Perseroan.
2. Manajemen memberikan contoh keteladanan kepada bawahan dan sesama rekan kerja tentang bagaimana harus bersikap dan berperilaku sesuai dengan Pedoman Perilaku.
3. Mengenakan sanksi secara tegas dan konsisten atas terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku.

corruption enforcement, both in operational and business management of the Company, as well as in the use of positions related to each of the Company's personnel.

DISSEMINATION OF CODE OF CONDUCT TO EMPLOYEES

The company is committed to implement effective and thorough socialization of the Code of Conduct owned, with the following steps:

1. Socialize the Code of Conduct to all levels in the Company, customers and work partners routinely through the dissemination of Code of Conduct book to all levels of management and employees.
2. Socialization of Code of Conduct to all levels of management and employees, cooperating with independent consultants and evaluating the achievement or understanding to all levels of the Company, both during orientation periods or during the working period.

EFFORTS TO ENFORCE CODE OF CONDUCT

1. Every employee, regardless of level, is obliged to sign a letter of statement asserting their obedience to the Code of Conduct and apply them consistently and responsibly in every duty given. The statement will be annually renewed and will be used as one of the conditions for continous employment.
2. Management will act as a role model to show its subordinates and co-workers on how to behave and act according to the Code of Conduct.
3. Deliver strict and consistent sanctions on every violation of the Code of Conduct.

Kode Etik, Pedoman Perilaku Perseroan
Code of Ethics, Company's Code of Conduct

Surat Pernyataan Kepatuhan

1. Saya menyatakan dengan sungguh-sungguh telah membaca dan memahami Pedoman Perilaku PT Perkebunan Nusantara X serta memahami kewajiban saya sebagai insan perusahaan untuk mematuhi kebijakan dan aturan yang tertuang dalam Pedoman Perilaku tersebut.
2. Saya setuju untuk bertindak sesuai dengan kebijakan dan aturan yang tertuang dalam Pedoman Perilaku dan sanggup untuk dikenakan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku tersebut.
3. Saya memahami bahwa persetujuan saya untuk mematuhi Pedoman Perilaku tidak tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Direksi dan Serikat Pekerja PT Perkebunan Nusantara X

TANDA TANGAN:

NAMA LENGKAP:

NOMOR INDUK KARYAWAN:

PANGKAT/GOLONGAN:

TANGGAL:

Kode Etik, Pedoman Perilaku Perseroan
Code of Ethics, Company's Code of Conduct

Sebagai realisasi penegakan Pedoman Perilaku Perseroan, berikut rincian sanksi yang dikenakan terkait penegakan Pedoman Perilaku selama 3 (tiga) tahun terakhir:

As a realization of the enforcement of the Company's Code of Conduct, the following are details of sanctions imposed related to the enforcement of Code of Conduct for the past 3 (three) years: Basic Principle of State Official

Jenis Sanksi	2016	2015	2014
Teguran *Reprimand*	5	32	6
Peringatan 1 *Warning 1*	19	47	52
Peringatan 2 *Warning 2*	5	8	11
Peringatan 3 *Warning 3*	9	9	14
Pengunduran Diri *Resignation*	21	23	5
Pemecatan *Dismissal*	10	5	22

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

State Official Property Report

PRINSIP DASAR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Sebagai eks-BUMN yang dimiliki oleh Negara melalui Pemerintah Indonesia, Perseroan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang mengikat. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh semangat pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal adalah kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan wewenang KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 pasal 2 (7) beserta penjelasannya, diuraikan bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mantaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaanya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara

BASIC PRINCIPLE OF STATE OFFICIAL PROPERTY REPORT

As an ex-SOE owned by the State through the Government of Indonesia, the Company is obliged to comply with binding legislation. One form of legislation that is based on the spirit of corruption eradication and internal irregularities is the obligation of State Official Property Report (LHKPN).

LHKPN is a list of all State Official Properties as set forth in LHKPN form stipulated by the Corruption Eradication Commission (KPK) as stipulated in KPK Decision No. KEP 07/KPK/02/2005 on the Procedure for Registration, Inspection and Announcement of the State Official Property Report. Law no. 30 Year 2002 on the Corruption Eradication Commission confirms the authority of KPK to implement measures or efforts to prevent corruption, among others through registration and examination of LHKPN. In addition, Law no. 28 Year 1999 on the Implementation of Clean State Official and Free from Corruption, Collusion and Nepotism, mandates that every official shall report and announce his or her Assets before and after taking office and willingly his or her assets are inspected before and after taking office. In Law No. 28 Year 1999 article 2 (7) and its elucidation, described that other officials with strategic functions in relation to state officials include the Board of Commissioners, Board of Directors and other structural officials to State-Owned Enterprises (BUMN) and Regional Owned Enterprises (BUMD) .

The examination of LHKPN submitted to the KPK aims at realizing the State Officials who adhere to the general principles of state officials free from corruption, collusion and nepotism practices, and other disgraceful acts. Each State Official is required to report his/her property through the LHKPN form provided by KPK to be filled honestly, correctly and completely, so that KPK can analyze, evaluate

jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

DASAR HUKUM DAN PERATURAN DALAM MENERAPKAN LHKPN DI PERSEROAN

Dalam menerapkan LHKPN, Perseroan menimbang beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkungan Perseroan. Dasar hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/BUMN/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, dan perubahannya;
4. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik;

PELAKSANAAN LHKPN PERSEROAN

Penyelenggara Negara di lingkungan Perseroan dilakukan untuk Pejabat 2 (dua) level di bawah Direksi (Pejabat Puncak dan Manajer/Kepala Urusan) yang wajib membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan LHKPN dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Waktu Penyampaian LHKPN
   a. Pejabat yang baru pertama kali menjabat
   b. Berakhirnya masa jabatan/pensiun
   c. Periodik setahun sekali
   d. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa jabatan/pensiun
2. Jangka Waktu Penyampaian LHKPN
   a. Penyampaian LHKPN berdasarkan Periode Perubahan Jabatan (Pelaporan Khusus)

and assess all reported amounts, types and values of the Property correctly, promptly, accurately and responsibly.

LEGAL AND REGULATORY BASIS IN APPLYING LHKPN IN THE COMPANY

In applying LHKPN, the Company considers several legal and regulatory basis as the foundation for LHKPN implementation in the Company. The legal basis are:

1. Law No. 28 Year 1999 on Clean State Official and Free from Corruption, Collusion and Nepotism;
2. Law No. 30 Year 2002 on the Corruption Eradication Commission;
3. Regulation of the Minister of State Owned Enterprises (SOEs) No. PER-01/BUMN/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises and its amendment;
4. Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 on Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Good GCG Implementation;

IMPLEMENTATION OF THE COMPANY'S LHKPN

The State Officials within the Company are performed for Officials 2 (two) levels below the Board of Directors (Top Officials and Managers/Heads of Affairs) who are required to prepare State Official Property Report (LHKPN) in accordance with KPK Regulation no. 7 Year 2016 on Procedures for Registration, Announcement and Inspection of LHKPN with the following explanation:

1. Submisson Time of LHKPN
   a. First term Official
   b. End of term/retirement
   c. Once a year period
   d. Re-appointment as State Official after termination/retirement
2. LHKPN Submission Period
   a. Submission of LHKPN based on Position Change Period (Special Reporting)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
State Official Property Report

- Penyampaian LHKPN pada saat pertama kali menjabat atau pensiun
- Batas waktu penyapaian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menjabat atau pensiun

b. Penyampaian LHKPN berdasarkan Periode Berkala (Pelaporan Periodik)
- Penyampaian LHKPN setiap setahun sekali
- Batas waktu penyampaian paling lambat pada 31 Maret tahun berikutnya

3. Pelaporan LHKPN di lakukan melalui formulir e-LHKPN

- Submission of LHKPN at the time of first term or retirement
- Deadline for submission not later than 3 (three) months after taking office or retiring

b. Submission of LHKPN by Periodic Reporting
- Submission of LHKPN every year
- Deadline for submission no later than March 31 of the following year

3. LHKPN reporting is conducted through e-LHKPN form

TRANSPARANSI LHKPN PEJABAT PERSEROAN TAHUN 2016

Di bawah ini disampaikan transparansi penyampaian LHKPN pejabat Perseroan di tahun 2016.

LHKPN TRANSPARENCY OF COMPANY OFFICIAL IN 2016

Below is the LHKPN submission transparency of Company officials in 2016.

Pengungkapan Penyampaian LHKPN Pejabat PTPN X Tahun 2016

Disclosure of LHKPN Submission of PTPN X Officials in 2016

Pejabat *Official*	Jumlah Wajib Lapor *Number of Mandatory Reports*	Jumlah yang Telah Melaporkan *Number Who Has Reported*	
		Jumlah *Number*	%
Dewan Komisaris *Board of Commissioners*	5	5	100,00%
Direksi *Board of Directors*	5	4	80,00%
Organ Pendukung Dewan Komisaris *Supporting Organs of the Board of Commissioners*	-	-	-
1 Tingkat di Bawah Direksi (Kepala Divisi/Biro/ SPI/Sekretaris Perusahaan/GM Unit Usaha) dan 2 Tingkat di Bawah Direksi (Kepala Urusan/Manajer) *1 Level Below the Board of Directors (Head Division/Bureau/SPI/ Corporate Secretary/GM Business Unit) and 2 Level Below Board of Directors (Head of Affairs/Manager)*	152	150	98,68%
Jumlah *Total*	162	159	98,15%

Whistleblowing System
Whistleblowing System

PEDOMAN PENGADUAN PELANGGARAN

Perseroan memiliki ketentuan mengenai pengaduan pelanggaran yakni Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS). Dalam ketentuan ini diatur mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran. Selain itu, diatur juga mengenai tahap penerimaan laporan, tahap penyelidikan sampai kepada tahap pemberian keputusan dan sanksi yang akan diberikan apabila pelanggaran yang dilaporkan terbukti.

Bagi Perseroan, keberadaan WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan. Keberadaan WBS bagi Perseroan diharapkan menjadi sistem yang efektif dalam mengungkap terjadinya berbagai bentuk kecurangan dan mampu menyelesaikannya dalam waktu singkat.

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN DAN PENANGANAN PENGADUAN

Unit pengelola Tim WBS harus merupakan fungsi atau unit yang independen dari operasi Perseroan sehari-hari setidak-tidaknya bisa merekrut ahli dari eksternal dan mempunyai akses kepada pimpinan tertinggi Perseroan. Unsur dari unit Tim WBS terdiri dari 2 (dua) elemen yakni:

1. 1Sub unit penerima laporan dan pelindungan pelapor
   Menerima dan menyeleksi laporan pelanggaran untuk diproses lebih lanjut oleh sub unit investigasi tanpa membuka identitas pelapor bertanggung jawab atas pelaksanaan pelaporan. Selain menyelenggarakan administrasi pelaporan pelanggaran yang masuk, dalam proses dan telah selesai ditindaklanjuti juga bertanggung jawab atas pelaksanaan program perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah dicanangkan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan pelapor (SDM).
2. Sub unit investigasi
   Bertugas untuk melakukan investigasi dengan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna memastikan bahwa memang terjadi pelanggaraan. Apabila terdapat bukti-bukti

GUIDELINES FOR VIOLATION REPORTING

The company regulates the violation reporting which is Whistleblowing System (WBS). In this provision the mechanism of violation reports is regulated. Aside from it, there are regulations on the receptence of reports, investigation stages up until the verdict and sanction given stages which will be carried out when the violation is proven to be true.

For the company, the existence of WBS is a part of internal controlling system to prevent deviation of practices. In other word, the existence of WBS is expected to become an effective system in revealing various deceits and able to solve them as soon as possible.

MECHANISM OF VIOLATION REPORTING AND HANDLING COMPLAINTS

Team WBS management unit must be an indepedent function or unit of the Company's daily operation or at least able to recruit external experts and have access to the highest position of the Company. The elements of Team WBS consist of two elements, which are:

1. Sub unit to receive reports and protecting the rapporteur
   Accepting and selecting violation reports for further processing by the investigation sub unit without revealing the identity of the rapporteur and is responsible to the implementation of said report. Aside from managing the administrational aspect of the report, the team is also responsible to protect the reportee in accordance to the regulations, especially the aspect of secrecy and security of the rapporteur (SDM).
2. unit of investigation
   Mandated to investigate and collect evidence required to ensure that there are violations being committed. Should there be evidence corroborating the existence of a violation, a recommendation regarding sanctions

Whistleblowing System
Whistleblowing System

yang memadai maka rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan diberikan kepada Direksi untuk memutuskan. Namun jika tidak menemukan bukti-bukti yang mencukupi, maka proses investigasi dihentikan dan laporan pelanggaran tidak dilanjutkan (Biro Hukum, SPI dan Bidang terkait).

is given to the management for further rulings. If there isn't enough evidence, the investigation will be stopped and no further actions are conducted (Legal Bureau, SPI, and associated fields).

SALURAN PELAPORAN

Sarana Pelaporan Pelangggaran antara lain melalui saluran di bawah ini:

REPORTING CHANNEL

Reporting can be done through:

Email: wbs.ptpn10@ptpn10.co.id
Fax: +62 31 352316
Telp: +62 31 3523143 pswt (110, 190)
Kotak Surat: Tim Whistleblowing System
PT Perkebunan Nusantara X
Jalan Jembatan Merah 3-11
Surabaya 60175

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Guna mendorong keberanian untuk melaporkan adanya tindak pelanggaran, maka Perseroan menetapkan prosedur yang mampu menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta memberikan perlindungan bagi pelapor. Perseroan berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik dan Perseroan akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan WBS.

Seorang pelapor pelanggaran akan mendapatkan perlindungan dari:
1. Pemecatan yang tidak adil.
2. Penurunan jabatan atau pangkat.
3. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya.
4. Catatan yang merugikan dalam *file* data pribadinya.

Perseroan melindungi Pelapor yang beretika baik, melalui:

1. Tersedianya fasilitas saluran pelaporan.
2. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor apabila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor.

PROTECTION FOR THE RAPPORTEUR

To encourage reports on violations, the Company has established a procedure to ensure the secrecy of the rapporteur's identity as well as providing protection. The company is committed to protect the rapporteur of violations that has good intentions and the company will obey all related regulations and legislations as well as best practices that are in effect in the implementation of WBS.

A rapporteur will receive protection from:

1. Unfair termination
2. Demotion
3. Harassmment or any form of discrimination
4. Harmful notes within his/her personal records

The company protects rapporteur with good intention through:
1. Existence of reporting channels.
2. Assurance of secrecy should the rapporteur provides personal and contact information.

3. Jaminan keamanan informasi dan perlindungan terhadap tindakan balasan dari terlapor.

Selain kerahasiaan dan keamanan pelapor dilindungi, pelapor sebaliknya juga bisa dikenai sanksi apabila pelaporan merupakan fitnah atau pelaporan palsu.

HASIL PENANGANAN PENGADUAN TAHUN 2016

Di sepanjang tahun 2016, tidak terdapat pelaporan dan pengaduan yang masuk melalui saluran WBS yang dimiliki Perseroan.

3. Assurance of information safety and any reprocussions from the reported.

Aside from said secrecy and protections, the rapporteur can also be given sanctions if the reports are proven to be slanderous or fake.

REPORT FOLLOW-UPS IN 2016

Throughout 2016 there are no reports or complaints through WBS channel owned by the Company.

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Policy on the Diversity of the Composition of Board of Commissioners and Directors

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih obyektif, komprehensif, optimal, dan memiliki dampak positif terhadap pengawasan dan pengelolaan Perseroan. Keberagaman ini diharapkan dapat memperkaya sudut pandang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan baik di tubuh Dewan Komisaris maupun Direksi, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi aspek operasional dan usaha Perseroan, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkup Perseroan.

Perseroan belum memiliki kebijakan secara spesifik terkait keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Belum adanya kebijakan ini terutama disebabkan proses nominasi dan remunerasi sepenuhnya berada di Kementerian BUMN dan Holding Perkebunan selaku pemegang saham. Namun, Perseroan telah memiliki *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi yang mengatur komposisi dan kualifikasi keanggotaan memiliki latar belakang yang dapat mendukung kinerja operasional dan bisnis Perseroan.

Di bawah ini disajikan tabel keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2016.

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PTPN X

Nama *Name*	Kewarganegaraan *Nationality*	Pendidikan Terakhir *Last Education*	Latar Belakang Pendidikan *Educational Background*
Dewan Komisaris *Board of Commissioners*			
Rudi Wibowo (Komisaris Utama) *President Commissioner*	Indonesia	Doktor (S3), dengan gelar pemberian Profesor *Doctorate (S3), with Professor granting degree*	Profesor, Doktor bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah Pedesaan, Magister Sains Ekonomi Pertanian, Sarjana Pertanian jurusan Sosial Ekonomi *Professor, Doctorate in Rural Development Planning, Master of Science in Agricultural Economics, Bachelor of Agriculture majoring in Social Economics*
Sukardi Rinakit (Komisaris) *Commissioner*	Indonesia	Ph.D (S3)	Ph.D, Departement of Political Science; M.A., Departement of Southeast Asian Studies; Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. *Ph.D, Departement of Political Science; M.A., Departement of Southeast Asian Studies; Bachelor of Social Science and Political Science.*

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Policy on the Diversity of the Composition of Board of Commissioners and Directors

The diversity of the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors is part of the Company's efforts to encourage a more objective, comprehensive, optimal and decision-making process that has a positive impact on the supervision and management of the Company. This diversity is expected to enrich the point of view and interest in decision-making processes in both the Board of Commissioners and Board of Directors, thereby providing added value to the operational and business aspects of the Company, as well as the implementation of Corporate Governance within the Company.

The Company does not have specific policies regarding the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors. The absence of this policy is mainly due to the nomination and remuneration processes is fully in the Ministry of SOE and Plantation Holding as the shareholders. However, the Company has a Board Manual of Board of Commissioners and Board of Directors which regulates the composition and qualification of membership having background that can support the operational and business performance of the Company.

Below is a table of composition diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company in 2016.

Table of Composition Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors of PTPN X

Pengalaman Kerja *Work Experience*	Usia *Age*	Gender *Gender*
Deputi Badan Eksekutif GAPPERINDO bidang SDM/Teknologi (2003-sekarang); Ketua Majelis Penasehat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) (2011-2014); Sekretaris Jenderal PERHEPI (2004-2007); Sekditjen Tanaman Pangan dan Hortikultura Departemen Pertanian (1998-2000); Kepala Biro Tata Usaha BUMN (1997); Sekretaris Badan Agribisnis Departemen Pertanian (1994-1997). *Deputy Executive Board of GAPPERINDO in Human Resources/Technology (2003-present); Chairman of the Advisory Council of Indonesian Agricultural Economy (PERHEPI) (2011-2014); Secretary General of PERHEPI (2004-2007); Secretary General of Food Crops and Horticulture Department of Agriculture (1998-2000); Head of Bureau of SOE Administration (1997); Secretary of Agribusiness Agency Department of Agriculture (1994-1997).*	64	Laki-laki *Male*
Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (2015-sekarang); Anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) (2015-sekarang); Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate (2001-2014); Dosen Tamu di Lemhanas dan Program Pascasarjana Universitas Indonesia (2001-2014); Staf Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) (1989-1998). *Special Staff of the President of the Republic of Indonesia (2015-present); Member of the Indonesian Political Science Association (AIPI) (2015-present); Executive Director of Soegeng Sarjadi Syndicate (2001-2014); Guest Lecturer at Lemhanas and Postgraduate Program of University of Indonesia (2001-2014); Center for Strategic and International Studies (CSIS) Research Staff (1989-1998).*	53	Laki-laki *Male*

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Policy on the Diversity of the Composition of Board of Commissioners and Directors

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PTPN X

Nama *Name*	Kewarganegaraan *Nationality*	Pendidikan Terakhir *Last Education*	Latar Belakang Pendidikan *Educational Background*
Y.B. Priyatmo Hadi (Komisaris) *Commissioner*	Indonesia	Magister (S2) *Master*	Magister Ekonomi, dan Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. *Master of Economics, and Bachelor of Social Science and Political Science.*
Arvan Rivaldy Rebion Siregar (Komisaris Independen) *Independent Commissioner*	Indonesia	Sarjana (S1) *Bachelor*	Bachelor Comm, Specializing in Finance
Djoko Moeljono (Komisaris) *Commissioner*	Indonesia	Sarjana (S1) *Bachelor*	Sarjana Ekonomi *Bachelor of Economics*

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Policy on the Diversity of the Composition of Board of Commissioners and Directors

Table of Composition Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors of PTPN X

Pengalaman Kerja *Work Experience*	Usia *Age*	Gender *Gender*
Kepala Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana, Prasarana Perhubungan 1b, Kementerian BUMN (2015-sekarang); Komisaris PT Reasuransi International Indonesia (2014-2016); Kepala Bidang Usaha Perbankan & Asuransi I, Kementerian BUMN (2014-2015); Komisaris PT Jalantol Lingkar Luar Jakarta (2014); Staf Sekretaris Komisaris PT Bank Mandiri (2011-2014); Kepala Sub Bidang Jasa 1 A2, Kementerian BUMN (2010-2014); Sekretaris Dewan Komisaris PTPN XI (2008-2011); Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kinerja Usaha Perkebunan II A Kementerian BUMN (2008-2010); Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kinerja Usaha Perkebunan II A, Kementerian BUMN (2006-2008); Sekretaris Dewan Komisaris PTPN IX (2006-2008); Sekretaris Dewan Komisaris PT Merpati Nusantara Airlines (2002-2006); Pelaksana pada Sub Bidang Perencanaan Usaha Bidang Sarana Perhubungan, Kementerian Keuangan/Kementerian Pembinaan BUMN (1999-2006); Staf Sekreatris Dewan Komisaris PT Merpati Nusantara Airlines (2000-2002). *Head of Construction and Facilities Section, Transportation Infrastructure 1b, Ministry of SOE (2015-present); Commissioner of PT Reasuransi International Indonesia (2014-2016); Head of Banking & Insurance Business I, Ministry of SOE (2014-2015); Commissioner of PT Jalantol Lingkar Luar Jakarta (2014); Staff Secretary Commissioner of PT Bank Mandiri (2011-2014); Head of Service Sub Division 1 A2, Ministry of SOE (2010-2014); Secretary of the Board of Commissioners of PTPN XI (2008-2011); Head of Sub-Planning and Plantation Business Performance II of Ministry of SOE (2008-2010); Executing Officer Task Head of Planning and Performance of Plantation Business II A, Ministry of BUMN (2006-2008); Secretary of the Board of Commissioners of PTPN IX (2006-2008); Secretary of the Board of Commissioners of PT Merpati Nusantara Airlines (2002-2006); Implementer in Sub Division of Business Planning in Transportation Facilities Sector, Ministry of Finance/Ministry of BUMN (1999-2006); Secretary Staff of Board of Commissioners of PT Merpati Nusantara Airlines (2000-2002).*	44	Laki-laki *Male*
Direktur PT Ingria Pratama Capitalindo (2015-sekarang); Komisaris PT Puri Amerta Sanjiwani (2009-sekarang); Direktur PT Petrobas Indonesia (2006-20090); Direktur PT Megah Tama Berjangka (2007-2008); Assistant to Senior Vice President Coordinating Executive PT Freeport Indonesia (2003-2005). *Director of PT Ingria Pratama Capitalindo (2015-present); Commissioner of PT Puri Amerta Sanjiwani (2009-present); Director of PT Petrobas Indonesia (2006-2009); Director of PT Megah Tama Berjangka (2007-2008); Assistant to Senior Vice President Coordinating Executive of PT Freeport Indonesia (2003-2005).*	36	Laki-laki *Male*
Direktur SDM/Umum PTPN V (2006-2012), Direktur Pemasaran PTPN V (2006), Asisten Deputi Bidang Usaha Perkebunan di Kementerian BUMN (2002-2006), Direktur Kawasan Industri, Jasa Konstruksi dan Konsultasi Konstruksi (2001), Direktur Usaha Agro Industri II (2000), Kepala Subdit Perusahaan Pertanian dan Perkebunan Kantor Menteri Negara BUMN (1998-1999), Kepala Sub Direktorat Perkebunan di Kantor Menteri Negara BUMN (1998), Kepala Sub Direktorat pada Ditjen Pembinaan BUMN Departemen Keuangan (1992-1998), Kepala Seksi Direktorat Jenderal Moneter Departemen Keuangan (1985-1992) *Director of Human Resources/General PTPN V (2006-2012), Marketing Director of PTPN V (2006), Assistant Deputy of Plantation Business at Ministry of SOE (2002-2006), Director of Industrial Estate, Construction Services and Construction Consultant (2001), Director of Agro Industry II (2000), Head of Sub-Directorate of Agriculture and Plantation Company Office of State Minister of State-Owned Enterprise (1998-1999), Head of Sub Directorate of Plantation at Ministry of State-Owned Enterprise (1998), Head of Sub Directorate at Directorate General of BUMN Ministry of Finance (1992-1998) Section Chief of Directorate General of Monetary Ministry of Finance (1985-1992)*	66	Laki-laki *Male*

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Policy on the Diversity of the Composition of Board of Commissioners and Directors

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PTPN X

Nama *Name*	Kewarganegaraan *Nationality*	Pendidikan Terakhir *Last Education*	Latar Belakang Pendidikan *Educational Background*
Indarto (Komisaris) *Commissioner*	Indonesia	Sarjana (S1) dan Pendidikan Kepolilsian *Bachelor and Police Academy*	Sekolah Staf dan Komando Gabungan ABRI, Sarjana Hukum, Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) bagian kepolisian. *ABRI Joint Staff and Command School, Bachelor of Law, Staff and Police Leadership School, Police Science College, Indonesian Armed Forces Academy (AKABRI) Police Department.*
Heru Sudibyo (Komisaris) *Commissioner*	Indonesia	SESKOAD *(Army Staff and Command School)*	Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD), Kursus Lanjutan Perwira Infantri (SUSLAPA IF), Kursus Dasar Kecabangan Infantri (SUSSARCAB IF), Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). *Army Staff and Command School (SESKOAD), Infantry Officer Advanced Course (SUSLAPA IF), Infantry Base Course (SUSSARCAB IF), Academy of the Armed Forces of the Republic of Indonesia (AKABRI).*
Susanto Darus (Komisaris) *Commissioner*	Indonesia	Magister (S2) *Master*	Sarjana Sosial Ekonomi Pertanian dan Magister Manajemen Agribisnis *Bachelor Degree of Agricultural Socio-Economics and Master of Agribusiness Management*
Direksi *Board of Directors*			
Subiyono (Direktur Utama) *President Director*	Indonesia	Magister (S2) *Master*	Sarjana Sosial Ekonomi Pertanian dan Magister Manajemen Agribisnis *Bachelor of Agricultural Socio-Economics and Master of Agribusiness Management*
Tarsisius Sutaryanto (Direktur) *Director*	Indonesia	Magister (S2) *Master*	Sarjana Pertanian dan Magister Manajemen *Bachelor of Agriculture and Master of Management*

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Policy on the Diversity of the Composition of Board of Commissioners and Directors

Table of Composition Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors of PTPN X

Pengalaman Kerja *Work Experience*	Usia *Age*	Gender *Gender*
Kapolda Kalimantan Timur (2006-2008), Direktur Pidana Korupsi Bareskrim Polri (2004-2006), Kapolda Sulawesi Tenggara (2001-2002), Wakil Direktur Pidana Korupsi Koserse Polri (1999-2001), Kapolwil Purwakarta Polda Jabar (1998-1999), Kadit Serse Polda Sulawesi Selatan (1997–1998), Perwira Siswa Sesko ABRI Dikreg XXIII (1996-1997), Kabag Bisnis Koserse Polri (1994–1996), Kasat Samapta, Kasat Serse, Kapolresta Surabaya Timur, Kapolres Gresik Polda Jawa Timur (1990-1994) *East Kalimantan Police Chief (2006-2008), Director of Police Criminal Corruption Crime (2004-2006), Southeast Sulawesi Police Chief (2001-2002), Deputy Director of Police Criminal Corruption (1999-2001), Police Chief of Purwakarta Jabar (1998-1999) , Sert Police Headquarters of South Sulawesi (1997-1998), Armed Forces Officer Dikreg XXIII (1996-1997), Head of Koserse Polri Business (1994-1996), Kasat Samapta, Sert kasat East Surabaya Kapolresta, Gresik Police Chief, East Java Police (1990-1994)*	66	Laki-laki *Male*
Wakil Asisten Teritorial Kasad Mabes AD, Jakarta (periode-2006), Pati Staf Ahli Kasad Mabes AD, Jakarta (periode), Komandan Korem 074 Warastratama-Surakarta Jawa Tengah (periode), Perwira Staf Sospol Mabes ABRI (1999), Asisten Teritorial Kodam V Brawijaya (1997), Komandan Kodim 1630 di Sumba Barat (1994), Komandan Koramil Lanjak Kalbar (1977) *Deputy Assistant for the Army Chief of Staff of the Army Headquarters, Jakarta (period-2006), Petty Staff of the Army Chief of Staff, Jakarta (period), Commander of Korem 074 Warastratama-Surakarta Central Java (period), Social political Staff of ABRI Headquarters (1999), Territorial Assistant Kodam V Brawijaya (1997), Commander of Kodim 1630 in West Sumba (1994), Commander of Koramil Lanjak Kalbar (1977)*	66	Laki-laki *Male*
Wakil Pemimpin Umum SKH (grup) Jurnal Nasional (2006-2010), Staf Khusus Menko Polhukam RI (2006-2009), Penasehat Menteri Pertahanan Republik Indonesia (2003-2004), Staf Ahli Bidang Militer dan Keamanan Departemen Pertahanan Republik Indonesia (2001-2003) *Deputy General Manager of SKH (Group) of National Journal (2006-2010), Special Staff of the Coordinating Minister for Political and Security Affairs (2006-2009), Advisor to the Minister of Defense of the Republic of Indonesia (2003-2004), Military and Security Expert Staff of the Department of Defense of the Republic of Indonesia (2001- 2003)*	69	Laki-laki *Male*
Komisaris PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (2014-sekarang), Ketua Umum IKAGI Pusat (2012-2016), Pembina Tingkat 1 (1999-2001), Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur (2001), Kepala Dinas Perkebunan Prov. Dati I Jawa Timur (1998-2001), Kepala Sub. Dinas Bina Produk Disbunda Prov. Dati I Jawa Timur di Surabaya (1997-1998), Kepala Sub. Dinas Tehnik Produk Disbunda Prov. Dati I Jawa Timur di Surabaya (1994-1997), Kepala Cabang Disbunda Prov. Dati I Jawa Timur di Jember (1986-1994), Kepala Cabang Disbunda Prov. Dati I Jawa Timur di Bojonegoro (1982-1986), Kepala Seksi Perencanaan Disbunda Prov. Dati I Jawa Timur di Bojonegoro (1981-1982) *Commissioner of PT Kharisma Marketing Bersama Nusantara (2014-present), Chairman of Central IKAGI (2012-2016), Level 1 (1999-2001), Head of East Java Provincial Plantation Office (2001), Head of Plantation Service Prov. Dati I East Java (1998-2001), Head of Sub. Product Development Service Disbunda Prov. Dati I East Java in Surabaya (1997-1998), Head of Sub. Product Technical Service Disbunda Prov. Dati I East Java in Surabaya (1994-1997), Branch Head Disbunda Prov. Dati I East Java in Jember (1986-1994), Branch Head Disbunda Prov. Dati I East Java in Bojonegoro (1982-1986), Head of Planning Section Disbunda Prov. Dati I East Java in Bojonegoro (1981-1982)*	66	Laki-laki *Male*
Ketua IKAGI Cabang Jawa Timur (2008-sekarang), Administratur Pabrik Gula Ngadiredjo (2003-2007), Ketua Tim Program Pengembangan Kapasitas Pabrik Gula Ngadiredjo (2006), Administratur Pabrik Gula Modjopanggong (2003), Pejabat Sementara Administratur Pabrik Gula Modjopanggoong (2001-2003), Kepala Bagian Tanaman - Pabrik Gula Ngadiredjo (2001), Kepala Bagian Tanaman - Pabrik Gula Modjopanggoong (1999-2001) *Chairman of IKAGI Branch of East Java (2008-present), Administrator of Sugar Factory Ngadiredjo (2003-2007), Head of Ngadiredjo Sugar Factory Production Team (2006), Modjopanggong Sugar Factory Manager (2003), Temporary Sugar Factory Manager Modjopanggoong (2001- 2003), Head of Sugar Factory of Ngadiredjo (2001), Head of Plant of Modjopanggoong Sugar Factory (1999-2001)*	59	Laki-laki *Male*

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Policy on the Diversity of the Composition of Board of Commissioners and Directors

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PTPN X

Nama *Name*	Kewarganegaraan *Nationality*	Pendidikan Terakhir *Last Education*	Latar Belakang Pendidikan *Educational Background*
Muhammad Hanugroho (Direktur) *Director*	Indonesia	Sarjana (S1) *Bachelor*	Diploma Ilmu Perpustakaan dan Sarjana Administrasi Bisnis *Non-degree of Library Science and Bachelor of Business Administration*
Djoko Santoso (Direktur) *Director*	Indonesia	Sarjana (S1) *Bachelor*	Sarjana Pertanian *Bachelor of Agriculture*
Moch Sulton (Direktur) *Director*	Indonesia	Magister (S2) *Master*	Sarjana Pertanian jurusan Agronomi dan Magister Manajemen *Bachelor of Agriculture majoring in Agronomy and Master of Management*

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Policy on the Diversity of the Composition of Board of Commissioners and Directors

Table of Composition Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors of PTPN X

Pengalaman Kerja *Work Experience*	Usia *Age*	Gender *Gender*
Associate Director-Investment Banking Department, PT Mandiri Sekuritas (2012-Juni 2015), Assistant Vice President-Investment Banking Department, PT Mandiri Sekuritas (2011-2012), Senior Manager-Investment Banking Department, PT Bahana Securities (2005-2011), Senior Manager-Invesment Banking Department, PT Bahana Securities (Mei 2005-Maret 2011), Manager-Fixed Income Sales Department, PT Bahana Securitires (Februari 2005-April 2005), Assistant Manager-Research Department, PT Bahana Securities (Juli 1997-Januari 2005), Researcher-Research Department, PT DBS Securities Indonesia (Maret 1996-Juni 1997) *Associate Director-Investment Banking Department, PT Mandiri Sekuritas (2012-June 2015), Assistant Vice President-Investment Banking Department, PT Mandiri Sekuritas (2011-2012), Senior Manager-Investment Banking Department, PT Bahana Securities (2005-2011), Senior Manager-Invesment Banking Department, PT Bahana Securities (May 2005-March 2011), Manager-Fixed Income Sales Department, PT Bahana Securities (February 2005-April 2005), Assistant Manager-Research Department, PT Bahana Securities (July 1997-January 2005), Researcher-Research Department, PT DBS Securities Indonesia (March 1996-June 1997)*	46	Laki-laki *Male*
Sekretaris Perusahaan (2009-2012), Kadiv Bidang Perencanaan & Pengembangan (2008-2009), Sekretaris Perusahaan (2007-2008), Kepala Biro Sekretariat Perusahaan (2003-2007), PLH Kepala Biro Sekretariat Perusahaan (2001-2003) *Corporate Secretary (2007-2008), Head of Planning and Development (2008-2009), Corporate Secretary (2007-2008), Head of Corporate Secretariat Bureau (2003-2007), Head of Corporate Secretariat Bureau PLH (2001-2003)*	58	Laki-laki *Male*
Administratur Pabrik Gula Pesantren Baru (2010-2012), Administratur Pabrik Gula Djombang Baru (2008-2010), PJs. Administratur Pabrik Gula Krembong (2008), Kepala Bagian Tanaman Pabrik Gula Lestari (2007-2008), Kepala Bagian Tanaman Pabrik Gula Watoetoelis (2005-2007), SKK – Tebang & Angkut – Pabrik Gula Lestari (2004-2005), SKK – Tebang & Angkut – Pabrik Gula Ngadiredjo (1997-2003). *Administrator of Sugar Factory of Pesantren Baru (2010-2012), Administrator of Jombang Baru Sugar Factory (2008-2010), PJs. Administrator of Crembong Sugar Factory (2008), Head of Plant of Lestari Sugar Factory (2007-2008), Head of Plant of Watoetoelis Sugar Factory (2005-2007), SKK – Chop & Transport – Lestari Sugar Factory (2004-2005), SKK – Chop & Transport - Ngadiredjo Sugar Factory (1997-2003).*	58	Laki-laki *Male*

Perpajakan
Taxation

Perseroan berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada negara melalui pemenuhan kewajiban pajak. Salah satunya perwujudan tersebut dilakukan melalui keikutsertaan Perseroan dalam program *Tax Amnesty* di tahun 2016. Di samping itu, setoran pajak kepada negara sebagai bentuk kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perpajakan di Indonesia.

The Company is committed to contributing to the state through the fulfillment of tax obligations. One of these realizations is done through the participation of the Company in the Amnesty Tax program in 2016. In addition, the tax payment to the state is as a form of compliance of the Company against taxation laws in Indonesia.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intenttionally left blank

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Sebagai Agen Pembangunan, PTPN X berupaya membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan, agar terwujudnya pertumbuhan yang berkelanjutan.

As a Development Agent, PTPN X seeks to build a harmonious relationship with all Stakeholders, in order to achieve a sustainable growth.

Pembangunan Berkelanjutan Fondasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sustainable Development Foundation of Corporate Social Responsibility

Pembangunan berkelanjutan yang telah diinisiasi oleh berbagai negara transpirasi oleh keinginan banyak pihak tentang keseimbangan antara entitas usaha, pemegang saham/pemilik modal dan pemangku kepentingan. Masing-masing dari elemen tersebut memiliki kepentingannya yang saling berbeda, yang tidak jarang justru mengalami benturan yang kemudian memunculkan keresahan dan ketidakstabilan sosial; yang dapat berdampak buruk terhadap semua pihak.

Entitas usaha, bersama-sama dengan Pemerintah sebagai lokomotif yang memiliki peran besar dalam keseimbangan ini, didorong untuk mengambil porsi terdepan dalam melakukan perubahan. Pembangunan berkelanjutan kemudian menjadi sebuah bingkai berpikir dan bertindak bagi entitas usaha untuk dapat menciptakan keseimbangan antara pengelolaan usaha berbasis laba, kepentingan pemilik modal, hingga hubungan dengan pemangku kepentingan.

Sebagai perusahaan eks-BUMN yang memiliki visi "Menjadi Perusahaan Agroindustri Terkemuka yang Berwawasan Lingkungan", Perseroan memiliki kewajiban moral untuk dapat mewujudkan keseimbangan tersebut. Pengelolaan usaha yang sehat dan memiliki masa depan yang cerah, penerapan tata kelola organisasi yang baik yang didasarkan pada kepatuhan dan akuntabilitas, pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemenuhan hak-haknya, hingga pertumbuhan Perseroan bersama masyarakat Indonesia, tentu akan memperkuat posisi Perseroan untuk dapat menjemput visi yang dicita-citakan.

Sustainable development that has been initiated by various countries was inspired by the desire of many parties on balance between business entities, shareholders / creditors and stakeholders. Each of the elements has interests that differ from each other, which was not uncommon for experienced clash then led to unrest and social instability; which could adversely affect all parties.

Business entities, together with the Government as a locomotive that has a major role in this balance, were encouraged to take a leading portion of the changes. The sustainable development later became a frame of thinking and acting for the business entities in order to create a balance between profit-based business management, the interests of the capital owners, up to the relationship with stakeholders.

As an ex state-owned company that has a vision of "Becoming the Leading Agroindustrial Company with Environmental Sound," the Company has a moral obligation to be able to realize the balance. The management of a healthy business and has a bright future, the implementation of good corporate governance that is based on compliance and accountability, competence development of Human Resources (HR) and the fulfillment of their rights, until the growth of the Company together with the people of Indonesi, will definitely strengthen the Company's position to be able to reach the vision aspired.

Pembangunan Berkelanjutan Fondasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Sustainable Development Foundation of Corporate Social Responsibility

Keseimbangan dalam Pembangunan Berkelanjutan
Balance in Sustainable Development

Keseimbangan seperti yang tergambar pada bagan di atas dapat diwujudkan melalui komitmen Perseroan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) ke dalam 4 (empat) aspek:

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap lingkungan hidup.
2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap karyawan melalui Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap masyarakat melalui pengembangan sosial dan kemasyarakatan serta pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap konsumen.

The balance as illustrated in the chart above can be realized through the Company's commitment in implementing the Corporate Social Responsibility (CSR) into four (4) aspects:

1. Corporate Social Responsibility towards the environment.
2. Corporate Social Responsibility towards employees through Labor, Occupational Safety and Health Work.
3. Corporate Social Responsibility to the community through social and community development as well as the implementation of the Partnership Program and Community Development (CSR).
4. Corporate Social Responsibility to the consumers.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang terkait dengan **lingkungan hidup**	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang terkait dengan **ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja**	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang terkait dengan **pengembangan sosial dan kemasyarakatan**	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang terkait dengan **tanggung jawab kepada konsumen**

Pembangunan Berkelanjutan Fondasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Sustainable Development Foundation of Corporate Social Responsibility

LANDASAN HUKUM

Dasar pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berlandaskan pada beberapa aspek hukum, diantaranya:

1. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN:
   a. Pasal 2 mengemukakan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
   b. Pasal 88 mengemukakan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (pasal 15 (b)) yang berisi, "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat".
5. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
6. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.
7. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
8. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
11. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/ MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

LEGAL BASIS

The basis of implementation of Corporate Social Responsibility program is based on several aspects of the law, including:

1. Law No. 19 Year 2003 on State-owned Enterprises:
   a. Article 2 sets out that one of the purposes and objectives of the establishment of state-owned enterprises are actively involved providing guidance and assistance to employers of economically weak groups, cooperatives, and community.
   b. Article 88 suggests that SOEs can set aside part of the net income for the purposes of small business development / co-operatives and community development around the SOE.
2. Law No. 32 Year 1998 on the Development and Small Business Development.
3. Law No. 20 Year 2008 on Micro, Small and Medium Enterprises.
4. Law No. 25 Year 2007 regarding Investment (Article 15 (b)) which provides: "Every investor is obliged to implement corporate social responsibility. What is meant by "Corporate social responsibility" is the responsibility inherent in each investment firm to keep creating harmonious relations, balanced, and in accordance with the environment, values, norms and local culture".
5. Law No. 1 Year 1970 on Work Safety.
6. Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection.
7. Law No. 13 Year 2003 on Manpower.
8. Law No. 28 Year 1999 on Clean State Officials and Free from Corruption, Collusion and Nepotism.
9. Law of the Republic of Indonesia No. 20 Year 2001 on Amendments to the Law of the Republic of Indonesia No. 31 Year 1999 on Corruption Eradication.
10. Government Regulation No. 50 Year 2012 on the Implementation of Management system on Health and Work Safety.
11. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01 / MBU / 2011 dated 1 August 2011 and its amendments No. PER- 09 / MBU / 2012 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) at the State-Owned Enterprises.

12. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sebagaimana terakhir diubah dengan PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
13. Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
14. ISO 26000
    Telah diratifikasi oleh Pemerintah pada tahun 2010 dan dijadikan Standar Nasional (SNI) pada 2012, dengan 7 (tujuh) subyek inti yaitu:
    a. Tata kelola organisasi yang baik
    b. Penegakan hak asasi manusia
    c. Praktek ketenagakerjaan yang manusiawi dan berkeadilan
    d. Dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan
    e. Prosedur operasi yang wajar
    f. Tanggung jawab terhadap konsumen
    g. Pelibatan dalam pengembangan masyarakat

MEMBANGUN HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Perseroan menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam rangka membentuk korporasi sebagai sebuah bagian integral dari masyarakat. Perseroan tidak hanya mengemban misi ekonomi bagi pemegang saham, tetapi juga wajib mengambil peran aktif dalam memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan Perseroan.

Perseroan tidak dapat berhenti pada usaha-usaha pengembangan bisnis semata. Untuk meraih pertumbuhan yang berkesinambungan, Perseroan wajib memperhatikan pemangku kepentingan internal, dalam hal ini karyawan Perseroan, dan pemangku kepentingan eksternal, dalam hal ini masyarakat di sekitar area operasional Perseroan. Program-program CSR yang dilakukan oleh Perseroan bertujuan untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

12. Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09 / MBU / 07/2015 concerning the Partnership Program State Owned Enterprises by Small Business and Community Development Program, as amended by PER-03 / MBU / 12/2016 on the Amendment of the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises PER-09 / MBU / 07/2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises.
13. Circular Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. SE-02 / MBU / Wk / 2012 dated February 23, 2012 regarding the Stipulation Guidelines of Accounting Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises.
14. ISO 26000
    It was ratified by the government in 2010 and was made the National Standard (SNI) in 2012, with 7 (Seven) core subjects, such as:
    a. Good corporate governance
    b. Enforcement of human rights
    c. Humane labor practices and fair
    d. The impact of corporate activities on the environment
    e. Reasonable operating procedures
    f. Responsibility towards consumers
    g. Involvement in community development

BUILDING RELATIONSHIPS WITH STAKEHOLDERS

The Company operates the Corporate Social Responsibility in order to establish the corporation as an integral part of the society. The Company does not only bear the economic mission for the shareholders, but is also obliged to take an active role in caring for the needs of the Company's stakeholders.

The Company can not stop at the business development efforts alone. To achieve sustainable growth, the Company must pay attention to the internal stakeholders, in this case the employees of the Company and external stakeholders, in this case the communities surrounding the Company's operational area. The CSR programs conducted by the Company are aimed to provide sustainable added values for stakeholders.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup

Corporate Social Responsibility Related to Environment

Ekspansi dunia usaha kerap berbuah negatif terhadap keberadaan lingkungan hidup. Sebagai entitas usaha yang menggunakan sumber daya alam dalam hal ini hasil bumi sebagai modal utama dalam lingkup bisnisnya, Perseroan menaruh perhatian terhadap pengelolaan lingkungan hidup khususnya di sekitar lokasi Pabrik Gula dan perkebunan yang dikelola Perseroan.

Adanya Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL) dari setiap Pabrik Gula menunjukkan kepatuhan Perseroan kepada peraturan yang berlaku, sekaligus memberikan dasar bagi pengelolaan produksi Perseroan yang berbasiskan bisnis ramah lingkungan. Dalam RKL/RPL tersebut mencakup kewajiban titik operasi Perseroan untuk melakukan pemantauan lingkungan sesuai dengan yang diamanahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur; seperti pengukuran polusi air dan udara, pembuangan limbah, hingga tingkat kebisingan yang dapat muncul sebagai akibat dari proses produksi yang dilakukan Perseroan.

Tanggung jawab Perseroan terhadap lingkungan hidup juga dilakukan melalui pelestarian lingkungan di sekitar lokasi Pabrik Gula dan perkebunan yang dikelola. Hal ini penting, mengingat pengelolaan kawasan menjadi sebuah kunci bagi keberlangsungan dunia usaha bersama pemangku kepentingan untuk dapat tumbuh bersama-sama.

Berbagi pengetahuan kepada petani di sekitar Jawa Timur juga menjadi tanggung jawab Perseroan atas lingkungan hidup. Faktor risiko usaha atas alih fungsi lahan masyarakat menjadi perhatian Perseroan. Selain akan berpengaruh terhadap kinerja operasi, alih fungsi lahan justru akan berdampak pada pengelolaan kawasan tanpa melibatkan kepentingan lingkungan hidup. Hal ini juga dilakukan Perseroan di Madura, dimana Perseroan membagikan pengetahuan kepada para petani untuk dapat mengoptimalkan lahan yang dimiliki dengan tetap berorientasi pada kepentingan lingkungan hidup. Melalui harmonisasi antara kepentingan bisnis dan keberlangsungan lingkungan hidup, Perseroan berharap untuk dapat menumbuhkan citra korporasi yang sesuai dengan industri yang dijalani oleh Perseroan.

The expansion of the business often bear negatively on the existence of the environment. As a business entity that use of natural resources-in this case agricultural products-as a major capital within the scope of its business, the Company pays attention to environmental management, especially in the vicinity of Sugar Factory and plantation managed by the Company.

The existence of the Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan (RKL / RPL) on each sugar factory shows the Company's compliance to the regulations, while providing a basis for management of the Company's production-based business environment. RKL / RPL includes liability operating point of the Company to conduct environmental monitoring as mandated by the Government of East Java Province; such as the measurement of air and water pollution, waste disposal, up to the level of noise that may arise as a result of the Company's production process.

The Company's responsibility towards the environment is also done through the preservation of the environment around the site of Sugar Factory and managed plantations. This is important, as land management becomes a key for the sustainability of the business together with stakeholders to be able to grow together.

Sharing knowledge to farmers around East Java is also being the responsibility of the Company for the environment. Business risk factors on public land conversion becomes the Company's attention. Beside affecting the performance of operations, the land conversion would likely have an impact on the management of the region without involving environmental interests. It is also conducted by the Company in Madura, where the Company distributed knowledge to farmers in order to optimize land owned by focusing on the environmental interests. Through harmonization between business interests and environmental sustainability, the Company expects to be able to cultivate the image of the corporation in accordance with the industry undertaken by the Company.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja

Corporate Social Responsibility Relatied to Manpower, Health, Work Safety

Aspek ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan faktor penting dalam proses pengelolaan operasi dan bisnis Perseroan. Industri pengolahan dengan menggunakan mesin dan teknologi membuka kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja pada proses produksi, baik pada tahapan gula maupun tembakau.

Dengan menempatkan karyawan sebagai pemangku kepentingan, Perseroan mendorong pelaksanaan program CSR melalui sejumlah program yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada setiap karyawan. Mulai dari pemenuhan hak-hak karyawan seperti imbalan kerja, program kesehatan melalui asuransi, program pascakerja dengan dana pensiun, hingga pembentukan suasana kerja yang kondusif yang diwujudkan dengan berbagai kegiatan pendukung di luar operasional dan bisnis Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga mengupayakan keberadaan sarana keselamatan kerja di kantor pusat dan seluruh Pabrik Gula yang dikelola Perseroan. Peremajaan pabrik secara berkala dengan memperhitungan kemampuan Perseroan juga terus dilakukan sebagai bagian dari upaya meminimalisir angka kecelakaan yang dapat terjadi

The aspects of labor, health and safety are important factors in the process of operational management and the Company's business. The processing industry using machines and technology opens up possibilities of accidents in the production process, both on the stage of sugar or tobacco.

By placing employees as stakeholders, the Company encourages the implementation of CSR programs through a number of programs that can provide a sense of security and comfort to every employee. Starting from the fulfillment of the employees' rights, such as work benefits, health programs through insurance, with a post-employment program with pension funds, until the establishment of a conducive working atmosphere that is embodied in various supporting activities outside the Company's operations and business.

In addition, the Company is also seeking the presence of safety facilities at the central office and the all the Sugar Factories managed by the Company. The rejuvenation of factories regularly by taking into account the ability of the Company is also carried out continuously as part of efforts to minimize the number of accidents that can occur.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Corporate Social Responsibility Related to Social and Community Development

Sebagai eks-BUMN dengan Negara Republik Indonesia sebagai entitas induk akhir, Perseroan memiliki kewajiban untuk melaksanakan program Pemerintah dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang telah disahkan melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sebagaimana terakhir diubah dengan PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Program ini memiliki 2 (dua) aspek besar yang patut menjadi sorotan, yaitu Program Kemitraan dengan bentuk pinjaman modal kepada mitra binaan; dan Program Bina Lingkungan yang berbentuk bantuan langsung kepada masyarakat. Sumber dana program ini disisihkan 4% dari laba setelah pajak BUMN.

Dengan kemitraan usaha yang telah terjalin selama bertahun-tahun, pelaksanaan PKBL Perseroan menyasar kepada petani-petani mitra binaan Perseroan, dengan tujuan membantu permodalan yang dibutuhkan, sekaligus memberikan bantuan langsung dalam bentuk pembinaan kemitraan, pendidikan, pembangunan sarana ibadah dan fasilitas umum, serta beberapa bentuk lainnya. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Perseroan untuk dapat tumbuh bersama petani sebagai bagian dari platform BUMN yang berperan menjadi Agen Pembangunan.

Besaran penyaluran PKBL dapat dilihat pada bagan dan tabel di bawah ini

As an ex state-owned enterprises with the Republic of Indonesia as the end of the parent entity, the Company has an obligation to implement the government programs in an effort to improve the level of social welfare. One of them is through the Partnership Program and Community Development (CSR) which has been ratified by the Minister of State Regulation PER- 09 / MBU / 07/2015 concerning the Partnership Program with the State-Owned Enterprises and the Small Business Development Program Environment, as amended by PER-03 / MBU / 12/2016 on Amendments to Regulation of SOE No. PER-09 / MBU / 07/2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program of State-owned Enterprises.

The program has two (2) major aspects that should be highlighted, namely the Partnership Program with the form of capital loans to the partners; and Community Development Program in the form of direct assistance to the community. The source of funding of this program is set aside 4% from the after-tax profit of the State-owned Enterprises.

With a business partnership that has existed for many years, the Company targets the implementation of CSR to the farmers trained partners of the Company, with the aim of helping the capital required, as well as providing direct assistance in the form of partnership development, education, the construction of places of worship and public facilities, as well as some other forms. It is also in line with the Company's commitment to grow together with farmers as part of the platform state that plays a Development Agent.

The size of CSR distribution can be seen in the chart and table below

Jumlah Penyaluran PKBL Tahun 2015 dan 2016
Total PKBL Distribution in 2015 and 2016

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility Related to Social and Community Development

Jumlah Penyaluran Program Bina Lingkungan Tahun 2015 dan 2016

Total Distribution of the Community Development Program Fund in 2015 and 2016

Uraian	2016 (Rp-ribu)	2015 (Rp-ribu)
Bantuan sosial kemasyarakatan *Community Social assistance*	389.500	181.000
Pembinaan kemitraan *fostering partnerships*	189.893	152.200
Sarana ibadah *Place of worship*	105.000	55.500
Pendidikan *Education*	99.250	179.250
Kesehatan *Health*	30.500	32.000
Pengembangan sarana dan prasarana umum *Public facilities and infrastructure development*	12.500	30.000
Pelestarian alam *Nature Conservasion*	1.000	81.500
Korban bencana alam *victims of natural disasters*	-	5.000
Jumlah *Total*	827.643	716.450

Selain penyaluran dari PKBL yang dikelola sendiri, Perseroan melakukan sinergi antar BUMN untuk dapat menyalurkan PKBL BUMN lainnya kepada petani mitra binaan Perseroan. Hal ini memungkinkan, mengingat Perseroan memiliki target dan sasaran PKBL yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti yang dilakukan PT Pertamina (Persero) di tahun 2016, yang menyalurkan dana kemitraannya kepada petani-petani yang menjadi mitra binaan Perseroan.

In addition to the self-managed distribution of the PKBL, the Company made a synergy among SOEs to be able to distribute the PKBL of other SOEs to the development-pertnership farmers of the Company. This is possible considering that the Company has PKBL targets and objectives that are valid and reliable. As performed by PT Pertamina (Persero) in 2016, which distributed partnerships funds to the local farmers being the partners of the company.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Tanggung Jawab kepada Konsumen

Corporate Social Responsibility Related To Responsibility To The Consumers

Sebagai perusahaan manufaktur yang mengolah dan memproduksi hasil bumi, Perseroan memberikan perhatian yang besar terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Proses pengolahan dengan standarisasi yang telah ditetapkan juga menjadi fokus dan perhatian Perseroan untuk dapat memenuhi standar produk yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan CSR Perseroan di bidang tanggung jawab terhadap konsumen, rencana yang telah ditetapkan Perseroan adalah mempertahankan/memperbaharui beberapa sertifikasi dan standarisasi, meliputi:

1. Wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) gula di seluruh Pabrik Gula Perseroan.
2. Sertifikasi halal untuk produk gula.
3. ISO 9001 : 2008 tentang Sistem Manajemen Mutu
4. Nomor Registrasi Produk (NRP)

Wajib SNI dan sertifikasi halal untuk produk gula serta sertifikasi ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu telah diterapkan di seluruh Pabrik Gula yang dioperasikan oleh Perseroan. Melalui penerapan wajib SNI, sertifikasi halal dan ISO 9001, Perseroan mendorong keluaran produk Perseroan memiliki kualitas yang tinggi dan memenuhi standar keamanan pangan. Untuk mendapatkan NRP, di tahun 2016 Perseroan telah mendaftarkan produk di Departemen Perdagangan Direktorat Uji Mutu Kementerian Perdagangan.

As a manufacturing company that processes and produces crops, the Company gives attention greatly to the quality of the product. The processing with the standardization that has been set also became the focus and attention of the Company to be able to meet the standards of the products in accordance with the applicable regulations.

In the implementation of CSR in the Company's areas of responsibility to consumers, the plan that was defined by the Company is maintaining / updating multiple certification and standardization, includes:

1. Mandatory of Indonesian National Standard (SNI) for Sugar in all Company's Sugar Factory.
2. Halal certification for sugar products.
3. ISO 9001: 2008 on Quality Management Systems
4. Product Registration Number (NRP)

Mandatory SNI and halal certification for sugar products and the certification of ISO 9001 Quality Management System has been applied across the sugar factories operated by the Company. Through the application of SNI, the halal certification and ISO 9001, the Company encourages output of the Company's products to be high quality and meet the standards of food safety. To get the NRP, in 2016 the Company registered a product in the Department of Trade, Directorate of the Ministry of Trade Quality Test.

Agar produk Perseroan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan khususnya pelanggan, Perseroan menggunakan berbagai macam bentuk media yang dikelola secara internal. Beberapa media penyampaian tersebut seperti situs web yang mudah di akses, telepon *hunting* serta email. Selain itu, untuk menginformasikan bahwa produk gula aman untuk dikonsumsi, Perseroan mencantumkan SNI, logo halal, NRP dan juga ISO 9001 di kemasan gula 50 kg.

Dalam hal menangani pengaduan dari pelanggan, Perseroan memiliki *direct line* telepon yang langsung dikelola oleh Divisi Pemasaran. Perseroan membuka pengaduan dan penanggulangan terhadap seluruh keluhan pelanggan, baik itu pelanggan langsung (distributor besar) maupun konsumen akhir. Kepada pelanggan tetap atau rekanan, Perseroan memberikan *Person in Charge (PIC)* langsung yang menangani keluhan pelanggan di masing-masing Pabrik Gula.

In order that the Company's products be understood by the stakeholders, especially customers, the Company uses various forms of media which are managed internally. Some of the delivery medium such as a website that is easy to access, hunting phone and email. In addition, to inform that the sugar product is safe for consumption, the Company include the SNI, the halal logo, NRP and also ISO 9001 at 50 kg sugar packaging.

In terms of dealing with complaints from customers, the Company has a direct telephone line directly managed by the Marketing Division. The Company opens a complaint and response to all customers' complaints, either direct customers (large distributors) or end-consumer. To the regular customers or partners, the Company places a Person-in-Charge (PIC) directly to handle customers' complaints in their respective sugar factory.

Lampiran

Attachment

PT Perkebunan Nusantara X
dan Entitas Anaknya/*and its Subsidiaries*

Laporan keuangan konsolidasian tanggal
31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Consolidated financial statements as of
December 31, 2016 and for the year then ended
with independent auditors' report

Purwantono, Sungkoro & Surja

EY
Building a better
working world

PT Perkebunan Nusantara X
dan Entitas Anaknya/*and its Subsidiaries*

Laporan keuangan konsolidasian tanggal
31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Consolidated financial statements as of
December 31, 2016 and for the year then ended
with independent auditors' report

PT Perkebunan Nusantara X
Jalan Jembatan Merah No. 3-11 Surabaya 60175
Telepon : (031) 3523143 (Hunting) Fax : (031)-3523167
Homepage : http//www.ptpn10.co.id
E-mail : contact@ptpn10.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL, 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

DIRECTORS'S STATEMENT REGARDING RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016 AND 2015

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAK / *AND SUBSIDIARIES*

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama — Ir. Dwi Satriyo Annurogo, MT — *Name* 1.
   Alamat Kantor — Jl. Jembatan Merah No. 3 – 11, Surabaya 60175 — *Office address*
   Alamat Rumah — Jl. Keningar No. 1 Karang Turi – Gresik — *Home address*
   Nomor Telepon — 031-3522848 — *Telephone Number*
   Jabatan — Direktur Utama / *President Director* — *Position*

2. Nama — Muhammad Hanugroho, S.AB — *Name* 2.
   Alamat Kantor — Jl. Jembatan Merah No. 3 – 11, Surabaya 60175 — *Office address*
   Alamat Rumah — Jl. Abimanyu Raya No. 19 RT.002/RW.015 Bantarjati Kota Bogor Utara, Bogor, Jawa Barat — *Home address*
   Nomor Telepon — 031-3522847 — *Telephone Number*
   Jabatan — Direktur Komersil / *Commercial Director* — *Position*

Menyatakan bahwa :	*Declare that :*	
1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perkebunan Nusantara X dan Entitas anak ;	*We are responsible for the preparation and presentation of PT Perkebunan Nusantara X and Subsidiaries's consolidated financial statements;*	1.
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.	*The Company and Subsidiaries's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards;*	2.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;	*All information has been fully and correctly disclosed in the company's consolidated financial statements;*	a. 3.
b. Laporan Keuangan Konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;	*The Company's consolidated financial statements do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts*	b.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perseroan dan Entitas anak.	*We are responsible for PT Perkebunan Nusantara and Subdiaries's internal control systems.*	4.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya	*This is our declaration, which has been made truthfully*	

Surabaya, 28 Februari / *February 2017*
Atas Nama dan Mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*

Direktur Utama / *President Director*	Direktur Komersil / *Commercial Director*
Ir. DWI SATRIYO ANNUROGO, MT	**MUHAMMAD HANUGROHO, S.AB**
Direktur Utama / *President Director*	Direktur Komersil / *Commercial Director*

EY
Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-3406/PSS/2017

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Perkebunan Nusantara X

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Perkebunan Nusantara X ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Kelompok Usaha") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Laporan No. RPC-3406/PSS/2017

The Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors
PT Perkebunan Nusantara X

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Perkebunan Nusantara X (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2016, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-3406/PSS/2017 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Perkebunan Nusantara X dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2016, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan.

Independent Auditors' Report (continued)

Laporan No. RPC-3406/PSS/2017 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Perkebunan Nusantara X and its subsidiaries as of December 31, 2016, and their consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matter

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2016 and for the year then ended was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole.

EY
Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-3406/PSS/2017 (lanjutan)

Hal lain (lanjutan)

Informasi keuangan PT Perkebunan Nusantara X (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi obyek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir secara keseluruhan.

Independent Auditors' Report (continued)

Laporan No. RPC-3406/PSS/2017 (continued)

Other matter (continued)

The accompanying financial information of PT Perkebunan Nusantara X (parent entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2016, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

In our opinion, the Parent Entity Financial Information as of December 31, 2016, and for the year ended is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements as of December 31, 2016 and for the year then ended taken as a whole.

Purwantono, Sungkoro & Surja

Muhammad Kurniawan
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0240/*Public Accountant Registration No. AP.0240*

28 Februari 2017/*February 28, 2017*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2016
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2016
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Daftar Isi / ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditors' Report*
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian ……..	1 - 3	…... *Consolidated Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4 - 5	*Consolidated Statement of Profit or Loss and* ……..*Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6	…. *Consolidated Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian.....	7 - 8	…….. *Consolidated Statement of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian....	9 - 133	.. *Notes to the Consolidated Financial Statements*
Laporan Keuangan Tersendiri ……...	i - x	…….*The Separate Financial Statements*

****

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2016	Disajikan kembali (Catatan 43)/ *As restated (Note 43)* 31 Desember/ *December 31,* 2015	1 Januari 2015/ 31 Desember 2014/ *January 1, 2015/ December 31, 2014*	
ASET					***ASSETS***
ASET LANCAR					***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	2h,2i, 2m,4,9	235.427.132.592	395.885.957.341	399.117.275.829	*Cash and cash equivalents*
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	2h,2m,5,9	967.565.780.768	975.000.000.000	-	*Restricted cash and cash Equivalents*
Investasi jangka pendek	2m	5.000.000.000	-	-	*Short-term investment*
Piutang usaha, neto	2k,2m,6				*Trade receivables, net*
Pihak berelasi	2h,9	45.056.610.177	35.039.236.059	24.172.392.506	*Related parties*
Pihak ketiga, neto		105.426.845.817	148.350.881.189	355.023.087.793	*Third parties, net*
Piutang lain-lain, neto	2k,2m,7				*Other receivables, net*
Piutang petani tebu rakyat, neto		176.862.782.224	178.490.052.924	377.618.967.118	*Sugarcane farmers receivables, net*
Pihak berelasi	2h,9	9.542.861.985	6.731.200.378	6.406.540.253	*Related parties*
Pihak ketiga, neto		34.576.004.177	47.007.858.692	52.678.191.063	*Third parties, net*
Persediaan, neto	2l,10	905.980.683.474	595.597.261.033	606.739.697.186	*Inventories, net*
Pajak dibayar di muka	2v,18a	41.477.856.407	30.953.493.650	363.075.601	*Prepaid taxes*
Biaya dibayar di muka	2n,8	6.095.077.102	1.122.175.846	1.176.295.043	*Prepaid expenses*
Uang muka		1.184.855.352	1.650.750.271	682.656.882	*Advance payments*
Aset lancar lainnya		23.570.636.544	20.990.756.484	19.115.694.519	*Other current assets*
JUMLAH ASET LANCAR		**2.557.767.126.619**	**2.436.819.623.867**	**1.843.093.873.793**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR					***NON CURRENT ASSETS***
Piutang pihak berelasi jangka panjang	2h,2m, 9,11	1.216.017.167.331	889.417.682.345	898.697.656.593	*Long-term receivables from related parties*
Investasi saham	2f,9,12	13.190.600.380	15.209.971.476	15.209.971.476	*Investment in shares*
Aset pajak tangguhan, neto	2v,18e	279.468.528.493	203.670.893.990	193.781.845.078	*Deferred tax assets, net*
Aset tanaman menghasilkan	2o,13				*Mature plantation assets*
Tanaman semusim		31.165.987.537	26.498.072.837	18.064.399.192	*Annual crops*
Tanaman produktif		19.820.575	30.067.521	63.799.089	*Bearer plants*
Aset tetap, neto	2p,14	8.824.200.775.267	8.679.922.966.926	1.516.338.474.705	*Fixed assets, net*
Aset pengampunan pajak, neto	2p,14	2.650.230.711	-	-	*Tax amnesty assets, net*
Aset takberwujud, neto	2r,15	56.482.605.323	50.334.586.327	42.081.403.137	*Intangible assets, net*
Estimasi tagihan pajak	2v,18f	49.659.745.449	15.795.821.437	18.197.205.476	*Estimated claims for tax Refund*
Uang muka pembelian aset tetap		22.835.938.272	5.180.869.824	-	*Advance payments on purchase of fixed assets*
Aset tidak lancar lainnya	2q,2t	7.663.182.304	836.068.906	494.801.809	*Other non-current assets*
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		**10.503.354.581.642**	**9.886.897.001.589**	**2.702.929.556.555**	***TOTAL NON CURRENT ASSETS***
JUMLAH ASET		**13.061.121.708.261**	**12.323.716.625.456**	**4.546.023.430.348**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT
OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2016	Disajikan kembali (Catatan 43)/ *As restated (Note 43)* 31 Desember/ *December 31,* 2015	1 Januari 2015/ 31 Desember 2014/ *January 1, 2015/ December 31, 2014*	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK					***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	2m,16				*Trade payables*
Pihak berelasi	2h,9	311.162.730.750	-	-	*Related parties*
Pihak ketiga		155.513.366.190	62.470.235.567	65.811.152.953	*Third parties*
Beban akrual dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek	2m,17	50.287.042.376	96.692.127.588	25.067.352.794	*Accrued expenses and short-term employee benefits liabilities*
Utang pajak	2v,18b	26.280.902.682	135.407.324.053	92.398.892.238	*Taxes payable*
Utang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (“KKPE”)	2h,2m, 9,19	242.547.956.959	205.831.736.897	478.516.864.969	*Food security and energy credit (“KKPE”) payables*
Pinjaman jangka pendek	2h,2m, 9,20	220.418.586.533	139.152.180.431	205.503.320.000	*Short-term loans*
Utang lain-lain	2m,21				*Other payables*
Pihak berelasi	2h,9	23.093.721.898	34.237.849.076	39.126.226.426	*Related parties*
Pihak ketiga		129.891.115.374	86.641.750.068	121.454.623.423	*Third parties*
Uang muka pelanggan		20.129.771.509	9.458.682.421	1.251.791.574	*Advance from customers*
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2h,2m,9				*Current portion of long-term loans*
Pinjaman bank dan lainnya	22	137.444.633.957	204.062.606.237	201.088.323.464	*Bank and other loans*
Pinjaman pembiayaan konsumen		2.490.474.168	1.087.979.332	283.950.000	*Consumer financing loans*
Liabilitas pengampunan pajak	14	1.343.600.000	-	-	*Tax amnesty liability*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		**1.320.603.902.396**	**975.042.471.670**	**1.230.502.497.841**	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG					***NON CURRENT LIABILITIES***
Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2h,2m,9				*Long-term loans, net of current portion*
Pinjaman bank dan lainnya	22	1.247.910.613.028	661.461.183.232	884.519.373.236	*Bank and other loans*
Pinjaman pembiayaan konsumen		9.055.842.360	3.599.216.464	-	*Consumer financing loans*
Liabilitas pengampunan pajak	14	762.831.862	-	-	*Tax amnesty liability*
Utang obligasi	2m,23	700.000.000.000	700.000.000.000	700.000.000.000	*Bonds payable*
Liabilitas imbalan kerja	2w,24	739.529.788.604	716.358.998.388	652.378.220.555	*Employee benefits liability*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		**2.697.259.075.854**	**2.081.419.398.084**	**2.236.897.593.791**	***TOTAL NON CURRENT LIABILITIES***
JUMLAH LIABILITIAS		**4.017.862.978.250**	**3.056.461.869.754**	**3.467.400.091.632**	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT
OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

			Disajikan kembali (Catatan 43)/ *As restated (Note 43)*		
	Catatan/ *Notes*	**31 Desember/ *December 31,* 2016**	**31 Desember/ *December 31,* 2015**	**1 Januari 2015/ 31 Desember 2014/ *January 1, 2015/ December 31, 2014***	
EKUITAS					***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk					***Equity attributable to the owners of the Parent Entity***
Modal saham					*Share capital*
Nilai nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per saham					*Par value Rp1,000,000 (full amount) per share*
Modal dasar - 7.300.000 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A dan 7.299.999 saham Seri B pada tahun 2016; 3.400.000 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A dan 3.399.999 saham Seri B pada tahun 2015					*Authorized capital - 7,300,000 shares which consist of 1 Series A share and 7,299,999 Series B shares in 2016; 3,400,000 shares which consist of 1 Series A share and 3,399,999 Series B shares in 2015*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.845.596 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A dan 1.845.595 saham Seri B pada tahun 2016; 870.596 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A dan 870.595 saham Seri B pada tahun 2015	25	1.845.596.000.000	870.596.000.000	870.596.000.000	*Issued and fully paid - 1,845,596 shares which consist of 1 Series A share and 1,845,595 Series B shares in 2016; 870,596 shares which consist of 1 Series A share and 870,595 Series B shares in 2015*
Modal sumbangan	26	10.061.504.138	10.061.504.138	10.061.504.138	*Donated capital*
Komponen ekuitas lainnya	27	10.625.986.788	985.137.116.356	10.137.116.356	*Other component of equity*
Penghasilan komprehensif lain	2p,2w,14	6.792.289.390.771	6.799.992.877.349	(288.090.221.796)	*Other comprehensive income*
Saldo laba (akumulasi rugi)	2x				*Retained earnings (accumulation losses)*
Ditentukan penggunaannya	25	613.102.848.116	547.623.627.605	529.122.521.845	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya		(267.702.743.737)	18.387.240.193	(77.539.506.248)	*Unappropriated*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		**9.003.972.986.076**	**9.231.798.365.641**	**1.054.287.414.295**	***Equity attributable to owners of the Parent Entity***
Kepentingan nonpengendali	2e,28a	39.285.743.935	35.456.390.061	24.335.924.421	*Non-controlling interests*
JUMLAH EKUITAS		**9.043.258.730.011**	**9.267.254.755.702**	**1.078.623.338.716**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**13.061.121.708.261**	**12.323.716.625.456**	**4.546.023.430.348**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Year ended
December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2016	**Catatan/ *Notes***	**2015**	
PENDAPATAN	2.260.373.519.789	2y,29	2.531.557.640.770	***REVENUE***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(2.009.574.938.291)	2y,30	(1.913.222.044.130)	***COST OF SALES***
LABA KOTOR	**250.798.581.498**		**618.335.596.640**	***GROSS PROFIT***
Beban penjualan	(19.548.917.789)	2y,31	(20.003.442.819)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	(306.666.606.157)	2y,31	(273.856.440.021)	*General and administrative expenses*
Beban operasi lain	(137.705.389.636)	2y,33	(85.052.057.284)	*Other operating expenses*
Pendapatan operasi lain	50.202.581.530	2y,33	62.865.961.832	*Other operating income*
LABA (RUGI) USAHA	**(162.919.750.554)**		**302.289.618.348**	***OPERATING PROFIT (LOSS)***
Pendapatan keuangan	72.013.863.872	2y,32	4.052.048.081	*Finance income*
Pajak final	(14.384.364.235)	2v	(711.365.945)	*Final tax*
Beban keuangan	(111.545.739.910)	2m,2y,32	(107.267.297.312)	*Finance expenses*
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK	**(216.835.990.827)**		**198.363.003.172**	***PROFIT (LOSS) BEFORE TAX BENEFIT (EXPENSE)***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	61.052.996.256	2v,18c	(71.935.106.505)	***TAX BENEFIT (EXPENSE)***
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	**(155.782.994.571)**		**126.427.896.667**	***PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Item yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi tahun berikutnya:				***Items that will not be reclassified to profit or loss in subsequent years:***
Kerugian pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	22.529.699.148	2w	(50.479.392.041)	*Re-measurement losses on employee benefits liability*
Pajak tangguhan terkait	(5.632.424.786)	2w,2v,18e	12.619.848.010	*Deferred tax effect*
Surplus revaluasi aset tetap	-	2p,14	7.132.317.869.932	*Revaluation surplus of fixed assets*
Pendapatan komprehensif lain, neto	**16.897.274.362**		**7.094.458.325.901**	***Other comprehensive income, net***
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**(138.885.720.209)**		**7.220.886.222.568**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
Year ended
December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2016	**Catatan/ *Notes***	**2015**	
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				***Profit (loss) for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk	(161.352.670.426)		119.053.128.201	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	5.569.675.855		7.374.768.466	*Non-controlling interests*
Jumlah	**(155.782.994.571)**		**126.427.896.667**	***Total***
Total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				***Total comprehensive income (loss) for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk	(144.133.737.315)		7.207.136.227.346	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	5.248.017.106	28b	13.749.995.222	*Non-controlling interests*
Jumlah	**(138.885.720.209)**		**7.220.886.222.568**	***Total***
Laba (rugi) per saham	**(98.238)**	2aa,35	**136.749**	***Income (loss) per share***

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
Year ended
December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Attributable to the owners of the parent entity*									
	Catatan/ *Notes*	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Authorized issued and fully paid*	Saldo laba (defisit)/ *Retained earnings (deficit)* Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*	Modal sumbangan/ *Donated capital*	Komponen ekuitas lainnya/ *Other component of equity*	Jumlah/ *Total*	Kepentingan Non pengendali/ *Non-controlling Interests*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo 31 Desember 2014 (disajikan kembali)		**870.596.000.000**	**529.122.521.845**	**(77.539.506.248)**	**(288.090.221.796)**	**10.061.504.138**	**10.137.116.356**	**1.054.287.414.295**	**24.335.924.421**	**1.078.623.338.716**	***Balance as of December 31, 2014 (as restated)***
Laba tahun berjalan		-	-	119.053.128.201	-	-	-	119.053.128.201	7.374.768.466	126.427.896.667	*Profit for the year*
Pembayaran dividen tunai	34	-	-	(4.625.276.000)	-	-	-	(4.625.276.000)	-	(4.625.276.000)	*Cash dividend payment*
Cadangan umum	25	-	18.501.105.760	(18.501.105.760)	-	-	-	-	-	-	*General reserve*
Surplus revaluasi aset tetap	14	-	-	-	7.126.062.047.189	-	-	7.126.062.047.189	6.255.822.743	7.132.317.869.932	*Revaluation surplus of fixed assets*
Kerugian pengukuran kembali liabilitas imbalan imbalan kerja		-	-	-	(37.978.948.044)	-	-	(37.978.948.044)	119.404.013	(37.859.544.031)	*Re-measurement losses on employee benefits liability*
Pembagian dividen tunai oleh Entitas Anak untuk kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-	-	-	(2.629.529.582)	(2.629.529.582)	*Cash dividend paid by Subsidiaries to non-controlling interests*
Penyertaan modal negara	27	-	-	-	-	-	975.000.000.000	975.000.000.000	-	975.000.000.000	*State capital investment*
Saldo 31 Desember 2015		**870.596.000.000**	**547.623.627.605**	**18.387.240.193**	**6.799.992.877.349**	**10.061.504.138**	**985.137.116.356**	**9.231.798.365.641**	**35.456.390.061**	**9.267.254.755.702**	***Balance as of December 31, 2015***
Laba (rugi) tahun berjalan		-	-	(161.352.670.426)	-	-	-	(161.352.670.426)	5.569.675.855	(155.782.994.571)	*Profit (loss) for the year*
Penambahan modal saham	25	975.000.000.000	-	-	-	-	(975.000.000.000)	-	-	-	*Additional of share capital*
Pembayaran dividen tunai	34	-	-	(53.573.907.690)	-	-	-	(53.573.907.690)	-	(53.573.907.690)	*Cash dividend payment*
Cadangan umum	25	-	65.479.220.511	(65.479.220.511)	-	-	-	-	-	-	*General reserve*
Pajak atas revaluasi aset tetap	18a	-	-	-	(30.119.116.863)	-	-	(30.119.116.863)	-	(30.119.116.863)	*Tax on revaluation of fixed assets*
Reklasifikasi		-	-	(5.196.697.174)	5.196.697.174	-	-	-	-	-	*Reclassification*
Kerugian pengukuran kembali liabilitas imbalan imbalan kerja		-	-	-	17.218.933.111	-	-	17.218.933.111	(321.658.749)	16.897.274.362	*Re-measurement losses on employee benefits liability*
Tantiem		-	-	(487.488.129)	-	-	-	(487.488.129)	(262.511.871)	(750.000.000)	*Tantiem*
Pembagian dividen tunai oleh Entitas Anak untuk kepentingan nonpengendali		-	-	-	-	-	-	-	(1.419.407.600)	(1.419.407.600)	*Cash dividend paid by Subsidiaries to non-controlling interests*
Tambahan modal disetor dari pengajuan pengampunan pajak	27	-	-	-	-	-	488.870.432	488.870.432	263.256.239	752.126.671	*Additional paid in capital from tax amnesty filling*
Saldo 31 Desember 2016		**1.845.596.000.000**	**613.102.848.116**	**(267.702.743.737)**	**6.792.289.390.771**	**10.061.504.138**	**10.625.986.788**	**9.003.972.986.076**	**39.285.743.935**	**9.043.258.730.011**	***Balance as of December 31, 2016***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
Year ended
December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2016	Catatan/ *Notes*	2015	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan	2.653.025.388.357		3.191.394.905.313	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kepada pemasok	(2.377.818.507.389)		(2.892.191.458.936)	*Cash paid to suppliers*
Pembayaran ke Direksi dan karyawan	(800.391.174.807)		(838.734.210.178)	*Cash paid to Directors and employees*
Kas yang digunakan untuk operasi	(525.184.293.839)		(539.530.763.801)	*Cash used in operations*
Pembayaran pajak	(248.977.733.374)		(327.977.797.809)	*Tax payment*
Pembayaran bunga atas pinjaman	(204.432.629.236)		(153.079.527.169)	*Interest payments on loans*
Penerimaan dari piutang Bone, Camming dan Takalar	163.469.225.735		451.004.040.420	*Proceeds from receivables of Bone, Camming and Takalar*
Pembayaran atas operasional Bone, Camming dan Takalar	(388.920.733.014)		(360.563.097.723)	*Payment for the operational of Bone, Camming and Takalar*
Penyaluran ke petani tebu rakyat	(319.014.369.508)		(455.872.767.166)	*Distribution to sugarcane farmers*
Pengembalian dari petani tebu rakyat	318.513.551.066		673.132.540.373	*Repayments from sugarcane farmers*
Lain-lain	847.836.478.840		1.512.548.310.012	*Others*
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	**(356.710.503.330)**		**799.660.937.137**	***Net cash flows provided by (used in) operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pembelian aset tetap	(377.752.527.485)		(265.066.091.924)	*Purchase of fixed assets*
Penempatan investasi jangka pendek	(5.000.000.000)		-	*Placement in short-term investment*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**(382.752.527.485)**		**(265.066.091.924)**	***Net cash flows used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan Penyertaan Modal Negara (PMN)	-	28	975.000.000.000	*Cash receipts from State Capital Invesment (PMN)*
Penerimaan pinjaman bank	1.591.542.107.126		766.926.068.175	*Proceeds from bank loans*
Penerimaan pinjaman KKPE	573.893.468.892		441.469.584.393	*Proceeds from KKPE payables*
Pembayaran dividen	(53.573.907.690)	36	(4.625.276.000)	*Cash dividend payment*
Pembayaran dividen dari Entitas Anak kepada kepentingan nonpengendali	(1.400.000.000)		(2.629.529.582)	*Cash dividend payment from Subsidiaries to non-controlling interests*
Pembayaran angsuran atas pinjaman bank dan lainnya	(990.215.373.621)		(1.030.316.524.237)	*Installment payments on bank loans and others*
Pembayaran angsuran pinjaman KKPE	(548.676.307.873)		(708.650.486.450)	*Installment payments on KKPE payables*
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	**571.569.986.834**		**437.173.836.299**	***Net cash flows provided by (used in) financing activities***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
(continued)
Year ended
December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2016	Catatan/ *Notes*	2015	
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS DAN KAS DAN SETARA KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA	**(167.893.043.981)**		**971.768.681.512**	***NET (DECREASE) INCREASE CASH AND CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Terdiri dari:				*Consist of:*
Penurunan neto kas dan setara kas	(160.458.824.749)		(3.231.318.488)	*Net decrease increase in cash and cash equivalents*
(Penurunan) kenaikan neto kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	(7.434.219.232)		975.000.000.000	*Net (decrease) increase in restricted cash and cash equivalents*
KAS DAN SETARA KAS DAN KAS DAN SETARA KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA AWAL TAHUN	**1.370.885.957.341**		**399.117.275.829**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
Terdiri dari:				*Consist of:*
Kas dan setara kas awal tahun	395.885.957.341		399.117.275.829	*Cash and cash equivalents at beginning of year*
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya awal tahun	975.000.000.000		-	*Restricted cash and cash equivalents at beginning of year*
KAS DAN SETARA KAS DAN KAS DAN SETARA KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA AKHIR TAHUN	**1.202.992.913.360**		**1.370.885.957.341**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***
Terdiri dari:				*Consist of:*
Kas dan setara kas akhir tahun	235.427.132.592		395.885.957.341	*Cash and cash equivalents at end of year*
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya akhir tahun	967.565.780.768		975.000.000.000	*Restricted cash and cash equivalents at end of year*
Aktivitas non-kas:				***Non-cash activities:***
Penambahan aset tetap yang diperoleh dari uang muka, utang dan pinjaman	65.809.071.649		23.254.086.310	*Additions to property, plant and equipment through incurrence of advances, payables and loans*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum Perusahaan

PT Perkebunan Nusantara X ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 11 Maret 1996 berdasarkan Akta No. 43 yang dibuat oleh Harun Kamil, S.H., notaris di Jakarta, dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-8338.HT.01.01.TH96 tanggal 8 Agustus 1996, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 020/BH.13.01/Sept/1996 tanggal 18 September 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1996 Tambahan No. 8681.

Akta Pendirian Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 11 tanggal 14 Maret 2016 oleh Nanda Faux Iwan, S.H., notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar, penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh (Catatan 25) dan perubahan beberapa ayat dalam Anggaran Dasar. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0006223.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 1 April 2016.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan antara lain melakukan budidaya tanaman, produksi hasil tanaman, perdagangan dan pemasaran, pengembangan usaha bidang perkebunan serta usaha lain yang menunjang usaha pokok Perusahaan.

Perusahaan berkedudukan di Jalan Jembatan Merah No. 3 - 11, Surabaya, Jawa Timur.

b. Penawaran umum

Melalui surat No. XX-PESWA/13/026 tanggal 19 April 2013, Perusahaan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dalam rangka Emisi Obligasi Perusahaan tahun 2013 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,9% dan nominal sebesar Rp700.000.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun melalui Bursa Efek Indonesia. Pernyataan pendaftaran tersebut dinyatakan efektif berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-198/D.04.2013 tertanggal 27 Juni 2013.

1. GENERAL

a. The Company's establishment and general information

PT Perkebunan Nusantara X (the "Company") was established on March 11, 1996 through Deed No. 43 of Harun Kamil, S.H., notary in Jakarta, and was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia by its Decision Letter No. C2-8338.HT.01.01.TH96 dated August 8, 1996, and registered on the Company List No. 020/BH.13.01/Sept/1996 dated September 18, 1996, as announced on State Gazette of the Republic of Indonesia No. 81 dated October 8, 1996, Supplement No. 8681.

The Company's Articles of Association has been amended several times, most recently by Deed No. 11 dated March 14, 2016 of Nanda Faux Iwan, S.H., notary in Jakarta, related to increase in authorized capital, issued and fully paid capital (Note 25) and change in several Articles of Association. The amendment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-0006223.AH.01.02.Year 2016 dated April 1, 2016.

Based on Article 3 of the Articles of Association, the scope of activities of the Company comprises of the cultivation of crops, crops production, trading and marketing, plantations business development and other business that support the Company's main operations.

The Company is domiciled in Jembatan Merah Street No. 3 - 11, Surabaya, East Java.

b. Public offering

Based on letter No. XX-PESWA/13/026 dated April 19, 2013, the Company submitted the Registration Statement to the Financial Services Authority ("OJK") relating to the Issuance Corporate Bonds in 2013 with a fixed interest rate of 8.9% and nominal value of Rp700,000,000,000 with 5 year period through the Indonesia Stock Exchange. The registration statement became effective based on letter No. S-198/D.04.2013 dated June 27, 2013 of Financial Services Authority.

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Perusahaan dan Entitas Anak

Entitas anak yang dimiliki Perusahaan, secara langsung maupun tidak langsung, adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. The Company and Subsidiaries' structure

Subsidiaries of the Company, directly or indirectly, are as follows:

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Principal activity*	Tahun operasi/ *Start of operation*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination*	
				2016	2015	2016	2015
PT Mitratani Dua Tujuh	Jember	Industri edamame dan okra/ *Industry of edamame and okra*	2004	65,00%	65,00%	135.717.361.186	116.430.093.912
PT Dasaplast Nusantara	Jepara	Industri plastik dan *fiber* *Industry of plastic and fiber*	2004	90,00%	90,00%	159.431.470.133	131.816.426.282
PT Nusantara Medika Utama	Mojokerto	Pelayanan rumah sakit/ *Medical services*	2013	99,56%	99,56%	212.303.697.248	184.550.639.921
PT Energi Agro Nusantara	Mojokerto	Industri bahan bakar *bioethanol/ Industry of bioethanol fuel*	2013	100,00%	100,00%	55.119.901.441	50.624.940.139

Berdasarkan Akta Notaris No. 57 tanggal 13 Juni 2016 dari Elly Herawati Sutedjo, S.H., pemegang saham PT Mitratani Dua Tujuh setuju untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 6.500 saham atau sebesar Rp6,5 miliar berupa dividen saham yang diambil dari laba ditahan.

Perusahaan mempunyai investasi saham di PT Energi Agro Nusantara ("Enero") sebesar Rp65.597.839.235 pada tahun 2016 (2015: Rp58.597.839.235) yang merupakan bagian yang sudah dibayar dari jumlah seluruh saham Perusahaan di Enero sebesar Rp74.438.000.000.

Sesuai dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Saham dari Dewan Komisaris PT Nusantara Medika Utama Nomor DK-NMU-22240/15.001 tertanggal 8 Januari 2015 tentang pengeluaran saham yang masih dalam simpanan sebesar 4.300 lembar saham senilai Rp4.300.000.000, Perusahaan setuju untuk menambah setoran modal sejumlah tersebut. Perusahaan telah melakukan pembayaran untuk penambahan setoran modal pada tanggal 2 Maret 2015.

Based on Notarial Deed No. 57 dated June 13, 2016 by Elly Herawati Sutedjo, S.H., shareholders of PT Mitratani Dua Tujuh agreed to increase issued and fully paid capital amounted to 6,500 shares or Rp6.5 billion in the form of shares dividend derived from retained earnings.

The Company booked an investment in PT Energi Agro Nusantara ("Enero") amounted to Rp65,597,839,235 (2015: Rp58,597,839,235) which represent fully paid shares part of total shares of the Company in Enero of Rp74,438,000,000.

In accordance with the Shares Issuance Approval Letter of the Board of Commissioners of PT Nusantara Utama Medika No. DK-NMU-22240/15.001 dated January 8, 2015 related to the issuance of 4,300 shares amounted to Rp4,300,000,000, the Company agreed to increase the paid-in capital at such amount. The Company has paid the additional paid-in capital on March 2, 2015.

d. Entitas induk dan entitas induk terakhir

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Negara Republik Indonesia masing-masing adalah entitas induk dan entitas induk terakhir dari Perusahaan.

d. The parent entity and ultimate parent entity

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) and the Republic of Indonesia, are the parent entity and the ultimate parent entity of the Company, respectively.

e. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit serta karyawan

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

e. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committees and employees

The composition of the Boards of Commissioners and Directors of the Company as of December 31, 2016 is as follows:

1. UMUM (lanjutan)

e. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit serta karyawan (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

e. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committees and employees (continued)

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Presiden Komisaris	Prof. Dr. Ir. H. Rudi Wibowo, MS	*President Commissioner*
Komisaris	Arvan Rivaldy R. Siregar, B.Comm	*Commissioner*
Komisaris	Yohanes Babtista Priyatmo Hadi, ME	*Commissioner*
Komisaris	Drs. Sukardi Rinakit, MA, Ph.D	*Commissioner*

Direksi		***Board of Directors***
Presiden Direktur	Ir. Subiyono, MMA	*President Director*
Direktur Operasional	Ir. Tarsisius Sutaryanto, MM	*Director of Operations*
Direktur Komersil	Muhammad Hanugroho, SAB	*Director of Commercial*
Direktur SDM dan Umum	Ir. Djoko Santoso	*Director of HR and General Affairs*

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

The composition of the Boards of Commissioners and Directors of the Company as of December 31, 2015 is as follows:

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Presiden Komisaris	Prof. Dr. Ir. H. Rudi Wibowo, MS	*President Commissioner*
Komisaris	Drs. Djoko Moeljono	*Commissioner*
Komisaris	Irjen Pol (Purn) Drs. Indarto, S.H.,	*Commissioner*
Komisaris	Brigjen TNI (Purn) H. Heru Sudibyo	*Commissioner*
Komisaris	Mayjen TNI (Purn) Susanto Darus	*Commissioner*

Direksi		***Board of Directors***
Presiden Direktur	Ir. Subiyono, MMA	*President Director*
Direktur Produksi	Ir. Tarsisius Sutaryanto, MM	*Director of Production*
Direktur Keuangan	Muhammad Hanugroho, SAB	*Director of Finance*
Direktur Pemasaran dan Perencanaan/Pengembangan	Ir. H. Mochammad Sulton, MM	*Director of Marketing and Planning/Development*
Direktur SDM dan Umum	Ir. Djoko Santoso	*Director of HR and General Affairs*

Berdasarkan Akta Notaris tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan No. 3 oleh notaris Sri Eliana Tjahjoharto, S.H., tanggal 8 Agustus 2016, memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Ir. H. Mochammad Sulton, MM sebagai Direktur.

Based on Notarial Deed of Dismissal and Appointment of the Director of the Company by Sri Eliana Tjahtoharto, S.H., notary No. 3 dated August 8, 2016, decided to respectfully discharging Ir. H. Mochammad Sulton, MM as Director.

Berdasarkan Akta Notaris tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan No. 8 oleh notaris Sri Eliana Tjahjoharto, S.H., tanggal 14 April 2016, memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Irjen Pol (Purn) Drs. Indarto, S.H., sebagai anggota Dewan Komisaris dan mengangkat Drs. Sukardi Rinakit, MA, Ph.D sebagai anggota Dewan Komisaris.

Based on Notarial Deed of Dismissal and Appointment of the Board of Commissioner of the Company by Sri Eliana Tjahtoharto, S.H., notary No. 8 dated April 14, 2016, decided to respectfully discharging Irjen Pol (Purn) Drs. Indarto, S.H., as the Board of Commissioner and raised Drs. Sukardi Rinakit, MA, Ph.D as Board of Commissioner.

1. UMUM (lanjutan)

e. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit serta karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan No. 26 oleh notaris Sri Eliana Tjahjoharto, S.H., tanggal 26 September 2016, memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Brigjen TNI (Purn) H. Heru Sudibyo, Mayjen TNI (Purn) Susanto Darus dan Drs. Djoko Moeljono sebagai anggota Dewan Komisaris dan mengangkat Arvan Rivaldy R. Siregar, B.Comm dan Yohanes Babtista Priyatmo Hadi, ME sebagai anggota Dewan Komisaris.

Komposisi Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

e. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committees and employees (continued)

Based on Notarial Deed of Dismissal and Appointment of the Board of Commissioner of the Company by Sri Eliana Tjahtoharto, S.H., notary No. 26 dated September 26, 2016, decided to respectfully discharging Brigjen TNI (Purn) H. Heru Sudibyo, Mayjen TNI (Purn) Susanto Darus and Drs. Djoko Moeljono as Board of Commissioner and appointing Arvan Rivaldy R. Siregar, B.Comm and Yohanes Babtista Priyatmo Hadi, ME as Board of Commissioner.

The composition of the Audit Committees of the Company on December 31, 2016 was as follows:

Komite Audit		***Audit Committees***
Ketua	Arvan Rivaldy R. Siregar, B.Comm	*Chairman*
Anggota	Drs. Wisnu Pudjiatmoko	*Member*
Anggota	Ir. Adi Rahardjo	*Member*

Komposisi Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

The composition of the Audit Committees of the Company on December 31, 2015 was as follows:

Komite Audit		***Audit Committees***
Ketua	Brigjen (Purn) H. Heru Sudibyo	*Chairman*
Anggota	Herry Soelistiyono	*Member*
Anggota	H. Soepraptono, Bsc., ST., MT.	*Member*

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit No. DK-SURKP.16.04 tanggal 16 September 2016, memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Brigjen (Purn) H. Heru Sudibyo dan mengangkat Arvan Rivaldy R. Siregar, B.Comm sebagai ketua Komite Audit.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit No. DK-SURKP.16.03 tanggal 31 Maret 2016, memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Herry Soelistiyono dan H. Soepraptono, Bsc., ST., MT. sebagai anggota Komite Audit dan mengangkat Drs. Wisnu Pudjiatmoko dan Ir. Adi Rahardjo sebagai anggota Komite Audit.

Based on the Decree of the Board of Commissioner of Dismissal and Appointment of the Chairman of Audit Committee No. DK-SURKP16.04 dated September 16, 2016, decided to respectfully discharging Brigjen (Purn) H. Heru Sudibyo and appointing Arvan Rivaldy R. Siregar, B.Comm as chairman of audit committees.

Based on the Decree of the Board of Commissioner of Dismissal and Appointment of the Chairman of Audit Committee No. DK-SURKP16.03 dated March 31, 2016, decided to respectfully discharging Herry Soelistiyono and H. Soepraptono, Bsc., ST., MT. as member of Audit Committee and appointing Drs. Wisnu Pudjiatmoko and Ir. Adi Rahardjo as member of Audit Committees.

1. UMUM (lanjutan)

e. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit serta karyawan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan dan Entitas Anak (selanjutnya disebut "Kelompok Usaha") memiliki masing-masing 11.185 dan 12.172 karyawan (tidak diaudit).

f. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini, yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 28 Februari 2017.

1. GENERAL (continued)

e. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committees and employees (continued)

On December 31, 2016 and 2015, the Company and Subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), have 11,185 and 12,172 employees, respectively (unaudited).

f. Completion of the consolidated financial statements

The Company's management is responsible for the preparation of the accompanying consolidated financial statements, which have been completed and authorized for issue by the Company's Directors on February 28, 2017.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh Kelompok usaha sesuai dengan standar akuntasi keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"). Kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 oleh Kelompok Usaha.

a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK") yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK") dan Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan dan Peraturan-peraturan serta Pedoman, Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali untuk laporan arus kas, dan dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The accounting and financial reporting policies adopted by the Group conform to the Indonesian financial accounting standards, which are based on Indonesian Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK"). The accounting policies were applied consistently in the preparation of the consolidated financial statements as of December 31, 2016 and 2015 by the Group.

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements are prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK") and the Accounting Guidance for State-Owned Enterprises of Plantations Companies and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority ("OJK").

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, and using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies of each account.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha.

b. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

(i) Standar baru dan revisi standar

Efektif tanggal 1 Januari 2016, Kelompok Usaha menerapkan standar baru, amandemen, penyesuaian dan interpretasi PSAK. Penerapan standar baru, amandemen dan interpretasi tidak berdampak secara substansial atas kebijakan akuntansi Kelompok Usaha dan tidak berdampak material terhadap nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

- Amandemen PSAK No. 4: Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri. Amandemen ini memperkenankan penggunaan metode ekuitas sebagai salah satu metode pencatatan investasi pada entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi dalam laporan keuangan tersendiri entitas tersebut.

- Amandemen PSAK No. 15: Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi. Amandemen ini memberikan klarifikasi tentang pengecualian konsolidasi untuk entitas investasi ketika kriteria tertentu terpenuhi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

The consolidated statement of cash flows, has been prepared using direct method, by classifying cash receipts and payments into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the consolidated financial statements is Rupiah, which is the functional currency of the Group.

b. Changes in accounting policies and disclosures

(i) New and amended standards

On January 1, 2016, Group adopted revised standards, amendments, adjustments and interpretations to PSAK. The adoption of these revised standards, amendments and interpretations did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the financial statements.

- *Amendments to PSAK No. 4: Separate Financial Statements of Equity Method in Separate Financial Statements. The amendments allow the use of the equity method as a method of recording the investment in subsidiaries, joint ventures and associates in the separate financial statements of the entity.*

- *Amendments to PSAK No. 15: Investments in Associates and Joint Ventures on Investment Entities: The Application of Consolidation Exception. These amendments provide clarification on consolidation exception for investment entities when certain criterias are met.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

(i) Standar baru dan revisi standar (lanjutan)

- Amandemen PSAK No. 16: Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi. Amandemen ini memberikan tambahan penjelasan tentang indikasi perkiraan keusangan teknis atau komersial suatu aset. Amandemen ini juga mengklarifikasi bahwa penggunaan metode penyusutan yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat.

- Amandemen PSAK No. 19: Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi. Amandemen ini memberikan klarifikasi tentang anggapan bahwa pendapatan adalah dasar yang tidak tepat dalam mengukur pemakaian manfaat ekonomi aset takberwujud dapat dibantah dalam keadaan terbatas tertentu.

- Amandemen PSAK No. 24: Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja. Amandemen ini menyederhanakan akuntansi untuk kontribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, misalnya iuran pekerja yang dihitung berdasarkan persentase tetap dari gaji.

- Amandemen PSAK No. 65: Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi. Amandemen ini mengklarifikasi tentang pengecualian konsolidasi untuk entitas investasi ketika kriteria tertentu terpenuhi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting policies and disclosures (continued)

(i) New and amended standards (continued)

- *Amendments to PSAK No. 16: Property, Plant and Equipment on Clarification of the Accepted Depreciation and Amortization Methodology. The amendments provide additional explanation of the approximate indication of the technical or commercial obsolescence of an asset. The amendments also clarify that use of the depreciation method based on revenue is not appropriate.*

- *Amendments to PSAK No. 19: Intangible Assets on Clarification of the Accepted Depreciation and Amortization Methodology. The amendments provide clarification on the presumption that revenue is not appropriate reflects the consumption of the economic benefits embodied in the intangible assets is rebutted in certain limited circumstances.*

- *Amendments to PSAK No. 24: Employee Benefits on a Defined Benefit Plans: Contribution from Employees. The amendments simplify the accounting for the contribution from employees or third parties that independent on the number of years of service, for example contributions from employees that are fixed percentage of the employee's salary.*

- *Amendments to PSAK No. 65: Consolidated Financial Statements on Investment Entities: Application Consolidation Exceptions. The amendments clarify the consolidation exceptions for investment entities when certain criterias are met.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

(i) Standar baru dan revisi standar (lanjutan)

- Amandemen PSAK No. 67: Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi. Amandemen ini mengklarifikasi tentang pengecualian konsolidasi untuk entitas investasi ketika kriteria tertentu terpenuhi.
- PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015): Segmen Operasi. PSAK ini menambahkan pengungkapan deskripsi singkat segmen operasi yang telah digabungkan dan indikator ekonomik memiliki karakteristik yang serupa.
- PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015): Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. PSAK ini menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi dan mengklarifikasi pengungkapan imbalan yang dibayarkan oleh entitas manajemen.
- PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015): Aset Tetap. PSAK ini memberikan klarifikasi terkait model revaluasi, bahwa ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.
- PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015): Aset Takberwujud. PSAK ini memberikan klarifikasi terkait model revaluasi, bahwa ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat asset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.
- PSAK No. 22 (Penyesuaian 2015): Kombinasi Bisnis. PSAK ini mengklarifikasi ruang lingkup dan kewajiban membayar imbalan kontinjensi yang memenuhi definisi instrumen keuangan diakui sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas.
- PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan. PSAK ini memberikan koreksi editorial tentang keterbatasan penerapan retrospektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting policies and disclosures (continued)

(i) New and amended standards (continued)

- *Amendments to PSAK No. 67: Disclosure of Interests in Other Entities on Investment Entities: Application of Consolidation Exceptions. The amendments clarify the consolidation exceptions for investment entities when certain criterias are met.*
- *PSAK No. 5 (Adjustment 2015): Operating Segments. The PSAK adds the disclosure of brief description on aggregated operating segments and indicators for similar economic characteristics.*
- *PSAK No. 7 (Adjustment 2015): Related Party Disclosures. The PSAK adds requirements for related parties and clarify the disclosure of compensation paid by the entity management.*
- *PSAK No. 16 (Adjustment 2015): Plant, Property and Equipment. The PSAK provides clarification of the revaluation model, that when an entity uses the revaluation model, the carrying amount of the asset is restated on revalued amount.*
- *PSAK No. 19 (Adjustment 2015): Intangible Assets. The PSAK provides clarification of the revaluation model, that when an entity uses the revaluation model, the carrying amount of the asset is restated on revalued amount.*
- *PSAK No. 22 (Adjustment 2015): Business Combinations. The PSAK clarifies the scope and the obligation to pay contingent consideration that meets the definition of a financial instruments are recognized as a financial liability or as equity.*
- *PSAK No. 25 (Adjustment 2015): Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. The PSAK provides editorial revision on the limitations of retrospective application.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

(i) Standar baru dan revisi standar (lanjutan)

- PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015): Pengukuran Nilai Wajar. PSAK ini mengklarifikasi bahwa pengecualian portofolio, yang memperkenankan entitas mengukur nilai wajar kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan secara neto, diterapkan pada seluruh kontrak (termasuk kontrak non-keuangan) dalam ruang lingkup PSAK No. 55.

- PSAK No. 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak. PSAK 70 memberikan opsi dalam akuntasi untuk entitas yang memilih untuk menerapkan pengampunan pajak berdasarkan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak ("SHPPP") untuk memilih menggunakan PSAK No. 25 (pendekatan umum), atau menggunakan ketentuan khusus dalam paragraf 10 - 23 dari PSAK No. 70 (pendekatan opsional). Aset pengampunan pajak harus diukur pada jumlah yang dilaporkan dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak ("SKPP") (sebagai biaya perolehan). Kewajiban lain terkait pengampunan pajak harus diukur pada jumlah kas atau setara kas yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban kontraktual yang terkait dengan akuisisi aset pengampunan pajak.

- ISAK No. 30: Pungutan. ISAK ini merupakan interpretasi atas PSAK No. 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi yang mengklarifikasi akuntansi liabilitas untuk membayar pungutan, selain pajak penghasilan yang berada dalam ruang lingkup PSAK No. 46: Pajak Penghasilan serta denda lain atas pelanggaran perundang-undangan, kepada Pemerintah.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting policies and disclosures (continued)

(i) New and amended standards (continued)

- *PSAK No. 68 (Adjustment 2015): Fair Value Measurement. The PSAK clarifies that the portfolio exception, which permits an entity to measure the fair value of a group of financial assets and financial liabilities on a net basis, applied to all contracts (including non-financial contracts) within the scope of PSAK No. 55.*

- *PSAK No. 70: Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities. PSAK 70 provides options in accounting for an entity that applied for the Tax Amnesty Law based on its Declaration Letter for Tax Amnesty (Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak or "SHPPP") to apply PSAK No. 25 (General Approach); or to apply the specific provisions in paragraphs 10 - 23 of PSAK No. 70 (Optional Approach). The tax amnesty assets shall be measured at the amount reported in the "Surat Keterangan Pengampunan Pajak" ("SKPP") (as deemed cost). Any related tax amnesty liability shall be measured at the amount of cash or cash equivalents that will settle the contractual obligation related to the acquisition of the tax amnesty assets.*

- *ISAK No. 30: Levy. The ISAK is an interpretation of PSAK No. 57: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets which clarifies the accounting for liability to pay levy, other than income taxes within the scope of PSAK No. 46: Income Tax and other penalties on violations of law, to the Government.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

(ii) Standar baru, revisi dan intepretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017:

- PSAK No. 1 (Amandemen 2015): Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan.
- PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016): Imbalan Kerja.
- PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan.
- PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016): Instrumen Keuangan - Pengungkapan.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018:

- PSAK No. 2 (Amandemen 2016): Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan.
- PSAK No. 46 (Amandemen 2016): Pajak Penghasilan atas Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang belum Direalisasi.
- PSAK No. 69: Agrikultur

Kelompok Usaha sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan Kelompok Usaha.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting policies and disclosures (continued)

(ii) New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective:

Effective on or after January 1, 2017:

- *PSAK No. 1 (Amendments 2015): Presentation of Financial Statements on Disclosures Initiative.*
- *PSAK No. 24 (Improvement 2016): Employee Benefits.*
- *PSAK No. 58 (Improvement 2016): Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operation.*
- *PSAK No. 60 (Improvement 2016): Financial Instrument - Disclosure.*

Effective on or after January 1, 2018:

- *PSAK No. 2 (Amendment 2016): Statement of Cash Flow on the Disclosure Initiative.*
- *PSAK No. 46 (Amendment 2016): Income Taxes on the Recognition of Deferred Tax Asset for Unrealized Losses.*
- *PSAK No. 69: Agriculture*

The Group is presently evaluating and has not yet determined the effects of this accounting standard on its financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anaknya pada setiap tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Pengendalian diperoleh bila Kelompok Usaha terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:

i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi *investor* kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Bila Kelompok Usaha tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Kelompok Usaha mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:
i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Kelompok Usaha.

Kelompok Usaha menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak Kelompok Usaha memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berhenti pada saat Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Kelompok Usaha memperoleh kendali sampai tanggal Kelompok Usaha tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries as at December 31 each year. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, the investor controls an investee if and only if the investor has all of the following:

i) Power over the investee, that is existing rights that give the investor current ability to direct the relevant activities of the investee,
ii) Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and
iii) The ability to use its power over the investee to affect its returns.

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

i) The contractual arrangements with the other vote holders of the investee,
ii) Rights arising from other contractual arrangements, and
iii) The Group's voting rights and potential voting rights.

The Group reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of subsidiaries begins when the Group obtains control over the subsidiaries and ceases when the Group losses control of the subsidiaries. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit.

Seluruh saldo akun, transaksi antar perusahaan yang signifikan, dan laba atau rugi hasil transaksi dari intra Kelompok Usaha yang belum direalisasi dan dividen dieliminasi pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada Entitas Anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas suatu Entitas Anak, maka Kelompok Usaha menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas, kepentingan nonpengendali dan komponen lain dari ekuitas terkait, sementara rugi atau laba yang dihasilkan diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Jika anggota Kelompok Usaha menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda untuk transaksi dan peristiwa dalam keadaan yang serupa, maka penyesuaian dilakukan atas laporan keuangannya dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

d. Pengukuran nilai wajar

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 68: Pengukuran Nilai Wajar.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

(a) di pasar utama (*principal market*) untuk aset atau liabilitas tersebut; atau

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of consolidation (continued)

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance.

All significant accounts, transactions between entities, and unrealized gain or losses resulting from intra-Group transactions and dividends are eliminated on consolidation.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a Subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, non-controlling interests and other component of equity, while any resultant gain or loss is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

The consolidated financial statements are prepared using consistent accounting policies for transactions and events in similar circumstances. If the members of the Group use different accounting policies for transactions and events in similar circumstances, adjustments were made to its financial statements in preparing the consolidated financial statements.

d. Fair value measurement

The Group applies PSAK No. 68: Fair Value Measurement.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

(a) in the principal market for the asset or liability; or

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

d. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

(b) jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan (*most advantageous market*) untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan harus dapat diakses oleh Kelompok Usaha.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya ("*highest and best use*") atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Kelompok Usaha menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, dijelaskan sebagai berikut, berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Level 2 - Teknik penilaian dimana level *input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar adalah dapat diobservasi secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 - Teknik penilaian dimana level *input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar adalah tidak dapat diobservasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Fair value measurement (continued)

(b) in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal market or the most advantageous market must be accessible to by the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- *Level 1 - Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.*
- *Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

d. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Untuk aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan secara berulang, Kelompok Usaha menentukan apakah perpindahan antar level dalam hirarki telah terjadi dengan menilai kembali kategorisasi (berdasarkan level *input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada akhir setiap periode pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Kelompok Usaha telah menentukan kelas aset dan liabilitas dengan dasar sifat, karakteristik dan risiko aset atau liabilitas dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

e. Kombinasi bisnis

Kombinasi bisnis, jika ada, dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap kepentingan nonpengendali ("KNP") pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban-beban administrasi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Kelompok Usaha mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Fair value measurement (continued)

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers between levels in the hierarchy have occurred by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

d. Business combinations

Business combinations, if any, are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value, and the amount of any non-controlling interests ("NCI") in the acquiree. For each business combination, the acquirer selects whether it measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition costs incurred are directly expensed and included in administrative expenses.

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date.

If the business combination is achieved in stages, the acquirer is remeasured the previously held equity interest in the acquiree at fair value in the acquisition date and recognized gain or loss through consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Kombinasi bisnis (lanjutan)

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diasumsikan. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto Entitas Anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon setelah sebelumnya manajemen menilai kembali identifikasi dan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitias yang diambil alih.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Kelompok Usaha yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

Kombinasi bisnis antara entitas sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan ("*pooling-of-interest*"). Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan tersebut, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung disajikan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Business combinations (continued)

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the Subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously assessing the identification and fair value measurement of the acquired assets and the assumed liabilities.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Group's Cash-generating Units ("CGU") that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those CGUs.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operations within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

Business combinations among entities under common control

Business combination of entities under common control are accounted for the pooling-of-interests method. In applying the pooling-of-interests method, components of the financial statements of combined entities are presented in such a manner as if the combination has already happened since the beginning of the period entities under common control.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

f. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas yang terhadapnya Kelompok Usaha memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengaruh signifikan adalah serupa dengan hal-hal yang diperlukan dalam menentukan pengendalian atas Entitas Anak.

Investasi Kelompok Usaha pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, investasi awalnya diakui pada harga perolehan. Nilai tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan bagian Kelompok Usaha atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal perolehan. *Goodwill* yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi dan tidak diamortisasi maupun diuji secara individual untuk penurunan nilai.

Jika bagian Kelompok Usaha atas rugi entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, maka Kelompok Usaha menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. Setelah kepentingan Kelompok Usaha dikurangkan menjadi nihil, tambahan kerugian dicadangkan, dan liabilitas diakui, hanya sepanjang Kelompok Usaha memiliki kewajiban konstruktif atau hukum, atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi. Jika entitas asosiasi kemudian melaporkan laba, maka Kelompok Usaha mulai mengakui bagiannya atas laba tersebut hanya setelah bagian atas laba tersebut sama dengan bagian atas rugi yang belum diakui.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Investment in Associates

An Associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee, but is not control or joint control over those policies.

The considerations made in determining significant influence are similar to those necessary to determine control over Subsidiaries.

The Group's investment in its associate is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to recognize changes in the Group's share of net assets of the associate since the acquisition date. Goodwill relating to the associate is included in the carrying amount of the investment and is neither amortized nor tested for impairment individually.

If the Group's share of losses of an associate equals or exceeds its interest in the associate, it discontinues recognising its share of further losses. After the Group's interest is reduced to nil, additional losses are provided for, and a liability is recognized, only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate. If the associate subsequently reports profits, the Group resumes recognising its share of those profits only after its share of the profits equals the share of losses not recognized.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

f. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Laporan laba rugi konsolidasian mencerminkan bagian Kelompok Usaha atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Perubahan penghasilan komprehensif lain ("PKL") dari entitas asosiasi disajikan sebagai bagian dari PKL Kelompok Usaha. Selain itu, bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, Kelompok Usaha mengakui bagiannya atas perubahan, jika sesuai, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Kelompok Usaha dengan entitas asosiasi dieliminasi sesuai dengan kepentingan dalam entitas asosiasi.

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Kelompok Usaha.

Setelah penerapan metode ekuitas, Kelompok Usaha menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Kelompok Usaha dalam entitas asosiasi. Kelompok Usaha menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang objektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Kelompok Usaha menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laba rugi.

Pada saat kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, Kelompok Usaha mengukur dan mengakui bagian investasi tersisa pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat entitas asosiasi dan nilai wajar investasi yang tersisa dan penerimaan dari pelepasan investasi diakui pada laba rugi.

g. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha. Tiap entitas dalam Kelompok Usaha menentukan mata uang fungsionalnya masing-masing dan laporan keuangannya masing-masing diukur menggunakan mata uang fungsional tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Investment in Associates (continued)

The consolidated profit or loss reflects the Group's share of the results of operations of the associate. Any change in other comprehensive income ("OCI") of the associate is presented as part of the Group's OCI. In addition, when there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Group recognizes its share of any changes, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions among the Group and the associate are eliminated to the extent of the interest in the associate.

The financial statements of the associate are prepared for the same reporting period of the Group.

After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Group's investment in its associate. The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. In this case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment in associate and its carrying value, and recognizes the amount in profit or loss.

Upon loss of significant influence over the associate, the Group measures and recognizes any retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.

g. Transactions and balances in foreign currencies

The reporting currency used in the consolidated financial statements is Rupiah, which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and their financial statements are measured using that functional currency.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (lanjutan)

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk tahun yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun yang bersangkutan.

Kurs mata uang asing yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Transactions and balances in foreign currencies (continued)

Transactions in foreign currencies are recorded in Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the year, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current year.

The exchange rate used as at December 31, 2016 and 2015:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
1 Dolar Amerika Serikat/Rupiah	13.436	13.795	*US Dollar 1/Rupiah*
1 Euro/Rupiah	14.162	15.070	*Euro 1/Rupiah*

h. Transaksi dengan pihak berelasi

Kelompok Usaha mempunyai transaksi dengan pihak-pihak berelasi, dengan definisi yang diuraikan pada PSAK No. 7 (Revisi 2010). Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi.

h. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties, as defined in PSAK No. 7 (Revised 2010). All significant transactions and balances with related parties are disclosed in notes to the consolidated financial statements.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

i. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri atas kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak saat penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman, serta tidak dibatasi penggunaannya.

i. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits which have maturity periods of 3 months or less at the time of placement and are not pledged as collateral and unrestricted.

j. Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan dan kurang dari satu tahun sejak saat ditempatkan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman, serta tidak dibatasi penggunaannya, dinyatakan sebesar nilai nominal.

j. Short-term investment

Short-term investment in the form of time deposit with maturity period of more than three months and less than one year at the time of placement and are not pledged as collateral and unrestricted, are stated at nominal value.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

k. Piutang

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penyisihan untuk penurunan nilai. Jika piutang diharapkan tertagih dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika lebih lama), piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika piutang diharapkan tertagih lebih dari satu tahun, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

l. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Biaya perolehan persediaan ditentukan dengan menggunakan metode biaya rata-rata bergerak ("*moving average method*").

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada setiap akhir tahun keuangan.

m. Instrumen keuangan

a. Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Aset keuangan diklasifikasikan, pada saat pengakuan awal, sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, atau sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai efektif, bila memenuhi syarat.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Receivables

Trade and other receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less provision for impairment. If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If more, they are presented as non-current assets.

l. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Cost of inventories is determined using the moving average method.

The allowance for obsolescence determined based on periodic reviews of the physical conditions at each financial year.

m. Financial instruments

a. Financial assets

Initial recognition and measurement

Financial assets are classified, at initial recognition, as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, available-for-sale financial assets, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

m. Instrumen keuangan (lanjutan)

a. Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)

Semua aset keuangan awalnya diakui pada nilai wajar namun dalam hal aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan tersebut.

Kelompok Usaha mengklasifikasikan seluruh aset keuangannya sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, seperti kas dan setara kas, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain dan piutang pihak berelasi jangka panjang.

Pengukuran selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing seperti berikut ini:

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE"). Keuntungan dan kerugian terkait diakui pada laba atau rugi ketika pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Financial instruments (continued)

a. Financial assets (continued)

Initial recognition and measurement (continued)

All financial assets are recognized initially at fair value, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit and loss, the related fair values are added with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial assets.

The Group designates its financial assets as loans and receivables, such as cash and cash equivalents, restriced cash and cash aquivalents, short-term investment, trade receivables, other receivables and long-term receivables form related party.

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. After initial recognition, such assets are carried at amortized cost using the Effective Interest Rate ("EIR") method. The related gains or losses are recognized in the profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

m. Instrumen keuangan (lanjutan)

a. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

Piutang usaha dan lain-lain dan piutang petani tebu rakyat

Penyisihan atas jumlah yang tidak tertagih dicatat bila ada bukti yang objektif bahwa Kelompok Usaha tidak akan dapat menagih piutang tersebut. Piutang tidak tertagih dihapuskan pada saat teridentifikasi. Rincian lebih lanjut tentang kebijakan akuntansi atas penurunan nilai aset keuangan diungkapkan pada paragraf-paragraf berikutnya yang relevan pada Catatan ini.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan, atau, bila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, terjadi bila:

i. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
ii. Kelompok Usaha mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan apabila (a) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) secara substansial tidak mentransfer dan tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Financial instruments (continued)

a. Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

Trade and other receivables and sugarcane farmers receivables

An allowance is made for uncollectible amounts when there is objective evidence that the Group will not be able to collect the receivables. Bad debts are written off when identified. Further details on the accounting policy for impairment of financial assets are disclosed in the relevant succeeding paragraphs under this Note.

Derecognition

A financial asset, or, where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:

i. the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or
ii. the Group has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (a) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (b) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

m. Instrumen keuangan (lanjutan)

a. Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Ketika Kelompok Usaha mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan, Kelompok Usaha mengevaluasi sejauh mana Kelompok Usaha memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut. Pada saat Kelompok Usaha tidak mentransfer maupun tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut, juga tidak mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka aset keuangan tersebut diakui oleh Kelompok Usaha sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Kelompok Usaha.

Dalam hal ini, Kelompok Usaha juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur atas dasar yang merefleksikan hak dan kewajiban Kelompok Usaha yang ditahan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung; dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui pada laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Financial instruments (continued)

a. Financial assets (continued)

Derecognition (continued)

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from a financial asset or has entered into a pass-through arrangement, the Group evaluates if and to what extent it has retained the risks and rewards of ownership. When the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, nor transferred control of the financial asset, the financial asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the financial asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity, is recognized in the profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

m. Instrumen keuangan (lanjutan)

a. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai

Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi, Kelompok Usaha pertama kali secara individual menentukan bahwa terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Financial instruments (continued)

a. Financial assets (continued)

Impairment

At each reporting date, the Group assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is an objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred "loss event") and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

Evidence of impairment may include indications that the debtor or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization, and when observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

Financial assets carried at amortized cost

For loans and receivables carried at amortized cost, the Group first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

m. Instrumen keuangan (lanjutan)

a. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai (lanjutan)

Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Jika Kelompok Usaha menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Kelompok Usaha memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit yang diharapkan di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan atas penurunan nilai dan jumlah kerugian tersebut diakui secara langsung dalam laba atau rugi.

Penghasilan bunga terus diakui atas nilai tercatat yang telah dikurangi tersebut berdasarkan tingkat SBE awal aset keuangan tersebut. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan penyisihan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan, jika ada, sudah direalisasi atau ditransfer kepada Kelompok Usaha.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Financial instruments (continued)

a. Financial assets (continued)

Impairment (continued)

Financial assets carried at amortized cost (continued)

If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether that asset is significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance for impairment account and the amount of the loss is recognized in the statements of profit or loss.

Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the original EIR of the asset. Loans and receivables, together with the associated allowance, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Group.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

m. Instrumen keuangan (lanjutan)

a. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai (lanjutan)

Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Jika, dalam tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang yang dikarenakan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambahkan atau dikurangi (dipulihkan) dengan menyesuaikan akun penyisihan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laba rugi.

Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa mendatang yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dipulihkan pada tahun berikutnya.

b. Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, utang dan pinjaman.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, bagi liabilitas keuangan dalam bentuk utang dan pinjaman, dicatat pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Financial instruments (continued)

a. Financial assets (continued)

Impairment (continued)

Financial assets carried at amortized cost (continued)

If, in a subsequent year, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance for impairment account. The amount of the reversal cannot exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date the impairment was reversed. The reversal of financial assets was recognized in profit or loss.

Financial assets carried at cost

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred on financial asset carried at cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment losses cannot be reversed in the subsequent year.

b. Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified at initial recognition as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings.

Financial liabilities are recognized initially at fair values and, in the case of loans and borrowings, are recognized at fair valuse plus directly attributable transaction costs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

m. Instrumen keuangan (lanjutan)

b. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)

Kelompok Usaha mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman, seperti utang usaha, utang lain-lain, utang jangka pendek, utang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi ("KKPE"), beban akrual, utang jangka panjang dan utang obligasi.

Pengukuran selanjutnya

Utang usaha, utang lain-lain, utang jangka pendek, beban akrual dan utang KKPE

Liabilitas tersebut dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Utang jangka panjang dan utang obligasi yang dikenakan bunga

Setelah pengakuan awal, utang jangka panjang dan utang obligasi yang dikenakan bunga diukur dengan biaya yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas lancar. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai bagian dari "Beban Keuangan" pada laporan laba rugi dan peghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Financial instruments (continued)

b. Financial liabilities (continued)

Initial recognition and measurement (continued)

The Group classifies its financial liabilities as loans and borrowings, such as trade payables, other payables, short-term loans, food security and energy credit ("KKPE") payables, accrued expenses, long-term loans and bond payable.

Subsequent measurement

Trade payables, other payables, short-term loans, accrued expenses and KKPE payables

Those liabilities are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

Interest bearing long-term loans and bond payable

Subsequent to initial recognition, ling ter loan and bond payable interest-bearing are measured at amortized costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through amortization process using the EIR method.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included under "Finance expenses" account in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

m. Instrumen keuangan (lanjutan)

b. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

c. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

d. Biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai dan pembayaran atau pengurangan pokok. Perhitungan tersebut memperhitungkan seluruh premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan komisi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Financial instruments (continued)

b. Financial liabilities (continued)

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing financial liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability, and the difference in the respective carrying values is recognized in profit or loss.

c. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

d. Amortized cost of of financial instruments

Amortized cost is computed using the effective interest rate method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and commissions that are an integral part of the effective interest rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

n. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar di muka dibebankan melalui amortisasi sesuai masa manfaat masing-masing biaya yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus.

o. Tanaman perkebunan

Tanaman menghasilkan

Jangka waktu suatu tanaman dinyatakan mulai menghasilkan ditentukan oleh pertumbuhan vegetatif dan berdasarkan taksiran manajemen, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tanaman kakao, dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan apabila tanaman telah berumur lebih dari 3 tahun.

Penyusutan tanaman kakao dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat yang diestimasi selama 25 tahun atau dengan tarif penyusutan 4% per tahun.

Aset tanaman semusim

Seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan bibit, tenaga kerja langsung dan biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, biaya pinjaman serta beban penyusutan peralatan langsung, ditangguhkan sampai dengan tanaman semusim diproduksi/dipanen yang disajikan sebagai akun "Aset Tanaman Semusim" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

p. Aset tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan. Biaya untuk mengganti komponen dari aset tetap pada saat penggantian, yang memenuhi kriteria pengakuan, diakui sebagai bagian dari biaya perolehan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited using straight-line method.

o. Plantations

Mature plantations

The period of a plantation classified as mature depends on the vegetative growth and based on the management estimation with criteria as follows:

- *The cocoa plantation, classified as mature plantations when the plantation has been more than 3 years.*

Depreciation of cocoa plantation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives which estimated for 25 years or with depreciation tariff of 4% per year.

Annual crops assets

The accumulated costs relating to seedling, direct labor and directly attributed cost, borrowing cost and depreciation expenses, are deferred until its crops that is presented as "Annual Crops Assets" in the consolidation statements of financial position.

p. Fixed assets

Fixed assets, except for landrights, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Cost comprises their purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to its working condition and to the location where it is intended to be used. Costs of replacing part of fixed assets, which met the recognition criteria, are recognized as part of cost.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

p. Aset tetap (lanjutan)

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya oleh Kelompok Usaha dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset-aset tersebut sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Fixed assets (continued)

Depreciation of an asset is commenced when the asset is available for use in the manner intended by the Group and is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	3-20	*Building*
Mesin dan instalasi	8-20	*Machinery and installation*
Alat pengangkutan	5	*Transportations equipment*
Jalan, jembatan dan saluran air	8-20	*Roads, bridges and culvert*
Alat pertanian	2-8	*Agricultural equipment*
Peralatan kantor dan lainnya	5	*Office equipment and others*

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto dan jumlah tercatatnya) dimasukkan ke dalam laba atau rugi pada tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is directly included in the profit or loss of year the item is derecognized.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu aset, masa manfaat, dan metode penyusutan dievaluasi dan disesuaikan secara prospektif jika dipandang perlu.

The assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, at each financial year end and adjusted prospectively if appropriate.

Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan perbaikan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group, and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

p. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap dalam pelaksanaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam pelaksanaan tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam pelaksanaan tidak disusutkan sampai memenuhi syarat pengakuan sebagai aset tetap seperti diungkapkan di atas.

Pada awalnya, tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Tanah diukur pada nilai wajar tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tanah tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan.

Surplus revaluasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian penghasilan komprehensif lain. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.

Defisit revaluasi diakui dalam laba rugi. Namun penurunan nilai tersebut diakui dalam surplus revaluasi aset tetap sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut.

Surplus revaluasi aset tetap yang termasuk dalam ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Fixed assets (continued)

Constructions in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Fixed Assets" account when the construction is completed and available for use. Assets under construction are not depreciated until they fulfill the criteria for recognition as fixed assets as disclosed above.

At the beginning, land are stated at cost and not amortized as the management is of the opinion that it is probable that the titles can be renewed/extended upon expiration.

Land is measured at fair value on revaluation date less accumulated impairment losses after revaluation date. Revaluation is regularly conducted to ensure that the carrying amount of land does not differ materially from its fair value using its fair value at the end of reporting period.

A revaluation surplus is recorded in other comprehensive income and accumulated in equity as part of other comprehensive income. However, to the extent that it reverses a revaluation deficit of the same asset previously recognised in profit or loss, the increase is recognised in profit and loss.

A revaluation deficit is recognised in the statement of profit or loss, except to the extent that it offsets an existing surplus on the same asset recognised in the asset revaluation reserve.

A revaluation surplus of fixed asset which included in equity could be directly transferred to retained earnings when the asset is derecognized.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

p. Aset tetap (lanjutan)

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha (“HGU”), Hak Guna Bangunan (“HGB”), dan Hak Pakai (“HP”) ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun “Aset Tetap” dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB, dan HP diakui sebagai bagian dari akun “Aset Takberwujud” pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomis tanah.

q. Aset tidak produktif

Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha diklasifikasikan ke akun aset tetap non-produktif dalam kelompok aset lain-lain dan disajikan sebesar nilai setelah dikurangi penurunan nilai.

Penghapusan dan pemindahtanganan aset tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-02/MBU/2010, tentang tata cara penghapusbukukan dan pemindahtanganan aset tetap Badan Usaha Milik Negara.

Aset tetap yang diusulkan untuk dihapusbukukan yang selanjutnya telah mendapat persetujuan Direksi dan diusulkan kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuan penghapusan oleh Pemegang Saham, maka biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset tidak produktif tersebut direklasifikasi ke aset tidak produktif dalam akun ”Aset Tidak Lancar Lainnya”. Akumulasi penurunan nilai aset tidak produktif dibentuk sebagai penerapan atas akuntansi penurunan nilai.

Pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan aset tetap usulan penghapusan ini, diakui sebagai pendapatan lain-lain (keuntungan penjualan aset tetap).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Fixed assets (continued)

Legal cost of landrights in the form of Business Usage Rights (“Hak Guna Usaha” or “HGU”), Building Usage Right (“Hak Guna Bangunan” or “HGB”), and Usage Rights (“Hak Pakai” or “HP”) when the land was acquired initially are recognized as part of the cost of the land under the “Fixed Assets” account and not amortized. Meanwhile, the extension or the legal renewal costs of landrights in the form of HGU, HGB, and HP were recognized as part of “Intangible Assets” account in the consolidated statement of financial position and were amortized over the shorter of the rights' legal life and land's economic life.

q. Non-productive assets

Fixed assets that are not used in the Company’s operations classified as non-productive assets in other assets and presented at amount less allowance for impairment losses.

The disposal and transfer of fixed assets following the provisions set forth in the Regulation of the State Minister of State-Owned Enterprises number PER-02/MBU/2010 regarding the procedure for the disposal and transfer fixed assets of State-Owned Enterprise.

Fixed assets that are proposed to be written-off and then has been approved by the Board of Directors and proposed to the Board of Commissioners for written-off approval by the Shareholders, the cost and accumulated depreciation of non-productive assets are reclassified as non-productive assets in the account "Other Non-Current Assets". Accumulated allowance for impairment of non-productive assets are recorded as an implementation of the impairment accounting.

Proceeds from the sale of the proposed written-off fixed assets, is recognized as other income (gain on sale of fixed assets).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

r. Aset takberwujud

Biaya sehubungan dengan biaya pra operasi, perpanjangan hak atas tanah serta perangkat lunak disajikan dalam akun "Aset Takberwujud" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

s. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Kelompok Usaha membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui sebagai laba atau rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan untuk menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Intangible assets

Costs incurred related to pra-operating expenses, renewal of the legal rights over land and softwares are presented as "Intangible Assets" account in the consolidated statement of financial position and amortized over its useful lives using the straight-line method.

s. Impairment of non-financial assets

At the end of each reporting year, the Group assesses whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Unit's ("CGU") fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying value of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the profit or loss in those expense categories consistent with the functions of the impaired asset.

An assessment is made at each reporting date to assess whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

s. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat yang telah ditentukan, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui sebagai laba atau rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

t. Beban tangguhan

Biaya-biaya yang mempunyai manfaat di kemudian hari dan melebihi akhir periode pembukuan dikapitalisasi dan diamortisasikan selama taksiran masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

u. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tetap tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung Kelompok Usaha sehubungan dengan peminjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Impairment of non-financial assets (continued)

If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

t. Deferred charges

Costs that have future benefits for longer than accounting period are capitalized and amortized over their estimated useful lives using the straight-line method.

u. Borrowing cost

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalized as part of the cost of the related asset. Otherwise, borrowing costs are recognized as expense when incurred. Borrowing costs consist of interest and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

Capitalization of borrowing costs commences when the necessary activities to prepare the asset for intended use in accordance with the aims and expenditures for the asset and borrowing costs have occurred. Capitalization of borrowing costs ceases upon completion of substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset to be used in accordance with the intention.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

v. Perpajakan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak penghasilan badan yang terutang saat ini dan pajak tangguhan.

Pajak kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban pajak kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, Kelompok Usaha juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban pajak kini".

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan diterima.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

i. liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak atau rugi pajak;

ii. dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada Entitas Anak, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Taxation

Income tax expense represents the sum of the corporate income tax currently payable and deferred tax.

Current tax

Current income tax assets and liabilities for the current years are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authorities. Curent tax expenses determined based on current year taxable income which computed based on applicable tax rate.

The underpayment/overpayment of income tax is presented as part of "Current tax expense" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. The Group also presented interest/penalty, if any, as part of "Current tax expense".

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or if appealed against, when the results of the appeal are determined.

Deferred tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except:

i. where the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss;

ii. in respect of taxable temporary differences associated with investments in Subsidiaries, when the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the forseeable future.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

v. Perpajakan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali:

i. jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau

ii. dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disalinghapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama, Kelompok Usaha yang bermaksud untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas lancar berdasarkan jumlah neto.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Taxation (continued)

Deferred tax (continued)

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except:

i. where the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or

ii. in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as of the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Group intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

v. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")

Pendapatan, beban-beban, dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN, kecuali:

i. PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan

ii. piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang terpulihkan dari, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari piutang atau utang pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pajak final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46: Pajak Penghasilan.

w. Imbalan kerja

a) Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan. Termasuk dalam program imbalan kerja jangka pendek adalah tantiem and bonus.

(i) Tantiem

Penyisihan atas tantiem dibuat berdasarkan estimasi manajemen dan dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Tantiem akan dibayarkan kepada Direksi dan Komisaris setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Selisih antara jumlah tantiem yang diestimasi oleh manajemen dengan jumlah yang disahkan oleh pemegang saham dibebankan atau dikreditkan pada periode dimana tantiem tersebut disahkan oleh RUPS.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Taxation (continued)

Value Added Tax ("VAT")

Revenue, expenses, and assets are recognized net of the amount of VAT, except:

i. the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the taxation authority, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and

ii. receivables and payables that are stated inclusive of the VAT amount.

The net amount of VAT recoverable from, or payable to, the taxation authorities is included as part of receivables or payables in the consolidated statement of financial position.

Final tax

Based on tax regulation in Indonesia, final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Final tax is no longer governed by PSAK No. 46: Income Tax.

w. Employee benefits

a) Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognized when they are accrued to the employees. Included in short-term employee benefits are tantiem and bonus.

(i) Tantiem

Provision of tantiem are based on management estimates and charged to the current profit or loss. Tantiem will be paid to Directors and Commissioners after obtaining the approval in the General Shareholders' Meeting ("GSM"). The difference between the provision of tantiem that was estimated by management and the amount approved by the shareholders is recognized in the period when such tantiem is approved by GSM.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

w. Imbalan kerja (lanjutan)

a) Imbalan kerja jangka pendek (lanjutan)

(ii) Bonus

Bonus ditetapkan berdasarkan estimasi manajemen Kelompok Usaha dan disahkan oleh RUPS. Selisih antara jumlah bonus yang diestimasi oleh manajemen dengan jumlah yang disahkan oleh pemegang saham dibebankan atau dikreditkan pada periode dimana bonus tersebut disahkan oleh RUPS.

b) Imbalan pasca kerja

Kelompok Usaha diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UUK"), yang merupakan kewajiban imbalan pasti.

Kelompok Usaha memberikan imbalan pasca kerja kepada karyawan yang telah mencapai usia pensiun normal pada umur 55-56 tahun dan imbalan lainnya berupa santunan hari tua, tunjangan masa persiapan pensiun, cuti panjang, penghargaan masa kerja dan iuran BPJS untuk pesniunan dengan syarat-syarat yang telah diputuskan dalam Perjanjian Kerja Bersama. Kecuali untuk imbalan pensiun, imbalan tersebut tidak didanai.

Kewajiban imbalan pasti dihitung sekali setahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi jangka panjang yang berkualitas tinggi dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Employee benefits (continued)

a) Short-term employee benefits (continued)

(ii) Bonus

Bonus is provided based on the estimates of Group's management and approved by GSM. The difference between the total bonus estimated by management and approved by shareholders is recognized in the period when bonus is approved by GSM.

b) Post-employment benefits

The Group is required to provide a minimum pension benefit as stipulated in Labor Law No. 13 Year 2003 (the "Labor Law"), which represents an underlying defined benefit obligation.

The Group provides employee benefits for employees who have reached normal pension age of 55-56 years old and other benefits such as post retirement benefits, allowance for preparation of pension, long vacation, appreciation for service years and BPJS contribution for pensionary which conditions have been agreed in Collective Labour Agreement. Except for the pension benefit, the other benefits are not funded.

The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high-quality long-term bonds that are denominated in Rupiah in which the benefits will be paid and that have terms of maturity similar to the related pension liability.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

w. Imbalan kerja (lanjutan)

b) Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

i) ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
ii) ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Kelompok Usaha mengakui perubahan berikut pada kewajiban imbalan pasti neto pada akun "Beban Pokok Pendapatan" dan "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

i) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas kurtailmen dan penyelesaian tidak rutin, dan
ii) Beban atau penghasilan bunga neto.

c) Kewajiban imbalan pasca-kerja lainnya

Kelompok Usaha memberikan imbalan pasca-kerja lainnya, seperti uang penghargaan. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Employee benefits (continued)

b) Post-employment benefits (continued)

Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier between:

i) when the amendment or curtailment happens; and
ii) when the entity recognizes related restructuring costs and termination benefits.

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability. The Group recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under "Cost of Sales" and "General and Administrative Expenses" as appropriate in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income:

i) Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains and losses on curtailments and non-routine settlements, and
ii) Net interest expense or income.

c) Other post-employment obligations

The Group also provides other post-employment benefits, such as gratuity. The benefits in the form of gratuity is awarded when the employees reach their retirement age. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plans.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

w. Imbalan kerja (lanjutan)

d) Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja terutang ketika karyawan dihentikan kontrak kerjanya sebelum usia pensiun normal. Kelompok Usaha mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja ketika Kelompok Usaha menunjukkan komitmennya untuk memutuskan kontrak kerja dengan karyawan berdasarkan suatu rencana formal terperinci yang kecil kemungkinannya untuk dibatalkan. Pesangon yang akan dibayarkan dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah akhir tanggal pelaporan didiskontokan untuk mencerminkan nilai kini.

e) Imbalan jangka panjang lainnya

Imbalan lainnya seperti imbalan cuti jangka panjang dihitung berdasarkan Peraturan Kelompok Usaha dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini.

x. Penggunaan saldo laba berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Saldo laba digunakan untuk pembagian dividen dan penyisihan untuk cadangan.

y. Pendapatan dan beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat, dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"). Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman barang, diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Employee benefits (continued)

d) Termination benefits

Termination benefits are payable whenever an employee's employment is terminated before the normal retirement age. The Group recognizes termination benefits when it is demonstrably committed to terminate the employment of current employees according to a detailed formal plan and the possibility to withdraw the plan is low. Benefits falling due more than 12 months after the end of reporting date are discounted at present value.

e) Other long-term benefits

Other benefits such as long service leave is calculated in accordance with the Group Regulations, using the projected unit credit method and discounted to present value.

x. The use of retained earnings based on the decision of the General Meeting of Shareholders

Retained earnings are used for the distribution of dividends and provisions for reserves.

y. Revenue and expenses

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates, and Value Added Tax ("VAT"). The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

Sales of Goods

Revenue from sales arising from the delivery of goods is recognized when the significant risks and rewards have been transferred to the buyer.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

y. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Penghasilan/beban bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penghasilan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode SBE, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Kelompok usaha memperoleh penghasilan bunga yang diperoleh dari deposito berjangka dan dicatat sebagai "Pendapatan keuangan", sedangkan beban bunga yang dibayarkan atas pinjaman dicatat sebagai "Beban keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (azas akrual).

z. Provisi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

aa. Laba (rugi) per saham

Laba (rugi) per saham dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun yang bersangkutan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Revenue and expenses (continued)

Interest income/Expense

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using EIR method, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying value of the financial asset or liability.

The Group obtained Interest income which was obtained from time deposits dan recorded as "Finance income", while interest expenses paid on loans was recorded as "Finance expenses" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Expenses

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

z. Provisions

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimates. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

aa. Earnings (loss) per share

Earnings (loss) per share are computed by dividing net profit attributable to the owners of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

ab. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa, adalah berdasarkan substansi dari perjanjian tersebut pada penetapan awal. Perjanjian dievaluasi apakah pemenuhannya tergantung kepada penggunaan aset atau aset-aset tertentu secara spesifik atau perjanjian mengalihkan hak untuk menggunakan aset atau aset-aset, walaupun hak tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian.

Sebagai *lessee*

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewa. Sewa tersebut dikapitalisasi sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung sebagai laba rugi.

Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa *lessee* akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewaan disusutkan selama masa penggunaan aset yang diestimasi berdasarkan umur manfaat aset tersebut. Jika tidak terdapat kepastian tersebut, maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan atau masa sewa. Selisih lebih yang timbul dari transaksi jual dan sewa-balik kembali ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa sewa.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran sewa diakui pada laba atau rugi dengan dasar garis lurus ("*straight-line basis*") selama masa sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ab. Lease

Determining whether an arrangement is, or contains, lease, is based on the substance of the agreement at the beginning of the establishment. Agreement is evaluated whether the fulfillment depends on the spesifically use of the asset or certain assets or right transfer agreement to use the asset or assets, although the right is not explicitly mentioned in the agreement.

As lessee

A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased assets. The lease is capitalized at the fair value of the leased property or the present value of the minimum lease payments if the present value is lower than fair value. Minimum lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance expenses are charged directly to profit or loss.

If there is reasonable certainty that the lessee will obtain ownership by the end of the lease term, the leased asset is depreciated over the estimated period of use of assets based on the useful life of the asset. If there is no such certainty, the leased asset is depreciated over the shorter period between the useful life of the leased asset or the lease term. The excess arising from the sale and leaseback back to be deferred and amortized over the remaining term of the lease.

Leases are classified as operating leases if the lease does not transfer substantially all the risks and rewards related to ownership of assets. Thus, the lease payments are recognized in profit or loss with straight-line basis over the lease term.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

ac. Informasi segmen

Untuk tujuan manajemen, Kelompok Usaha dibagi menjadi lima segmen operasi berdasarkan produk yang dikelola secara independen oleh masing-masing pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen. Para pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen Perusahaan yang secara teratur mengkaji laba segmen sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen. Pengungkapan tambahan pada masing-masing segmen terdapat dalam Catatan 41, termasuk faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan dan dasar pengukuran informasi segmen.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ac. Segment information

For management purposes, the Group is organized into five operating segments based on their products and services which are independently managed by the respective segment managers responsible for the performance of the respective segments under their charge. The segment managers report directly to the management who regularly review the segment results in order to allocate resources to the segments and to assess the segment performance. Additional disclosures on each of these segments are shown in Note 41, including the factors used to identify the reportable segments and the measurement basis of segment information.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir tahun pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari masing-masing entitas dalam Kelompok Usaha adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari penjualan barang dan jasa yang diberikan.

3. SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting year. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying values of the assets and liabilities affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by the management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Determination of functional currency

The functional currency of each entity in the Group is the currency of the primary economic environment in which the entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and expenses from sale of goods and services rendered.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha seperti diungkapkan pada Catatan 2.

Tagihan dan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan direstitusi oleh Otoritas Pajak. Nilai tercatat atas tagihan dan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak Kelompok Usaha pada tanggal-tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 18.

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Nilai tercatat tagihan pajak penghasilan pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 18.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3. SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

Classification of financial assets and financial liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2.

Claim for tax refund and objection on the result of tax assessments

Based on the tax regulations currently enacted, the management judged if the amounts recorded under those accounts above are recoverable and refundable by the Tax Authority. The carrying amount of the claim and objection and the result of the tax assessments of the Group at the reporting dates are disclosed in Note 18.

Uncertainty exist with respect to the interpretation of complexity tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Group recognizes liabilities of corporate income tax based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. The carrying amount of the claim for tax refund at the reporting dates is disclosed in Note 18.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty estimates at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying values of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Instrumen keuangan

Kelompok Usaha mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Walaupun komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Kelompok Usaha menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Kelompok Usaha.

Penyisihan penurunan nilai atas kerugian piutang usaha

Kelompok Usaha mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Kelompok Usaha mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan informasi dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Kelompok Usaha. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan penurunan nilai piutang usaha.

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan

Penyisihan atas penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian, dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan Kelompok Usaha sebelum penyisihan atas penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan pada tanggal-tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 10.

3. SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Financial instruments

The Group records certain financial assets and liabilities at fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair values would differ if the Group utilized different valuation methodology. Any changes in fair values of these financial assets and liabilities would affect directly the Group's profit or loss.

Allowance for impairment losses on trade receivables

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgement, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted if additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses on trade receivables.

Allowance for decline in market values and obsolescence of inventories

Allowance for decline in market values and obsolescence of inventories is estimated based on available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion, and estimated costs to be incurred for their sales. The allowance is re-evaluated and adjusted if additional information received affects the amount estimated. The *Group's inventories carrying value before provision for decline in market values and obsolescence of inventories at the reporting dates are disclosed in Note 10.*

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyusutan aset tetap dan tanaman menghasilkan

Biaya perolehan aset tetap dan tanaman menghasilkan disusutkan/diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 2 sampai dengan 20 tahun (Catatan 2p) dan tanaman menghasilkan selama 25 tahun (Catatan 2o), yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya.

Perubahan tingkat pemakaian, perkembangan teknologi dan keterbatasan hak atau pembatasan lainnya dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan dan amortisasi masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat neto atas aset tetap Kelompok Usaha pada tanggal-tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 14.

Nilai tercatat neto atas tanaman menghasilkan Kelompok Usaha pada tanggal-tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 13.

Imbalan kerja

Pengukuran kewajiban dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk, antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain dalam periode terjadinya.

Walaupun Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

3. SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Depreciation of fixed assets and mature plantations

The costs of fixed assets and mature plantations are depreciated/amortized on a straight-line basis over their estimated economic useful lives. Management estimates the economic useful lives of these fixed assets to be within 2 to 20 years (Note 2p) and plantations within 25 years (Note 2o), which are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses.

Changes in the level of consumption, technology developments and the limitations of rights or other restrictions may affect the economic useful lives and the residual value of assets, and therefore depreciation and amortization future may be revised. The net carrying value of fixed assets in the Group reporting date is disclosed in Note 14.

The net carrying value over the Group's mature plantation at reporting dates is disclosed in Note 13.

Employee benefits

The measurement of Group's obligations and pension costs and employee benefits liabilities depends on the selection of certain assumptions used by independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, annual salary increases, annual employee resignation rate, disability rate, retirement age and mortality rates. Actuarial gains or losses arising from adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the inccured period.

Although the Group believes that these assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its employee benefits liabilities and net employee benefits expense.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan kerja (lanjutan)

Nilai tercatat neto liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 diungkapkan dalam Catatan 24.

Pajak penghasilan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Nilai tercatat tagihan pajak penghasilan pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 18.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi pajak yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan. Nilai tercatat atas aset pajak tangguhan Kelompok Usaha pada tanggal-tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 18.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Kelompok Usaha memiliki rugi fiskal yang dapat dikompensasi sebesar Rp280.045.950.725. Rugi fiskal tersebut terkait Perusahaan yang diperkirakan dapat terpulihkan, diungkapkan pada Catatan 18e.

3. SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Employee benefits (continued)

The net carrying value of the Group's employee benefits liability as of December 31, 2016 and 2015 is disclosed in Note 24.

Income tax

Uncertainty exist with respect to the interpretation of complexity tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Group recognizes liabilities of corporate income tax based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. The carrying amount of the claim for tax refund at the reporting dates is disclosed in Note 18.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable income together with future tax planning strategies. The carrying amount of deferred tax assets of the Group at the reporting date is disclosed in Note 18.

As of December 31, 2016, the Group has tax loss amounting to Rp280,045,950,725. These tax loss relate to the Company which are estimated recoverable, are disclosed in Note 18e.

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Kas	1.253.739.058	1.522.344.971	*Cash*
Bank:			*Bank:*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 9)			*Related parties (Note 9)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	83.832.744.378	164.065.172.058	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	63.114.552.232	42.935.948.570	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	5.747.031.899	4.909.579.102	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.621.559.895	8.308.673.605	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Mandiri	984.866.808	192.558.155	*PT Bank Syariah Mandiri*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	269.429.471	297.323.230	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	209.489.051	350.033.590	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank Central Asia Tbk	2.837.064.727	1.481.894.588	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.217.698.942	1.234.020.324	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Bukopin Tbk	232.722.303	391.629.160	*PT Bank Bukopin Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	70.938.959	-	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	54.524.997	-	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Mega Syariah	-	139.354.785	*PT Bank Mega Syariah*
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
Pihak berelasi (Catatan 9)			*Related parties (Note 9)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.018.152.644	31.448.872.729	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.428.790.345	390.036.795	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	19.654.046	20.589.727	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	12.142.516	12.798.035	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	460.533.411	472.185.330	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Bukopin Tbk	378.717.576	389.352.977	*PT Bank Bukopin Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	26.510.034	27.235.745	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
Euro			*Euro*
Pihak berelasi (Catatan 9)			*Related parties (Note 9)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22.960.575.742	135.796.353.865	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Jumlah bank	200.497.699.976	392.863.612.370	*Total bank*
Deposito berjangka:			*Time deposits:*
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 9)			*Related parties (Note 9)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	33.675.693.558	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	1.500.000.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Jumlah deposito berjangka	33.675.693.558	1.500.000.000	*Total time deposits*
Jumlah kas dan setara kas	**235.427.132.592**	**395.885.957.341**	***Total cash and cash equivalents***
Tingkat bunga deposito per tahun	6,75%	4,6%	*Annual interest rate of time deposits*

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo kas dan setara kas yang ditempatkan pada pihak berelasi masing-masing sebesar 97% dan 98% dari jumlah seluruh kas dan setara kas.

Seluruh kas telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Tania Tbk terhadap risiko kehilangan dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp21 miliar dan Rp43 miliar pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang mungkin dialami Kelompok Usaha.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

As of December 31, 2016 and 2015, cash and cash equivalents placed on related parties are 97% and 98% of the total cash and cash equivalents, respectively.

The entire cash are insured by PT Asuransi Jasa Tania Tbk against losses with sum insured of Rp21 billion and Rp43 billion as of December 31, 2016 and 2015, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from such risks which may be suffered by the Group.

5. KAS DAN SETARA KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

5. RESTRICTED CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Giro			*Current accounts*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	17.565.780.768	25.000.000.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Deposito Berjangka			*Time Deposits*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	550.000.000.000	550.000.000.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	400.000.000.000	200.000.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	-	200.000.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk*
Jumlah kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	**967.565.780.768**	**975.000.000.000**	***Total restricted cash and cash equivalents***

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya berasal dari dana program Penyertaan Modal Negara (“PMN”) yang diterima tahun 2015 dan telah ditentukan penggunaannya (Catatan 27).

Sampai dengan 31 Desember 2016, dana ini telah digunakan sebesar Rp7.434.219.232.

Tingkat suku bunga deposito per tahun sebesar 6,75% (2015: 9,0% - 10,0%), dan berjangka waktu tiga bulan.

Restricted cash and cash equivalents was derived from funds of State Capital Investment (“PMN”) program which was received in 2015 and has been appropriated (Note 27).

As of December 31, 2016, funds that have been used amounted to Rp7,434,219,232.

Annual interest rate of time deposits is 6.75% (2015: 9.0% - 10.0%), and have maturity periods of three months.

6. PIUTANG USAHA / *6. TRADE RECEIVABLES*

a. Berdasarkan pelanggan / *a. Based on customers*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Pihak berelasi (Catatan 9)	45.056.610.177	39.159.366.698	***Related parties*** *(Note 9)*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.308.383.371)	(2.308.383.371)	*Allowance for impairment losses*
Piutang pihak berelasi, neto	42.748.226.806	36.850.983.327	*Related parties receivables, net*
Pihak ketiga:			***Third parties:***
PT Molindo Raya Industrial	20.941.946.430	491.891.550	*PT Molindo Raya Industrial*
PT Sumber Redjeki	10.463.760.175	-	*PT Sumber Redjeki*
Altadis SA, Spanyol	9.411.936.810	-	*Altadis SA, Spain*
PT Indo Acidatama	8.314.068.581	135.540.474	*PT Indo Acidatama*
PT Etanol Ceria Abadi	4.600.542.862	13.643.364.705	*PT Etanol Ceria Abadi*
Ing Shiang Co., Ltd., China	4.539.255.592	-	*Ing Shiang Co., Ltd., China*
Royal Agio Cigars, Belanda	4.107.277.179	-	*Royal Agio Cigars, Netherland*
PT Berlian Mandiri Perkasa	3.017.722.997	2.174.505.654	*PT Berlian Mandiri Perkasa*
Tobacco Traders International, Jerman	2.235.846.048	4.596.324.770	*Tobacco Traders International, Germany*
CV Central Agro Mandiri	2.091.861.247	2.091.861.247	*CV Central Agro Mandiri*
PT Indonesian Tobacco International	1.559.041.107	5.040.472.119	*PT Indonesian Tobacco International*
Ant. Ankersmit & Co. (Gmbh & Co. KG), Jerman	857.408.550	6.605.818.490	*Ant. Ankersmith & Co. (Gmbh & Co. KG), Germany*
The Spanish Trading House S.I, Spanyol	372.186.808	6.625.986.810	*The Spanish Trading House S.I, Spain*
PT Indonesia Bintang Baru	16.413.299	7.221.853.204	*PT Indonesia Bintang Baru*
PT Cipta Andhika Teladan	-	60.000.000.000	*PT Cipta Andhika Teladan*
Tokai Denpun Co., Ltd., Jepang	-	2.909.503.450	*Tokai Denpun Co., Ltd., Japan*
PT Indonesia Dwi Sembilan	-	2.699.273.532	*PT Indonesia Dwi Sembilan*
Vetab International Inc., Amerika Serikat	-	2.367.105.734	*Vetab International Inc., United States of America*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2 miliar)	47.630.688.653	42.081.071.323	*Others (each below Rp2 billion)*
Jumlah pihak ketiga	120.159.956.338	158.684.573.062	*Total third parties*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(12.424.727.150)	(12.145.439.141)	*Allowance for impairment losses*
Piutang pihak ketiga, neto	107.735.229.188	146.539.133.921	*Third parties receivables, net*
Jumlah piutang usaha, neto	**150.483.455.994**	**183.390.117.248**	***Total trade receivables, net***

b. Berdasarkan umur piutang usaha / *b. Based on aging of trade receivables*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Lancar dan tidak mengalami penurunan nilai	93.383.877.600	130.285.583.668	*Neither past due nor impairment*
Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai:			*Past due but not impaired:*
1 - 30 hari	36.391.708.361	20.662.805.887	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	8.990.041.181	6.685.218.283	*31 - 60 days*
Lebih dari 60 hari	11.717.828.852	25.756.509.410	*More than 60 days*
Sub jumlah	150.483.455.994	183.390.117.248	*Sub total*
Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai	14.733.110.521	14.453.822.512	*Past due and impaired*
Jumlah	**165.216.566.515**	**197.843.939.760**	***Total***

6. PIUTANG USAHA (lanjutan) / *6. TRADE RECEIVABLES (continued)*

c. Berdasarkan mata uang / *c. Based on currencies*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Rupiah	131.446.584.868	168.645.685.387	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	25.368.263.571	22.045.140.867	*United States Dollar*
Euro	8.401.718.076	7.153.113.506	*Euro*
Jumlah	**165.216.566.515**	**197.843.939.760**	***Total***

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai:

Movements of allowance for impairment losses:

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Saldo awal	14.453.822.512	9.595.692.424	*Beginning balance*
Penambahan tahun berjalan	279.288.009	4.858.130.088	*Addition during the year*
Saldo akhir	**14.733.110.521**	**14.453.822.512**	***Ending balance***

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.

Piutang usaha tertentu digunakan sebagai jaminan utang jangka pendek (Catatan 20) dan utang jangka panjang (Catatan 22).

Certain trade receivables are used as collateral for short-term loans (Note 20) and long-term loans (Note 22).

7. PIUTANG LAIN-LAIN / *7. OTHER RECEIVABLES*

Piutang lain-lain terdiri dari:

Other receivables consist of:

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Piutang petani tebu rakyat, neto	176.862.782.224	178.490.052.924	*Sugarcane farmers receivables, net*
Pihak berelasi	9.542.861.985	6.731.200.378	*Related parties*
Pihak ketiga, neto	34.576.004.177	47.007.858.692	*Third parties, net*
Jumlah	**220.981.648.386**	**232.229.111.994**	***Total***

7. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

7. OTHER RECEIVABLES (continued)

Piutang petani tebu rakyat

Sugarcane farmers receivables

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Pabrik Gula (PG):			*Sugar Factory (SF):*
Gempolkrep	61.972.645.637	49.542.617.637	*Gempolkrep*
Ngadiredjo	24.168.297.109	25.423.308.074	*Ngadiredjo*
Tjoekir	21.894.808.913	5.574.891.988	*Tjoekir*
Pesantren Baru	17.561.973.337	13.680.140.211	*Pesantren Baru*
Djombang Baru	15.356.327.004	13.032.480.791	*Djombang Baru*
Toelangan	10.617.150.225	11.528.131.290	*Toelangan*
Lestari	10.587.404.905	11.992.336.771	*Lestari*
Pengembangan Madura	9.765.941.996	8.968.227.451	*Development of Madura*
Modjopanggung	8.106.721.109	22.533.003.972	*Modjopanggung*
Kremboong	8.051.147.676	5.616.887.276	*Kremboong*
Meritjan	5.230.742.390	6.203.777.621	*Meritjan*
Pengembangan Tuban	4.870.680.929	2.334.828.849	*Development of Tuban*
Watoetoelis	4.553.940.358	8.513.714.911	*Watoetoelis*
Kebun Klaten	250.600.572	250.600.572	*Klaten Plantation*
Jumlah piutang petani tebu rakyat	202.988.382.160	185.194.947.414	*Total sugarcance farmes receivables*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(26.125.599.936)	(6.704.894.490)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah piutang petani tebu rakyat, neto	**176.862.782.224**	**178.490.052.924**	***Total sugarcane farmers receivables, net***

Piutang petani tebu rakyat merupakan pinjaman antara lain berupa beban garap, saprodi, BBT/Bibit, beban traktor, termasuk pemberian pinjaman dalam rangka program Pemerintah "Ketahanan Pangan dan Energi". Pelunasan dari piutang ini akan dikompensasi dengan hasil penjualan gula dan tetes milik petani. Pinjaman ini berasal dari paket kredit bank melalui Koperasi Petani Tebu Rakyat. Penyaluran dan pelunasan dari pinjaman melalui Perusahaan. Dalam perjanjian pinjaman tersebut Perusahaan bertindak sebagai penjamin (avalis).

Receivables of sugarcane farmers represents receivables which include loads till, inputs, BBT/Seed, tractor expenses, including lending relating to "Food Security and Energy Loan" government program. The repayment of the receivables will be compensated with the proceeds of the sale of sugar and molasses owned by farmers. These loans come from bank loan package through the Sugarcane Farmers Cooperative. The distribution and repayment of the loans will be made through the Company. Based on the loan agreements the Company acts as a guarantor (avalist).

Seluruh piutang petani tebu rakyat adalah dalam mata uang Rupiah.

All of the sugarcane farmers receivables are in Rupiah currency.

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai:

Movements of allowance for impairment losses:

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Saldo awal	6.704.894.490	6.704.894.490	*Beginning balance*
Penambahan tahun berjalan	19.420.705.446	-	*Addition during the year*
Saldo akhir	**26.125.599.936**	**6.704.894.490**	***Ending balance***

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang petani tebu rakyat.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible sugarcane farmers receivables accounts.

7. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan) / *7. OTHER RECEIVABLES (continued)*

Piutang pihak berelasi dan pihak ketiga / ***Related parties and third parties receivables***

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Pihak berelasi (Catatan 9)	9.542.861.985	6.731.200.378	***Related parties*** *(Note 9)*
Pihak ketiga:			***Third parties:***
PT Sakapatria Perkasa	22.729.368.295	21.654.119.089	*PT Sakapatria Perkasa*
PT Medco Intidinamika	6.734.576.328	-	*PT Medco Intidinamika*
PT Asuransi Jasa Tania, Tbk	3.840.043.366	4.811.917.062	*PT Asuransi Jasa Tania, Tbk*
Piutang bunga deposito	3.639.452.021	-	*Deposits interest receivable*
Burger Sohne AG Burg, Swiss	3.328.787.411	6.189.804.802	*Burger Sohne AG Burg, Swiss*
CV Rajawali Usaha Nabati	2.856.262.500	2.737.411.038	*CV Rajawali Usaha Nabati*
Piutang karyawan	1.242.770.798	3.375.378.188	*Employee receivables*
Piutang restitusi pajak (Catatan 18g)	-	2.401.384.039	*Tax refund receivable (Note 18g)*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2 miliar)	8.708.610.350	6.033.733.206	*Others (each below Rp2 billion)*
Jumlah pihak ketiga	53.079.871.069	47.203.747.424	*Total third parties*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(18.503.866.892)	(195.888.732)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah piutang lain-lain pihak ketiga, neto	34.576.004.177	47.007.858.692	*Total other receivables - third parties, net*
Jumlah piutang lain-lain, neto	**44.118.866.162**	**53.739.059.070**	***Total other receivables, net***

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai: / *Movements of allowance for impairment losses:*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Saldo awal	195.888.732	195.888.732	*Beginning balance*
Penambahan tahun berjalan	18.307.978.160	-	*Addition during the year*
Saldo akhir	**18.503.866.892**	**195.888.732**	***Ending balance***

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible other receivables.

8. BIAYA DIBAYAR DI MUKA / *8. PREPAID EXPENSES*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Uang muka jasa	4.931.150.211	-	*Advances of services*
Asuransi	1.163.926.891	1.122.175.846	*Insurance*
Jumlah biaya dibayar di muka	**6.095.077.102**	**1.122.175.846**	***Total prepaid expenses***

9. SALDO SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, yaitu dengan beberapa bank yang dikendalikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, entitas dalam pengendalian bersama, entitas asosiasi dan pihak berelasi lainnya.

a. Saldo-saldo signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

9. SIGNIFICANT BALANCES WITH RELATED PARTIES

The Group enters into transactions with related parties, which are with several banks that are controlled by the Central Government and Local Grovernment, under common control entity, associate entity and other related parties.

a. Significant balances with related parties are as follows:

	Saldo/*Balance*		Persentase terhadap total aset/liabilitas/ *Percentage of total assets/ liabilities*		
	31 Desember/*December 31,*		31 Desember/ *December 31,*		
	2016	2015	2016	2015	
Kas dan setara kas (Catatan 4)					***Cash and cash equivalents (Note 4)***
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	83.832.744.378	164.065.172.058	0,64%	1,33%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	63.114.552.232	42.935.948.570	0,48%	0,35%	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	5.747.031.899	4.909.579.102	0,04%	0,04%	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.621.559.895	8.308.673.605	0,04%	0,07%	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Mandiri	984.866.808	192.558.155	0,01%	0,00%	*PT Bank Syariah Mandiri*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	269.429.471	297.323.230	0,00%	0,00%	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	209.489.051	350.033.590	0,00%	0,00%	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
Dolar Amerika Serikat					*United States Dollar*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.018.152.644	31.448.872.729	0,07%	0,26%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.428.790.345	390.036.795	0,03%	0,00%	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	19.654.046	20.589.727	0,00%	0,00%	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	12.142.516	12.798.035	0,00%	0,00%	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk*
Euro					*Euro*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22.960.575.742	135.796.353.865	0,18%	1,10%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Deposito berjangka					*Time deposits*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	33.675.693.558	-	0,26%	0,00%	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	1.500.000.000	0,00%	0,01%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Jumlah kas dan setara kas	**228.894.682.585**	**390.227.939.461**	**1,75%**	**3,17%**	***Total cash and cash equivalents***
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya (Catatan 5)					***Restricted cash and cash equivalents (Note 5)***
Giro					*Current accounts*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	17.565.780.768	25.000.000.000	0,13%	0,20%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Deposito berjangka					*Time deposits*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	550.000.000.000	550.000.000.000	4,21%	4,46%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	400.000.000.000	200.000.000.000	3,06%	1,62%	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	-	200.000.000.000	0,00%	1,62%	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk*
Jumlah kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	**967.565.780.768**	**975.000.000.000**	**7,41%**	**7,90%**	***Total restricted cash and cash equivalents***
Piutang usaha (Catatan 6)					***Trade receivables (Note 6)***
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	31.552.653.764	30.499.380.074	0,24%	0,25%	*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan*
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik	6.815.531.600	-	0,05%	0,00%	*Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik*
PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri	2.308.383.371	4.120.130.639	0,02%	0,03%	*PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1.300.849.014	507.767.316	0,01%	0,00%	*PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk*
PT Pupuk Kujang	1.158.300.000	-	0,01%	0,00%	*PT Pupuk Kujang*
PT Perkebunan Nusantara XIV	647.909.128	-	0,00%	0,00%	*PT Perkebunan Nusantara XIV*
PT Perkebunan Nusantara IX	4.582.970	2.990.495.730	0,00%	0,02%	*PT Perkebunan Nusantara IX*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-	1.041.592.939	0,00%	0,01%	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta)	1.268.400.330	-	0,01%	0,00%	*Others (each below Rp500 million)*
Jumlah piutang usaha	**45.056.610.177**	**39.159.366.698**	**0,34%**	**0,32%**	***Total trade receivables***
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.308.383.371)	(4.120.130.639)	(0,02%)	(0,03%)	*Allowance for impairment loss*
Jumlah piutang usaha, neto	**42.748.226.806**	**35.039.236.059**	**0,32%**	**0,28%**	***Total trade receivables, net***

9. SALDO SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

9. SIGNIFICANT BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Saldo-saldo signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

a. Significant balances with related parties are as follows: (continued)

	Saldo/*Balance*		Persentase terhadap total aset/liabilitas/ *Percentage of total assets/ liabilities*		
	31 Desember/*December 31,*		31 Desember/ *December 31,*		
	2016	2015	2016	2015	
Piutang lain-lain (Catatan 7)					***Other receivables (Note 7)***
PT Perkebunan Nusantara XIV	3.069.029.178	2.061.981.955	0,02%	0,02%	*PT Perkebunan Nusantara XIV*
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	3.042.546.445	-	0,02%	0,00%	*PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)*
PT Perkebunan Nusantara IX	1.850.247.145	1.969.176.776	0,01%	0,02%	*PT Perkebunan Nusantara IX*
PT Perkebunan Nusantara II	726.286.833	720.857.235	0,01%	0,01%	*PT Perkebunan Nusantara II*
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	-	1.627.129.041	0,00%	0,01%	*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta)	854.752.384	352.055.371	0,01%	0,00%	*Others (each below Rp500 million)*
Jumlah piutang lain-lain	**9.542.861.985**	**6.731.200.378**	**0,07%**	**0,05%**	***Total other receivables***
Piutang jangka panjang (Catatan 11)					***Long term receivables (Note 11)***
PT Perkebunan Nusantara XIV	**1.216.017.167.331**	**889.417.682.345**	**9,31%**	**7,22%**	*PT Perkebunan Nusantara XIV*
Investasi (Catatan 12)					***Investments (Note 12)***
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	6.884.000.000	6.884.000.000	0,05%	0,06%	*PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara*
PT Riset Perkebunan Nusantara	6.306.600.380	6.306.600.380	0,05%	0,05%	*PT Riset Perkebunan Nusantara*
Perantara Makelar Tembakau Indonesia	-	2.019.371.096	0,00%	0,02%	*Perantara Makelar Tembakau Indonesia*
Jumlah investasi	**13.190.600.380**	**15.209.971.476**	**0,10%**	**0,12%**	***Total investments***
Utang usaha (Catatan 16)					***Trade payable (Note 16)***
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik ("Perum BULOG")	**311.162.730.750**	**-**	**7,74%**	**0,00%**	*Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik ("Perum BULOG")*
Utang KKPE (Catatan 19)					***KKPE payables (Note 19)***
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	91.512.618.786	28.145.082.511	2,28%	0,92%	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)	70.078.403.326	109.463.950.524	1,74%	3,58%	*Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	52.226.574.922	35.721.873.322	1,30%	1,17%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Taspen (Persero)	14.186.478.450	-	0,35%	0,00%	*PT Taspen (Persero)*
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	12.288.000.000	-	0,31%	0,00%	*PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.796.696.956	53.077.640	0,04%	0,00%	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	315.021.641	28.541.951.700	0,01%	0,93%	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Bukopin Tbk	144.162.878	3.905.801.200	0,00%	0,13%	*PT Bank Bukopin Tbk*
Jumlah utang KKPE	**242.547.956.959**	**205.831.736.897**	**6,04%**	**6,73%**	***Total KKPE payables***
Pinjaman jangka pendek (Catatan 20)					***Short-term loans (Note 20)***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	163.372.397.219	-	4,07%	0,00%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	14.294.773.959	-	0,36%	0,00%	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Badan Usaha Milik Negara	3.600.000.000	3.600.000.000	0,09%	0,12%	*Badan Usaha Milik Negara*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	12.000.000.000	0,00%	0,39%	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Jumlah pinjaman jangka pendek	**181.267.171.178**	**15.600.000.000**	**4,51%**	**0,51%**	***Total short-term loans***
Utang lain-lain (Catatan 21)					***Other payables (Note 21)***
Dana Pensiun Perkebunan	16.727.000.258	31.663.808.552	0,42%	1,04%	*Dana Pensiun Perkebunan*
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL")	4.187.125.128		0,10%	0,00%	*Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL")*
Badan Usaha Milik Negara		1.031.940.521	0,00%	0,03%	*Badan Usaha Milik Negara*
Lembaga Pendidikan Perkebunan Yogyakarta	630.704.967	654.764.967	0,02%	0,02%	*Lembaga Pendidikan Perkebunan Yogyakarta*
Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia	851.437.443	669.474.500	0,02%	0,02%	*Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia*
PT Perkebunan Nusantara XI	568.436.787	152.028.850	0,01%	0,00%	*PT Perkebunan Nusantara XI*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta)	129.017.315	65.831.686	0,00%	0,00%	*Others (each below Rp500 million)*
Jumlah utang lain-lain	**23.093.721.898**	**34.237.849.076**	**0,57%**	**1,12%**	***Total other payables***
Pinjaman jangka panjang (Catatan 22)					***Long-term loans (Note 22)***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.274.087.000.000	815.004.691.969	31,71%	26,66%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	50.000.000.000	-	1,24%	0,00%	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Mandiri	42.667.543.759	39.793.952.332	1,06%	1,30%	*PT Bank Syariah Mandiri*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8.655.028.959	-	0,22%	0,00%	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Jumlah pinjaman jangka panjang	**1.375.409.572.718**	**854.798.644.301**	**34,23%**	**27,96%**	***Total long-term loans***

9. SALDO SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Transaksi dengan pihak berelasi yang melebihi masing-masing Rp1 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

9. SIGNIFICANT BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

b. Significant transactions with related parties are as follows:

Transactions with related parties above Rp1 billion each for the years ended December 31, 2016 and 2015 are as follows:

	Saldo/*Balance*		Persentase terhadap total pendapatan/ beban terkait/ *Percentage to related total income/ expenses*		
	31 Desember/*December 31,*		31 Desember/ *December 31,*		
	2016	2015	2016	2015	
Pendapatan/penjualan					***Revenue/sales***
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik ("Perum BULOG")	621.056.437.817	-	27,48%	0,00%	*Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik ("Perum BULOG")*
PT Perkebunan Nusantara XIV	2.962.400.000	-	0,13%	0,00%	*PT Perkebunan Nusantara XI*
PT Pupuk Kujang	1.053.000.000	-	0,05%	0,00%	*PT Pupuk Kujang*
PT Perkebunan Nusantara IX	-	5.959.916.100	0,00%	0,24%	*PT Perkebunan Nusantara IX*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-	2.212.738.869	0,00%	0,09%	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	-	1.117.963.092	0,00%	0,04%	*PT Telekomunikasi Indonesia Tbk*
Jumlah pendapatan/penjualan	**625.071.837.817**	**9.290.618.061**	**27,65%**	**0,37%**	***Total revenus/sales***
Pendapatan operasi lain					***Other operating income***
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	3.042.546.445	-	6,06%	0,00%	*PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)*
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	197.939.586	498.931.053	0,39%	0,79%	*PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara*
Jumlah pendapatan operasi lain	**3.240.486.031**	**498.931.053**	**6,45%**	**0,79%**	***Total other operating income***
Pembayaran dividen					***Dividend payments***
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	48.216.516.921	4.162.748.000	35,01%	3,02%	*PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*
Pemerintah Republik Indonesia	5.357.390.769	462.528.000	3,89%	0,34%	*Pemerintah Republik Indonesia*
Jumlah pembayaran dividen	**53.573.907.690**	**4.625.276.000**	**38,90%**	**3,36%**	***Total dividen payments***
Penerimaan dana Penyertaan Modal Negara ("PMN")	**-**	**975.000.000.000**	**0,00%**	**38,51%**	*The receipt of state capital investment ("PMN")*
Iuran Dana Pensiun	**21.275.035.878**	**11.830.486.809**	**0,92%**	**0,53%**	*Pension contributions*
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS")	**13.872.657.075**	**15.721.464.670**	**0,60%**	**0,72%**	*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") contributions*
Biaya tunjangan sosial					***Social benefits expenses***
Lembaga Pendidikan Perkebunan	**1.149.155.809**	**2.284.767.181**	**0,05%**	**0,10%**	*Lembaga Pendidikan Perkebunan*

c. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah remunerasi yang diterima Dewan Komisaris untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp3.409.608.679 dan Rp2.459.793.780.

Jumlah remunerasi yang diterima Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp7.001.969.850 dan Rp5.405.174.440.

c. Remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors

Total remuneration received by the Board of Commissioners for the years ended December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp3,409,608,679 and Rp2,459,793,780, respectively.

Total remuneration received by the Board of Directors for the years ended December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp7,001,969,850 and Rp5,405,174,440, respectively.

9. SALDO SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian pihak berelasi, sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

9. SIGNIFICANT BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

The details of related parties, nature of relationship and types of significant transactions with related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi / ***Related parties***	**Sifat hubungan /** ***Type of relationship***	**Jenis transaksi /** ***Nature of transactions***
PT Perkebunan Nusantara I	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ *Controlled by the PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) / *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara II	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ *Controlled by the PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) / *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Pemegang saham Perusahaan/ Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Shareholder of the Company/ Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) / *Sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara IV	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ *Controlled by the PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) / *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara V	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ *Controlled by the PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) / *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara VI	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ *Controlled by the PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) / *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara VII	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ *Controlled by the PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) / *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara VIII	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ *Controlled by the PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) / *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara IX	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ *Controlled by the PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) / *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara XI	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ *Controlled by the PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) / *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara XII	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ *Controlled by the PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) / *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*

9. SALDO SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian pihak berelasi, sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

9. SIGNIFICANT BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

The details of related parties, nature of relationship and types of significant transactions with related parties are as follows: (continued)

Pihak-pihak berelasi / ***Related parties***	**Sifat hubungan /** ***Type of transaction***	**Jenis transaksi /** ***Nature of transactions***
PT Perkebunan Nusantara XIII	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ *Controlled by the PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) / *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Perkebunan Nusantara XIV	Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ *Controlled by the PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*	Biaya pengobatan dan pembebanan biaya bersama (biaya rapat, biaya koordinasi, dsb.) / *Medical costs and sharing costs (meeting expenses, coordination expenses, etc.)*
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	Investasi saham/ *Investment in shares*	Jasa pemasaran dan investasi saham/ *Marketing services and shares investment*
PT Riset Perkebunan Nusantara	Investasi saham/ *Investment in shares*	-
Perantara Makelar Tembakau Indonesia	Entitas Asosiasi/ *Associates*	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan giro dan deposito, bunga atas deposito, fasilitas kredit modal kerja dan investasi, dan kredit ketahanan pangan dan energi/ *Placement of current accounts and deposits, interest on deposits, credit facilities for working capital and investment, and food security and energy credit*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan giro dan deposito, bunga atas deposito, fasilitas kredit modal kerja dan investasi, dan kredit ketahanan pangan dan energi/ *Placement of current accounts and deposits, interest on deposits, credit facilities for working capital and investment, and food security and energy credit*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan giro dan deposito, bunga atas deposito, fasilitas kredit modal kerja dan investasi, dan kredit ketahanan pangan dan energi/ *Placement of current accounts and deposits, interest on deposits, credit facilities for working capital and investment, and food security and energy credit*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur/ *Controlled by Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur*	Penempatan giro dan kredit ketahanan pangan dan energi/ *Placement of current accounts and food security and energy credit*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Biaya pengobatan / *Medical costs*
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Biaya pengobatan / *Medical costs*
PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Klaim asuransi kesehatan/ *Health insurance claim*

9. SALDO SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian pihak berelasi, sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

9. SIGNIFICANT BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

The details of related parties, nature of relationship and types of significant transactions with related parties are as follows: (continued)

Pihak-pihak berelasi / ***Related parties***	**Sifat hubungan /** ***Type of transaction***	**Jenis transaksi /** ***Nature of transactions***
PT Bank Syariah Mandiri	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Fasilitas kredit investasi / *Investment credit facility*
PT Pupuk Kujang	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Penjualan karung/ *Sale of plastic bags*
Program Kemitraan Bina Lingkungan	Unit Perusahaan/ *the Company's unit*	Penyaluran dana modal kerja ke petani tebu/ *Distribution of working capital to sugarcane farmers*
Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik ("Perum BULOG")	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Kerjasama importasi raw sugar, pengolahan raw sugar, distribusi dan penjualan gula/ *Cooperation in importation of raw sugar, processing of raw sugar, distribution and sale of sugar*
PT Taspen (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Penyaluran dana modal kerja ke petani tebu/ *Distribution of working capital to sugarcane farmers*
PT Asuransi Jiwasraya	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Penyaluran dana modal kerja ke petani tebu/ *Distribution of working capital to sugarcane farmers*
Dana Pensiun Perkebunan	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Pengelola dana pensiun karyawan/ *Management of pensioun fund of the employees*
LPP (Lembaga Pendidikan Perkebunan)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Pendidikan dan pelatihan/ *Education and training*
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan/ *Heath and social security program*
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia*	Penjualan gula/ *Sale of sugar*

10. PERSEDIAAN / *10. INVENTORIES*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Barang jadi:			*Finished goods:*
Gula	352.188.294.280	63.095.794.331	*Sugar*
Tetes	18.237.397.797	7.978.725.546	*Molasses*
Okra	11.306.942.065	3.845.282.882	*Okra*
Karung	8.183.415.798	7.150.715.179	*Plastic bags*
Edamame	4.089.595.356	9.257.952.213	*Edamame*
Buncis	3.594.955.456	2.465.938.313	*Bean*
Bioethanol	725.736.049	41.534.505.579	*Bioethanol*
Tembakau	-	2.720.326.751	*Tobacco*
Lain-lain	4.349.002.697	505.778.539	*Others*
Barang dalam proses:			*Work in process:*
Tembakau	312.977.836.895	266.743.378.672	*Tobacco*
Karung	13.857.954.812	17.770.817.613	*Plasctic bag*
Gula sisan	12.696.315.290	16.941.680.055	*Sisan sugar*
Bahan baku	8.422.969.975	7.715.895.733	*Raw materials*
Bahan pembantu	63.712.689.007	80.178.418.316	*Supporting materials*
Tanaman tebu	63.661.355.973	68.844.510.587	*Sugarcane crop*
Barang dalam perjalanan	15.622.158.170	-	*Good in transit*
Tanaman edamame dan okra	13.133.626.371	20.595.555.820	*Edamame and okra crop*
Jumlah	906.760.245.991	617.345.276.129	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(779.562.517)	(21.748.015.096)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah persediaan, neto	**905.980.683.474**	**595.597.261.033**	***Total inventories, net***

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

Movements of allowance for impairment of inventories is as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Saldo awal	21.748.015.096	779.562.517	*Beginning balance*
Penambahan (pemulihan) tahun berjalan	(20.968.452.579)	20.968.452.579	*Addition (recovery) during the year*
Saldo akhir	**779.562.517**	**21.748.015.096**	***Ending balance***

Pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai persediaan pada tahun 2016 sebesar Rp20.968.452.579 terjadi di PT Energi Agro Nusantara, Entitas Anak, karena persediaan yang disisihkan tersebut telah seluruhnya dijual.

The recovery of allowance for impairment losses in 2016 amounting to Rp20,968,452,579 occured at PT Energi Agro Nusantara, a Subsidiary, because the reserved inventories have been entirely sold.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian dari penurunan nilai persediaan.

Management believes that the allowances for impairment losses is adequate to cover possible losses from impairment in value of inventory.

10. PERSEDIAAN (lanjutan)

Seluruh persediaan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Tania Tbk terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp1 triliun dan Rp937 milyar pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang mungkin dialami Kelompok Usaha.

Persediaan tertentu digunakan sebagai jaminan pinjaman jangka pendek (Catatan 20) dan pinjaman jangka panjang (Catatan 22).

10. INVENTORIES (continued)

All inventories are insured by PT Asuransi Jasa Tania Tbk against fire and other risks with coverage amounting to Rp1 trillion and Rp937 billion as of December 31, 2016 and 2015, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the possible risks experienced by the Group.

Certain inventories are used as collateral for short-term loans (Note 20) and long-term loans (Note 22).

11. PIUTANG PIHAK BERELASI JANGKA PANJANG

11. LONG-TERM RECEIVABLES FROM RELATED PARTY

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
PT Perkebunan Nusantara XIV	1.216.017.167.331	889.417.682.345	*PT Perkebunan Nusantara XIV*

Piutang PT Perkebunan Nusantara XIV merupakan pengeluaran Perusahaan dalam rangka penyelamatan PT Perkebunan Nusantara XIV dari kerugian usaha Pabrik Gula Bone, Caming dan Takalar (BCT) sesuai dengan penugasan dari Menteri BUMN berdasarkan surat No. S-549/MBU/2009 tanggal 31 Juli 2009 dan Surat Deputi Bidang Agro Industri S-187/MBU/2009 tanggal 12 Agustus 2009 serta No. S-653/MBU/2011 tanggal 7 Desember 2011. Termasuk dalam saldo piutang tersebut adalah pinjaman novasi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dilakukan pada saat penyerahan BCT kepada Perusahaan. Piutang kepada PT Perkebunan Nusantara XIV dikenakan bunga sebesar 8,9% per tahun.

Receivables from PT Perkebunan Nusantara XIV represent cost incurred by the Company in relation to taking care PT Perkebunan Nusantara XIV of Bone, Caming and Takalar (BCT) Sugar Factory operating loss in accordance with the assignment from the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) based on letter No. S-549/MBU/2009 dated July 31, 2009 and the Letter of Deputy Agro Industries S-187/MBU/2009 dated August 12, 2009 and No. S-653/MBU/2011 dated December 7, 2011. Included in the receivables balance is loan novation from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk during transfer of BCT to the Company. Receivables from PT Perkebunan Nusantara XIV bears interest at 8.9% per year.

12. INVESTASI SAHAM

12. INVESTMENT IN SHARES

Entitas/ *Entities*	Aktivitas utama/ *Main business*	Tempat kedudukan/ *Location*	Persentase kepemilikan/ *Ownership percentage* 2016	2015	Jumlah/ *Total* 2016	2015
Metode Perolehan/*Cost method*						
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	Pemasaran/ *Marketing*	Jakarta	7,14%	7,14%	6.884.000.000	6.884.000.000
PT Riset Perkebunan Nusantara	Riset penelitian dan pengembangan/ *Research and development*	Bogor	6,67%	6,67%	50.000.000	50.000.000
Perantara Makelar Tembakau Indonesia	Pemasaran/ *Marketing*	Jerman/ *Germany*	24,53%	24,53%	-	2.019.371.096
Sub-total					6.934.000.000	8.953.371.096
Uang muka investasi saham/ *Advance in share investments*						
PT Riset Perkebunan Nusantara					6.256.600.380	6.256.600.380
Jumlah/Total					**13.190.600.380**	**15.209.971.476**

- PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara ("KPBN")

  Pada tahun 2009, Perusahaan melakukan investasi saham pada KPBN sebanyak 1.000 lembar saham dengan persentase kepemilikan sebesar 6,67%. Pada tahun 2011, investasi Perusahaan bertambah sebanyak 5.884 saham, sehingga jumlah sahamnya menjadi sebanyak 6.884 saham dengan persentase kepemilikan menjadi sebesar 7,14% dan dengan nilai sebesar Rp6.884.000.000. Pada tahun 2016 dan 2015, Perusahaan memperoleh penghasilan dividen atas pembagian laba KPBN per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp197.939.586 dan Rp498.931.053.

- *PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara ("KPBN")*

  In 2009, the Company acquired 1,000 shares of KPBN with ownership of 6.67%. In 2011, the Company's investments increased by 5,884 shares, so the number of shares became 6,884 shares representing ownership of 7.14% and value of Rp6,884,000,000. In 2016 and 2015, the Company received dividend income as of December 31, 2016 and 2015 amounting to Rp197,939,586 and Rp498,931,053, respectively.

- PT Riset Perkebunan Nusantara ("RPN")

  Pada tahun 2009, Perusahaan melakukan investasi saham pada RPN sebanyak 50 lembar saham dan dengan nilai sebesar Rp50.000.000 dan dengan persentase kepemilikan sebesar 6,67%. Pada tahun 2012, Perusahaan melakukan penyetoran modal sebesar Rp6.256.600.380 dan dicatat sebagai uang muka investasi saham.

- *PT Riset Perkebunan Nusantara ("RPN")*

  In 2009, the Company invested in RPN of 50 shares amounting to Rp50,000,000 with ownership of 6.67%. In 2012, the Company injected capital amounting to Rp6,256,600,380 and recorded as advance payment for shares investment.

- Perantara Makelar Tembakau

  Pada tahun 1996, Perusahaan melakukan investasi saham pada Perantara Makelar Tembakau sebanyak 75.000 lembar saham dengan total nilai sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp2.019.371.096 dengan persentase kepemilikan saham 24,53%. Pada tahun 2016, Perusahaan memutuskan untuk menghapus investasi saham tersebut karena terdapat keraguan yang signifikan terhadap kelangsungan usahanya.

- *Perantara Makelar Tembakau*

  In 1996, the Company made shares investment in Perantara Makelar Tembakau by 75,000 shares with a total value as of December 31, 2015 amounting to Rp2,019,371,096 with a percentage ownership of 24.53%. In 2016, the Company decided to write-off the shares investment because of significant doubts about its going concern.

13. ASET TANAMAN MENGHASILKAN

a. Tanaman semusim

Tanaman semusim adalah beban yang telah dikeluarkan yang akan menjadi beban produksi tanaman tebu giling dan tembakau pada 2 sampai dengan 4 tahun yang akan datang, yang terdiri dari:

13. MATURE PLANT ASSETS

a. Annual crops

Annual crops represent cost incurred that will become cost of milled sugarcane and tobacco cost production in 2 to 4 years, which consist of:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Beban Produksi Gula	20.839.020.103	17.380.351.324	*Sugar production expenses*
Beban Produksi Tembakau	10.326.967.434	9.117.721.513	*Tobacco production expenses*
Jumlah aset tanaman semusim	**31.165.987.537**	**26.498.072.837**	***Total annual crops assets***

Beban tersebut meliputi beban tanaman semusim tanaman tebu sendiri di sebelas pabrik gula milik Perusahaan yang tersebar di daerah Sidoarjo, Mojokerto, Kediri, Jombang dan Tulungagung serta tembakau di Jember dan Klaten.

These expenses include cost of annual crops assets of sugarcane crop at eleven sugar factory located in Sidoarjo, Mojokerto, Kediri, Jombang and Tulungagung and tobacco in Jember and Klaten.

b. Tanaman produktif

Tanaman produktif adalah tanaman kakao yang berada di Kebun Kertosari, Jember.

b. Bearer plants

Bearer plants are cocoa plants located in Kertosari Plantation, Jember.

Perubahan di tahun 2016	**Saldo awal 1 Jan. 2016/ *Beginning balance Jan. 1, 2016***	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassifications***	**Saldo akhir 31 Des. 2016/ *Ending balance Dec. 31, 2016***	***2016 Movements***
Nilai perolehan	551.368.904	-	-	-	551.368.904	*Acquisition cost*
Akumulasi penyusutan	(521.301.383)	(10.246.946)	-	-	(531.548.329)	*Accumulated depreciation*
Nilai buku	**30.067.521**				**19.820.575**	***Net book value***

Perubahan di tahun 2015	**Saldo awal 1 Jan. 2015/ *Beginning balance Jan. 1, 2015***	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassifications***	**Saldo akhir 31 Des. 2015/ *Ending balance Dec. 31, 2015***	***2015 Movements***
Nilai perolehan	551.368.904	-	-	-	551.368.904	*Acquisition cost*
Akumulasi penyusutan	(487.569.815)	(33.731.568)	-	-	(521.301.383)	*Accumulated depreciation*
Nilai buku	**63.799.089**				**30.067.521**	***Net book value***

14. ASET TETAP / *14. FIXED ASSETS*

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016/ *Year ended December 31, 2016*

Mutasi 2016	Saldo 1 Januari 2016/ *Balance January 1, 2016*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Pemindahan/ *Transfers*	Saldo 31 Desember 2016/ *Balance December 31, 2016*	*2016 Movements*
Biaya Perolehan						***Cost***
Tanah	7.236.086.378.620	-	-	-	7.236.086.378.620	*Land*
Bangunan	341.473.142.331	47.421.140.587	-	3.601.988.302	392.496.271.220	*Building*
Mesin dan instalasi	2.631.603.772.571	151.896.786.237	-	7.333.240.504	2.790.833.799.312	*Machinery and installation*
Jalan, jembatan dan saluran air	36.419.784.148	17.449.615.602	-	-	53.869.399.750	*Roads, bridges and culvert*
Alat pengangkutan	65.641.113.183	2.899.570.458	(153.825.000)	856.200.000	69.243.058.641	*Transportations equipment*
Alat pertanian	60.707.538.007	2.343.283.635	-	-	63.050.821.642	*Agricultural equipment*
Peralatan kantor dan lainnya	117.904.933.740	53.971.721.976	-	-	171.876.655.716	*Office equipment and others*
	10.489.836.662.600	275.982.118.495	(153.825.000)	11.791.428.806	10.777.456.384.901	
Pekerjaan dalam pelaksanaan	23.901.104.628	94.448.651.049	-	(11.791.428.806)	106.558.326.871	*Construction in progress*
	10.513.737.767.228	**370.430.769.544**	**(153.825.000)**	**-**	**10.884.014.711.772**	
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Bangunan	126.932.889.704	34.104.317.501	-	-	161.037.207.205	*Building*
Mesin dan instalasi	1.517.779.630.653	144.484.438.381	-	-	1.662.264.069.034	*Machinery and installation*
Jalan, jembatan dan saluran air	14.305.490.673	5.989.836.530	-	-	20.295.327.203	*Roads, bridges and culvert*
Alat pengangkutan	54.460.548.507	4.184.047.562	(153.825.000)	-	58.490.771.069	*Transportations equipment*
Alat pertanian	39.899.855.073	3.040.400.642	-	-	42.940.255.715	*Agricultural equipment*
Peralatan kantor dan lainnya	80.436.385.692	34.349.920.587	-	-	114.786.306.279	*Office equipment and others*
	1.833.814.800.302	**226.152.961.203**	**(153.825.000)**	**-**	**2.059.813.936.505**	
Nilai buku	**8.679.922.966.926**				**8.824.200.775.267**	***Net book value***

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015/ *Year ended December 31, 2015*

Mutasi 2015	Saldo 1 Januari 2015/ *Balance January 1, 2015*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Pemindahan/ *Transfers*	Saldo 31 Desember 2015/ *Balance December 31, 2015*	*2015 Movements*
Biaya Perolehan						***Cost***
Tanah	85.078.258.688	7.151.008.119.932	-	-	7.236.086.378.620	*Land*
Bangunan	280.985.488.213	54.071.759.863	(2.376.983.113)	8.792.877.368	341.473.142.331	*Building*
Mesin dan instalasi	2.340.705.800.088	133.635.673.734	-	157.262.298.749	2.631.603.772.571	*Machinery and installation*
Jalan, jembatan dan saluran air	31.718.708.565	4.701.075.583	-	-	36.419.784.148	*Roads, bridges and culvert*
Alat pengangkutan	63.558.841.031	2.082.272.152	-	-	65.641.113.183	*Transportations equipment*
Alat pertanian	53.771.456.853	6.936.081.154	-	-	60.707.538.007	*Agricultural equipment*
Peralatan kantor dan lainnya	97.815.769.637	20.021.164.103	-	68.000.000	117.904.933.740	*Office equipment and others*
	2.953.634.323.075	7.372.456.146.521	(2.376.983.113)	166.123.176.117	10.489.836.662.600	
Pekerjaan dalam pelaksanaan	184.527.868.675	5.547.839.570	(51.427.500)	(166.123.176.117)	23.901.104.628	*Construction in progress*
	3.138.162.191.750	**7.378.003.986.091**	**(2.428.410.613)**	**-**	**10.513.737.767.228**	
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Bangunan	110.605.025.843	18.404.399.993	(2.076.536.132)	-	126.932.889.704	*Building*
Mesin dan instalasi	1.344.453.660.019	173.325.970.634	-	-	1.517.779.630.653	*Machinery and installation*
Jalan, jembatan dan saluran air	12.308.544.180	1.996.946.493	-	-	14.305.490.673	*Roads, bridges and culvert*
Alat pengangkutan	48.765.767.608	5.694.780.899	-	-	54.460.548.507	*Transportations equipment*
Alat pertanian	34.219.661.628	5.680.193.445	-	-	39.899.855.073	*Agricultural equipment*
Peralatan kantor dan lainnya	71.471.057.767	8.965.327.925	-	-	80.436.385.692	*Office equipment and others*
	1.621.823.717.045	**214.067.619.389**	**(2.076.536.132)**	**-**	**1.833.814.800.302**	
Nilai buku	**1.516.338.474.705**				**8.679.922.966.926**	***Net book value***

Penambahan aset tetap pada tahun 2016 sebesar Rp370.430.769.544 terdiri dari Rp300.346.237.089 dan Rp70.084.532.455 masing-masing pada aset tetap Perusahaan dan Entitas Anak.

Addition of fixed assets in 2016 amounting to Rp370,430,769,544 consists of Rp300,346,237,089 and Rp70,084,532,455 in the fixed assets of the Company and Subsidiaries, respectively.

Penambahan aset tetap pada tahun 2015, termasuk surplus revaluasi aset tetap tanah sebesar Rp7.089.970.503.561 dan Rp42.347.366.371 masing-masing pada aset tetap tanah Perusahaan dan Entitas Anak.

Addition of fixed assets in 2015, includes the revaluation surplus of land amounting to Rp7,089,970,503,561 and Rp42,347,366,371 in the fixed assets land of the Company and Subsidiaries, respectively.

14. ASET TETAP (lanjutan)

Aset dalam pelaksanaan pada tanggal 31 Desember 2016 sebagian besar merupakan mesin dan peralatan untuk inspeksi dengan tingkat penyelesaian sebesar 30% - 93%. Proyek-proyek ini diharapkan dapat diselesaikan di tahun 2017.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada perolehan aset tetap adalah sebesar Rp216.328.366 dan Rp2.049.727.250 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Pada tahun 2016, PT Dasaplast Nusantara menjual kendaraan dengan nilai buku RpNihil dan dengan harga jual Rp82.272.727. Laba atas penjualan aset tersebut dicatat sebagai bagian dari pendapatan operasi lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2016.

Selama tahun 2016 dan 2015, Perusahaan tidak memiliki aset yang masih belum digunakan sementara dan aset tetap yang dihentikan penggunaannya.

Revaluasi aset tetap tanah dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Antonius Setiady dan Rekan, KJPP Toha, Okky, Heru dan Rekan, KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan, KJPP Rengganis, Hamid dan Rekan, KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan dan KJPP Herly, Ariawan & Rekan.

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam revaluasi ini adalah pendekatan pasar.

Jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan dalam usaha pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

14. FIXED ASSETS (continued)

Construction in progress on December 31, 2016 moslty represents machinery and equipment with percentage completion of 30% - 93%. These projects are expected to be completed in 2017.

Total borrowing cost capitalized to the acquisition of fixed assets amounted to Rp216,328,366 and Rp2,049,727,250, for the years ended December 31, 2016 and 2015, respectively.

In 2016, PT Dasaplast Nusantara sell vehicles with net book value of RpNil and with proceeds of Rp82,272,727. Gain on sale of assets recorded as part of other operating income in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income year 2016.

During 2016 and 2015, the Company did not have assets that are temporary unused and fixed assets that were discontinued its use.

Revaluation of land carried out by the Public Appraisal Service Office ("KJPP") Antonius Setiady and Partners, KJPP Toha, Okky, Heru and Partners, KJPP Abdullah Fitriantoro and Partners, KJPP Rengganis, Hamid and Partners, KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Hanz and Partners, KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori & Partners and KJPP Herly, Ariawan & Partners.

The valuation approach used in the assessment of this revaluation is market approach.

Gross carrying amount of fixed assets which are fully depreciated but still used in operations as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ ***Year ended December 31,***		
	2016	**2015**	
Bangunan	53.085.234.625	45.611.808.861	*Buildings*
Mesin	1.139.383.932.923	861.439.873.038	*Machinery*
Jalan dan jembatan	6.420.010.496	5.892.478.966	*Roads and bridges*
Alat pengangkutan	45.610.079.210	40.350.266.101	*Transportations equipment*
Alat pertanian	48.621.213.209	22.611.148.104	*Agricultural equipment*
Peralatan kantor	64.127.376.164	53.906.010.737	*Office equipment*
Jumlah	**1.357.247.846.627**	**1.029.811.585.807**	***Total***

14. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, bangunan, mesin dan peralatan dan kendaraan tertentu telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Tania Tbk, PT Astra Buana Asuransi, PT Jasaraharja Putera, PT Ace Jaya Proteksi, dan PT Asuransi Jasa Indonesia terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan paket polis tertentu dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp1,1 triliun dan Rp1,9 triliun. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan tersebut.

Aset tetap tertentu digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Indonesia Eximbank (Catatan 22).

Beban penyusutan dibebankan ke akun sebagai berikut:

14. FIXED ASSETS (continued)

As of December 31, 2016 and 2015, buildings, machinery and equipment and certain vehicles are insured with PT Asuransi Jasa Tania Tbk, PT Astra Buana Asuransi, PT Jasaraharja Putera, PT Ace Jaya Proteksi, and PT Asuransi Jasa Indonesia against fire and other risks based on certain policies package with total coverage amounting to Rp1.1 trillion and Rp1.9 trillion, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Certain fixed assets used as collateral for bank loans obtained from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and Indonesia Eximbank (Note 22).

Depreciation expenses charged to the account as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2016	**2015**	
Beban pokok pendapatan (Catatan 30)	204.123.650.142	190.412.087.787	*Cost of sales (Note 30)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 31)	22.029.311.061	23.655.531.602	*General and administrative expenses (Note 31)*
Jumlah	**226.152.961.203**	**214.067.619.389**	***Total***

Aset Pengampunan Pajak

Pada 2016, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-undang pengampunan pajak No. 11/2016 yang merupakan pengampunan pajak, sanksi administrasi, dan sangsi pidana pajak dengan membayar uang tebusan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini.

Pengampunan pajak diberikan kepada kewajiban pajak yang belum dibayar atau dilunasi oleh wajib pajak sampai dengan tahun pajak terbaru (yang berakhir pada tanggal 1 Januari - 31 Desember 2015) melalui Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak mencakup pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan pajak penjualan barang mewah.

Tax Amnesty Assets

In 2016, the Goverment of the Republic of Indonesia issued tax amnesty Law No. 11/2016 which represents a waiver of tax due, administration sanctions, and tax crime sanctions which can be granted by paying redemption money as stipulated in this law.

The tax amnesty is granted on tax obligation which has not been paid or fully settled by taxpayers up to the latest fiscal year (which ended within January 1 - December 31, 2015) through assets declared using the Asset Declaration Letter for Tax Amnesty. The scope of this Tax Amnesty covers Income Tax, Value Added Tax ("VAT") and Luxury-goods Sales Tax.

14. ASET TETAP (lanjutan)

PT Mitratani Dua Tujuh, Entitas Anak, menyampaikan surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak tanggal 28 September 2016 terkait dengan pengampunan pajak. Aset pengampunan pajak yang dilaporkan berupa mesin sebesar Rp4.059.926.900 dikurangi dengan liabilitas pengampunan pajak sebesar Rp3.044.944.925, dengan nilai tebusan sebesar Rp20.299.640. PT Mitratani Dua Tujuh melaporkan liabilitas pengampunan pajak sebesar 75% dari aset pengampunan pajak.

Aset dan liabilitas pengampunan pajak masing-masing dicatat sebagai "Aset Pengampunan Pajak, neto" dan "Liabilitas pengampunan pajak" pada laporan posisi keuangan konsolidasian 2016. Aset pengampunan pajak dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan depresiasi tahun berjalan. Selisih antara harga perolehan aset pengampunan pajak dengan liabilitas pengampunan pajak dicatat sebagai bagian dari "Komponen ekuitas lainnya".

Saldo aset pengampunan pajak adalah sebagai berikut:

14. FIXED ASSETS (continued)

PT Mitratani Dua Tujuh, a Subsidiary, based on a letter dated September 28, 2016, has submitted an application regarding the tax amnesty. Reported tax amnesty assets in the form of machineries amounting to Rp4,059,926,000 less tax amnesty liabilities amounting to Rp3,044,944,925, with a redemption value of Rp20,299,640. PT Mitratani Dua Tujuh reported liability of tax amnesty amounting to 75% from tax amnesty assets.

Assets and liabilities of tax amnesty recorded as "Tax amnesty assets, net" and "Tax amnesty liability", respectively, in the consolidated statement of financial position 2016. Tax amnesty assets are recorded at cost less depreciation of the year. The difference between the acquisition price of tax amnesty assets and tax amnesty liabilities is recorded as part of "Other component of equity".

The balance of tax amnesty assets are as follow:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Harga perolehan	4.059.927.900	-	*Acquisition cost*
Akumulasi penyusutan	(1.409.697.189)	-	*Accumulated depreciation*
Jumlah	**2.650.230.711**	**-**	***Total***

Beban penyusutan aset pengampunan pajak sebesar Rp1.409.697.189 pada tahun 2016 dibebankan ke akun beban pokok pendapatan (Catatan 30).

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Depreciation expense of tax amnesty assets amounting to Rp1,409,697,189 in 2016 charged to cost of sales (Note 30).

Management believes that there are no events or changes in circumstances that may indicate impairment in the value of fixed assets as of December 31, 2016 and 2015.

15. ASET TAKBERWUJUD / *15. INTANGIBLE ASSETS*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Beban pendirian	55.148.226.625	54.476.944.234	*Establishment cost*
Perangkat lunak	16.294.535.744	9.140.446.493	*Software*
Goodwill	7.556.310.000	7.556.310.000	*Goodwill*
Hak atas tanah	7.465.253.493	6.718.798.730	*Landrights*
Sub jumlah	86.464.325.862	77.892.499.457	*Sub total*
Akumulasi amortisasi	(29.981.720.539)	(27.557.913.130)	*Accumulated amortization*
Jumlah aset takberwujud, neto	**56.482.605.323**	**50.334.586.327**	***Total intangible assets, net***

Termasuk dalam beban pendirian terutama pembayaran royalti kepada Marubeni Corporation, Tokyo, Jepang sesuai dengan *license agreement* tanggal 13 Oktober 2013 sebesar ¥270.000.000 atau setara dengan Rp28.368.900.000 terkait dengan pembangunan pabrik *bioethanol* di Gempolkrep, Mojokerto, Jawa Timur dan perijinan usaha kompos sebesar Rp1.588.235.344.

Included in establishment cost mainly a royalty payments to Marubeni Corporation, Tokyo, Japan in accordance with the license agreement dated October 13, 2013 amounted to ¥270,000,000 or equivalent to Rp28,368,900,000 related to the construction of bioethanol plant in Gempolkrep, Mojokerto, East Java and compost business licenses amounted to Rp1,588,235,344.

Goodwill merupakan selisih antara harga perolehan dan nilai pasar pada saat Perusahaan mengakuisisi saham milik PT Mitratani Dua Tujuh pada tahun 2014.

Goodwill represents the difference between the acquisition cost and the market value at the time the Company acquired the shares of PT Mitratani Dua Tujuh in 2014.

Perangkat lunak merupakan beban terkait dengan pembelian perangkat lunak di sehubungan dengan implementasi SAP di Perusahaan.

Software is the expenses associated with purchasing software in connection with the implementation of SAP.

Hak atas tanah, merupakan biaya perpanjangan sertifikat Tanah HGU yang diamortisasi selama 20 tahun.

Landrights is a renewal fee of HGU Land amortized during 20 years.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Management believes that there are no events or changes in circumstances that may indicate impairment in the value of intangible assets as of December 31, 2016 and 2015.

16. UTANG USAHA / *16. TRADE PAYABLES*

a. Berdasarkan pemasok / *a. Based on suppliers*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Pihak berelasi (Catatan 9)	311.162.730.750	-	***A related party*** *(Note 9)*
Pihak ketiga:			***Third parties:***
CV Tri Karya	27.873.171.164	8.037.741.859	*CV Tri Karya*
PT Dirgantara Surya Persada	8.944.103.993	-	*PT Dirgantara Surya Persada*
PT Verona Multikimia Abadi	6.903.123.641	124.208.000	*PT Verona Multikimia Abadi*
PT Bukit Megamas Abadi	6.004.572.700	971.828.000	*PT Bukit Megamas Abadi*
PT Artoda Bersaudara	5.143.640.508	179.225.400	*PT Artoda Bersaudara*
PT Barata Indonesia	4.003.044.195	2.015.792.444	*PT Barata Indonesia*
CV Adi Graha	3.613.043.900	86.000.000	*CV Adi Graha*
CV Lontar Jaya	3.479.394.310	4.891.103.031	*CV Lontar Jaya*
PT Anugrah Mitra Jaya	3.342.335.410	3.485.048.493	*PT Anugrah Mitra Jaya*
Itochu Plastics Pte. Ltd, Singapura	2.889.277.440	-	*Itochu Plastics Pte. Ltd, Singapore*
CV Jaya Utama	2.711.475.872	-	*CV Jaya Utama*
PT Candi Ngrimbi	2.621.215.704	444.177.394	*PT Candi Ngrimbi*
CV Usaha Mandiri	2.600.395.351	291.983.545	*CV Usaha Mandiri*
UD Keluarga Setia	2.533.074.850	1.255.755.043	*UD Keluarga Setia*
PT Inosco Surya Pratama	2.284.734.364	165.958.373	*PT Inosco Surya Pratama*
CV Hendra Putra Mandiri	2.092.804.392	-	*CV Hendra Putra Mandiri*
PT Guna Saudara Teknik	2.021.285.000	34.760.000	*PT Guna Saudara Teknik*
PT Multinas Indonesia	2.013.944.464	-	*PT Multinas Indonesia*
PT Watama Prima	-	2.298.478.942	*PT Watama Prima*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2 miliar)	64.438.728.932	38.188.175.043	*Others (each below Rp2 billion)*
Jumlah pihak ketiga	155.513.366.190	62.470.235.567	*Total third parties*
Jumlah	**466.676.096.940**	**62.470.235.567**	***Total***

b. Berdasarkan mata uang / *b. Based on currencies*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Rupiah	462.547.647.165	61.404.093.931	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	4.128.449.775	1.066.141.636	*United States Dollar*
Jumlah	**466.676.096.940**	**62.470.235.567**	***Total***

17. BEBAN AKRUAL DAN LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK

17. ACCRUED EXPENSES AND SHORT-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Beban akrual			***Accrued expenses***
Beban bunga obligasi	15.575.000.000	15.575.000.000	*Bond interest expense*
Beban profesional	13.234.000.000	10.730.733.460	*Professional expense*
Beban listrik, air, dan telepon	4.388.979.241	3.856.032.692	*Utilities expense*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1,5 miliar)	11.903.940.681	7.224.397.809	*Other (each below Rp1.5 billion)*
Jumlah beban akrual	45.101.919.922	37.386.163.961	*Total accrued expenses*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek			***Short-term employee benefits liabilities***
Bonus karyawan dan tantiem	5.185.122.454	59.305.963.627	*Employees' bonus and tantiem*
Jumlah beban akrual dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek	**50.287.042.376**	**96.692.127.588**	***Total accrued expenses and short-term employee benefits liabilities***

18. PERPAJAKAN

18. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Perusahaan:			*The Company:*
Pajak Pertambahan Nilai	41.477.856.407	-	*Value Added Tax*
Pajak atas surplus revaluasi aset tetap	-	30.107.688.840	*Tax on revaluation surplus of fixed assets*
Entitas anak:			*Subsidiaries:*
Pajak Pertambahan Nilai	-	845.804.810	*Value Added Tax*
Jumlah pajak dibayar dimuka	**41.477.856.407**	**30.953.493.650**	***Total prepaid taxes***

Perusahaan telah melakukan revaluasi aset tanah tertentu untuk tujuan komersial dan pajak (Catatan 14). Perusahaan telah membayar pajak atas revaluasi tersebut pada tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp30.107.688.840. Pada tahun 2016, Perusahaaan telah memperoleh persetujuan atas revaluasi aset tanah tersebut dari Direktorat Jenderal Pajak dengan nilai pajak Rp30.119.116.863, sehingga pajak atas surplus revaluasi tersebut direklasifikasi sebagai pengurang surplus revaluasi aset tetap dalam akun penghasilan komprehensif lain.

The Company has revalued certain land for commercial and tax purposes (Note 14). The Company has paid tax on the revaluation on December 30, 2015 amounting to Rp30,107,688,840. In 2016, the Company has obtained approval for the revaluation of the land assets from the Directorate General of Taxation with value of tax Rp30,119,116,863, therefore the tax on revaluatiom surplus of fixed assets has been reclassified as deduction of revaluation surplus of fixed asset in other comprehensive income account.

18. PERPAJAKAN (lanjutan) / *18. TAXATION (continued)*

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Perusahaan:			***The Company:***
Pajak penghasilan:			*Income taxes:*
Pasal 4(2)	1.435.239.841	1.283.974.490	*Article 4(2)*
Pasal 21	2.752.769.908	4.398.802.723	*Article 21*
Pasal 22	24.545.131	54.720.334	*Article 22*
Pasal 23	344.116.468	408.522.450	*Article 23*
Pasal 25	11.061.955.748	245.715.000	*Article 25*
Pasal 26	392.604.008	423.670.067	*Article 26*
Pasal 29	-	39.447.219.656	*Article 29*
Pajak Pertambahan Nilai	-	27.400.845.094	*Value Added Tax*
Pajak Pertambahan Nilai jasa giling (Catatan 18g)	-	52.932.159.554	*Value Added Tax of milling services (Note 18g)*
Sub jumlah	**16.011.231.104**	**126.595.629.368**	***Sub total***
Entitas Anak:			***Subsidiaries:***
Pajak penghasilan:			*Income taxes:*
Pasal 4(2)	405.877.961	40.000.000	*Article 4(2)*
Pasal 21	1.374.603.537	1.257.654.791	*Article 21*
Pasal 23	83.090.281	753.203.629	*Article 23*
Pasal 25	192.319.624	4.007.662	*Article 25*
Pasal 29	4.749.530.911	6.600.428.638	*Article 29*
Pajak Pertambahan Nilai	3.464.249.264	156.399.965	*Value Added Tax*
Sub jumlah	**10.269.671.578**	**8.811.694.685**	***Sub total***
Jumlah utang pajak	**26.280.902.682**	**135.407.324.053**	***Total taxes payable***

c. Beban (manfaat) pajak / *c. Tax expense (benefit)*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31* 2016	2015	
Perusahaan:			***The Company:***
Beban pajak kini	-	43.466.378.000	*Current tax expense*
Kurang bayar pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (Catatan 18g)	2.124.468.283	7.359.524.029	*Underpayment tax based on the tax assessment letter (Note 18g)*
Beban (manfaat) pajak tangguhan	(79.774.058.214)	4.005.819.218	*Deferred tax expense (benefits)*
Sub jumlah	**(77.649.589.931)**	**54.831.721.247**	***Sub total***
Entitas Anak:			***Subsidiaries:***
Beban pajak kini	18.130.208.750	18.297.239.128	*Current tax expense*
Kurang bayar pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (Catatan 18g)	122.386.000	-	*Underpayment tax based on the Tax Assessment Letter (Note 18g)*
Manfaat pajak tangguhan	(1.656.001.075)	(1.193.853.870)	*Deferred tax benefits*
Sub jumlah	**16.596.593.675**	**17.103.385.258**	***Sub total***
Jumlah beban (manfaat) pajak	**(61.052.996.256)**	**71.935.106.505**	***Total tax expense (benefit)***

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat (beban) pajak dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015:

18. TAXATION (continued)

d. Current tax

A reconciliation between profit before tax benefit (expense) and estimated taxable income for the year ended December 31, 2016 and 2015:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31*		
	2016	**2015**	
Laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan, Kelompok Usaha	(216.835.990.827)	198.363.003.172	*Profit (loss) before tax benefit (expense), Group*
Laba sebelum pajak, Entitas Anak	50.463.973.730	12.173.543.173	*Profit before tax expense, Subsidiaries*
Laba (rugi) sebelum pajak, Perusahaan	**(267.299.964.557)**	**186.189.459.999**	***Profit (loss) before tax expense, the Company***
Beda waktu:			***Temporary differences:***
Liabilitas imbalan kerja	42.846.880.264	9.994.056.581	*Employee benefits liability*
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	37.728.683.606	1.914.841.875	*Allowance for impairment losses on receivables*
Penyesuaian nilai wajar	(472.504.370)	(693.644.744)	*Fair value adjustment*
Bonus dan tantiem	-	(3.308.866.000)	*Bonus and tantiem*
Depresiasi aset tetap dan amortisasi aset takberwujud	(41.052.777.369)	(23.929.664.582)	*Fixed assets depreciation and intangible assets amortization*
Jumlah beda waktu	39.050.282.131	(16.023.276.870)	*Total temporary difference*
Beda tetap:			***Permanent difference:***
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(62.103.389.527)	(8.504.247.187)	*Income already subject to final tax*
Penghasilan dividen dari Entitas Anak	(13.537.870.300)	(5.870.425.443)	*Dividend income from Subsidiaries*
Penghasilan lain yang tidak dapat dikurangkan	-	(11.830.486.809)	*Other non-deductable income*
Beban sumbangan	4.558.878.671	6.693.186.690	*Donation expenses*
Beban pengeluaran unit	4.442.289.125	4.870.281.500	*Unit spending expenses*
Beban perjamuan	4.107.098.184	5.993.635.830	*Entertainment expenses*
Beban lain yang tidak dapat dikurangkan	10.736.725.548	12.347.384.840	*Other non-deductable expenses*
Jumlah beda tetap	(51.796.268.299)	3.699.329.421	*Total permanent differences*
Taksiran penghasilan (rugi) kena pajak - Perusahaan	(280.045.950.725)	173.865.512.550	***Estimated taxable income (loss) - the Company***
Pembulatan	(280.045.950.000)	173.865.512.000	*Rounded*
Taksiran beban pajak penghasilan - Perusahaan	**-**	**43.466.378.000**	***Estimated income tax expense - the Company***
Pajak dibayar dimuka - Perusahaan			*Prepaid taxes - the Company*
Pajak penghasilan:			*Income taxes:*
PPh 22	16.668.633.975	225.178.878	*Article 22*
PPh 23	112.731.206	351.489.057	*Article 23*
PPh 25	32.854.003.376	3.442.490.409	*Article 25*
Jumlah	49.635.368.557	4.019.158.344	*Total*
Kurang (lebih) bayar pajak penghasilan badan - Perusahaan	**(49.635.368.557)**	**39.447.219.656**	***Under (over) payment corporate income tax - the Company***

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak kini (lanjutan)

Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") Perusahaan tahun 2015 telah disampaikan ke Kantor Pajak sesuai dengan taksiran penghasilan kena pajak tahun 2015. Sampai dengan tanggal penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian, Perusahaan belum melaporkan SPT tahun 2016 kepada Kantor Pajak. Perusahaan akan melaporkan SPT tahun 2016 sesuai dengan taksiran penghasilan kena pajak tahun 2016 di atas.

Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat (beban) pajak, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku dan beban pajak, neto adalah sebagai berikut:

18. TAXATION (continued)

d. Current tax (continued)

Annual Tax Return ("SPT") of the Company for the year 2015 has been submitted to the Tax Office in accordance with the estimated taxable income for the year 2015. As of the completion date of the Consolidated Financial Statements, the Company has not reported its 2016 SPT to the Tax Office. The Company will report the 2016 SPT in accordance with the estimated taxable income for the year 2016 as above.

A reconciliation between profit before tax benefit (expense), as presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, multiplied by the applicable tax rate and income tax expense, net are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ ***Year ended December 31***		
	2016	**2015**	
Laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan, Kelompok Usaha	(216.835.990.827)	198.363.003.172	*Profit (loss) before tax benefit (expense), Group*
Laba sebelum pajak, Entitas Anak	50.463.973.730	12.173.543.173	*Profit before tax expense, Subsidiaries*
Laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak - Perusahaan	**(267.299.964.557)**	**186.189.459.999**	***Profit (loss) before tax benefit (expense) - the Company***
Pengaruh pajak atas:			*The tax effect on:*
Pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak	(66.824.991.139)	46.547.365.000	*Income tax based on tax rates*
Beda tetap dan pembulatan	(12.949.067.075)	924.832.218	*Pemanent difference and rounded*
Total beban (manfaat) pajak penghasilan - Perusahaan	(79.774.058.214)	47.472.197.218	*Total income tax expense (benefit) - the Company*
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	2.124.468.283	7.359.524.029	*Underpayment Tax Assessment Letter*
Total beban pajak penghasilan - Entitas Anak	16.596.593.675	17.103.385.258	*Total income tax expense - Subsdiaries*
Total beban (manfaat) pajak penghasilan - Kelompok Usaha	**(61.052.996.256)**	**71.935.106.505**	***Total income tax expense (benefit) - Group***

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Aset pajak tangguhan

Rincian aset pajak tangguhan Perusahaan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

18. TAXATION (continued)

e. Deferred tax assets

The details of the Company and Subsidiaries deferred tax assets are as follows:

	31 Des. 2015/ *Dec. 31, 2015*	Dibebankan ke laba rugi/ *Charged to profit or loss*	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ *Charged to other comprehensive income*	31 Des. 2016/ *Dec. 31, 2016*	
Perusahaan:					***The Company:***
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	4.557.775.263	9.432.170.902	-	13.989.946.165	*Allowance for impairment losses*
Penyisihan aset non produktif	249.561.347	-	-	249.561.347	*Allowance for non-poductive assets*
Liabilitas imbalan kerja	174.845.428.162	10.711.720.066	(6.634.346.355)	178.922.801.873	*Employee benefits liability*
Aset tetap dan aset takberwujud	17.993.517.064	(10.263.194.343)	-	7.730.322.721	*Fixed assets and Intangible assets*
Piutang jangka panjang	118.126.092	(118.126.092)	-	-	*Long-term receivables*
Penyisihan penurunan nilai persediaan	194.736.417	-	-	194.736.417	*Allowance for impairment of Inventories*
Rugi fiskal	-	70.011.487.681	-	70.011.487.681	*Losses fiscal*
Aset pajak tangguhan, neto	**197.959.144.345**	**79.774.058.214**	**(6.634.346.355)**	**271.098.856.204**	*Deferred tax assets, net*
Entitas Anak:					***Subsidiaries:***
Aset pajak tangguhan	5.711.749.645	1.656.001.075	1.001.921.569	8.369.672.289	*Deffered tax assets*
Aset pajak tangguhan, neto	**203.670.893.990**	**81.430.059.289**	**(5.632.424.786)**	**279.468.528.493**	***Deferred tax assets, net***

f. Estimasi tagihan pajak

f. Estimated claims for tax refund

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31*		
	2016	**2015**	
Perusahaan			***The Company***
2016 (Catatan 18d)	49.635.368.557	-	*2016 (Note 18d)*
2014 (Catatan 18g)	-	15.560.342.237	*2014 (Note 18g)*
Entitas Anak			***Subsidiaries***
PT Dasaplast Nusantara (Catatan 18g)	-	235.479.200	*PT Dasaplast Nusantara (Note 18g)*
PT Energi Agro Nusantara (lebih bayar pajak badan tahun 2016)	24.376.892	-	*PT Energi Agro Nusantara (overpayment of corporate tax for the year 2016)*
Jumlah estimasi piutang pajak	**49.659.745.449**	**15.795.821.437**	***Total estimated claim for tax refund***

g. Surat ketetapan pajak

Perusahaan

- Pada 5 April 2016, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (“SKPLB”) atas pajak penghasilan badan tahun 2014 sebesar Rp13.435.873.954 dari tagihan lebih bayar pajak yang diajukan oleh Perusahaan sebesar Rp15.560.342.237. Selisih sebesar Rp2.124.468.283 diakui sebagai bagian dari beban pajak kini tahun 2016.

g. Tax assessment letters

The Company

- *On April 5, 2016, the Directorate General of Taxation issued Overpayment Tax Letter (“SKPLB”) for corporate income tax year 2014 amounted to Rp13,435,873,954 out of Rp15,560,342,237 claim for tax refund filed by the Company. The remaining amount Rp2,124,468,283 is recorded as part of the current tax expense year 2016.*

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- Pada tahun 2015, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") pajak penghasilan badan tahun 2010, 2011 dan 2012 masing-masing sebesar Rp3.355.865.294, Rp3.232.662.620 dan Rp770.996.115. Seluruh kurang bayar pajak tersebut sejumlah Rp7.359.524.029 telah dibayar oleh Perusahaan dan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini tahun 2015.

- Perusahaan menerima SKPKB dan Surat Tagihan Pajak ("STP") atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ("PPN") jasa giling untuk tahun 2001, 2003 dan 2004 dengan kekurangan bayar PPN masing-masing Rp22.838.261.952, Rp43.609.222.270 dan Rp31.373.487.884. Perusahaan telah melakukan pembayaran secara bertahap dan pada tanggal 31 Desember 2015 Perusahaan masih memiliki sisa kurang bayar sebesar Rp52.932.159.554 yang dicatat sebagai "Utang pajak - Pajak Pertambahan Nilai Jasa Giling" (Catatan 18b). Atas SKPKB tersebut, juga terdapat potensi denda pajak sebesar Rp139.354.007.042 berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Pajak No. S-11960/WPJ.19/KP.03/2015 tanggal 24 November 2015.

  Pada tahun 2016, Perusahaan telah membayar utang kurang bayar atas pokok pajak sebesar Rp40.935.561.069 dan mencatat pendapatan lain-lain sebesar Rp11.996.598.485 atas selisih dengan utang yang sebelumnya dicatat (Catatan 33). Atas potensi denda pajak tidak dicatat Perusahaan karena telah mengikuti pengampunan pajak.

18. TAXATION (continued)

g. Tax assessment letters (continued)

The Company (continued)

- *In 2015, the Company received Underpayment Tax Letter ("SKPKB") for income tax years 2010, 2011 and 2012 amounting to Rp3,355,865,294, Rp3,232,662,620 and Rp770,996,115, respectively. All of those tax underpayments amounting to Rp7,359,524,029 has been paid by the Company and recorded as part of the current tax expense year 2015.*

- *The Company received SKPKB and Tax Collection Letter ("STP") for milling services Value Added Tax ("VAT") for the year 2001, 2003 and 2004 with the underpayment of VAT amounted to Rp22,838,261,952, Rp43,609,222,270 and Rp31,373,487,884, respectively. The Company has paid the underpayment by installment and as of December 31, 2015, the Company has the remaining payables of SKPKB amounting to Rp52,932,159,554 and recorded as "Tax payable - Value Added Tax for Milling Services" (Note 18b). For these SKPKB, there is also potential tax penalty amounting to Rp139,354,007,042 based on the letter of Directorate General of Taxation No. S-11960/WPJ.19/ KP.03/2015 dated November 24, 2015.*

  In 2016, the Company has paid the principal underpayment tax payables amounting to Rp40,935,561,069 and recorded other income amounting to Rp11,996,598,485 of the difference with previously payables (Note 33). The Company has not recorded the potential tax penalty since the Company filling a tax amnesty.

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

Entitas Anak

PT Dasaplast Nusantara ("Dasaplast")

- Pada 5 April 2016, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas pajak penghasilan badan tahun 2014 sebesar Rp113.093.200 dari tagihan lebih bayar pajak yang diajukan oleh Dasaplast sebesar Rp235.479.200. Selisih sebesar Rp122.386.000 diakui sebagai bagian dari beban pajak kini tahun 2016.

PT Energi Agro Nusantara ("Enero")

- Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Enero mencatat taksiran tagihan pajak - PPN bulan Juni - Desember 2014 sebesar Rp3.753.698.209. Pada tanggal 19 Juni 2015, Enero menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atas lebih bayar PPN untuk periode Juni - Agustus 2014 senilai Rp1.352.314.170. Lebih bayar tersebut telah diterima oleh Enero pada tanggal 24 Agustus 2015. Sisa sebesar Rp2.401.384.039 dicatat sebagai tagihan pajak pada tanggal 31 Desember 2015. Pada tanggal 21 Januari 2016, Enero menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atas lebih bayar PPN untuk periode September - Desember 2014 senilai Rp2.401.384.039. Lebih bayar tersebut telah diterima oleh Enero pada tanggal 26 Februari 2016.

h. Pengampunan Pajak

Perusahaan

- Pada tahun 2016, Perusahaan memutuskan untuk memanfaatkan fasilitas pengampunan pajak berdasarkan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Sehubungan dengan hal ini, Perusahaan menyampaikan surat pernyataan harta tanggal 27 September 2016 dan membayar nilai tebusan sebesar Rp436.488.826 yang dicatat sebagai bagian dari "Beban operasi lain" di Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian. Perusahaan telah menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak ("SKPP") tertanggal 11 Oktober 2016.

18. TAXATION (continued)

g. Tax assessment letters (continued)

Subsidiaries

PT Dasaplast Nusantara ("Dasaplast")

- *On April 5, 2016, the Directorate General of Taxation issued Overpayment Tax Letter for corporate income tax year 2014 amounted to Rp113,093,200 out of Rp235,479,200 claim of tax refund filed by the Dasaplast. The remaining amount Rp122,386,000 are recorded as part of the current tax expense year 2016.*

PT Energi Agro Nusantara ("Enero")

- *As at 31 December 2014, Enero recorded estimated tax bill - VAT June - December 2014 amounted to Rp3,753,698,209. On June 19, 2015, Enero received the Notice of Examination on overpayment of VAT for the period June - August 2014 worth Rp1,352,314,170. Overpayment has been received by Enero on August 24, 2015. The remaining of Rp2,401,384,039 recorded as a tax payables on December 31, 2015. On January 21, 2016, Enero received the Notice of Examination on overpayment of VAT for the period September - December 2014 worth Rp2,401,384,039. Overpayment has been received by Enero on February 26, 2016.*

h. Tax Amnesty

The Company

- *In 2016, the Company decided to utilize tax amnesty facility based on the Tax Amnesty Law. In relation to that matter, the Company has submitted an application regarding the tax amnesty dated September 27, 2016 and paid a redemption value of Rp436,488,826 which recorded as part of "Other operating expenses" in Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income. The Company has received Tax Amnesty Approval Letter ("Surat Keterangan Pengampunan Pajak - SKPP") dated October 11, 2016.*

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Pengampunan Pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Perusahaan menghapus denda pajak atas PPN Jasa Giling yang masih terutang (Catatan 18g) senilai Rp11.996.598.485 dan menyajikan penghapusan tersebut sebagai bagian dari "Pendapatan operasi lain" dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (Catatan 33). Penghapusan ini dibukukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak KPP Wajib Pajak Besar III pada tanggal 28 Februari 2017.

Entitas Anak

PT Nusantara Medika Utama ("NMU")

- Pada tahun 2016, NMU memutuskan untuk memanfaatkan fasilitas pengampunan pajak berdasarkan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Sehubungan dengan hal ini, NMU menyampaikan surat pernyataan harta tanggal 30 September 2016 dan membayar nilai tebusan sebesar Rp13.988.210 yang dicatat sebagai bagian dari "Beban operasi lain" di Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian. Perusahaan telah menerima SKPP tertanggal 4 Oktober 2016.

PT Mitratani Dua Tujuh ("Mitratani")

- Seperti dijelaskan pada Catatan 14, Mitratani memanfaatkan fasilitas pengampunan pajak dan melaporkan aset sebesar Rp4.059.926.900 dikurangi dengan liabilitas pengampunan pajak sebesar Rp3.044.944.925. Mitratani membayar nilai tebusan sebesar Rp20.299.640 yang dicatat sebagai bagian dari "Beban operasi lain" di Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian. Perusahaan telah menerima SKPP tertanggal 30 September 2016.

18. TAXATION (continued)

h. Tax Amnesty (continued)

The Company (continued)

The Company has written-off the remaining tax penalty liabilities (Note 18g) amounting to Rp11,996,598,485 and presented it as part of "Other operating Income" in the Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Note 33). The write-off was booked upon approval of Director General of Taxation Large Tax Office III dated February 28, 2017.

Subsidiaries

PT Nusantara Medika Utama ("NMU")

- *In 2016, NMU decided to utilize tax amnesty facility based on the Tax Amnesty Law. In relation to that matter, NMU has submitted an application regarding the tax amnesty dated September 30, 2016 and paid a redemption value of Rp13,988,210 which recorded as part of "Other operating expenses" in Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income. The Company has received SKPP dated October 4, 2016.*

PT Mitratani Dua Tujuh ("Mitratani")

- *As discussed in Note 14, Mitratani utilized tax amnesty facility and reported tax amnesty assets amounted to Rp4,059,926,900 less with tax amnesty liabilities amounting to Rp3,044,944,925. Mitratani paid redemption value of of Rp20,299,640 which recorded as part of "Other operating expense" in Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income. The Company has received SKPP dated September 30, 2016.*

19. UTANG KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI ("KKPE")

19. FOOD SECURITY AND ENERGY CREDIT ("KKPE") PAYABLES

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	91.512.618.786	28.145.082.511	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	70.078.403.326	109.463.950.524	*Program Kemitraan dan Bina Lingkungan*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	52.226.574.922	35.721.873.322	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Taspen (Persero)	14.186.478.450	-	*PT Taspen (Persero)*
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	12.288.000.000	-	*PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.796.696.956	53.077.640	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	315.021.641	28.541.951.700	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk*
PT Bank Bukopin Tbk	144.162.878	3.905.801.200	*PT Bank Bukopin Tbk*
Jumlah	**242.547.956.959**	**205.831.736.897**	***Total***

Seluruh utang KKPE adalah dalam mata uang Rupiah dan kepada pihak berelasi (Catatan 9).

All KKPE payables are in Rupiah currency and to related parties (Note 9).

Utang KKPE merupakan kredit yang diperoleh Perusahaan dari bank-bank Pemerintah dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL") untuk diteruskan kepada Petani Tebu Rakyat melalui Pabrik Gula. Dalam perjanjian kredit ini, Perusahaan bertindak sebagai *avalist* (penjamin) dengan menerbitkan jaminan perusahaan ("*corporate guarantee").*

KKPE payables represent credit obtained by the Company from government banks and the Partnership Program and Community Development ("PKBL") to be distributed to the Sugarcane Farmers through Sugar Factory. In this agreement, the Company acts as an avalist by issuing a corporate guarantee.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama Pelaksanaan KKPE dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk untuk dua musim tanam tebu dengan suku bunga pinjaman adalah 10% per tahun dan jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Pencairan dana disesuaikan dengan kebutuhan dalam masing-masing musim tanam.

The Company entered into cooperation agreement of the implementation of KKPE with PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk for two sugarcane planting seasons with the interest rate at 10% per year and due within a year. The distribution of funds depends on the needs of each planting season.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL")

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL")

Pemberian pinjaman dari PKBL memiliki suku bunga pinjaman sebesar 6% per tahun. Jangka waktu pelunasan adalah satu masa giling (sejak tanam tebu hingga bagi hasil). Jaminan yang diberikan berupa jaminan fidusia atas tebu yang dimiliki petani, bukti pemilik kendaraan bermotor, dan Sertifikat Hak Milik dari petani atau koperasi. PKBL mensyaratkan untuk menyampaikan surat rekomendasi dari masing-masing pabrik gula, gambar kebun, indentitas petani, dan rencana definitif kebutuhan kelompok/petani sebagai persyaratan pinjaman.

Loan from PKBL bears interest at 6% per year. Repayment period is one period of milling (from planting until the profit sharing). Collateral provided in the form of fiduciary on cane owned by farmers, certificate of ownership of vehicles, and land certificate from farmers or cooperatives. PKBL required to provide a letter of recommendation from their respective sugar mills, mapping, farmers identity, and a definitive plan needs of groups/ farmers as credit terms.

19. UTANG KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI ("KKPE") (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk penyaluran kredit KKPE untuk dua musim tanam tebu dengan suku bunga pinjaman sebesar 8,00% - 12,75% per tahun. Pencairan dana disesuaikan dengan kebutuhan dalam masing-masing musim tanam.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Taspen (Persero)

Pemberian pinjaman dari BUMN Sinergi memiliki suku bunga pinjaman sebesar 6% per tahun. Jangka waktu pelunasan maksimum 24 bulan dari tanggal pencairan. Jaminan yang diberikan berupa jaminan fidusia atas tebu yang dimiliki petani.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk 2 (dua) musim tanam tebu dengan suku bunga yang diberikan adalah sebesar 8,25%.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama pelaksanaan KKPE dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk penyaluran kredit KKPE untuk 2 (dua) musim tanam tebu dengan suku bunga pinjaman adalah sebesar 7,50% - 8,25% per tahun. Pencairan dana disesuaikan dengan kebutuhan dalam masing-masing musim tanam.

PT Bank Bukopin Tbk

Berdasarkan perjanjian kerjasama tentang pembiayaan KKPE Tebu Rakyat atau Kelompok Tani Binaan, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Bank Bukopin Tbk dengan tingkat suku bunga 12,75% per tahun, di mana 4,5% merupakan subsidi dari Pemerintah. Jangka waktu pemberian kredit adalah maksimal 18 bulan dan tidak melebihi masa tanam tebu 2015/2016 serta tidak dapat diperpanjang. Jaminan yang diberikan berupa tagihan atas hasil penjualan gula milik petani/kelompok tani, *corporate guarantee* Perusahaan yang disahkan RUPS sebesar total kewajiban kredit.

19. FOOD SECURITY AND ENERGY CREDIT ("KKPE") PAYABLES (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

The Company entered into a cooperation agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk relating to KKPE credit for two sugarcane planting seasons with the loan interest rate at 8.00% - 12.75% per year. The distribution of funds depends on the needs of each planting season.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) and PT Taspen (Persero)

Loan from BUMN Sinergi bears interest at 6% per year. Repayment period is maximum 24 months since withdrawal date. Collateral provided in the form of fiduciary on cane owned by farmers.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

The Company entered into agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk for two (2) sugarcane planting seasons with the interest rate at 8.25%.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

The Company entered into cooperation agreement of the implementation of KKPE with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk for distribution of KKPE credit for two (2) sugarcane planting seasons with the interest rate at 7.50% - 8.25% per year. The distribution of funds depends on the needs of each planting season.

PT Bank Bukopin Tbk

Under a cooperation agreement of KKPE financing for Sugarcane Farmers or Group (Kelompok Tani Binaan), the Company signed an agreement with PT Bank Bukopin Tbk with interest rate of 12.75% per year, in which 4.5% was a subsidy from the Government. The term of loan is a maximum of 18 months and does not exceed the 2015/2016 sugarcane planting season and can not be extended. The collateral provided in the form of a bill on the sale of sugar from farmers/farmer groups, corporate guarantee of the Company authorized through GSM at credit obligations amount.

20. PINJAMAN JANGKA PENDEK / *20. SHORT-TERM LOANS*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Pihak berelasi: (Catatan 9)			***Related parties:*** *(Note 9)*
Perusahaan			*The Company*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	163.372.397.219	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Entitas Anak			*Subsidiaries*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	14.294.773.959	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	12.000.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Badan Usaha Milik Negara lain	3.600.000.000	3.600.000.000	*Other State-owned Enterprises*
Pihak ketiga:			***Third parties:***
Perusahaan			*The Company*
PT Bank Panin Tbk	-	100.000.000.000	*PT Bank Panin Tbk*
Entitas Anak:			*Subsidiaries*
Indonesia Eximbank	22.211.955.574	11.767.135.000	*Indonesia Eximbank*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	16.939.459.781	11.785.045.431	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
Jumlah pinjaman jangka pendek	**220.418.586.533**	**139.152.180.431**	***Total short-term loans***

Perusahaan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - *Mandiri Supplier Finance*

Berdasarkan perjanjian Kredit Modal Kerja ("KMK") No. CCO-SBY/223/PK-KMK/2004 tanggal 16 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Noor Irawati, S.H Perusahaan mendapatkan fasilitas *Mandiri Supplier Finance* ("MSF") untuk supplier Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000. Fasilitas ini bersifat *uncommitted* dan *revloving.* Tujuan kredit adalah pembiayaan *Supply Chain Finance* atas dasar akseptasi *invoice* dengan tenor maksimal 180 hari. Jangka waktu fasilitas adalah tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 dan diperpanjang sampai Maret 2018. Saldo terutang atas fasilitas MSF ini masing-masing sebesar Rp13.372.397.219 dan RpNihil pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

The Company

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Mandiri Supplier Finance

Based on Working Capital Loan ("KMK") agreement No. CCO-SBY/223/PK-KMK/2004 dated December 16, 2004 of Notary Noor Irawati, S.H The Company obtained facility of Mandiri Supplier Finance ("MSF") for the Company's supplier amounting to Rp100,000,000,000. The purpose of loans is for financing Supply Chain Finance on the basis of acceptance invoice with maximum 180 days of tenor. The facility term is from March 3, 2016 until March 3, 2017 and has been extended up to March 2018. The outstanding loan related to MSF facility amounting to Rp13,372,397,219 and RpNil as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

20. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - KMK *Revolving* III

Berdasarkan perjanjian Kredit Modal Kerja ("KMK") No. CRO.KP/088/KMK/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Mutiara Siswono Patiendra, S.H Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp700.000.000.000. KMK tersebut bersifat *revolving* rekening koran dan digunakan untuk membeli tebu rakyat. Jangka waktu pinjaman adalah tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017 dan diperpanjang sampai Maret 2018. Suku bunga pinjaman sebesar 10,50% per tahun dibayar setiap bulan pada tanggal 23. Provisi kredit sebesar 0,25% dari *limit* kredit. Selama tahun 2016, Perusahaan melunasi pinjaman sebesar Rp167.000.000.000. Saldo terutang atas fasilitas KMK III ini masing-masing sebesar Rp150.000.000.000 dan RpNihil pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Pinjaman ini dijamin dengan persediaan, piutang usaha, tanah, bangunan pabrik, serta beberapa aset tetap dan non aset tetap yang bersifat *joint collateral* dan *cross default* dengan jaminan fasilitas kredit lainnya yang diterima oleh Perusahaan dari Bank Mandiri.

Pembatasan

Perjanjian antara Perusahaan dengan Bank Mandiri di atas memuat beberapa pembatasan antara lain mengharuskan Perusahaan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu, mengalihkan hak kepimilikan atas barang yang sudah dijaminkan, mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan memperoleh pinjaman baru dari bank atau kreditur lain.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan tidak memenuhi beberapa ketentuan rasio keuangan dan persyaratan lainnya yang disyaratkan di atas namun sudah mendapatkan *waiver*.

PT Bank Panin Tbk - *Medium Term Notes* ("MTN") III

Perjanjian ini terkait dengan pengakuan utang sebesar Rp100.000.000.000 sesuai dengan Surat Perjanjian PT Perkebunan Nusantara X dengan PT Bank Panin Tbk, selaku pemegang MTN 100%, dengan No. 176 tertanggal 31 Oktober 2014. Jangka waktu pelunasan adalah sampai 30 April 2016, yang kemudian diubah menjadi 3 Mei 2016 melalui surat pemberitahuan No. 07046/DTRE/IV/2015. Pada bulan Mei 2016, pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya.

20. SHORT-TERM LOANS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - KMK Revolving III

Based on Working Capital Loan ("KMK") agreement No. CRO.KP/088/KMK/2016 dated June 16, 2016 of Notary Mutiara Siswono Patiendra, S.H the Company obtained a credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp700,000,000,000. The KMK is revolving bank statement and used for purchase sugarcane. The loan term is from June 16, 2016 and up to March 23, 2017 and has been extended up to March 2018. The interest rate at 10.50% per annum paid monthly on date 23. The credit provision is 0.25% from limit credit. During 2016, the Company paid loan installments amounting to Rp167,000,000,000. The outstanding loan related to KMK III facility amounting to Rp150,000,000,000 and RpNil as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

This loan is secured by inventories, trade receivables, land, buildings and several fixed assets and non fixed assets with joint collateral and cross default nature with other loan facility collateral received by the Company from Bank Mandiri.

Covenant

The agreements with Bank Mandiri above include certain restrictive covenants including, amount others, the requirement for the Company to comply with certain financial ratios, transfer the ownership of the guaranteed assets, acting as guarantor to another parties and obtaining new loan facilities from bank or other creditor.

As of December 31, 2016, the Company did not comply certain required financial ratios and covenants for which it has obtained a waiver for such non-compliance.

PT Bank Panin Tbk - Medium Term Notes ("MTN") III

This agreement is related to the loan amounting to Rp100,000,000,000 in accordance with the Letter of Agreement with PT Bank Panin Tbk, as the 100% holder of MTN, No. 176 dated October 31, 2014. The term of payment is up to 30 April 2016, which was then changed to May 3, 2016 through notification No. 07046/DTRE/IV/2015. In May 2016, the loan was fully paid.

20. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

Entitas Anak

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Surat Keputusan Kredit PT Dasaplast Nusantara ("Dasaplast") No. SBM/1/512/R tanggal 29 Desember 2015, Dasaplast mendapatkan fasilitas perjanjian KMK 1 dan KMK 2 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp15.000.000.000 dan Rp7.000.000.000, dengan tingkat suku bunga sebesar 12,25% dan jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2017 dan telah diperpanjang sampai dengan 3 April 2017. Pinjaman ini dijamin dengan mesin dan peralatan sejumlah 17 buah serta persediaan dan piutang yang diikat secara fidusia. Selama tahun 2016, Dasaplast melunasi pinjaman sebesar Rp14.563.355.000. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp14.294.773.959 dan RpNihil pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Pembatasan

Perjanjian antara Dasaplast dengan Bank BNI di atas memuat beberapa pembatasan antara lain mengharuskan Dasaplast untuk memenuhi rasio keuangan tertentu, mengubah bentuk dan status hukum perusahaan, anggaran dasar, susunan direksi, komisaris dan pemegang saham, mengijinkan pihak lain menggunakan Dasaplast untuk kegiatan usaha pihak lain dan menggunakan kredit diluar tujuan pemberian kredit

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Dasaplast telah memenuhi rasio keuangan dan persyaratan lainnya yang disyaratkan di atas.

Badan Usaha Milik Negara lain

Pada tahun 1997, PT Mitratani Dua Tujuh ("Mitratani"), Entitas Anak, memperoleh fasilitas pinjaman lunak dari 20 BUMN sesuai surat Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN No.S-171/MK-16/1997 tanggal 3 Juni 1997. Tujuan kredit adalah untuk meningkatkan fasilitas produksi dan produktivitas kedelai nasional.

Sehubungan dengan pinjaman dana yang telah jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2007, Mitratani dan ke-20 BUMN telah mengirimkan surat nomor 02/ETR-DIR/M27/I/2009 tanggal 16 Januari 2009 kepada Kementrian Negara BUMN tentang permohonan atas dana tersebut untuk dihibahkan. Sampai saat ini belum ada jawaban atas surat tersebut.

20. SHORT-TERM LOANS (continued)

Subsidiaries

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Based on Decision Letter of Credit PT Dasaplast Nusantara ("Dasaplast") No. SBM/1/512/R dated December 29, 2015, Dasaplast obtained KMK 1 and KMK 2 with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp15,000,000,000 and Rp7,000,000,000, with an interest rate of 12.25% and is due on January 3, 2017 and has been extended until April 3, 2017. The loan is pledged by machinery and equipment as well as 17 pieces of inventory and receivables tied fiduciary. During 2016, Dasaplast paid loan installments amounting to Rp14,563,355,000. The outstanding loan related to this facility amounting to Rp14,294,773,959 and RpNil as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

Covenant

The agreements with Bank BNI above include certain restrictive covenants including, amount others, the requirement for Dasaplast to comply with certain financial ratios, changing articles of association, composition of boards of directors and commissioners and stockholders, allowing other parties operates Dasaplast for other business activities and using the loan other than its purposes.

As of December 31, 2016 and 2015, Dasaplast has complied the required financial ratios and covenants stated above.

Other State-Owned Enterprises (BUMN)

In 1997, PT Mitratani Dua Tujuh ("Mitratani"), a Subsidiary, obtained a soft loan from 20 BUMN in accordance with letter from Directorate General of Supervising BUMN No. S-171/MK-16/1997 dated June 3, 1997. The purpose of the credit is to improve the production facilities and national soybean productivity.

As the loan matured on December 31, 2007, Mitratani and all 20 BUMN sent a letter No. 02/ETR-DIR/M27/I/ 2009 dated January 16, 2009 to the Ministry of BUMN requesting for the funds to be granted. Up to date, there has been no answer to these letter.

20. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja 2 dan *forex line* ("KMK 2") No. 37 yang dibuat pada tanggal 14 Oktober 2014 oleh notaris Ernawati, S.H Notaris di Jepara, Dasaplast, mendapatkan perpanjangan fasilitas kredit KMK 2 sebesar Rp12.000.000.000 dan fasilitas *forex line* sebesar AS$500.000 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di cabang Jepara. Perpanjangan pinjaman berlaku sampai dengan tanggal 27 Juni 2016. Tingkat bunga pinjaman adalah 10,75% per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan tanah dan bangunan, mesin-mesin, persediaan dan piutang usaha tertentu milik Dasaplast. Pada tanggal 11 Januari 2016, Dasaplast telah melunasi seluruh pinjaman tersebut kepada bank.

Indonesia Eximbank

Berdasarkan perjanjian kredit sesuai dengan Akta Notaris No. 29 oleh notaris Ranti N. Handayani, S.H tanggal 12 Desember 2014, Mitratani mendapat fasilitas pinjaman bergulir (*revolving*) untuk modal kerja dari Indonesia Eximbank dengan limit fasilitas sebesar AS$1.133.000 yang terbagi atas AS$933.000 untuk *take-over* pinjaman PT Bahana Artha Ventura dan AS$200.000 untuk *limit* tambahan.

Mitratani juga mendapatkan fasilitas pinjaman bergulir (*revolving*) untuk modal kerja ekspor-transaksional (*Letter of Credit*) dan negosiasi wesel ekspor dengan limit fasilitas sebesar AS$530.000.

Fasilitas ini dijamin dengan fidusia yang dinotariskan atas persediaan dan piutang usaha dari Mitratani. Fasilitas ini juga dijamin dengan Surat Hak Tanggungan Pertama (*first registered hypothecation)* atas tanah, bangunan, dan mesin tertentu.

Berdasarkan Akta Notaris No. 17 oleh notaris Ranti N. Handayani, S.H tanggal 7 Desember 2016, jangka waktu fasilitas diperpanjang menjadi hingga 8 Desember 2017 dengan suku bunga efektif sebesar 6,5% per tahun dengan pembayaran bunga setiap bulannya. Selama 2016, Mitratani telah melakukan penarikan sebesar AS$1.449.867 (setara dengan Rp19.609.737.416) dan pembayaran pinjaman sebesar AS$649.700 (setara dengan Rp8.521.481.800).

20. SHORT-TERM LOANS (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Based on Working Capital Credit Agreement Addendum 2 and forex line ("KMK 2") No. 37 on October 14, 2014 by notary Ernawati, S.H Notary in Jepara, Dasaplast obtained a credit facility extension KMK 2 amounting to Rp12,000,000,000 and forex line facility amounting to US$500,000 from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jepara branch. The extension of loan is valid until June 27, 2016. The interest rate is 10.75% per year. This loan is secured by certain land and buildings, machineries, inventories and trade receivables of Dasaplast. On January 11, 2016, Dasaplast has fully paid this loan to the bank.

Indonesia Eximbank

Based on the credit agreement in accordance with the Deed No. 29 by notary Ranti N. Handayani, S.H dated December 12, 2014, Mitratani received revolving loan facility for working capital from Indonesia Eximbank with a facility limit amounting to US$1,133,000, consisting of US$933,000 for the take-over of loans to PT Bahana Artha Ventura and US$200,000 for additional limit.

Mitratani also obtained a revolving credit facility for export-transactional working capital (Letter of Credit) and negotiated export bill with a facility limit of US$530,000.

This facility is secured by notarized fiduciary of inventories and trade receivables of Mitratani. This facility is also secured by first registered hypothecation of land, buildings, and certain machines.

Based on the Deed No. 17 by notary Ranti N. Handayani, S.H dated December 7, 2016, the valid period of facility was extended until December 8, 2017 with efective interest rate at 6.5% per year with monthly interest payments. During 2016, Mitratani withdraw the loans amounted US$1,449,867 (equivalent to Rp19,609,737,416) and has paid the loans amounting to US$649,700 (equivalent to Rp8,521,481,800).

20. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Indonesia Eximbank (lanjutan)

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar AS$1.653.157 (setara dengan Rp22.211.955.574) dan AS$853.000 (setara dengan Rp11.767.135.000).

Pembatasan

Perjanjian di atas memuat beberapa pembatasan antara lain mengharuskan Mitratani untuk memenuhi rasio keuangan tertentu, melakukan perpanjangan polis asuransi paling lambat satu bulan setelah tanggal jatuh tempo asuransi, melakukan merger atau akusisi, memperluas/mempersempit bisnis, mengubah Anggaran Dasar termasuk mengubah struktur modal, dan membagikan dividen.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Mitratani tidak memenuhi salah satu persyaratan yang disyaratkan di atas namun sudah mendapatkan *waiver*.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. 38 oleh notaris Sari Nitiyudo, S.H tanggal 23 Agustus 2016, Dasaplast menandatangani perjanjian perubahan KMK dengan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, dengan tingkat suku bunga 11% per tahun dan jatuh tempo tanggal 17 September 2017. Fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp17.500.000.000 dan dijamin dengan piutang dagang yang telah diikat secara fidusia dan tanah seluas 15.475 m^2 di lokasi pabrik, Desa Pecangaan Kulon, Jepara. Selama tahun 2016, Dasaplast telah membayar pinjaman sebesar Rp32.164.788.067. Saldo pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp16.939.459.781 dan Rp11.785.045.431. Tidak ada jaminan untuk fasilitas ini.

20. SHORT-TERM LOANS (continued)

Subsidiaries (continued)

Indonesia Eximbank (continued)

Loan outstanding as of December 31, 2016 and 2015 amounted to US$1,653,157 (equivalent to Rp22,211,955,574) and US$853,000 (equivalent to Rp11,767,135,000), respectively.

Covenant

The above said agreement include certain restrictive covenants including, among others, the requirement for Mitratani to comply with certain financial ratios, extend the insurance policy no later than one month after the maturity date of insurance, merger or acquisition, expand or restrict bussiness, change the Articles of Association including changes the capital structure, and declaring any dividends.

As of December 31, 2016 and 2015, Mitratani did not comply with one of required covenants above for which has obtained a waiver.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Based on credit agreement No. 38 by notary Sari Nitiyudo, S.H dated August 23, 2016, Dasaplast entered into an amendment agreement of KMK with PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, with interest rate at 11% per year and will be due on September 17, 2017. The facility loan amounting to Rp17,500,000,000 and it is secured by trade receivabe which has been bound by fiduciary and collaterall of land area up to 15,475 m^2 at the factory site, Pecangaan Kulon village, Jepara. During 2016, Dasaplast has paid loan amounting to Rp32,164,788,067. The outstanding loan as of December 31, 2016 and 2015 amounting to Rp16,939,459,781 and Rp11,785,045,431, respectively. There is no collateral for this facility.

21. UTANG LAIN-LAIN / *21. OTHER PAYABLES*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Pihak berelasi (Catatan 9)	23.093.721.898	34.237.849.076	***Related parties*** *(Note 9)*
Pihak ketiga:			***Third parties****:*
Utang retensi	22.781.959.208	18.082.018.149	*Retention payables*
Utang karyawan	7.445.636.909	907.102.503	*Employees payables*
PT Inti Makmur Jaya Perkasa	7.363.680.039	-	*PT Inti Makmur Jaya Perkasa*
Utang Peserta Koordinasi (“Peserko”)	5.437.770.999	25.593.798.041	*Peserta Koordinasi (“Peserko”) payables*
Dokter spesialis	4.935.296.705	6.447.107.912	*Medical specialist*
CV Rajawali Usaha Nabati	4.046.440.000	-	*CV Rajawali Usaha Nabati*
PT Margatama Bangun Karsa	2.540.587.963	2.962.478.433	*PT Margatama Bangun Karsa*
PT Arsy Amanah Timur	2.256.045.586	484.870.350	*PT Arsy Amanah Timur*
Perusahaan asuransi	469.180.337	1.141.857.755	*Insurance companies*
PT Nila Kencana	117.609.300	1.630.005.300	*PT Nila Kencana*
Utang koperasi	-	2.684.949.674	*Cooperative payables*
Dirjen Perkebunan	-	1.011.887.494	*Directorate General of Plantation*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	72.496.908.328	25.695.674.457	*Others (each below Rp1 billion)*
Sub jumlah	129.891.115.374	86.641.750.068	*Sub total*
Jumlah	**152.984.837.272**	**120.879.599.144**	***Total***

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG / *22. LONG-TERM LOANS*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Perusahaan:			*The Company:*
Pihak berelasi: (Catatan 9)			***Related parties****: (Note 9)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.274.087.000.000	813.754.691.975	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	50.000.000.000	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Pihak ketiga:			***Third parties****:*
Burger Sohne AG Burg, Swiss (Catatan 40)	6.085.203.285	7.124.650.168	*Burger Sohne AG Burg, Swiss (Note 40)*
Entitas Anak:			*Subsidiaries:*
Pihak berelasi: (Catatan 9)			***Related parties****: (Note 9)*
PT Bank Syariah Mandiri	42.667.543.759	39.793.952.332	*PT Bank Syariah Mandiri*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8.655.028.959	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	1.249.999.994	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Pihak ketiga:			***Third parties****:*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2.369.074.982	-	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
Indonesia Eximbank	1.491.396.000	3.600.495.000	*Indonesia Eximbank*
Jumlah	1.385.355.246.985	865.523.789.469	*Total*

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan) / ***22. LONG-TERM LOANS (continued)***

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Dikurangi:			***Less:***
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			***Current portion of long-term loans***
Perusahaan:			*The Company:*
Pihak berelasi:			*Related party:*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	(130.000.000.000)	(198.000.000.000)	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Entitas Anak:			*Subsidiaries:*
Pihak berelasi:			*Related parties:*
PT Bank Syariah Mandiri	(4.753.237.957)	(3.493.356.237)	*PT Bank Syariah Mandiri*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	(1.200.000.000)	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	(500.000.000)	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Pihak ketiga:			*Third parties:*
Indonesia Eximbank	(1.491.396.000)	(2.069.250.000)	*Indonesia Eximbank*
Jumlah	(137.444.633.957)	(204.062.606.237)	*Total*
Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	**1.247.910.613.028**	**661.461.183.232**	***Long-term loans, net of current portion***

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Perusahaan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

a. KMK *Revolving I*

Berdasarkan perjanjian Kredit Modal Kerja ("KMK") No. CCO-SBY/223/PK-KMK/2004 tanggal 16 Desember 2004 oleh Notaris Noor Irawati, S.H Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp450.000.000.000. Pada tanggal 19 Februari 2014, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan tambahan *limit* fasilitas menjadi sebesar Rp550.000.000.000. Pada tanggal 3 Maret 2016 PT Bank Mandiri (persero) Tbk melakukan pengurangan *limit* menjadi Rp450.000.000.000, termasuk di dalamnya *Sublimit Non Cash Loan* senilai Rp10.000.000.000. KMK tersebut bersifat *revolving* dan digunakan untuk modal kerja Perusahaan. Jangka waktu pinjaman adalah sampai tanggal 3 Maret 2017 dan telah diperpanjang sampai dengan Maret 2018. Suku bunga pinjaman sebesar 10,50% per tahun dibayar setiap bulan pada tanggal 23. Provisi kredit sebesar 0,25% dari *limit* kredit. Selama tahun 2016, perusahaan melunasi pinjaman sebesar Rp68.000.000.000. Saldo terutang pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp450.000.000.000 dan Rp198.000.000.000

Fasilitas ini dijamin dengan fidusia yang dinotariskan atas persediaan dan piutang usaha. Fasilitas ini juga dijamin dengan Surat Hak Tanggungan Pertama dan Surat Hak Tanggungan Kedua atas tanah, bangunan, dan mesin tertentu.

22. LONG-TERM LOANS (continued)

The Company

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

a. KMK Revolving I

Under the Working Capital Credit Loan ("KMK") agreement No. CCO-SBY/223/PK-KMK/2004 dated December 16, 2004 of Notary Noor Irawati, S.H the Company obtained a credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp450,000,000,000. On February 19, 2014, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk provided additional facility limit amounting to Rp550,000,000,000. On March 3, 2016, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk deducted the loan limit amounting to Rp450,000,000,000, including Sublimit Non Cash Loan amounting to Rp10,000,000,000. This KMK is revolving and used for working capital of the Company. The loan term is March 3, 2017 and has been extended up to March 2018. The interest rate at 10.50% per annum paid monthly on date 23. The credit provision is 0.25% from credit limit. During 2016, the Company paid loan amounting to Rp68,000,000,000. The outstanding loans as of December 31, 2016 and December 31, 2015, amounted to Rp450,000,000,000 and Rp198,000,000,000, respectively.

This facility is secured by notarized fiduciary on inventories and accounts receivables. This facility is also secured by a First Letter of Guarantee Rights and Second Letter of Guarantee Rights of land, buildings, and certain machineries.

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

b. KMK *Revolving II*

Berdasarkan perjanjian KMK No. CCO-SBY/066/KMK/13 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Mutiara Siswono Patiendra, S.H Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp100.000.000.000. Pada tanggal 3 Maret 2016, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan tambahan *limit* fasilitas menjadi sebesar Rp500.000.000.000. KMK tersebut bersifat *revolving* dan digunakan untuk modal kerja Perusahaan. Jangka waktu pinjaman adalah sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 dan telah diperpanjang sampai dengan Maret 2018. Suku bunga pinjaman sebesar 10,50% per tahun dibayar setiap bulan pada tanggal 23. Provisi kredit sebesar 0,25% dari *limit* kredit. Selama tahun 2016, Perusahaan telah membayar pinjaman sebesar Rp168.000.000.000. Saldo terutang masing-masing sebesar Rp499.500.000.000 dan RpNihil pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015.

Pinjaman ini dijamin dengan persediaan, piutang usaha, tanah, bangunan pabrik, serta beberapa aset tetap dan non aset tetap yang bersifat *joint collateral* dan *cross default* dengan jaminan fasilitas kredit lainnya yang diterima oleh Perusahaan dari Bank Mandiri.

Pembatasan

Perjanjian di atas memuat beberapa pembatasan antara lain mengharuskan Perusahaan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu, mengalihkan hak kepimilikan atas barang yang sudah dijaminkan, mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan memperoleh pinjaman baru dari bank atau kreditur lain.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan tidak memenuhi beberapa ketentuan rasio keuangan dan persyaratan lainnya yang disyaratkan di atas namun sudah mendapatkan *waiver*.

22. LONG-TERM LOANS (continued)

The Company (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)

b. KMK Revolving II

Under the KMK agreement No. CCO-SBY/066/KMK/13 dated March 25, 2013 of Notary Mutiara Siswono Patiendra, *S.H the Company obtained a credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp100,000,000,000. On March 3, 2016, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk provided additional facility limit amounted to Rp500,000,000,000. The KMK is revolving and used for working capital of the Company. The loan term is up to March 3, 2017 and has been extended up to March 2018. The interest rate at 10.50% per annum which paid monthly on date 23. The credit provision is 0.25% from limit credit. During 2016, the Company has paid the loan amounting to Rp168,000,000,000. The outstanding loans amounting to Rp499,500,000,000 and RpNil as of December 31, 2016 and December 31, 2015, respectively.*

This loan is secured by inventories, trade receivables, land, buildings and several fixed assets and non fixed assets with joint collateral and cross default with other loan facility collateral received by the Company from Bank Mandiri.

Covenant

The agreements with Bank Mandiri above include certain restrictive covenants including, amount others, the requirement for the Company to comply with certain financial ratios, transfer the ownership of the guaranteed assets, acting as guarantor to another parties and obtaining new loan facilities from bank or other creditor.

As of December 31, 2016, the Company did not comply for certain required financial ratios and covenants for which it has obtained a waiver for such non-compliance.

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

c. Kredit Investasi ("KI") - Optimalisasi Pabrik Gula

Berdasarkan perjanjian KI No. CRO.KP/066/KI/11 tanggal 12 April 2012 No. 65, yang dibuat dihadapan Notaris Anita Anggawidjaja, S.H Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp188.800.000.000. Kredit investasi bersifat *aflopend plafond* dan digunakan untuk pembiayaan investasi 6 unit pabrik gula termasuk pembukaan L/C impor. Jangka waktu pinjaman adalah 7 tahun sejak angsuran pokok dimulai (triwulan I 2014). Suku bunga sebesar 10,50% per tahun, dengan provisi kredit sebesar 0,25% dari *limit* kredit. Selama tahun 2016, Perusahaan telah melunasi seluruh pinjaman sebesar Rp12.000.000.000.

Jaminan pinjaman adalah seluruh obyek yang dibiayai dengan fasilitas KI ini dan aset tetap berupa tanah dan bangunan Pabrik Gula ("PG") Djombang Baru, PG Lestari, PG Meritjan, PG Pesantren Baru, PG Gempolkrep, dan PG Ngadiredjo.

d. Kredit Investasi - *Bioethanol*

Berdasarkan perjanjian KI No. CRO.KP/065/KI/11 tanggal 12 April 2012 No. 64, oleh notaris Anita Anggawidjaja, S.H., Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp282.412.000.000. Pinjaman bersifat *non-revolving* ini digunakan untuk pembiayaan lokal/konten pembangunan pabrik *bioethanol* di area Gempolkrep. Suku bunga pinjaman adalah sebesar 10,50% per tahun dibayar setiap bulan pada tanggal 23, dengan provisi kredit sebesar 0,25% dari limit kredit. Jangka waktu pinjaman adalah dari tanggal 12 April 2012 sampai tanggal 23 Desember 2018. Selama tahun 2016, Perusahaan membayar angsuran pinjaman sebesar Rp40.000.000.000. Saldo terutang masing-masing sebesar Rp204.587.000.000 dan Rp244.587.000.000 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015.

22. LONG-TERM LOANS (continued)

The Company (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)

c. Investment Credit ("KI") - Sugar Factory Optimalization

Under the agreement of KI No. CRO.KP/066/KI/11 dated April 12, 2012 No. 65, of Notary Anita Anggawidjaja, S.H., the Company obtained a credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp188,800,000,000. This investment credit is aflopend plafond and used for the financing of investment in 6 units of sugar factories including the opening of L/C import. The loan period is 7 years since the principal installment begins (first quarter of 2014). It bears interest rate at 10.50% per year, with credit provision of 0.25% from the credit limit. During 2016, the Company has fully paid the loan amounting to Rp12,000,000,000.

The loan collaterals are all assets financed by KI facilities and fixed assets of land and buildings in Djombang Baru Sugar Factory ("SF"), Lestari SF, Meritjan SF, Pesantren Baru SF, Gempolkrep SF, and Ngadiredjo SF.

d. Investment Credit – Bioethanol

Based on KI agreement No. CRO.KP/065/KI/11 dated April 12, 2012 No. 64, of notary Anita Anggawidjaja, S.H., the Company obtained a credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp282,412,000,000. This non-revolving loan was used to finance local/content development of bioethanol plant in Gempolkrep area. The interest rate at 10.50% per annum paid monthly on date 23, with a credit provision of 0.25% of the credit limit. The credit period is from April 12, 2012 until December 23, 2018. During 2016, the Company paid loan installments amounting to Rp40,000,000,000. The outstanding loans amounting to Rp204,587,000,000 and Rp244,587,000,000 as of December 31, 2016 and December 31, 2015, respectively.

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

d. Kredit Investasi – *Bioethanol* (lanjutan)

Jaminan atas pinjaman ini adalah seluruh obyek yang dibiayai dengan fasilitas KI ini dan tanah berikut bangunan di atas lokasi pabrik *bioethanol*.

Pembatasan

Perjanjian di atas memuat beberapa pembatasan antara lain mengharuskan Perusahaan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu, mengalihkan hak kepemilikan atas barang yang sudah dijaminkan, mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan mengharuskan untuk melapor jika Perusahaan mengumumkan atau membayar dividen.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan tidak memenuhi beberapa ketentuan rasio keuangan dan persyaratan lainnya yang disyaratkan di atas namun sudah mendapatkan *waiver*.

e. Kredit Investasi - Biaya modal

Berdasarkan perjanjian kredit No. CRO.KP/165/KI/14 No. 07 pada tanggal 21 Juli 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Mutiara Siswono Patiendra, S.H Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi (KI) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp200.000.000.000 dan bersifat *aflopend plafond*. Pinjaman ini digunakan untuk membayar investasi biaya modal 2014 dengan jangka waktu hingga 31 Desember 2019. Suku bunga sebesar 11% per tahun dibayar setiap bulan pada tanggal 23, dengan provisi kredit sebesar 0,25% dari *limit* kredit. Fasilitas ini dijamin dengan fidusia yang dinotariskan atas persediaan dan piutang usaha. Atas seluruh jaminan yang diserahkan, wajib diikat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, serta diasuransikan dengan *banker's clause* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Selama tahun 2016, Perusahaan membayar angsuran pinjaman sebesar Rp40.000.000.000. Saldo terutang masing-masing sebesar Rp140.000.000.000 dan Rp120.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015.

22. LONG-TERM LOANS (continued)

The Company (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)

d. Investment Credit – Bioethanol (continued)

Collaterals of this loan are all assets financed by this investment credit, also land and buildings on the plant site of bioethanol.

Covenant

The agreements with Bank Mandiri above include certain restrictive covenants including, amount others, the requirement for the Company to comply with certain financial ratios, transfer the ownership of the guaranteed assets, acting as guarantor to another parties and the requirement for the Company while declare or pay any dividends.

As of December 31, 2016, the Company did not comply for certain required financial ratios and covenants for which it has obtained a waiver for such non-compliance.

e. Investment Credit - Cost of capital

Based on credit agreement No. CRO.KP/165/KI/14 No. 07 dated July 21, 2014 of Notary Mutiara Siswono Patiendra, S.H., the Company obtained investment credit (KI) from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp200,000,000,000 and it is aflopend plafond loan. The loan was used to finance the capital investments in 2014 with credit term until December 31, 2019. The interest rate at 11% per annum paid monthly on date 23, with a credit provision of 0.25% of the credit limit. This facility is secured by notarized fiduciary on inventories and trade receivables. For all guarantees transferred, it should be bound in accordance with applicable laws, as well as banker's clause insured with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. During 2016, the Company paid loan installments amounting to Rp40,000,000,000. The outstanding loans amounting to Rp140,000,000,000 and Rp120,000,000,000 as of December 31, 2016 and December 31, 2015, respectively.

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

f. KMK *Fixed Loan*

Berdasarkan perjanjian kredit No. CRO.KP/164/KMK/14 tanggal 21 Juli 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Mutiara Siswono Patiendra, S.H., Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp100.000.000.000. Pada tanggal 27 Februari 2015, Perusahaan memperpanjang jangka waktu pelunasan menjadi hingga tanggal 3 Maret 2016 dan menambah *limit* kredit menjadi Rp200.000.000.000 dan kemudian telah diperpanjang lagi menjadi tanggal 3 Maret 2017. Jenis kredit adalah *non-revolving* dengan suku bunga pinjaman sebesar 10,50% per tahun dibayar setiap bulan pada tanggal 23, sedangkan provisi kredit 0,25% dari limit kredit. Jaminan kredit adalah aset tetap dan persediaan milik Perusahaan. Selama tahun 2016, Perusahaan telah melunasi seluruh pinjaman.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian KMK No. 026 tanggal 23 Juni 2016 oleh notaris Yatty Sriyanti Suhadiwiraatmaja, S.H., MM., Mhum, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp250.000.000.000. Kredit Modal Kerja tersebut bersifat *withdrawal approval* dan digunakan untuk pembiayaan talangan petani tebu rakyat dan pembiayaan tebu sendiri. Jangka waktu pinjaman adalah tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018. Suku bunga pinjaman sebesar 9,75% per tahun yang dibayar setiap bulan pada tanggal 25. Provisi kredit sebesar 0,25% dari *limit* kredit. Selama tahun 2016, tidak terdapat pembayaran angsuran. Saldo terutang adalah sebesar Rp50.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2016 dan RpNihil pada tanggal 31 Desember 2015.

22. LONG-TERM LOANS (continued)

The Company (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)

f. KMK Fixed Loan

Based on credit agreement No. CRO.KP/164/KMK/14 dated July 21, 2014, of Notary Mutiara Siswono Patiendra, S.H., the Company obtained a Working Capital Credit (KMK) from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp100,000,000,000. On February 27, 2015, the Company extended the repayment period up to March 3, 2016 and increased the credit limit up to Rp200,000,000,000 and then was extended again up to March 3, 2017. The loan is non-revolving credit with lending rates at 10.50% per annum paid monthly on date 23, while credit provision was 0.25% of the credit limit. The loan collaterals are fixed assets and inventories of the Company. During 2016, the Company has fully paid the loan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Based on KMK agreement No. 026 dated June 23, 2016 of notary Yatty Sriyanti Suhadiwiraatmaja, S.H., MM., Mhum, the Company obtained a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp250,000,000,000. The Working Capital Loan is withdrawal approval and used for financing bailouts for sugarcane farmers and financing its own sugarcane. The period of loan is from June 23, 2016 and up to December 23, 2018. The interest rate at 9.75% per annum which paid monthly on date 25 The credit provision is 0.25% from limit credit. During 2016, there is no loan installment paid. The outstanding loan amounting to Rp50,000,000,000 as of December 31, 2016 and RpNil as of December 31, 2015.

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

Perjanjian antara Perusahaan dengan Bank BRI di atas memuat beberapa pembatasan antara lain mengajukan permohonan pailit, mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain, menyewakan aset yang dijaminkan, menerima pinjaman dari pihak lain apabila DER melebihi 400% dan melunasi atau membayar utang kepada pemegang saham sebelum utang bank dilunasi.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan telah memenuhi persyaratan yang disyaratkan di atas.

Entitas Anak

PT Bank Syariah Mandiri

PT Nusantara Medika Utama ("NMU") mendapatkan Kredit Investasi Al-Murabahah dari PT Bank Syariah Mandiri pada tanggal 20 Desember 2014 dengan fasilitas maksimum sebesar Rp40.000.000.000. Jangka waktu pinjaman adalah 84 bulan (termasuk masa tenggang) dengan provisi kredit sebesar 0,5% dari *limit* pencairan dan tingkat bunga 11% per tahun. Kredit ini dijamin dengan aset tetap tertentu milik NMU.

NMU memperoleh fasilitas kredit investasi jangka panjang Musyarakah Mutanaqisah dari PT Bank Syariah Mandiri pada tanggal 24 Agustus 2016 dengan fasilitas maksimum sebesar Rp6.200.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 11% per tahun. Utang akan jatuh tempo dalam 108 bulan dari tanggal pencairan. Kredit ini dijamin dengan aset tetap tertentu milik NMU.

Selama 2016 dan 2015, NMU telah membayar pinjaman sejumlah Rp3.327.840.436 dan Rp169.615.802. Saldo terutang adalah masing-masing sebesar Rp42.667.543.759 dan Rp39.793.952.332 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

22. LONG-TERM LOANS (continued)

The Company (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (continued)

The agreements with Bank BRI above include certain restrictive covenants including, amount others, filing for bankruptcy, acting as guarantor or pledge the Company's assets to another party, rent out the secured assets, received loan from other parties if DER is more than 400% and pay off or pay down debt to shareholders before the loan has repaid.

As of December 31, 2016, the Company has complied required covenants above.

Subsidiaries

PT Bank Syariah Mandiri

PT Nusantara Medika Utama ("NMU") obtained Al-Murabahah Investment Credits from PT Bank Syariah Mandiri on December 20, 2014 with maximum facility amounting to Rp40,000,000,000. The loan period is 84 months (including grace period) with a credit provision of 0.5% of the credit withdrawals limit and interest rate at 11% per year. This credit is secured by certain assets owned by NMU.

NMU obtained Musyarakah Mutanaqisah a long term investment credit facility from PT Bank Syariah Mandiri on August 24, 2016 with maximum facility amounting to Rp6,200,000,000 with interest rate at 11% per year. The loan will be due within 108 month from withdrawal date. This credit is secured by certain assets owned by NMU.

During 2016 and 2015, NMU has paid the loans amounting to Rp3,327,840,436 dan Rp169,615,802, respectively. The outstanding loan amounting to Rp42,667,543,759 and Rp39,793,952,332 as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Syariah Mandiri (lanjutan)

Pembatasan

Perjanjian di atas memuat beberapa pembatasan antara lain melakukan transaksi penggabungan usaha atau akuisisi, menjual seluruh atau sebagian aset, mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain, mengubah anggaran dasar, susunan pemegang saham, direksi dan/atau komisaris, mengalihkan hak kepimilikan atas barang yang sudah dijaminkan dan menunjuk eksekutor, kurator, likuidator atas sebagian atau seluruh aset.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, NMU telah memenuhi rasio keuangan dan persyaratan lainnya di atas.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Surat Keputusan Kredit No.SBM/1/512/R tanggal 29 Desember 2015, Dasaplast mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam bentuk Kredit Investasi dengan maksimal pinjaman sebesar Rp9.000.000.000 dan tingkat suku bunga sebesar 12,25% dan akan jatuh tempo pada 3 Januari 2023. Pinjaman ini dijamin dengan mesin dan peralatan sejumlah 17 buah serta persediaan dan piutang yang diikat secara fidusia. Selama tahun 2016, Dasaplast telah membayar pinjaman sejumlah Rp468.504.068. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp8.655.028.959 dan RpNihil pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Pembatasan

Perjanjian di atas memuat beberapa pembatasan antara lain mengharuskan Dasaplast untuk memenuhi rasio keuangan tertentu, mengubah bentuk dan status hukum Perusahaan, anggaran dasar, susunan direksi, komisaris dan pemegang saham tanpa pemberitahuan tertulis, mengijinkan pihak lain menggunakan Dasaplast untuk kegiatan usaha pihak lain dan menggunakan kredit diluar tujuan pemberian kredit

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Dasaplast telah memenuhi rasio keuangan dan persyaratan lainnya yang disyaratkan di atas.

22. LONG-TERM LOANS (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Bank Syariah Mandiri (continued)

Covenant

The agreements said above include certain restrictive covenants including, amount others, entering into liquidation, merger or acquisition transactions, sell in whole or in part assets, Acting as guarantor or pledge NMU's assets to another party, changing articles of association, members of its boards of directors and commissioners and stockholders, transfer the ownership of the guaranteed assets; appoint executor, curator, liquidator to value some or all NMU's assets.

As of December 31, 2016 and 2015, NMU has complied the required financial ratios and covenants stated above.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Based on Decision Letter Loan No. SBM/1/512/R on December 29, 2015, Dasaplast got credit facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp9,000,000,000, with interest rate at 12.25% and will mature on January 3, 2023. This loan secured by machine and equipment amounted to 17 piece and inventories and receivable which bound by fiduciary. During 2016, Dasaplast has paid the loan amounting to Rp468,504,068. The outstanding loan related to this facility amounting to Rp8,655,028,959 and RpNil as of December 31, 2016 and 2015.

Covenant

The agreements as said above include certain restrictive covenants including, amount others, the requirement for Dasaplast to comply with certain financial ratios, changing articles of association, members of its boards of directors and commissioners and stockholders without written notification, allowing other parties operate Dasaplast for other business activities and using the credit, outside credit lending purposes.

As of December 31, 2016 and 2015, Dasaplast has complied the required financial ratios and covenants stated above.

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit no. 13 pada tanggal 10 Agustus 2016 dihadapan notaris Sari Nitiyudo, SH, Dasaplast mendapatkan fasilitas Kredit Angsuran Berjangka-Bisa (KAB-Bisa) dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dengan maksimal pinjaman sebesar Rp2.500.000.000 dengan tingkat suku bunga 9,95% dan akan jatuh tempo pada 10 Agustus 2021. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan Sertifikat HGB No.244/Wonotinggal. Selama tahun 2016, Dasaplast telah membayar pinjaman sejumlah Rp130.925.018. Saldo terutang adalah masing-masing sebesar Rp2.369.074.982 dan RpNihil pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Tidak ada jaminan yang diberikan untuk fasilitas ini.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian Kredit Investasi No. CRO.SMG/0088/KI/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat dihadapan notaris Maria Magdalena Herawati S.H., Dasaplast memperoleh fasilitas kredit umum/*non revolving* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, cabang Semarang dengan maksimal pinjaman sebesar Rp2.000.000.000, dengan tingkat suku bunga 13,75% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2018. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan bangunan kantor Dasaplast yang berlokasi di Jl. Kendalisodo No.1, Semarang. Selama tahun 2016, Dasaplast telah membayar pinjaman sebesar Rp749.999.994. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar RpNihil dan Rp1.249.999.994 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Pembatasan

Perjanjian di atas memuat beberapa pembatasan antara lain mengubah bentuk dan status hukum Dasaplast, kepemilikan jaminan, menjaminkan kekayaan pada pihak lain, memperoleh pinjaman baru dari bank atau kreditur lain, mengalihkan hak kepimilikan atas barang yang sudah dijaminkan, mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan memperoleh pinjaman baru dari bank atau kreditur lain, menyewakan aset yang dijaminkan dan mengambil bagian keuntungan untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Dasaplast telah memenuhi persyaratan yang disyaratkan di atas.

22. LONG-TERM LOANS (continued)

Subsidiaries (continued)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Based on Loan Deed Agreement No. 13 on August 10, 2016 of notary Sari Nitiyudo, SH, Dasaplast got Kredit Angsuran Berjangka-Bisa (KAB-Bisa) facility from PT Bank Danamon Indonesia Tbk, with maximum loan amounting to Rp2,500,000,000 with interest rate at 9.95% and maturity date on August 10, 2021. This facility loan secured by Certificate HGB No.244/Wonotinggal. During 2016, Dasaplast has paid the loan amounting to Rp130,925,018. The outstanding loan amounting to Rp2,369,074,982 and RpNihil as of December 31, 2016 and 2015, respectively. There is no collateral given for this facility.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on Investment Credit (KI) Agreement No. CRO.SMG/0088/KI/2014 dated June 19, 2014 of Notary Maria Magdalena Herawati S.H., Dasaplast obtained a general credit facility/non-revolving from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Semarang branch with maximum amount of Rp2,000,000,000, with an interest rate at 13.75% per annum and will mature on June 18, 2018. This credit facility is secured by Dasaplast's office building located at Jl. Kendalisodo 1, Semarang. During 2016, Dasaplast has paid the loan amounting to Rp749,999,994. The outstanding loan related to this facility amounting tp RpNil and Rp1,249,999,994 as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

Covenant

The agreements as said above certain restrictive covenants including, amount others, change the Dasaplast's legal form, obtaining new loan facilities from bank or other creditor, offering a wealth for other party, transfer the ownership of the guaranteed assets, acting as guarantor to another parties and obtaining new loan facilities from bank or other creditor, rent out the secured assets and take part of profits outside the business and personal interests.

As of December 31, 2016 and 2015, Dasaplast has complied the required covenants stated above.

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Indonesia Eximbank

Berdasarkan perjanjian kredit No. 30 tanggal 12 Desember 2014 yang dibuat dihadapan notaris Ranti N. Handayani, SH., PT Mitratani Dua Tujuh ("Mitratani") mendapatkan fasilitas KI jangka panjang dari Indonesia Eximbank dengan limit fasilitas sebesar AS$498.500 dengan jangka waktu 40 bulan sejak tanggal perjanjianSuku bunga pinjaman efektif adalah 6,75% per tahun dengan *review* 6 bulanan dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Berdasarkan Akta Notaris No. 18 oleh notaris Ranti N. Handayani, S.H., tanggal 7 Desember 2016, Mitratani mendapatkan tambahan fasilitas kredit investasi tambahan dari Indonesia Eximbank untuk pembangunan perluasan pabrik dan pembelian dua unit *cold storage* dengan limit fasilitas masing-masing sebesar Rp10.595.000.000 dan Rp3.625.000.000. Jangka waktu fasilitas sejak 7 Desember 2016 sampai dengan 7 Desember 2022 dengan masa tenggang sampai dengan 7 Desember 2017.

Fasilitas ini dijamin dengan fidusia yang dinotariskan atas persediaan (Catatan 10) dan piutang usaha (Catatan 6) masing-masing sebesar Rp22.503.000.000 dan Rp 5.509.000.000. Fasilitas ini juga dijamin dengan Surat Hak Tanggungan Pertama (*first registered hypothecation)* atas tanah, bangunan, dan mesin tertentu milik Mitratani sebesar Rp38.804.000.000.

Selama 2016, Mitratani telah membayar pinjaman sejumlah AS$150.000 (setara dengan Rp 2.001.162.500). Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar AS$111.000 (setara dengan Rp1.491.396.000) dan AS$261.000 (setara dengan Rp3.600.495.000).

22. LONG-TERM LOANS (continued)

Subsidiaries (continued)

Indonesia Eximbank

Based on credit agreement No. 30 dated December 12, 2014 of notary Ranti N. Handayani, SH., PT Mitratani Dua Tujuh ("Mitratani") obtain a long-term KI facility from Indonesia Eximbank with limit facility amounting to US$498,500 and credit term of 40 months since the date of the agreement. Effective loan interest rate is 6.75% per year with 6 month review and may change at any time.

Based on Notarial Deed No. 18 of Notary Ranti N. Handayani, S.H., dated December 7, 2016, Mitratani obtained an extra loan invesment facility from Indonesia Eximbank for factory construction expansion and purchase two unit of cold storage with limit of facility amounting to Rp10,595,000,000 and Rp3,625,000,000, respectively. Time period of facility from December 7, 2016 until December 7, 2022 with grace period until December 7, 2017.

This facility is secured by notarized fiduciary on inventories (Note 10) and trade receivables (Note 6) amounting to Rp22,503,000,000 and Rp5,509,000,000, respectively. This facility is also secured by a first registered hypothecation of land, buildings, and certain machineries owned by Mitratani amounting to Rp38,804,000,000.

During 2016, Mitratani has paid the loan amounting to US$150,000 (equivalent to Rp2,001,162,500). Loan outstanding as of December 31, 2016 and 2015 amounting to US$111,000 (equivalent to Rp1,491,396,000) and US$261,000 (equivalent to Rp3,600,495,000), respectively.

22. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Indonesia Eximbank (lanjutan)

Pembatasan

Perjanjian di atas memuat beberapa pembatasan antara lain mengharuskan Mitratani untuk memenuhi rasio keuangan tertentu, melakukan perpanjangan polis asuransi paling lambat satu bulan setelah tanggal jatuh tempo asuransi, melakukan merger atau akusisi, memperluas/mempersempit bisnis, mengubah Anggaran Dasar termasuk mengubah struktur modal, dan membagikan dividen.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Mitratani tidak memenuhi salah satu persyaratan yang disyaratkan di atas namun sudah mendapatkan *waiver*.

22. LONG-TERM LOANS (continued)

Subsidiaries (continued)

Indonesia Eximbank (continued)

Covenant

The above said agreement include certain restrictive covenants including, among others, the requirement for Mitratani to comply with certain financial ratios, extend the insurance policy no later than one month after the maturity date of insurance, merger or acquisition, expand or restrict bussiness, change the Articles of Association including changes the capital structure, and declaring any dividends.

As of December 31, 2016 and 2015, Mitratani did not comply with one of required covenants above for which has obtained a waiver.

23. UTANG OBLIGASI

23. BONDS PAYABLE

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Obligasi I PTPN X Tahun 2013	**700.000.000.000**	**700.000.000.000**	*Bonds I PTPN X Year 2013*

Pada tahun 2013, Perusahaan menerbitkan Obligasi I PTPN X Tahun 2013 dalam mata uang Rupiah dengan nilai nominal Rp700.000.000.000 dan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,9% per tahun yang dibayar tiap 3 bulan dengan nama "Obligasi I PTPN X Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap". Obligasi tersebut berjangka waktu 5 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2018. Seluruh obligasi dijual pada nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan PT CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, obligasi ini dijamin dengan aset Perusahaan yang belum dijaminkan secara *pari passu* dengan kreditur lain yang tidak dijamin secara khusus.

Perusahaan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal berikut:

- Melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen keuangan yang lain yang sejenis dengan kedudukan yang lebih tinggi dari obligasi

In 2013, the Company issued Bonds I PTPN X Year 2013 denominated in Rupiah with nominal amount of Rp700,000,000,000 and a fixed interest rate at 8.9% per annum which paid every three months. The bonds have a term of 5 years and will be due on July 5, 2018. All the bonds were sold at nominal value and are listed on the Indonesia Stock Exchange with PT CIMB Niaga Tbk as a Trustee.

Based on the trustee agreement, the bonds are secured by assets of the Company that has not been pledged as pari passu with other unsecured creditors in particular.

The Company, without the written consent of the trustee will not do the following:

- *Perform bond issuance or other similar financial instruments at a level that is higher than the bonds*

23. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Perusahaan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal berikut: (lanjutan)

- Melaksanakan perubahan bidang usaha utama kecuali atas keputusan pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Perusahaan
- Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain
- Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor
- Menjaminkan dan atau membebani dengan cara apapun aset Perusahaan termasuk hak atas pendapatan Perusahaan baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang.
- Memberikan pinjaman atau jaminan Perusahaan kepada pihak ketiga
- Melakukan pengalihan atas aset tetap Perusahaan dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset tetap yang dimiliki Perusahaan.
- Mengajukan permohonan pailit

Tujuan penerbitan obligasi adalah sebagai berikut:

- 39% untuk pelunasan saldo kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- 61% untuk belanja modal dan atau modal kerja dalam rangka optimalisasi 11 unit Pabrik Gula milik Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan telah memenuhi persyaratan yang disyaratkan di atas.

Berdasarkan hasil pemantauan tahunan pemeringkatan atas Obligasi I PTPN X Tahun 2013, sesuai dengan surat No. RC-102/PEF-DIR/II/2017 tanggal 20 Februari 2017, PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) telah menurunkan peringkat obligasi Perusahaan dari BBB+ menjadi BBB. Peringkat ini berlaku hingga tanggal 1 Februari 2018.

23. BONDS PAYABLE (continued)

The Company, without the written consent of the trustee will not do the following: (continued)

- *Implement changes to the main business areas except on the decision of the Government of Indonesia as the shareholder of the Company*
- *Conduct merger or consolidation with another company*
- *Reduction of the authorized, issued and paid-up capital*
- *Pledge or in any way encumber the Company's assets including the rights to the Company's revenue either existing or to be acquired in the future.*
- *Provide loan or guarantee of the Company to the third party*
- *Transfer of the Company's fixed assets in one or a series of transactions in the current financial year that exceeded 10% of total fixed assets owned by the Company.*
- *Filing for bankruptcy*

The purpose bond issuance are as follows:

- *39% for the repayment of outstanding credit at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
- *61% for capital expenditure and or working capital in order to optimize 11 units of sugar factories owned by the Company.*

As of December 31, 2016 and 2015, the Company has meet required covenants above.

Based on the results of the annual rating monitoring of Bonds I PTPN X Year 2013, according to the letter No. RC-102/PEF-DIR/II/2017 dated February 20, 2017, PT Pemeringkatan Efek Indonesia (“Pefindo”) has downgraded the bonds rating of the Company from BBB+ to BBB. This rating is valid up to February 1, 2018.

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan manfaat imbalan kerja untuk karyawan yang mencapai usia pensiun berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Kecuali untuk imbalan pensiun, imbalan kerja tersebut tidak didanai.

24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

The Company and Subsidiaries apply employee benefits for employees who achieve retirement age based on the provisions of Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003. Except for pension benefits, post-employment benefits are unfunded.

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan unsur-unsur beban imbalan karyawan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan liabilitas imbalan pascakerja karyawan dalam laporan posisi keuangan yang ditentukan berdasarkan laporan aktuaris independen PT Bestama Aktuaria, tertanggal 10 Januari 2017 untuk tahun 2016 dan tertanggal 21 Maret 2016 untuk tahun 2015 dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

The following table summarizes the elements of employee benefits expense in statement of profit or loss and other comprehensive invcome and employee benefits in statement of financial position determined by independent actuary PT Bestama Aktuaria, dated January 10, 2017 for year 2016 and dated March 21, 2016 for year 2015 by using the projected unit credit method.

a. Beban imbalan kerja karyawan, neto / ***a. Employee benefits expense, net***

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Beban jasa kini	87.909.105.746	30.930.521.411	*Current service cost*
Beban bunga	27.786.075.730	53.327.883.119	*Interest cost*
Biaya jasa lalu *(vested)*	20.703.242.367	974.231.138	*Past service cost (vested)*
Keuntungan aktuaria atas penyelesaian	(2.537.369.043)	(328.892.644)	*Actuarial gains on settlement*
Beban imbalan kerja karyawan, neto	**133.861.054.800**	**84.903.743.024**	***Employee benefits expense, net***

b. Liabilitas imbalan kerja karyawan, neto / ***b. Employee benefits liability, net***

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	1.052.086.833.231	1.038.123.170.297	*Present value of benefit obligation*
Nilai wajar aset program imbalan karyawan	(312.557.044.627)	(322.090.211.076)	*Fair value of employee benefits*
Defisit	739.529.788.604	716.032.959.221	*Deficit*
Batas atas aset	-	326.039.167	*Limits on assets*
Liabilitas imbalan kerja karyawan, neto	**739.529.788.604**	**716.358.998.388**	***Employee benefits liability, net***

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

b. Liabilitas imbalan kerja karyawan, neto (lanjutan)

Perubahan liabilitas imbalan kerja karyawan neto selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

b. Employee benefits liability, net (continued)

Changes in net liabilities for employee benefi for the year ended December 31, 2016 and 201 are as follow:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Saldo awal tahun	716.358.998.388	652.378.220.556	*Balance at beginning of yea*
Beban imbalan pada tahun berjalan	133.861.054.800	84.903.743.024	*Employee benefits expens during the year*
Pengukuran kembali liabilitas (aset) periode berjalan - beban komprehensif lainnya	(22.529.699.148)	50.479.392.041	*Re-measurement liabilite (assets) during the year - other comprehensive expense*
Pembayaran	(88.160.565.436)	(71.402.357.233)	*Paymen*
Saldo akhir tahun	**739.529.788.604**	**716.358.998.388**	***Ending balanc***

Total liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Total employee benefits liability is as follow:

	2016	**2015**	
Program imbalan pascakerja	403.575.397.698	426.253.529.755	*Employee benefits progra*
Program pensiun	209.122.189.297	159.151.255.505	*Pension progra*
Program iuran BPJS pensiunan	99.373.077.273	100.696.485.898	*BPJS dues retirement progra*
Program imbalan jangka panjang lain	27.459.124.336	30.257.727.230	*Other long-term benefi*
Total liabilitas imbalan pascakerja	**739.529.788.604**	**716.358.998.388**	***Total employee benefi liability***

Program imbalan pascakerja

Perusahaan dan Entitas Anak memberikan imbalan pascakerja yang merupakan pesangon pensiun, santunan meninggal dunia, santunan cacat dan pesangon pengunduran diri. Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

Employee benefits program

The Company and Subsidiaries provid employment benefits which are severance pension death benefit, disability compensation an severance resignation. The key assumptions calculation of employee benefit liabilities are a follows:

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Program imbalan pascakerja (lanjutan)

Employee benefits program (continued)

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Tingkat diskonto	8,10%-8,50%	8,00%-9,00%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji tahunan	4,00%-8,00%	8,00%	*Annual basic salary increase*
Usia pensiun normal	55-56 tahun/*years*	55-56 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat pengunduran diri	5% pada usia 20 dan 45 tahun dan menurun secara linear sampai dengan nol usia pensiun normal *5% to age 20 and 40 year and linearly decreasing to 0% at normal retirement age*	5% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan 0 pada usia pensiun normal/ *5% to age 20 year and linearly decreasing to 0% at normal retirement age*	*Resignation rate*
Tingkat mortalita	Tabel mortalita Indonesia tahun 2011 (Pria) *Indonesia Mortality Table 2011 (Male)*	Tabel mortalita Indonesia tahun 2011 (Pria) *Indonesia Mortality Table 2011 (Male)*	*Mortality rate*
Tingkat cacat	1%-10% dari mortalita/ *1%-10% of mortality rate*	10% dari mortalita/ *10% of mortality rate*	*Disability rate*

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

Movement of employee benefits liability are as follows:

	2016	**2015**	
Saldo awal	426.253.529.755	434.210.864.801	*Beginning balance*
Beban imbalan pada tahun berjalan	8.998.705.029	61.086.102.139	*Employee benefits expense during the year*
Pengukuran kembali liabilitas (aset) periode berjalan - beban komprehensif lainnya	17.487.554.686	(25.083.660.945)	*Re-measurement liabilites (assets) during the year - other comprehensive expense*
Pembayaran	(49.164.391.772)	(43.959.776.240)	*Payments*
Total liabilitas imbalan pascakerja	**403.575.397.698**	**426.253.529.755**	***Total employee benefits liability***

Program pensiun

Perusahaan dan Entitas Anak tertentu menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dihitung berdasarkan gaji pada tahun tertentu dan masa kerja karyawan. Dana Pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-344/KMK/17/1999 tanggal 13 September 1999.

Pension program

The Company and certain Subsidiaries provided defined benefits pension plan for all permanent employees calculated based on salary in certain year and service years of employees. The pension plan is managed by Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) based on the the Decision Letter of Ministry of Finance No. Kep-344/KMK/17/1999 dated September 13, 1999.

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Program pensiun (lanjutan)

Iuran dana pensiun yang ditanggung Perusahaan dan Entitas Anak tertentu di atas masing-masing sebesar 6,59% dan 6,00% dari penghasilan dasar pensiun untuk Perusahaan dan karyawan.

Nilai wajar liabilitas imbalan kerja Perusahaan dan Entitas Anak tertentu pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan asumsi-asumsi utamanya adalah sebagai berikut:

24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Pension program (continued)

A pension contribution by the Company and certain Subsidiaries as above respectively was 6.59% and 6,00% of pension basic income for the Company and its employees.

The fair value of employee benefits liability of the Company and certain Subsidiaries as of December 31, 2016 and 2015 and the key assumptions are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Tingkat diskonto	8,10%	8,90%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji pokok rata-rata	2,50%	2,50%	*Annual basic salary increase*
Usia pensiun normal	55-56 tahun/ *years*	55-56 tahun/ *years*	*Normal retirement age*
Tingkat pengunduran diri	5% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan nol usia pensiun normal *5% to age 20 year and linearly decreasing to 0% at normal retirement age*	5% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan 0 pada usia pensiun normal/ *5% to age 20 year and linearly decreasing to 0% at normal retirement age*	*Resignation rate*
Tingkat mortalita	Aktif: Tabel mortalita Indonesia tahun 2011 (Pria) Tidak aktif: *The 1971 Group Annuity Mortality Table* (Pria)/ *Active: Indonesia Mortality Table 2011 (Male) Not active: The 1971 Group Annuity Mortality Table (Male)*	Aktif: Tabel mortalita Indonesia tahun 2011 (Pria) Tidak aktif: *The 1971 Group Annuity Mortality Table* (Pria)/ *Active: Indonesia Mortality Table 2011 (Male) Not active: The 1971 Group Annuity Mortality Table (Male)*	*Mortality rate*
Tingkat cacat	10% dari mortalita/ *10% of mortality rate*	10% dari mortalita/ *10% of mortality rate*	*Disability rate*

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

Movement of employee benefits liability are as follows:

	2016	**2015**	
Saldo awal	159.151.255.505	102.342.411.654	*Beginning balance*
Beban imbalan pada tahun berjalan	62.759.927.575	10.717.532.680	*Employee benefits expense during the year*
Pengukuran kembali liabilitas (aset) periode berjalan - beban komprehensif lainnya	12.176.493.690	61.032.864.753	*Re-measurement liabilites (assets) during the year - other comprehensive expense*
Pembayaran	(24.965.487.473)	(14.941.553.582)	*Payments*
Total liabilitas imbalan pascakerja	**209.122.189.297**	**159.151.255.505**	***Total employee benefits liability***

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Program iuran BPJS pensiunan

Perusahaan dan Entitas Anak tertentu memberikan pembayaran premi BPJS kepada karyawan aktif yang akan pensiun dimasa yang akan datang. Nilai wajar liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan dan Entitas Anak tertentu pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan asumsi-asumsi utamanya adalah sebagai berikut:

BPJS dues retirement program

The Company and certain Subsidiaries provide BPJS premium payments to active employees who will retire in the future. The fair value of employment benefit liability of The Company and certain Subsidiaries on December 31, 2016 and 2015 and the key assumptions are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Tingkat diskonto	8,00%	8,90%	*Discount rate*
Usia pensiun normal	55-56 tahun/*years*	55-56 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat pengunduran diri	5% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan nol usia pensiun normal *5% to age 20 year and linearly decreasing to 0% at normal retirement age*	5% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan 0 pada usia pensiun normal/ *5% to age 20 year and linearly decreasing to 0% at normal retirement age*	*Resignation rate*
Tingkat mortalita	Aktif: Tabel mortalita Indonesia tahun 2011 (Pria) Tidak aktif: *The 1971 Group Annuity Mortality Table* (Pria)/ *Active: Indonesia Mortality Table 2011 (Male) Not active: The 1971 Group Annuity Mortality Table (Male)*	Aktif: Tabel mortalita Indonesia tahun 2011 (Pria) Tidak aktif: *The 1971 Group Annuity Mortality Table* (Pria)/ *Active: Indonesia Mortality Table 2011 (Male) Not active: The 1971 Group Annuity Mortality Table (Male)*	*Mortality rate*
Tingkat cacat	10% dari mortalita/ *10% of mortality rate*	10% dari mortalita/ *10% of mortality rate*	*Disability rate*

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

Movement of employee benefits liability are as follows:

	2016	**2015**	
Saldo awal	100.696.485.898	83.864.280.106	*Beginning balance*
Beban imbalan pada tahun berjalan	29.375.765.340	8.799.970.059	*Employee benefits expense during the year*
Pengukuran kembali liabilitas (aset) periode berjalan - beban komprehensif lainnya	(22.929.722.514)	14.530.188.233	*Re-measurement liabilites (assets) during the year - other comprehensive expense*
Pembayaran	(7.769.451.451)	(6.497.952.500)	*Payments*
Total liabilitas imbalan pascakerja	**99.373.077.273**	**100.696.485.898**	***Total employee benefits liability***

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Program imbalan jasa masa kerja lainnya

Perusahaan dan Entitas Anak tertentu memberikan imbalan jasa masa kerja lainnya meliputi santunan hari tua, pemeliharaan kesehatan pensiunan, bantuan kematian, dan cuti panjang. Nilai wajar liabilitas imbalan pascakerja Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan asumsi-asumsi utamanya sebagai berikut:

Other long-term employee benefits

The Company and certain Subsidiaries provided other long-term employee benefits, such as post-retirement benefits, retired healthcare benefits, money grave and long service leave. The fair value of employment benefit liability Group on December 31, 2016 and 2015 and the key assumptions are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Tingkat diskonto	8,20%	8,90%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji pokok rata-rata	4,00%	4,00%	*Annual basic salary increase*
Usia pensiun normal	55-56 tahun/*years*	55-56 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat pengunduran diri	5% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan nol usia pensiun normal *5% to age 20 year and linearly decreasing to 0% at normal retirement age*	5% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan 0 pada usia pensiun normal/ *5% to age 20 year and linearly decreasing to 0% at normal retirement age*	*Resignation rate*
Tingkat mortalita	Tabel mortalita Indonesia tahun 2011 (Pria) *Active: Indonesia Mortality Table 2011 (Male)*	Tabel mortalita Indonesia tahun 2011 (Pria) *Active: Indonesia Mortality Table 2011 (Male)*	*Mortality rate*
Tingkat cacat	10% dari mortalita/ *10% of mortality rate*	10% dari mortalita/ *10% of mortality rate*	*Disability rate*

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

Movement of employee benefits liability are as follows:

	2016	**2015**	
Saldo awal	30.257.727.230	31.960.663.995	*Beginning balance*
Beban imbalan pada tahun berjalan	32.726.656.856	4.300.138.146	*Employee benefits expense during the year*
Pengukuran kembali liabilitas (aset) periode berjalan - beban komprehensif lainnya	(29.264.025.010)	-	*Re-measurement liabilites (assets) during the year - other comprehensive expense*
Pembayaran	(6.261.234.740)	(6.003.074.911)	*Payments*
Total liabilitas imbalan pascakerja	**27.459.124.336**	**30.257.727.230**	***Total employee benefits liability***

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Program imbalan jasa masa kerja lainnya (lanjutan)

Pembayaran kontribusi yang diharapkan dari kewajiban imbalan kerja pada periode mendatang adalah sebagai berikut:

24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Other long-term employee benefits (continued)

Contribution payment expected from the employee benefits obligation in the future are as follows:

	2016	2015	
Dalam 12 bulan mendatang	78.552.646.149	88.254.954.824	*Within 1 year*
Antara 1 sampai 2 tahun	77.272.376.005	79.370.214.250	*Between 1 and 2 years*
Antara 2 sampai 5 tahun	207.918.621.743	290.366.647.870	*Between 2 and 5 years*
Di atas 5 tahun	1.631.688.663.917	1.676.302.758.020	*More than 5 years*
Jumlah	**1.995.432.307.814**	**2.134.294.574.964**	***Total***

Analisa sensitivitas untuk risiko tingkat diskonto

Pada tanggal 31 Desember 2016, jika tingkat diskonto meningkat sebesar satu persen dan semua variabel lainnya konstan, maka nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan lebih rendah sebesar Rp61.980.518.357, sedangkan jika tingkat diskonto menurun satu persen, maka nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan lebih tinggi sebesar Rp71.219.152.668.

Sensitivity analysis of discount rate risk

On December 31, 2016, if the discount rate of the Group amounted to 1% higher and all other variables constant, the present value of employee benefits liability would be higher by Rp61,980,518,357, whereas if the discount rate of the Group amounted to 1% lower, the present value of employee benefits liability would be higher by Rp71,219,152,668.

Analisa sensitivitas untuk risiko tingkat kenaikan upah

Pada tanggal 31 Desember 2016, jika tingkat kenaikan upah meningkat sebesar satu persen dan semua variabel lainnya konstan, maka nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan lebih tinggi sebesar Rp 28.895.050.367, sedangkan jika tingkat kenaikan upah menurun satu persen, maka nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan lebih rendah sebesar Rp26.644.773.620.

Sensitivity analysis of increased wages rate risk

On December 31, 2016, if the increased wages rate of the Group amounted to 1% higher and all other variables constant, the present value of employee benefits liability would be higher by Rp28,895,050,367, whereas if the wages rate of the Group amounted to 1% lower, the present value of employee benefits liability would be lower by Rp26,644,773,620.

25. MODAL SAHAM

Pemegang saham Perusahaan dan saldo yang terkait pada tanggal 31 Desember 2016:

25. SHARE CAPITAL

The Company's shareholders and their related balance as of December 31, 2016:

Pemegang saham	Jumlah saham/ *Number of share*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah/ *Amount*	*Shareholders*
Saham seri A				*Series A share*
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	1	0,00%	1.000.000	*PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*
Saham seri B				*Series B shares*
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	1.661.035	90,00%	1.661.035.000.000	*PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*
Negara Republik Indonesia	184.560	10,00%	184.560.000.000	*Republic of Indonesia*
Jumlah	**1.845.596**	**100%**	**1.845.596.000.000**	***Total***

25. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pemegang saham Perusahaan dan saldo yang terkait pada tanggal 31 Desember 2015:

25. SHARE CAPITAL (continued)

The Company's shareholders and their related balance as of December 31, 2015:

Pemegang saham	Jumlah saham/ *Number of share*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah/ *Amount*	*Shareholders*
Saham seri A				*Series A share*
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	1	0,00%	1.000.000	*PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*
Saham seri B				*Series B shares*
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	783.535	90,00%	783.535.000.000	*PT Perkebunan Nusantara III (Persero)*
Negara Republik Indonesia	87.060	10,00%	87.060.000.000	*Republic of Indonesia*
Jumlah	**870.596**	**100%**	**870.596.000.000**	***Total***

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, efektif tanggal 16 Agustus 2007, untuk menyisihkan sampai dengan minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan.

Berdasarkan Akta Notaris No. 11 tanggal 14 Maret 2016 dari Nanda Faux Iwan, SH., pemegang saham menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh perusahaan sebanyak 975.000 saham dengan nominal Rp1.000 per saham atau sejumlah Rp975.000.000.000 yang diambil dari dana PMN.

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham No. RIS-K.BUMN/16.001 tanggal 14 Juni 2016, para pemegang saham menyetujui untuk menyisihkan Rp65.479.220.551 untuk cadangan umum.

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham No. RIS-002/XX-K.BUMN/2015 tanggal 18 Mei 2015, para pemegang saham menyetujui untuk menyisihkan Rp18.501.105.760 untuk cadangan umum.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama tahun penyajian.

Capital management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Company is also required by the Limited Liability Company Law No. 40, Year 2007 effective on August 16, 2007 to allocate and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches at least 20% of the issued and paid-up capital.

Based on the Notarial Deed No. 11 dated March 14, 2016 of Nanda Faux Iwan, SH., the shareholder ratified the increase in the Company's issued and fully paid capital by 975,000 shares, with a nominal value of Rp1,000 per shares or totaling Rp975,000,000,000 taken from PMN funds.

Based on minutes of the General Meeting of Shareholders No. RIS-K.BUMN/16.001 dated June 14, 2016, the Shareholders approved to allocate Rp65,479,220,551 as general reserve.

Based on minutes of the General Meeting of Shareholders No. RIS-002/XX-K.BUMN/2015 dated May 18, 2015, the Shareholders approved to allocate Rp18,501,105,760 as as general reserve.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or raise debt financing. No changes were made in the objectives, policies or processes during the years presented.

26. MODAL SUMBANGAN / *26. DONATED CAPITAL*

Donor	Aset/ *Assets*	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015
Burger Soehne AG Burg, Swiss	Gudang *cooler*, ruang reparasi mesin, rumah sakit, gudang pengering, gedung *cigarillos/ Coller warehouse, machinery repair room, hospital, drying warehouse, cigarillos building*	9.739.880.250	9.739.880.250
The International Agency for International Development - Australia	*Stabilizing pond* dan modifikasi kolam *aerasi/ Stabilizing pond and modification of an aeration*	286.588.087	286.588.087
Dokter/ *Doctor*	Inventaris/ *Equipments*	35.035.801	35.035.801
Jumlah modal sumbangan/ *Total donated capital*		**10.061.504.138**	**10.061.504.138**

27. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA / *27. OTHER COMPONENT OF EQUITY*

	31 Desember/*December 31,* 2016	31 Desember/*December 31,* 2015	
Kenaikan investasi saham pada Entitas Asosiasi	10.137.116.356	10.137.116.356	*Increase in investment shares in Associates*
Tambahan modal disetor dari pengajuan pengampunan pajak	488.870.432	-	*Additional paid in capital from tax amnesty filling*
Penyertaan Modal Negara (PMN) 2015	-	975.000.000.000	*State Capital Investment (PMN) 2015*
Jumlah ekuitas lainnya	**10.625.986.788**	**985.137.116.356**	***Total other equity***

Penyertaan Modal Negara (PMN) 2015

Perusahaan menerima dana program Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp975.000.000.000 pada tanggal 30 Desember 2015.

Dana ini akan digunakan dalam beberapa program kegiatan Perusahaan, antara lain:

- Peningkatan kapasitas giling dan rendemen tebu untuk PG Tjoekir dan PG Gempolkrep
- Pembangunan proyek *co-generation* untuk pembangkit listrik di PG Ngadiredjo, PG Tjoekir dan PG Gempolkrep
- Pemantapan kinerja pabrik *Bioethanol* di PG Gempolkrep
- Pembangunan 1 pabrik *Bioethanol* berkapasitas 100 KL/hari di PG Ngadiredjo

Pada tahun 2016, dana tersebut telah direklasifikasi sebagai penambahan modal saham (Catatan 25).

State Capital Investment (PMN) 2015

The Company received State Capital Investment program fund (PMN) amounting to Rp975,000,000,000 on December 30, 2015.

This fund will be allocated to several program activities of the Company, among others:

- *The increase in milling capacity and sugarcane yield rendement for Tjoekir Sugar Factory and Gempolkrep Sugar Factory*
- *Project development of co-generation for power plant in Ngadirejo Sugar Factory, Tjoekir Sugar Factory and Gempolkrep Sugar Factory*
- *Stabilization of Bioethanol plant performance in Gempolkrep Sugar Factory*
- *Development of one Bioethanol plant with capacity of 100 KL/day in Ngadiredjo Sugar Factory*

In 2016, the fund was reclassified as additional share of capital (Note 25).

27. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA (lanjutan)

Kenaikan investasi saham Entitas Asosiasi

Pada tahun 2012, Entitas Asosiasi Perusahaan, PT Mitratani Dua Tujuh (saat ini adalah Entitas Anak) melakukan kuasi reorganisasi yang menghasilkan kenaikan revaluasi nilai wajar aset neto yang berasal dari aset tetap.

Tambahan modal disetor dari pengampunan pajak

Pada tanggal 28 September 2016, PT Mitratani Dua Tujuh, Entitas Anak mengajukan pengampunan pajak dengan mencatat selisih antara harga perolehan aset dan liabilitas sebesar Rp752.126.671 sebagai tambahan modal disetor dalam laporan posisi keuangannya.

27. OTHER COMPONENT OF EQUITY (continued)

Increase of investment in shares in Associates

In 2012, Associates of the Company, PT Mitratani Dua Tujuh (currently a Subsidiary) conducted quasi-reorganization which resulted in a revaluation of the fair value of net assets originating from fixed assets

Additional paid-in capital for tax amnesty

On September 28, 2016, PT Mitratani Dua Tujuh, a Subsidiary, submitted tax amnesty by recording a difference between value of assets and liability amounting to Rp752,126,671 as additional paid in capital in its statement of financial position.

28. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Akun ini merupakan hak pemegang saham nonpengendali atas aset bersih dan bagian laba rugi bersih Entitas Anak yang dikonsolidasikan.

a. Ekuitas neto yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali:

28. NON-CONTROLLING INTERESTS

This account represents the right of non-controlling interest shareholders of net assets and net income (loss) of consolidated Subsidiaries.

a. Net equity attributable to non-controlling interest:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
PT Surya Satria Sembada	8.007.410.883	7.517.037.693	*PT Surya Satria Sembada*
Koperasi Karyawan	446.077.987	366.048.335	*Koperasi Karyawan*
PT Kelola Mina Laut	30.832.255.065	27.573.304.033	*PT Kelola Mina Laut*
Jumlah	**39.285.743.935**	**35.456.390.061**	***Total***

b. Laba rugi bersih dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali:

b. Net income and other comprehensive income for the year attributable to non-controlling interests:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
PT Surya Satria Sembada	490.373.191	3.695.919.502	*PT Surya Satria Sembada*
Koperasi Karyawan	99.166.233	99.791.762	*Koperasi Karyawan*
PT Kelola Mina Laut	4.658.477.682	9.954.283.958	*PT Kelola Mina Laut*
Jumlah	**5.248.017.106**	**13.749.995.222**	***Total***

29. PENDAPATAN / *29. REVENUE*

a. Rincian pendapatan berdasarkan segmen adalah sebagai berikut: / ***a. Details revenue by segment is as follows:***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2016	**2015**	
Gula	1.021.885.407.268	1.362.446.279.652	*Sugar*
Tembakau	331.435.383.035	325.817.143.167	*Tobacco*
Rumah Sakit	293.483.314.117	263.356.366.704	*Hospital*
Edamame dan okra	208.638.522.762	181.632.472.608	*Edamame and Okra*
Tetes	205.045.723.342	287.908.648.062	*Molasses*
Bioethanol	115.028.572.030	40.130.787.175	*Bioethanol*
Karung plastik	51.873.715.123	42.869.646.989	*Plastic bag*
Cutting bobbin	32.982.882.112	27.396.296.413	*Cutting Bobbin*
Jumlah pendapatan	**2.260.373.519.789**	**2.531.557.640.770**	***Total revenue***

b. Rincian pendapatan menurut daerah geografis adalah sebagai berikut: / ***b. Details revenue by geographic region is as follows:***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2016	**2015**	
Lokal	1.737.780.165.547	2.018.966.938.928	*Local*
Ekspor	522.593.354.242	512.590.701.842	*Export*
Jumlah pendapatan	**2.260.373.519.789**	**2.531.557.640.770**	***Total revenue***

c. Penjualan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan dilakukan kepada pelanggan adalah sebagai berikut: / ***c. Sales that more than 10% of the total revenue are as follow:***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*				
	2016		**2015**		
	Jumlah / *Total*	**Persentase dari penjualan neto / *The percentage of net sales***	**Jumlah / *Total***	**Persentase dari penjualan neto / *The percentage of net sales***	
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik	621.056.437.817	27,48%	-	0%	*Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik*
Tobacco Traders International	262.437.645.238	11,61%	213.932.225.004	8,45%	*Tobacco Traders International*
PT Berlian Mandiri Perkasa	174.941.342.103	7,74%	405.981.545.000	16,04%	*PT Berlian Mandiri Perkasa*
Jumlah	**1.058.435.425.158**	**46,83%**	**619.913.770.004**	**24,49%**	***Total***

30. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *30. COST OF SALES*

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 / *Year ended December 31, 2016*

	Gula / *Sugar*	Tetes / *Molasses*	Tembakau / *Tobacco*	Rumah Sakit / *Hospital*	Lainnya / *Others*	Jumlah / *Total*	
Biaya langsung							*Direct cost*
Biaya tanaman							*Plantation cost*
Pembibitan/pemupukan	7.650.450.827	1.971.017.516	46.120.606.307	-	14.960.893.178	70.702.967.828	*Seedling/fertilization*
Pemeliharaan	62.365.316.746	15.785.706.569	150.436.614.613	-	10.852.294.974	239.439.932.902	*Maintenance*
Pengangkutan	47.063.860.927	11.565.175.804	14.928.715.249	-	11.922.084.950	85.479.836.930	*Transportation*
Gaji dan tunjangan karyawan	81.797.506.814	23.736.225.623	22.784.600.975	-	35.203.382.721	163.521.716.133	*Salaries and allowances*
Bahan baku	-	-	-	-	56.982.989.075	56.982.989.075	*Raw materials*
Jumlah biaya tanaman	**198.877.135.314**	**53.058.125.512**	**234.270.537.144**	**-**	**129.921.644.898**	**616.127.442.868**	***Total cost of plants***
Biaya pabrik							*Factory cost*
Biaya pengolahan	388.318.010.180	20.852.209.802	45.823.031.886	-	29.754.875.189	484.748.127.057	*Processing expenses*
Pemelihaan mesin dan instalasi	167.465.088.271	47.138.749.924	-	-	4.301.835.390	218.905.673.585	*Maintenance of machinery and installation*
Gaji dan tunjangan karyawan	182.735.580.755	55.466.053.957	6.567.438.524	-	83.024.499.645	327.793.572.881	*Salaries and allowances*
Biaya pengemasan	24.892.916.545	-	-	-	4.644.243.711	29.537.160.256	*Packaging expenses*
Lain-lain	11.796.306.224	3.313.936.584	10.246.946	-	22.220.313.799	37.340.803.553	*Others*
Jumlah biaya pabrik	**775.207.901.975**	**126.770.950.267**	**52.400.717.356**	**-**	**143.945.767.734**	**1.098.325.337.332**	***Total factory cost***
Biaya langsung rumah sakit	-	-	-	151.919.336.392		151.919.336.392	*Direct cost of hospital*
Penyusutan (Catatan 14)	136.294.163.764	36.821.756.170	5.457.274.558	15.895.091.729	9.655.363.921	204.123.650.142	*Depreciation (Note 14)*
Penyusutan aset pengampunan pajak (Catatan 14)	-	-	-	-	1.409.697.189	1.409.697.189	*Depreciation of tax amnesty's asset (Note 14)*
Amortisasi	194.768.737	52.619.472	28.965.393	-	-	276.353.602	*Amoritzation*
Jumlah biaya langsung	**1.110.573.969.790**	**216.703.451.421**	**292.157.494.451**	**167.814.428.121**	**284.932.473.742**	**2.072.181.817.525**	***Total direct cost***
Biaya tidak langsung							*Indirect cost*
Gaji dan tunjangan karyawan	73.645.554.659	21.465.202.629	20.662.008.197	4.911.297.118	3.955.302.540	124.639.365.143	*Salaries and allowances*
Pengangkutan dan perjalanan	-	-	10.481.140.221	1.856.016.627	144.300.760	12.481.457.608	*Transportation and travel*
Pemeliharaan bangunan, mesin, dan instalasi	12.407.883.694	3.049.034.938	14.916.291.429	1.370.542.683	779.399.523	32.523.152.267	*Maintenance of building, machinery and installation*
Lain-lain	10.050.118.861	2.266.173.069	6.211.700.427	48.431.151.507	19.606.002.588	86.565.146.452	*Others*
Jumlah biaya tidak langsung	**96.103.557.214**	**26.780.410.636**	**52.271.140.274**	**56.569.007.935**	**24.485.005.411**	**256.209.121.470**	***Total indirect cost***
Jumlah biaya produksi	**1.206.677.527.004**	**243.483.862.057**	**344.428.634.725**	**224.383.436.056**	**309.417.479.153**	**2.328.390.938.995**	***Total production cost***
Persediaan barang dalam proses - awal tahun	16.941.680.055	-	266.743.378.672	-	17.770.817.613	301.455.876.340	*Work in process inventory - at beginning of year*
Persediaan barang dalam proses - akhir tahun	(12.696.315.290)	-	(312.977.836.895)	-	(13.857.954.812)	(339.532.106.997)	*Work in process inventory - at end of year*
Persediaan barang jadi - awal tahun	63.095.794.331	7.978.725.546	2.720.326.751	-	43.791.720.126	117.586.566.754	*Finished goods inventory - at beginning of year*
Persediaan barang jadi - akhir tahun	(352.188.294.280)	(18.237.397.797)	-	-	(27.900.644.724)	(398.326.336.801)	*Finished goods inventory - at end of year*
Jumlah beban pokok pendapatan	**921.830.391.820**	**233.225.189.806**	**300.914.503.253**	**224.383.436.056**	**329.221.417.356**	**2.009.574.938.291**	***Total cost of sales***

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 / *Year ended December 31, 2015*

	Gula / *Sugar*	Tetes / *Molasses*	Tembakau / *Tobacco*	Rumah Sakit / *Hospital*	Lainnya / *Others*	Jumlah / *Total*	
Biaya langsung							*Direct cost*
Biaya tanaman							*Plantation cost*
Pembibitan/pemupukan	5.725.047.454	1.322.899.676	42.095.286.153	-	25.833.683.569	74.976.916.852	*Seedling/fertilization*
Pemeliharaan	43.572.537.986	10.068.404.998	109.719.832.389	-	-	163.360.775.373	*Maintenance*
Pengangkutan	40.669.725.138	9.397.645.462	22.366.891.019	-	-	72.434.261.619	*Transportation*
Gaji dan tunjangan karyawan	96.656.698.138	22.334.682.064	27.197.493.400	-	62.627.101.036	208.815.974.638	*Salaries and allowances*
Bahan baku	-	-	-	-	57.620.236.029	57.620.236.029	*Raw materials*
Jumlah biaya tanaman	**186.624.008.716**	**43.123.632.200**	**201.379.502.961**	**-**	**146.081.020.634**	**577.208.164.511**	***Total cost of plants***
Biaya pabrik							*Factory cost*
Biaya pengolahan	72.190.847.292	16.681.302.520	47.989.864.425	-	42.012.059.614	178.874.073.851	*Processing expenses*
Pemelihaan mesin dan instalasi	124.212.945.863	34.691.721.793	-	-	-	158.904.667.656	*Maintenance of machinery and installation*
Gaji dan tunjangan karyawan	200.326.308.116	50.703.694.431	7.029.621.197	-	12.206.474.247	270.266.097.991	*Salaries and allowances*
Biaya pengemasan	21.682.683.858	-	-	-	-	21.682.683.858	*Packaging expenses*
Lain-lain	8.318.294.005	1.922.127.028	606.570.798	-	33.467.045.458	44.314.037.289	*Others*
Jumlah biaya pabrik	**426.731.079.134**	**103.998.845.772**	**55.626.056.420**	**-**	**87.685.579.319**	**674.041.560.645**	***Total factory cost***
Biaya langsung rumah sakit	-	-	-	136.729.217.735	-	136.729.217.735	*Direct cost of hospital*
Penyusutan (Catatan 14)	135.611.707.147	32.286.895.565	5.551.512.655	6.875.096.649	10.086.875.771	190.412.087.787	*Depreciation (Note 14)*
Amortisasi	168.041.100	44.113.321	22.594.279	-	-	234.748.700	*Amoritzation*
Jumlah biaya langsung	**749.134.836.097**	**179.453.486.858**	**262.579.666.315**	**143.604.314.384**	**243.853.475.724**	**1.578.625.779.378**	***Total direct cost***
Biaya tidak langsung							*Indirect cost*
Gaji dan tunjangan karyawan	93.052.085.649	21.501.756.096	20.425.813.084	6.467.603.328	6.349.478.438	147.796.736.595	*Salaries and allowances*
Pengangkutan dan perjalanan	8.466.565.386	1.956.388.431	538.511.778	1.793.010.285	9.459.864.850	22.214.340.730	*Transportation and travel*
Pemeliharaan bangunan, mesin, dan instalasi	13.440.531.453	3.105.734.032	12.512.090.772	1.394.971.272	3.262.873.073	33.716.200.602	*Maintenance of building, machinery and installation*
Lain-lain	10.670.416.239	2.465.637.237	6.864.721.220	51.808.812.261	12.001.081.382	83.810.668.339	*Others*
Jumlah biaya tidak langsung	**125.629.598.727**	**29.029.515.796**	**40.341.136.854**	**61.464.397.146**	**31.073.297.743**	**287.537.946.266**	***Total indirect cost***
Jumlah biaya produksi	**874.764.434.824**	**208.483.002.654**	**302.920.803.169**	**205.068.711.530**	**274.926.773.467**	**1.866.163.725.644**	***Total production cost***

30. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan)

30. COST OF SALES (continued)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (lanjutan)

Year ended December 31, 2015 (continued)

	Gula / *Sugar*	Tetes / *Molasses*	Tembakau / *Tobacco*	Rumah Sakit / *Hospital*	Lainnya / *Others*	Jumlah / *Total*	
Persediaan barang dalam proses - awal tahun	13.094.972.872	-	229.706.009.046	-	14.683.936.616	257.484.918.534	*Work in process inventory - at beginning of year*
Persediaan barang dalam proses - akhir tahun	(16.941.680.055)	-	(266.743.378.672)	-	(17.770.817.613)	(301.455.876.340)	*Work in process inventory - at end of year*
Persediaan barang jadi - awal tahun	140.073.818.496	23.597.456.231	6.723.186.427	-	38.221.381.892	208.615.843.046	*Finished goods inventory - at beginning of year*
Persediaan barang jadi - akhir tahun	(63.095.794.331)	(7.978.725.546)	(2.720.326.751)	-	(43.791.720.126)	(117.586.566.754)	*Finished goods inventory - at end of year*
Jumlah beban pokok pendapatan	**947.895.751.806**	**224.101.733.339**	**269.886.293.219**	**205.068.711.530**	**266.269.554.236**	**1.913.222.044.130**	***Total cost of sales***

Pembelian yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan dilakukan kepada pelanggan adalah sebagai berikut:

Purchase that more than 10% of the total revenue are as follow:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*				
	2016		2015		
	Jumlah / *Total*	Persentase dari penjualan neto / *The percentage of net sales*	Jumlah / *Total*	Persentase dari penjualan neto / *The percentage of net sales*	
Agrocorp International Pte Ltd., Singapura	**279.985.555.319**	**12,39%**	**-**	**0%**	*Agrocorp Internationl Pte Ltd., Singapore*

31. BEBAN PENJUALAN DAN UMUM DAN ADMINISTRASI

31. SELLING EXPENSES AND GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

a. Beban penjualan

a. Selling expenses

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2016	2015	
Transportasi	9.444.144.755	10.531.174.636	*Transportation*
Beban penjualan tembakau	3.194.522.204	3.488.287.343	*Tobacco sales expense*
Beban penjualan gula dan tetes	1.713.120.849	1.266.558.693	*Sugar and molasses sales expense*
Beban kirim dan bongkar	1.693.211.925	937.009.821	*Shipping and unloading cost*
Jasa perantara	1.185.561.588	1.173.961.397	*Brokerage service*
Beban promosi	321.926.684	1.216.738.194	*Promotion expense*
Lain-lain	1.996.429.784	1.389.712.735	*Others*
Jumlah	**19.548.917.789**	**20.003.442.819**	***Total***

31. BEBAN PENJUALAN DAN UMUM DAN ADMINISTRASI (lanjutan)

31. SELLING EXPENSES AND GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES (continued)

b. Beban umum dan administrasi

b. General and administrative expenses

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2016	**2015**	
Gaji, upah dan tunjangan kesejahteraan	181.873.858.208	157.990.004.280	*Salaries, wages and welfare benefits*
Beban kantor, gedung dan mess	26.550.319.700	31.886.467.434	*Office, building, and hostel cost*
Penyusutan (Catatan 14)	22.029.311.061	23.655.531.602	*Depreciation (Note 14)*
Beban penelitian dan pengembangan	21.047.571.578	16.595.984.363	*Research and development cost*
Tunjangan sosial karyawan	18.700.693.204	21.038.617.092	*Employee social benefits*
Perjamuan	8.628.137.692	1.387.437.637	*Entertainment*
Perjalanan dinas	6.175.619.023	6.006.446.183	*Business travelling*
Transportasi	4.667.078.781	5.185.562.485	*Transportation*
Beban komisaris dan direksi	3.281.128.125	2.552.900.500	*Commissioners and directors fees*
Amortisasi	2.145.960.171	1.201.299.731	*Amortization*
Pajak dan asuransi	1.927.053.558	3.274.600.932	*Taxes and insurances*
Lain-lain	9.639.875.056	3.081.587.782	*Others*
Jumlah	**306.666.606.157**	**273.856.440.021**	***Total***

32. PENDAPATAN DAN BEBAN KEUANGAN

32. FINANCE INCOME AND EXPENSES

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2016	**2015**	
Bunga kredit investasi	47.510.601.840	48.253.131.578	*Interest of investment credit*
Bunga obligasi	37.746.934.236	37.746.934.236	*Interest of bond*
Bunga kredit modal kerja	26.288.203.834	21.267.231.498	*Interest of working capital credit*
Jumlah	**111.545.739.910**	**107.267.297.312**	***Total***

Pendapatan keuangan Kelompok Usaha diperoleh dari deposito berjangka.

Finance income Group obtained from time deposits.

33. PENDAPATAN (BEBAN) USAHA LAINNYA / *33. OTHER OPERATING INCOME (EXPENSES)*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2016	**2015**	
BEBAN OPERASI LAIN			***OTHER OPERATING EXPENSES***
Beban konsultan	57.353.037.630	41.653.967.064	*Consultant expenses*
Beban penyisihan piutang	37.845.989.866	2.149.556.070	*Provision for impairment lossess*
Jaminan sosial pensiun	13.797.331.217	8.020.426.105	*Social security pensions*
Sumbangan	6.565.999.716	6.878.156.615	*Donation*
Beban CSR	6.371.996.257	644.017.750	*CSR expenses*
Beban kompos	4.930.002.859	2.014.105.484	*Compost expenses*
Kerugian penyertaan di entitas asosiasi (Catatan 12)	2.019.371.094	-	*Losses on investment in associate (Note 12)*
Beban pajak	557.087.825	4.171.721.448	*Tax expenses*
Beban los roboh/terbakar	73.865.965	1.079.047.149	*Fire/damage expenses*
Beban percobaan penelitian dan pengembangan	105.000	4.463.902.412	*Research and development Expenses*
Iuran tambahan Dana Pensiun Perkebunan	-	6.871.801.215	*Additional contributions of Dana Pensiun Perkebunan*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	8.190.602.207	7.105.355.972	*Others (each below Rp1 million)*
Jumlah	**137.705.389.636**	**85.052.057.284**	***Total***
PENDAPATAN OPERASI LAIN			***OTHER OPERATING REVENUE***
Pengampunan pajak (Catatan 18h)	11.996.598.485	-	*Tax amnesty (Note 18h)*
Pendapatan cigarillos	5.734.486.942	4.665.599.517	*Cigarillos revenue*
Pendapatan atas klaim asuransi	4.367.440.000	4.041.086.130	*Revenue from insurance claim*
Pendapatan kakao, sengon, bibit dan lainnya	3.941.928.022	1.255.718.182	*Cocoa, sengon, seed and other revenues*
Pendapatan bagi hasil	3.042.546.445	-	*Profit sharing income*
Pendapatan sewa	2.624.168.206	232.077.654	*Rental income*
Denda keterlambatan/ administrasi	2.429.816.530	3.748.261.559	*Late penalty/administration*
Pendapatan atas selisih kurs	2.172.647.378	5.859.922.094	*Gain on foreign exchange*
Penjualan dan *fee* dari Peserta Koordinasi	1.695.425.241	6.555.361.658	*Sales and fees from Peserta Koordinasi*
Setoran gula polutan	1.493.879.538	2.519.222.605	*Revenue from pollutant sugar*
Beban akrual yang tidak terealisasi	1.031.940.521	5.562.372.532	*Unrealized accrued expenses*
Penjualan barang bekas, ampas dan lainnya	929.785.459	3.047.942.390	*Scraps, dregs and other sales*
Penjualan benih	288.431.763	1.682.978.982	*Seed sales*
Pendapatan atas hibah aset gedung gula	-	14.162.500.000	*Revenue from sugar building grants*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	8.453.487.000	9.532.918.529	*Others (each below Rp1 billion)*
Jumlah	**50.202.581.530**	**62.865.961.832**	***Total***

34. DIVIDEN TUNAI

Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 14 Juni 2016, menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp53.573.907.690 atau Rp29.028 per lembar saham kepada seluruh pemegang saham tanggal 31 Desember 2015, yang telah dibayarkan pada tahun 2016.

Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 15 Mei 2015, menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp4.625.276.000 atau Rp4.625 per lembar saham kepada seluruh pemegang saham tanggal 31 Desember 2014, yang telah dibayarkan pada tahun 2015.

34. CASH DIVIDENDS

The General Shareholders' Meeting dated June 14, 2016, approved the distribution of cash dividends amounting to Rp53,573,907,690 or Rp29,028 per share to all shareholders as of December 31, 2015, which has been paid in 2016.

The General Shareholders' Meeting dated May 15, 2015, approved the distribution of cash dividends amounting to Rp4,625,276,000 or Rp4,625 per share to all shareholders as of December 31, 2014, which has been paid in 2015.

35. LABA (RUGI) PER SAHAM

Laba (rugi) bersih per saham dihitung dari laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dibagi rata-rata tertimbang saham, dengan rincian sebagai berikut:

35. EARNINGS (LOSS) PER SHARE

Earnings (loss) per share calculated from profit (loss) for the year attributable to owners of the parent entity divided by the weighted average shares, with details as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(161.352.670.426)	119.053.128.201	*Profit (loss) for the year attributable to owners of the parent entity*
Jumlah rata-rata tertimbang saham selama tahun berjalan	1.642.471	870.596	*The weighted average number of shares during the year*
Laba (rugi) per saham	**(98.238)**	**136.749**	***Earnings (loss) per share***

36. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama dari instrumen keuangan Kelompok Usaha adalah risiko suku bunga, risiko mata uang, risiko harga komoditas dan risiko kredit. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:

Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas

Risiko suku bunga Kelompok Usaha terutama timbul dari piutang jangka panjang, piutang petani tebu rakyat, utang KKPE serta pinjaman untuk modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai suku bunga menimbulkan risiko suku bunga atas nilai wajar kepada Kelompok Usaha.

Saat ini, Kelompok Usaha tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko suku bunga.

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The main risks arising from the Group's financial instruments are interest rate risk, foreign currency risk, commodity price risk, and credit risk. The management reviews and approves policies for managing each of these financial risk, which are described in more detail as follows:

Interest rate risk on fair value and cash flow

The Group interest rate risk mainly arises from long-term receivables, sugarcane farmers receivables, KKPE payables, also working capital loans and investment. Loans at various interest rates cause a risk of interest rates on the fair value to the Group.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for interest rate exposures.

36. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas (lanjutan)

Analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga

Pada tanggal 31 Desember 2016, jika tingkat suku bunga Kelompok Usaha sebesar 1% lebih rendah/tinggi, dengan semua variabel lain konstan, rugi sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan sebelum kapitalisasi beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebesar Rp15,8 miliar lebih rendah/tinggi.

Risiko mata uang

Risiko mata uang merupakan risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar mata uang. Risiko Kelompok Usaha atas fluktuasi nilai tukar mata uang terutama timbul dari piutang dagang dari penjualan dalam mata uang asing dan hutang dari pembelian dalam mata uang asing. Saat ini, Kelompok Usaha tidak memiliki kebijakan lindung nilai yang formal untuk mengelola risiko mata uang. Namun harga produk utama Kelompok Usaha akan berfluktuasi sesuai dengan harga yang diperdagangkan di pasar internasional. Keterkaitan fluktuasi harga produk Kelompok Usaha dengan perubahan nilai tukar mata uang secara alamiah tersebut dipandang dapat mengurangi risiko mata uang Kelompok Usaha.

Analisis sensitivitas untuk risiko nilai mata uang asing

Pada tanggal 31 Desember 2016, jika nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dan Euro melemah/menguat sebesar 10% dengan semua variabel lain konstan, rugi sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sebesar Rp9,4 miliar lebih tinggi/rendah.

Risiko harga komoditas

Kelompok Usaha terkena dampak risiko harga komoditas akibat beberapa faktor, antara lain cuaca, kebijakan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran pasar dan lingkungan ekonomi global. Dampak tersebut terutama timbul dari penjualan dan produk lainnya di mana marjin laba atas penjualan barang tersebut dapat terpengaruh fluktuasi harga pasar internasional.

Pada saat ini, Kelompok Usaha tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko harga komoditas.

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Interest rate risk on fair value and cash flow (continued)

Sensitivity analysis of interest rate risk

On December 31, 2016, if the interest rate of the Group amounted to 1% lower/higher, with all other variables constant, loss before tax benefit (expense) before the capitalization of financial expenses for the year then ended amounted to Rp15.8 billion lower/higher.

Currency risk

Currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's exposure to the risk of changes in foreign exchange rates relates primarily to trade receivables from sales denominated in foreign currency and loans denominated in froeign currency. Currently, the Group does not have a formal hedging policy to manage currency risk. But the price of the main product groups will fluctuate according to the traded price in the international market. Linkage price fluctuations of the Group's product with changes in the currency exchange rate naturally will reduce the currency risk of the Group.

Sensitivity analysis of foreign exchange risk

On December 31, 2016, if the value of the Rupiah against the US Dollar and the Euro weakened/ strengthened by 10% with all other variables constant, loss before tax benefit (expense) for the year then ended amounted to Rp9.4 billion higher/lower.

Commodity price risk

The Group is affected by the commodity price as a result of several factors, specifically from weather, government policies, the level of market supply and demand and the global economic environment. These impacts mainly arise from sales and other products where the profit margin on the sale of these goods can be affected by fluctuations in international market prices.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for commodity price risk exposures.

36. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit

Risiko kredit yang dihadapi oleh Kelompok Usaha berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan, piutang petani tebu rakyat dan penempatan rekening koran dan deposito pada bank.

Selain dari pengungkapan di bawah ini, Kelompok Usaha tidak memiliki konsentrasi risiko kredit.

Kas dan setara kas

Risiko kredit atas penempatan rekening koran dan deposito dikelola oleh manajemen sesuai dengan kebijakan Kelompok Usaha. Investasi atas kelebihan dana dibatasi untuk tiap-tiap bank dan kebijakan ini dievaluasi setiap tahun oleh direksi. Batas tersebut ditetapkan untuk meminimalkan risiko konsentrasi kredit sehingga mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank-bank tersebut.

Piutang usaha

Terdapat kebijakan untuk memastikan penjualan produk hanya dilakukan kepada pelanggan yang dapat dipercaya dengan rekam jejak atau sejarah kredit yang baik. Merupakan kebijakan Kelompok Usaha bahwa semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Untuk penjualan ekspor, Kelompok Usaha mensyaratkan pembayaran saat penyerahan dokumen penjualan. Kelompok Usaha memiliki kebijakan yang membatasi jumlah kredit untuk tiap-tiap pelanggan dan saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang tak tertagih.

Ketika pelanggan gagal melakukan pelunasan sesuai dengan syarat pembayaran, Kelompok Usaha akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti piutang yang telah lewat jatuh tempo. Jika pelanggan tidak melunasi piutang yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Kelompok Usaha akan menempuh jalur hukum. Sesuai dengan evaluasi oleh Kelompok Usaha, penyisihan spesifik dapat dibuat jika utang dianggap tidak tertagih. Untuk menekan risiko kredit, Kelompok Usaha akan menghentikan penyaluran semua produk kepada pelanggan yang terlambat dan/atau gagal bayar.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Kelompok Usaha terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Credit risk

Credit risk faced by the Group is derived from loans to customers, sugarcane farmers receivables and the placement of bank statements and deposits at the bank.

Apart from the disclosure below, the Group has no concentrations of credit risk.

Cash and cash equivalents

The credit risk on bank statement placement and deposits managed by the management in accordance with Group policy. Investments in excess funds are limited for each bank and this policy is evaluated annually by the board of directors. The limit is set to minimize the risk of concentration credit, thereby reducing the possibility of losses due to bankruptcy of banks.

Trade receivables

There is a policy to ensure the sales of products only made to customers who can be trusted with a track record or good credit history. It is Group's policy that all customers who wish to purchase on credit must pass credit verification procedures. For export sales, the Group requires payment upon delivery of sales documents. The Group has policies that limit the amount of credit for each customer and account receivables are monitored continuously to reduce the risk of bad debts.

When customers fail to make payment in accordance with the payment terms, the Group will contact the customer to follow up receivables that are past due. If the customers do not pay off debts that are due within a predetermined time period, the Group will take legal action. According to evaluations by the Group, a specific allowance can be made if the debt is considered uncollectible. To reduce the risk of credit, the Group will cease distribution of all products to the customers who are late and / or failed to pay.

On the reporting date, the Group's maximum exposure to credit risk is the carrying amount of each financial asset category which are presented in the consolidated statement of financial position.

36. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Kelompok Usaha mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus diselesaikan dengan penyerahan kas atau aset keuangan lainnya.

Kelompok Usaha mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah ini merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Kelompok Usaha, berdasarkan arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto.

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Group experienced difficulties in fulfilling financial obligations which must be settled by delivery of cash or other financial assets.

The Group manages liquidity risk by monitoring production and actual cash flows continuously and monitoring the maturity date financial assets and liabilities.

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities, based on contractual cash flows which are not discounted.

31 Desember 2016 / *December 31, 2016*

	Jumlah / *Total*	Dalam 1 tahun / *Within 1 year*	Lebih dari 1 tahun kurang dari 5 tahun / *More that a year less than 5 years*	Lebih dari 5 tahun / *More than 5 years*	
Utang usaha	466.676.096.940	466.676.096.940	-	-	*Trade payables*
Beban akrual dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek	50.287.042.376	50.287.042.376	-	-	*Accrued expenses and short-term employee benefits liabilities*
Utang KKPE	242.547.956.959	242.547.956.959	-	-	*KKPE payables*
Pinjaman jangka pendek	220.418.586.533	220.418.586.533	-	-	*Short-term loans*
Utang lain-lain	152.984.837.272	152.984.837.272	-	-	*Other payables*
Pinjaman jangka panjang					*Long-term loans*
Pinjaman bank dan lainnya	1.385.355.246.985	137.444.633.957	1.196.456.074.982	51.454.538.046	*Bank and other loans*
Pinjaman pembiayaan konsumen	11.546.316.528	2.490.474.168	9.055.842.360	-	*Consumer financing loans*
Liabilitas pengampunan pajak	2.106.431.862	1.343.600.000	762.831.862	-	
Utang obligasi	700.000.000.000	-	700.000.000.000	-	*Bonds payable*
Jumlah	**3.231.922.515.455**	**1.274.193.228.205**	**1.906.274.749.204**	**51.454.538.046**	***Total***

31 Desember 2015 / *December 31, 2015*

	Jumlah / *Total*	Dalam 1 tahun / *Within 1 year*	Lebih dari 1 tahun kurang dari 5 tahun / *More that a year less than 5 years*	Lebih dari 5 tahun / *More than 5 years*	
Utang usaha	62.470.235.567	62.470.235.567	-	-	*Trade payables*
Beban akrual dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek	96.692.127.588	96.692.127.588	-	-	*Accrued expenses and short-term employee benefits liabilities*
Utang KKPE	205.831.736.897	205.831.736.897	-	-	*KKPE payables*
Pinjaman jangka pendek	139.152.180.431	139.152.180.431	-	-	*Short-term loans*
Utang lain-lain	120.879.599.144	120.879.599.144	-	-	*Other payables*
Pinjaman jangka panjang					*Long-term loans*
Pinjaman bank dan lainnya	865.523.789.469	204.062.606.237	654.336.533.064	7.124.650.168	*Bank and other loans*
Pinjaman pembiayaan konsumen	4.687.195.796	1.087.979.332	3.599.216.464	-	*Consumer financing loans*
Utang obligasi	700.000.000.000	-	700.000.000.000	-	*Bonds payable*
Jumlah	**2.195.236.864.892**	**830.176.465.196**	**1.357.935.749.528**	**7.124.650.168**	***Total***

37. PERKARA HUKUM SIGNIFIKAN

Perusahaan saat ini mempunyai aset/liabilitas kontinjensi yang signifikan terkait dengan beberapa perkara perdata sebagai berikut:

a. Kasus H. Mischan

Perkara No.53/ Pdt.G/2014.JMB
Para Pihak : H. Mischan sebagai Penggugat dan Perusahaan sebagai Tergugat.
Objek : H. Mischan menggugat Perusahaan karena tebu tidak ditebang oleh Pabrik Gula Djombang Baru.
Status : Banding Penggugat ditolak di Pengadilan Tinggi. Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Perusahaan telah mengajukan Kontra Memori Kasasi.

b. Kasus H. Mischan

Perkara No.56/Pdt.G/2014/JMB
Para Pihak : Perusahaan sebagai Penggugat dan H. Mischan sebagai Tergugat.
Objek : Perusahaan menggugat balik H. Mischan atas wanprestasi karena tidak menyerahkan tebu dan pengembalian dana KKPE.
Status : Banding Penggugat ditolak di Pengadilan Tinggi. Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Perusahaan telah mengajukan Kontra Memori Kasasi.

c. Kasus Sadji

Perkara No.19/Pdt.G/2014/PN.Jr
Para Pihak : Sadji dan Ruminah sebagai Penggugat dan Pemerintah Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri, Cq Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Cq Kepala Desa Pecoro Kecamatan, Rambipudji Kabupaten Jember sebagai Tergugat.

37. SIGNIFICANT LAWSUITS

The Company currently has significant contingent assets/liabilities relating to several civil cases as follows:

a. H. Mischan Case

Case No. 53 / Pdt.G / 2014.JMB
Parties : H. Mischan as Plaintiff and the Company as a defendant
Object : H. Mischan sued the Company because sugarcane is not cut by the Djombang Baru Sugar Factory.
Status : The Plaintiff appeal was rejected in the High Court. Plaintiff appealed to the Supreme Court. The Company has submitted a Contra Appeal Memorandum.

b. H. Mischan Case

Case No. 56/Pdt.G/2014/JMB
Parties : The Company as plaintiff and H. Mischan as Defendants.
Object : The Company sued H. Mischan for the tort due to not deliver sugar cane and paid KKPE loan.
Status : The Plaintiff appeal was rejected in the High Court. Plaintiff appealed to the Supreme Court. The Company has submitted a Contra Appeal Memorandum.

c. Sadji Case

Case No. 19/Pdt.G/2014/PN.Jr
Parties : Sadji and Ruminah as plaintiffs and the Government, Cq Ministry of Internal Affairs , Cq the Governor of East Java, Jember regent, Cq village chief of Districts Pecoro, Rambipudji Regency of Jember as Defendants.

37. PERKARA HUKUM SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perusahaan saat ini mempunyai aset/liabilitas kontinjensi yang signifikan terkait dengan beberapa perkara perdata sebagai berikut: (lanjutan)

c. Kasus Sadji (lanjutan)

Perkara No.19/Pdt.G/2014/PN.Jr (lanjutan)

Objek : Para penggugat menyatakan bahwa tanah RVE No. 2473 seluas 4,133m2 (objek sengketa I) dan tanah RVO No. 1591 seluas 11.600 m2 (objek sengketa II) telah dikuasai selama 23 tahun dan mengajukan konversi atas objek sengketa untuk menjadi hak millik para penggugat. Perusahaan mengajukan gugatan intervensi karena kedua objek sengketa adalah milik Perusahaan.

Status : Kasus ini dimenangkan oleh Perusahaan hingga tingkat Pengadilan Tinggi. Penggugat mengajukan kasasi dan Perusahaan telah mengajukan Kontra Memori Kasasi. Hingga tanggal penyelesaian pelaporan, belum ada keputusan kasasi dari Mahkamah Agung.

d. Kasus Langsepan

Perkara No.41/Pdt.G/2014/PN.Jr

Para Pihak : Perusahaan sebagai Penggugat dan Pak Amria Rosid, H. Murdi dan H. Mujibur Rohman Sucipto sebagai Tergugat. Yayuk Puji Rahayuningsih sebagai Penggugat Intervensi.

Objek : Tanah bekas *Eigendom Perponding* No. 4368, Hak *Opstal Perponding* No. 2851 dan Hak *Erfpacht Perponding* No. 1827 dan masih dikuasai Tergugat.

Status : Pengadilan Tinggi memenangkan Perusahaan. Penggugat Intervensi mengajukan kasasi dan saat ini proses kasasi masih berlangsung.

Untuk perkara hukum di atas, Perusahaan telah mengeluarkan biaya masing-masing sebesar Rp2.231.104.005 dan Rp1.166.881.940 selama tahun 2016 dan 2015 dan dicatat pada beban operasi lain.

37. SIGNIFICANT LAWSUITS (continued)

The Company currently has significant contingent assets/liabities relating to several civil cases as follows: (continued)

c. Sadji Case (continued)

Case No. 19/Pdt.G/2014/PN.Jr (continued)

Object : The plaintiffs claimed that the land RVE No. 2473 covering an area of 4,133m2 (the object of dispute I) and ground RVO No. 1591 of 11,600 m2 (object dispute II) has ruled for 23 years and filed a dispute for the conversion of objects into proprietary of the plaintiffs. The Company filed for intervention because the second object of dispute is Company's property.

Status : This case was won by the Company up to the High Court. The Plaintiffs submitted appeal and the Company has submitted Contra Appeal Memorandum. Up to the completion of reporting date, there has been no decision from Supreme Court.

d. Langsepan Case

Case No. 41/Pdt.G/2014/PN.Jr

Parties : Company as Plaintiff and Mr. Amria Rosid, H. Murdi and H. Mujibur Rohman Sucipto as Defendants. Yayuk Puji Rahayuningsih as Intervention Plaintiff.

Object : Land ex Eigendom Verponding No. 4368, Opstal Perponding Right No. 2851 and Erfpacht Rights Perponding No. 1827 and still controlled by Defendants.

Status : High Court declared that the Company won. Intervention Plaintiff appealed and up to date the process are still ongoing.

For the lawsuits as above, the Company has incurred Rp2,231,104,005 and Rp1,166,881,940 during 2016 and 2015, respectively, and recorded as other operating expenses.

38. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

38. ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN EXCHANGE

	Saldo dalam mata uang asing/ *Balance in foreign currencies*		Ekuivalen Rupiah pada/ *Equivalent to Rupiah in* Tanggal pelaporan 31 Desember 2016/ *Reporting date December 31, 2016*	Tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian 28 Februai 2017/ *Settlement date of the consolidated financial statements February 28, 2017*	
Aset moneter					***Monetary assets***
Kas dan setara kas	AS$	993.190	13.344.500.572	13.256.106.664	*Cash and cash equivalents*
	EUR	1.621.332	22.960.575.742	22.904.785.704	
Piutang usaha	AS$	1.888.082	25.368.263.571	25.200.224.314	*Trade receivables*
	EUR	593.277	8.401.718.076	8.381.303.423	
Piutang lain-lain	AS$	810.517	10.890.103.725	10.817.967.730	*Other receivables*
	EUR	507.762	7.190.696.951	7.173.224.861	
Jumlah aset moneter			**88.155.858.637**	**87.733.612.696**	***Total monetary assets***
Liabilitas moneter					***Monetary liabilities***
Utang usaha	AS$	307.268	4.128.449.775	4.101.105.996	*Trade payables*
Utang lain-lain	AS$	356.623	4.791.589.315	4.759.849.850	*Other payables*
	EUR	1.179.436	16.702.641.886	16.662.057.493	
Jumlah liabilitas moneter			**25.622.680.976**	**25.523.013.339**	***Total monetary liabilities***
Aset moneter, neto			**62.533.177.661**	**62.210.599.357**	***Monetary assets, net***

39. NILAI WAJAR

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Kelompok Usaha yang tercatat dalam laporan keuangan.

39. FAIR VALUE

The following tables summarize the comparison between carrying amounts and fair value of the Group's financial instruments which recognized in financial statements.

	31 Desember/*December 31,*				
	2016		2015		
	Nilai tercatat/ *Carrying amounts*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai tercatat/ *Carrying amounts*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset keuangan					*Financial assets*
Kas dan setara kas	235.427.132.592	235.427.132.592	395.885.957.341	395.885.957.341	*Cash and cash equivalents*
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	967.565.780.768	967.565.780.768	975.000.000.000	975.000.000.000	*Restricted cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-	*Short-term investment*
Piutang usaha, neto	150.483.455.994	150.483.455.994	183.390.117.248	183.390.117.248	*Trade receivables, net*
Piutang lain-lain, neto					*Other receivables, net*
Piutang petani tebu rakyat, neto	176.862.782.224	176.862.782.224	178.490.052.924	178.490.052.924	*Sugarcane farmers receivables, net*
Piutang pihak berelasi dan pihak ketiga, neto	44.118.866.162	44.118.866.162	53.739.059.070	53.739.059.070	*Related parties and third parties receivables, net*
Piutang pihak berelasi jangka panjang	1.216.017.167.331	1.216.017.167.331	889.417.682.345	889.417.682.345	*Long-term receivabels from related parties*
Jumlah	**2.795.475.185.071**	**2.795.475.185.071**	**2.675.922.868.928**	**2.675.922.868.928**	***Total***
Liabilitas keuangan					*Financial liabilities*
Utang usaha	466.676.096.940	466.676.096.940	62.470.235.567	62.470.235.567	*Trade payables*
Utang lain-lain	152.984.837.272	152.984.837.272	120.879.599.144	120.879.599.144	*Other payables*
Utang KKPE	242.547.956.959	242.547.956.959	205.831.736.897	205.831.736.897	*KKPE payables*
Beban akrual	50.287.042.376	50.287.042.376	96.692.127.588	96.692.127.588	*Accrued expenses*
Pinjaman jangka pendek	220.418.586.533	220.418.586.533	139.220.643.363	139.220.643.363	*Short-term loans*
Pinjaman jangka panjang	1.399.007.995.375	1.399.007.995.375	870.210.985.265	870.210.985.265	*Long-term loans*
Utang obligasi	700.000.000.000	700.000.000.000	700.000.000.000	700.000.000.000	*Bonds payable*
Jumlah	**3.231.922.515.455**	**3.231.922.515.455**	**2.195.305.327.824**	**2.195.305.327.824**	***Total***

39. NILAI WAJAR (lanjutan)

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga pasar, model arus kas diskonto dan model penentuan harga opsi yang wajar.

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar, atau sebaliknya disajikan dalam jumlah tercatat apabila jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Nilai wajar kas dan setara kas, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, utang KKPE, pinjaman jangka pendek, beban akrual dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek kurang lebih sama dengan nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

NIlai wajar piutang pihak berelasi jangka panjang dicatat pada biaya perolehan karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal.

Selain item-item tersebut diatas, Perusahaan tidak memiliki aset atau kewajiban lain yang diukur atau diungkapkan berdasarkan nilai wajar, sehingga tidak ada keharusan untuk menyajikan hirarki nilai wajar berdasarkan PSAK No. 68 (Revisi 2014): Pengukuran Nilai Wajar.

39. FAIR VALUE (continued)

Fair value is defined as the amount at which the instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's-length transaction, other than in a forced or liquidation sale. Fair values are obtained from quoted market prices, discounted cash flow models and option pricing models as appropriate.

Financial instruments presented in the statement of financial position are carried at the fair value, otherwise, these are presented at carrying values as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

Fair value of cash and cash equivalents, restricted cash and cash equivalents, short-term investment, trade receivables, other receivables, trade payables, other payables, KKPE payables, short-term loans, accrued expenses and short-term employee benefits liabilities approximate their carrying amounts largely due to short-term maturities of these instruments.

The fair value of long-term receivables from related parties are carried at cost as their fair value cannot be reliably measured.

Other than those items mentioned above, the Company does not have any assets or liabilities that are measured or disclosed based on fair value, therefore it is not necessary to present fair value hierarchy based on PSAK No. 68 (Revised 2014): Fair Value Measurement.

40. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

<u>Raw Sugar</u>

Pada tanggal 5 Agustus 2016, Perusahaan dan beberapa perusahaan BUMN produsen gula melakukan perjanjian kerjasama importasi raw sugar, pengolahan raw sugar dan distribusi gula hasil pengolahan raw sugar impor dengan Perum BULOG. Dalam perjanjian ini, Perum BULOG bertanggung jawab menyediakan pendanaan, mendistribusikan dan melakukan penjualan gula; sementara Perusahaan bertanggung jawab untuk melaksanakan importasi dan pengolahan raw sugar hingga menjadi gula. Di tahun 2016, raw sugar diimpor dari Agrocrop International Pte.Ltd. yang didanai oleh Perum BULOG. Sampai dengan 31 Desember 2016, Perusahaan mencatat utang usaha sebesar Rp311.162.730.750 (Catatan 9).

40. COMMITMENT AND CONTINGENCY

<u>*Raw Sugar*</u>

On August 5, 2016, the Company and several BUMN companies of sugar producers entered into coorperation agreement on raw sugar importation, raw sugar processing and distribution of sugar as result of raw sugar import with Perum BULOG. In this agreement, Perum BULOG responsible to provide financing, distribute, and sell sugar; while the Company responsible to do the importation and processing of raw sugar into sugar. In 2016, raw sugar was imported from Agrocrop International Pte.Ltd. which financed by Perum BULOG. Until December 31, 2016, the Company record accounts payable amounting to Rp311,162,730,750 (Note 9).

40. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Off-taker gula

Pada tanggal 9 Agustus 2016, Perusahaan dan BUMN produsen gula (PTPN IX, PTPN XI, PTPN XII dan PT RNI (Persero)) mengadakan kesepakatan dengan Perum BULOG dimana Perum BULOG setuju untuk melakukan off-taker gula milik BUMN produsen gula dengan harga dan kuantum tertentu. Alokasi *off-taker* gula untuk Perusahaan adalah 50.000 ton (Catatan 29).

Burger Sohne AG Burg ("BSB")

Pada tanggal 15 April 2002, BSB memberikan pinjaman dana kepada Perusahaan sejumlah EUR1.558.000 untuk membangun pabrik *bobbin* baru diatas tanah milik Perusahaan di Kawasan Berikat Jelbuk Jember yang akan digunakan proses produksi *cutting* tembakau untuk kepentingan BSB. Pinjaman tersebut berjangka waktu 20 tahun sampai dengan 31 Desember 2022 dan tidak dikenakan bunga (kontraprestasi) serta Perusahaan akan dibebaskan dari kewajiban pembayaran pinjaman dengan syarat:

- Perusahaan menggunakan pinjaman semata-mata hanya untuk pembangunan pabrik *bobbin* baru untuk proses produksi *cutting* tembakau untuk kepentingan BSB.
- Proses produksi *cutting* tembakau untuk kepentingan BSB akan terus berlangsung sampai dengan 31 Desember 2022.
- Perusahaan mengikatkan diri atas pembelian mesin dan peralatan milik BSB yang telah ditempatkan di lokasi Pabrik *bobbin* dengan harga EUR265.682. Selain itu, BSB juga mengikatkan diri untuk membeli kembali mesin dan peralatan tersebut dengan harga jual yang akan ditetapkan kemudian sampai dengan berakhirnya perjanjian yaitu tanggal 31 Desember 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, saldo pinjaman dana tersebut sebesar masing-masing EUR429.699 (setara dengan Rp6.085.203.285) dan EUR472.801 (setara dengan Rp7.124.650.168) (Catatan 22).

40. COMMITMENT AND CONTINGENCY (continued)

Off-taker of sugar

On August 9, 2016, the Company and BUMN sugar producers (PTPN IX, PTPN XI, PTPN XII dan PT RNI (Persero)) entered into an agreement with Perum Bulog where Perum BULOG agreed to off-taker the sugar of BUMN sugar with certain price and quantum. The allocation of the off-taker sugar for the Company is 50,000 tons (Note 29).

Burger Sohne AG Burg ("BSB")

On April 15, 2002, BSB lend funds to the Company amounted to EUR1,558,000 to build a new bobbin factory on the land owned by the Company in bonded zone of Jember Jelbuk that will be used to tobacco cutting production process for the importance of BSB. The loan period is 20 years up to December 31, 2022 and bears no interest, also the Company will be exempted from payment of the following loan on the conditions:

- *Companies use the loan solely for the construction of a new bobbin factory for tobacco cutting production processes for the importance of BSB.*
- *The process of tobacco cutting production for the importance of BSB will be continued until December 31, 2022.*
- *The Company binds itself on the purchase of machinery and equipment owned by BSB that has been placed in bobbin factory amounting EUR265,682. In addition, BSB also binds itself to buy back the equipment and machinery. The selling price will be determined later until the expiry of the agreement which is dated December 31, 2022.*

On December 31, 2016 and 2015, the outstanding balance of these funds amounted EUR429,699 (equivalent to Rp6,085,203,285) and EUR472,801 (equivalent to Rp7,124,650,168), respectively (Note 22).

40. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi ("KKPE")

Dalam rangka pelaksanaan program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi ("KKPE") tebu rakyat dengan pola kemitraan, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan beberapa Bank dalam pemberian kredit kepada petani tebu. Perusahaan bertindak sebagai penjamin (avalis).

Pengelolaan Pabrik Gula Camming dan Bone PT Perkebunan Nusantara XIV

Menunjuk surat dari Kementerian BUMN nomor S-549/MBU/2009 tanggal 31 Juli 2009 dan S-187/MBU/2009 tanggal 12 Agustus 2009, dalam rangka peningkatan kinerja Pabrik Gula Camming dan Bone dari PT Perkebunan Nusantara XIV, Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan melalui Kuasa Direksi di Makassar untuk melakukan perencanaan dan implementasi kegiatan produksi mulai dari tanam, persiapan pabrik, giling dan penjualan maupun menerima manfaat dari Pabrik Gula Bone dan Camming.

Pada tanggal 7 Desember 2011, berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.S-53/MBU/2011 yang menyatakan bahwa kerjasama pengelolaan antara PT Perkebunan Nusantara X dengan PT Perkebunan Nusantara XIV atas pengelolaan PG Bone dan PG Caming serta kerjasama antara PT Rajawali Nusantara Indonesia dengan PT Perkebunan Nusantara XIV atas pengelolaan PG Takalar tidak dapat optimal, maka Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham dari ketiga perusahaan tersebut memutuskan bahwa pengelolaan PG Bone, PG Caming dan PG Takalar akan dilakukan dengan membentuk perusahaan baru (*new company*) yang didirikan bersama antara PT Perkebunan Nusantara X dan PT Perkebunan Nusantara XIV. Langkah awal yang dilakukan adalah mengalihkan pengelolaan PG Takalar dari PT Rajawali Nusantara Indonesia kepada Perusahaan (Catatan 11).

Proyek *Bioethanol* Bantuan NEDO - Jepang berlokasi di PG Gempolkrep

Pada tanggal 2 Agustus 2010, Perusahaan melalui Kementrian Perindustrian Republik Indonesia membuat perjanjian *Memorandum of Understanding* dengan New Energy and Industrial Technology Development Organization of Japan ("NEDO") mengenai penerushibahan model proyek *Bioethanol* kepada Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

40. COMMITMENT AND CONTINGENCY (continued)

Food Security and Energy Credit ("KKPE")

The implementation of the Food Security and Energy Credit ("KKPE") program in the form of partnership, the Company, enter into agreement with several Bank to supply credit to sugarcane farmres. The Company acts as guarantor (avalist).

Management of Camming and Bone Sugar Factory of PT Perkebunan Nusantara XIV

Referring to the letter from the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) No. S-549/MBU/2009 dated July 31, 2009 and S-187/MBU/2009 dated August 12, 2009, in order to improve the performance of the Camming and Bone Sugar Factory of PT Perkebunan Nusantara XIV, the Company enter into agreement of management cooperation through Board of Directors Power of Attorney in Makassar to perform the planning and implementation of production activities starting from planting, plant preparation, milling and sales or receiving benefit from the Bone and Camming Sugar Factory.

On December 7, 2011, based on letter of the Minister of State-Owned Enterprises ("BUMN") No.S-53/MBU/2011, which states that management cooperation between PT Perkebunan Nusantara X with PT Perkebunan Nusantara XIV for managing Bone and Caming Sugar Factory and cooperation between PT Rajawali Nusantara Indonesia with PT Perkebunan Nusantara XIV for managing Takalar Sugar Factory can not be optimalized, the Ministry of BUMN as shareholder of these companies decided that the management of Bone, Caming and Takalar Sugar Factory will be done by forming a new company jointly established between PT Perkebunan X Nusantara and PT Perkebunan Nusantara XIV. The first step is to transfer the management of Takalar Sugar Factory from PT Rajawali Nusantara Indonesia to the Company (Note 11).

Bioethanol Project granted by NEDO - Japan located in Gempolkrep Sugar Factory

On August 2, 2010, the Company through the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia made a Memorandum of Understanding agreement with the New Energy and Industrial Technology Development Organization of Japan ("NEDO") regarding continued grant of Bioethanol project model to the Company with the following conditions:

40. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Proyek *Bioethanol* Bantuan NEDO - Jepang berlokasi di PG Gempolkrep (lanjutan)

- Melakukan kerjasama model proyek untuk memproduksi *bioethanol* dari tetes di Pabrik Gula dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan untuk melestarikan lingkungan di wilayah Republik Indonesia. Penunjukan Perusahaan sebagai pelaksana proyek dan pengaplikasiannya.
- NEDO memberikan bantuan berupa peralatan utama (*main equipment*) pabrik *bioethanol.*
- Pembagian kerja, pembiayaan dan tanggung jawab dilakukan bersama sesuai dengan pembagiannya masing masing.
- Kepemilikan alat dan pengalihannya:
  - Selama masa pembangunan proyek, kepemilikan peralatan yang disediakan oleh NEDO sesuai dengan pembagian kerja merupakan milik NEDO.
  - Setelah pembangunan proyek selesai, peralatan utama bantuan NEDO menjadi milik Kementerian Perindustrian secara otomatis tanpa biaya dan Kementerian Perindustrian langsung saat itu juga menerushibahkan kepada Perusahaan.

40. COMMITMENT AND CONTINGENCY (continued)

Bioethanol Project granted by NEDO - Japan located in Gempolkrep Sugar Factory (continued)

- *Doing cooperation of project model to produce bioethanol from molasses at the Sugar Factory with the aim to reduce using fossil fuels material and to preserve the environment in area. Appointment of the Company, as the executor of the project and its application.*
- *NEDO provides an assistance in the form of main equipment of Bioethanol plant.*
- *The job allocation, finance and responsibilities performed together in accordance with their respective division.*
- *Ownership of equipment and its transfer:*
  - *During the project development, ownership of the equipment supplied by NEDO in accordance with the job allocation is owned by NEDO.*
  - *After the construction project is completed, the NEDO main equipment belongs to the Ministry of Industry automatically without the cost and the Ministry of Industry right then continued grant to the Company.*

41. INFORMASI SEGMEN

Kelompok Usaha mengklasifikasikan aktivitas usahanya menjadi lima segmen usaha, yang terdiri atas segmen gula, segmen tetes, segmen tembakau, segmen rumah sakit dan segmen lainnya. Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian.

Tabel berikut ini menyajikan informasi pendapatan dan laba sehubungan dengan segmen operasi Kelompok Usaha:

41. SEGMENT INFORMATION

The Group classifies its business activities into five business segments, consisting of sugar segment, molasses segment, tobacco segment, the hospital segment and other segments. Management monitors the operating results of its business units separately for the purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment. Performance is evaluated based on segment operating profit or loss and is measured consistently by operating profit or loss in the consolidated financial statements.

The following table presents information with respect to revenue and profit of Group operating segments:

	2016						
	Gula / *Sugar*	Tetes / *Molasses*	Tembakau / *Tobacco*	Rumah Sakit / *Hospital*	Lain-lain / *Others*	Jumlah / *Total*	
Laba usaha segmen							***Business segmen profit***
Pendapatan usaha							***Revenue***
Pendapatan eksternal	1.021.885.407.268	205.045.723.342	331.435.383.035	293.483.314.117	408.523.692.027	2.260.373.519.789	*External revenue*
Beban pokok pendapatan	(922.229.193.994)	(233.225.189.806)	(300.904.256.307)	(224.383.436.056)	(328.832.862.128)	(2.009.574.938.291)	*Cots of sales*
Laba kotor	99.656.213.274	(28.179.466.464)	30.531.126.728	69.099.878.061	79.690.829.899	250.798.581.498	*Gross profit*
Beban operasi	(157.703.735.983)	(34.430.565.656)	(56.606.963.545)	(23.346.951.832)	(54.127.306.930)	(326.215.523.946)	*Operating expense*
Laba operasi	(58.047.522.709)	(62.610.032.120)	(26.075.836.817)	45.752.926.229	25.563.522.969	(75.416.942.448)	*Operating income*
Beban lain-lain - neto						(141.419.048.379)	*Other expenses, net*
Laba (rugi) sebelum pajak						(216.835.990.827)	*Income (loss) before tax*
Beban pajak penghasilan						61.052.996.256	*Income tax expense*
Laba bersih tahun berjalan						**(155.782.994.571)**	*Net income*

41. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan informasi pendapatan dan laba sehubungan dengan segmen operasi Kelompok Usaha: (lanjutan)

41. SEGMENT INFORMATION (continued)

The following table presents information with respect to revenue and profit of Group operating segments: (continued)

	2016						
	Gula / *Sugar*	Tetes / *Molasses*	Tembakau / *Tobacco*	Rumah Sakit / *Hospital*	Lain-lain / *Others*	Jumlah / *Total*	
Informasi geografis							***Geographic information***
Penjualan bersih							*Net sales*
Indonesia	1.021.885.407.268	205.045.723.342	39.814.431.638	293.483.314.117	177.551.289.182	1.737.780.165.547	*Indonesia*
Negara - negara asing	-	-	291.620.951.397	-	230.972.402.845	522.593.354.242	*Foreign countries*
Jumlah pendapatan	**1.021.885.407.268**	**205.045.723.342**	**331.435.383.035**	**293.483.314.117**	**408.523.692.027**	**2.260.373.519.789**	***Total sales***
Aset segmen	6.147.725.816.674	1.604.752.769.899	4.687.120.977.038	206.013.415.552	415.508.729.098	13.061.121.708.261	*Segment assets*
Liabilitas segmen	2.374.694.445.799	579.804.967.676	769.097.792.974	100.610.074.145	193.655.697.656	4.017.862.978.250	*Segment liabilities*
Informasi segmen lainnya							***Other segment information***
Pengeluaran modal	225.789.131.040	61.175.179.713	13.020.684.288	39.352.608.283	31.093.166.220	370.430.769.544	*Capital expenditures*
Penyusutan	149.126.258.624	40.973.396.909	9.878.380.044	15.895.039.259	10.279.886.367	226.152.961.203	*Depreciation*

	2015						
	Gula / *Sugar*	Tetes / *Molasses*	Tembakau / *Tobacco*	Rumah Sakit / *Hospital*	Lain-lain / *Others*	Jumlah / *Total*	
Laba usaha segmen							***Business segmen profit***
Pendapatan usaha							***Revenue***
Pendapatan eksternal	1.362.446.279.652	287.908.648.062	325.817.143.167	263.356.366.704	292.029.203.185	2.531.557.640.770	*External revenue*
Beban pokok pendapatan	(947.895.751.806)	(224.101.733.339)	(269.886.293.219)	(205.068.711.530)	(266.269.554.236)	(1.913.222.044.130)	*Cots of sales*
Laba kotor	414.550.527.846	63.806.914.723	55.930.849.948	58.287.655.174	25.759.648.949	618.335.596.640	*Gross profit*
Beban operasi	(151.527.464.651)	(34.909.072.057)	(36.236.471.398)	(17.264.293.351)	(53.922.581.383)	(293.859.882.840)	*Operating expense*
Laba operasi	263.023.063.195	28.897.842.666	19.694.378.550	41.023.361.823	(28.162.932.434)	324.475.713.800	*Operating income*
Beban lain-lain - neto						(126.112.710.628)	*Other expenses, net*
Laba sebelum pajak						198.363.003.172	*Income before tax*
Beban pajak penghasilan						(71.935.106.505)	*Income tax expense*
Laba bersih tahun berjalan						**126.427.896.667**	*Net income*
Informasi geografis							***Geographic information***
Penjualan bersih							*Net sales*
Indonesia	1.362.446.279.652	287.908.648.062	23.746.687.280	263.356.366.704	81.508.957.230	2.018.966.938.928	*Indonesia*
Negara - negara asing	-	-	302.070.455.887	-	210.520.245.955	512.590.701.842	*Foreign countries*
Jumlah pendapatan	**1.362.446.279.652**	**287.908.648.062**	**325.817.143.167**	**263.356.366.704**	**292.029.203.185**	**2.531.557.640.770**	***Total sales***
Aset segmen	6.003.495.625.175	1.387.241.325.674	4.472.694.007.535	184.550.639.921	275.735.027.151	12.323.716.625.456	*Segment assets*
Liabilitas segmen	1.938.244.898.642	446.535.095.050	463.514.360.210	96.050.383.785	112.117.132.067	3.056.461.869.754	*Segment liabilities*
Informasi segmen lainnya							***Other segment information***
Pengeluaran modal	149.955.548.487	40.512.568.479	7.022.849.776	39.323.632.169	8.871.517.248	245.686.116.159	*Capital expenditures*
Penyusutan	154.734.090.358	36.844.296.111	6.352.231.295	4.534.389.101	11.602.612.524	214.067.619.389	*Depreciation*

42. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Berdasarkan Surat Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan yang ditandatangani oleh Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) masing - masing tanggal 24 Februari 2017 dan 20 Februari 2017, pemegang saham setuju untuk memberhentikan dengan hormat Ir. Subiyono, MMA sebagai Direktur Utama, Ir. Tarsisius Sutaryanto, MM sebagai Direktur dan Ir. Djoko Santoso sebagai Direktur. Selanjutnya, mengangkat Ir. Dwi Satriyo Annurogo, MT sebagai Direktur Utama dan Mustaqim, ST sebagai Direktur.

Komposisi Dewan Direksi Perusahaan setelah tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

42. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Based on the Decree of the Shareholders of the Company, signed by the Minister of State Enterprises and President Director of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dated February 24, 2017 and February 20, 2017, respectively, the shareholders agreed to respectfully discharging Ir. Subiyono, MMA as President Director, Ir. Tarsisius Sutaryanto, MM as Director and Ir. Djoko Santoso as Director. Further, appointing Ir. Dwi Satriyo Annurogo, MT as President Director and Mustaqim, ST as Director.

The composition of the Boards Directors of the Company as of December 31, 2016 is as follows:

Direksi		***Board of Directors***
Presiden Direktur	Ir. Dwi Satriyo Annurogo, MT	*President Director*
Direktur Operasional	Mustaqim, ST	*Director of Operations*
Direktur Komersil	Muhammad Hanugroho, SAB	*Director of Commercial*

43. REKLASIFIKASI AKUN

Perusahaan dan Entitas Anak melakukan reklasifikasi akun-akun pada laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2015 dan 1 Januari 2015/31 Desember 2014, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 untuk menyesuaikan penyajian laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Akun-akun yang dipengaruhi atas reklasifikasi diikhtisarkan sebagi berikut:

43. ACCOUNTS RECLASSFICATION

The Company and its Subsidiaries reclassified accounts in the consolidated financial statements dated December 31, 2015 and January 1, 2015/ 31 December 2014, and for the year ended December 31, 2015 to adjust the consolidated financial statements dated December 31, 2016 and for the year then ended.

The accounts were affected on the reclassification are summarized as follows:

	Sebelum reklasifikasi / ***Before reclassification***	**Reklasifikasi /** ***Reclassification***	**Setelah reklasifikasi /** ***After reclassification***	
Laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2015				***The consolidated statements of financial position as of December 1, 2015***
Aset lancar				***Current assets***
Piutang usaha - pihak ketiga	143.754.556.419	4.596.324.770	148.350.881.189	*Trade receivables - third parties*
Piutang lain-lain - pihak ketiga	57.907.053.286	(10.899.194.594)	47.007.858.692	*Other receivables - third parties*
Persediaan	506.157.194.626	89.440.066.407	595.597.261.033	*Inventories*
Pajak dibayar dimuka	30.960.870.184	(7.376.534)	30.953.493.650	*Prepaid taxes*
Uang muka	-	1.650.750.271	1.650.750.271	*Advance payments*
Aset lancar lainnya	110.959.573.162	(89.968.816.678)	20.990.756.484	*Other current assets*
Aset tidak lancar				***Non current assets***
Investasi saham	8.953.371.096	6.256.600.380	15.209.971.476	*Investment in shares*
Uang muka pembelian aset tetap	-	5.180.869.824	5.180.869.824	*Advance payments on purchase of fixed assets*
Aset tidak lancar lainnya	7.092.669.286	(6.256.600.380)	836.068.906	*Other non-current assets*
Liabilitas jangka pendek				***Current Liabilities***
Utang usaha - pihak ketiga	66.359.605.000	(3.889.369.433)	62.470.235.567	*Trade payable - third parties*
Utang pajak	135.414.700.587	(7.376.534)	135.407.324.053	*Taxes payable*
Pinjaman jangka pendek	139.220.643.363	(68.462.932)	139.152.180.431	*Short-term loans*
Utang lain-lain - pihak ketiga	82.752.380.635	3.889.369.433	86.641.750.068	*Other payable - third parties*
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				*Current portion of long term loans*
Pinjaman bank dan lainnya	205.082.122.637	(1.019.516.400)	204.062.606.237	*Bank and other loans*
Pinjaman pembiayaan konsumen	-	1.087.979.332	1.087.979.332	*Consumer financing loans*
Liabilitas jangka panjang				***Non current liabilities***
Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				*Long-term loans, net of current portion*
Pinjaman bank dan lainnya	665.060.399.696	(3.599.216.464)	661.461.183.232	*Bank and other loans*
Pinjaman pembiayaan konsumen	-	3.599.216.464	3.599.216.464	*Consumer financing loans*
Ekuitas				***Equity***
Penghasilan komprehensif lain	7.126.062.047.189	(326.069.169.840)	6.799.992.877.349	*Other comprehensive income*
Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya	(307.681.929.647)	326.069.169.840	18.387.240.193	*Retained earnings - Unappropriated*

43. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan)

43. ACCOUNTS RECLASSFICATION (continued)

	Sebelum reklasifikasi / *Before reclassification*	Reklasifikasi / *Reclassification*	Setelah reklasifikasi / *After reclassification*	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015				***The consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2015***
Beban pokok pendapatan	(1.910.117.046.465)	(3.104.997.665)	(1.913.222.044.130)	*Cost of sales*
Beban umum dan administrasi	(276.961.437.686)	3.104.997.665	(273.856.440.021)	*General and administrative expenses*
Beban operasi lain	(92.224.172.403)	7.172.115.119	(85.052.057.284)	*Other operating expenses*
Pendapatan operasi lain	70.038.076.951	(7.172.115.119)	62.865.961.832	*Other operating income*
Laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2015/31 Desember 2014				***The consolidated statements of financial position as of January 1, 2015/December 31, 2014***
Aset lancar				***Current assets***
Piutang usaha - pihak ketiga	349.057.977.923	5.965.109.870	355.023.087.793	*Trade receivables - third parties*
Piutang lain-lain - pihak ketiga	58.643.300.933	(5.965.109.870)	52.678.191.063	*Other receivables - third parties*
Persediaan	536.051.586.519	70.688.110.667	606.739.697.186	*Inventories*
Pajak dibayar dimuka	687.679.460	(324.603.859)	363.075.601	*Prepaid taxes*
Uang muka	-	682.656.882	682.656.882	*Advance payments*
Aset lancar lainnya	90.486.462.068	(71.370.767.549)	19.115.694.519	*Other current assets*
Aset tidak lancar				***Non current assets***
Investasi saham	8.953.371.096	6.256.600.380	15.209.971.476	*Investment in shares*
Aset tidak lancar lainnya	6.751.402.189	(6.256.600.380)	494.801.809	*Other non-current assets*
Liabilitas jangka pendek				***Current Liabilities***
Utang usaha - pihak ketiga	77.974.710.980	(12.163.558.027)	65.811.152.953	*Trade payable - third parties*
Utang pajak	92.723.496.097	(324.603.859)	92.398.892.238	*Taxes payable*
Pinjaman jangka pendek	205.787.270.000	(283.950.000)	205.503.320.000	*Short-term loans*
Utang lain-lain - pihak ketiga	109.291.065.396	12.163.558.027	121.454.623.423	*Other payable - third parties*
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				*Current portion of long term loans*
Pinjaman pembiayaan konsumen	-	283.950.000	283.950.000	*Consumer financing loans*
Ekuitas				***Equity***
Penghasilan komprehensif lain	-	(288.090.221.796)	(288.090.221.796)	*Other comprehensive income*
Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya	(365.629.728.044)	288.090.221.796	(77.539.506.248)	*Retained earnings - Unappropriated*

Informasi berikut adalah laporan keuangan tersendiri PT Perkebunan Nusantara X, entitas induk, yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian PT Perkebunan Nusantara X dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

The following information is the separate financial statements of PT Perkebunan Nusantara X, parent entity, which is presented as supplementary information to the consolidated financial statements of PT Perkebunan Nusantara X and its Subsidiaries as of December 31, 2016 and for the year then ended.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(PARENT ENTITY)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	1 Januari 2015/ 31 Desember 2014/ *January 1, 2015/ December 31, 2014*	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	202.776.546.981	382.009.409.315	361.763.392.873	*Cash and cash equivalents*
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	967.565.780.768	975.000.000.000	-	*Restricted cash and cash Equivalents*
Investasi jangka pendek	5.000.000.000	-	-	*Short-term investment*
Piutang usaha, neto				*Trade receivables, net*
Pihak berelasi	3.396.754.201	13.859.160.621	210.456.321	*Related parties*
Pihak ketiga, neto	40.652.475.401	107.211.096.672	335.589.255.043	*Third parties, net*
Piutang lain-lain, neto				*Other receivables*
Piutang petani tebu rakyat, neto	176.862.782.224	178.490.052.924	377.618.967.118	*Sugarcane farmers receivables, net*
Pihak berelasi	54.179.729.775	40.956.074.921	34.778.829.274	*Related parties*
Pihak ketiga, neto	33.387.890.955	43.329.538.255	48.416.284.681	*Third parties, net*
Persediaan, neto	820.183.196.780	489.886.153.342	525.602.036.773	*Inventories, net*
Pajak dibayar di muka	41.477.856.407	30.107.688.840	-	*Prepaid taxes*
Biaya dibayar di muka	5.835.897.537	2.042.155.138	920.561.138	*Prepaid expenses*
Uang muka - pihak berelasi	3.236.744.000	4.500.119.223	5.777.860.889	*Advance payments - a related party*
Aset lancar lainnya	23.570.636.544	20.990.756.485	19.115.694.519	*Other current assets*
JUMLAH ASET LANCAR	**2.378.126.291.573**	**2.288.382.205.736**	**1.709.793.338.629**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR				***NON CURRENT ASSETS***
Piutang pihak berelasi jangka panjang	1.224.017.167.331	902.945.177.975	913.531.507.479	*Long-term receivables from related parties*
Investasi saham	174.549.573.275	163.068.944.371	125.376.261.872	*Investment in shares*
Aset pajak tangguhan, neto	271.098.856.202	197.959.144.345	188.965.122.291	*Deferred tax assets, net*
Aset tanaman menghasilkan				*Mature plantation assets*
Tanaman semusim	31.165.987.537	26.498.072.837	18.064.399.192	*Annual crops*
Tanaman produktif	19.820.575	30.067.521	63.799.089	*Bearer plants*
Aset tetap, neto	8.521.061.827.401	8.422.072.256.722	1.362.729.419.622	*Fixed assets, net*
Aset takberwujud, neto	56.041.512.932	50.319.532.690	42.070.200.864	*Intangible assets, net*
Estimasi tagihan pajak	49.635.368.557	15.560.342.237	15.560.342.237	*Estimated claims for tax refund*
Uang muka pembelian aset tetap	22.835.938.272	5.180.869.824	-	*Advance for purchase of fixed assets*
Aset tidak lancar lainnya	54.190.342	54.190.342	54.137.763	*Other non current assets*
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**10.350.480.242.424**	**9.783.688.598.864**	**2.666.415.190.409**	***TOTAL NON CURRENT ASSETS***
JUMLAH ASET	**12.728.606.533.997**	**12.072.070.804.600**	**4.376.208.529.038**	***TOTAL ASSETS***

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(lanjutan)
31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(PARENT ENTITY)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
(continued)
As of December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	1 Januari 2015/ 31 Desember 2014/ *January 1, 2015/ December 31, 2014*	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha				*Trade payables*
Pihak berelasi	315.302.128.650	-	35.386.460.882	*Related parties*
Pihak ketiga	122.516.601.871	38.701.967.782	-	*Third parties*
Beban akrual dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek	41.803.711.467	89.275.947.348	18.645.857.572	*Accrued expenses and short-term employee benefits liabilities*
Utang pajak	16.011.231.104	126.595.629.368	86.173.681.451	*Taxes payable*
Utang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (“KKPE”)	242.547.956.959	205.831.736.897	478.516.864.969	*Food security and energy credit (“KKPE”) payables*
Utang lain-lain				*Other payables*
Pihak berelasi	29.384.003.594	41.890.459.592	44.712.827.455	*Related parties*
Pihak ketiga	114.820.185.253	70.955.977.222	111.530.384.667	*Third parties*
Pinjaman jangka pendek	163.372.397.219	100.000.000.000	200.000.000.000	*Short-term loans*
Uang muka pelanggan	18.942.682.337	7.075.446.720	364.416.715	*Advance from customers*
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	130.000.000.000	198.000.000.000	186.884.711.847	*Current portion of long-term loans*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	**1.194.700.898.454**	**878.327.164.929**	**1.162.215.205.558**	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON CURRENT LIABILITIES***
Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.200.172.203.285	622.879.342.143	857.825.890.115	*Long-term loans, net of current portion*
Utang obligasi	700.000.000.000	700.000.000.000	700.000.000.000	*Bonds payable*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	715.691.207.491	699.381.712.647	637.388.290.982	*Employee benefits liability*
JUMLAH LIABILITIAS JANGKA PANJANG	**2.615.863.410.776**	**2.022.261.054.790**	**2.195.214.181.097**	***TOTAL NON CURRENT LIABILITIES***
JUMLAH LIABILITIAS	**3.810.564.309.230**	**2.900.588.219.719**	**3.357.429.386.655**	***TOTAL LIABILITIES***

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(lanjutan)
31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(PARENT ENTITY)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
(continued)
As of December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*	31 Desember 2015/ *December 31, 2015*	1 Januari 2015/ 31 Desember 2014/ *January 1, 2015/ December 31, 2014*	
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham				*Share capital*
Nilai nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per saham				*Par value Rp1,000,000 (full amount) per share*
Modal dasar - 7.300.000 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A dan 7.299.999 saham Seri B pada tahun 2016; 3.400.000 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A dan 3.399.999 saham Seri B pada tahun 2015				*Authorized capital - 7,300,000 shares which consist of 1 Series A share and 7,299,999 Series B shares in 2016; 3,400,000 shares which consist of 1 Series A and 3,399,999 Series B in 2015*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.845.596 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A dan 1.845.595 saham Seri B pada tahun 2016; 870.596 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A dan 870.595 saham Seri B pada tahun 2015	1.845.596.000.000	870.596.000.000	870.596.000.000	*Issued and fully paid - 1,845,596 shares which consist of 1 Series A share and 1,845,595 Series B shares in 2016; 870,596 shares which consist of 1 Series A share and 870,595 Series B shares in 2015*
Modal sumbangan	10.061.504.138	10.061.504.138	10.061.504.138	*Donated capital*
Penghasilan komprehensif lainnya	6.754.636.665.712	6.764.852.743.510	(286.118.236.239)	*Other comprehensive income*
Komponen ekuitas lainnya	10.137.116.356	985.137.116.356	10.137.116.356	*Other component of equity*
Saldo laba				*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya	613.102.848.116	547.623.627.605	529.122.521.845	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	(315.491.909.555)	(6.788.406.728)	(115.019.763.717)	*Unappropriated*
JUMLAH EKUITAS	**8.918.042.224.767**	**9.171.482.584.881**	**1.018.779.142.383**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**12.728.606.533.997**	**12.072.070.804.600**	**4.376.208.529.038**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(PARENT ENTITY)
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the year then ended December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2016	2015	
PENJUALAN	1.637.631.702.667	2.029.541.664.395	***REVENUE***
BEBAN POKOK PENJUALAN	(1.538.606.928.098)	(1.521.513.523.132)	***COST OF SALES***
LABA KOTOR	**99.024.774.569**	**508.028.141.263**	***GROSS PROFIT***
Beban umum dan administrasi	(249.148.975.730)	(220.965.101.533)	*General and administrative expenses*
Beban penjualan	(4.907.643.053)	(4.754.846.036)	*Selling expenses*
Pendapatan (beban) lain-lain, neto	(70.265.848.404)	1.336.322.190	*Other operating income (expense), net*
LABA (RUGI) USAHA	**(225.297.692.618)**	**283.644.515.884**	***OPERATING PROFIT (LOSS)***
Pendapatan keuangan	71.461.607.665	3.556.829.723	*Finance income*
Pajak final	(14.292.321.533)	(711.365.945)	*Final tax*
Beban keuangan	(99.171.558.071)	(100.300.519.663)	*Finance expense*
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK	**(267.299.964.557)**	**186.189.459.999**	***PROFIT (LOSS) BEFORE TAX BENEFIT (EXPENSE)***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	77.649.589.931	(54.831.721.247)	***TAX BENEFIT (EXPENSE)***
(RUGI) LABA TAHUN BERJALAN	**(189.650.374.626)**	**131.357.738.752**	***(LOSS) PROFIT FOR THE YEAR***
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Item yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi tahun berikutnya:			***Items that will not be reclassified to profit or loss in subsequent years:***
Surplus revaluasi aset tetap	-	7.089.970.503.561	*Revaluation surplus of fixed assets*
Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	26.537.385.420	(51.999.365.083)	*Re-measurement gain (loss) on employee benefits liability*
Pajak tangguhan terkait	(6.634.346.355)	12.999.841.271	*Deferred tax effect*
Penghasilan komprehensif lain, neto	19.903.039.065	7.050.970.979.749	*Other comprehensive income, net*
TOTAL (RUGI) LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**(169.747.335.561)**	**7.182.328.718.501**	***TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME FOR THE YEAR***

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Tahun yang berakhir pada tanggal
31 desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(PARENT ENTITY)
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
Year ended
December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Authorized issued and fully paid*	Saldo laba (defisit)/ *Retained earnings (deficit)*		Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*	Modal sumbangan/ *Donated capital*	Komponen ekuitas lainnya/ *Other component of equity*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
		Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*					
Saldo 1 Januari 2015/ 31 Desember 2014 (disajikan kembali)	**870.596.000.000**	**529.122.521.845**	**(115.019.763.717)**	**(286.118.236.239)**	**10.061.504.138**	**10.137.116.356**	**1.018.779.142.383**	***Balance as of January 1, 2015/ December 31, 2014 (as restated)***
Laba tahun berjalan	-	-	131.357.738.749	-	-	-	131.357.738.749	*Profit for the year*
Pembayaran dividen tunai	-	-	(4.625.276.000)	-	-	-	(4.625.276.000)	*Cash dividend payment*
Cadangan umum	-	18.501.105.760	(18.501.105.760)	-	-	-	-	*General reserve*
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	-	7.089.970.503.561	-	-	7.089.970.503.561	*Revaluation surplus of fixed assets*
Kerugian pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, neto	-	-	-	(38.999.523.812)	-	-	(38.999.523.812)	*Re-measurement losses on employee benefits liability, net*
Penyertaan modal negara	-	-	-	-	-	975.000.000.000	975.000.000.000	*State capital investment*
Saldo 31 Desember 2015	**870.596.000.000**	**547.623.627.605**	**(6.788.406.728)**	**6.764.852.743.510**	**10.061.504.138**	**985.137.116.356**	**9.171.482.584.881**	***Balance as of December 31, 2015***
Penambahan modal saham	975.000.000.000	-	-	-	-	(975.000.000.000)	-	*Additional share capital*
Rugi tahun berjalan	-	-	(189.650.374.626)	-	-	-	(189.650.374.626)	*Loss for the year*
Pembayaran dividen tunai	-	-	(53.573.907.690)	-	-	-	(53.573.907.690)	*Cash dividend payment*
Cadangan umum	-	65.479.220.511	(65.479.220.511)	-	-	-	-	*General reserve*
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	-	(30.119.116.863)	-	-	(30.119.116.863)	*Revaluation surplus of fixed assets*
Dividen saham dari Entitas Anak	-	-	-	-	-	-	-	*Share dividend from Subsidiaries*
Keuntungan pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja, neto	-	-	-	19.903.039.065	-	-	19.903.039.065	*Re-measurement gain on employee benefits liability, net*
Saldo 31 Desember 2016	**1.845.596.000.000**	**613.102.848.116**	**(315.491.909.555)**	**6.754.636.665.712**	**10.061.504.138**	**10.137.116.356**	**8.918.042.224.767**	***Balance as of December 31, 2016***

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(PARENT ENTITY)
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the year then ended
December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2016	2015	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan	1.940.730.657.905	2.490.259.182.201	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kepada pemasok	(1.919.439.811.867)	(2.450.835.297.026)	*Cash paid to suppliers*
Pembayaran ke Direksi dan karyawan	(674.829.752.416)	(614.574.965.765)	*Cash payments to Directors and employees*
Kas yang digunakan untuk operasi	(653.538.906.378)	(575.151.080.590)	*Cash used for operations*
Penerimaan dari piutang Bone, Camming dan Takalar	163.469.225.735	451.004.040.420	*Proceeds from receivable of Bone, Camming and Takalar*
Pengembalian dari petani tebu rakyat	318.513.551.066	673.132.540.373	*Repayments from sugarcane farmers*
Pembayaran atas operasional Bone, Camming, dan Takalar	(388.920.733.014)	(360.563.097.723)	*Payment for the operational of Bone, Camming and Takalar*
Pembayaran pajak	(217.927.583.826)	(292.026.668.092)	*Tax payment*
Penyaluran ke petani tebu rakyat	(319.014.369.508)	(455.872.767.166)	*Distribution to sugarcane farmers*
Pembayaran bunga atas pinjaman	(192.313.770.223)	(149.976.959.716)	*Interest payment*
Lain-lain	855.200.004.841	1.506.304.557.893	*Others*
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	**(434.532.581.307)**	**796.850.565.399**	***Net cash flows provided by (used in) operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pembelian aset tetap	(295.088.021.107)	(183.830.124.065)	*Purchase of fixed assets*
Penyertaan saham	(7.000.000.000)	(4.300.000.000)	*Investments in shares*
Penerimaan dividen	4.437.870.300	6.198.359.165	*Dividend receipt*
Penempatan pada investasi jangka pendek	(5.000.000.000)	-	*Placement in short-term investment*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**(302.650.150.807)**	**(181.931.764.900)**	***Net cash used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan Penyertaan Modal Negara (PMN)	-	975.000.000.000	*The receipt of state capital*
Penerimaan pinjaman bank	1.499.055.311.583	689.000.000.000	*Proceeds of bank loans*
Penerimaan pinjaman KKPE	573.893.468.892	441.469.584.393	*Proceeds of KKPE payables*
Pembayaran dividen	(53.573.907.690)	(4.625.276.000)	*Dividend payment*
Pembayaran angsuran atas pinjaman bank dan lainnya	(920.182.914.364)	(1.011.866.606.000)	*Installment payments of bank loans and others*
Pembayaran angsuran pinjaman KKPE	(548.676.307.873)	(708.650.486.450)	*Installment payments of KKPE payables*
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	**550.515.650.548**	**380.327.215.943**	***Net cash flows (used in) provided by funding activities***

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
(PARENT ENTITY)
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the year then ended
December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2016	2015	
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS DAN KAS DAN SETARA KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA	**(186.667.081.566)**	**995.246.016.442**	***NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Terdiri dari:			*Consist of:*
Penurunan neto kas dan setara kas	(179.232.862.334)	20.246.016.442	*Net decrease increase in cash and cash equivalents*
(Penurunan) kenaikan neto kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	(7.434.219.232)	975.000.000.000	*Net (decrease) increase in restricted cash and cash equivalents*
KAS DAN SETARA KAS DAN KAS DAN SETARA KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA AWAL TAHUN	**1.357.009.409.315**	**361.763.392.873**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
Terdiri dari:			*Consist of:*
Kas dan setara kas awal tahun	382.009.409.315	361.763.392.873	*Cash and cash equivalents at beginning of year*
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya awal tahun	975.000.000.000	-	*Restricted cash and cash equivalents at beginning of year*
KAS DAN SETARA KAS DAN KAS DAN SETARA KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA AKHIR TAHUN	**1.170.342.327.749**	**1.357.009.409.315**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***
Terdiri dari:			*Consist of:*
Kas dan setara kas akhir tahun	202.776.546.981	382.009.409.315	*Cash and cash equivalents at end of year*
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya akhir tahun	967.565.780.768	975.000.000.000	*Restricted cash and cash equivalents at end of year*
Aktivitas non-kas:			***Non-cash activities:***
Penambahan aset tetap yang diperoleh dari uang muka, utang dan pinjaman	50.954.953.892	18.566.888.499	*Additions to property, plant and equipment through incurrence of advance, payables and loans*

1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk

Laporan keuangan tersendiri Entitas Induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri Entitas Induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi.

Sesuai dengan PSAK No. 4 (Revisi 2013), Entitas Induk mencatat penyertaan pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi dengan menggunakan metode biaya perolehan. Entitas Induk mengakui dividen dari Entitas Anak dan Entitas Asosiasi pada laporan laba rugi dalam laporan keuangan tersendiri ketika hak menerima dividen ditetapkan.

Mata uang fungsional Entitas Induk adalah Rupiah. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan tersendiri adalah mata uang Rupiah. Laporan Keuangan Tersendiri disusun untuk keperluan pelaporan perpajakan Perusahaan.

1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis of preparation of the separate financial statements of the parent entity

The separate financial statements of the Parent Entity are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 4 (Revised 2013), "Separate Financial Statements".

Accounting policies adopted in the preparation of the parent entity separate financial statements are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in Subsidiaries and Association Entities.

In accordance with PSAK No. 4 (Revised 2013), Parent Entity recorded its investment in Subsidiary and Associates using the cost method. Parent Entity recognizes dividends of Subsidiary and Associates in the income statement in the separate financial statements when the right to receive the dividend is set.

Parent Entity's functional currency is Rupiah. Presentation currency used for the preparation of separate financial statements is Rupiah. Separate Financial Statements prepared for Company's tax reporting purposes.

2. INVESTASI SAHAM

Entitas Induk memiliki investasi saham pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi sebagai berikut:

2. INVESTMENTS IN SHARES

The Parent Entity has the following investments in shares in Subsidiaries and Associates as follow:

Nama entitas	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Biaya perolehan 1 Januari 2016/ *Acquisition cost January 1, 2016*	Penambahan (Pengurangan)/ *Additions (Reduction)*	Biaya perolehan 31 Desember 2016/ *Acquisition cost December 31, 2016*	*Entity name*
Entitas Anak					*Subsidiaries*
PT Mitratani Dua Tujuh	65,00%	14.033.000.000	6.500.000.000	20.533.000.000	*PT Mitratani Dua Tujuh*
PT Dasaplast Nusantara	90,00%	40.928.133.660	-	40.928.133.660	*PT Dasaplast Nusantara*
PT Nusantara Medika Utama	99,56%	34.300.000.000	-	34.300.000.000	*PT Nusantara Medika Utama*
PT Energi Agro Nusantara	100,00%	58.597.839.235	7.000.000.000	65.597.839.235	*PT Energi Agro Nusantara*
Entitas Asosiasi					*Associates*
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	7,14%	6.884.000.000	-	6.884.000.000	*PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara*
Perantara Makelar Tembakau Indonesia	24,53%	2.019.371.096	(2.019.371.096)	-	*Perantara Makelar Tembakau Indonesia*
PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN)	6,67%	50.000.000	-	50.000.000	*PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN)*
Jumlah		**156.812.343.991**	**11.480.628.904**	**168.292.972.895**	***Total***
Tambahan investasi saham pada RPN		6.256.600.380	-	6.256.600.380	*Additions of shares investment of RPN*
Jumlah investasi saham		**163.068.944.371**	**11.480.628.904**	**174.549.573.275**	***Total shares investments***

2. INVESTASI SAHAM (lanjutan) / *2. INVESTMENTS IN SHARES (continued)*

Nama entitas	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Biaya perolehan 1 Januari 2015/ *Acquisition cost January 1, 2015*	Penambahan (Pengurangan)/ *Additions (Reduction)*	Biaya perolehan 31 Desember 2015/ *Acquisition cost December 31, 2015*	*Entity name*
Entitas Anak					*Subsidiaries*
PT Mitratani Dua Tujuh	65,00%	14.033.000.000	-	14.033.000.000	*PT Mitratani Dua Tujuh*
PT Dasaplast Nusantara	90,00%	40.928.133.660	-	40.928.133.660	*PT Dasaplast Nusantara*
PT Nusantara Medika Utama	99,56%	30.000.000.000	4.300.000.000	34.300.000.000	*PT Nusantara Medika Utama*
PT Energi Agro Nusantara	100,00%	25.205.156.736	33.392.682.499	58.597.839.235	*PT Energi Agro Nusantara*
Entitas Asosiasi					*Associates*
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	6,67%	6.884.000.000	-	6.884.000.000	*PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara*
Perantara Makelar Tembakau Indonesia	24,53%	2.019.371.096	-	2.019.371.096	*Perantara Makelar Tembakau Indonesia*
PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN)	6,67%	50.000.000	-	50.000.000	*PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN)*
Jumlah		**119.119.661.492**	**37.692.682.499**	**156.812.343.991**	***Total***
Tambahan investasi saham pada RPN		6.256.600.380	-	6.256.600.380	*Additions of shares investment of RPN*
Jumlah investasi saham		**125.376.261.872**	**37.692.682.499**	**163.068.944.371**	***Total shares investments***

3. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI / *3. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Kas dan bank			***Cash in banks***
Bank			*Bank*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	70.501.197.438	157.930.020.697	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	62.051.457.255	41.993.551.120	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	5.214.333.055	4.171.437.846	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.608.594.783	6.954.042.377	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	269.429.471	297.323.230	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk*
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.257.424.318	31.266.390.262	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	12.142.516	12.798.035	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk*
Euro			*Euro*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22.960.575.742	135.796.353.865	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Deposito berjangka			*Time deposits*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	33.675.693.558	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Jumlah kas dan setara kas	**199.550.848.136**	**378.421.917.432**	***Total cash and cash equivalents***

3. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

3. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2016	2015	
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya			***Restricted cash and cash equivalents***
Giro			*Current accounts*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	17.565.780.768	25.000.000.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Deposito berjangka			*Time deposits*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	550.000.000.000	550.000.000.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	400.000.000.000	200.000.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	-	200.000.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk*
Jumlah kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	**967.565.780.768**	**975.000.000.000**	***Total restricted cash and cash equivalent***
Piutang usaha			***Trade receivable***
PT Energi Agro Nusantara	3.396.754.201	13.859.160.621	*PT Energi Agro Nusantara*
Piutang lain-lain			***Other receivables***
PT Energi Agro Nusantara	27.399.170.890	27.989.009.552	*PT Energi Agro Nusantara*
PT Nusantara Medika Utama	12.738.460.789	7.862.994.032	*PT Nusantara Medika Utama*
PT Perkebunan Nusantara XIV	3.069.029.178	2.061.981.955	*PT Perkebunan Nusantara XIV*
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	3.042.546.445	-	*PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)*
PT Mitratani Dua Tujuh	2.600.000.000	-	*PT Mitratani Dua Tujuh*
PT Dasaplast Nusantara	1.899.236.111	-	*PT Dasaplast Nusantara*
PT Perkebunan Nusantara IX	1.850.247.145	1.969.176.776	*PT Perkebunan Nusantara IX*
PT Perkebunan Nusantara II	726.286.833	720.857.235	*PT Perkebunan Nusantara II*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500 juta)	854.752.384	352.055.371	*Others (each below Rp500 million)*
Jumlah piutang lain-lain	**54.179.729.775**	**40.956.074.921**	***Total other receivables***
Uang muka			***Advance payments***
PT Dasaplast Nusantara	3.236.744.000	4.500.119.223	*PT Dasaplast Nusantara*
Beban akrual			***Accrued expense***
PT Nusantara Medika Utama	-	5.099.882.141	*PT Nusantara Medika Utama*
Piutang jangka panjang			***Long-term receivables***
PT Perkebunan Nusantara XIV	1.216.017.167.331	889.417.682.345	*PT Perkebunan Nusantara XIV*
PT Dasaplast Nusantara	8.000.000.000	13.527.495.630	*PT Dasaplast Nusantara*
Jumlah piutang jangka panjang	**1.224.017.167.331**	**902.945.177.975**	***Total long-term receivables***

3. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

3. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

	31 Desember/*December 31,*		
	2016	**2015**	
Utang usaha			***Trade payable***
Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik	311.162.730.750	-	*Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik*
PT Dasaplast Nusantara	4.139.397.900	-	*PT Dasaplast Nusantara*
Jumlah utang usaha	**315.302.128.650**	**-**	***Total trade payable***
Utang lain-lain			***Other payables***
Dana Pensiun Perkebunan	16.727.000.258	31.663.808.552	*Dana Pensiun Perkebunan*
PT Nusantara Medika Utama	6.290.281.696	8.684.551.037	*PT Nusantara Medika Utama*
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	4.187.125.128	-	*Program Kemitraan dan Bina Lingkungan*
Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia	851.437.443	669.474.500	*Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia*
Lembaga Pendidikan Perkebunan Yogyakarta	630.704.967	654.764.967	*Lembaga Pendidikan Perkebunan Yogyakarta*
PT Perkebunan Nusantara XI	568.436.787	152.028.850	*PT Perkebunan Nusantara XI*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500 juta)	129.017.315	65.831.686	*Other (each below Rp500 million)*
Jumlah utang lain-lain	**29.384.003.594**	**41.890.459.592**	***Total other payables***
Pinjaman jangka pendek			***Short-term loan***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	**163.372.397.219**	**-**	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Pinjaman jangka panjang			***Long-term loans***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.274.087.000.000	813.754.691.975	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	50.000.000.000	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Dikurangi:			***Less:***
Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			*Current portion of long-term loans*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	(130.000.000.000)	(198.000.000.000)	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	**1.194.087.000.000**	**615.754.691.975**	***Long-term loans, net of current portion***

ANNUAL REPORT **2016** LAPORAN TAHUNAN

PT Perkebunan Nusantara X

Kantor Pusat
Jl. Jembatan Merah No 3-11,
Surabaya 60175
Jawa Timur, Indonesia
Telp (031) 3523143 (hunting)
email contact@ptpn10.co.id

www.ptpn10.co.id